



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018- 2023;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi , Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490)
11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

15. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
16. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
18. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
21. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

32. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6224);
38. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
39. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
40. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);

42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
43. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
44. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
45. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2014-2019 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2019.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
9. Rencana Strategis PD yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
13. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
14. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.

BAB II
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan Dan Program Pembangunan;
 - g. BAB VII : Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Di Jawa Tengah;
 - h. BAB VIII : Kerangka Pendanaan Pembangunan Dan Program Perangkat Daerah;
 - i. BAB IX : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - j. BAB X : Penutup.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2018.
- (2) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN.

Pasal 5

RPJMD menjadi pedoman bagi:

- a. PD dalam menyusun Renstra-PD dan sebagai acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2018-2023;
- b. Pemerintah Kabupaten/Kota di dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 6

RPJMD dilaksanakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Gubernur melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan;
 - c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PD yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB IV
PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan dalam hal:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 9

RPJMD Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Dalam hal Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang RPJMD belum diundangkan, maka penyusunan RKPD berpedoman pada RPJPD dan mengacu pada RPJMN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Maret 2019
GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 4 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTOSOEDARMO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2019 NOMOR 5
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH: (5-69/2019)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Pada hakikatnya perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMN dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan dalam kurun waktu lima tahun. RPJMN sebagai rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan secara kongkrit, spesifik dan operasional menjadi rencana operasional tahunan.

Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi misi Gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun, serta dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan

daerah, kebijakan umum, program pembangunan daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra-PD dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Sistematika RPJMD merujuk pada ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pemangku kepentingan” adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD, TNI, POLRI, Kejaksaan, Akademisi, representasi Partai Politik, LSM/ORMAS, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota serta desa/kelurahan, pengusaha/investor, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa, dan Kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 110

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2018-2023

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah jangka menengah tergambarkan dalam satu dokumen yaitu dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Periode pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah tahun 2013-2018 telah berakhir. Periode pembangunan daerah Jawa Tengah berikutnya tahun 2018-2023 dimulai sejak dilantikannya Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, S.IP, MIP dan Wakil Gubernur Jawa Tengah H. Taj Yasin Maimoen pada tanggal 5 September 2018. Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkewajiban menyusun dan menetapkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 paling lambat 6 (enam) bulan setelah Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 merupakan tahap pembangunan jangka menengah ketiga dan keempat pada periode RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025, serta merupakan tahap lanjutan dari RPJMD Tahun 2013-2018. Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 adalah "**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi**". Dalam rangka mencapai visi dilakukan upaya yang dijabarkan dalam 4 (empat) misi yaitu: 1) membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI; 2) mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota; 3) memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan 4) menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah juga merupakan satu kesatuan perencanaan pembangunan nasional. Untuk itu RPJMD Provinsi Jawa Tengah juga berpedoman pada RPJMN Tahun 2014-2019 dan memperhatikan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional. Perumusan kebijakan dan program

pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah dalam lima tahun kedepan adalah juga untuk mendukung pada pencapaian target pembangunan nasional.

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah Jawa Tengah, serta menghadapi isu kemiskinan, bonus demografi, dan daya saing ekonomi daerah, maka kebijakan pembangunan lima tahun kedepan akan lebih menempatkan manusia sebagai fokus pembangunan. Sumberdaya manusia tidak saja dipandang sebagai objek pembangunan, namun menempatkannya dalam menentukan arah dan kebijakan pembangunan. Pengembangan sumberdaya manusia dilakukan melalui pemberdayaan (*empowering*), serta peningkatan kemampuan manusia untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimiliki dan menumbuhkan kesadaran diri (*self hood*). Sumberdaya manusia sebagai bagian dari masyarakat akan mampu memandang secara kritis situasi sosial, ekonomi, politik, dan kultural yang melingkupinya. Dengan demikian diharapkan sumberdaya manusia Jawa Tengah akan menjadi sumber dinamika dan motor penggerak pembangunan dalam upaya dalam mewujudkan kemandirian, kemajuan, dan kesejahteraan yang berkelanjutan.

RPJMD Tahun 2018-2023 yang disusun selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
16. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
17. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 24. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 27. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);
 28. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 29. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

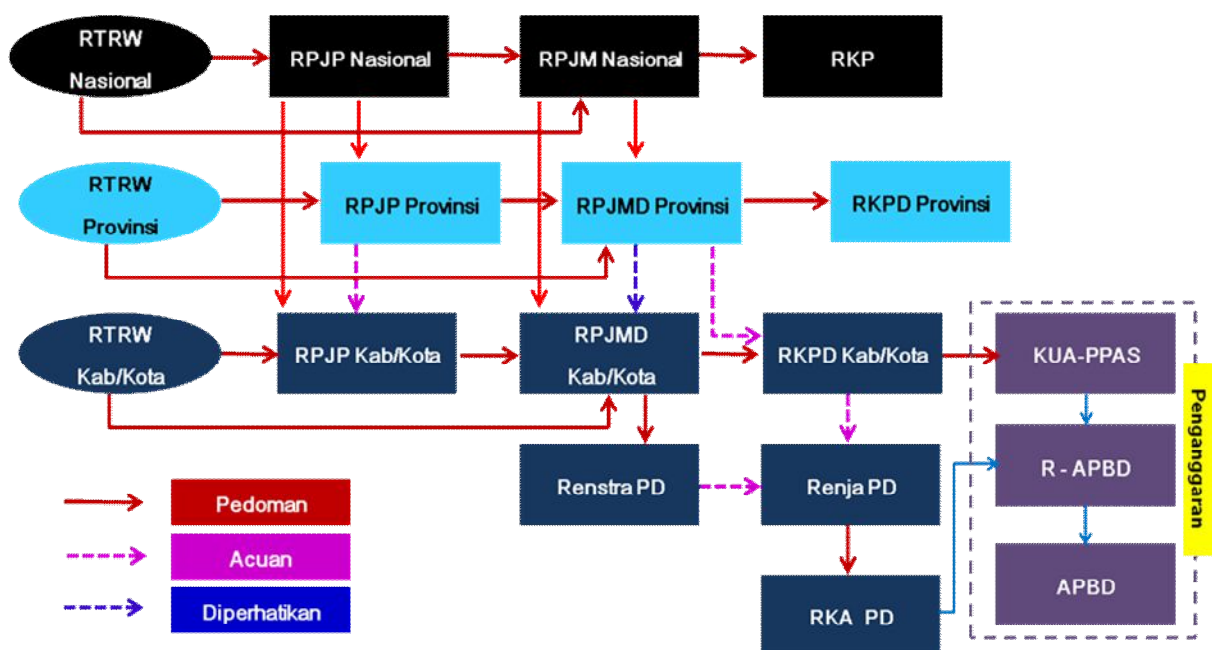
30. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
31. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Tahun 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6224);
34. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
35. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
36. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
42. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 105);

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan strategis dan sektoral lainnya, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota lainnya yang berbatasan. Dokumen RPJMD disusun dengan mempedomani RPJPD dan RPJMN, serta memperhatikan RPJMD Provinsi lainnya yang berbatasan, dan RTRW Provinsi Jawa Tengah. RPJMD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Gambaran keterkaitan RPJMD dengan dokumen lainnya dapat dilihat sebagai berikut.



Gambar 1.1.
Keterkaitan Antar Dokumen Perencanaan

Keselarasan amanat dalam RPJPD Tahun 2005-2025, dan RPJMN Tahun 2015-2019 dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dijabarkan sebagai berikut.

1. RPJMD dengan RPJPD Provinsi Jawa Tengah

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari tahapan pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari visi dan misi pembangunan RPJMD yang mendukung pada visi dan misi pembangunan RPJPD, sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.1.

Keselarasan Dokumen RPJMD Dengan RPJPD

No	RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
VISI		
	Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari	Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi
MISI		
1	Mewujudkan sumber daya manusia dan masyarakat Jawa Tengah yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, sehat, serta berbudaya	Misi 1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI Misi 4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan
2	Mewujudkan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi unggulan daerah dengan dukungan rekayasa teknologi dan berorientasi pada ekonomi kerakyatan	Misi 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
3	Mewujudkan kehidupan politik dan tata pemerintahan yang baik (<i>good governance</i>), demokratis, dan bertanggung jawab, didukung oleh kompetensi dan profesionalitas aparatur, bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta pengembangan jaringan	Misi 2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota
4	Mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang optimal dengan tetap menjaga kelestarian fungsinya dalam menopang kehidupan	Misi 4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan
5	Mewujudkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana yang menunjang pengembangan wilayah, penyediaan pelayanan dasar dan pertumbuhan ekonomi daerah	Misi 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran

No	RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025	RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
6	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman, damai dan bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) didukung dengan kepastian hukum dan penegakan HAM serta kesetaraan dan keadilan gender	Misi1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI Misi 2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota

2. RPJMD dengan RPJMN

RPJMN merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional jangka menengah tahun 2015-2019 yang dipedomani dalam penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Keselarasan RPJMN dan RPJMD adalah pada misi daerah yang mendukung Nawacita sebagaimana tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1.2.

Keselarasn Dokumen RPJMD Dengan RPJMN Tahun 2015-2019

No	RPJMN Tahun 2015-2019	RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023
	VISI	VISI
	Terwujudnya Indonesia Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong	Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi
	MISI	MISI
1	Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan	Misi1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI
2	Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum	Misi 2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota
3	Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim	Misi 2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota
4	Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera	Misi 4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan
5	Mewujudkan bangsa yang berdaya saing	Misi 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran Misi 4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan
6	Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional	Misi 3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran

No	RPJMN Tahun 2015-2019	RPJMD Provinsi Jawa Tengah 2018-2023
7	Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan	Misi 4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan

3. RPJMD dengan Rencana Strategi Perangkat Daerah (Renstra PD)

Renstra PD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 disusun berpedoman pada RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023. Renstra PD merupakan dokumen perencanaan tiap perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah.

4. RPJMD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RKPD merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. RKPD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

5. RPJMD dengan Rencana Pembangunan Sektoral

Selain memiliki korelasi dengan dokumen perencanaan pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah, RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 juga memperhatikan beberapa dokumen rencana pembangunan sektoral di tingkat nasional dan provinsi. Beberapa dokumen rencana tersebut antara lain: 1) Agenda pembangunan *Sustainable Development Goals* (SDG's), 2) Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN PG), 3) Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM), 3) Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), 4) *Grand Design* Reformasi Birokrasi, 5) Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) Provinsi Jawa Tengah, 6) RAD Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah, 7) RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Provinsi Jawa Tengah, 8) RAD Pengurangan Resiko Bencana, 9) Pedoman Pelaksanaan PUG di Jawa Tengah, 10) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, 11) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, dan 12) Aksi Penanganan Konflik Sosial. Dan dalam proses penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023, adalah sebagai berikut.

a. Maksud

Maksud dari penyusunan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah untuk memberikan arah pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 dan sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023.

b. Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menjabarkan visi dan misi ke dalam tujuan, sasaran, dan indikator kinerja pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke depan, sehingga rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan dapat terwujud;
2. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan di Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu 2018-2023;
3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergi, koordinasi, dan sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam satu pola sikap dan tindakan;
4. Mewujudkan keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan;
5. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan daerah sekitar (Pemerintah Kabupaten/Kota), Pemerintah Provinsi berbatasan, dan Pemerintah; serta
6. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 disusun menurut sistematika yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Provinsi Jawa Tengah meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing, sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan.

Bab III Gambaran Keuangan Daerah

Bab ini menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan.

Bab IV Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Pada bab ini menguraikan permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan hasil analisis data pada bab gambaran umum daerah.

Bab V Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Bab ini menjelaskan tentang visi dan misi pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan visi dan misi yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih, yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam lima tahun kedepan, disertai indikator kinerja dan targetnya.

Bab VI Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah

Pada bab ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran, serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih, dan didukung dengan program pembangunan daerah.

Bab VII Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Jawa Tengah

Pada bab ini diuraikan tentang arah kebijakan pengembangan kewilayahan, disertai sasaran pembangunan untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Bab VIII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Bab IX Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Bab ini menjelaskan tentang penetapan indikator kinerja utama (IKU) daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan sebagai indikator kinerja daerah.

Bab X Penutup

Bab ini menguraikan tentang pentingnya RPJMD bagi pembangunan daerah Jawa Tengah lima tahun kedepan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi

Provinsi Jawa Tengah terletak di 5°40' - 8°30' Lintang Selatan dan 108°30' - 111°30' Bujur Timur, dengan luas wilayah sebesar 3.254.412 ha atau 25,04% dari luas Pulau Jawa. Secara administratif, letak wilayahnya berbatasan dengan Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah Selatan; Provinsi Jawa Barat di sebelah Barat; Provinsi Jawa Timur di sebelah Timur, dan Laut Jawa di sebelah Utara. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 29 Kabupaten dan 6 Kota, 573 Kecamatan yang meliputi 7.809 Desa dan 769 Kelurahan. Batas wilayah administrasi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Sumber: Peta dasar Rupa Bumi Indonesia (RBI), BAKOSURTANAL Skala 1:25.000 Edisi Tahun 2000

Gambar 2.1.

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah

2.1.2. Topografi

Kondisi topografi wilayah Jawa Tengah beraneka ragam, meliputi daerah pegunungan dan dataran tinggi yang membujur sejajar dengan panjang pulau Jawa di bagian tengah; dataran rendah yang hampir tersebar di seluruh wilayah; dan pantai yaitu pantai Utara dan Selatan. Kemiringan lahannya bervariasi, meliputi lahan dengan kemiringan 0-2% sebesar 38%; lahan dengan kemiringan 2-15% sebesar 31%; lahan dengan kemiringan 15-40% sebesar 19%; dan lahan dengan kemiringan lebih dari 40% sebesar 12%. Kemiringan lahan dapat menjadi dasar pertimbangan untuk kesesuaian pemanfaatan dan fungsi penggunaan lahan. Peta Topografi dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

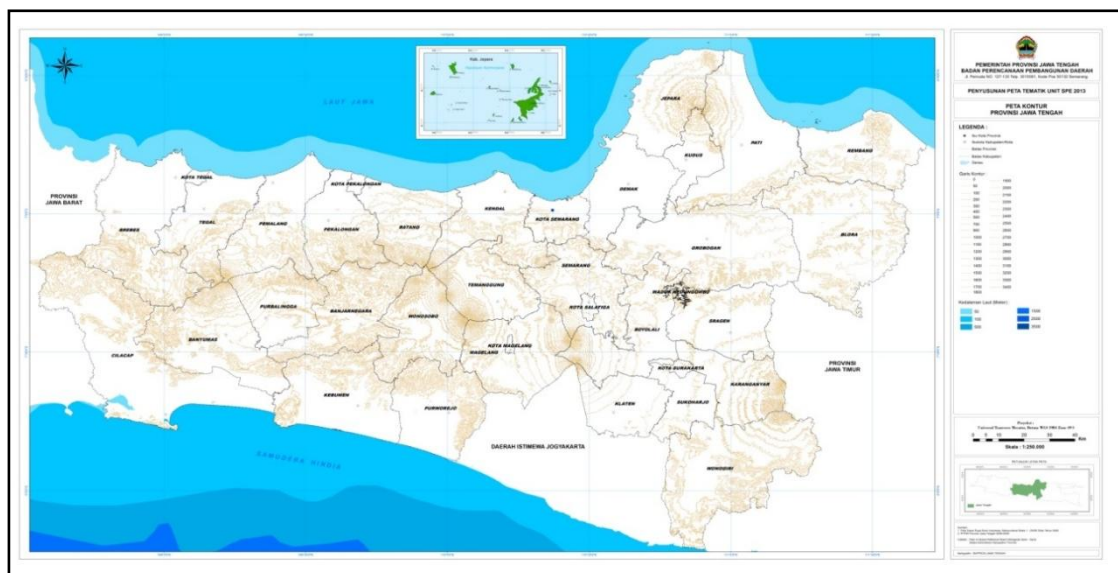
Gambar 2.2.
Peta Topografi Provinsi Jawa Tengah

Wilayah Provinsi Jawa Tengah memiliki ketinggian yang beraneka ragam, yaitu pegunungan dan dataran tinggi yang membujur di bagian tengah dan dataran rendah yang tersebar di hampir seluruh wilayah yang umumnya adalah wilayah pantai. Sekitar 53% wilayah berada pada ketinggian 0-99 mdpl, secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.1, dan Peta Kontur pada Gambar 2.3.

Tabel 2.1.
Ketinggian Wilayah di Jawa Tengah

No	Ketinggian (m dpl)	% Luas
1	0-99	53,3
2	100-499	27,4
3	500-999	14,7
4	>1000	4,6

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029

Gambar 2.3.
Peta Kontur Provinsi Jawa Tengah

2.1.3. Geologi

Kondisi fisiografis Jawa Tengah terbagi menjadi 7 (tujuh) klasifikasi, yaitu Perbukitan Rembang, Zona Randublatung, Pegunungan Kendeng, Pegunungan Selatan Jawa Tengah bagian Timur, Pegunungan Serayu Utara, Pegunungan Serayu Selatan, dan Pegunungan Progo Barat. Jenis tanah yang ada di wilayah Jawa Tengah meliputi *organosol*, *alluvial*, *planosol*, *litosol*, *regosol*, *andosol*, *grumosol*, *mediteran*, *latosol*, *podsolik*, dan didominasi jenis tanah *latosol*, *aluvial*, serta *gromosol*, yang tersebar di seluruh wilayah. Jenis tanah ini merupakan jenis tanah yang tingkat kesuburannya cukup tinggi.

Jumlah gunung di Jawa Tengah relatif banyak, beberapa diantaranya masih aktif sehingga sewaktu-waktu masih mengeluarkan lava/gas beracun. Terdapat 6 (enam) gunung berapi yang aktif di Jawa Tengah, yaitu Gunung Merapi (di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Klaten), Gunung Slamet (di Kabupaten Pemalang, Banyumas, Purbalingga, Tegal, dan Brebes), Gunung Sindoro (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Sumbing (di Kabupaten Temanggung, Wonosobo), Gunung Dieng (di Kabupaten Wonosobo, Banjarnegara, Pekalongan, Batang, dan Kendal) dan Gunung Merbabu (di Kabupaten Semarang, Boyolali dan Magelang). Gunung berapi di sepanjang wilayah Jawa Tengah rata-rata mempunyai tingkat kerentanan terhadap bahaya bencana vulkanik tinggi, sehingga memerlukan pengawasan terus menerus.

2.1.4. Hidrologi

Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Jawa Tengah cukup banyak, 18 DAS diantaranya menjadi DAS Prioritas yaitu DAS Garang (Babon), DAS Serang, DAS Bodri, DAS Cacaban, DAS Juwana, DAS Tuntang, DAS Pemali, DAS Comal, DAS Babakan, DAS Gangsa, DAS Kupang, DAS Serayu, DAS Luk Ulo, DAS Citanduy (Segara Anakan; Jabar, Jateng), DAS Bengawan Solo (Jateng, Jatim, DIY), DAS Bogowonto (Jateng, DIY), DAS Progo (Jateng, DIY), dan DAS Wawar Medono.

Jumlah sungai di wilayah Jawa Tengah cukup banyak dan tersebar hampir di seluruh wilayah Jawa Tengah. Sungai-sungai tersebut antara lain Sungai Serayu, Bengawan Solo, Juwana, Progo, Pemali, Tuntang, Klawing, Lusi, Bogowonto, Kaligung, Kali Comal, Kali Bodri, dan lain-lain. Bengawan Solo merupakan sungai terpanjang di Pulau Jawa, memiliki mata air di Pegunungan Sewu (Kabupaten Wonogiri), mengalir ke utara melintasi Kota Surakarta, dan akhirnya menuju ke Jawa Timur dan bermuara di daerah Gresik (dekat Surabaya). Sungai lainnya yang cukup besar adalah Sungai Serayu, yang melintasi 5 (lima) Kabupaten yaitu Wonosobo, Banjarnegara, Banyumas, Purbalingga, dan Cilacap. Sungai ini berhulu di Kabupaten Wonosobo, dan bermuara di Kabupaten Cilacap, dengan panjang sekitar 181 km, lebar sekitar 12 m di bagian hulu dan 80 m di bagian hilir. Peta daerah aliran sungai dapat dilihat pada Gambar 2.4.



Sumber : Badan Informasi Geospasial, 2013

Gambar 2.4.
Peta Sungai di Wilayah Provinsi Jawa Tengah

Sungai-sungai di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas daerah pengaliran lebih dari 1.000 km² perlu diwaspadai karena daerah pengalirannya cukup luas dengan debit yang cukup besar, sehingga mengakibatkan wilayah di sekitarnya rawan banjir limpasan. Selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2.
Debit Sungai Rata-Rata Harian Luas Daerah Pengaliran Lebih Dari 1.000 km² di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Induk Sungai	Lokasi Desa, Kecamatan, Kabupaten	Luas Daerah Pengaliran (Km ²)	Debit Air (m ³ /detik)									
			2014		2015		2016		2017		2018	
			Terbesar	Terkecil	Terbesar	Terkecil	Terbesar	Terkecil	Terbesar	Terkecil	Terbesar	Terkecil
Sungai Pemali	Pos Brebes, Kec. Brebes, Kab. Brebes	1.111	1.599,09	11,10	817,77	13,87	671,33	43,81	2.650,40	10,10	1.625	20,25
Sungai Bengawan Solo	Pos Jurug, Desa Jebres, Kota Surakarta	3.206,70	4.056,50	7,90	895,68	0,25	4.253,01	0,84	1.095,90	44,11	2.575	15,05
Sungai Serayu	Pos Bd. Gerak Serayu Desa Gambarsari, Kab. Banyumas	3.030	1.157,50	16,60	970,80	16,00	1.152,30	25,80	960,61	10,60	1.060	16,90

Sumber : Dinas Pusdataru Provinsi Jawa Tengah, 2019

2.1.5. Klimatologi

Suhu udara rata-rata di Jawa Tengah tahun 2017 berkisar 26,8°C sampai dengan 28,9°C. Kelembaban udara rata-rata relatif bervariasi berkisar 69,0 persen sampai dengan 86,0 persen. Tahun 2017 tercatat curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu sebesar 484,0 mm dan curah hujan terendah di bulan Agustus sebesar 15 mm. Hari hujan terbanyak juga terjadi

di bulan Oktober sebanyak 23 hari hujan, dan terendah adalah di bulan Agustus sebanyak 1 hari hujan.

2.1.6. Penggunaan Lahan

Provinsi Jawa Tengah memiliki luas 3.254.412 hektar. Sepanjang tahun 2014-2016, terjadi perubahan komposisi penggunaan lahan. Luas lahan sawah bertambah dari 990.652 hektar (30,44%) menjadi 991.524 hektar (30,47%), sementara lahan bukan sawah berkurang dari 2.263.760 hektar (69,56) menjadi 2.262.888 hektar (69,53%). Penambahan luas lahan sawah menunjukkan adanya upaya pengembangan sawah baru serta komitmen menjaga pertanian lahan pangan berkelanjutan (LP2B). Penggunaan lahan di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3.
Penggunaan Lahan di Provinsi Jawa Tengah 2014 – 2016

No	Penggunaan Lahan	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016	
		Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%	Luas (Ha)	%
1	Lahan Sawah	990.652	30,44	991.652	30,47	991.524	30,47
a	Pengairan Teknis	382.643	38,63	383.262	38,65	386.953	39,03
b	Pengairan ½ Teknis	129.630	13,09	133.769	13,49	131.687	13,28
c	Pengairan Sederhana	136.796	13,81	136.635	13,78	140.423	14,16
d	Pengairan Desa/non PU	57.032	5,76	52.596	5,30	57.731	5,82
e	Tadah Hujan	281.919	28,46	282.521	28,49	272.364	27,47
f	Pasang Surut	1.561	0,16	1.613	0,16	1.661	0,17
g	Lebak, Polder, Lainnya	1.071	0,11	1.256	0,13	705	0,07
2	Bukan Lahan Sawah	2.263.760	69,56	2.262.760	69,53	2.262.888	69,53
a	Bangunan/Pekarangan	524.465	16,12	503.923	15,48	537.288	16,51
b	Tegal/Kebun	732.853	22,52	730.370	22,44	723.056	22,22
c	Ladang/Huma	13.346	0,41	13.413	0,41	11.664	0,36
d	Padang Rumput	1.231	0,04	1.184	0,04	1.745	0,05
e	Hutan Rakyat	95.550	2,94	103.402	3,18	103.004	3,17
f	Hutan Negara	568.572	17,47	578.107	17,76	567.449	17,44
g	Perkebunan Negara	71.868	2,21	69.345	2,13	71.337	2,19
h	Rawa	9.027	0,28	9.035	0,28	9.021	0,28
i	Tambak	34.972	1,07	39.810	1,22	37.574	1,15
j	Kolam/Empang	3.719	0,11	8.259	0,25	3.046	0,09
k	Sementara tidak diusahakan	1.772	0,05	1.628	0,05	1.429	0,04
l	Lain-lain	206.385	6,34	204.284	6,28	196.275	6,03
	Jumlah (Ha)	3.254.412	100,00	3.254.412	100,00	3.254.412	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

2.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Wilayah Jawa Tengah memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian daerah, sekaligus potensi wilayah yang harus dipertahankan untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya alamnya. Potensi wilayah tersebut terdiri dari kawasan budidaya dan kawasan lindung, sebagaimana tertuang dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029.

1. Kawasan Budidaya

Berdasarkan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 kawasan budidaya di Jawa Tengah terdiri atas kawasan peruntukan hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata, permukiman, serta pesisir dan pulau-pulau kecil.

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Kawasan peruntukan hutan produksi di Provinsi Jawa Tengah dengan luas 546.290 hektar terbagi ke dalam 20 KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan), dengan fungsi hutan sebagai hutan produksi terbatas seluas ±362.360 hektar, dan hutan produksi tetap seluas ±183.930 hektar. Kawasan hutan produksi terbatas berada di 28 kabupaten (seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Sukoharjo) dan satu kota yaitu Kota Semarang. Sedangkan kawasan hutan produksi tetap berada di 28 kabupaten (seluruh kabupaten kecuali Kabupaten Karanganyar).

b. Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat

Kawasan peruntukan hutan rakyat di Jawa Tengah seluas 345.822,96 hektar (10,63% luas Jawa Tengah), berada di 29 kabupaten dan 5 kota, kecuali Kota Tegal.

c. Kawasan Peruntukan Pertanian

Kawasan peruntukan pertanian di Jawa Tengah meliputi kawasan pertanian lahan basah seluas ±990.652 hektar, dan kawasan pertanian lahan kering seluas ±995.587 hektar, yang diarahkan dikembangkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah. Lahan pertanian basah dan kering tersebut dikelola untuk mendukung program perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Provinsi Jawa Tengah dengan rencana seluas 1.022.570 hektar.

d. Kawasan Peruntukan Perkebunan

Kawasan peruntukan perkebunan di Provinsi Jawa Tengah seluas ±885.344 hektar, terdiri dari perkebunan rakyat seluas 845.668 hektar (96%), PTPN IX seluas 28.212 hektar (3%), dan Perkebunan Besar Swasta/PBS seluas 11.464 hektar (1%).

e. Kawasan Peruntukan Peternakan

Pengembangan kawasan peruntukan peternakan meliputi kawasan peternakan besar, kecil dan kawasan peternakan unggas yang diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

f. Kawasan Peruntukan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan seluas ±24.802 hektar, diarahkan untuk dikembangkan di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, dan difungsikan menjadi lokasi budidaya ikan. Kawasan perikanan tersebut meliputi:

- 1) Kawasan perikanan tangkap, diarahkan pada perairan pantai utara dan pantai selatan, danau, waduk, rawa, sungai dan embung;
- 2) Kawasan perikanan budidaya (air tawar, air payau, air laut), diarahkan di semua kabupaten/kota se-Jawa Tengah.

g. Kawasan Peruntukan Pertambangan

Potensi kawasan peruntukan pertambangan hampir merata di sebagian besar wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Kawasan peruntukan pertambangan, meliputi:

- 1) Kawasan pertambangan mineral logam, bukan logam, batuan, dan batu bara, terletak di kawasan Majenang-Bantarkawung, Serayu-Pantai Selatan, Serayu-Pantai Utara, Gunung Slamet, Sindoro-Sumbing-Dieng, Merapi-Merbabu-Ungaran, Gunung Muria, Pegunungan Kendeng Utara, Kendeng Selatan, dan Gunung Lawu;
- 2) Kawasan pertambangan panas bumi, terletak di 9 (sembilan) lokasi kompleks/kawasan panas bumi yang ada di 15 kabupaten, yaitu Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) panas bumi Dieng, Gunung Telomoyo, Gunung Ungaran, Gunung Lawu, Baturraden, Guci, Banyugaram, Mangunan-Wanayasa, dan Condrodimuka;
- 3) Kawasan pertambangan minyak dan gas bumi, terletak di Wilayah Kerja Migas di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Klaten, Sragen, Karanganyar, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Grobogan, Demak, Semarang, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Salatiga, Pekalongan, Tegal, dan pengembangan sumur tua/marjinal yang tersebar di Kabupaten Blora, Grobogan dan Kendal.

h. Kawasan Peruntukan Industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri skala wilayah diarahkan untuk pengembangan produk-produk unggulan berbasis industri manufaktur. Wilayah industri/kawasan peruntukan industri tersebar di semua kabupaten/kota di Jawa Tengah kecuali Kota Magelang dan Kota Surakarta, sedangkan kawasan berikat berada di Kabupaten Cilacap, Semarang, Kendal dan Kota Semarang.

i. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata, meliputi koridor Borobudur-Prambanan-Surakarta; Borobudur-Dieng; Semarang-Demak-Kudus-Jepara-Pati-Rembang-Blora; Semarang-Ambarawa-Salatiga; Batang-Pekalongan-Pemalang-Tegal-Brebes; Cilacap-Banyumas-Purbalingga-Banjarnegara; dan Cilacap-Kebumen-Purworejo.

j. Kawasan Peruntukan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Jawa Tengah tersebar di seluruh kabupaten/kota, meliputi :

- 1) Kawasan permukiman perdesaan diarahkan pada kawasan-kawasan yang sudah ada dan perluasan areal dengan tetap memperhatikan kelestarian kawasan pertanian yang merupakan peruntukan dominan di perdesaan;
- 2) Kawasan permukiman perkotaan diarahkan pada intensifikasi kawasan-kawasan yang sudah ada melalui upaya pembangunan ke arah vertikal dan perluasan kawasan perkotaan, diikuti upaya pengendalian sehingga tidak mengganggu kawasan peruntukan lainnya terutama sawah di pinggiran kawasan perkotaan.

k. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Jawa Tengah diarahkan pada kawasan pesisir yang terletak di Kabupaten Cilacap, Kebumen,

Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal. Di Jawa Tengah terdapat 33 pulau-pulau kecil dimana 27 (dua puluh tujuh) pulau terletak di Kepulauan Karimunjawa, 2 (dua) pulau di Kabupaten Jepara (Pulau Panjang, dan Pulau Mandalika); 3 (tiga) pulau di Kabupaten Rembang (Pulau Marongan, Gede dan Sualan,); serta Pulau Nusakambangan di Kabupaten Cilacap.

2. Kawasan Lindung

Sesuai RTRW, rencana kawasan lindung di Jawa Tengah tahun 2009–2029 seluas 561.404 hektar (17,4% dari luas wilayah provinsi). Pemanfaatan ruang hutan lindung fisiografis merupakan sub kawasan lindung yang paling besar, sedangkan pemanfaatan ruang yang paling kecil adalah kawasan pantai dan sempadan.

a. Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung yang dikelola oleh negara diarahkan penyebarannya di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal dan Brebes. Untuk kawasan hutan lindung yang dikelola oleh masyarakat terus didorong setidaknya mencapai minimal 10% melalui alih fungsi lahan tidak produktif, yang diarahkan pengembangannya di 29 kabupaten dan 3 kota (Magelang, Salatiga, dan Semarang).

b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan bagi Kawasan Bawahannya

Kawasan yang memberikan perlindungan bagi kawasan bawahannya berbentuk kawasan resapan air. Luas kawasan resapan air di Provinsi Jawa Tengah ditetapkan seluas ±114.822 hektar. Kawasan resapan air tersebar di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

c. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat terdiri dari kawasan sempadan sungai, sempadan pantai, sekitar mata air, dan sekitar danau/waduk/rawa. Luas kawasan perlindungan setempat ditetapkan minimal seluas ±59.918 hektar, meliputi:

- 1) Kawasan sempadan sungai, direncanakan berada pada semua wilayah kabupaten/kota yang dilewati oleh sungai, seluas ±23.583 hektar;
- 2) Kawasan sempadan pantai, direncanakan seluas ±8.786 hektar yang terdiri dari kawasan pesisir pantura dan pansela sejauh 100 meter dari garis pasang tertinggi; dan kawasan pesisir pulau-pulau kecil sejauh 50 meter dari garis pasang tertinggi;
- 3) Kawasan sekitar danau/waduk/rawa, direncanakan seluas ±24.618,2 hektar, yang terdiri dari kawasan sempadan pagar terhadap danau/waduk/rawa sejauh 50 meter dari titik pasang tertinggi

danau/waduk/rawa; dan kawasan sempadan bangunan terhadap danau/waduk/rawa sejauh paling sedikit 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Kawasan waduk tersebar di 15 kabupaten, yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Pati, Semarang, Pemalang, Tegal dan Brebes;

- 4) Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH), dengan pengembangan RTH tersebar di tiap kabupaten/kota, terdiri dari RTH publik dan RTH privat, dengan luas minimal 30% dari kawasan perkotaan. Proporsi RTH publik minimal 20% sedangkan RTH privat 10%.

d. Kawasan Lindung Lainnya

Kawasan lindung lainnya meliputi:

- 1) Daerah perlindungan plasma nutfah, tersebar di 29 kabupaten dan 4 kota, yaitu Kota Magelang, Salatiga, Semarang, dan Tegal;
- 2) Kawasan perlindungan plasma nutfah perairan, tersebar di kabupaten/kota sepanjang pantai utara dan pantai selatan;
- 3) Daerah pengungsian satwa berada di Sronдол Kota Semarang.

e. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya

Kawasan lindung ini terdiri dari cagar alam, suaka marga satwa, suaka alam laut dan perairan, kawasan pantai berhutan bakau, taman wisata alam, serta kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, meliputi:

- 1) Kawasan cagar alam, taman wisata alam, dan suaka marga satwa tersebar di 4 konservasi wilayah, meliputi Pati, Surakarta, Cilacap dan Pemalang, dengan luas yang telah ditetapkan sebesar ±2.923,3 hektar. Sebaran kawasan ini selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut.

Tabel 2.4.

Sebaran Kawasan Cagar Alam, Taman Wisata Alam dan Suaka Margasatwa di Provinsi Jawa Tengah

No	Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Suaka Margasatwa	Lokasi	Luas (Ha)
A	Konservasi Wilayah I Pati		
1	Cagar Alam Keling I a, b, c	Kabupaten Jepara	6,8
2	Cagar Alam Keling II, III	Kabupaten Jepara	61
3	Cagar Alam Kembang	Kabupaten Jepara	1,8
4	Cagar Alam Gunung Celering	Kabupaten Jepara	1328,4
5	Cagar Alam Bekutuk	Kabupaten Blora	25,4
6	Cagar Alam Cabak I/II	Kabupaten Blora	30
7	Cagar Alam Gunung Butak	Kabupaten Rembang	45,1
B	Konservasi Wilayah II Surakarta		
1	Cagar Alam Gebugan	Kabupaten Semarang	1,8
2	Cagar Alam Sepakung	Kabupaten Semarang	10
3	Cagar Alam Donoloyo	Kabupaten Wonogiri	8,3
4	Suaka Margasatwa Gunung Tunggangan	Kabupaten Sragen	103,9
C	Konservasi Wilayah III Cilacap		
1	Cagar Alam Pantodomas	Kabupaten Wonosobo	4,1
2	Cagar Alam Telogo Dringo	Kabupaten Banjarnegara	26,1
3	Cagar Alam Telogo Sumurup	Kabupaten Banjarnegara	20,1

No	Cagar Alam, Taman Wisata Alam, dan Suaka Margasatwa	Lokasi	Luas (Ha)
4	Cagar Alam Pringamba I / II	Kabupaten Banjarnegara	58
5	Cagar Alam Nusakambangan Barat	Kabupaten Cilacap	675
6	Cagar Alam Nusakambangan Timur	Kabupaten Cilacap	277
7	Cagar Alam Wijaya Kusuma	Kabupaten Cilacap	1
8	Cagar Alam Karangbolong	Kabupaten Cilacap	0,5
D.	Konservasi Wilayah IV Pemalang		
1	Cagar Alam Pagerwunung Darupono	Kabupaten Kendal	33,2
2	Cagar Alam Peson Subah I	Kabupaten Batang	10,4
3	Cagar Alam Peson Subah II	Kabupaten Batang	10
4	Cagar Alam Ulolanang Kecubung	Kabupaten Batang	69,7
5	Cagar Alam Bantarbolang	Kabupaten Pemalang	24,5
6	Cagar Alam Curug Bengkawah	Kabupaten Pemalang	1,5
7	Cagar Alam Moga	Kabupaten Pemalang	3,5
8	Cagar Alam Vak 53 Comal	Kabupaten Pemalang	29,1
9	Cagar Alam Guci	Kabupaten Tegal	2
10	Cagar Alam Sub Vak 18c, 19b Jatinegara	Kabupaten Tegal	6,6
11	Cagar Alam Telaga Renjeng	Kabupaten Brebes	48,5
	Jumlah		2.923.3

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2018

- 2) Kawasan Taman Nasional ditetapkan seluas ±12.135 hektar, meliputi: a) Taman Nasional Gunung Merapi seluas ±6.410 hektar berada di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten dan sebagian Sleman (Provinsi DIY); b) Taman Nasional Gunung Merbabu seluas ±5.725 hektar berada di Kabupaten Magelang, Boyolali, dan Semarang; serta c) Taman Nasional Karimunjawa seluas ±111.625 hektar berada di Kepulauan Karimunjawa Kabupaten Jepara;
- 3) Kawasan pelestarian alam berupa taman hutan rakyat dan kebun raya, yaitu kawasan Taman Hutan Raya Jawa Tengah berada di Berjo-Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar seluas ±231,3 hektar, dan Kebun Raya Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas seluas ±150 hektar;
- 4) Pengembangan taman wisata alam dan taman wisata alam laut meliputi: Taman Wisata Alam Gunung Selok di Kabupaten Cilacap; Taman Wisata Alam Tlogo Warno/Pengilon di Kabupaten Wonosobo; Taman Wisata Alam Grojogan Sewu di Kabupaten Karanganyar; Taman Wisata Alam Sumber Semen di Kabupaten Rembang; Taman Wisata Alam Laut Ujung Negro-Roban di Kabupaten Batang;
- 5) Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ditetapkan untuk melindungi 597 benda cagar budaya yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Benda cagar budaya tersebut terdiri dari candi, situs purbakala, benteng kuno, makam kuno, masjid, gereja, klenteng, dan bangunan bersejarah lainnya;
- 6) Daerah pantai berhutan bakau seluas ±10.718,51 hektar tersebar di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Kota Semarang. Kawasan mangrove terluas di pantai selatan berada di

Kabupaten Cilacap (77,99%), sedangkan di pantai utara berada di Kabupaten Demak (9,19%).

2.1.8. Wilayah Rawan Bencana

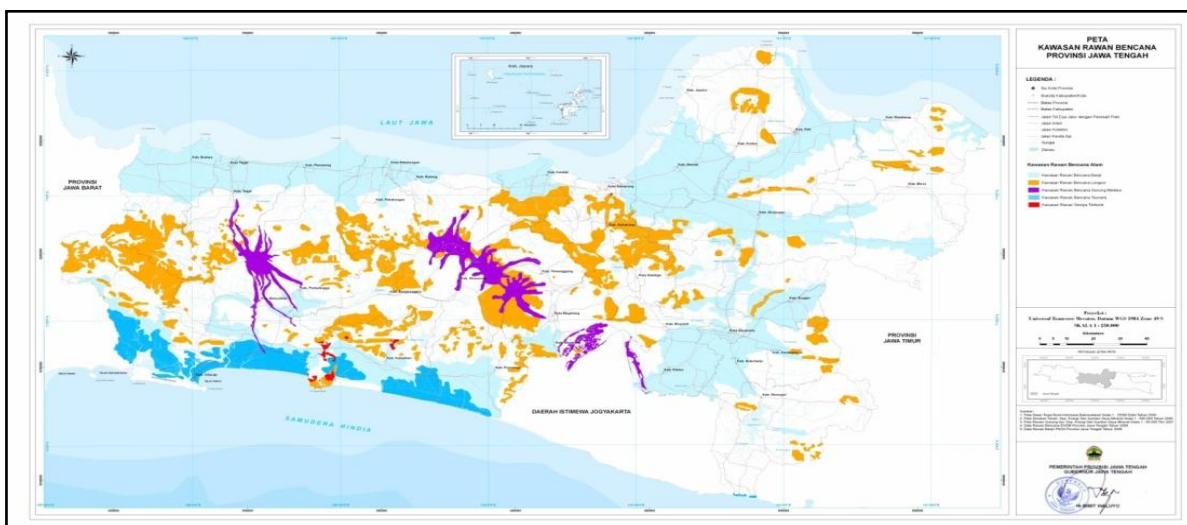
Kondisi geologis, topografis, klimatologis, hidrologis dan letak geografis Provinsi Jawa Tengah menyebabkan terdapat kawasan-kawasan yang berpotensi terdampak peristiwa yang mengancam atau mengganggu kehidupan masyarakat dan berakibat timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, kawasan rawan bencana alam di Jawa Tengah dapat diidentifikasi ke dalam 10 kawasan, yaitu:

1. Kawasan Rawan Banjir, yaitu kawasan yang mengalami genangan akibat curah hujan tinggi, luapan air sungai ataupun rusaknya bendung/ tanggul yang mengancam areal persawahan, jalan, dan permukiman, meliputi Kabupaten Demak, Grobogan, Kendal, Semarang, Pati, Kudus, Brebes, Tegal, Pekalongan, Kebumen, Magelang, Purworejo, Wonogiri, Sukoharjo, Klaten, Sragen, Karanganyar, Cilacap, Banjarnegara, Banyumas, dan Purbalingga;
2. Kawasan Rawan Kekeringan, yaitu kawasan dengan ketersediaan air rendah untuk pertanian dan kebutuhan konsumsi masyarakat, khususnya pada musim kemarau yang diperparah dampak perubahan iklim dan pemanasan global yang mengancam, meliputi Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Boyolali, Sukoharjo, Wonogiri, Sragen, Grobogan, Jepara, Kudus, Blora, Rembang, Pati, Demak, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes;
3. Kawasan Rawan Tanah Longsor, yaitu kawasan yang kondisi permukaan tanahnya mudah bergerak akibat patahan atau pergeseran, kemiringan lereng, jenis/karakter batuan, hujan, kandungan air dalam tanah dan penggunaan lahan, meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, Kebumen, Purworejo, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Kota Semarang;
4. Kawasan Rawan Letusan Gunung Berapi, yaitu kawasan di sekitar puncak gunung berapi yang rawan terhadap bahaya primer berupa lelehan lava, semburan api, luncuran awan panas piroklastik, gas vulkanik beracun, dan bahaya sekunder berupa aliran lahar hujan, banjir bandang, dan longSORan material vulkanik. Bahaya tersebut khususnya mengancam kawasan Gunung Merapi di Kabupaten Magelang, Boyolali, Klaten, Kota Magelang; dan kawasan Gunung Slamet di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Pemalang, Tegal, Brebes, dan Kota Tegal;
5. Kawasan Rawan Gempa Bumi, meliputi kawasan selatan Jawa Tengah dimana relatif lebih dekat dengan zona tumbukan lempeng benua dan terdapat sebaran garis-garis sesar aktif, yaitu di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Klaten, dan Wonogiri. Peristiwa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 berkekuatan 6,3 Skala Richter dan

mengguncang bagian selatan Pulau Jawa, berdampak tidak hanya pada kawasan di lima kabupaten tersebut, namun dampaknya mencapai hingga radius 95 km dari pusat gempa, meliputi Kabupaten Klaten, Sukoharjo, Boyolali, Wonogiri, Purworejo, Magelang, Kebumen, Temanggung, dan Karanganyar;

6. Kawasan Rawan Gelombang Pasang, meliputi wilayah pantai berkemiringan landai di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal;
7. Kawasan Rawan Tsunami, meliputi kawasan Pesisir Pantai Selatan yang berhadapan dengan Samudera Hindia yaitu di Kabupaten Cilacap, Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri. Tsunami terakhir terjadi pada 17 Juli 2006 akibat gempa bawah laut di Samudera Hindia dan menimbulkan jatuhnya korban jiwa, kerusakan sarana prasarana perikanan dan kerusakan lingkungan pantai di Cilacap, Kebumen, dan Purworejo;
8. Kawasan Rawan Abrasi yang mengikis tanah daratan kawasan pesisir pantai utara berakibat pada rusaknya kawasan pertambakan, pelabuhan dan permukiman, tersebar di Kabupaten Rembang, Pati, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, Brebes, Kota Semarang, Kota Pekalongan, dan Kota Tegal;
9. Kawasan Rawan Angin Topan dimana angin dengan kecepatan dan daya rusak tinggi melintasi daratan yang seringkali terjadi di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, Wonosobo, Magelang, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Blora, Pati, Kudus, Jepara, Demak, Kota Semarang, dan Kota Pekalongan;
10. Kawasan Rawan Gas Beracun, meliputi wilayah di sekitar kawah Sinila, Timbang, Sikendang, Sibanteng, dan Sileri kawasan Pegunungan Dieng, mengancam areal permukiman dan pertanian desa-desa sekitarnya yang terdapat di wilayah perbatasan Kabupaten Banjarnegara, dan Wonosobo.

Kawasan rawan bencana di Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.5 berikut.



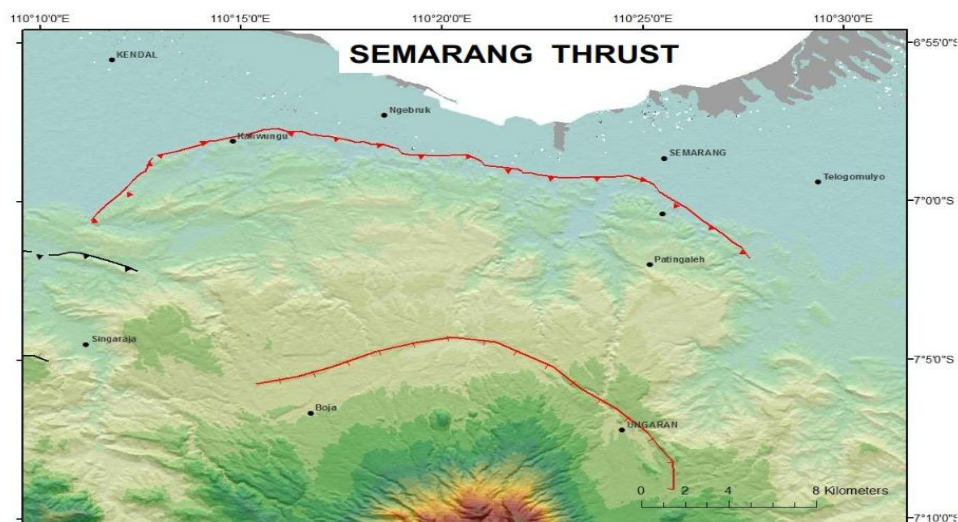
Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029

Gambar 2.5.
Peta Kawasan Rawan Bencana Alam di Provinsi Jawa Tengah

Khusus untuk wilayah Semarang dan sekitarnya, jenis bencana yang juga perlu menjadi perhatian adalah bencana gempa bumi. Hal tersebut dikarenakan terdapat jalur sesar aktif di wilayah Semarang yaitu sesar Ambarawa, Ungaran dan Semarang. Sesar tersebut aktif yang terbukti dari catatan sejarah gempa yang pernah terjadi yaitu:

1. Gempa Semarang dan Ungaran pada 19 Februari 1856, dan cukup kuat mengguncang Semarang, Ungaran, dan sekitarnya;
2. Gempa Banyubiru, Ambarawa, dan Ungaran pada 17 Juli 1865, dan gempa ini menyebabkan rumah tembok retak;
3. Gempa Semarang, Ungaran, dan Ambarawa pada 22 Oktober 1865 pukul 9.16 WIB, berlanjut pada keesokan harinya pada 23 Oktober 1865 pukul 2.45 dengan guncangan gempa yang diikuti oleh gemuruh;
4. Gempa Ungaran dan Ambarawa pada 22 April 1866 yang menyebabkan kerusakan bangunan rumah tembok;
5. Gempa Salatiga, Ambarawa dan Ungaran pada 10 Oktober 1872, dan guncangan gempa ini menyebabkan kerusakan bangunan rumah tembok.

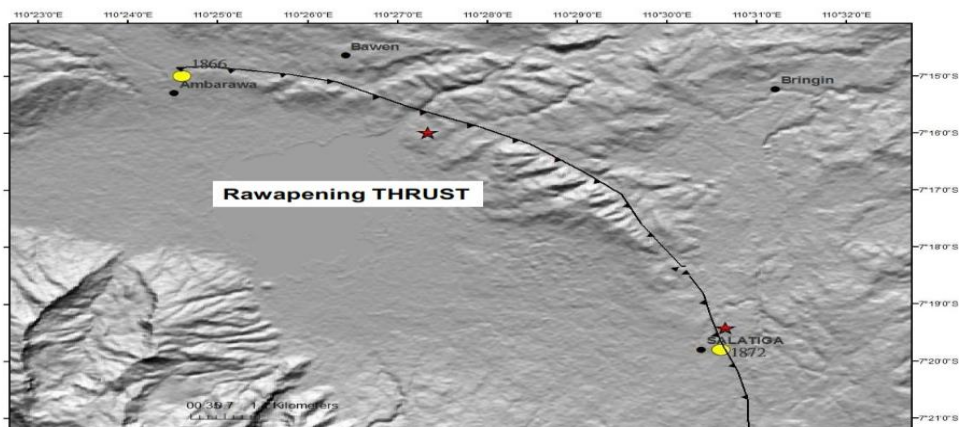
Jalur sesar atau jalur patahan tersebut juga membentuk lereng atau tebing curam yang biasanya juga rawan longsor. Dalam gambar berikut, terlihat gambar lengkung merah yang merupakan patahan aktif dan melintasi Semarang, Ungaran dan sekitarnya.



Sumber: BMKG, 2019

Gambar 2.6.
Struktur Sesar Semarang dan Ungaran

Selain itu, Rawa Pening Ambarawa juga terbentuk karena patahan atau sesar yang disebut Sesar Rawapening, dengan lintasan jalurnya melalui Kota Ambarawa dan Salatiga. Dalam gambar berikut terlihat lengkung hitam yang merupakan patahan naik di tepi Rawa Pening.



Sumber: BMKG, 2019

Gambar 2.7.
Patahan Naik Rawa Pening Ambawara

Sebagai bagian dari Indonesia yang rawan bencana, wilayah Jawa Tengah juga memiliki risiko bencana alam yang cukup tinggi seperti banjir, tsunami, abrasi, dan longsor. Kondisi tersebut dapat diketahui berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia Tahun 2013 yang menunjukkan bahwa wilayah Provinsi Jawa Tengah termasuk dalam kelas risiko bencana tinggi dengan skor 158 dan menempati urutan/rangking 13 di tingkat nasional. Terdapat 22 kabupaten/kota di wilayah Jawa Tengah yang masuk kategori risiko bencana tinggi, dan 13 kabupaten/kota termasuk kategori risiko bencana sedang, dengan skor risiko tertinggi adalah Kabupaten Cilacap, dan Purworejo.

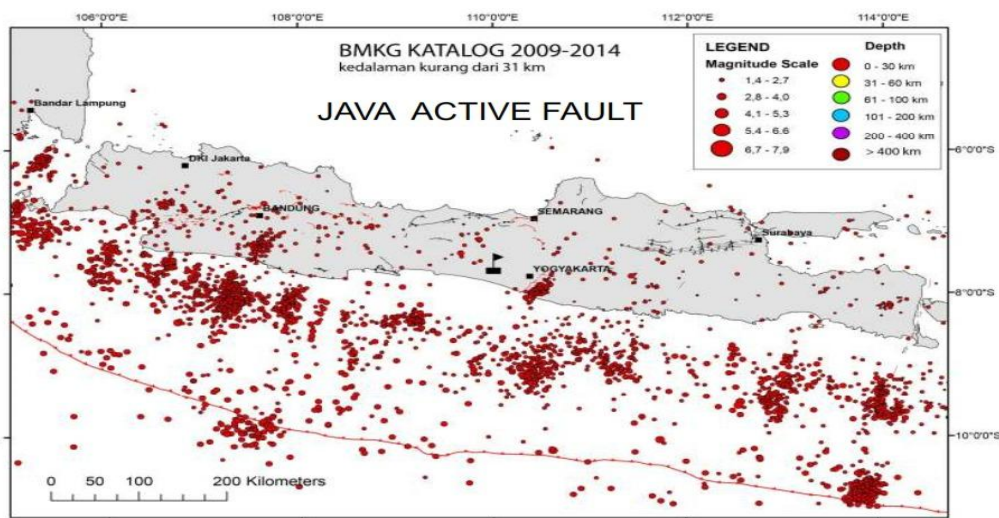
Tingkat kerawanan bencana di Jawa Tengah tersebut dapat diindikasikan dengan meningkatnya frekuensi kejadian bencana alam di Jawa Tengah, terutama kejadian bencana tanah longsor, angin topan dan kebakaran yang menimbulkan dampak serta kerugian cukup besar di semua sektor. Frekuensi kejadian bencana di Jawa Tengah dapat dilihat dalam Tabel 2.5 berikut.

Tabel 2.5.
Frekuensi Kejadian Bencana di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 – 2018

No	Jenis Bencana	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Angin Topan	197	308	419	490	407
2	Banjir	136	176	298	270	171
3	Gas Beracun	1	1	-	-	-
4	Gempa Bumi	13	3	-	3	3
5	Kebakaran	338	572	468	600	589
6	Kekeringan	-	23	-	-	30
7	Letusan Gn. Api	-	-	-	1	5
8	Tanah Longsor	219	491	927	1.091	555
9	Tsunami	-	-	-	-	-
10	Gelombang Pasang	-	-	-	-	-
11	Lainnya	-	-	-	-	-
Jumlah		812	904	1.574	2.304	1.760

Sumber: Sekretariat BPBD Provinsi Jateng, 2019

Dalam gambar berikut, dapat dilihat kejadian bencana yang pernah terjadi di Pulau Jawa, termasuk yang pernah tercatat terjadi di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2009-2014.



Sumber: BMKG, 2019

Gambar 2.8.
Kejadian Gempa Bumi di Pulau Jawa Tahun 2009-2014

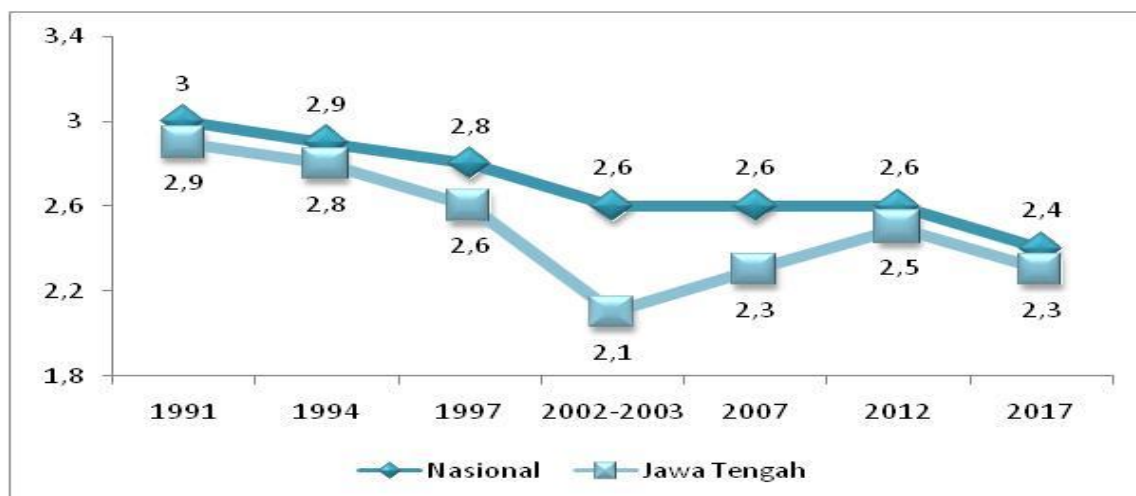
2.1.9. Kondisi Demografi

Penduduk merupakan potensi sumber daya manusia untuk menghasilkan barang dan jasa, tetapi penduduk juga membutuhkan barang-barang konsumsi untuk menunjang kehidupannya. Jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tidak terkendali, dan persebaran penduduk yang tidak seimbang ditambah dengan daya dukung alam dan lingkungan yang terbatas, akan menimbulkan masalah dan beban bagi negara/daerah. Kuantitas dan kualitas sumber daya alam akan mengalami penurunan yang cepat jika angka pertumbuhan penduduk terus meningkat. Oleh karena itu harus dilakukan pengendalian jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu fertilitas (tingkat kelahiran), mortalitas (tingkat kematian) dan migrasi (perpindahan).

Jumlah penduduk Jawa Tengah tahun 2017 (Susenas 2017) adalah sebesar 34,20 juta jiwa atau sedikit berbeda dengan proyeksi jumlah penduduk tahun 2017 hasil sensus penduduk 2010 yang sebesar 34,25 juta jiwa. Jumlah penduduk Jawa Tengah mengalami peningkatan sebesar 0,71 juta jiwa jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2016 yang mencapai 33,96 juta jiwa. Secara nasional, Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar ketiga setelah Jawa Barat (48,04 juta jiwa) dan Jawa Timur (39,29 juta jiwa).

Perkembangan jumlah penduduk Jawa Tengah relatif terkendali, hal ini terlihat dari kondisi tingkat kelahiran. Gambaran tingkat kelahiran di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari Angka Fertilitas Total (*Total Fertility Rate/TFR*) yang didefinisikan sebagai jumlah kelahiran hidup laki-laki dan perempuan tiap 1.000 penduduk yang hidup hingga akhir masa reproduksinya. Tahun 2017 angka TFR Jawa Tengah sebesar 2,3, menurun dibandingkan angka

tahun 2012 yang tercatat sebesar 2,5. Angka TFR Jawa Tengah juga lebih rendah jika dibanding dengan nasional yang sebesar 2,4.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.9.
Perkembangan TFR Jawa Tengah dan Nasional

Apabila dilihat dari persebarannya, Kabupaten Brebes merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Jawa Tengah, yakni sebanyak 1.802.829 jiwa atau 5,22% dari total penduduk Jawa Tengah. Sedangkan Kota Magelang merupakan daerah dengan jumlah penduduk paling sedikit sebanyak 121.872 jiwa atau 0,35%.

Kepadatan penduduk Jawa Tengah tahun 2018 tercatat sebesar 1.060 jiwa/km² meningkat dibandingkan tahun 2017 yang tercatat sebesar 1.051 jiwa/km². Sebaran kepadatan penduduk di kabupaten/kota menunjukkan bahwa Kota Surakarta merupakan kota dengan kepadatan penduduk tertinggi di Jawa Tengah sebesar 11.770 jiwa/km², diikuti oleh Kota Tegal dan Kota Pekalongan dengan masing-masing kepadatan penduduk sekitar 7.324 jiwa/km² dan 6.766 jiwa/km². Sementara kepadatan penduduk terendah berada di Kabupaten Blora (481 jiwa/km²), Kabupaten Wonogiri (525 jiwa/km²), dan Kabupaten Rembang (625 jiwa/km²). Hal ini menunjukkan bahwa wilayah kota rata-rata memiliki kepadatan penduduk lebih besar dibandingkan wilayah kabupaten.

Tabel 2.6.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk			
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Kepadatan Penduduk
1	Kab. Cilacap	2.139	861.266	858.238	1.719.504	804
2	Kab. Banyumas	1.328	838.798	840.326	1.679.124	1.264
3	Kab. Purbalingga	778	456.972	468.221	925.193	1.189
4	Kab. Banjarnegara	1.070	459.903	458.316	918.219	858
5	Kab. Kebumen	1.283	595.003	600.089	1.195.092	931
6	Kab. Purworejo	1.035	353.298	363.179	716.477	692
7	Kab. Wonosobo	985	399.115	388.269	787.384	799
8	Kab. Magelang	1.086	641.992	637.633	1.279.625	1.178

No	Kabupaten/ Kota	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk			
			Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Kepadatan Penduduk
9	Kab. Boyolali	1.015	482.309	497.490	979.799	965
10	Kab. Klaten	656	574.824	596.587	1.171.411	1.786
11	Kab. Sukoharjo	467	438.527	446.678	885.205	1.896
12	Kab. Wonogiri	1.822	465.124	491.982	957.106	525
13	Kab. Karanganyar	772	434.726	444.352	879.078	1.139
14	Kab. Sragen	946	434.976	452.913	887.889	939
15	Kab. Grobogan	1.976	678.296	693.314	1.371.610	694
16	Kab. Blora	1.794	424.189	437.921	862.110	481
17	Kab. Rembang	1.014	315.689	317.895	633.584	625
18	Kab. Pati	1.491	607.002	646.297	1.253.299	841
19	Kab. Kudus	425	423.985	437.445	861.430	2.027
20	Kab. Jepara	1.004	618.422	622.178	1.240.600	1.236
21	Kab. Demak	897	570.481	581.315	1.151.796	1.284
22	Kab. Semarang	947	511.202	529.427	1.040.629	1.099
23	Kab. Temanggung	870	383.704	381.890	765.594	880
24	Kab. Kendal	1.002	488.618	475.488	964.106	962
25	Kab. Batang	789	380.574	381.803	762.377	966
26	Kab. Pekalongan	836	443.009	448.883	891.892	1.067
27	Kab. Pemalang	1.012	643.219	656.505	1.299.724	1.284
28	Kab. Tegal	880	714.305	722.920	1.437.225	1.633
29	Kab. Brebes	1.658	905.683	897.146	1.802.829	1.087
30	Kota Magelang	18	60.005	61.867	121.872	6.771
31	Kota Surakarta	44	251.772	266.115	517.887	11.770
32	Kota Salatiga	53	93.718	97.853	191.571	3.615
33	Kota Semarang	374	875.575	910.539	1.786.114	4.776
34	Kota Pekalongan	45	152.202	152.275	304.477	6.766
35	Kota Tegal	34	123.323	125.680	249.003	7.324
Jawa Tengah		32.544	17.101.806	17.389.029	34.490.835	1.060

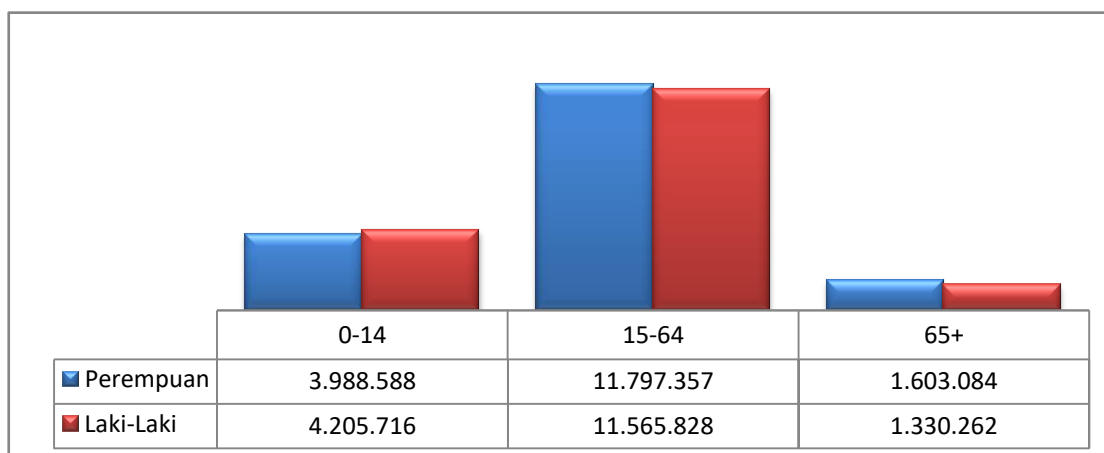
Sumber: BPS Jawa Tengah, 2018

Sementara itu, rasio jenis kelamin penduduk penduduk Jawa Tengah tahun 2018 sebesar 98,35. Angka ini menunjukkan perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan dimana persentase penduduk perempuan sebesar 50,42%, sedikit lebih banyak dibanding persentase penduduk laki-laki sekitar 49,58%.

Apabila dilihat dari jumlah penduduk menurut kelompok umur tahun 2018 diketahui bahwa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih banyak dibandingkan usia non produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun), dengan komposisi 23,36 juta jiwa penduduk usia produktif (67,73%) dan 11,12 juta jiwa penduduk usia non produktif (32,27%). Sehingga angka rasio ketergantungan di Jawa Tengah tahun 2018 sebesar 47,63 yang artinya bahwa setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 47 orang penduduk usia tidak produktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Jawa Tengah telah mengalami bonus demografi, dimana jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif.

Dilihat dari komposisi penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin maka diketahui bahwa penduduk usia produktif di Jawa Tengah lebih

banyak perempuan dibandingkan laki-laki yaitu 11,79 juta jiwa penduduk perempuan, dan 11,56 juta jiwa penduduk laki-laki. Demikian juga untuk kelompok usia 65+ tahun menunjukkan komposisi penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan penduduk laki-laki yaitu 1,6 juta jiwa penduduk perempuan dan 1,33 juta jiwa penduduk laki-laki. Sementara untuk kelompok umur 0-14 tahun, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan, yaitu 3,98 juta jiwa penduduk perempuan dan 4,2 juta jiwa penduduk laki-laki.



Sumber: BPS Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.10.
Jumlah Penduduk Jawa Tengah Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2018 (Orang)

Dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah, sebanyak 7 kabupaten memiliki rasio jenis kelamin lebih dari 100 yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan yaitu Kabupaten Cilacap, Banjarnegara, Wonosobo, Magelang, Temanggung, Kendal, dan Brebes. Sementara itu dilihat dari rasio ketergantungan di kabupaten/kota menunjukkan bahwa rata-rata kabupaten memiliki rasio ketergantungan lebih besar dibandingkan dengan kota. Kabupaten Kebumen, Purworejo, dan Purbalingga adalah tiga kabupaten dengan rasio ketergantungan tertinggi di Jawa Tengah, sementara Kota Semarang, Surakarta, dan Salatiga memiliki rasio ketergantungan yang paling rendah di Jawa Tengah. Kondisi ini menggambarkan bahwa penduduk usia produktif rata-rata kabupaten di Jawa Tengah lebih banyak menanggung usia non produktifnya jika dibandingkan dengan kota.

Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin, Rasio Ketergantungan, Dan Rasio Jenis Kelamin Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 (Orang)

Kabupaten/ Kota	0-14			15-64			65+			Total			Rasio Ketergantungan	Rasio Jenis Kelamin
	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan		
Kab. Cilacap	439.514	225.614	213.900	1.134.293	565.426	568.867	145.697	70.226	75.471	1.719.504	861.266	858.238	51,59	100,35
Kab. Banyumas	402.855	207.471	195.384	1.121.167	557.111	564.056	155.102	74.216	80.886	1.679.124	838.798	840.326	49,77	99,82
Kab.Purbalingga	233.718	119.550	114.168	608.207	297.116	311.091	83.268	40.306	42.962	925.193	456.972	468.221	52,12	97,60
Kab.Banjarnegara	225.430	115.191	110.239	614.535	306.232	308.303	78.254	38.480	39.774	918.219	459.903	458.316	49,42	100,35
Kab. Kebumen	301.800	155.756	146.044	766.543	379.156	387.387	126.749	60.091	66.658	1.195.092	595.003	600.089	55,91	99,15
Kab. Purworejo	162.323	83.473	78.850	464.658	228.182	236.476	89.496	41.643	47.853	716.477	353.298	363.179	54,19	97,28
Kab. Wonosobo	199.958	102.231	97.727	520.604	263.149	257.455	66.822	33.735	33.087	787.384	399.115	388.269	51,24	102,79
Kab. Magelang	299.668	153.263	146.405	860.974	432.168	428.806	118.983	56.561	62.422	1.279.625	641.992	637.633	48,63	100,68
Kab. Boyolali	225.147	115.765	109.382	648.250	318.603	329.647	106.402	47.941	58.461	979.799	482.309	497.490	51,15	96,95
Kab. Klaten	249.429	128.629	120.800	787.865	385.895	401.970	134.117	60.300	73.817	1.171.411	574.824	596.587	48,68	96,35
Kab. Sukoharjo	194.045	99.440	94.605	613.127	302.327	310.800	78.033	36.760	41.273	885.205	438.527	446.678	44,38	98,18
Kab. Wonogiri	188.460	97.000	91.460	631.814	306.757	325.057	136.832	61.367	75.465	957.106	465.124	491.982	51,49	94,54
Kab. Karanganyar	199.746	102.459	97.287	598.619	296.130	302.489	80.713	36.137	44.576	879.078	434.726	444.352	46,85	97,83
Kab. Sragen	196.444	101.074	95.370	596.887	291.936	304.951	94.558	41.966	52.592	887.889	434.976	452.913	48,75	96,04
Kab. Grobogan	328.516	168.005	160.511	925.501	458.412	467.089	117.593	51.879	65.714	1.371.610	678.296	693.314	48,20	97,83
Kab. Blora	190.480	98.011	92.469	587.130	289.737	297.393	84.500	36.441	48.059	862.110	424.189	437.921	46,83	96,86
Kab. Rembang	139.465	72.128	67.337	444.600	222.533	222.067	49.519	21.028	28.491	633.584	315.689	317.895	42,51	99,31
Kab. Pati	275.920	141.534	134.386	860.600	415.205	445.395	116.779	50.263	66.516	1.253.299	607.002	646.297	45,63	93,92
Kab. Kudus	198.173	101.578	96.595	611.086	300.423	310.663	52.171	21.984	30.187	861.430	423.985	437.445	40,97	96,92
Kab. Jepara	309.821	158.756	151.065	844.312	421.340	422.972	86.467	38.326	48.141	1.240.600	618.422	622.178	46,94	99,40

Kabupaten/ Kota	0-14			15-64			65+			Total			Rasio Keterangan tungan	Rasio Jenis Kelamin
	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan		
Kab. Demak	293.200	150.459	142.741	788.897	389.994	398.903	69.699	30.028	39.671	1.151.796	570.481	581.315	46,00	98,14
Kab. Semarang	234.692	120.668	114.024	715.383	349.667	365.716	90.554	40.867	49.687	1.040.629	511.202	529.427	45,46	96,56
Kab. Temanggung	175.530	89.781	85.749	522.540	261.984	260.556	67.524	31.939	35.585	765.594	383.704	381.890	46,51	100,48
Kab. Kendal	228.154	116.825	111.329	663.215	339.160	324.055	72.737	32.633	40.104	964.106	488.618	475.488	45,37	102,76
Kab. Batang	182.967	93.482	89.485	525.690	262.816	262.874	53.720	24.276	29.444	762.377	380.574	381.803	45,02	99,68
Kab. Pekalongan	235.920	120.884	115.036	596.725	296.542	300.183	59.247	25.583	33.664	891.892	443.009	448.883	49,46	98,69
Kab. Pemasang	344.703	176.921	167.782	859.071	423.493	435.578	95.950	42.805	53.145	1.299.724	643.219	656.505	51,29	97,98
Kab. Tegal	382.937	197.235	185.702	953.218	473.615	479.603	101.070	43.455	57.615	1.437.225	714.305	722.920	50,78	98,81
Kab. Brebes	465.312	238.990	226.322	1.208.432	609.990	598.442	129.085	56.703	72.382	1.802.829	905.683	897.146	49,19	100,95
Kota Magelang	25.222	12.941	12.281	86.130	42.549	43.581	10.520	4.515	6.005	121.872	60.005	61.867	41,50	96,99
Kota Surakarta	104.762	53.536	51.226	375.931	182.490	193.441	37.194	15.746	21.448	517.887	251.772	266.115	37,76	94,61
Kota Salatiga	40.573	20.809	19.764	136.377	66.609	69.768	14.621	6.300	8.321	191.571	93.718	97.853	40,47	95,77
Kota Semarang	384.698	196.987	187.711	1.302.887	635.595	667.292	98.529	42.993	55.536	1.786.114	875.575	910.539	37,09	96,16
Kota Pekalongan	74.893	38.509	36.384	213.702	107.164	106.538	15.882	6.529	9.353	304.477	152.202	152.275	42,48	99,95
Kota Tegal	59.829	30.761	29.068	174.215	86.322	87.893	14.959	6.240	8.719	249.003	123.323	125.680	42,93	98,12

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Bonus demografi di Jawa Tengah mempunyai waktu peluang relatif lebih pendek dibanding dengan tingkat nasional maupun provinsi lain di Pulau Jawa, khususnya DKI, DIY, Jawa Timur dan Banten. Angka rasio ketergantungan di Jawa Tengah telah mencapai di bawah 50, sejak tahun 2015 yaitu sebesar 48,1 dan diproyeksikan akan terus menurun sampai dengan tahun 2020, dan kembali akan meningkat mulai tahun 2025. Sampai dengan tahun 2030, rasio ketergantungan Jawa Tengah diproyeksikan akan meningkat menuju angka 50. Artinya peluang bonus demografi Jawa Tengah diproyeksikan hanya terjadi sampai dengan tahun 2030. Hal ini memerlukan arah kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang tepat, antara lain menyiapkan kualitas sumber daya manusia yang akan masuk ke angkatan kerja, menjaga penurunan fertilitas, menyiapkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, kebijakan ekonomi dalam menciptakan lapangan kerja, fleksibilitas pasar tenaga kerja, serta strategi *link and match* antara kebutuhan pasar tenaga kerja.

Sebagai langkah antisipasi menghadapi bonus demografi di Jawa Tengah telah disusun *Grand Design* Bonus Demografi Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2018-2038, dimana di dalamnya berisi serangkaian arah kebijakan antara lain menyangkut pengendalian kuantitas penduduk yang diarahkan untuk mengelola dan mempertahankan pertumbuhan penduduk melalui pengendalian kelahiran dengan cara mengoptimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana (KB). Di samping itu, yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas penduduk yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan secara umum dan pendidikan serta kesempatan kerja/berusaha. Dalam rangka peningkatan kualitas penduduk, dari sisi pelayanan kesehatan perlu diupayakan peningkatan derajat kesehatan untuk menurunkan angka kematian terutama ibu dan anak serta meningkatkan usia harapan. Sementara dari sisi pendidikan, perlu diupayakan peningkatan kompetensi dan daya saing penduduk melalui pendidikan formal, non formal dan informal tanpa mengesampingkan masalah kesetaraan gender. Sedangkan dari sisi kesempatan kerja/berusaha perlu diupayakan penyediaan lapangan pekerjaan yang layak atau kemudahan berwirausaha. Melalui pekerjaan yang layak memberi peluang keluarga untuk meningkatkan penghasilannya sehingga terbebas dari kemiskinan dan mengurangi kesenjangan ekonomi.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Selama rentang waktu lima tahun, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif stabil pada kisaran 5,2% - 5,4%, bahkan selalu lebih baik dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2018 sebesar 5,32% meningkat dibandingkan tahun 2017 (5,26%), dan lebih baik dibandingkan nasional (5,17%).



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.11.

Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014-2018 (%)

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2014-2018 didukung dengan pertumbuhan positif seluruh lapangan usaha, dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi adalah informasi dan komunikasi, diikuti jasa perusahaan, dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pertumbuhan tiap lapangan usaha di Jawa Tengah selama tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8.

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 (%)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	-0,95	5,60	2,20	1,66	2,63
Pertambangan dan Penggalian	6,66	4,57	18,98	5,19	2,45
Industri Pengolahan	6,61	4,71	4,10	4,33	4,35
Pengadaan Listrik dan Gas	6,50	2,43	4,57	5,22	5,36
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,45	1,63	2,17	6,51	4,88
Konstruksi	4,38	6,00	6,52	7,13	6,07
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,79	4,09	5,67	6,01	5,70
Transportasi dan Pergudangan	9,26	7,69	4,91	6,30	7,55
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,61	6,79	6,26	6,45	8,17
Informasi dan Komunikasi	13,00	9,53	8,31	13,27	12,39
Jasa Keuangan dan Asuransi	4,12	7,61	8,77	5,17	3,58
Real Estate	7,19	7,59	6,81	6,48	5,58
Jasa Perusahaan	7,97	8,49	10,62	8,72	9,48
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,78	5,31	2,37	2,57	4,43
Jasa Pendidikan	9,37	7,55	7,35	6,97	7,76
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	11,37	6,61	9,86	8,60	8,80
Jasa lainnya	8,50	3,21	8,64	8,98	9,45

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Apabila dibandingkan dengan provinsi lain se Pulau Jawa, ekonomi Jawa Tengah tahun 2018 tumbuh paling rendah meskipun tetap tumbuh positif dari tahun ke tahun.

Tabel 2.9.
Pertumbuhan Ekonomi Provinsi se-Pulau Jawa dan Nasional
Tahun 2014 – 2018 (%)

No	Provinsi	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Banten	5,47	5,37	5,26	5,73	5,81
2	Jawa Barat	5,06	5,03	5,67	5,35	5,64
3	DKI Jakarta	5,95	5,88	5,85	6,20	6,17
4	Jawa Tengah	5,27	5,47	5,25	5,26	5,32
5	DIY	5,18	4,90	5,05	5,26	6,20
6	Jawa Timur	5,86	5,44	5,55	5,46	5,50
	Nasional	5,01	4,88	5,03	5,07	5,17

Sumber : BPS, 2019

Berdasarkan sebaran pertumbuhan ekonomi tiap kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2017, Kabupaten Banyumas tumbuh paling tinggi dibandingkan kabupaten/kota lainnya sebesar 6,34%, diikuti Kabupaten Rembang (6,18%). Sedangkan ekonomi Kabupaten Cilacap tumbuh paling rendah yaitu sebesar 2,45%, diikuti oleh Kabupaten Kudus (2,97%). Perkembangan pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10.
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013–2017 (%)

	Kabupaten/Kota	2013	2014	2015	2016 ^{a)}	2017 ^{b)}
1	Kab. Cilacap	1,66	2,93	6,46	5,06	2,45
2	Kab. Banyumas	6,97	5,67	6,12	6,05	6,34
3	Kab. Purbalingga	5,27	5,86	5,39	4,78	5,12
4	Kab. Banjarnegara	5,44	5,27	5,48	5,41	5,42
5	Kab. Kebumen	4,57	5,80	6,29	4,97	4,89
6	Kab. Purworejo	4,94	4,49	5,12	5,12	5,14
7	Kab. Wonosobo	4,00	4,89	5,12	5,13	3,16
8	Kab. Magelang	5,91	4,88	5,35	5,37	5,06
9	Kab. Boyolali	5,83	5,42	6,08	5,30	5,52
10	Kab. Klaten	5,96	5,79	5,64	5,14	5,07
11	Kab. Sukoharjo	5,78	5,40	5,69	5,71	5,72
12	Kab. Wonogiri	4,78	5,30	5,34	5,23	5,17
13	Kab. Karanganyar	5,69	5,22	5,05	5,37	5,52
14	Kab. Sragen	6,70	5,58	6,05	5,74	5,81
15	Kab. Grobogan	4,57	4,07	5,96	4,46	5,65
16	Kab. Blora	5,36	4,39	5,36	23,53	5,84
17	Kab. Rembang	5,43	5,14	5,49	5,23	6,18
18	Kab. Pati	5,97	4,63	5,98	5,46	5,40
19	Kab. Kudus	4,36	4,47	4,08	2,52	2,97
20	Kab. Jepara	5,39	4,80	5,03	5,02	5,13

Kabupaten/Kota		2013	2014	2015	2016 ^{*)}	2017 ^{**)}
21	Kab. Demak	5,27	4,29	5,93	5,05	5,56
22	Kab. Semarang	5,97	5,84	5,43	5,27	5,47
23	Kab. Temanggung	5,20	5,06	5,17	4,98	4,68
24	Kab. Kendal	6,22	5,17	5,17	5,53	5,57
25	Kab. Batang	5,88	5,43	5,60	4,98	5,29
26	Kab. Pekalongan	5,99	4,95	4,78	5,16	5,28
27	Kab. Pemasang	5,57	5,53	5,50	5,38	5,39
28	Kab. Tegal	6,73	5,03	5,45	5,92	5,38
29	Kab. Brebes	5,91	5,30	5,97	5,08	5,47
30	Kota Magelang	6,04	4,90	5,07	5,17	5,18
31	Kota Surakarta	6,25	5,28	5,44	5,32	5,33
32	Kota Salatiga	6,30	5,54	5,14	5,22	5,21
33	Kota Semarang	6,25	6,38	5,79	5,84	5,64
34	Kota Pekalongan	5,91	5,48	5,00	5,36	5,32
35	Kota Tegal	5,67	5,03	5,43	5,44	5,46

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Keterangan : *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 selama tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dari Rp.764.959,150 triliun (2014) menjadi Rp.941.283,278 triliun (2018). Demikian juga dengan nilai PDRB Jawa Tengah Atas Dasar Harga Berlaku pada periode yang sama meningkat dari Rp. 922.471,181 triliun (2014) menjadi Rp.1.268.700,96 triliun (2018). Peningkatan nilai PDRB baik ADHK Tahun 2010 dan ADHB didukung dengan peningkatan nilai PDRB pada seluruh lapangan usaha. Rincian nilai PDRB tiap lapangan usaha baik ADHK 2010 maupun ADHB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.11.

**Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018 (Juta Rupiah)**

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	107.793.381	113.826.299	116.331.116	118.265.172	121.370.041
Pertambangan dan Penggalian	15.566.649	16.278.165	19.367.597	20.373.383	20.873.488
Industri Pengolahan	271.526.773	284.306.592	295.960.836	308.770.222	322.203.738
Pengadaan Listrik dan Gas	866.488	887.584	928.106	976.553	1.028.917
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	567.980	577.262	589.805	628.208	658.880
Konstruksi	76.681.877	81.286.113	86.589.002	92.762.018	98.393.741
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	110.899.194	115.430.121	121.970.807	129.301.748	136.673.489
Transportasi dan Pergudangan	24.868.281	26.780.920	28.097.072	29.867.333	32.121.009
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	23.471.641	25.064.275	26.633.474	28.350.128	30.667.222

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
Informasi dan Komunikasi	30.130.162	33.001.271	35.742.556	40.485.502	45.500.915
Jasa Keuangan dan Asuransi	20.106.852	21.636.626	23.533.410	24.749.918	25.635.547
Real Estate	13.776.864	14.822.295	15.831.478	16.856.963	17.797.502
Jasa Perusahaan	2.526.616	2.741.143	3.032.330	3.296.655	3.609.298
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	21.075.647	22.194.695	22.720.444	23.304.537	24.337.786
Jasa Pendidikan	27.266.220	29.324.082	31.479.474	33.674.587	36.286.322
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.916.711	6.307.617	6.929.496	7.525.670	8.187.909
Jasa lainnya	11.917.818	12.300.031	13.362.351	14.561.838	15.937.473
Total PDRB	764.959.151	806.765.092	849.099.355	893.750.437	941.283.278

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Keterangan : *) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Tabel 2.12.
Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 – 2018 (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	140.435.087	157.201.724	164.512.013	168.535.067	178.075.520
Pertambangan dan Penggalian	19.653.819	23.228.243	27.479.905	30.062.173	32.902.706
Industri Pengolahan	329.025.312	354.642.135	377.237.312	406.034.161	437.715.451
Pengadaan Listrik dan Gas	842.921	906.761	988.648	1.128.082	1.225.338
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	601.325	632.697	659.345	706.826	743.875
Konstruksi	93.449.794	103.406.449	111.884.560	122.936.709	136.153.698
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	124.942.794	135.033.871	146.523.162	158.582.155	171.376.944
Transportasi dan Pergudangan	27.668.162	31.783.645	33.786.516	36.449.005	39.593.409
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	27.787.794	30.968.362	33.658.311	36.204.667	39.506.557
Informasi dan Komunikasi	28.403.004	30.511.263	33.075.352	39.125.735	43.963.887
Jasa Keuangan dan Asuransi	25.534.863	28.518.188	31.865.321	34.964.643	37.488.383
Real Estate	15.037.136	16.749.473	18.172.330	19.836.975	21.450.329
Jasa Perusahaan	3.018.353	3.448.318	3.957.047	4.465.106	5.021.624
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	26.406.084	28.925.625	31.233.106	33.086.005	34.940.149
Jasa Pendidikan	38.446.225	41.989.359	46.454.032	51.741.342	57.040.985
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7.537.883	8.404.005	9.307.248	10.258.531	11.300.799
Jasa lainnya	13.680.626	14.636.521	16.522.476	18.283.303	20.201.312
Total PDRB	922.471.181	1.010.986.637	1.087.316.683	1.172.400.482	1.268.700.966

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Keterangan : *) Angka sementara **) Angka sangat Sementara

Sementara itu, struktur perekonomian Jawa Tengah menurut lapangan usaha selama tahun 2014-2018 masih didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan; pertanian, kehutanan dan perikanan; dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor. Meskipun angka distribusinya tidak selalu tumbuh positif dari tahun ke tahunnya.

Tabel 2.13.

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 (%)

Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017*	2018**
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,22	15,55	15,13	14,38	14,04
Pertambangan dan Penggalian	2,13	2,30	2,53	2,56	2,59
Industri Pengolahan	35,67	35,08	34,69	34,63	34,50
Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,09	0,09	0,10	0,10
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,06	0,06	0,06	0,06
Konstruksi	10,13	10,23	10,29	10,49	10,73
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,54	13,36	13,48	13,53	13,51
Transportasi dan Pergudangan	3,00	3,14	3,11	3,11	3,12
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,01	3,06	3,10	3,09	3,11
Informasi dan Komunikasi	3,08	3,02	3,04	3,34	3,47
Jasa Keuangan dan Asuransi	2,77	2,82	2,93	2,98	2,95
Real Estate	1,63	1,66	1,67	1,69	1,69
Jasa Perusahaan	0,33	0,34	0,36	0,38	0,40
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,86	2,86	2,87	2,82	2,75
Jasa Pendidikan	4,17	4,15	4,27	4,41	4,50
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,82	0,83	0,86	0,88	0,89
Jasa lainnya	1,48	1,45	1,52	1,56	1,59

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Keterangan : *) Angka sementara

***) Angka sangat Sementara

Nilai PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran selama tahun 2014-2018 tetap didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, bahkan lebih dari separuh nilai PDRB Jawa Tengah. Komponen lainnya yang cukup besar memberikan peranan terhadap PDRB Jawa Tengah adalah PMTB, serta impor dan ekspor barang dan jasa.

Tabel 2.14.

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	570.433.401	620.264.015	660.988.586	714.362.513	768.534.014
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	10.773.170	11.438.505	12.256.989	13.168.407	14.491.862
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	75.556.449	85.225.912	87.589.147	94.261.559	98.712.449
Pembentukan Modal Tetap Bruto	274.558.464	308.702.422	333.977.418	366.766.466	413.749.153
Perubahan Inventori	27.054.493	14.268.808	7.307.461	9.627.928	15.699.070

Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
Ekspor Luar Negeri	84.542.042	92.813.476	92.562.664	106.463.041	124.316.368
Impor Luar Negeri	220.421.202	188.360.109	134.238.540	160.854.809	234.958.244
Net Ekspor Antar Daerah	99.974.365	66.633.608	26.872.958	28.605.378	68.156.295
Total PDRB	922.471.181	1.010.986.637	1.087.316.683	1.172.400.482	1.268.700.966

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah , 2019

Keterangan : *) Angka sementara;

***) Angka sangat sementara

Tabel 2.15.

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)

Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	465.234.026	485.947.262	508.104.938	531.583.770	556.540.858
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8.299.374	8.047.359	8.498.966	8.875.110	9.551.014
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	56.643.275	58.117.816	57.782.238	59.554.139	61.329.149
Pembentukan Modal Tetap Bruto	220.772.866	232.335.202	246.247.089	264.716.106	285.045.113
Perubahan Inventori	16.261.492	5.076.120	7.576.171	7.952.833	8.423.390
Ekspor Luar Negeri	68.523.198	68.716.856	66.644.885	75.670.848	84.767.419
Impor Luar Negeri	118.498.481	99.894.366	95.528.922	104.677.126	138.816.756
Net Ekspor Antar Daerah	47.723.401	48.418.843	49.773.989	50.074.758	74.443.091
Total PDRB	764.959.151	806.765.092	849.099.355	893.750.437	941.283.278

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah , 2019

Keterangan : *) Angka sementara;

***) Angka sangat sementara

Rata-rata kontribusi pengeluaran konsumsi rumah tangga dalam PDRB Jawa Tengah selama lima tahun sebesar 61%, yang diikuti oleh PMTB sebesar 30%, dan impor barang jasa sebesar 17%. Kondisi ini menggambarkan bahwa PDRB Jawa Tengah sangat tergantung pada konsumsi rumah tangga, meskipun trennya semakin tahun semakin menurun kontribusinya.

Tabel 2.16.

Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018 (%)

Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	61,84	61,35	60,79	60,93	60,58
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,17	1,13	1,13	1,12	1,14
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	8,19	8,43	8,06	8,04	7,78
Pembentukan Modal Tetap Bruto	29,76	30,53	30,72	31,28	32,61
Perubahan Inventori	2,93	1,41	0,67	0,82	1,24
Ekspor Luar Negeri	9,16	9,18	8,51	9,08	9,80
Impor Luar Negeri	23,89	18,63	12,35	13,72	18,52
Net Ekspor Antar Daerah	10,84	6,59	2,47	2,44	5,37

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Keterangan : *) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

Meskipun kontribusi konsumsi rumah tangga mendominasi struktur perekonomian Jawa Tengah, namun tingkat pertumbuhannya rata-rata dalam lima tahun sebesar 4,5%. Komponen lain yang rata-rata pertumbuhannya cukup tinggi adalah PMTB sebesar 6,19% dan ekspor barang dan jasa sebesar 6,70%. Apabila kedua komponen ini terus diupayakan peningkatannya maka akan dapat mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah kedepan. Pertumbuhan PDRB Jawa Tengah menurut pengeluaran tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.17.

Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 Menurut Pengeluaran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 (%)

Jenis Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,31	4,45	4,56	4,62	4,69
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	8,62	-3,04	5,61	4,43	7,62
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,19	2,60	-0,58	3,07	2,98
Pembentukan Modal Tetap Bruto	4,52	5,24	5,99	7,50	7,68
Perubahan Inventori	-22,63	-68,78	49,25	4,97	5,92
Ekspor Luar Negeri	10,66	0,28	-3,02	13,54	12,02
Impor Luar Negeri	-7,29	-15,70	-4,37	9,58	32,61
Net Ekspor Antar Daerah	-6,80	1,46	2,80	0,60	48,66

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

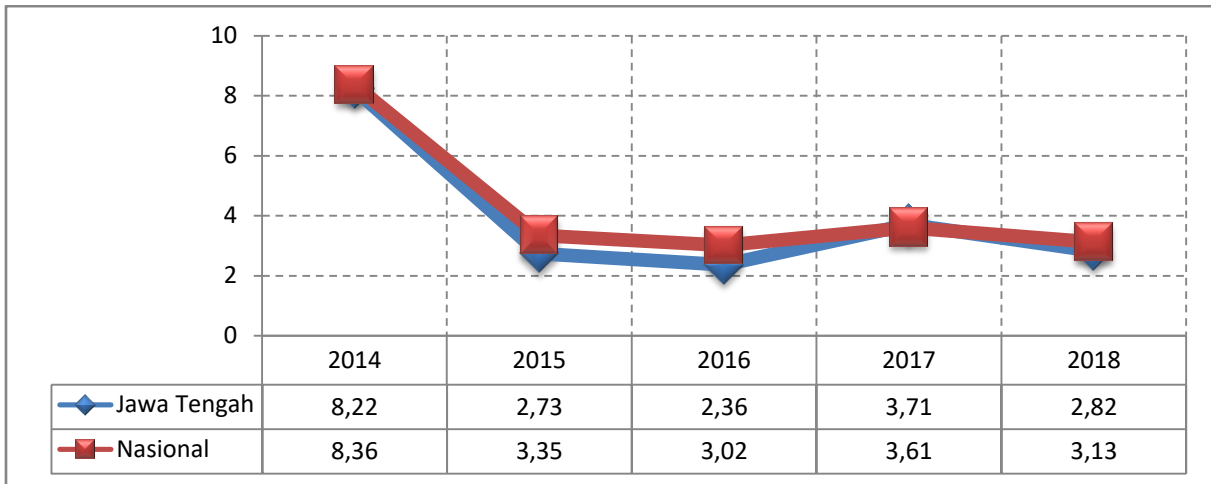
Keterangan : *) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

2.2.2. Laju Inflasi

Tingkat inflasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2014-2018 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 2%-3%. Bahkan tingkat inflasi di Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional dalam periode tersebut. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah.

Namun demikian, terkendalinya tingkat inflasi di Jawa Tengah selama ini tidak terlepas dari optimalnya kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Jawa Tengah. Berbagai upaya selalu dilakukan untuk mengendalikan tingkat inflasi antara lain melalui pemenuhan ketersediaan pasokan, pembentukan harga yang terjangkau, pendistribusian pasokan, perluasan akses informasi dan penerapan protokol manajemen lonjakan harga. Disamping itu, Bank Indonesia telah merilis aplikasi SiHati Generasi III yang berfungsi untuk memantau informasi pasokan dan perkembangan harga komoditas kebutuhan pokok masyarakat di Jawa Tengah. Informasi yang lebih komprehensif ini sangat membantu pemerintah Jawa Tengah dalam pengambilan keputusan terkait dengan pengendalian inflasi di Jawa Tengah.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah , 2019

Gambar 2.12.

Tingkat Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014–2018 (%)

2.2.3. PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Selama kurun waktu tahun 2014-2018, PDRB per kapita Jawa Tengah atas dasar harga berlaku menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2018, PDRB per kapita ADHB Jawa Tengah sebesar 36,78 juta rupiah, yang artinya bahwa rata-rata pendapatan penduduk Jawa Tengah mencapai nilai 36,78 juta rupiah per kapita per tahun. Berdasarkan PDRB ADHK Tahun 2010, nilai PDRB per kapita Jawa Tengah

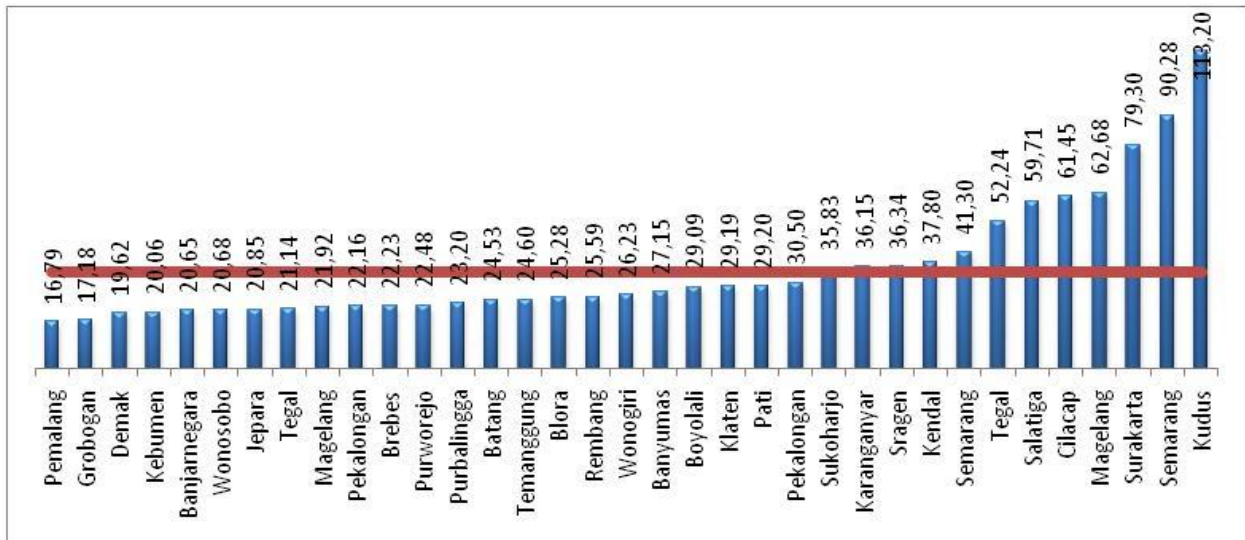
Tabel 2.18.

PDRB Per Kapita Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014–2018 (Rupiah)

Tahun	ADHB	ADHK Tahun 2010
2014	27.518.381	22.819.616
2015	29.933.873	23.887.164
2016	31.962.041	24.959.562
2017	34.233.676	26.089.571
2018	36.784.603	27.291.484

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah,2019

Berdasarkan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2017 diketahui bahwa Kabupaten Kudus memiliki PDRB per kapita tertinggi di Jawa Tengah sebesar 113,20 juta rupiah per kapita, dan terendah adalah Kabupaten Pemalang sebesar 16,79 juta rupiah per kapita. Selengkapnya data PDRB per kapita kabupaten/kota tahun 2017 dapat dilihat pada Gambar 2.10.



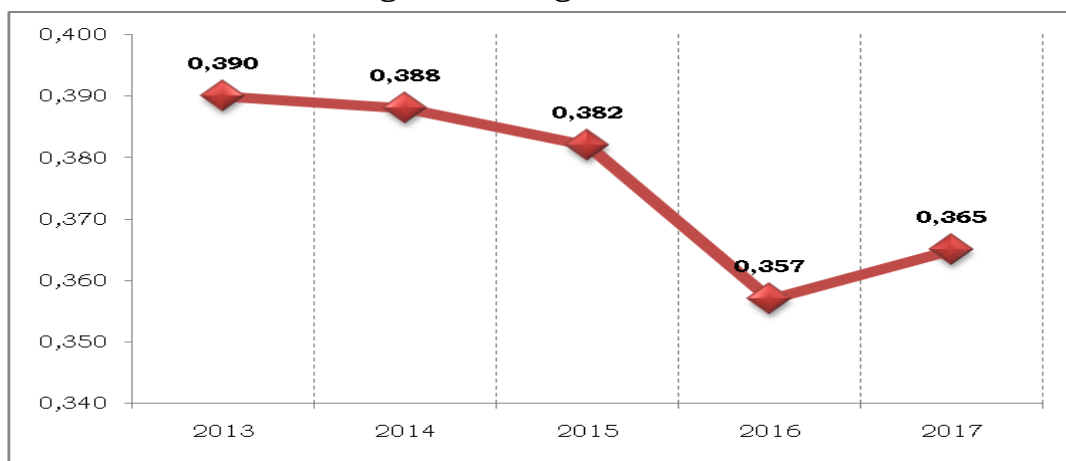
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.13.

PDRB ADHB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 (Juta)

2.2.4. Indeks Gini

Selama kurun waktu tahun 2013 – 2017 perkembangan Indeks Gini di Jawa Tengah menunjukkan angka yang cenderung membaik, dari 0,390 di tahun 2013 menjadi 0,365 di tahun 2017. Di kurun waktu tersebut, Indeks Gini mencapai titik timpang tertinggi pada tahun 2013 sebesar 0,390 dan titik timpang terendahnya pada tahun 2016 sebesar 0,357. Indeks Gini Jawa Tengah termasuk dalam kategori menengah.

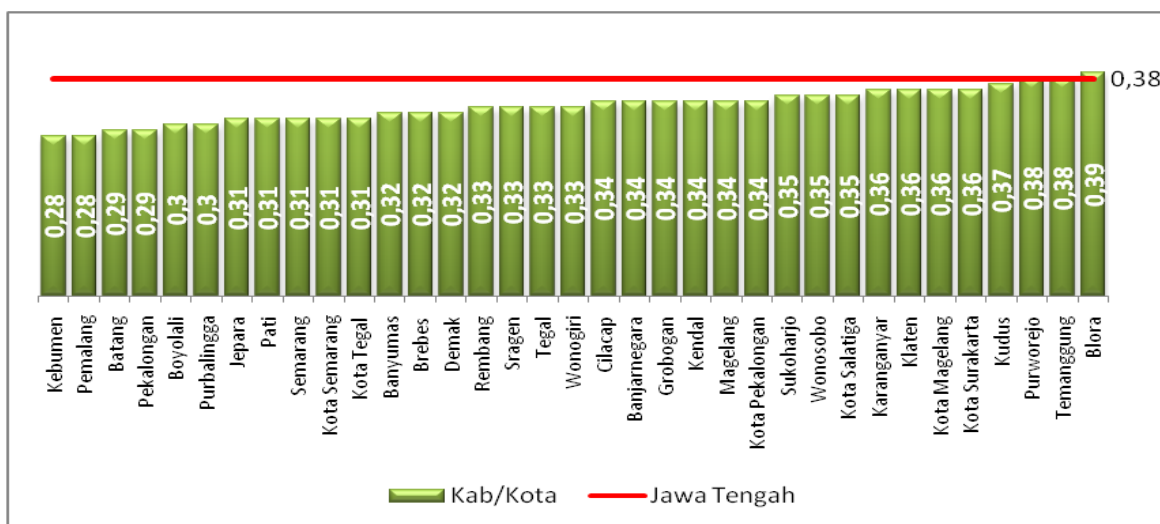


Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.14.

Indeks Gini Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Berdasarkan distribusi Indeks Gini per kabupaten/kota tahun 2015, diketahui Indeks Gini kabupaten dan kota di Jawa Tengah berada pada kisaran antara 0,28 sampai 0,39. Kabupaten/kota yang memiliki Indeks Gini tertinggi berturut-turut adalah Kabupaten Blora (0,39), Temanggung (0,38), dan Purworejo (0,38). Sementara Kabupaten Kebumen, dan Pemalang memiliki Indeks Gini terendah. Rincian Indeks Gini kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2015 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2017

Gambar 2.15.

Indeks Gini Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

2.2.5. Pemerataan Pendapatan Versi Bank Dunia

Berdasarkan kriteria Bank Dunia distribusi pendapatan penduduk Jawa Tengah dapat diukur menjadi tiga kelompok pendapatan. Sesuai kriteria Bank Dunia, pada tahun 2017 distribusi pendapatan penduduk Jawa Tengah tergolong merata dengan posisi ketimpangan rendah. Hal tersebut tampak dari angka 18,40% pendapatan dinikmati oleh 40% penduduk berpenghasilan rendah, sebesar 37,54% oleh 40% penduduk berpenghasilan menengah, dan sebesar 44,06% oleh 20% penduduk berpenghasilan tinggi.

Tabel 2.19.

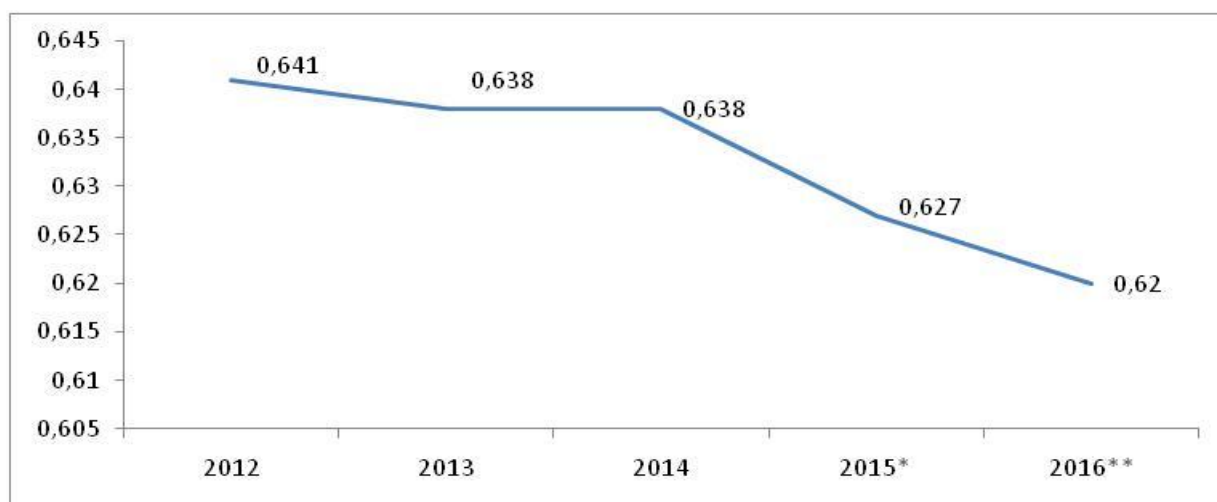
Pemerataan Pendapatan Penduduk Menurut Kriteria Bank Dunia Tahun 2013 – 2017

No	Tahun	Kriteria Bank Dunia		
		40% Penduduk Pendapatan Rendah	40% Penduduk Pendapatan Menengah	20% Penduduk Pendapatan Tinggi
1	2013	18,38	34,55	47,07
2	2014	18,59	35,39	46,02
3	2015	18,64	34,82	46,54
4	2016	18,42	37,46	44,11
5	2017	18,40	37,54	44,06

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

2.2.6. Indeks Williamson

Guna melihat tingkat kesenjangan antar wilayah kabupaten/kota di Jawa Tengah, digunakan Indeks Williamson. Pada kurun waktu tahun 2012 – 2016, Indeks Williamson Jawa Tengah semakin menurun yaitu dari 0,641 menjadi 0,62. Kondisi ini menggambarkan kesenjangan antar kabupaten/kota di Jawa Tengah yang semakin mengecil.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.16.

Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2016

2.2.7. Penduduk Miskin

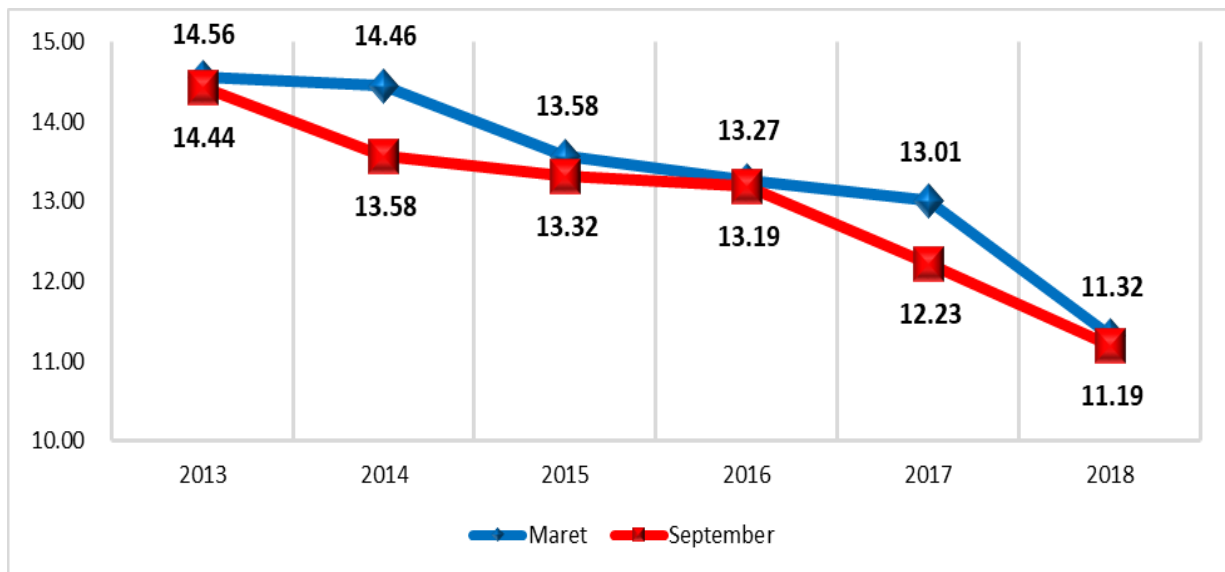
Kemiskinan di Jawa Tengah selama kurun waktu 2014 – 2018 terus mengalami penurunan, meskipun jumlah absolutnya masih cukup besar. Jumlah penduduk miskin tahun 2018 (September) sebanyak 3,867 juta jiwa (11,19%), menurun sebesar 1,04 persen poin dibanding tahun 2017 (September) sebanyak 4,197 juta jiwa (12,23%). Jumlah penduduk miskin lebih besar di perdesaan sebanyak 2,157 juta jiwa (12,80%), sedangkan di perkotaan sebanyak 1,709 juta jiwa (9,67%).

Tabel 2.20.

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Tahun	Bulan	Penduduk Miskin					
		(ribu jiwa)			(%)		
		Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2014	Maret	1.948,29	2.891,17	4.836,45	12,68	15,96	14,46
	September	1.771,53	2.790,29	4.561,83	11,5	15,35	13,58
2015	Maret	1.837,19	2.739,85	4.577,04	11,85	15,05	13,58
	September	1.789,57	2.716,21	4.505,78	11,50	14,86	13,32
2016	Maret	1.824,08	2.682,81	4.506,89	11,44	14,89	13,27
	September	1.879,55	2.614,20	4.493,75	11,38	14,88	13,19
2017	Maret	1.889,09	2.561,63	4.450,72	11,21	14,77	13,01
	September	1.815,58	2.381,92	4.197,49	10,55	13,92	12,23
2018	Maret	1.716,16	2.181,04	3.897,20	9,73	12,99	11,32
	September	1.709,56	2.157,86	3.867,42	9,67	12,80	11,19

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

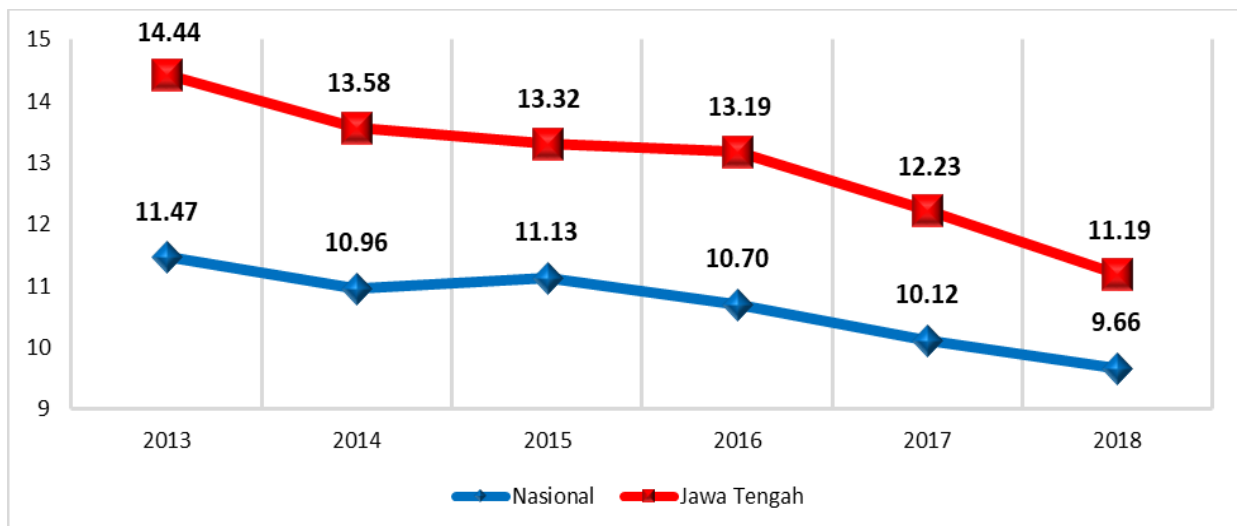


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.17.

Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Jika dibandingkan dengan nasional, persentase penduduk miskin di Jawa Tengah masih berada di atas nasional, bahkan selama lima tahun terakhir, sebagaimana gambar berikut.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.18.

Persentase Penduduk Miskin di Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2018

Kinerja penurunan kemiskinan Provinsi Jawa Tengah periode September tahun 2017-2018 menduduki peringkat 1 (terbaik) dibandingkan Provinsi se Jawa Bali maupun Nasional. Kinerja penurunan persentase kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang cukup tinggi tersebut mengindikasikan program/kegiatan penanggulangan kemiskinan telah berjalan sesuai arahnya (*on the track*).

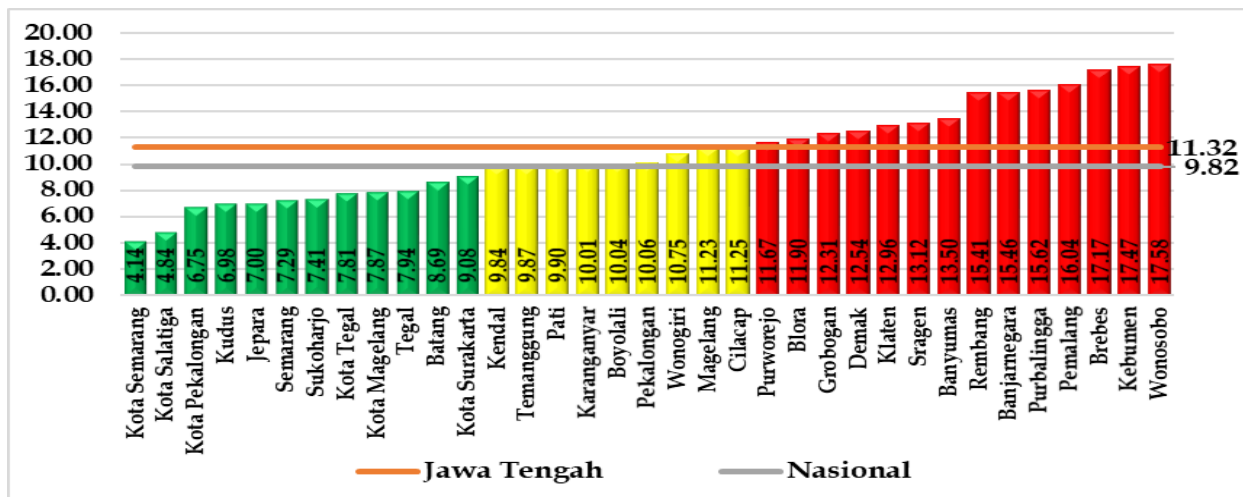
Tabel 2.21.
Persentase Penduduk Miskin Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi se Jawa-Bali Tahun 2017 – 2018

No.	Provinsi	Periode				Penurunan (%)
		Sept 2017		Sept 2018		
		(Ribu Jiwa)	(%)	(Ribu Jiwa)	(%)	
1	Jawa Tengah	4.197,49	12,23	3.867,42	11,19	-1,04
2	Jawa Barat	3.774,41	7,83	3.539,40	7,25	-0,58
3	DIY	466,33	12,36	450,25	11,81	-0,55
4	Jawa Timur	4.405,27	11,2	4.292,15	10,85	-0,35
5	Bali	176,48	4,14	168,34	3,91	-0,23
6	DKI Jakarta	393,13	3,78	372,26	3,55	-0,23
7	Banten	699,83	5,59	668,74	5,25	-0,34
	Nasional	26.582,99	10,12	25.674,58	9,66	-0,46

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019

Persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota di Jawa Tengah terbagi dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional, kabupaten/kota di bawah provinsi dan di atas nasional, serta kabupaten/kota di bawah provinsi dan nasional. Kondisi persebaran penduduk miskin di kabupaten/kota berdasarkan data per Maret tahun 2018 (data kemiskinan kabupaten/kota terakhir rilis) yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di atas provinsi dan nasional sebanyak 14 kabupaten meliputi Blora, Grobogan, Demak, Purworejo, Sragen, Klaten, Banyumas, Banjarnegara, Pemalang, Rembang, Purbalingga, Brebes, Kebumen, dan Wonosobo;
2. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan di atas nasional sebanyak 9 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Kendal, Pati, Temanggung, Boyolali, Karanganyar, Magelang, Pekalongan, Wonogiri, dan Cilacap;
3. Kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin di bawah provinsi dan nasional sebanyak 12 kabupaten/kota meliputi Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Pekalongan, Kabupaten Kudus, Kabupaten Semarang, Kota Tegal, Kabupaten Jepara, Kota Magelang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Tegal, Kabupaten Batang, dan Kota Surakarta.

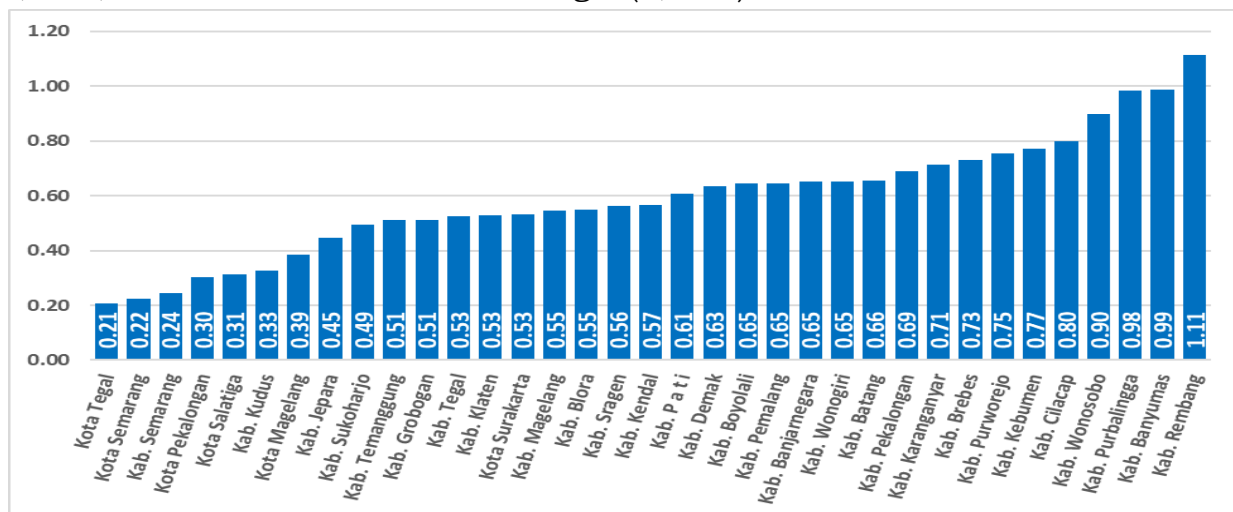


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.19.

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi, dan Nasional Tahun 2018 (Maret)

Melihat rata-rata kinerja penurunan kemiskinan kabupaten/kota se Jawa Tengah pada kurun waktu lima tahun (2014-2018), Kabupaten Rembang merupakan kabupaten dengan kinerja penurunan yang paling tinggi sebesar 1,11%, dan terendah adalah Kota Tegal (0,21%).

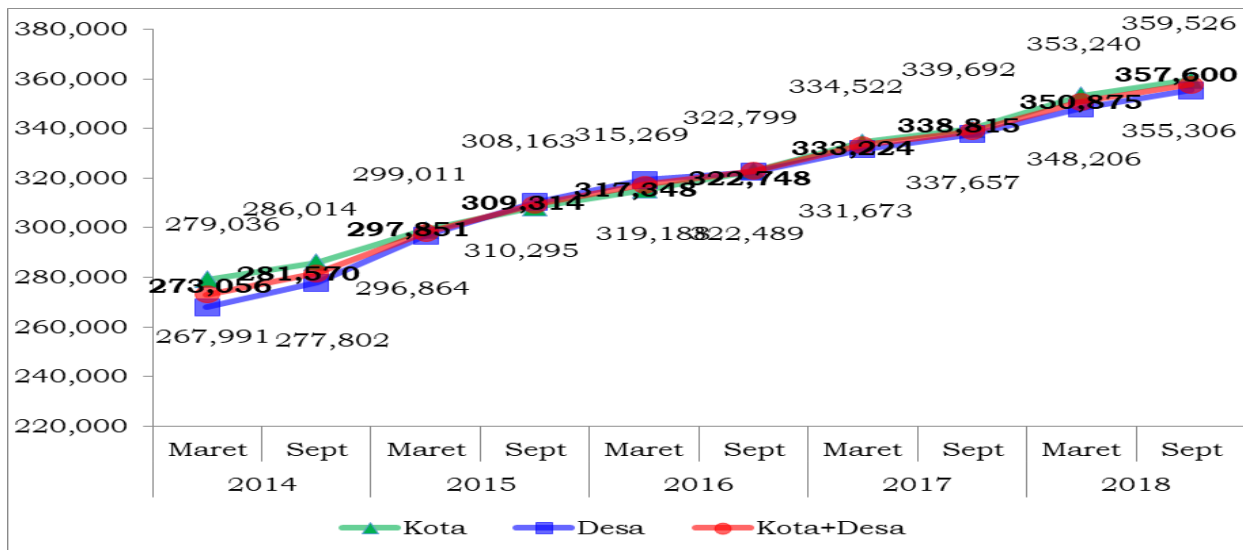


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014-2018

Gambar 2.20.

Rata-Rata Kinerja Penurunan Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018 (%)

Garis kemiskinan di Jawa Tengah pada September 2018 sebesar Rp. 357.600,00 per kapita per bulan, meningkat 5,54% dibandingkan dengan September 2017 yang mencapai Rp.338.815,00 perkapita per bulan. Pada periode waktu yang sama, garis kemiskinan daerah perkotaan sebesar Rp.359.526,00 per kapita per bulan atau naik 5,84% dari tahun 2017 (Rp.339.692,00 per kapita per bulan). Garis kemiskinan di perdesaan juga mengalami peningkatan sebesar 5,23% menjadi sebesar Rp.355.306,00 per kapita per bulan dibandingkan dari Rp.337.657,00 per kapita per bulan di tahun 2017.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014-2018

Gambar 2.21.

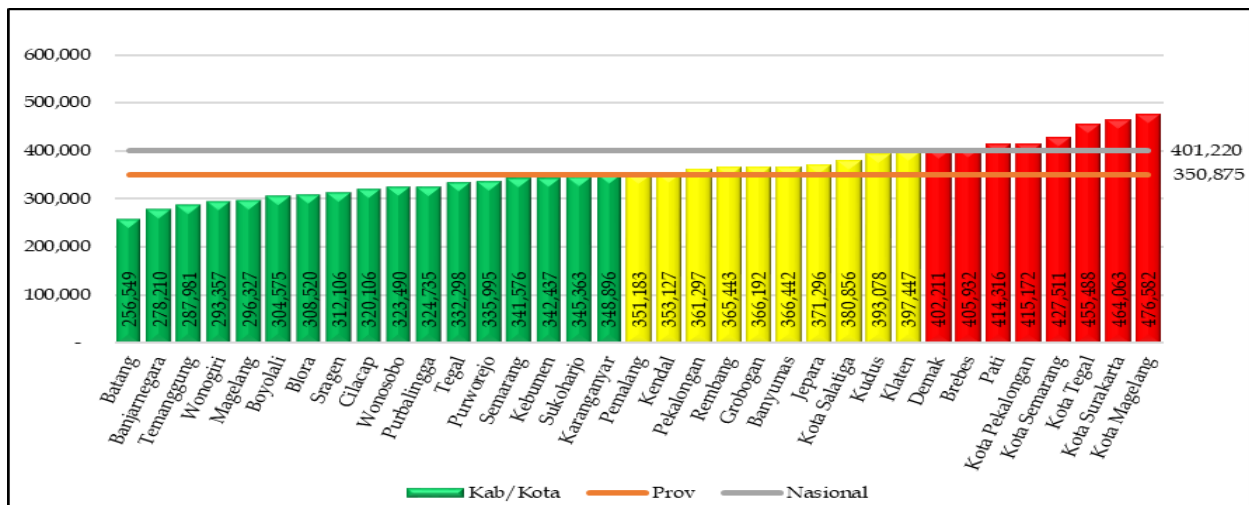
Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Garis kemiskinan dipengaruhi komponen bahan makanan dan non makanan. Peranan komoditi makanan terhadap garis kemiskinan masih jauh lebih besar (dominan) dibandingkan peranan komoditi bukan makanan. Terdapat tiga komoditi makanan yang berpengaruh cukup besar terhadap garis kemiskinan tahun 2018 (September) baik di perkotaan maupun perdesaan yaitu beras, rokok kretek filter, dan telur ayam ras. Komoditi lainnya relatif berbeda antara perkotaan dan perdesaan. Untuk komoditi bukan makanan yang berpengaruh besar terhadap garis kemiskinan di daerah perkotaan adalah biaya perumahan, bensin, dan listrik sedangkan di perdesaan adalah perumahan, bensin dan listrik.

Posisi relatif persebaran garis kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2018 (Maret) terhadap provinsi dan nasional dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu:

1. *Garis Kemiskinan Rendah*, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di bawah garis kemiskinan provinsi, terdapat di 17 kabupaten, yaitu Kabupaten Batang, Banjarnegara, Temanggung, Wonogiri, Magelang, Boyolali, Blora, Sragen, Cilacap, Wonosobo, Purbalingga, Tegal, Purworejo, Semarang, Kebumen, Sukoharjo dan Karanganyar;
2. *Garis Kemiskinan Sedang*, adalah garis kemiskinan kabupaten/kota berada di atas garis kemiskinan provinsi dan di bawah garis kemiskinan nasional, terdapat di 10 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Pemalang, Kendal, Pekalongan, Rembang, Grobogan, Banyumas, Jepara, Kota Salatiga, Kabupaten Kudus, dan Klaten;
3. *Garis Kemiskinan Tinggi*, adalah kabupaten/kota yang berada di atas garis kemiskinan nasional, terdapat di 8 kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Demak, Brebes, Pati, Kota Pekalongan, Kota Semarang, Kota Tegal, Kota Surakarta dan Kota Magelang.

Kabupaten/Kota dengan garis kemiskinan paling rendah adalah Kabupaten Batang sebesar Rp. 256.549,- per kapita per bulan, sedangkan garis kemiskinan paling tinggi adalah Kota Magelang sebesar Rp. 476.582,- per kapita per bulan.

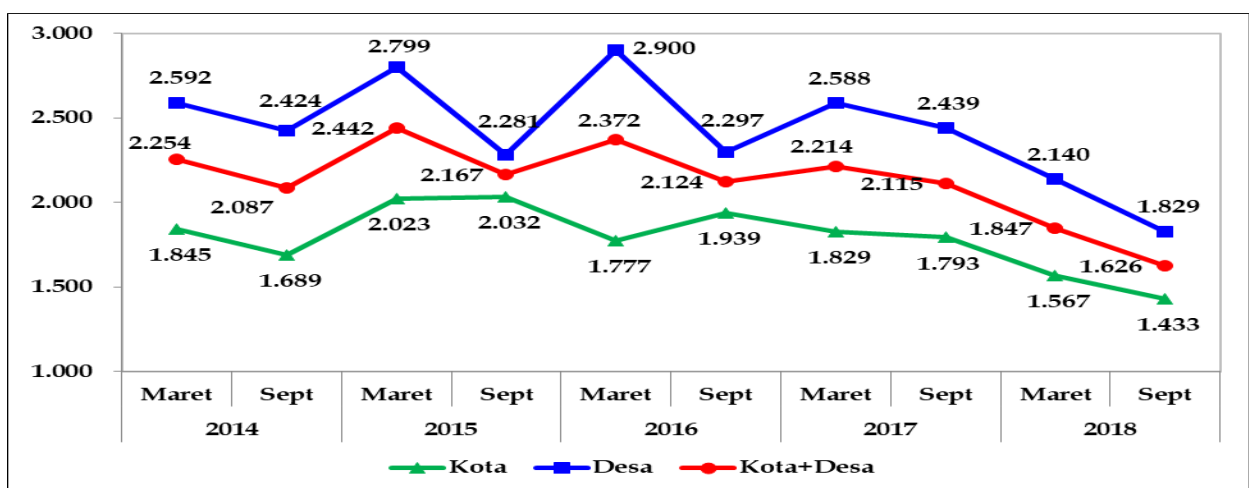


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.22.

Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bulan) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi, dan Nasional Tahun 2018 (Maret)

Selama periode Maret 2014 – September 2018 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah telah mengalami penurunan. Pada periode September 2018 sebesar 1,626 lebih baik dibandingkan dengan periode Maret 2014 yaitu sebesar 2,254. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil.



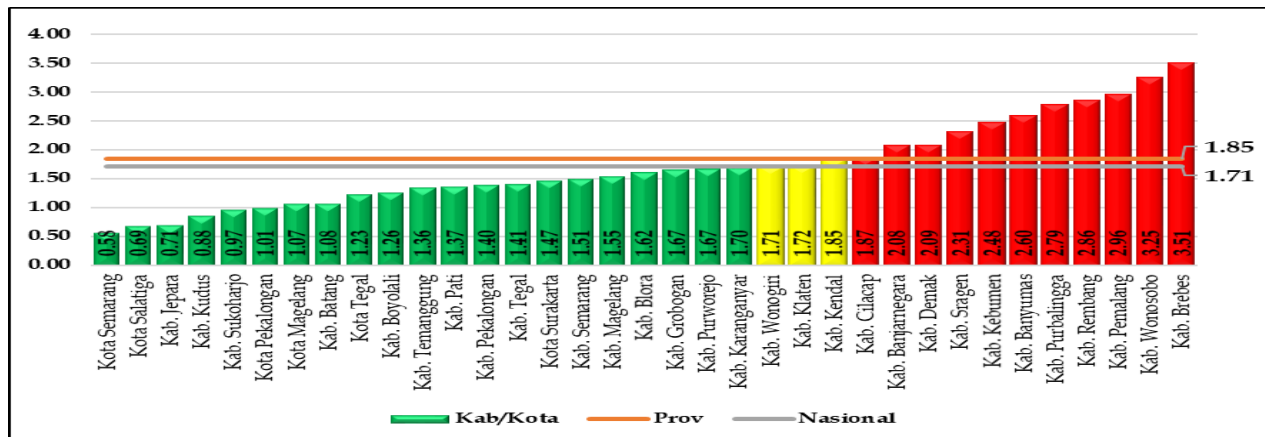
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014-2018

Gambar 2.23.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Jawa Tengah Periode Maret 2014 – September 2018

Nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) September 2018 di daerah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan. Pada September 2018, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) untuk daerah perkotaan sebesar 1,433, sedangkan di daerah perdesaan mencapai sebesar 1,829. Angka ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan. Sedangkan untuk Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) kabupaten/kota pada periode Maret 2018, apabila dibandingkan dengan P1 Provinsi sebesar 1,85 dan P1 Nasional sebesar 1,71,

diketahui bahwa Kabupaten Brebes memiliki Indeks Kedalaman Kemiskinan tertinggi yaitu sebesar 3,51 dan Kota Semarang terendah sebesar 0,58.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

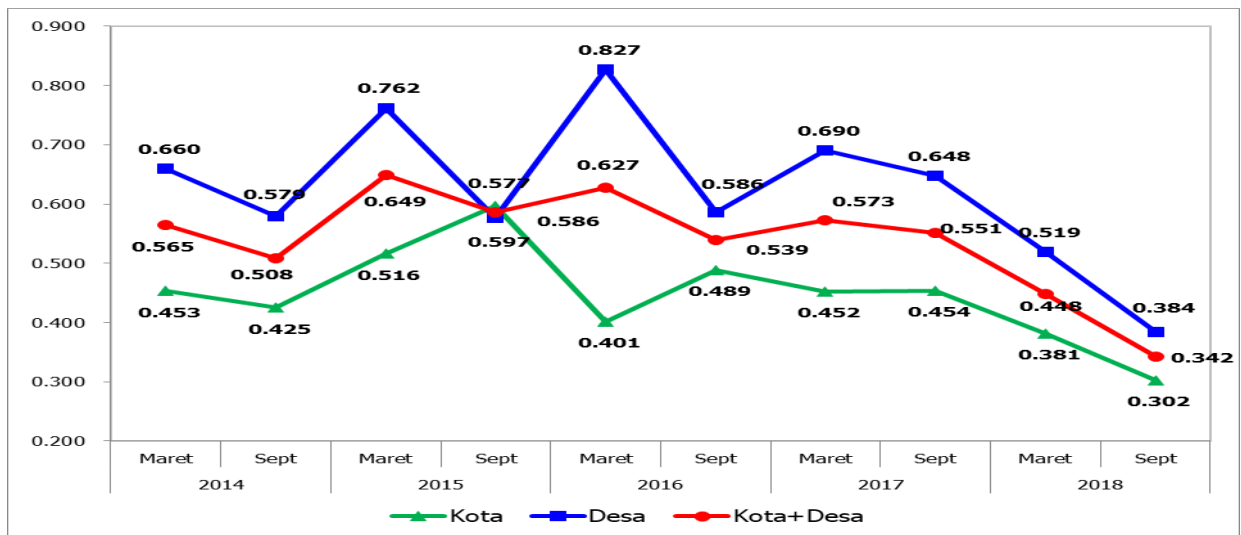
Gambar 2.24.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi, dan Nasional Tahun 2018 (Maret)

Posisi relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 sebagai berikut:

1. *Indeks Kedalaman Kemiskinan Tinggi*, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 diatas provinsi dan nasional, sebanyak 11 kabupaten meliputi Kabupaten Brebes, Wonosobo, Pemalang, Rembang, Purbalingga, Banyumas, Kebumen, Sragen, Demak, Banjarnegara, dan Cilacap;
2. *Indeks Kedalaman Kemiskinan Sedang*, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 dibawah provinsi dan diatas nasional, sebanyak 3 kabupaten Kendal, Klaten, dan Wonogiri;
3. *Indeks Kedalaman Kemiskinan Rendah*, adalah kabupaten/kota yang memiliki P1 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 21 kabupaten/kota meliputi Kabupaten Karanganyar, Purworejo, Grobogan, Blora, Magelang, Semarang, Kota Surakarta, Tegal, Pekalongan, Pati, Temanggung, Boyolali, Kota Tegal, Batang, Kota Magelang, Kota Pekalongan, Sukoharjo, Kudus, Jepara, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

Selain dilihat dari Indeks Kedalaman, gambaran kemiskinan juga dilihat dari Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Selama periode Maret 2014 – September 2018, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah mengalami fluktuasi namun cenderung menurun, yaitu turun dari 0,565 menjadi 0,342. Nilai Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) September 2018 di daerah perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan di daerah perkotaan, yaitu untuk daerah perkotaan sebesar 0,302 dan daerah perdesaan sebesar 0,384. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di perdesaan lebih lebar dibandingkan perkotaan.

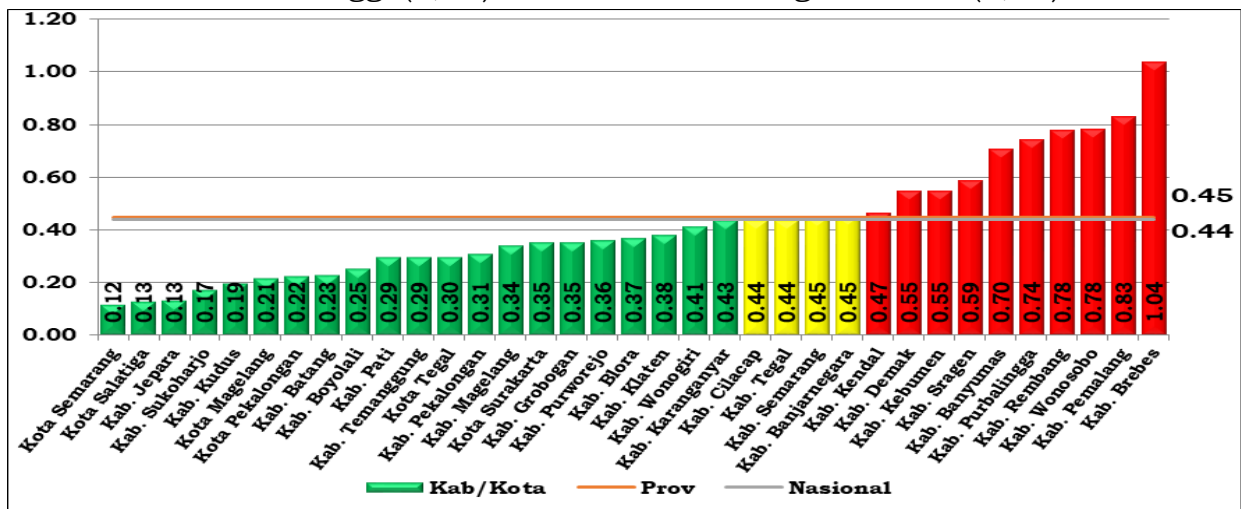


Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2014-2018

Gambar 2.25.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Jawa Tengah Periode Maret 2014 – September 2018

Gambaran Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten/kota di Jawa Tengah pada periode Maret 2018 menunjukkan bahwa Kabupaten Brebes memiliki indeks tertinggi (1,04) dan Kota Semarang terendah (0,12).



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.26.

Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi, Dan Nasional Tahun 2018 (Maret)

Posisi relatif Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 (Maret) sebagai berikut:

1. *Indeks Keparahan Kemiskinan Tinggi*, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di atas provinsi dan nasional, sebanyak 10 kabupaten meliputi Kabupaten Brebes, Pemalang, Wonosobo, Rembang, Purbalingga, Banyumas, Sragen, Kebumen, Demak, dan Kendal;
2. *Indeks Keparahan Kemiskinan Sedang*, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di bawah provinsi dan di atas nasional, sebanyak 4 kabupaten meliputi Banjarnegara, Semarang, Tegal, dan Cilacap;
3. *Indeks Keparahan Kemiskinan Rendah*, adalah kabupaten/kota yang memiliki P2 di bawah provinsi dan nasional, sebanyak 21 kabupaten/kota

meliputi Kabupaten Karanganyar, Wonogiri, Klaten, Blora, Purworejo, Grobogan, Kota Surakarta, Magelang, Pekalongan, Kota Tegal, Temanggung, Pati, Boyolali, Batang, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kudus, Sukoharjo, Jepara, Kota Salatiga, dan Kota Semarang.

2.2.8. Angka Kriminalitas yang Tertangani

Capaian kinerja penanganan angka kriminalitas di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2014-2018 adalah sebesar 68,0%. Kinerja penanganan angka kriminalitas di wilayah Jawa Tengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat dari 63,8% pada tahun 2014 menjadi 73,7% pada tahun 2018. Angka kriminalitas yang tertangani di Provinsi Jawa Tengah selama periode tahun 2014-2018 secara rinci sebagai berikut.

Tabel 2.22.

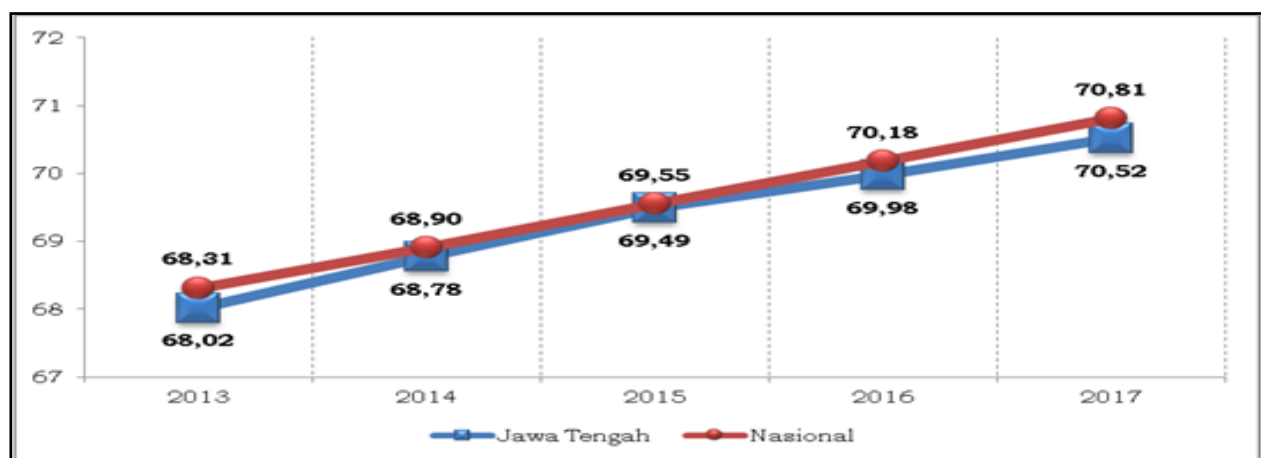
Angka Kriminalitas Yang Tertangani di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana		Kinerja Penanganan Angka Kriminalitas (%)
		Lapor	Selesai	
1.	2014	16.733	10.672	63,8
2.	2015	15.245	9.771	64,1
3.	2016	13.425	9.176	68,4
4.	2017	11.420	8.489	74,3
5.	2018	9.834	7.251	73,7
J U M L A H		66.657	45.359	68,0

Sumber: Polda Jawa Tengah, 2019

2.2.9. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk. Perkembangan IPM Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu dari 68,02 (tahun 2013) menjadi 70,52 (tahun 2017). Namun demikian IPM Jawa Tengah masih dibawah rata-rata IPM Nasional.



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Gambar 2.27.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013 – 2017

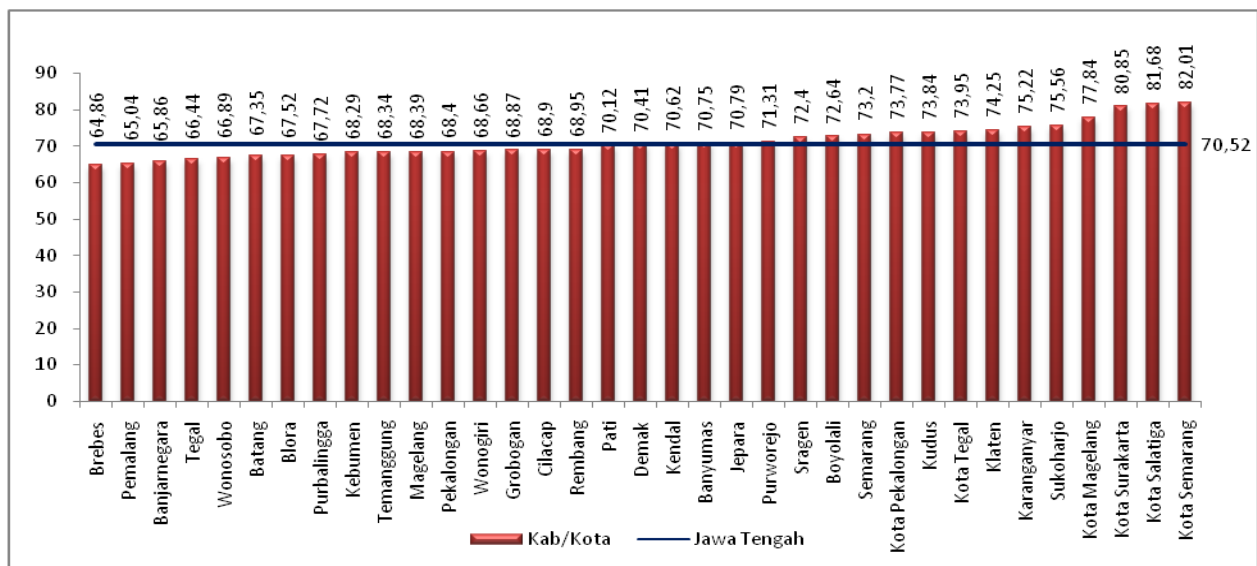
Apabila dibandingkan dengan provinsi lain se Pulau Jawa, IPM Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 berada di posisi ke-5, dan sedikit lebih baik dibandingkan Jawa Timur. Namun demikian, kinerja peningkatan IPM Jawa Tengah tahun 2017 tertinggi jika dibandingkan provinsi lain se Pulau Jawa yaitu 0,77 poin.

Tabel 2.23.
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi se Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2016 - 2017

No.	Provinsi	2016	2017	Kenaikan
1.	DKI Jakarta	79,60	80,06	0,46
2.	DI Yogyakarta	78,38	78,89	0,51
3.	Banten	70,96	71,42	0,46
4.	Jawa Barat	70,05	70,69	0,64
5.	Jawa Tengah	69,98	70,52	0,77
6.	Jawa Timur	69,74	70,27	0,53
	Nasional	70,18	70,81	0,63

Sumber : BPS, 2018

Sebaran IPM kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2017 menggambarkan bahwa Kabupaten Brebes adalah kabupaten dengan IPM terendah (64,86) dan tertinggi adalah Kota Semarang (82,01). Sebanyak 18 kabupaten di Jawa Tengah memiliki IPM lebih rendah dibandingkan Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Brebes, Pemalang, Banjarnegara, Tegal, Wonosobo, Batang, Blora, Purbalingga, Kebumen, Temanggung, Magelang, Pekalongan, Wonogiri, Grobogan, Cilacap, Rembang, Pati, dan Demak.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.28.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2017

Dari empat indikator pembentuk IPM di Jawa Tengah, seluruh indikator meningkat dalam lima tahun terakhir. Perkembangan IPM Jawa Tengah selama tahun 2013-2017 sebagai berikut.

Tabel 2.24.
IPM Provinsi Jawa Tengah Menurut Indikator Pembentuk Tahun 2013-2017

Komponen	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
Angka harapan hidup saat lahir (AHH)	Tahun	73,28	73,88	73,96	74,02	74,08
Harapan lama sekolah (HLS)	Tahun	11,89	12,17	12,38	12,45	12,57
Rata-rata lama sekolah (RLS)	Tahun	6,80	6,93	7,03	7,15	7,27
Pengeluaran per kapita disesuaikan	Rp.000	9.618	9.640	9.930	10.153	10.377
IPM	Angka	68,02	68,78	69,49	69,98	70,52
Pertumbuhan IPM	%	1,12	1,04	0,71	0,70	0,77

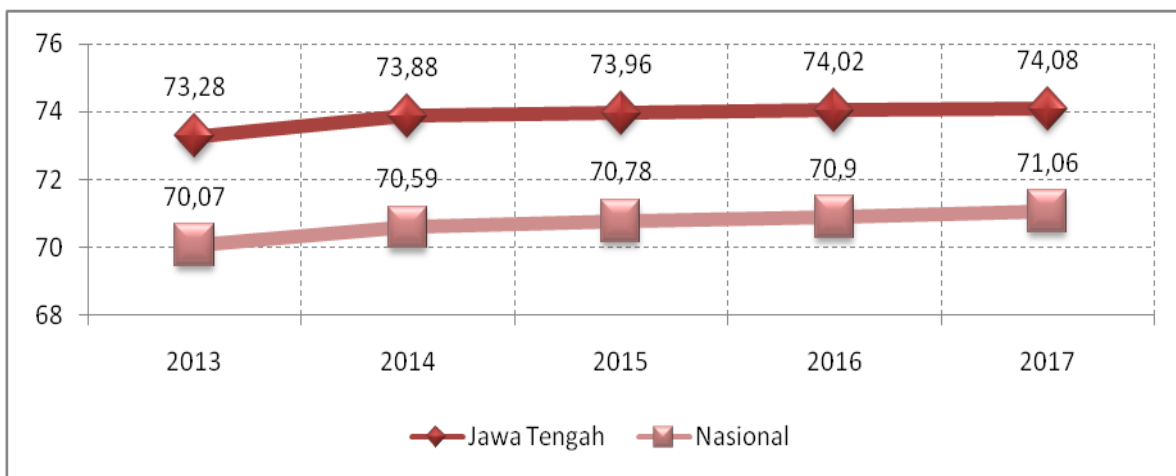
Sumber: BPS, 2018

Gambaran indikator pembentuk IPM Jawa Tengah secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh masyarakat sejak lahir yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Kualitas kesehatan masyarakat Jawa Tengah secara umum semakin membaik berdasarkan rata-rata usia harapan hidup yang semakin panjang. AHH Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir meningkat dari 73,28 tahun pada tahun 2013 menjadi 74,08 tahun pada tahun 2017. Angka tersebut menggambarkan bahwa secara rata-rata anak yang dilahirkan dapat bertahan hidup hingga usia 73 – 74 tahun.

Apabila dibandingkan dengan nasional selama kurun waktu 2013-2017, AHH Jawa Tengah lebih baik dari nasional. Tahun 2017, AHH Jawa Tengah sebesar 74,08 tahun lebih baik dibandingkan nasional (71,06 tahun). Perkembangan AHH Jawa Tengah dan Nasional tahun 2013-2017 dapat dilihat pada Gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.29.
Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2013-2017 (Tahun)

Dibandingkan dengan Provinsi se-Pulau Jawa, AHH Jawa Tengah tahun 2017 berada pada urutan 2 setelah DIY dan diatas DKI Jakarta, Jawa Barat,

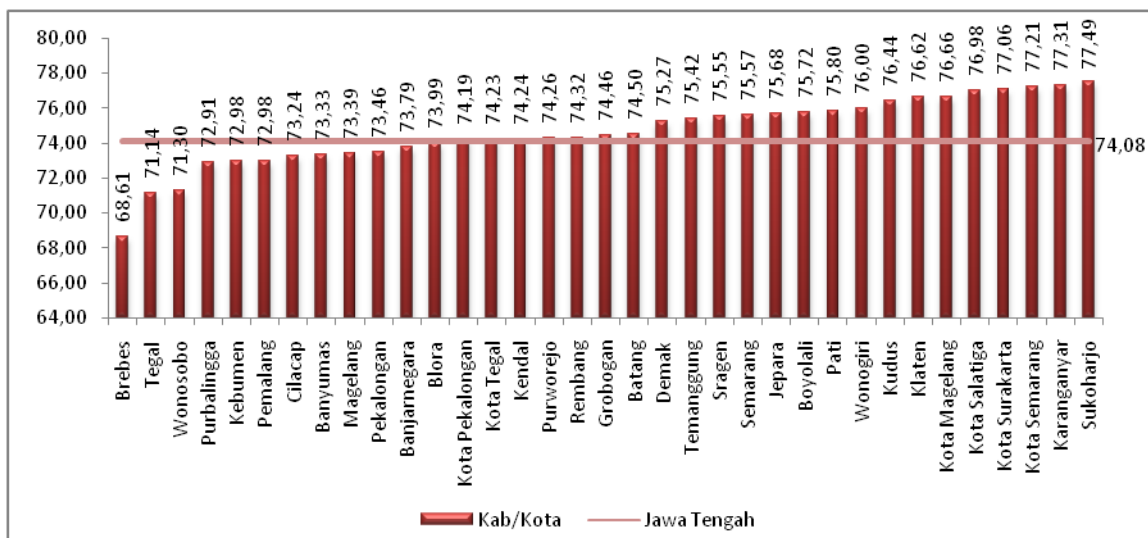
Jawa Timur dan Banten. AHH Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.25.
Angka Harapan Hidup Provinsi se-Pulau Jawa dan Nasional
Tahun 2013-2017 (Tahun)

No	Provinsi	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	DIY	74,45	74,50	74,68	74,71	74,74
2	Jawa Tengah	73,28	73,88	73,96	74,02	74,08
3	DKI Jakarta	72,19	72,27	72,43	72,49	72,55
4	Jawa Barat	72,09	72,22	72,41	72,44	72,47
5	Jawa Timur	70,34	70,45	70,68	70,74	70,80
6	Banten	69,04	69,13	69,43	69,46	69,49
	Nasional	70,07	70,59	70,78	70,90	71,06

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Melihat sebaran kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2017, tercatat Kabupaten Brebes adalah kabupaten dengan AHH terendah di Jawa Tengah (68,61 tahun), dan tertinggi adalah Kabupaten Sukoharjo (77,49 tahun). Ada 17 kabupaten yang memiliki AHH lebih rendah dari Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Brebes, Tegal, Wonosobo, Purbalingga, Kebumen, Pemalang, Cilacap, Banyumas, Magelang, Pekalongan, Banjarnegara, Blora, Kota Pekalongan, Kota Tegal, Kendal, Purworejo, Rembang, Grobogan, Batang, Demak, Temanggung, Sragen, Semarang, Jepara, Boyolali, Pati, Wonogiri, Kudus, Klaten, Kota Magelang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Kota Semarang, Karanganyar, dan Sukoharjo.



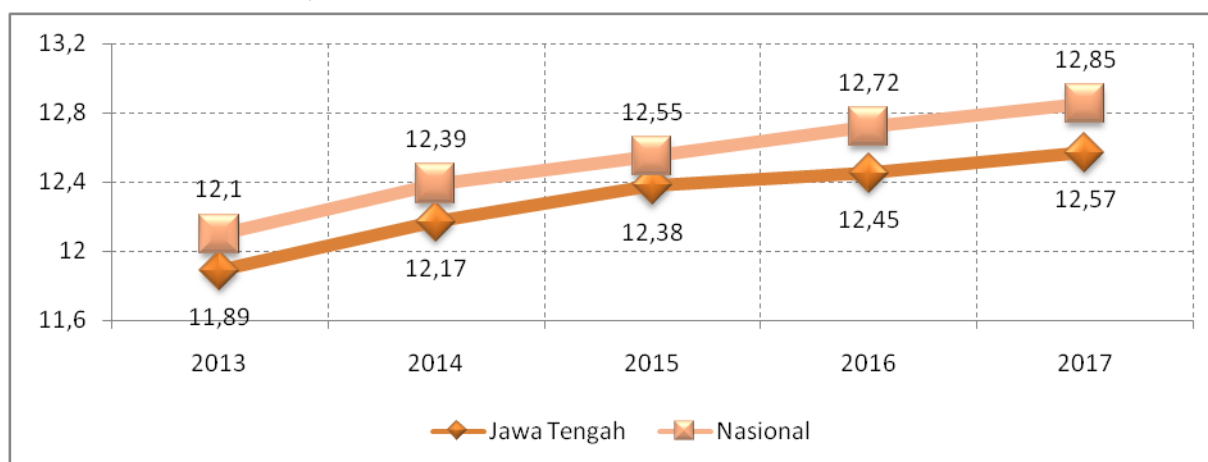
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.30.
Angka Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017
(Tahun)

2. Angka Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Perkembangan HLS di Jawa Tengah terus meningkat dari sebesar 11,89 (tahun 2013) menjadi 12,57 (tahun 2017). Namun demikian, apabila dibandingkan dengan nasional, HLS Jawa Tengah dibawah HLS

nasional. Tahun 2017, HLS Jawa Tengah sebesar 12,57 tahun, sementara nasional sebesar 12,85 tahun.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.31.

Harapan Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2013-2017 (Tahun)

Dibandingkan dengan Provinsi se-Pulau Jawa, HLS Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 berada pada urutan 5 setelah DIY, Jawa Timur, DKI Jakarta, Banten, dan diatas Jawa Barat. HLS Provinsi di Pulau Jawa dan Nasional tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

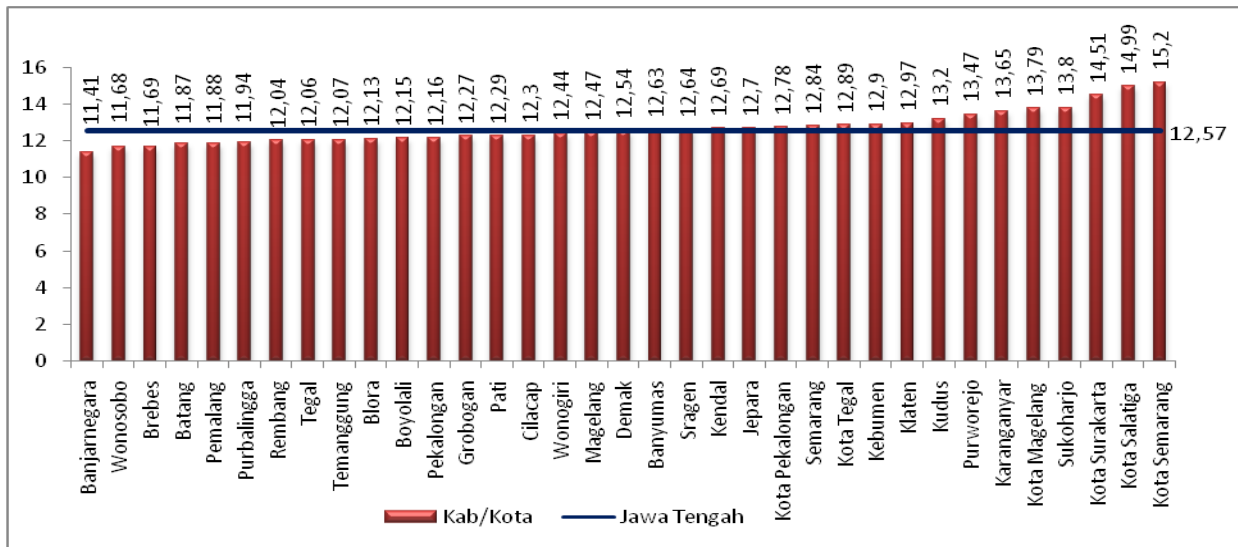
Tabel 2.26.

Harapan Lama Sekolah Provinsi se-Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2013-2017 (Tahun)

No	Provinsi	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	DIY	14,67	14,85	15,03	15,23	15,42
2	Jawa Timur	12,17	12,45	12,66	12,98	13,09
3	DKI Jakarta	12,24	12,38	12,59	12,73	12,86
4	Banten	12,05	12,31	12,35	12,70	12,78
5	Jawa Tengah	11,89	12,17	12,38	12,45	12,57
6	Jawa Barat	11,81	12,08	12,15	12,30	12,42
	Nasional	12,10	12,39	12,55	12,72	12,85

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Menurut kabupaten/kota di Jawa Tengah, HLS tahun 2017 capaian tertinggi adalah Kota Semarang (15,20 tahun), dan terendah adalah Kabupaten Banjarnegara (11,41 tahun). Sebanyak 18 kabupaten/kota angka harapan lama sekolahnya di atas rata-rata provinsi yaitu Kabupaten Banjarnegara, Wonosobo, Brebes, Batang, Pemalang, Purbalingga, Rembang, Tegal, Temanggung, Blora, Boyolali, Pekalongan, Grobogan, Pati, Cilacap, Wonogiri, Magelang, dan Demak.



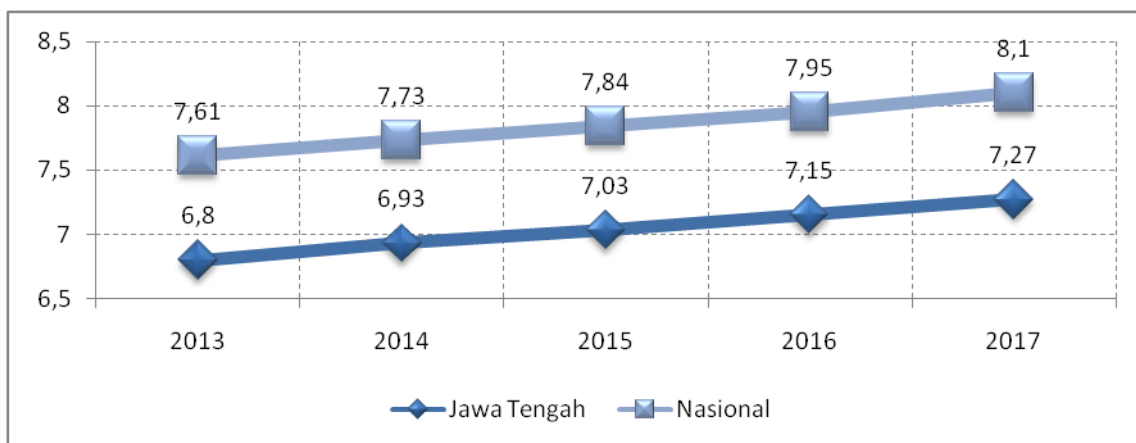
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.32.

Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017 (Tahun)

3. Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Cakupan penduduk yang dihitung dalam penghitungan rata-rata lama sekolah adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. RLS Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2013 - 2017 meningkat dari 6,80 tahun menjadi 7,27 tahun. Namun demikian, rata-rata lama sekolah Jawa Tengah masih dibawah nasional. Hal ini menggambarkan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas di Jawa Tengah menjalani jenjang pendidikan sampai tingkat SD atau maksimal SMP (kelas VII). Gambaran selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.33.

Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2013 - 2017 (Tahun)

Apabila disandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, rata-rata lama sekolah Provinsi Jawa Tengah berada pada posisi ke 6. Kedepan perlu ada upaya untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah di Jawa Tengah, agar setara dengan provinsi lain di Pulau Jawa.

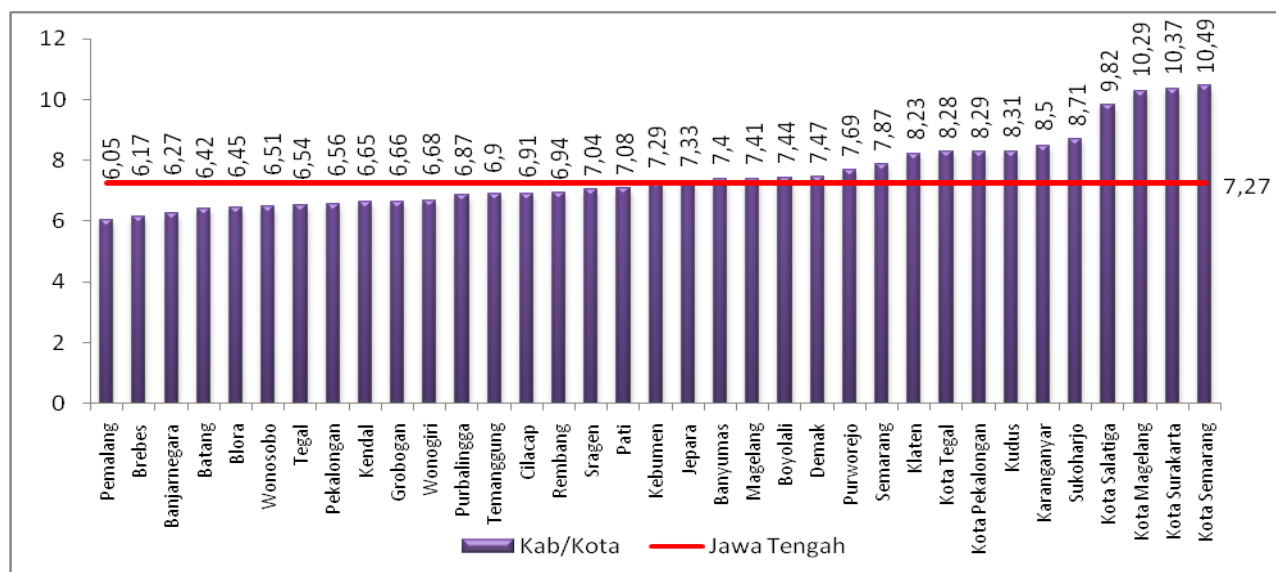
Tabel 2.27.

Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Provinsi se-Pulau Jawa Dan Nasional Tahun 2013–2017 (Tahun)

No	Provinsi	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	DKI Jakarta	10,47	10,54	10,7	10,88	11,02
2	DIY	8,72	8,84	9	9,12	9,19
3	Banten	8,17	8,19	8,27	8,37	8,53
4	Jawa Barat	7,58	7,71	7,86	7,95	8,14
5	Jawa Timur	6,90	7,05	7,14	7,23	7,34
6	Jawa Tengah	6,80	6,93	7,03	7,15	7,27
	Nasional	7,61	7,73	7,84	7,95	8,10

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Berdasarkan kabupaten/kota, Kota Semarang mencatat RLS tertinggi di Jawa Tengah tahun 2017 sebesar 10,49 tahun, dan terendah adalah Kabupaten Pemalang (6,05 tahun). Sebanyak 17 kabupaten, rata-rata lama sekolahnya dibawah provinsi yaitu Kabupaten Pemalang, Brebes, Banjarnegara, Batang, Blora, Wonosobo, Tegal, Pekalongan, Kendal, Grobogan, Wonogiri, Purbalingga, Temanggung, Cilacap, Rembang, Sragen, dan Pati.



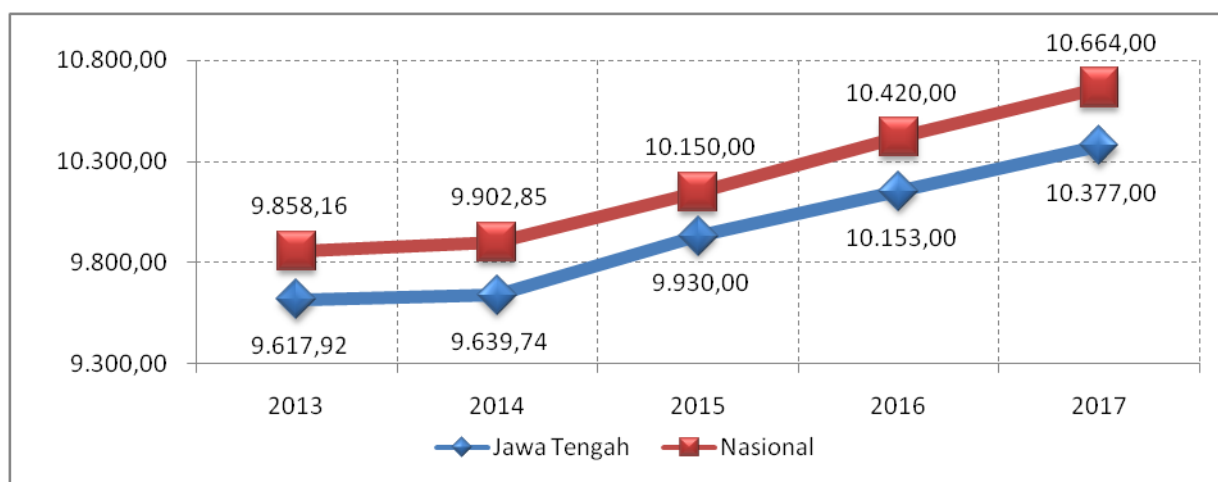
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.34.

Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017 (Tahun)

4. Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan

Pengeluaran per kapita (d disesuaikan) di Jawa Tengah mengalami peningkatan dari Rp.9.617,92 ribu pada tahun 2013 menjadi Rp.10.377 ribu pada tahun 2017. Kinerja tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengeluaran per kapita penduduk Jawa Tengah mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan taraf hidup masyarakat Jawa Tengah. Namun demikian, pengeluaran per kapita disesuaikan ini masih dibawah rata-rata nasional, dimana di tahun 2017 pengeluaran per kapita nasional sebesar Rp.10.664 ribu.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.35.

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2013-2017 (Ribu Rupiah)

Jika dibandingkan provinsi lain di Pulau Jawa pun, pengeluaran per kapita disesuaikan tahun 2017 masih berada di posisi ke-5 dibawah DKI Jakarta, DIY, Banten, dan Jawa Timur, namun lebih baik dibandingkan dengan Jawa Barat.

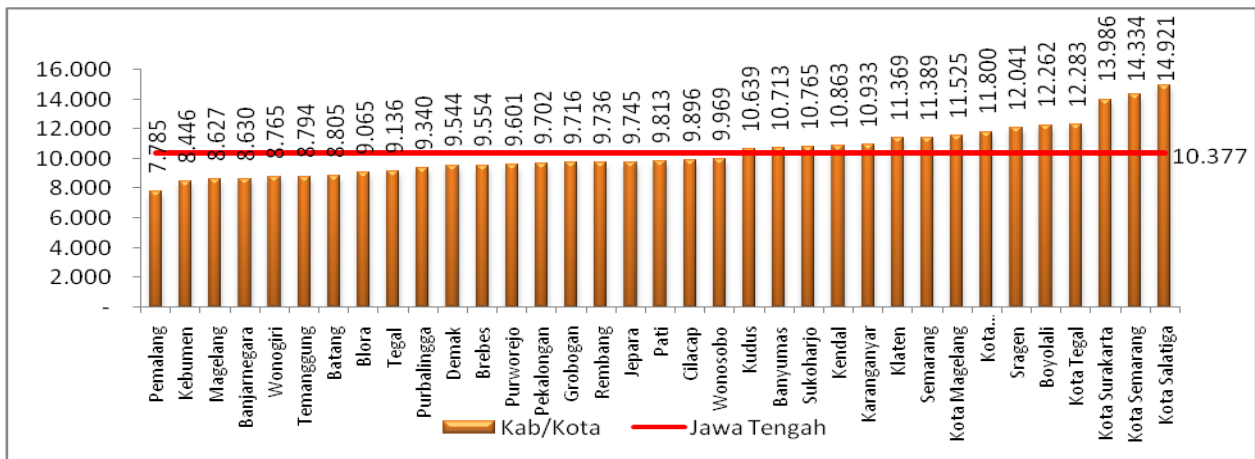
Tabel 2.28.

Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Provinsi se-Pulau Jawa dan Nasional Tahun 2013 – 2017 (Ribu Rupiah)

No	Provinsi	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	DKI Jakarta	16.827,58	16.897,51	17.075,43	17.468	17.707
2	DIY	12.260,52	12.294,43	12.684,24	13.229	13.521
3	Banten	11.061,34	11.150,00	11.261,48	11.469	11.659
4	Jawa Timur	9.978,00	10.012,16	10.383,37	10.715	10.973
5	Jawa Tengah	9.617,92	9.639,74	9.929,71	10.153	10.377
6	Jawa Barat	9.421,30	9.447,16	9.777,61	10.035	10.285
	Nasional	9.858,16	9.902,85	10.150,00	10.420	10.664

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

Sedangkan untuk kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2017, Kota Salatiga adalah kota dengan pengeluaran per kapita disesuaikan tertinggi di Jawa Tengah sebesar Rp.14.921.000, sedangkan terendah Kabupaten Pemalang sebesar Rp.7.785.000. Sebanyak 20 kabupaten memiliki pengeluaran per kapita disesuaikan lebih rendah daripada provinsi yaitu Kabupaten Pemalang, Kebumen, Magelang, Banjarnegara, Wonogiri, Temanggung, Batang, Blora, Tegal, Purbalingga, Demak, Brebes, Purworejo, Pekalongan, Grobogan, Rembang, Jepara, Pati, Cilacap, dan Wonosobo.



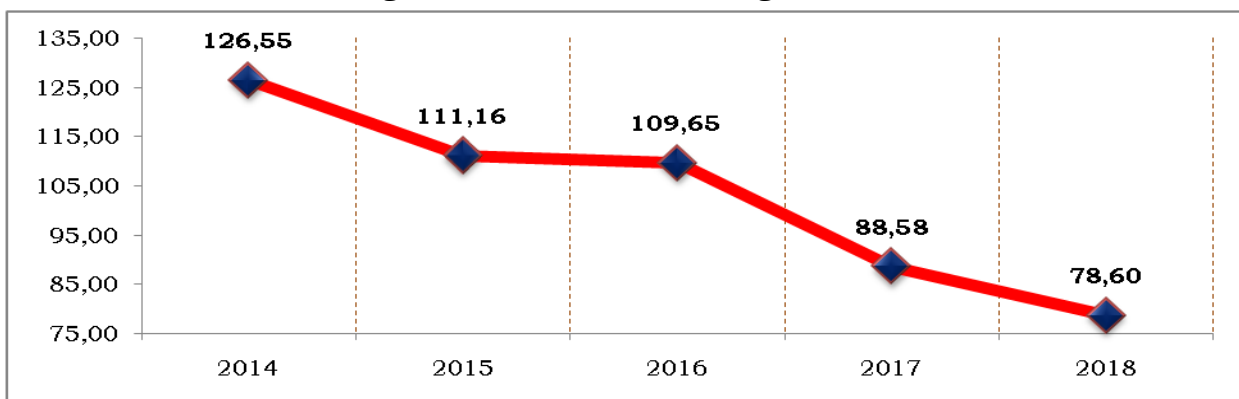
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.36.
Pengeluaran Per Kapita Disesuaikan Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2017 (Ribu Rupiah)

2.2.10. Angka Kematian Ibu (AKI)

Sasaran prioritas pembangunan kesehatan salah satunya adalah ibu dan anak karena merupakan kelompok rentan yang perlu menjadi fokus perhatian pembangunan kesehatan. Salah satu indikatornya adalah Angka Kematian Ibu (AKI) yang mencerminkan banyaknya ibu yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

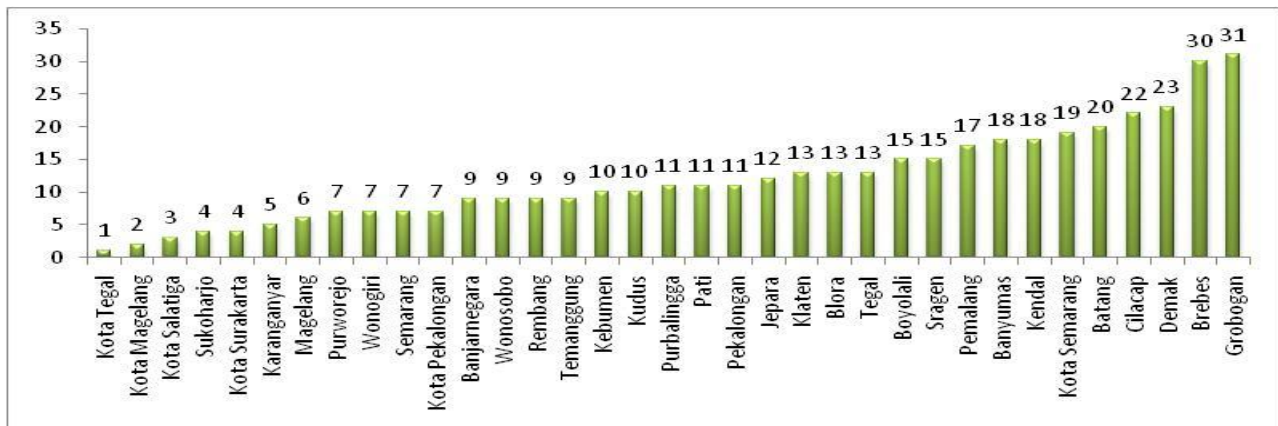
Angka Kematian Ibu (AKI) Jawa Tengah selama tahun 2014-2018 terus menurun yaitu dari angka 126,55/100.000 KH di tahun 2014 menjadi 78,60/100.000 KH di tahun 2017. Beberapa penyebab masih ditemukannya kasus kematian ibu melahirkan dan nifas antara lain pendarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, gangguan sistem peredaran darah, dan gangguan metabolisme. Selain itu penyebab kematian ibu juga tidak terlepas dari ketepatan waktu dalam mengakses ke pelayanan kesehatan ibu yang dilatarbelakangi oleh terlambat mengenali tanda bahaya dan mengambil keputusan. Perkembangan kondisi AKI Provinsi Jawa Tengah kurun waktu tahun 2014 - 2018 sebagaimana terlihat dalam gambar berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.37.
Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

Selanjutnya apabila dilihat dari kondisi kasus kematian ibu di kabupaten/kota se-Jawa Tengah tahun 2018, terdapat 5 kabupaten dengan kasus kematian ibu terbanyak yaitu Kabupaten Grobogan, Brebes, Demak, Cilacap, dan Batang. Secara rinci kasus kematian ibu di kabupaten/kota tahun 2018 tercantum dalam gambar berikut.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

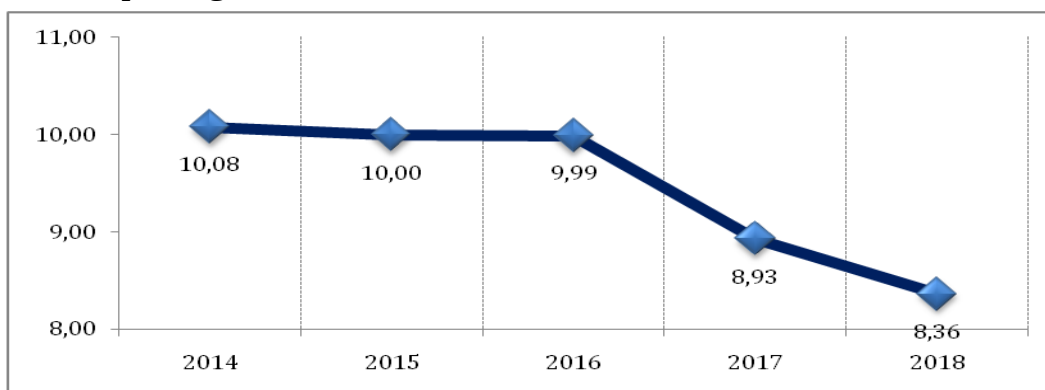
Gambar 2.38.

Kasus Kematian Ibu Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

2.2.11. Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0-11 bulan dari setiap 1.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup). Kematian bayi dapat disebabkan oleh kurangnya asupan gizi bayi selama dalam kandungan yang menyebabkan Berat Badan Lahir Rendah, kelainan konginetal pada bayi, dan komplikasi kehamilan.

Perkembangan AKB di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2014-2018 menunjukkan tren menurun dari 10,08 per 1.000 KH pada tahun 2014 menjadi 8,36 per 1.000 KH pada tahun 2018. Namun demikian masih diperlukan upaya penanganan untuk tetap menurunkan angka kematian bayi di Jawa Tengah antara melalui peningkatan pendampingan kelas ibu hamil dan balita, serta optimalisasi peran Posyandu. Kondisi AKB di Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.39.

Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

Pada tahun 2018 terdapat 5 (lima) kabupaten di Jawa Tengah dengan jumlah kasus kematian bayi tinggi yaitu Kabupaten Brebes, Grobogan, Banjarnegara, Banyumas, dan Tegal. Sementara Kota Magelang dan Salatiga adalah kota dengan kasus kematian bayi terendah di Jawa Tengah.



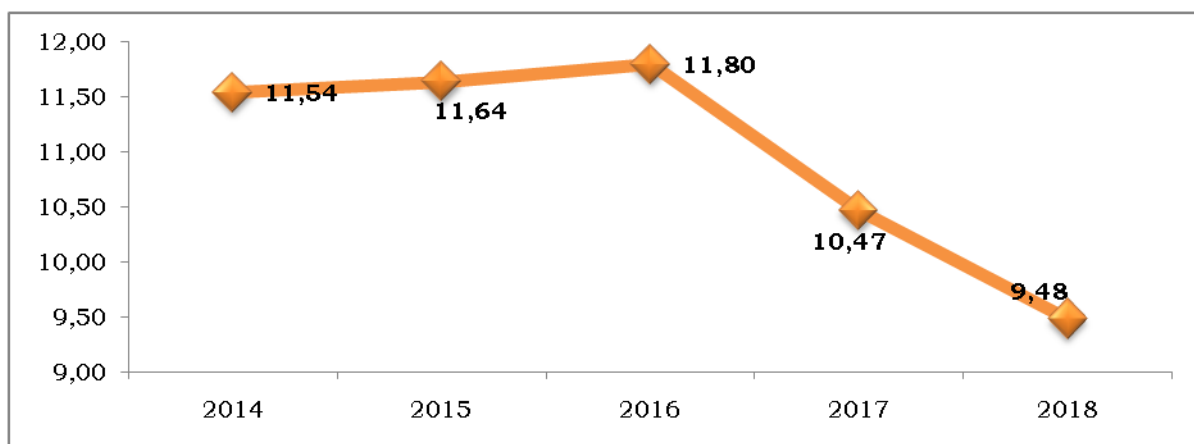
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.40.

Kasus Kematian Bayi Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

2.2.12. Angka Kematian Balita (AKABA)

AKABA menggambarkan jumlah anak yang dilahirkan pada tahun tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun per 1.000 KH. Perkembangan AKABA di Jawa Tengah selama tahun 2014-2018 mengalami tren yang menurun. Pada tahun 2014, AKABA sebesar 11,54 per 1.000 KH menurun menjadi 9,48 per 1.000 KH. Beberapa penyebab kematian pada balita antara lain gizi buruk pada balita, kurangnya pemahaman orang tua terkait pentingnya deteksi dini penyakit menular dan tidak menular pada balita, serta rendahnya pemberian imunisasi pada balita. Kondisi AKABA di Jawa Tengah tahun 2014-2018 dapat dilihat pada gambar berikut.

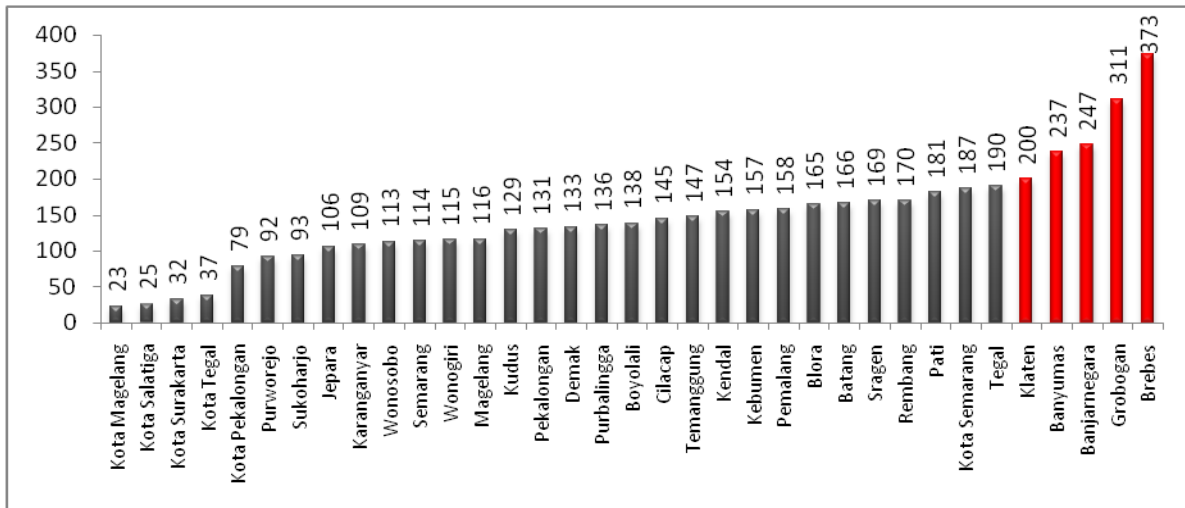


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.41.

Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

Sebaran kasus kematian balita pada kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2018 menunjukkan bahwa terdapat 5 (lima) kabupaten dengan kasus kematian balita tinggi yaitu Kabupaten Brebes, Grobogan, Banjarnegara, Banyumas, dan Klaten. Sementara jumlah kasus terendah ada di Kota Magelang dan Salatiga.



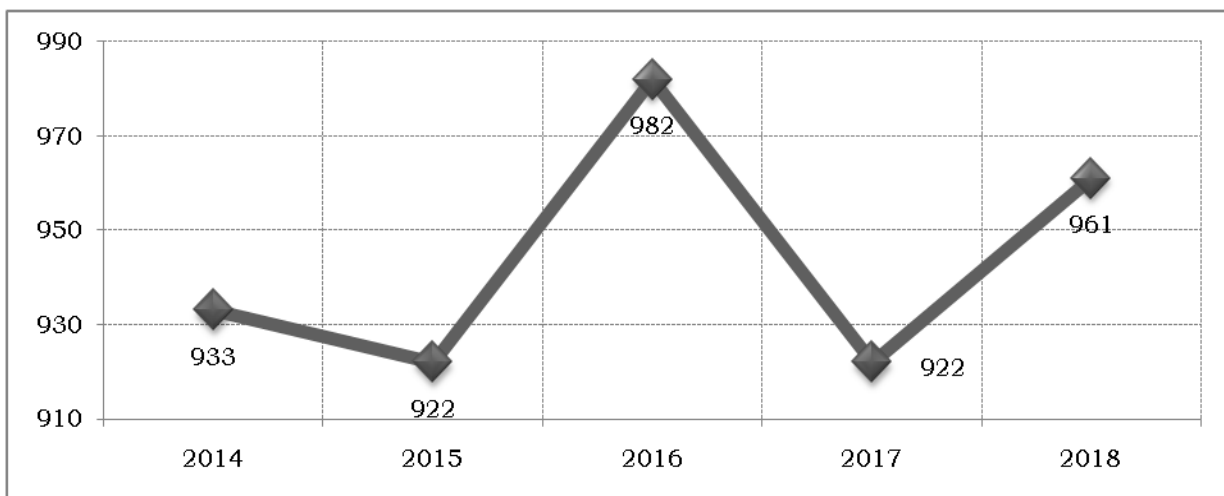
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.42.

Kasus Kematian Balita Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

2.2.13. Kasus Gizi Buruk dan *Stunting*

Kasus gizi buruk di Jawa Tengah masih cukup tinggi dari tahun ke tahun. Bahkan kecenderungannya sangat fluktuatif selama lima tahun terakhir. Tahun 2014, kasus gizi buruk di Jawa Tengah tercatat 933 kasus, dan di tahun 2018 tercatat meningkat menjadi 961 kasus. Beberapa hal telah diupayakan untuk mengurangi kasus gizi buruk antara lain melalui intensifikasi pemantauan tumbuh kembang balita di Posyandu dan dilanjutkan dengan penentuan status gizi oleh bidan di desa atau petugas kesehatan lainnya. Selain itu juga dilakukan pemberian makanan tambahan dan perawatan kepada balita gizi buruk.

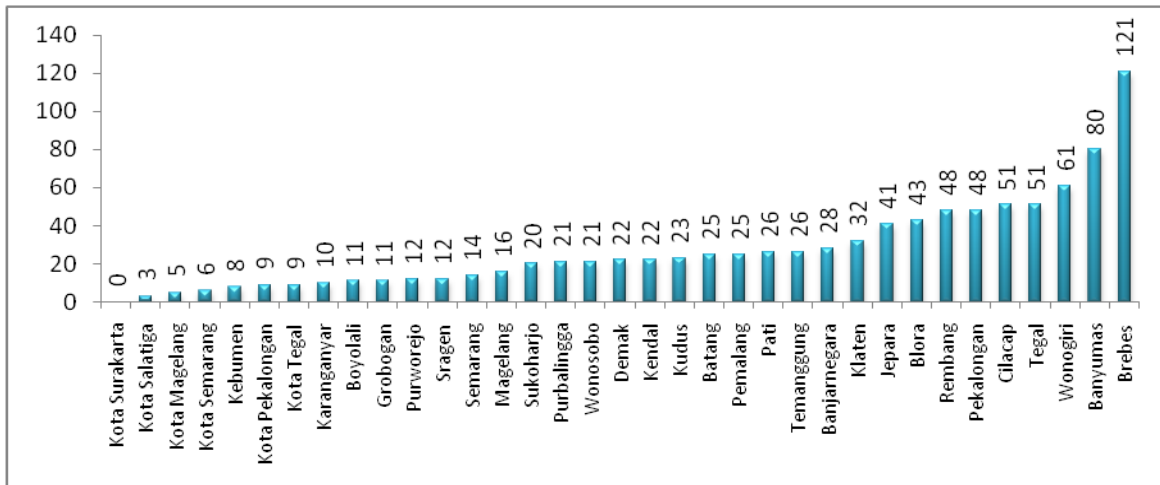


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.43.

Kasus Balita Gizi Buruk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

Sebaran kasus balita gizi buruk di kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2018, diketahui terdapat kabupaten dengan kasus balita gizi buruk yang masih tinggi yaitu Kabupaten Brebes, Banyumas, Wonogiri, Tegal, dan Cilacap. Sementara tidak tercatat ada kasus balita gizi buruk di Kota Surakarta pada tahun 2018.

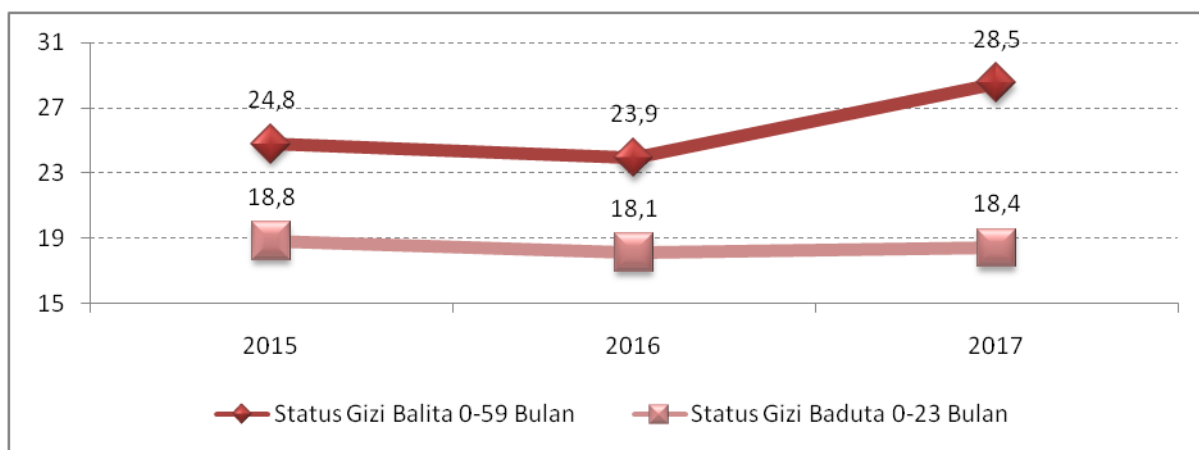


Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.44.

Kasus Balita Gizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Sedangkan terkait dengan kondisi *stunting* di Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) angka prevalensinya cenderung fluktuatif, dilihat dari pemantauan kondisi gizi pada balita usia 0-59 bulan dan baduta usia 0-23 bulan. Masih adanya kasus *stunting* di Jawa Tengah disebabkan oleh beberapa hal antara lain minimnya pengetahuan tentang pola pangan beragam, bergizi, berimbang sehat, dan aman, ditunjukkan dengan rendahnya angka rata-rata konsumsi energi, pola asuh orang tua terhadap balita, kurangnya pengetahuan tentang kesehatan reproduksi, risiko akibat pernikahan anak, serta kurangnya ketersediaan akses air minum layak, air bersih, dan sanitasi.

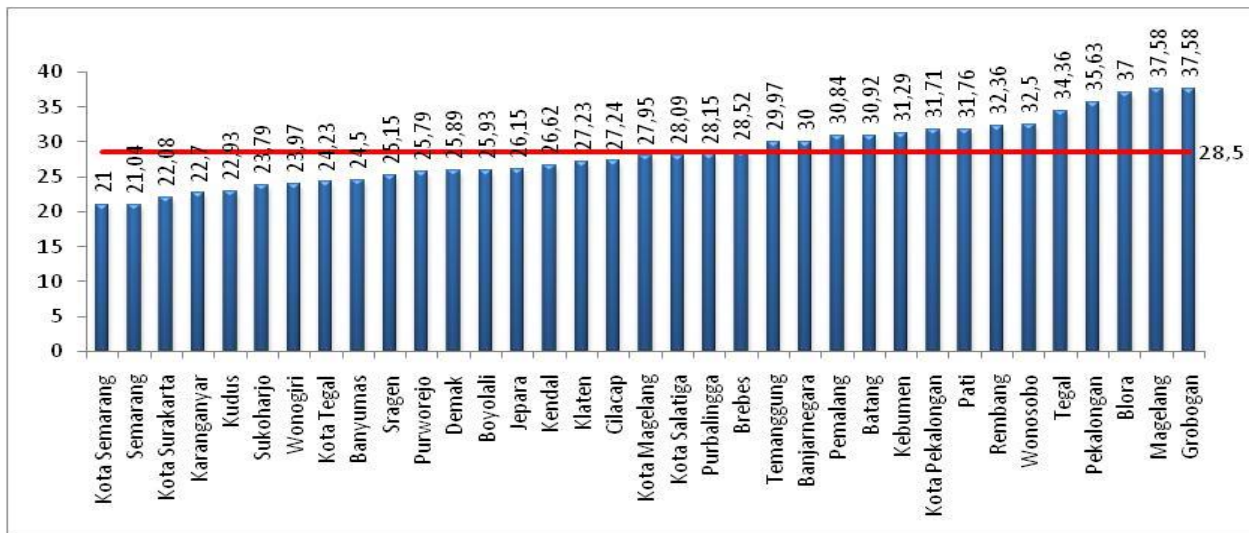


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.45.

Prevalensi Kasus Stunting di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017

Mendasarkan prevalensi *stunting* di kabupaten/kota tahun 2018, diketahui terdapat 14 kabupaten/kota berada diatas rata-rata provinsi yaitu Kabupaten Grobogan, Magelang, Blora, Pekalongan, Tegal, Wonosobo, Rembang, Pati, Kota Pekalongan, Kabupaten Kebumen, Batang, Pemalang, Banjarnegara dan Temanggung.



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.46.

Prevalensi *Stunting* Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Selain pemberian asupan gizi yang seimbang pada usia balita, perlu diperhatikan pula pemenuhan gizi pada bayi usia 0-6 bulan yaitu terhadap kebutuhan ASI Eksklusif. Tabel berikut menunjukkan kondisi pemenuhan ASI Eksklusif pada bayi usia 0-6 bulan.

Tabel 2.29.

Persentase Bayi Usia 0-6 Bulan Yang Mendapatkan ASI Eksklusif Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Bayi	Bayi yang diberi ASI Eksklusif	Cakupan (%)
2014	263.049	159.571	60,66
2015	556.900	342.994	61,59
2016	555.313	291.206	54,22
2017	464.647	252.784	54,40
2018	262.604	159.629	60,79

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Pemberian ASI Eksklusif dan asupan gizi seimbang pada balita merupakan salah satu paya untuk membentuk SDM berkualitas. Hal tersebut sekaligus menjawab tantangan bonus demografi dalam mempersiapkan SDM sejak usia dini agar nantinya menghasilkan SDM berkualitas dan memiliki daya saing.

2.2.14. Penyakit Menular dan Tidak Menular

Salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat adalah angka kesakitan dan kematian akibat penyakit, baik penyakit menular maupun penyakit tidak menular. Untuk itu penting dilakukan upaya pengendalian penyakit melalui upaya menurunkan insiden, prevalensi, morbiditas atau mortalitas dari suatu penyakit hingga level yang dapat diterima secara lokal.

Pengendalian penyakit menular dilakukan terhadap penyakit menular langsung, penyakit menular bersumber binatang, dan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sedangkan pengendalian penyakit tidak menular meliputi upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit tidak menular tertentu.

a. Kondisi Penyakit Menular

Penyakit menular yang menjadi sasaran prioritas program di Provinsi Jawa Tengah adalah TB, HIV/AIDS, dan Demam Berdarah *Dengue* (DBD). Angka kesakitan DBD (*Incidence Rate/IR DBD*) di Jawa Tengah mengalami penurunan pada tahun 2018 jika dibandingkan tahun 2014, namun tidak demikian dengan TB dan HIV/AIDS. Untuk kasus HIV/AIDS yang mengalami peningkatan penemuan kasus di tahun 2018 jika dibanding tahun 2014, dikarenakan semakin efektifnya pemanfaatan *Voluntary Conselling Test* (VCT) di Puskesmas dan Rumah Sakit. Namun disisi lain peningkatan angka tersebut mengindikasikan kondisi masyarakat yang kurang pemahaman tentang HIV/AIDS terutama pemahaman remaja terhadap akibat penyalahgunaan narkoba, serta adanya kecenderungan meningkatnya perilaku yang menyimpang. Peningkatan penemuan kasus TB juga merupakan salah satu ukuran kinerja pelayanan kesehatan yang semakin baik yang ditunjukkan dari peningkatan upaya deteksi dini petugas Puskesmas yang langsung turun ke masyarakat.

Tabel 2.30.

Kondisi Penyakit Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014–2018

Tahun	IR DBD per 100.000 penduduk	CFR DBD (%)	CNR TB (%)	SR TB (%)	HIV / AIDS	
					Kasus HIV	Kasus AIDS
2014	33,28	1,44	56	87,01	1.399	1.081
2015	47,9	1,56	117	>85	1.467	1.296
2016	43,4	1,46	118	68	1.402	1.867
2017	21,6	1,24	121	67,77	2.033	1.296
2018	8,68	1,25	143	77,13	2.654	1.879

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

b. Kondisi Penyakit Tidak Menular (PTM)

Kemajuan teknologi, mobilisasi penduduk, perilaku dan gaya hidup yang tidak sehat seperti kebiasaan merokok, diet tidak seimbang, kurang aktivitas fisik, dan konsumsi alkohol menjadi faktor risiko meningkatnya penyakit tidak menular di Jawa Tengah. Peningkatan PTM dapat mengakibatkan penurunan produktivas penduduk karena kasus PTM banyak ditemukan pada usia produktif seperti Hipertensi, *Diabetes Mellitus*, dan Kanker. Kondisi PTM di Jawa Tengah tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

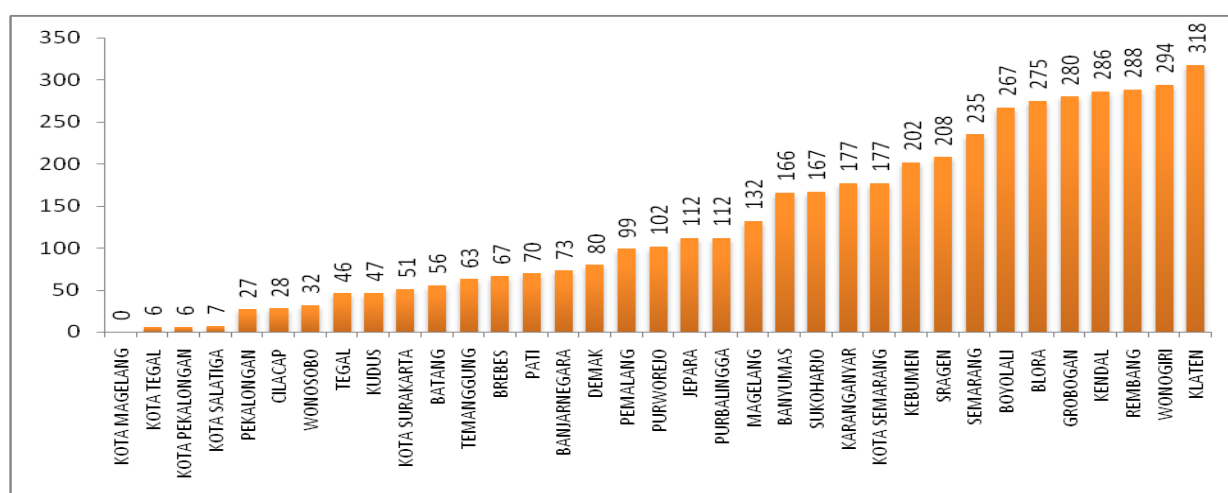
Tabel 2.31.**Kondisi Penyakit Tidak Menular Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018**

Tahun	Jenis PTM		
	Diabetes Milletus	Hipertensi	Kanker
2014	95.340	337.220	576
2015	100.448	324.320	5.801
2016	30.432	96.968	1.215
2017	94.890	262.327	4.099
2018	971.518	1.463.818	247.603

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

2.2.15. Kesehatan Lingkungan

Perilaku hidup sehat menjadi hal yang penting untuk ditanamkan pada masyarakat sejak mulai usia dini. Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan perilaku hidup sehat adalah melalui program *Open Defacation Free* (ODF) atau Bebas Buang Air Besar Sembarangan. Upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah provinsi adalah meningkatkan jumlah desa/kelurahan agar terverifikasi sebagai ODF melalui pemberian jamban kepada kepala keluarga. Tahun 2018, jumlah desa/kelurahan di Jawa Tengah yang diverifikasi sebagai ODF sebanyak 4.556 desa/kelurahan. Sebaran kabupaten/kota yang terverifikasi ODF di Jawa Tengah tahun 2018 sebagaimana gambar berikut.

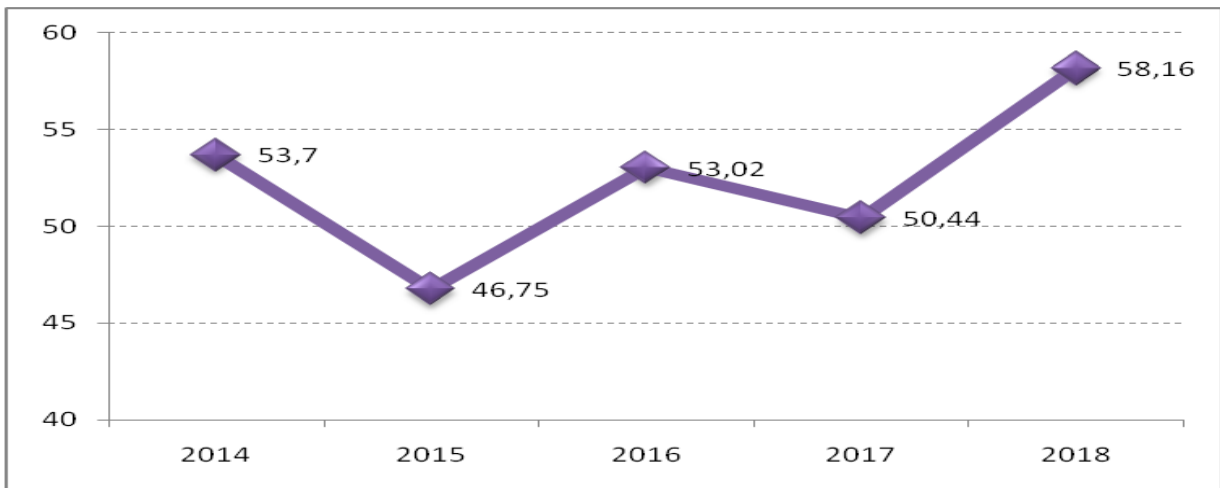


Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.47.**Sebaran Desa/Kelurahan Di Provinsi Jawa Tengah Yang Terverifikasi ODF Tahun 2018****2.2.16. Kesehatan Usia Lanjut**

Dalam rangka menyikapi bonus demografi, penduduk usia lanjut (penduduk usia 60 tahun keatas) lima tahun kedepan yang jumlahnya diperkirakan sebanyak 6.170.114 jiwa perlu mendapat perhatian dalam pelayanan kesehatan perorangan dan rujukan agar lansia dapat tetap menjalani aktivitas fisik, menjaga kesehatan, tidak menggantungkan kepada orang lain dalam kehidupan bahkan masih bisa produktif. Perkembangan cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut di Jawa Tengah pada tahun 2018

sebesar 58,16 persen mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 50,44 persen. Peningkatan pelayanan kesehatan lanjut usia terus dilakukan antara lain melalui penguatan promosi kesehatan, meningkatkan akses pelayanan kesehatan lanjut usia, pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat dan mandiri di usia lanjut, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM yang terlibat dalam upaya kesehatan lanjut usia. Perkembangan pelayanan kesehatan usia lanjut di Jawa Tengah tahun 2014 – 2018 sebagaimana gambar berikut.



Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

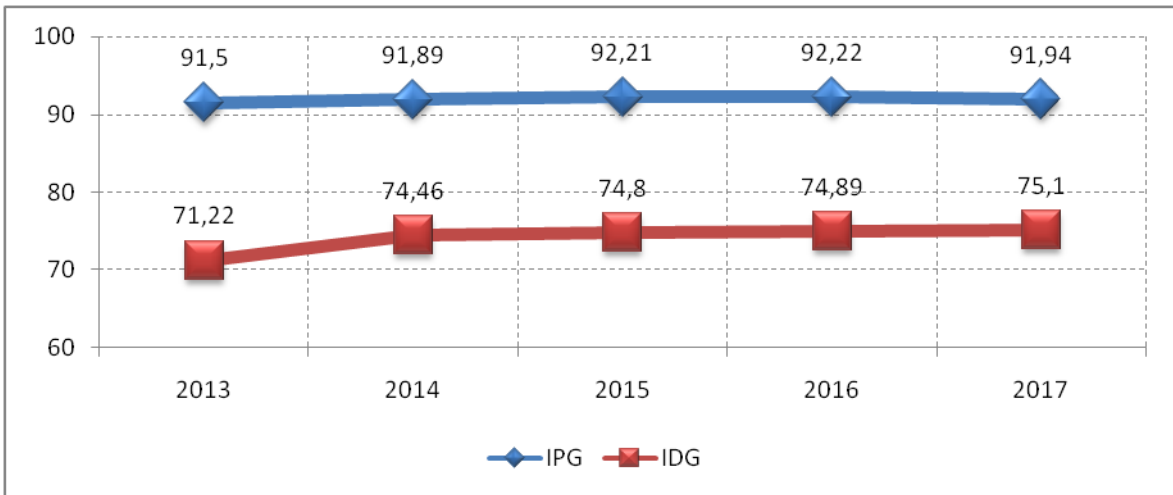
Gambar 2.48.

Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 (%)

2.2.17. Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Peningkatan kualitas hidup perempuan diperlukan dalam rangka pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan yang juga menjadi salah satu tujuan pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDG's). Kondisi kesetaraan gender dapat dilihat dari indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. Sebagai upaya peningkatan pencapaian kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dilakukan melalui pemberdayaan perempuan di bidang politik, ketenagakerjaan dan ekonomi yang ditunjukkan pada capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG).

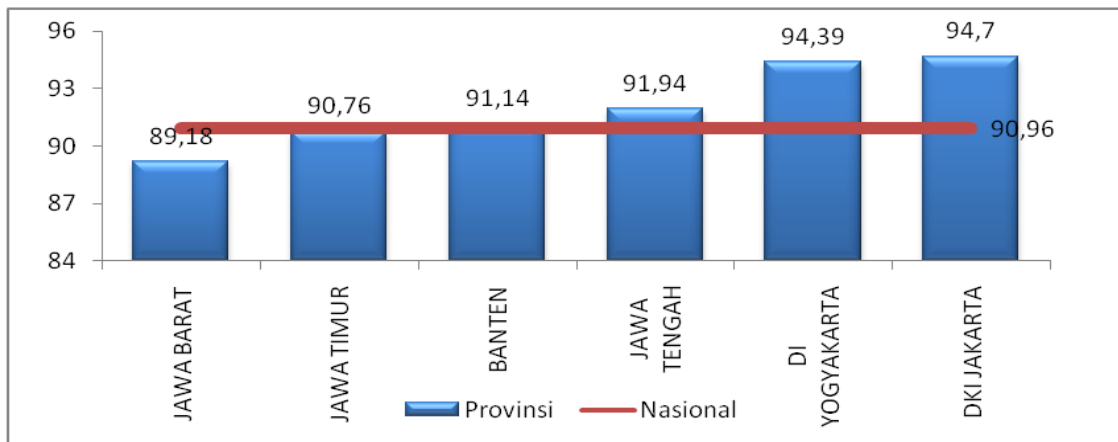
Capaian IPG maupun IDG selama periode 2013-2017 menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Angka IPG sebesar 91,94 di tahun 2017 lebih baik dibandingkan tahun 2013 sebesar 91,5. Demikian pula dengan capaian IDG yang mengalami peningkatan yaitu tahun 2013 sebesar 71,22 menjadi 75,1 pada tahun 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa pembangunan berbasis gender di Jawa Tengah kian membaik.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

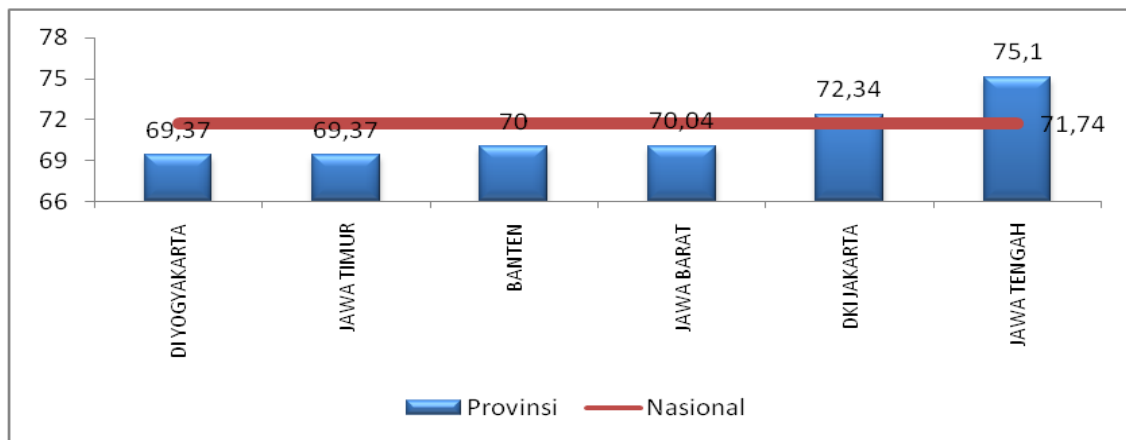
Gambar 2.49.
IPG dan IDG Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017

Apabila dibandingkan dengan provinsi lain se Pulau Jawa, IPG Jawa Tengah tahun 2017 berada di posisi ketiga dibawah DKI Jakarta dan DIY, dan lebih baik dari nasional. Sedangkan IDG Jawa Tengah tahun 2017 tertinggi apabila dibandingkan dengan provinsi lain se Pulau Jawa.



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Gambar 2.50.
IPG Jawa Tengah, Provinsi Se Pulau Jawa, dan Nasional Tahun 2017

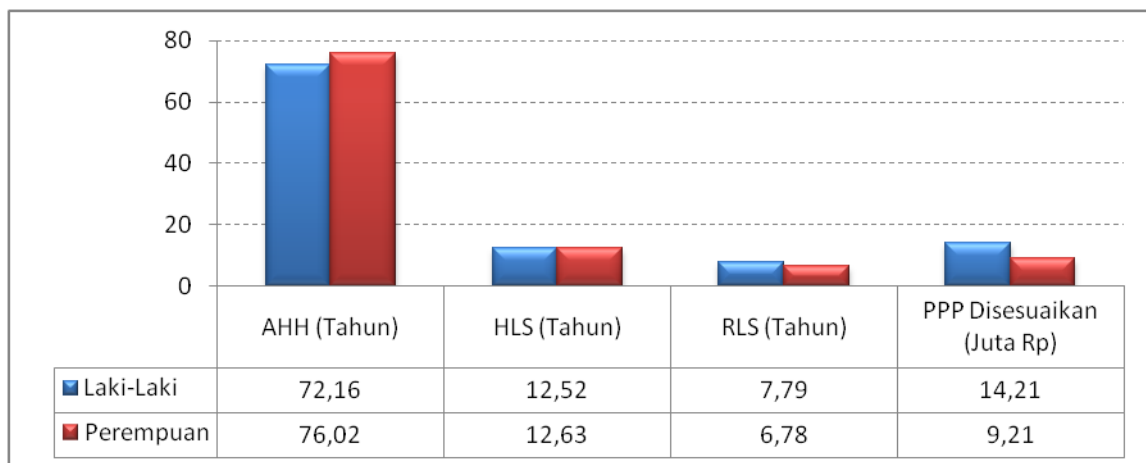


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Gambar 2.51.
IDG Jawa Tengah, Provinsi Se Pulau Jawa, dan Nasional Tahun 2017

Meskipun tren perkembangan pembangunan berbasis gender menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, Jawa Tengah ke depan masih dihadapkan pada tantangan pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan gender. Berbagai persoalan yang masih perlu menjadi perhatian ke depan antara lain masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS), kurangnya peran serta perempuan khususnya di bidang politik, serta tingginya kesenjangan pendapatan antara perempuan dan laki-laki.

Berdasarkan komponen pembentuk IPG tahun 2017, diketahui bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) perempuan lebih baik dibandingkan laki-laki. Sedangkan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan perempuan lebih rendah dibandingkan laki-laki. Rata-rata lama sekolah perempuan tahun 2017 sebesar 6,78 tahun lebih rendah dibandingkan laki-laki yaitu 7,79 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di atas 25 tahun bersekolah hanya sampai tingkat SD kelas VI. Sedangkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar 9,21 juta rupiah per kapita per tahun, jauh di bawah laki-laki sebesar 14,21 juta rupiah per kapita per tahun. Rata-rata lama sekolah perempuan lebih rendah daripada laki-laki dikarenakan antara lain masih adanya budaya patriarki (menempatkan kedudukan/hak laki-laki lebih tinggi daripada perempuan) termasuk hak mendapatkan pendidikan formal, serta masih dijumpainya pernikahan usia anak di beberapa daerah yang mengakibatkan putus sekolah pada anak perempuan. Sedangkan ketimpangan pengeluaran perkapita yang disesuaikan disebabkan antara lain kompetensi perempuan yang masih rendah, dan akses ekonomi terhadap perempuan masih terbatas, sehingga masih belum bisa bersaing dengan laki-laki.

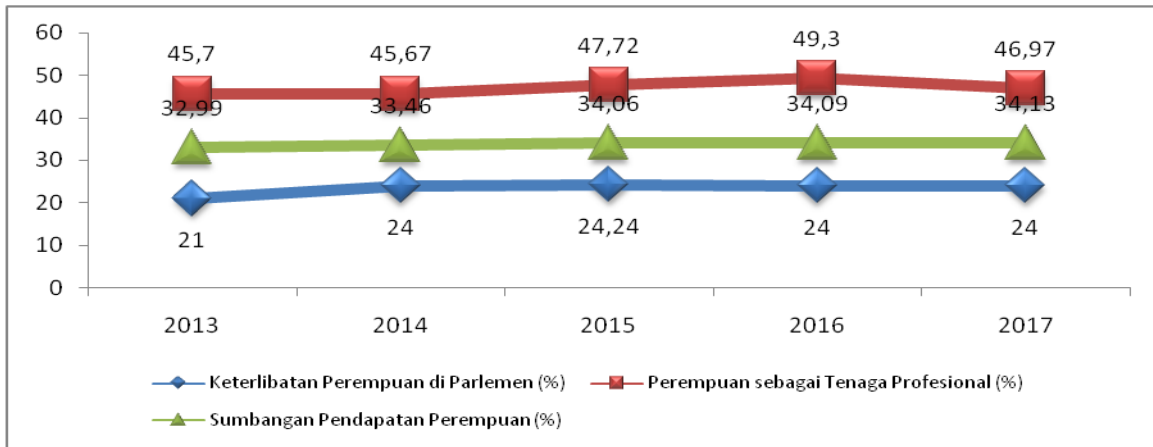


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Gambar 2.52.

IPG Provinsi Jawa Tengah Beserta Komponen Pembentuknya Tahun 2017

Apabila dilihat dari indikator pembentuk IDG selama tahun 2013-2017 trennya terus meningkat kecuali keterlibatan perempuan dalam parlemen yang cenderung tetap (pemilihan legislatif lima tahun sekali).



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Gambar 2.53.

IDG Provinsi Jawa Tengah Beserta Komponen Pembentuknya Tahun 2013-2017

Sebagaimana komponen pembentuk IDG di atas diketahui bahwa peran perempuan dalam berbagai sektor masih lemah yang disebabkan antara lain masih rendahnya tingkat pendidikan formal dan tingkat pengetahuan dalam berdemokrasi serta akses ekonomi yang terbatas.

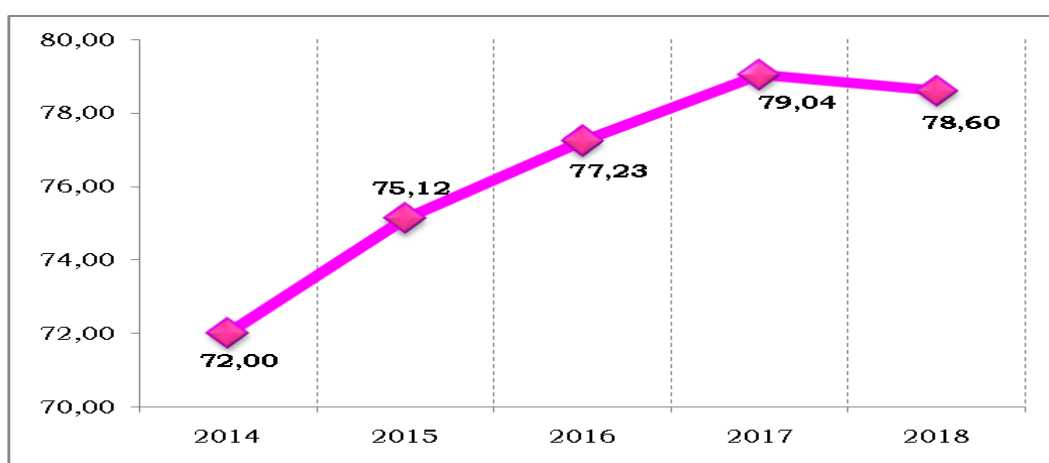
2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.3.1 Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Pada tahun 2014-2018, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD di Jawa Tengah mengalami peningkatan, dari 72,00 menjadi 78,60. Bahkan apabila dibandingkan dengan nasional, APK PAUD Jawa Tengah dalam lima tahun terakhir selalu lebih baik dibandingkan nasional. Namun demikian APK PAUD ini tetap perlu ditingkatkan guna mendukung upaya perwujudan pendidikan untuk semua di Jawa Tengah.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.54.

APK PAUD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

Tabel 2.32.**APK PAUD Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2018**

No	Tahun	APK	
		Provinsi	Nasional
1	2014	72,00	65,16
2	2015	75,12	68,10
3	2016	77,23	70,06
4	2017	79,04	72,35
5	2018	78,60	74,30

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

b. Pendidikan Dasar

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

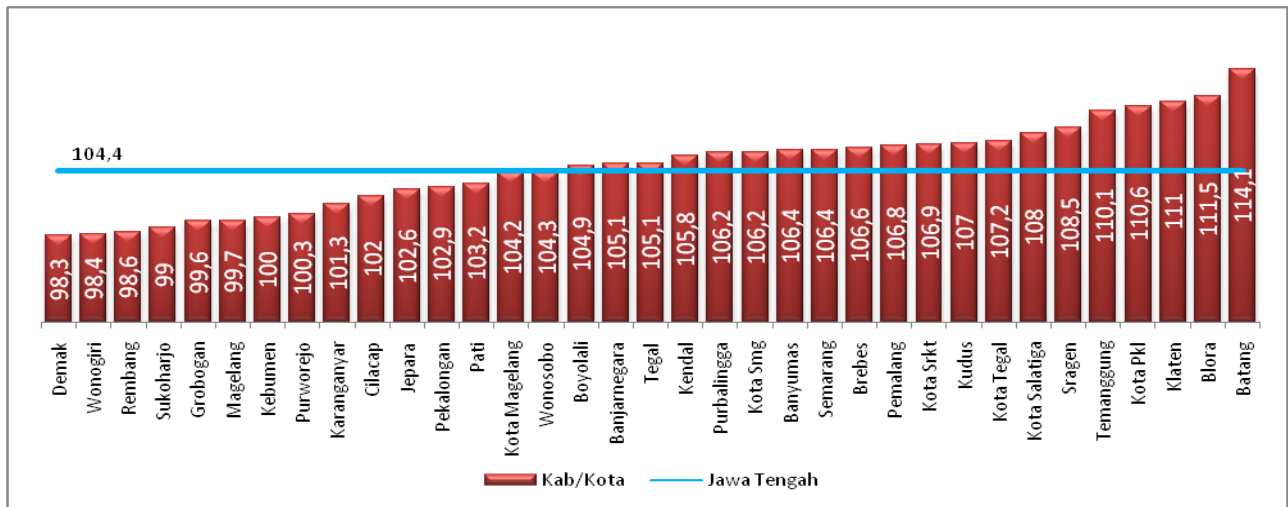
Pada tahun 2014-2018, capaian APK pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan dari 109,10 di tahun 2014 menjadi 104,40 di tahun 2018. APK SMP/MTs juga menurun pada periode tahun yang sama dari 100,54 menjadi 99,80. Jika dibandingkan dengan nasional, terutama di tahun 2018, APK SD/MI maupun APK SMP/MTs Jawa Tengah lebih rendah dibandingkan nasional. Beberapa penyebab APK Jawa Tengah belum optimal antara lain kemampuan ekonomi masyarakat, terjadi putus sekolah di SD/MI dan SMP/MTS, juga beberapa anak usia SMP/MTS telah bersekolah dijenjang SMA/SMK/MA.

Tabel 2.33.**APK Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2018**

No	Tahun	SD / MI (%)		SMP / MTs (%)	
		Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional
1	2014	109,10	110,68	100,54	96,91
2	2015	109,31	109,05	100,69	100,51
3	2016	109,46	108,00	100,72	100,72
4	2017	109,47	106,44	100,73	101,05
5	2018	104,40	105,09	99,80	102,10

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

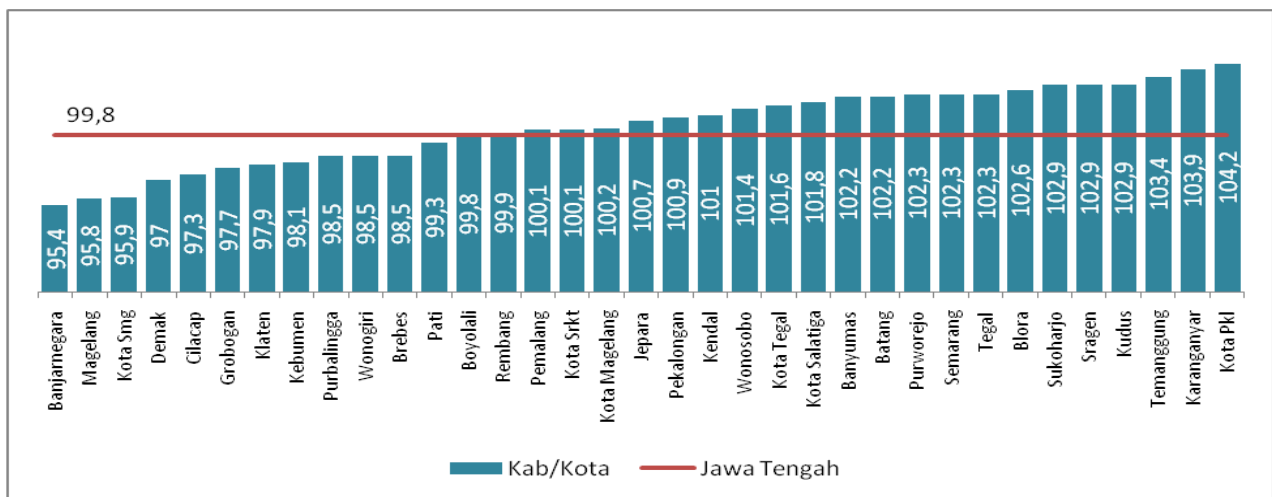
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI di Jawa Tengah menurut kabupaten/kota pada tahun 2018, tertinggi adalah Kabupaten Batang (114,1), dan terendah adalah Kabupaten Demak (98,3). Sedangkan APK SMP/MTs, tertinggi adalah Kota Pekalongan (104,2) dan terendah adalah Kabupaten Banjarnegara (95,4).



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.55.

APK SD/MI Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.56.

APK SMP/MTs Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

APM merupakan perbandingan antara jumlah anak sekolah masing-masing jenjang pendidikan dengan jumlah penduduk pada usia tertentu. Pada tahun 2014-2018, capaian APM pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan dari 98,32 menjadi 91,70. Sedangkan APM SMP/MTs meningkat dari 77,83 menjadi 77,00. Jika dibandingkan dengan capaian APM nasional sampai dengan tahun 2017, baik SD/MI maupun SMP/MTS capaian Jawa Tengah lebih tinggi. Namun kondisi sebaliknya terjadi di tahun 2018.

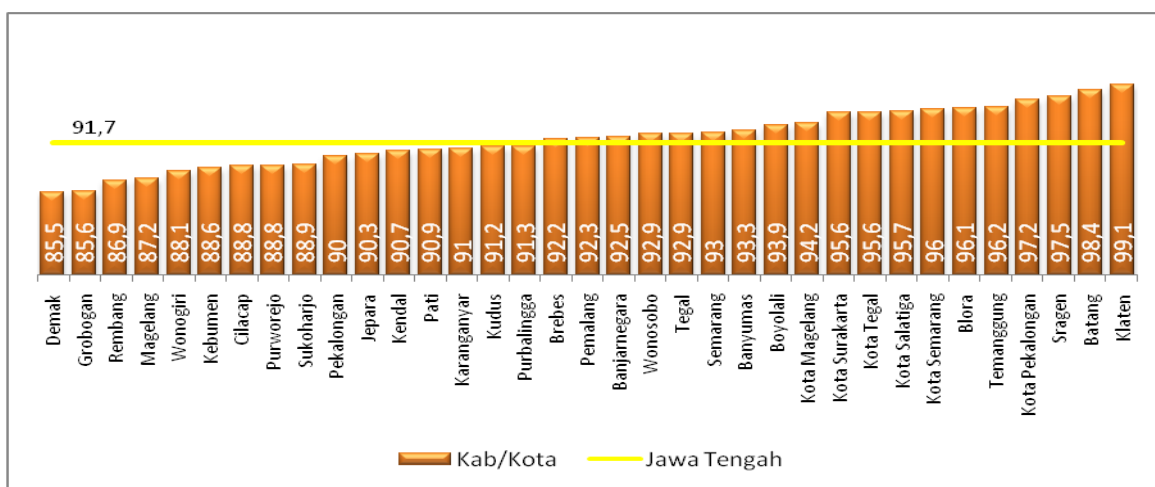
Tabel 2.34.

APM Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2018

No	Tahun	SD/MI		SMP/MTs	
		Provinsi	Nasional	Provinsi	Nasional
1	2014	98,32	93,30	77,83	76,55
2	2015	98,43	93,53	79,51	80,76
3	2016	98,95	93,38	80,09	81,01
4	2017	98,97	93,73	80,11	76,29
5	2018	91,70	93,00	75,50	77,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

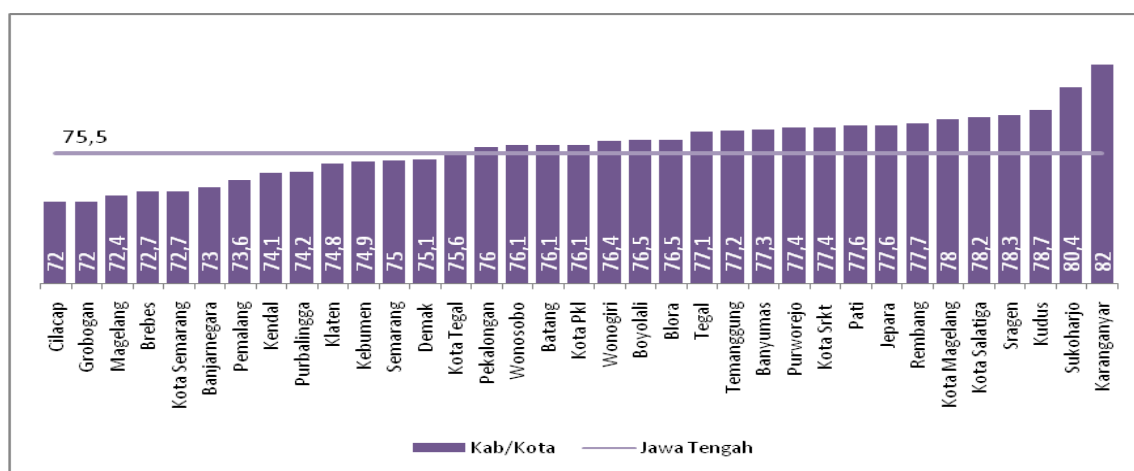
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI di Jawa Tengah menurut kabupaten/kota pada tahun 2017, terlihat capaian tertinggi adalah Kota Salatiga (125,53), dan terendah Kabupaten Banjarnegara (96,06). Sedangkan APM SMP/MTs di Jawa Tengah pada tahun 2017, terlihat capaian tertinggi adalah Kota Tegal (104,41), dan terendah Kabupaten Kendal (75,01). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.57.

APM SD/MI Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.58.

APM SMP/MTs Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

3) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Capaian APS tahun 2013-2017 pada usia 7-12 tahun cenderung meningkat, dari 99,28 (tahun 2013) menjadi 99,62 (tahun 2017). Pada usia 13-15 tahun, APS meningkat dari 90,73 menjadi 95,48. Perkembangan APS di Jawa Tengah sebagaimana berikut.

Tabel 2.35.
Angka Partisipasi Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI (7-12 th)	99,51	99,56	99,58	99,62	99,70
2	SMP/MTs (13-15 th)	94,85	95,30	95,41	95,48	95,68

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Selama tahun 2013-2017, APS usia 7-12 tahun Provinsi Jawa Tengah selalu lebih baik dibandingkan nasional. Dan di tahun 2017, apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa, Jawa Tengah menempati posisi ke-3 dalam capaian APS usia 7-12 tahun.

Tabel 2.36.
Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 Tahun Provinsi se-Pulau Jawa Dan
Nasional Tahun 2013 - 2017

No	Provinsi/Nasional	2013	2014	2015	2016	2017
1.	D.I. Yogyakarta	99,96	99,94	99,89	99,84	99,87
2.	DKI Jakarta	99,40	99,47	99,56	99,61	99,67
3.	Jawa Tengah	99,28	99,51	99,56	99,58	99,62
4.	Jawa Timur	98,60	99,36	99,45	99,66	99,57
5.	Jawa Barat	98,85	99,30	99,57	99,54	99,51
6.	Banten	99,05	99,29	99,41	99,43	99,31
	Nasional	98,42	98,92	99,09	99,09	99,14

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

Sementara itu untuk capaian APS usia 13-15 tahun dalam lima tahun terakhir Provinsi Jawa Tengah selalu lebih baik dibandingkan nasional. Namun di tahun 2017, apabila dibandingkan dengan provinsi lain se Pulau Jawa, APS usia 13-15 tahun Jawa Tengah menempati posisi ke-5.

Tabel 2.37.
Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 Tahun Provinsi se-Pulau Jawa Dan
Nasional Tahun 2013-2017

No	Provinsi/Nasional	2013	2014	2015	2016	2017
1.	D.I. Yogyakarta	96,79	99,48	99,68	99,62	99,63
2.	DKI Jakarta	95,47	96,69	97,19	97,47	97,64
3.	Jawa Timur	91,32	96,36	96,53	96,69	96,77
4.	Banten	92,83	94,87	95,29	95,59	95,67
5.	Jawa Tengah	90,73	94,85	95,30	95,41	95,48
6.	Jawa Barat	89,40	92,84	95,19	93,41	93,77
	Nasional	90,81	94,44	94,72	94,88	95,08

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2018

4) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk adalah jumlah sekolah jenjang pendidikan tertentu per 10.000 penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan sejauhmana ketersediaan sekolah dapat menampung seluruh penduduk usia sekolah.

Pada kurun waktu 2014-2018 ketersediaan sekolah pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan, namun meningkat untuk jenjang pendidikan SMP/MTs. Pada jenjang SD/MI dari 23.378 unit menjadi 23.041 unit, sedangkan untuk SMP/MTs dari 5.026 unit menjadi 5.059 unit. Perkembangan pada tahun 2014-2018 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.38.

Jumlah Sekolah dan Jumlah Penduduk Usia Sekolah Jenjang Pendidikan Dasar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah SD/MI	23.378	23.291	23.244	23.070	23.041
2	Jml SMP/MTs	5.026	4.996	4.929	4.935	5.059
3	Jml penduduk usia 7 s.d 12 th	3.509.045	3.309.915	3.341.200	3.366.400	3.419.000
4	Jml penduduk usia 13 s.d 15 th	1.875.517	1.685.431	1.673.400	1.670.100	1.662.300

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Berdasarkan data rasio ketersediaan sekolah SD/MI per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun, pada kurun waktu tahun 2014-2018, rasio tersebut mengalami peningkatan, dari 66,62 menjadi 67,39, dan telah memenuhi kondisi ideal. Untuk SMP/MTs, dalam periode yang sama juga mengalami peningkatan dari 26,80 menjadi 30,43, namun demikian belum memenuhi rasio ideal sebesar 52,08.

Tabel 2.39.

Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap 10.000 Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Rasio SD/MI per 10.000 penduduk Usia 7 – 12 tahun	66,62	70,37	69,57	68,53	67,39
2	Rasio SMP/MTs per 10.000 penduduk Usia 13 – 15 tahun	26,80	29,64	29,46	29,55	30,43

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019 (diolah)

5) Rasio Guru terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru per 10.000 jumlah murid berdasarkan jenjang pendidikan tertentu. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan jumlah pendidik dan jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai proses pembelajaran yang berkualitas.

Melihat data rasio guru terhadap murid di Jawa Tengah selama tahun 2014-2018, dapat tergambarkan bahwa kondisi ketersediaan guru

dibandingkan murid cukup memadai baik untuk jenjang SD/MI maupun SMP/MTs.

Tabel 2.40.
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
I	SD/MI					
	Jumlah guru	249.717	195.307	231.314	229.035	230.505
	Jumlah murid	3.678.191	3.731.535	3.595.555	3.487.996	3.488.436
	Rasio	14,73	19,01	15,62	15,21	15,13
II	SMP/MTs					
	Jumlah guru	119.996	73.418	108.408	122.959	124.429
	Jumlah murid	1.773.646	1.690.182	1.645.171	1.659.765	1.667.813
	Rasio	14,78	23,02	14,96	13,49	13,40

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019 (diolah)

c. Pendidikan Menengah

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

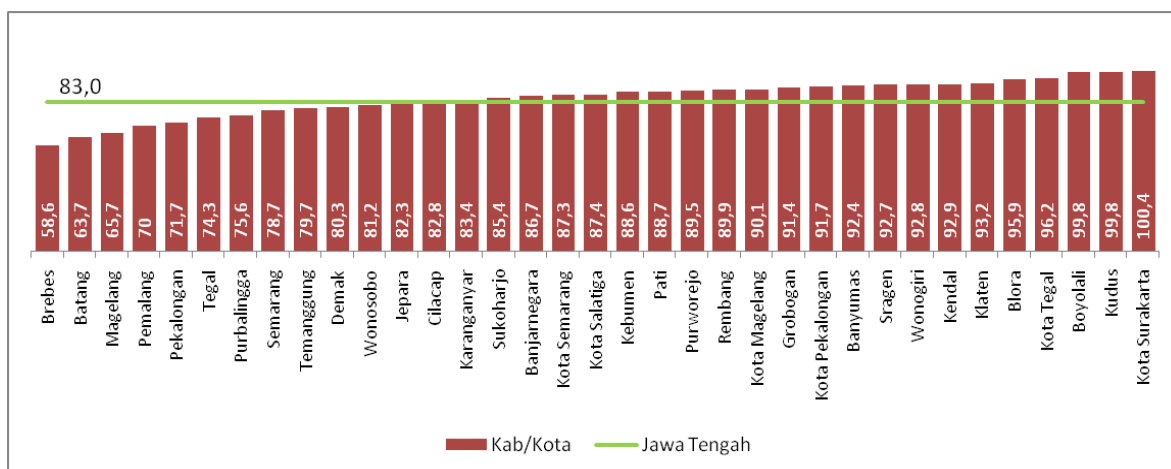
Pada tahun 2014-2018, capaian APK SMA/SMK/MA meningkat dari 73,05 menjadi 83,00. Meskipun meningkat cukup baik, apabila dibandingkan dengan APK SMA/SMK/MA nasional, APK Jawa Tengah masih pada kondisi lebih rendah dibandingkan nasional.

Tabel 2.41.
APK SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2018

No	Tahun	SMA/SMK/MA	
		Provinsi	Nasional
1	2014	73,05	74,63
2	2015	74,01	75,53
3	2016	76,43	76,45
4	2017	78,01	81,95
5	2018	83,00	86,90

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA di Jawa Tengah menurut kabupaten/kota pada tahun 2018 terlihat capaian tertinggi adalah Kota Surakarta (100,4), dan terendah adalah Kabupaten Brebes (58,6).



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.59.

APK SMA/SMK/MA Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

2) Angka Partisipasi Murni (APM)

Pada tahun 2014-2018, APM SMA/SMK/MA di Jawa Tengah meningkat dari 59,20 menjadi 61,80. Jika dibandingkan dengan capaian nasional sampai dengan tahun 2017, APM SMA/SMK/MA Jawa Tengah lebih baik dibandingkan nasional. Namun di tahun 2018, APM Jawa Tengah berada pada kondisi lebih rendah dibandingkan nasional. Rendahnya APM Jawa Tengah disebabkan beberapa hal antara lain kemampuan ekonomi masyarakat (sehingga lulusan SMP/MTs tidak mampu melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, tetapi lebih memilih untuk bekerja) dan keberadaan sekolah menengah, terutama SMK (belum semua kecamatan terdapat SMA/SMK/MA).

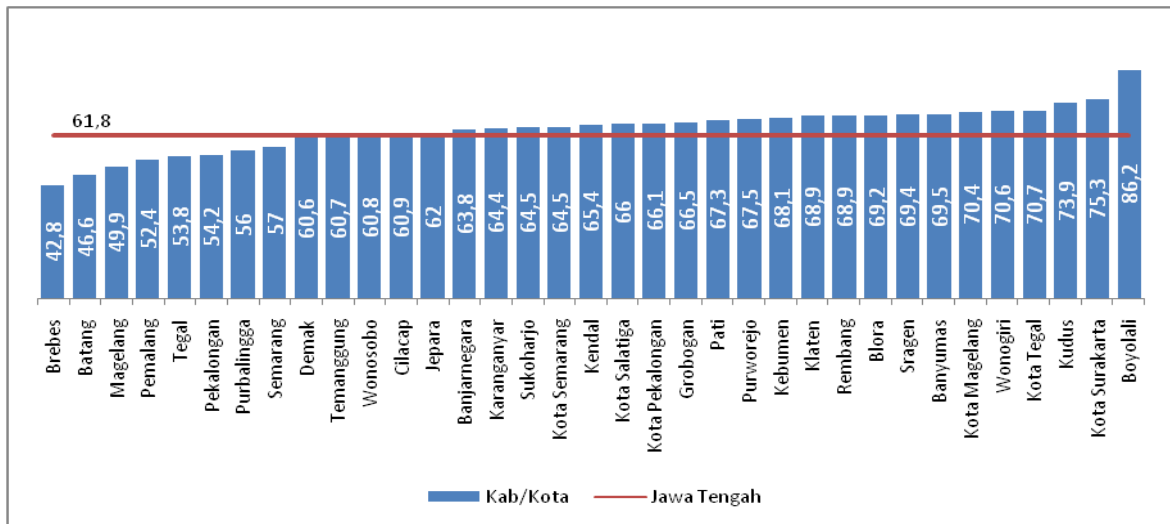
Tabel 2.42.

APM SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2014 – 2018

No	Tahun	APM SMA/SMK/MA	
		Provinsi	Nasional
1	2014	59,20	55,88
2	2015	60,18	57,15
3	2016	62,21	59,10
4	2017	64,02	61,20
5	2018	61,80	63,70

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah dan BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA di Jawa Tengah menurut kabupaten/kota pada tahun 2018, terlihat capaian tertinggi adalah Kabupaten Boyolali (86,2), dan terendah adalah Kabupaten Brebes (42,8).



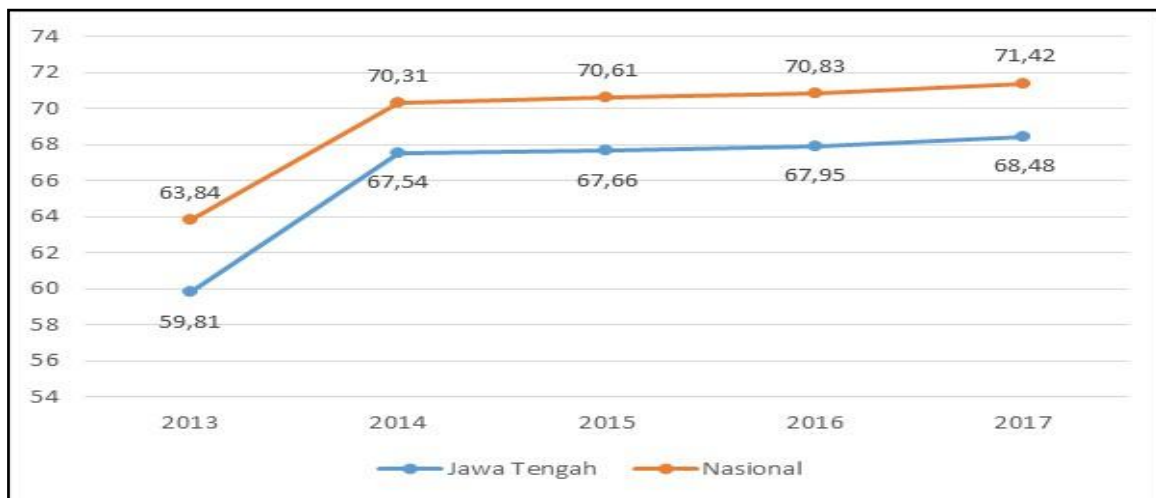
Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.60.

APM SMA/SMK/MA Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

3) Angka Partisipasi Sekolah

Capaian APS pendidikan menengah di Jawa Tengah cenderung meningkat, namun demikian kondisi tersebut belum sebanding dengan capaian APS SMP/MTs. Rendahnya APS pendidikan menengah antara lain disebabkan belum memadainya jumlah SMA/SMK/MA di beberapa wilayah kecamatan dan rendahnya tingkat perekonomian masyarakat (sehingga lulusan SMP/MTs sudah harus bekerja). Bahkan jika dibandingkan APS Nasional, APS Jawa Tengah berada dibawah nasional selama kurun waktu lima tahun terakhir.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.61.

Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2013 – 2017

Apabila dibandingkan dengan provinsi lain se Pulau Jawa, pada tahun 2017 APS SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah menempati urutan ke-4 setelah Provinsi DIY, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan diatas Provinsi Banten serta Jawa Barat.

Tabel 2.43.**APS SMA/SMK/MA Provinsi se-Pulau Jawa Dan Nasional Tahun 2013-2017**

No	Provinsi/Nasional	2013	2014	2015	2016	2017
1.	D.I. Yogyakarta	81,41	86,44	86,78	87,20	87,61
2.	Jawa Timur	62,32	70,25	70,44	70,54	71,51
3.	DKI Jakarta	66,09	70,23	70,73	70,83	71,50
4.	Jawa Tengah	59,88	67,54	67,66	67,95	68,48
5.	Banten	62,89	66,25	66,73	67,00	67,77
6.	Jawa Barat	59,98	65,48	65,72	65,82	66,62
	Nasional	63,84	70,31	70,61	70,83	71,42

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018

4) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah menunjukkan jumlah SMA/SMK/MA per 10.000 penduduk usia sekolah menengah. Rasio ini mengindikasikan sejauhmana ketersediaan SMA/SMK/MA mampu menampung seluruh penduduk usia sekolah menengah.

Pada kurun waktu 2014-2018, jumlah SMA/SMK/MA meningkat dari 2.881 unit menjadi 3.215 unit, dengan jumlah penduduk usia 16-18 tahun tahun 2014 sebanyak 1.556.312 orang menjadi 1.696.000 orang. Berdasarkan data tersebut, rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan menengah pada tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dari 18,51 menjadi 18,95.

Tabel 2.44.**Rasio Ketersediaan Sekolah SMA/SMK/MA Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018**

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah SMA/SMK/MA	2.881	2.388	2.361	3.000	3.215
Jumlah penduduk usia 16-18 th	1.556.312	1.553.498	1.519.321	1.587.478	1.696.000
Rasio SMA/SMK/MA per 10.000 penduduk Usia 16 - 18 tahun	18,51	15,37	15,54	18,89	18,95

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

5) Rasio Guru terhadap Murid

Pada tahun 2014-2018, rasio ketersediaan guru per 10.000 jumlah murid SMA/SMK/MA di Jawa Tengah membaik, yaitu dari 1:922 menjadi 1:765.

Tabel 2.45.**Rasio Guru Terhadap Murid SMA/SMK/MA Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018**

Uraian	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah guru	105.874	59.908	60.507	97.100	97.170
Jumlah murid	1.151.909	1.149.668	1.161.164	1.238.330	1.270.167
Rasio	1:919	1:521	1:521	1:784	1:765

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

6) Serapan Tamatan SMK

Serapan tamatan SMK di Jawa Tengah yang bekerja pada tahun 2018 cenderung meningkat dibanding tahun 2017, termasuk yang menjadi wirausaha juga meningkat cukup tinggi. Sementara itu, jumlah yang belum bekerja di tahun 2018 semakin menurun. Lulusan SMK yang belum bekerja antara lain disebabkan karena belum mengikuti uji kompetensi (bersertifikat), belum berpengalaman kerja, usia lulusan SMK yang belum cukup memenuhi persyaratan usia kerja, kemampuan berwirausaha yang rendah, serta melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Tabel 2.46.

Serapan Tamatan SMK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah siswa kelas III/IV	160.988	169.842	188.970	195.354	164.231
Jumlah lulusan	159.652	169.095	188.308	194.768	164.231
- Bekerja	120.314	117.961	99.558	100.500	111.096
- Wirausaha	1.373	1.623	1.393	1.266	13.159
- Melanjutkan	28.865	37.793	49.412	55.762	22.568
- Belum bekerja	9.100	11.178	37.944	37.240	17.048

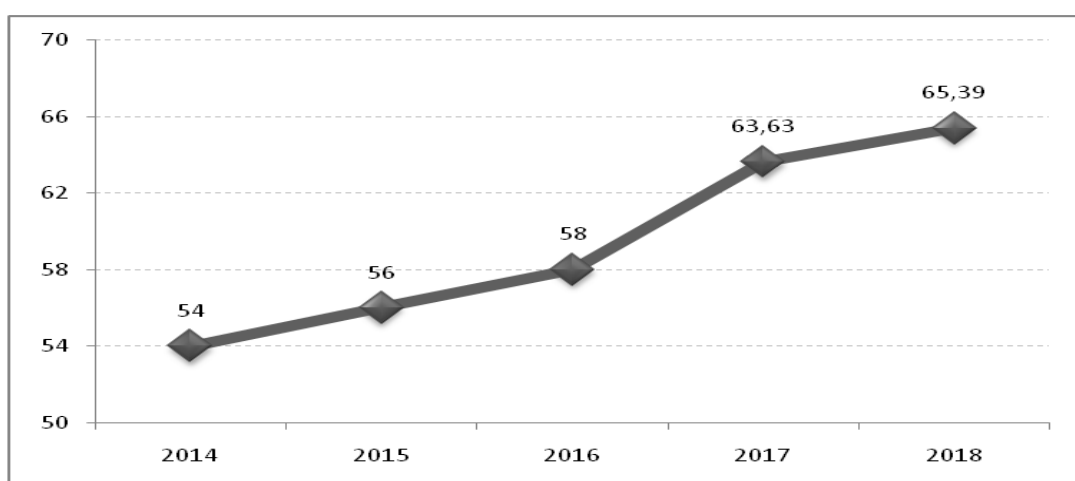
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

d. Pendidikan Khusus

1) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Pada tahun 2014-2018, capaian APK Pendidikan Khusus di Jawa Tengah meningkat dari 54,00 menjadi 65,39. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Khusus menurut kabupaten/kota pada tahun 2018 terlihat capaian tertinggi adalah Kabupaten Magelang (98,29), dan terendah adalah Kabupaten Brebes (22,88).

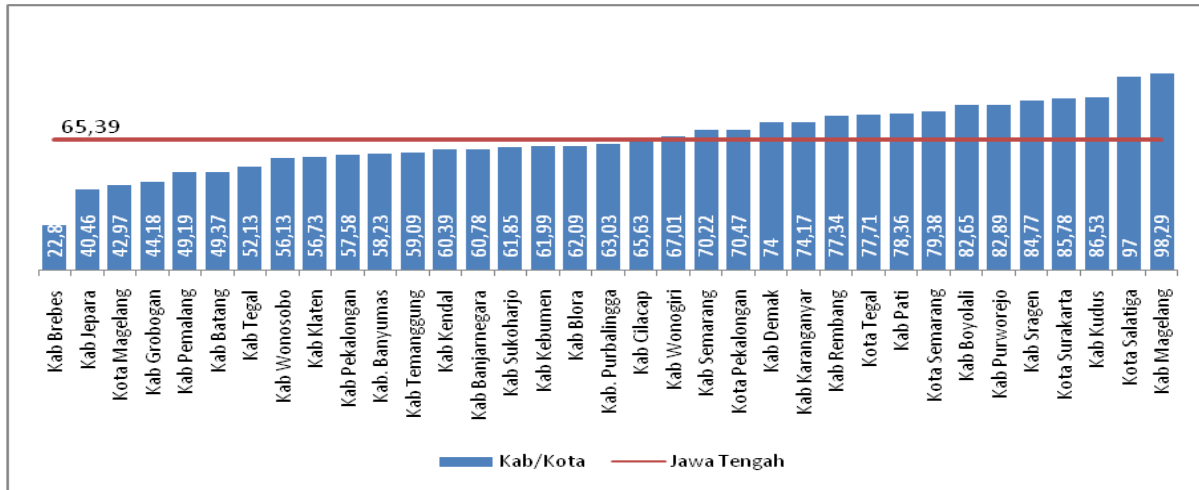
Rendahnya APK Pendidikan Khusus disebabkan beberapa hal antara lain kemampuan ekonomi masyarakat, keterbatasan akses SLB, kesadaran masyarakat dan belum optimalnya penyelenggaraan Pendidikan khusus melalui inklusi di sekolah reguler.



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.62.

APK Pendidikan Khusus Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.63.

APK Pendidikan Khusus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Pada tahun 2014-2018 jumlah anak usia sekolah berkebutuhan khusus yang sudah bersekolah di SLB mengalami peningkatan dari 14.735 menjadi 17.955, dari jumlah anak usia sekolah berkebutuhan khusus sebanyak 29.436 pada tahun 2018. Jumlah Sekolah Luar Biasa juga meningkat dari 164 menjadi 187.

Tabel 2.47.

Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus, SLB, dan Rasio Anak Berkebutuhan Khusus Yang Bersekolah Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah anak usia sekolah berkebutuhan khusus yang sudah sekolah di SLB	14.735	14.444	15.405	16.618	17.955
Jumlah anak usia sekolah berkebutuhan khusus	35.420	35.541	35.872	37.085	29.436
Jumlah Sekolah Luar Biasa	164	172	182	185	187
Rasio jumlah Anak Usia Sekolah berkebutuhan khusus yang sudah sekolah : Jumlah anak usia sekolah berkebutuhan khusus	0,416	0,406	0,429	0,448	0,609
Rasio jumlah Anak Berkebutuhan Khusus : Jumlah SLB	215,976	206,634	197,099	200,459	157,412

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

e. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Sejalan dengan capaian angka rata-rata lama sekolah, angka pendidikan yang ditamatkan merupakan indikator untuk mengukur kualitas SDM pada suatu wilayah. Selama kurun waktu 2013-2017, APT tingkat SD dan SMA cenderung menurun, dan APT SMP cenderung meningkat. Hal tersebut menggambarkan bahwa jumlah penduduk lulusan SD di Jawa Tengah semakin menurun, dan bergeser pada tingkatan SMP. Namun demikian, masih cukup tingginya persentase penduduk yang hanya menamatkan pendidikan sampai dengan SD/MI disebabkan oleh banyaknya penduduk

yang masih berpendidikan SD tidak mengikuti ujian persamaan, belum optimalnya pelaksanaan ujian persamaan untuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk menempuh ujian persamaan SMP dan SMA.

APT SMA pada periode yang sama juga cenderung menurun, meskipun di tahun 2017 angkanya meningkat dibandingkan tahun 2016, yang artinya sebagian penduduk lulusan SMP tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah. Inilah yang menjadi tantangan ke depan yaitu bagaimana mendorong upaya peningkatan jumlah penduduk yang berkualifikasi pendidikan menengah. Dengan kata lain perlu peningkatan Angka Partisipasi SMA/SMK/MA dengan meminimalkan Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA.

Tabel 2.48.

Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Berdasarkan Penduduk Angkatan Kerja Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

Tahun	Jumlah	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan						Jumlah
		SD	APT	SLTP	APT	SLTA +	APT	
2013	16.986.776	8.574.472	50,48	3.182.203	18,73	4.207.373	24,77	15.964.048
2014	17.547.026	8.983.154	51,19	3.118.191	17,77	4.449.337	25,35	16.550.682
2015	17.298.925	5.530.439	31,97	3.344.253	19,33	2.086.195	12,06	10.960.887
2016	18.010.612	5.516.851	30,63	3.451.745	19,06	1.916.989	10,64	10.885.585
2017	17.186.674	5.369.117	31,24	3.402.961	19,80	3.480.301	20,25	12.252.380

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

f. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas penyelenggaraan pendidikan dapat dilihat salah satunya dengan indikator kondisi bangunan/ruang kelas sesuai standar nasional pendidikan. Pada tahun 2014-2018, kondisi ruang kelas pada jenjang pendidikan dasar (SD/MI/SDLB dan SMP/MTs/SMPLB) mengalami penurunan. Sedangkan untuk jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK/MA) mengalami peningkatan.

Tabel 2.49.

Kondisi Bangunan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Dalam Kondisi Baik Tahun 2014 – 2018 (%)

No	Jenjang	Tahun				
		2014*)	2015*)	2016	2017	2018
1	SD/MI/SDLB	95,02	67,97	68,53	70,15	70,76
2	SMP/MTs/SMPLB	98,82	79,36	80,42	80,50	80,99
3	SMA/SMK/MA	82,00	84,33	86,32	88,01	90,02

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Ket:*)tidak termasuk mebelair

g. Angka Putus Sekolah (APS)

Pada kurun waktu 2014-2018, angka putus sekolah untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah mengalami penurunan. Pada SD/MI/SDLB, dari 0,09 menjadi 0,050; SMP/MTs/SMPLB dari 0,30 menjadi 0,10; serta SMA/SMK/MA, dari 0,06 menjadi 0,050.

Tabel 2.50.**Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI/SDLB	0,09	0,077	0,062	0,060	0,050
2	SMP/MTs/SMPLB	0,30	0,232	0,190	0,170	0,10
3	SMA/SMK/MA	0,06	0,059	0,060	0,059	0,050

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

h. Angka Kelulusan

Angka kelulusan menunjukkan tingkat kelulusan siswa dalam menyelesaikan pendidikan pada masing-masing jenjang pendidikan. Capaian Angka Kelulusan pada tahun 2014-2018 untuk jenjang SD/MI/SDLB mengalami peningkatan dari 99,95 menjadi 99,99, namun tidak demikian halnya dengan jenjang SMP/MTs/SMPLB yang mengalami penurunan dari 99,98 menjadi 99,81. Untuk jenjang SMA/SMK/MA angka kelulusan di tahun 2018 sangat baik mencapai angka 100, dimana di tahun-tahun sebelumnya masih berada dibawah 100.

Tabel 2.51.**Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018**

No	Jenjang Pendidikan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	SD/MI/SDLB	99,95	99,99	99,99	99,99	99,99
2	SMP/MTs/SMPLB	99,98	99,81	99,99	99,97	99,81
3	SMA/SMK/MA	99,94	99,97	99,98	99,99	100,00

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

i. Angka Melanjutkan

Persentase lulusan SD/MI dan SMP/MTs yang melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya selama kurun waktu tahun 2014-2018 mengalami peningkatan baik pada jenjang SD/MI ke SMP/MTs maupun untuk SMP/MTs ke SMA/SMK/MA.

Tabel 2.52.**Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	97,13	97,89	97,89	99,99	99,99
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	83,18	83,90	83,90	99,97	99,81

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

j. Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D4

Kualifikasi S1/D4 merupakan salah satu indikator kualitas pendidik yang dipersyaratkan dalam Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan. Kondisi pada tahun 2014-2018, capaian kinerjanya menunjukkan

peningkatan, yaitu untuk jenjang PAUD dari 31,05 menjadi 49,85; kemudian SD/MI/SDLB dari 53,61 menjadi 86,44; SMP/MTS dari 86,41 menjadi 95,72; dan SMA/SMK/MA dari 93,50 menjadi 98,86.

Tabel 2.53.

**Persentase Pendidik Berkualifikasi SI/D4 Di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4	31,10	46,66	47,27	48,69	49,85
2	Pendidik SD/MI/SDLB berkualifikasi S1/D4	53,61	77,90	78,80	84,10	86,44
3	Pendidik SMP/MTs/SMPLB berkualifikasi S1/D4	86,41	91,45	92,55	94,10	95,72
4	Pendidik SMA/SMK/MA berkualifikasi S1/D4	93,50	96,89	96,95	97,69	98,86

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

2. Kesehatan

a. Rasio Puskesmas Per Satuan Penduduk

Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayahnya. Sampai dengan tahun 2018, rasio puskesmas terhadap jumlah penduduk semakin kecil dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 1:21.871. Hal ini menandakan bahwa pelayanan puskesmas semakin optimal yang artinya 1 unit Puskesmas melayani 21.871 penduduk di tahun 2018. Kondisi ini sudah memenuhi standar ideal oleh Permenkes yaitu 1 puskesmas melayani 30.000 penduduk. Namun, dalam rangka mendukung pelaksanaan sistem rujukan berjenjang dari BPJS, pelayanan di Puskesmas masih perlu ditingkatkan utama dalam pemenuhan sarana dan prasarana.

Tabel 2.54.

**Rasio Puskesmas Terhadap Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014-2018**

No	Tahun	Rasio Puskesmas
1	2014	1:37.610
2	2015	1:38.599
3	2016	1:38.879
4	2017	1:24.922 (FKTP)
5	2018	1:21.871 (FKTP)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019 (diolah)

b. Rasio dokter persatuan penduduk

Tenaga kesehatan adalah orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Dalam kurun waktu 2014-2018 rasio dokter per satuan penduduk di Jawa Tengah cenderung meningkat, terutama untuk dokter umum, dokter spesialis, dan dokter gigi, meskipun dokter spesialis di tahun 2018 menurun dibandingkan tahun 2017. Hal yang perlu mendapatkan

perhatian adalah pemerataan dokter utamanya pada penempatan fasilitas pelayanan tingkat pertama (puskesmas).

Tabel 2.55.

Rasio Dokter Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

Tahun	Dokter Umum		Dokter Spesialis		Dokter Gigi	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
2014	4.188	12,40	2.706	8,01	1.071	3,17
2015	4.188	12,40	2.706	8,01	1.071	3,17
2016	4.429	13,02	4.486	13,19	1.070	3,15
2017	4.467	13,06	4.517	13,21	1.121	3,28
2018	6.004	16,00	9.327	13,00	1.495	4,00

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

c. Rasio tenaga paramedis per satuan penduduk

Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan selain dilaksanakan oleh dokter juga dibantu oleh tenaga paramedis seperti perawat, bidan, tenaga farmasi, dan tenaga gizi juga penting keberadaannya, karena mendukung pelayanan kesehatan agar semakin optimal. Dari keempat tenaga paramedis tersebut, sampai dengan tahun 2017 rasio perawat masih relatif kecil yaitu sebesar 0,85. Rasio terbesar adalah bidan dikarenakan adanya perekrutan bidan PTT guna memenuhi satu bidan satu desa.

Tabel 2.56.

Rasio Tenaga Paramedis Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017

Tahun	Perawat		Bidan		Tenaga Farmasi		Tenaga Gizi	
	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio	Jumlah	Rasio
2013	28.483	0,856	16.284	0,490	3.850	0,116	1.572	0,047
2014	28.483	0,849	16.284	0,485	5.982	0,178	1.572	0,046
2015	28.483	0,855	16.284	0,488	5.982	0,178	1.572	0,046
2016	29.150	0,90	15.017	0,484	2.208	0,153	1.573	0,046
2017	34.892	0,85	19.966	0,58	5.546	0,16	1.728	0,50

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2018

d. Persentase rumah sakit yang dibina untuk akreditasi

Akreditasi terhadap suatu layanan merupakan indikator jaminan mutu utamanya pada pelayanan rumah sakit. Pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan menunjukkan bahwa rumah sakit tersebut dinilai telah memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan. Jumlah Rumah Sakit (RS) yang dibina untuk akreditasi pelayanan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017, dimana penilaian akreditasi pelayanan menggunakan versi tahun 2012 dan banyak rumah sakit yang habis masa akreditasinya pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun 2013-2015 cenderung meningkat dikarenakan adanya pendampingan dari komite akreditasi rumah sakit serta merupakan salah satu syarat dalam pelaksanaan ijin operasional.

Dalam rangka mendorong peningkatan pelayanan di Rumah Sakit perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah melalui pemenuhan sarana dan prasarana yang menunjang syarat pelaksanaan akreditasi.

Tabel 2.57.

Persentase Rumah Sakit yang Dibina Untuk Akreditasi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

Tahun	Jumlah Rumah Sakit	Jumlah yang dibina untuk akreditasi	Persentase
2014	284	118	66,19
2015	276	188	68,12
2016*)	279	65	23,29
2017	279	134	48,03
2018	287	201	70,03

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, 2019

e. Jumlah Penduduk Pemanfaat Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) Dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda)

Pemenuhan pembiayaan masyarakat miskin sebagai salah satu upaya dalam penurunan kemiskinan dengan mengurangi beban pengeluaran kebutuhan dasar maka dilaksanakan program Jaminan Kesehatan Nasional Penerima Bantuan Iuran (JKN PBI) dan JKN Non PBI APBN. Pada tahun 2018 penerima manfaat jamkesda mengalami penurunan dikarenakan adanya perubahan mekanisme pengcoveran penduduk miskin penerima manfaat berdasarkan data BDT.

Tabel 2.58.

Jumlah Penduduk Pemanfaat Jamkesmas dan Jamkesda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin-Rentan Miskin	Jumlah yang menerima Jamkesmas	%	Jumlah yang menerima Jamkesda	%
2014**	15.758.436	14.151.037	89,80	1.300.587	8,25
2015**	15.758.436	14.151.037	89,80	1.300.587	8,25
2016**	15.758.436	14.152.522	89,81	1.605.914	10,19
2017	15.758.436	15.405.248	97,76	926.342	5,88
2018	15.522.000	15.449.972	99,54	357.962	2,31

Sumber : TNP2K dan Kementerian Kesehatan, 2018

Keterangan : *) sumber Kementerian kesehatan

***) sumber PPLS 2011

***) Sumber PBDT 2015

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1) Pekerjaan Umum

Urusan pekerjaan umum yang harus ditangani sesuai kewenangan provinsi meliputi jalan, jembatan, sumberdaya air, air bersih, sanitasi, dan jasa konstruksi.

a. Jalan dan Jembatan

Panjang jalan di Jawa Tengah yang menjadi kewenangan provinsi sebesar 7,70% dari total panjang jalan di Jawa Tengah (31.244,380 km). Sebagian besar jalan di Jawa Tengah (87,44%) merupakan kewenangan

Pemerintah Kabupaten/Kota dan sisanya merupakan kewenangan Nasional (4,86%).

Kondisi jalan kewenangan provinsi yang telah sesuai dengan standar yaitu lebar minimal 7 meter dengan MST 8 ton adalah sepanjang 841,90 km atau 35,01%. Sedangkan berdasarkan kondisi perkerasan jalan, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.59.
Kondisi Permukaan Jalan Di Provinsi Jawa Tengah Sesuai Kewenangan Tahun 2018

Kewenangan Jalan	Kondisi Ruas Jalan								Total Panjang (km)
	Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat		
	km	%	km	%	km	%	Km	%	
Nasional	783,65	51,62	669,86	44,13	58,46	3,85	6,11	0,40	1.518,090
Provinsi	2.154,657	89,60	250,094	10,40	0,000	0,00	0,000	0,00	2.404,741
Kabupaten/Kota	15.790,98	59,41	4.181,97	15,73	3.620,22	13,62	2.984,98	11,23	26.578,15
Jumlah Jateng	18.712,50	61,35	5.143,90	19,61	3.652,57	11,98	2.992,00	9,81	30.500,98

Catatan :

- Sumber Kondisi Jalan Nasional : SNVT P2JN Jawa Tengah, 2019
- Sumber Kondisi Jalan Provinsi : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2019
- Sumber Kondisi Jalan Kabupaten / Kota : Bappeda Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah, 2019

b. Sumber Daya Air

Pengelolaan sumber daya air di Jawa Tengah menghadapi tantangan yang cukup besar. Kebutuhan akan penyediaan air yang mencakup kapasitas daya dukung serta tingkat perkembangan kebutuhan air semakin dirasakan meningkat, baik penyediaan air untuk kebutuhan domestik, pertanian, industri, pemukiman, dan sektor lainnya. Di Jawa Tengah, kebutuhan air irigasi rata-rata per tahun sebesar 19.636.378.014 m³/tahun dengan asumsi memperhitungkan/mendasarkan pada rencana kebutuhan air MT 1 (musim tanam pertama) sampai dengan MT 3 (musim tanam ketiga). Sedangkan ketersediaan air baku di Jawa Tengah (pemenuhan kebutuhan air minum) mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir (2014-2018) dari 52,33% menjadi 60,89%.

Tabel 2.60.
Pemenuhan Kebutuhan Air Baku Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Kebutuhan Air Baku (juta m ³ /tahun) (air minum, industri, dan lain-lain)	728,49	734,15	739,65	745,02	750,25
Ketersediaan Air Baku (juta m ³ /tahun) (air minum, industri, dan lain-lain)	381,21	400,04	417,83	435,84	456,83
Ketersediaan Air Baku (%)	52,33	54,49	56,49	58,50	60,89

Sumber : Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, 2019

Pemenuhan kebutuhan air antara lain dapat diperoleh dari sungai, waduk, embung dan irigasi. Salah satu sumber penyediaan air baku adalah waduk. Di Jawa Tengah terdapat 9 waduk besar dengan ketersediaan air sebagaimana ditunjukkan tabel berikut.

Tabel 2.61.
Ketersediaan Air Waduk Besar (> 10.000.000 m³) Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018*)

No.	Nama Waduk	Areal (Ha)	Kapasitas Juta m ³	Elevasi (m)		Volume (juta m ³)		Persentase Realisasi
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi	
1	Malahayu	35.162	31,14	48,85	48,75	3,957	3,758	94,97
2	Cacaban	17.481	49,02	67,27	71,08	5,986	16,315	272,55
3	Rawapening	19.972	49,90	460,98	460,90	15,398	14,560	94,56
4	Kedungombo	59.544	689,09	77,70	72,80	228,402	134,819	59,03
5	Wonogiri	28.109	440,00	127,68	128,00	72,396	79,033	109,17
6	Sempor	6.485	38,04	54,70	67,44	10,286	29,620	287,96
7	Wadaslintang	31.109	388,72	166,00	159,03	208,492	153,791	73,76
8	Sudirman	8.400	23,24	227,50	230,11	4,510	14,840	329,05
9	Jatibarang	-	17,67	149,30	146,69	17,670	8,354	47,28
	JUMLAH	206.262	1.726,82			567,097	455,090	80,25
	Persentase					100 %	80%	14%

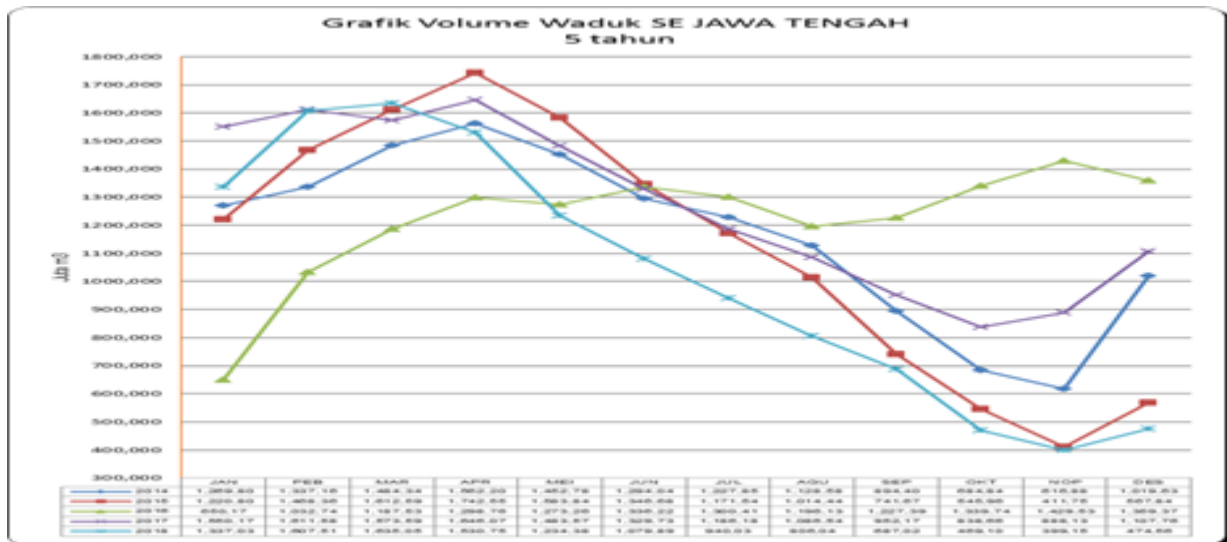
Sumber : Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, 2019

Keterangan: *) Data dinamis per Bulan Desember 2018

Rasio ketersediaan air berdasarkan volume rencana dan realisasi:

- >100% : Volume di atas rencana
- 85%-100% : Volume sesuai rencana
- <85% : Volume dibawah rencana
- 0% : Waduk dalam keadaan air habis

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa terdapat 3 waduk besar yang realisasi ketersediaan airnya dibawah rencana yang dimiliki yaitu waduk Kedungombo, Wadaslintang, dan Jatibarang. Kondisi tersebut disebabkan pada akhir tahun 2018 curah hujan menurun/kecil sehingga *inflow* waduk berkurang yang menyebabkan realisasi volume waduk lebih kecil dari rencana volume waduk.



Sumber : Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.64.
Ketersediaan Air Waduk Per Bulan di Provinsi Jawa Tengah (Juta m³) Tahun 2014-2018

Grafik diatas menunjukkan bahwa ketersediaan air waduk dari tahun ke tahun memiliki pola yang hampir sama yaitu debit tertinggi berkisar antara bulan Maret sampai dengan bulan April dan debit terendah pada bulan

Oktober sampai dengan bulan November, artinya bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan upaya agar pada saat ketersediaan air waduk di Jawa Tengah mengalami penurunan kebutuhan air di Jawa Tengah tetap bisa terpenuhi. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah untuk mencukupi kebutuhan air mendukung ketahanan pangan yaitu melalui Program 1000 Embung yang sebagian besar menggunakan prinsip memanen hujan.

Dukungan terhadap ketahanan pangan selain melalui pembangunan embung, ditempuh juga dengan pengelolaan irigasi. Di Jawa Tengah, total luas area Daerah Irigasi (DI) seluas 953.804 ha, yang terdiri dari 33 DI kewenangan pusat seluas 347.674 ha (36,45%), 108 DI kewenangan provinsi seluas 86.865 ha (9,11%) dan 11.401 DI kewenangan kabupaten/kota seluas 519.265 ha (54,44%).

Tabel 2.62.

Kewenangan Pengelolaan Daerah Irigasi di Provinsi Jawa Tengah

No.	Kewenangan Daerah Irigasi	Luas Area (ha)	% Dari Total Luas	Jumlah Daerah Irigasi
1.	Pusat	347.674	36,45%	33
2.	Provinsi	86.865	9,11%	108
3.	Kab/Kota	519.265	54,44%	11.401
Total Jawa Tengah		953.804	100,00%	11.542

Sumber: Permen PUPR RI No.14/PRT/M/2015

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mengupayakan pengelolaan irigasi untuk mendukung peningkatan produktivitas pertanian. Namun demikian, masih dijumpai jaringan irigasi dalam kondisi rusak hingga rusak ringan dalam kurun waktu tahun 2014-2018. Kerusakan jaringan irigasi sampai tahun 2018 tidak ada yang masuk dalam kategori rusak berat, namun demikian jaringan irigasi dengan kondisi rusak ringan sampai sedang jumlahnya cukup besar sehingga masih perlu dilakukan upaya-upaya rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan Provinsi.

Tabel 2.63.

Kondisi Fisik Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2014 – 2018

Tahun	Kondisi Jaringan Irigasi Provinsi								Total Luas (Ha)
	Baik		Ringan		Sedang		Berat		
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	
2014	2.560	4	63.790	70	20.336	23	179	3	86.865
2015	1.528	4	67.473	72	17.804	23	60	1	86.865
2016	1.730	6	67.754	73	17.044	19	337	2	86.865
2017	4.433	6	64.207	74	18.225	20	0	0	86.865
2018	4.941	7	63.349	75	18.575	18	0	0	86.865

Sumber : Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, 2019

Kemampuan lingkungan hidup dalam penyediaan air dihitung dengan membandingkan antara ketersediaan air dan kebutuhan layak untuk hidup dimana dalam Dokumen KLHS RPJMD menunjukkan kebutuhan air di Jawa

Tengah adalah sebesar 28,24 milyar m³/tahun. Rincian kebutuhan air di Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.64.
Kebutuhan Air Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Uraian	Jumlah Penduduk	Satuan	Kebutuhan air (ltr/hari/org)	Jumlah (m ³ /tahun)
Jumlah Penduduk	34.019.110	orang	120	1.490.037.018
Lahan Padi	307.943,47	Ha	1	9.717.956.966
Lahan Padi Tadah Hujan	873.438,57	Ha	0,3	8.269.087.519
Lahan Kering Lainnya	907.979,00	Ha	0,3	8.595.091.397
Industri	946.310 (jumlah tenaga kerja)	Jiwa	500	172.701.575
Total				28.245.874.474

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah, 2018

Berdasarkan hal tersebut, maka daya dukung lingkungan dalam menyediakan air bagi kebutuhan layak penduduk Jawa Tengah mengalami defisit sebesar 9,06%. Untuk mencukupi kebutuhan yang defisit dilakukan dengan pengambilan air tanah CAT lintas kabupaten/kota maupun CAT kabupaten/kota. Secara rinci hitungan daya dukung air dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.65.
Daya Dukung Air Permukaan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

No	Daya Dukung Air	Jumlah (Milyar m ³)	Keterangan
1	Ketersediaan Air Permukaan dan Mata Air	25,69	
2	Kebutuhan Air (layak untuk seluruh kegiatan manusia 1.000 m ³ /kapita/tahun standar WHO)	34,26	
3	Kebutuhan Air per Kegiatan	28,25	
4	Defisit pemenuhan kebutuhan air layak	2,56	9,06%
5	Daya Dukung Air Permukaan	0,91	
6	Potensi CAT lintas dan dalam kabupaten kota	7,57	Surplus

Sumber : KLHS RPJMD Provinsi Jawa Tengah, 2018

Dalam memenuhi kebutuhan air di Jawa Tengah diperlukan komitmen bersama antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air (politik air) dikarenakan air merupakan masalah lintas sektor, lintas wilayah dan lintas kepentingan. Adapun untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN) yang ada di Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berperan melakukan sinkronisasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi.

c. Air Minum dan Sanitasi

Cakupan pelayanan akses air minum perkotaan pada tahun 2017 sebesar 80,98% mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 80,45%. Sedangkan untuk perdesaan, cakupan pelayanan akses air minum pada tahun 2017 sebesar 72,80% sama jika dibandingkan dengan tahun 2016. Untuk cakupan layanan sanitasi pada tahun 2017 sebesar

80,00% yang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 77,00%.

Guna mendukung percepatan pencapaian akses menyeluruh layanan air minum di Jawa Tengah maka berdasarkan MoU bersama Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota terkait pada tahun 2011 telah direncanakan Pembangunan 8 (delapan) SPAM Regional yang berperan sebagai penyedia air curah bagi PDAM kabupaten/kota. Sampai dengan tahun 2017 telah terbangun dan operasional SPAM Regional Bregas dan terdapat 3 (tiga) SPAM Regional lainnya dalam proses pembangunan yaitu SPAM Regional Wosokusas, Petanglong, dan Keburejo.

Tabel 2.66.

Cakupan Pelayanan Air Minum dan Sanitasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Air Minum					
	- Perkotaan (%)	63,99	72,48	75,76	80,45	80,98
	- Perdesaan (%)	49,13	65,57	68,00	72,80	72,80
2	Sanitasi (%)	64,50	76,94	77,00	77,07	80,00

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2018

Dalam rangka pengelolaan layanan air minum dan sanitasi yang berkelanjutan maka dilakukan pendampingan terhadap institusi dan kelompok masyarakat pengelolanya dimana kondisi pengelolaannya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.67.

Kondisi Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Kabupaten/ Kota	Akses Air Minum Perkota- an	Akses AirMinum Perdesaan	Kondisi PDAM		Kondisi BPSPAM		Akses Sanitasi Air Limbah	Kondisi Sanitasi		
			Kapasi- tas Produk- si	Status Kiner- ja	Jum- lah BPSPA M	Fung- si Baik		Nama/Loka siIPLT	Status Operasi	Jumlah KPP
Cilacap	69,28	77,60	649,83	Sehat	100	75	71,52	Tritih Lor	Beroperasi	1
Banyumas	83,08	58,67	700,99	Sehat	134	116	85,20	GunungTugel	Tidak	30
Purbalingga	80,00	66,00	425,29	Sehat	120	115	62,00	-	-	2
Banjarnegara	85,00	66,50	199,03	Kurang	108	91	41,04	-	-	2
Kebumen	99,00	33,76	259,80	Sehat	113	96	80,23	Kaligending	Beroperasi	14
Purworejo	86,34	86,05	207,71	Sehat	128	123	81,27	Jetis	Tidak	17
Wonosobo	83,63	88,01	1.109,59	Sehat	115	106	51,36	Wonorejo	Beroperasi	n/a
Magelang	80,88	78,55	779,69	Sehat	140	137	83,64	-	-	12
Boyolali	18,52	65,74	366,42	Sehat	110	101	88,29	Winong	Tidak	32
Klaten	90,02	84,34	514,55	Sehat	109	99	88,22	Jomboran	Beroperasi	50
Sukoharjo	73,86	72,66	251,24	Sehat	88	72	72,38	Mojorejo	Beroperasi	10
Wonogiri	91,45	74,28	396,80	Sehat	114	108	87,03	-	-	33
Karanganyar	71,53	70,56	566,79	Sehat	109	107	87,20	Mojo Gedang	Beroperasi	30
Sragen	100,00	67,88	721,20	Sehat	138	129	78,53	Tanggan	Beroperasi	20

Kabupaten/ Kota	Akses Air Minum Perkotaan	Akses AirMinum Perdesaan	Kondisi PDAM		Kondisi BPSPAM		Akses Sanitasi Air Limbah	Kondisi Sanitasi		
			Kapasitas Produk- si	Status Kiner- ja	Jum- lah BPSPA M	Fung- si Baik		Nama/Loka- siIPLT	Status Operasi	Jumlah KPP
Grobogan	78,00	72,00	372,00	Kuran- g	111	83	64,00	Ngembak	Beroperasi	n/a
Blora	85,13	94,81	176,59	Sehat	127	116	85,54	Temurejo	Beroperasi	20
Rembang	77,49	75,20	192,36	Sehat	119	102	88,19	Kerep	Beroperasi	21
Pati	84,08	74,07	258,08	Sehat	141	130	86,52	Sukoharjo	Beroperasi	22
Kudus	89,00	85,03	366,60	Sehat	69	60	86,34	Tanjungrejo	Beroperasi	50
Jepara	86,92	55,33	470,70	Sehat	33	32	82,85	Bandengan	Beroperasi	95
Demak	56,35	73,62	441,26	Sehat	118	105	55,76	Kalikondang	Tidak	6
Semarang	91,61	86,49	464,14	Sehat	103	102	87,83	-	-	39
Temanggung	82,50	70,61	388,38	Sehat	119	119	89,74	Kranggan	Konstruksi	n/a
Kendal	12,71	57,88	487,71	Sehat	105	95	68,59	-	-	13
Batang	80,20	65,00	417,50	Sehat	107	103	70,76	Randu Kuning	Beroperasi	4
Pekalongan	76,26	78,10	131,50	Sehat	114	107	69,85	Wiradesa	Konstruksi	4
Pemalang	98,31	82,44	371,74	Sehat	124	104	70,48	Pegongsoran	Beroperasi	3
Tegal	85,30	66,56	326,23	Sehat	104	79	87,56	Kedungjati	Beroperasi	n/a
Brebes	88,80	88,80	327,26	Sehat	107	87	77,48	-	-	1
Kota Magelang	88,00	0	501,88	Sehat	0	0	96,85	Tegal rejo	Beroperasi	21
Kota Surakarta	81,85	0	775,92	Sehat	0	0	97,35	Putri Cempo	Beroperasi	50
Kota Salatiga	81,20	0	285,56	Sehat	0	0	82,96	Ngronggo	Tidak	n/a
Kota Semarang	82,00	0	3.411,2 7	Sehat	88	66	96,50	Tambak Lor	Beroperasi	1
Kota Pekalongan	85,12	0	382,50	Sehat	47	43	91,42	Degayu	Beroperasi	50
Kota Tegal	54,00	0	244,63	Sehat	0	0	80,00	Muara Rejo	Beroperasi	8
Jawa Tengah	80,98	72,80	17.942,76		3362	3008	80,00			

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2018

d. Jasa Konstruksi

Pengelolaan jasa konstruksi di Jawa Tengah pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016. Sertifikasi Hasil Uji pada tahun 2017 mencapai 1.853 mengalami peningkatan kondisi jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu sebesar 1.671. Informasi Jasa Konstruksi pada tahun 2017 sejumlah 4 kegiatan meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 sejumlah 3 kegiatan. Demikian pula dengan pelaku jasa konstruksi di tahun 2017 sejumlah 1.228 orang meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 1.065 orang.

Tabel 2.68.
Pengelolaan Jasa Konstruksi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Sertifikasi Hasil Uji (SHU)	573	899	1.426	1.671	1.853
2	Informasi Jasa Kontruksi {sosialisasi, bintek terkait jakon (peraturan jasa konstruksi, HSD, HSPK, dsb), pelaksanaan event / pameran}	2	3	2	3	4
3	Pelaku Jasa Kontruksi (orang)	585	630	1.230	1.065	1.228

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah, 2018

2) Penataan Ruang

Pelayanan umum urusan penataan ruang Provinsi Jawa Tengah diselenggarakan dengan mendasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang menyatakan bahwa keberadaan ruang yang terbatas sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Undang-undang sebagaimana dimaksud mengamanatkan disusunnya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berfungsi sebagai acuan pemerintah dan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan, arahan lokasi investasi, serta pedoman pemanfaatan ruang. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan, bahwa terhadap kawasan-kawasan tertentu yang memiliki nilai strategis perlu disusun Rencana Rinci Tata Ruang sebagai penjabaran RTRW.

Provinsi Jawa Tengah telah memiliki Perda Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, dan telah dilakukan revisi terkait dengan kesesuaian dengan kebutuhan ruang untuk pembangunan di Provinsi Jawa Tengah dikarenakan terjadinya dinamika pembangunan, perubahan regulasi sektoral, revisi RTRW Nasional, serta banyaknya kegiatan strategis di tingkat nasional dan regional.

Sebagai penjabaran RTRW Provinsi Jawa Tengah, baru ditetapkan 1 (satu) Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi (KSP), yaitu Perda Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang dari 25 (dua puluh lima) Kawasan Strategis.

Seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah juga telah memiliki Perda RTRW, tetapi belum ada yang memiliki Perda RDTR. Terhadap perda RTRW, seluruh kabupaten/kota melaksanakan proses Revisi RTRW, tetapi baru 2 (dua) Kabupaten yang telah menetapkan perda Revisi RTRW, yaitu Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Sukoharjo.

Tabel 2.69.
Kondisi RTRW Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah Tahun 2018*)

No	Kabupaten/Kota	Revisi Dan PK	Proses Rekom Gub	Proses Persub ATR	Proses Evaluasi Gub	Perda Baru
1	Cilacap	√	√			
2	Banyumas	√				
3	Purbalingga	√	√	√		
4	Banjarnegara	√				
5	Kebumen	√				
6	Purworejo	√				
7	Wonosobo	√				
8	Magelang	√				
9	Boyolali	√	√	√		
10	Klaten	√				
11	Sukoharjo	√	√	√	√	√
12	Wonogiri	√	√			
13	Karanganyar	√	√	√		
14	Sragen	√	√			
15	Grobogan	√				
16	Blora	√	√			
17	Rembang	√				
18	Pati	√				
19	Kudus	√				
20	Jepara	√				
21	Demak	√	√	√		
22	Semarang	√				
23	Temanggung	√				
24	Kendal	√	√			
25	Batang	√	√	√		
26	Pekalongan	√	√	√		
27	Pemalang	√	√	√	√	√
28	Tegal	√				
29	Brebes	√	√	√		
30	Kota Magelang	√	√	√		
31	Kota Surakarta	√	√			
32	Kota Salatiga	√				
33	Kota Semarang	√	√	√		
34	Kota Pekalongan	√	√			
35	Kota Tegal	√	√			
	JUMLAH	35	19	11	2	2
	%	100	54,29	31,43	5,71	5,71

Sumber : Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah, 2018

Keterangan: *) Data per 10 Agustus 2018

Berdasarkan amanat UU 26/2007, mewajibkan pemenuhan ruang terbuka hijau (RTH) publik di kawasan perkotaan sebesar 20%. Amanat tersebut merupakan salah satu upaya mewujudkan ruang perkotaan yang nyaman bagi masyarakat. Kondisi luasan RTH publik di Jawa Tengah, tahun 2017 sebesar 44.772 ha, atau sebesar 9,31% dari luas perkotaan di Jawa Tengah.

Tabel 2.70.

Kodisi RTH Publik Di Kawasan Perkotaan Jawa Tengah Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Luas Perkotaan (Ha)	Luas RTH (Ha)	Persentase (%)	Luas Kebutuhan RTH Publik (Ha)	Kekurangan (Ha)
1	Kota Semarang	38.674,00	4.980,41	12,88	7.734,80	2.754,39
2	Kab. Semarang	16.455,46	1.974,71	12,00	3.291,09	1.316,38
3	Kota Salatiga	5.278,29	1.013,48	19,20	1.055,66	42,18
4	Kab. Kendal	16.195,17	2.110,92	13,03	3.239,03	1.128,11
5	Kab. Demak	19.425,88	901,60	4,64	3.885,18	2.983,58
6	Kab. Grobogan	18.853,02	3.156,31	16,74	3.770,60	614,29
7	Kab. Pati	19.612,15	1.092,16	5,57	3.922,43	2.830,27
8	Kab. Kudus	16.859,25	2.465,93	14,63	3.371,85	905,92
9	Kab. Jepara	15.603,01	1.440,88	9,23	3.120,60	1.679,72
10	Kab. Blora	12.955,82	1.768,32	13,65	2.591,16	822,84
11	Kab. Rembang	7.673,63	1.478,21	19,26	1.534,73	56,52
12	Kab. Klaten	56.751,52	958,71	1,69	11.350,30	10.391,59
13	Kab. Boyolali	14.702,98	172,72	1,17	2.940,60	2.767,88
14	Kab. Wonogiri	14.998,97	1.269,10	8,46	2.999,79	1.730,69
15	Kab. Sukoharjo	17.754,34	1.121,62	6,32	3.550,87	2.429,25
16	Kab. Sragen	10.230,29	536,74	5,25	2.046,06	1.509,32
17	Kota Surakarta	4.711,77	644,55	13,68	942,35	297,80
18	Kab. Karanganyar	11.329,22	1.834,14	16,19	2.265,84	431,70
19	Kab. Purworejo	10.733,66	643,12	5,99	2.146,73	1.503,61
20	Kab. Temanggung	4.647,70	152,58	3,28	929,54	776,96
21	Kab. Wonosobo	4.981,43	941,66	18,90	996,29	54,63
22	Kab. Kebumen	15.444,03	2.267,79	14,68	3.088,81	821,02
23	Kab. Magelang	95.262,08	286,24	0,30	19.052,42	18.766,18
24	Kota Magelang	17.515,23	70,23	0,40	3.503,05	3.432,82
25	Kab. Banjarnegara	6.308,32	396,51	6,29	1.261,66	865,15
26	Kab. Banyumas	6.308,32	1.130,54	17,92	1.261,66	131,12
27	Kab. Batang	8.817,52	614,00	6,96	1.763,50	1.149,50
28	Kab. Brebes	14.390,90	834,59	5,80	2.878,18	2.043,59
29	Kab. Cilacap	37.762,77	5.120,52	13,56	7.552,55	2.432,03
30	Kota Pekalongan	4.394,75	388,54	8,84	878,95	490,41
31	Kota Tegal	429,22	13,28	3,09	85,84	72,56
32	Kab. Pekalongan	7.193,66	240,17	3,34	1.438,73	1.198,56
33	Kab. Pemalang	16.966,12	1.692,46	9,98	3.393,22	1.700,76
34	Kab. Purbalingga	9.675,13	315,33	3,26	1.935,03	1.619,70
35	Kab. Tegal	7.827,85	783,25	10,01	1.565,57	782,32
JUMLAH		586.723,46	44.772,04	9,31	117.344,69	72.533,35

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Selanjutnya seluruh kegiatan pemanfaatan ruang harus sesuai dengan rencana tata ruang. Kondisi saat ini, tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap Rencana Tata Ruang di Jawa Tengah sebesar 68,725%. Angka ini tentu perlu dipertahankan bahkan ditingkatkan melalui upaya pengendalian pemanfaatan ruang.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah/tempat tinggal beserta lingkungan yang aman dan sehat merupakan kebutuhan dasar setiap orang. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan salah satu prioritas nasional yang telah ditetapkan yaitu pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar dengan Program Prioritasnya Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Perumahan dan Permukiman Layak. Kebutuhan rumah sangat dipengaruhi oleh kondisi demografi. Rata-rata laju pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah sebesar 0,78% dimaknai juga sebagai pertumbuhan jumlah keluarga baru yang pada akhirnya akan meningkatkan kebutuhan rumah bagi keluarga.

Terpenuhinya kebutuhan rumah/tempat tinggal sangat bergantung pada sisi kebutuhan (*demand*) dan sisi penyediaan (*supply*). Sisi kebutuhan dipengaruhi oleh kemampuan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah/tempat tinggal. Sedangkan sisi penyediaan ditentukan oleh kemampuan badan usaha/lembaga untuk membangun rumah. Adanya gap antara kebutuhan dan ketersediaan rumah ini yang sering kita sebut dengan *Backlog* rumah.

Data BPS menunjukkan bahwa jumlah *backlog* rumah tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan kecenderungan peningkatan baik sisi *backlog* kependhunian maupun *backlog* kepemilikan. Berdasarkan perhitungan data perumahan dari BPS tahun 2015-2017, laju pertumbuhan rata-rata jumlah rumah di Jawa Tengah sebesar 0,25% per tahun. Angka rata-rata laju pertumbuhan rumah tersebut tidak sebanding dengan laju pertumbuhan rata-rata pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah sebesar 0,71% per tahun pada tahun yang sama.

Tabel 2.71.

Backlog Kependhunian dan Kepemilikan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017

No	Kabupaten/Kota	2015		2016		2017	
		<i>Backlog</i> Milik	<i>Backlog</i> Huni	<i>Backlog</i> Milik	<i>Backlog</i> Huni	<i>Backlog</i> Milik	<i>Backlog</i> Huni
1	Kab.Cilacap	20.135	13.670	32.646	22.679	33.567	27.166
2	Kab.Banyumas	21.384	14.077	29.630	10.546	35.597	20.585
3	Kab.Purbalingga	10.976	9.679	11.783	9.773	17.222	12.611
4	Kab.Banjarnegara	3.837	1.594	11.453	10.066	15.998	13.472
5	Kab.Kebumen	19.142	14.983	20.562	17.866	32.727	28.145
6	Kab.Purworejo	27.812	21.479	27.732	22.961	42.034	35.907
7	Kab.Wonosobo	10.553	6.794	10.512	7.309	17.374	13.274
8	Kab.Magelang	19.687	13.537	24.509	16.179	26.327	20.343
9	Kab.Boyolali	7.293	4.207	8.506	6.610	18.443	12.296

No	Kabupaten/Kota	2015		2016		2017	
		Backlog Milik	Backlog Huni	Backlog Milik	Backlog Huni	Backlog Milik	Backlog Huni
10	Kab.Klaten	21.644	16.274	27.504	21.953	46.233	37.381
11	Kab.Sukoharjo	37.265	20.370	30.408	19.762	45.826	28.524
12	Kab.Wonogiri	6.545	3.931	8.099	6.441	13.596	10.417
13	Kab.Karanganyar	9.075	4.631	9.892	3.749	15.296	11.247
14	Kab.Sragen	15.367	10.672	9.063	6.172	24.891	22.439
15	Kab.Grobogan	12.091	8.683	17.407	16.544	24.885	19.207
16	Kab.Blora	11.372	8.520	10.468	7.382	17.298	14.118
17	Kab.Rembang	6.237	3.933	8.916	6.963	9.345	7.824
18	Kab.Pati	12.658	9.073	17.879	16.568	23.240	20.447
19	Kab.Kudus	18.966	13.890	12.377	10.536	15.271	11.077
20	Kab.Jepara	13.956	10.274	18.930	16.949	31.954	26.733
21	Kab.Demak	6.470	4.118	14.617	11.867	15.832	12.934
22	Kab.Semarang	19.801	9.175	27.936	15.597	20.992	10.294
23	Kab.Temanggung	8.617	3.939	10.482	7.989	11.566	8.316
24	Kab.Kendal	11.441	8.122	21.203	19.408	27.457	22.103
25	Kab.Batang	6.814	3.908	7.402	5.774	13.732	11.734
26	Kab.Pekalongan	14.603	12.948	20.518	18.788	32.780	29.183
27	Kab.Pemalang	11.359	8.428	22.652	19.940	44.367	35.865
28	Kab.Tegal	65.175	59.634	66.837	61.195	72.469	70.231
29	Kab.Brebes	57.698	51.053	58.604	55.283	71.536	66.400
30	KotaMagelang	9.035	4.850	10.628	4.644	12.775	7.236
31	KotaSurakarta	58.084	25.145	54.313	26.496	60.653	33.446
32	KotaSalatiga	13.758	3.209	13.510	4.376	19.772	6.732
33	KotaSemarang	118.806	60.936	142.504	75.941	163.643	94.962
34	KotaPekalongan	19.480	17.836	16.629	14.192	21.994	17.208
35	KotaTegal	25.712	20.131	25.625	20.434	30.142	24.290
	Jumlah Total	752.848	503.703	861.738	618.932	1.127.202	844.226

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa tingkat pendapatan rumah tangga juga akan berpengaruh terhadap kemampuan untuk memiliki rumah. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dan Masyarakat Miskin (Maskin) akan sulit memenuhi kebutuhan akan rumah yang layak huni karena rendahnya pendapatan.

Hasil Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) tahun 2015 di Jawa Tengah, jumlah Kepala Rumah Tangga (KRT) dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah sebanyak 3.885.900 KRT. Dari 3.885.900 KRT, jumlah Kepala Rumah Tangga (KRT) Miskin di Jawa Tengah yang tidak memiliki rumah dan tidak memiliki aset tanah sejumlah 359 KRT.

Tabel 2.72.
**Jumlah Kepala Rumah Tangga (KRT) Tingkat Kesejahteraan 40%
 Terendah Yang Belum Memiliki Rumah Di Jawa Tengah Tahun 2015**

No	Kabupaten/Kota	Jumlah KRT	No	Kabupaten/Kota	Jumlah KRT
1	Cilacap	27	19	Kudus	5
2	Banyumas	-	20	Jepara	17
3	Purbalingga	10	21	Demak	28
4	Banjarnegara	6	22	Semarang	3
5	Kebumen	2	23	Temanggung	12
6	Purworejo	11	24	Kendal	6
7	Wonosobo	2	25	Batang	5
8	Magelang	20	26	Pekalongan	34
9	Boyolali	-	27	Pemalang	-
10	Klaten	25	28	Tegal	58
11	Sukoharjo	-	29	Brebes	20
12	Wonogiri	5	30	Kota Magelang	2
13	Karanganyar	-	31	Kota Surakarta	3
14	Sragen	6	32	Kota Salatiga	1
15	Grobogan	-	33	Kota Semarang	4
16	Blora	10	34	Kota Pekalongan	-
17	Rembang	14	35	Kota Tegal	-
18	Pati	23	Jumlah total		359

Sumber : Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT), 2015

Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat miskin juga berpengaruh pada jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Mendasarkan data dari Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) Tahun 2015, jumlah RTLH di Jawa Tengah tercatat sebesar 1.691.660 Kepala Rumah Tangga (KRT) terdiri dari:

- 1) Prioritas 1, tiga dari ketiga komponen (atap, lantai dan dinding/aladin) tidak layak sebanyak : 72.935 KRT;
- 2) Prioritas 2, dua dari ketiga komponen (atap, lantai dan dinding/aladin) tidak layak sebanyak : 848.387 KRT; dan
- 3) Prioritas 3, satu dari ketiga komponen (atap, lantai dan dinding/aladin) tidak layak sebanyak : 770.338 KRT.

Tabel 2.73.
Persebaran Jumlah RTLH di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015

No	Kabupaten/ Kota	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Jumlah
1	Cilacap	3.775	35.908	44.614	84.297
2	Banyumas	8.504	43.970	61.218	113.692
3	Purbalingga	11.125	19.371	42.751	73.247
4	Banjarnegara	3.720	8.829	19.152	31.701
5	Kebumen	1.848	17.144	29.521	48.513
6	Purworejo	659	14.461	14.054	29.174
7	Wonosobo	5.538	22.435	32.178	60.151
8	Magelang	70	32.943	33.260	66.273
9	Boyolali	96	34.271	22.619	56.986
10	Klaten	19	7.031	17.725	24.775

No	Kabupaten/ Kota	Prioritas 1	Prioritas 2	Prioritas 3	Jumlah
11	Sukoharjo	9	6.272	12.093	18.374
12	Wonogiri	28	16.804	28.981	45.813
13	Karanganyar	33	3.000	11.979	15.012
14	Sragen	25	36.120	16.004	52.149
15	Grobogan	195	130.737	23.896	154.828
16	Blora	72	78.017	14.757	92.846
17	Rembang	42	39.118	20.493	59.653
18	Pati	333	49.212	37.819	87.364
19	Kudus	9	1.658	6.654	8.321
20	Jebara	913	21.613	32.702	55.228
21	Demak	89	53.822	35.136	89.047
22	Semarang	34	22.696	18.825	41.555
23	Temanggung	1.359	17.007	21.409	39.775
24	Kendal	1.194	35.910	20.786	57.890
25	Batang	5.205	25.858	20.137	51.200
26	Pekalongan	3.870	7.949	13.203	25.022
27	Pemalang	16.188	22.406	34.517	73.111
28	Tegal	6.776	14.992	22.892	44.660
29	Brebes	1.077	23.453	44.108	68.638
30	Kota Magelang	4	102	706	812
31	Kota Surakarta	6	210	1.736	1.952
32	Kota Salatiga	5	520	1.904	2.429
33	Kota Semarang	108	4.159	10.042	14.309
34	Kota Pekalongan	1	338	1.827	2.166
35	Kota Tegal	6	51	640	697
Jumlah		72.935	848.387	770.338	1.691.660

Sumber : *Permutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT), Tahun 2015*

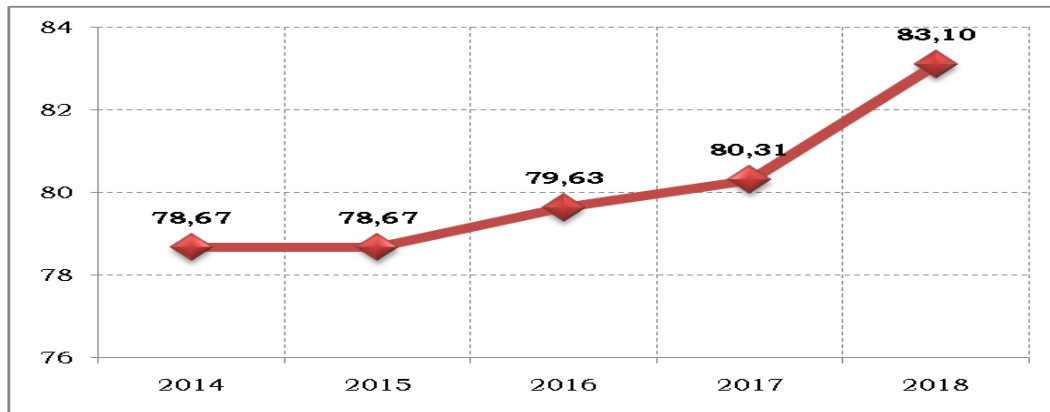
Intervensi program penanganan RTLH telah dilakukan mulai tahun 2011 dengan melibatkan Pemerintah, Pemerintah Daerah serta didukung oleh *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari swasta. Penanganan RTLH ini dilakukan dalam rangka mengurangi beban pengeluaran rumah tangga miskin di Jawa tengah. Adapun perkembangan penanganan RTLH beserta Rasio Rumah Layak Huni tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.74.

**Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2017**

Tahun	Sumber Pembiayaan					Jumlah (Unit)
	APBN	APBD Prov.	APBD Kab/Kota	CSR	Swadaya/ lainnya	
2013	22.545	2.344	40.366 *)	-	-	65.255
2014	50.928	3.870	14.448*)	181**)	641**)	70.068
2015	21.319	900	3.378*)	572**)	-	26.169
2016	5.839	3.601	8.070*)	1.045**)	-	18.555
2017	5.221	19.587	9.589*)	445**)	-	34.842
Total	105.852	30.302	75.851*)	2.243**)	641**)	214.889

Sumber: *Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2018*



Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2019

Gambar 2.65.

Perkembangan Rasio Rumah Layak Huni Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Kebutuhan rumah layak huni juga dapat disebabkan karena adanya faktor geografi yaitu bencana alam. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 terdapat 2 jenis layanan terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan yaitu:

- penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi;
- fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.

Provinsi Jawa Tengah termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi yang terdiri dari 10 kawasan rawan bencana. Adapun data rumah korban terdampak bencana di Jawa Tengah Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.75.

Data Kejadian Bencana dan Rumah Korban Bencana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018*)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan
1	Cilacap	67	54	91	576
2	Banyumas	45	38	28	239
3	Purbalingga	15	14	9	31
4	Banjarnegara	83	356	282	422
5	Kebumen	32	10	25	139
6	Purworejo	9	-	2	9
7	Wonosobo	35	14	4	39
8	Magelang	72	10	10	228
9	Boyolali	28	6	1	73
10	Klaten	15	5	8	67
11	Sukoharjo	4	4	-	2
12	Wonogiri	71	9	17	125
13	Karanganyar	26	4	6	35
14	Sragen	51	6	5	113
15	Grobogan	37	27	14	277
16	Blora	12	16	11	66

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian	Rusak Berat	Rusak Sedang	Rusak Ringan
17	Rembang	4	-	-	12
18	Pati	57	19	15	36
19	Kudus	55	7	2	37
20	Jepara	35	12	6	21
21	Demak	23	26	2	6
22	Semarang	9	5	1	6
23	Temanggung	60	15	12	111
24	Kendal	34	8	18	54
25	Batang	6	2	1	-
26	Pekalongan	35	8	1	17
27	Pemalang	14	10	12	12
28	Tegal	53	20	15	9
29	Brebes	49	39	134	168
30	Kota Magelang	1	-	-	1
31	Kota Surakarta	8	4	1	-
32	Kota Salatiga	1	-	-	-
33	Kota Semarang	121	15	14	56
34	Kota Pekalongan	7	1	8	1
35	Kota Tegal	10	-	2	1
TOTAL		1.184	764	757	2.989

Sumber : BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2018

Keterangan: *) Data dari Bulan Januari sampai dengan Bulan September 2018

Selain berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan rumah layak huni, hal lain yang perlu menjadi perhatian adalah kawasan permukiman kumuh yang masih cukup tinggi di Jawa Tengah. Rendahnya tingkat kesejahteraan, rendahnya perilaku hidup sehat, ketaatan dan kesadaran hukum terhadap kelestarian lingkungan menjadi salah satu faktor tumbuhnya kawasan permukiman kumuh di Jawa Tengah. Kawasan kumuh umumnya terdapat di kawasan perkotaan daripada di kawasan perdesaan.

Selain itu sejalan dengan berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Jawa Tengah turut menciptakan peluang lapangan pekerjaan. Implikasi dari peluang tersebut adalah terjadinya urbanisasi dari masyarakat untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Hal ini selanjutnya akan meningkatkan kebutuhan hunian masyarakat yang pada akhirnya dapat meningkatkan intensitas pemanfaatan lahan untuk permukiman (meningkatkan kepadatan bangunan).

Peningkatan pemanfaatan lahan untuk hunian yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat khususnya kategori MBR seringkali tidak diimbangi dengan aksesibilitas Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yang memadai. Tidak terdapatnya akses air minum, air bersih, sanitasi di kawasan permukiman salah satu contohnya. Akibatnya kualitas kawasan permukiman semakin lama akan semakin menurun. Kondisi ini dapat berakibat munculnya kawasan permukiman kumuh.

Berdasarkan hasil identifikasi kawasan kumuh sesuai keputusan Bupati dan Walikota di Provinsi Jawa Tengah, jumlah total kawasan kumuh di

Jawa Tengah seluas 3.952,98 ha. Berdasarkan luasan sesuai pembagian urusan, maka luasan kawasan kumuh dibagi menjadi 3 klasifikasi yaitu dibawah 10 ha, antara 10-15 ha dan di atas 15 ha. Luasan kumuh dibawah 10 ha menjadi tanggung jawab kabupaten/ kota, luasan kumuh 10-15 ha merupakan tanggung jawab Provinsi, serta luasan kumuh di atas 15 ha merupakan tanggung jawab Pusat.

Tabel 2.76.

Luas Kawasan Permukiman Kumuh Di Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian	<10 ha	10-15 ha	>15 ha	Total
1	Luas (ha)	1.029,6	612,48	2.310,9	3.952,98 Ha
2	Jumlah kawasan	267	51	92	410 Kawasan

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2018

Penanganan permukiman kumuh di Jawa Tengah tahun 2013 seluas mencapai 73,19 ha (7,80 %) dan meningkat mencapai 362,94 ha (16,62%) pada tahun 2017. Adapun perkembangan luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani di Jawa Tengah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.77.

Luas Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017

Tahun	Jumlah Capaian per Tahun (Ha)	Kumulatif Capaian (Ha)	% Capaian per Tahun	% Capaian Kumulatif
2013	14,44	73,19	1,54	7,80
2014	47,20	120,39	5,03	12,83
2015	11,25	131,65	1,20	14,03
2016	141,27*)	272,92*)	1,54*)	15,57
2017	90,02*)	362,94	0,98*)	16,62

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Jateng, 2018

Pendataan perumahan dan kawasan permukiman menjadi persoalan tersendiri saat ini. Belum adanya koordinasi dan sinergi pendataan dapat berakibat terbatasnya data yang dimiliki serta kurang sinerginya penanganan permasalahan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 Tentang Statistik, maka pemenuhan statistik dasar diselenggarakan oleh BPS. Sedangkan statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan badan. Oleh karena itu diharapkan adanya sinergi dalam pendataan yang dilakukan oleh BPS dan instansi pemerintah.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

a. Kondusivitas Wilayah

Kondusivitas wilayah dapat diukur dari jumlah tindak pidana yang tertangani. Capaian kinerja penyelesaian kasus tindak pidana di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2014-2018 adalah sebesar 68,0%. Kinerja penyelesaian tindak pidana di wilayah Jawa Tengah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir cenderung meningkat dari 63,8% pada tahun 2014 menjadi 73,7% pada tahun 2018.

Tabel 2.78.
Jumlah Tindak Pidana Yang Tertangani di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2018

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana		Kinerja Penyelesaian Tindak Pidana (%)
		Lapor	Selesai	
1.	2014	16.733	10.672	63,8
2.	2015	15.245	9.771	64,1
3.	2016	13.425	9.176	68,4
4.	2017	11.420	8.489	74,3
5.	2018	9.834	7.251	73,7
J U M L A H		66.657	45.359	68,0

Sumber: Polda Jawa Tengah, 2019

Selain jumlah tindak pidana yang tertangani, kondusivitas wilayah juga dapat diukur dari jumlah unjuk rasa berdasarkan kelompok massa maupun tuntutan.

Tabel 2.79.
Unjuk Rasa Berdasarkan Kelompok Massa di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014-2018

No.	Kelompok Massa	Tahun / Jumlah				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Guru	1	0	1	1	2
2	Mahasiswa	99	240	8	1	10
3	Buruh	67	117	5	7	17
4	Masyarakat	207	46	65	50	79
5	Warga Desa	0	0	0	0	0
6	Ormas/Parpol	0	0	0	0	0
	JUMLAH	374	403	369	279	108

Sumber : Polda Jawa Tengah, 2019

Unjuk rasa berdasar kelompok massa dari tahun ke tahun cenderung menurun, bahkan jumlah unjuk rasa pada tahun 2018 merupakan jumlah unjuk rasa terendah intensitasnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Kondisi demikian secara umum dapat menunjukkan situasi di Jawa Tengah relatif semakin kondusif.

Tabel 2.80.
Unjuk Rasa Berdasarkan Tuntutan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No	Tuntutan	Tahun					Total
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Ideologi	0	0	0	0	0	0
2	Politik	279	226	300	201	10	1.016
3	Ekonomi	62	127	40	51	31	311
4	Sosbud	4	35	5	4	60	108
5	Hukum dan HAM	29	15	17	11	7	79
6	Pendidikan	0	0	7	12	0	19
7	Kesehatan	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	374	403	369	279	108	1.533

Sumber : Polda Jawa Tengah, 2018

Unjuk rasa berdasarkan tuntutan selama periode tahun 2014 – 2018 dominan di jenis tuntutan politik (69,27%) yang tentunya sangat rawan apabila tidak ditangani secara tuntas dan sedini mungkin. Melihat kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus melakukan upaya penciptaan kondusivitas wilayah melalui optimalisasi fungsi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam upaya deteksi dini terhadap potensi dan kecenderungan ancaman serta gejala atau peristiwa yang strategis, dan meningkatkan sinergi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Instansi Vertikal (Kodam, Polda, BINDA, dan Kejati), dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menjaga keamanan dan kenyamanan wilayah.

b. Kualitas Kehidupan Demokrasi Jawa Tengah

Kondisi demokrasi di Jawa Tengah dapat dilihat dari Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang diukur melalui 3 aspek, yaitu kebebasan sipil (*civil liberty*), hak-hak politik (*political rights*), dan kelembagaan demokrasi (*democratic institution*), terdiri dari 11 variabel dan 28 indikator. Pencapaian skor IDI Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung meningkat dari 60,84 pada tahun 2013 menjadi 70,85 pada tahun 2017. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya kinerja pada variabel Kebebasan Berpendapat, Kebebasan Berkeyakinan, Hak Memilih dan Dipilih, Peran DPRD, dan Peran Birokrasi Pemerintah Daerah.

Tabel 2.81.

Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

No.	Aspek/Variabel	Tahun (Skor)				
		2013	2014	2015	2016	2017
I.	Kebebasan Sipil	79,18	87,87	79,44	66,06	69,07
	1. Kebebasan Berkumpul dan Berserikat	35,00	91,25	92,97	12,50	6,25
	2. Kebebasan Berpendapat	61,09	76,12	72,89	75,70	61,82
	3. Kebebasan Berkeyakinan	81,31	87,06	71,58	66,51	81,54
	4. Kebebasan dari Diskriminasi	96,53	93,23	96,43	80,03	63,53
II.	Hak-Hak Politik	46,29	67,08	67,28	67,24	67,24
	1. Hak Memilih dan Dipilih	42,59	84,16	84,57	84,48	84,48
	2. Partisipasi Politik dalam Pengambilan Keputusan dan Pengawasan	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
III.	Lembaga Demokrasi	60,89	80,77	61,48	66,69	78,82
	1. Pemilu yang Bebas dan Adil	94,94	86,71	86,71	86,71	86,71
	2. Peran DPRD	43,32	43,22	46,75	50,50	79,74
	3. Peran Partai Politik	100,0	99,96	48,49	74,29	100,00
	4. Peran Birokrasi Pemerintah Daerah	80,30	98,48	30,13	27,43	83,16
	5. Peran Peradilan yang Independen	0,00	75,00	100,00	100,00	50,00
	Skor IDI	60,84	77,44	69,75	66,71	70,85

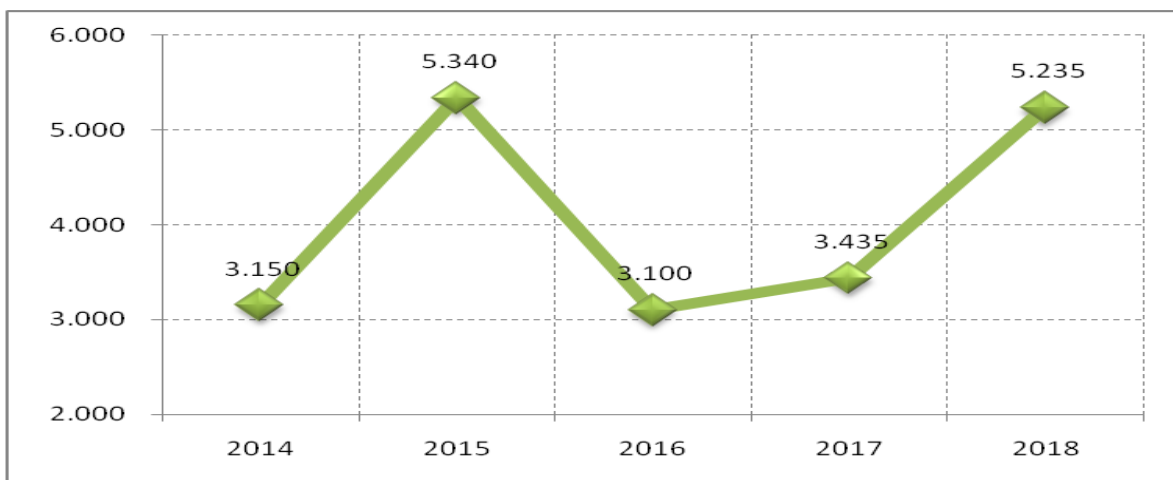
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Meskipun pencapaian IDI Provinsi Jawa Tengah cenderung mengalami peningkatan selama kurun waktu 2013 – 2017, namun ada beberapa variabel capaian IDI Provinsi Jawa Tengah tahun 2017 mengalami penurunan

dibanding tahun 2016, yang perlu mendapat perhatian dan upaya strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut, yaitu pada variabel kebebasan berkumpul dan berserikat; kebebasan berpendapat; kebebasan dari diskriminasi; dan peran peradilan yang independen.

c. Pendidikan Politik dan Tingkat Partisipasi Pemilih

Dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melaksanakan kegiatan pendidikan politik bagi 20.260 orang yang merupakan unsur elemen masyarakat dalam kurun waktu tahun 2014-2018, sebagai salah satu upaya peningkatan pemenuhan hak-hak politik masyarakat Jawa Tengah untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak maupun Pilpres dan Pileg.



Sumber: Badan Kesbangpol Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.66.

Jumlah Masyarakat Jawa Tengah Yang Telah Diberikan Pendidikan Politik Tahun 2014-2018

Tingkat partisipasi pemilih masyarakat Jawa Tengah dalam Pilkada Kabupaten/Kota pada tahun 2017 adalah sebesar 79,79% yang merupakan tingkat partisipasi pemilih tertinggi dibandingkan tahun 2013, 2015, dan 2018. Selanjutnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah adalah sebesar 73,19% pada tahun 2018, lebih tinggi dibandingkan tahun 2013, serta tingkat partisipasi pemilih dalam Pilleg sebesar 74% dan Pilpres sebesar 71,25% pada tahun 2014.

Tabel 2.82.

Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Jawa Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2013-2018

No.	Pemilihan Umum	Tahun (Persentase Rata-Rata)					
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Pilkada Kabupaten/Kota	64,40	-	68,54	-	79,79	77,40
2	Pilgub dan Wagub	55,64	-	-	-	-	73,19
3	Pilleg DPR/DPRD	-	74	-	-	-	-
4	Pilpres dan Wapres	-	71,25	-	-	-	-

Sumber: KPU Provinsi Jawa Tengah, 2018

Berdasarkan tabel di atas dapat dicermati bahwa untuk pilkada kabupaten/kota dan pilgub, partisipasi masyarakat telah cukup tinggi, yang masih perlu mendapat perhatian adalah terkait dengan partisipasi pemilih dalam pilleg dan pilpres tahun 2019. Salah satu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat adalah melalui peningkatan sinergi dan kerjasama antar tingkat pemerintahan dan lintas sektor dalam kegiatan pendidikan politik bagi masyarakat khususnya perempuan, kelompok marginal, pemilih pemula, dan penyandang disabilitas.

d. Kondisi Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah

Kondisi ketahanan nasional di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dari berbagai aspek pembangunan (8 gatra), baik gatra geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ketahanan nasional tersebut mencerminkan ketangguhan suatu wilayah dan dapat dianalisis dari Indeks Ketahanan Nasional (IKN) yang didalamnya mencakup 8 gatra, 37 aspek, 108 variabel, dan 821 indikator berbagai aspek pembangunan di Provinsi Jawa Tengah. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.83.

Indeks Ketahanan Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

No	GATRA	Tahun (Skor)									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi	Skor	Status Kondisi
1.	Geografi	2,83	●	2,49	●	2,63	●	2,81	●	2,81	●
2.	Demografi	3,16	●	3,16	●	3,12	●	3,13	●	3,09	●
3.	Sumber Kekayaan Alam	2,66	●	2,66	●	2,65	●	2,63	●	2,63	●
4.	Ideologi	2,97	●	2,97	●	2,61	●	2,58	●	2,58	●
5.	Politik	3,13	●	3,08	●	2,94	●	3,03	●	3,03	●
6.	Ekonomi	2,94	●	2,91	●	2,62	●	2,74	●	2,75	●
7.	Sosial dan Budaya	2,73	●	2,80	●	2,96	●	3,01	●	3,01	●
8.	Pertahanan dan Keamanan	2,50	●	2,76	●	2,78	●	3,08	●	3,08	●
Skor IKN		2,85	●	2,86	●	2,80	●	2,89	●	2,89	●

Sumber : Lemhannas, 2018

Keterangan:

- : Sangat Tangguh
- : Tangguh
- : Cukup Tangguh
- : Kurang Tangguh
- : Rawan

Pada tabel di atas dapat dicermati bahwa pencapaian skor IKN Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung meningkat dari 2,85 pada tahun 2013 menjadi 2,89 pada tahun 2017. Tren peningkatan skor IKN tersebut menunjukkan kondisi ketahanan 8 (delapan) gatra

pembangunan di wilayah Jawa Tengah secara makro pada level yang cukup tangguh, yaitu berada dalam kondisi yang cukup memadai untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan pembangunan, baik pada lingkup internal maupun eksternal wilayah Jawa Tengah. Pencapaian skor IKN terendah selama kurun waktu lima tahun terakhir yaitu sebesar 2,80 pada tahun 2015, yaitu pada skor gatra ideologi, politik, dan ekonomi. Hal tersebut mencerminkan adanya ancaman terhadap kinerja pembangunan pada ketiga gatra tersebut pada tahun 2015. Selain itu pada tahun 2016 dan 2017, gatra ideologi terutama aspek wawasan kebangsaan masih menunjukkan kinerja yang kurang tangguh, sehingga masih perlu ditingkatkan kinerjanya pada aspek tersebut. Ancaman tersebut dapat segera diatasi melalui kerjasama yang intensif antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Instansi Vertikal serta dibuktikan dengan adanya peningkatan skor IKN menjadi sebesar 2,89 pada tahun 2016 dan 2017.

e. Kehidupan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama di Jawa Tengah

Pemeliharaan kerukunan antar umat beragama merupakan kebutuhan pokok bangsa Indonesia, termasuk masyarakat Jawa Tengah. Kerukunan antar umat beragama sebagai bagian integral dari kerukunan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini salah satunya tercermin dari jaminan perlindungan negara terhadap hak asasi manusia (HAM) setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya tersebut. Seluruh warga negara Indonesia, termasuk masyarakat Jawa Tengah berkewajiban untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain antar umat beragama sebagai wujud dari toleransi beragama. Implementasi prinsip toleransi, kesetaraan, dan kerjasama antar umat beragama diharapkan akan mampu menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal ini dapat dianalisis dari Indeks Kerukunan Umat Beragama yang selengkapnya bisa dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.84.
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2017

No.	DIMENSI	Tahun (Skor)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Toleransi	NA	NA	NA	NA	73,9
2.	Kesetaraan	NA	NA	NA	NA	73,1
3.	Kerjasama	NA	NA	NA	NA	74,2
Skor IKUB		NA	NA	76,5	77,6	73,7

Sumber : Balitbang Kemenag, 2018

Pencapaian skor IKUB Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2015-2017 cenderung menurun dari 76,5 pada tahun 2015 menjadi 73,7 pada tahun 2017. Tren penurunan skor IKUB tersebut menunjukkan kehidupan toleransi dan kerukunan umat beragama di wilayah Jawa Tengah terpengaruh oleh kondisi tahun politik dan isu agama pada saat sebelum dan menjelang pilkada serentak, akan tetapi secara makro kehidupan masyarakat Jawa Tengah berada pada kategori rukun, yang artinya implementasi prinsip

toleransi (menerima dan menghormati perbedaan), kesetaraan, dan kerjasama antar umat beragama di wilayah Jawa Tengah secara umum dalam kondisi baik.

f. Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Kamtramtibum

Pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah provinsi dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Selama kurun waktu 2014 - 2018 rasio Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah meningkat dari 0,53 menjadi 0,76. Kenaikan ini dikarenakan masuknya urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, sehingga kelembagaan Satpol PP baik provinsi maupun kabupaten/kota ditingkatkan dan jumlah personil Satpol PP diperbanyak disesuaikan tugas pokok Satpol PP dalam penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Tabel 2.85.
Rasio Jumlah Polisi PP per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No	Tahun	Jumlah Polisi PP	Jumlah Penduduk	Rasio
1	2014	1.798	33.522.663	0,53
2	2015	3.081	33.774.140	0,91
3	2016	2.672	33.774.140	0,79
4	2017	2.769	34.257.865	0,81
5	2018	2.635	34.257.865	0,76

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, 2019

Meskipun jumlah anggota Satpol PP mengalami peningkatan namun tidak sebanding dengan penambahan jumlah penduduk di Jawa Tengah, oleh karena itu salah satu upaya yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan kemampuan Kader Siaga Tramtib (KST) yang telah terbentuk di 35 kabupaten/kota agar lebih dapat berdayaguna dan meningkat peran sertanya dalam upaya meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan daerah, meningkatkan dukungan upaya-upaya preventif dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum serta peran serta dalam perlindungan masyarakat.

Tabel 2.86.
Penyelesaian Pelanggar Perda Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Pelanggar Perda	Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Perda	Persentase
1	2014	1.357	1.357	100
2	2015	2.042	2.042	100
3	2016	1.425	1.425	100
4	2017	1.101	1.101	100
5	2018	1.000	1.000	100

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah, 2019

Berdasarkan data di atas persentase penyelesaian pelanggaran Perda setiap tahunnya dapat mencapai 100%. Hal ini berarti bahwa setiap pelanggaran Perda yang terdata telah dapat diselesaikan semuanya baik

melalui cara-cara yang sifatnya persuasif maupun represif. Upaya yang akan dilakukan pada masa mendatang adalah dengan melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk lebih meningkatkan kesadaran akan kepatuhan terhadap Perda, sedangkan upaya yang sifatnya represif baru akan dilakukan jika upaya pembinaan tidak dipatuhi oleh pelanggar.

g. Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Kamtramtibum

Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kamtramtibum merupakan salah satu alternatif upaya yang ditempuh untuk mengatasi permasalahan kurangnya jumlah personil aparat pengamanan. Upaya pemberdayaan yang dilakukan antara lain melalui perekrutan Linmas.

Tabel 2.87.

Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No	Tahun	Jumlah Linmas	Jumlah Penduduk	Rasio
1	2014	269.342	33.522.663	80,34
2	2015	255.810	33.774.140	75,74
3	2016	249.031	34.019.095	73,20
4	2017	242.020	34.257.865	70,64
5	2018	311.746	34.257.865	90,99

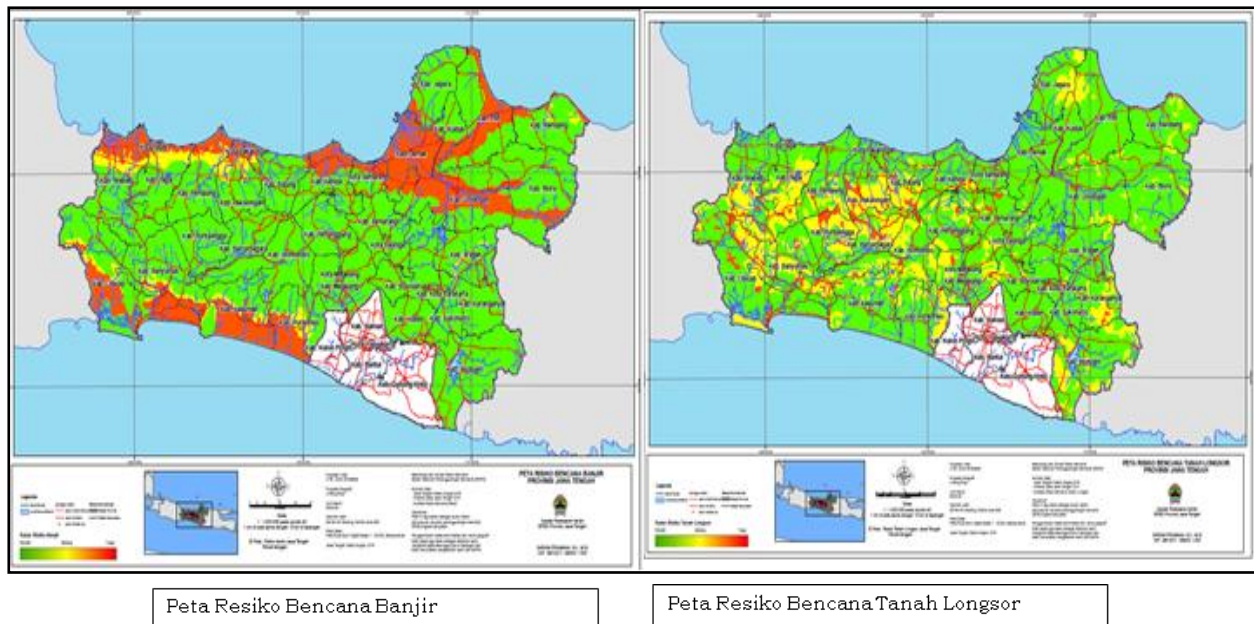
Sumber : Satpol PP Provinsi Jawa Tengah, 2019

Berdasarkan data di atas, rasio jumlah linmas terhadap jumlah penduduk Jawa Tengah dari tahun 2014 – 2018 mengalami penurunan dari 80,34% di tahun 2014 menjadi 70,64% pada tahun 2017, dan kembali naik di tahun 2018 menjadi sebesar 90,99%. Hal tersebut dikarenakan ada sejumlah faktor yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menjadi anggota linmas, kemampuan dan keterampilan, serta kesejahteraan anggota linmas di kabupaten/kota.

h. Penanggulangan Bencana

Karakteristik Jawa Tengah yang memiliki potensi bencana besar mendorong pemerintah dan seluruh *stakeholder* dan masyarakat untuk melaksanakan upaya pra bencana yang mencakup pencegahan, mitigasi, kesiapiagaan serta peringatan dini mengingat bencana alam dapat terjadi secara tiba-tiba. Risiko bencana dapat terjadi karena kurangnya kesiapsiagaan dan kewaspadaan masyarakat dalam menghadapi bencana, oleh karena itu kesiapsiagaan merupakan tahapan yang strategis untuk mewujudkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi bencana.

Melihat banyaknya ancaman bencana di Jawa Tengah, setidaknya terdapat 1.674 desa/kelurahan atau 19,5% dari seluruh desa/kelurahan di Jawa Tengah merupakan daerah rawan banjir dan 2.136 desa/kelurahan atau 24,9% rawan tanah longsor. Selain itu, pesatnya pembangunan menyebabkan meningkatnya risiko bencana kebakaran yang terjadi di pusat-pusat pembangunan dan kegiatan masyarakat, baik kebakaran hutan, lahan maupun perumahan. Daerah rawan bencana banjir dan tanah longsor di Jawa tengah terlihat pada gambar peta berikut.



Sumber : Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2017

Gambar 2.67.

Peta Risiko Bencana Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2017

Desa tangguh bencana merupakan salah satu upaya kesiapsiagaan dan pengurangan risiko bencana, dengan membentuk desa yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampak bencana yang merugikan. Indikator kunci desa tangguh bencana yaitu penguatan kualitas layanan dasar, penguatan pengelolaan risiko bencana termasuk di dalamnya adaptasi perubahan iklim melalui proses pemberdayaan masyarakat, sistem koordinasi dalam pengelolaan risiko bencana, penguatan sistem kesiapsiagaan untuk mendukung kegiatan tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi paska bencana. Perkembangan pembentukan desa tangguh bencana (destana) di Jawa Tengah kurun waktu 2014 – 2018 sebagai berikut.

Tabel 2.88.

Pembentukan Desa Tangguh Bencana Tahun 2014 - 2018

No	Tahun	Desa Tangguh Bencana yang dibentuk per Tahun	Jumlah Desa yang Terbentuk
1	2014	6	34 desa
2	2015	10	44 desa
3	2016	8	52 desa
4	2017	8	60 desa
5	2018	8	68 desa

Sumber : Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2019

Upaya pengurangan risiko bencana yang efektif dapat dilakukan adalah melalui mitigasi non struktural, antara lain dengan usaha peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dengan penerapan *Early Warning System* (sistem peringatan dini) berbasis masyarakat dilokasi yang rentan terhadap bencana.

Tabel 2.89.
Pemasangan EWS Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

No	Tahun	EWS		Jumlah
		BPBD	ESDM	
1	2014	-	14	14
2	2015	2	12	14
3	2016	2	-	2
4	2017	5	-	5
5	2018	8	-	8
Total Jawa Tengah		17	29	46

Sumber : Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2018

Selain pemasangan *Early Warning System* (sistem peringatan dini) pada daerah dengan tingkat risiko bencana tinggi, upaya lain dalam rangka peningkatan kesiapsiagaan masyarakat melalui penempatan rambu-rambu jalur evakuasi.

Tabel 2.90.
Pemasangan Rambu Jalur Evakuasi Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Rambu Jalur Evakuasi
1	s/d 2013	90
2	2014	90
3	2015	90
4	2016	120
5	2017	90
6	2018	150
Total Jawa Tengah		630

Sumber : Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2019

Tingginya resiko bencana di Jawa Tengah dan banyaknya potensi dan daerah rawan bencana, upaya mitigasi bencana berupa pemasangan *Early Warning System* (EWS) dan rambu-rambu jalur evakuasi masih belum banyak dipasang, sehingga ketika bencana terjadi, banyak masyarakat belum memahami, siap dan tanggap saat kejadian bencana. Oleh sebab itu, di lokasi yang rentan terhadap bencana perlu adanya pemasangan EWS dan jalur-jalur evakuasi ini disertai dengan peningkatan kapasitas masyarakat sehingga ketika terjadi bencana dapat dihindari ataupun diminimalisir adanya korban jiwa dan kerugian harta benda.

Bencana alam merupakan salah satu faktor yang mewarnai kondisi kehidupan masyarakat dan menjadi perhatian yang serius pemerintah dan masyarakat. Korban bencana alam merupakan kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan penanganan dan bantuan agar dapat melaksanakan fungsi sosial secara normal serta pemulihan dari dampak bencana yang dilaksanakan secara terpadu diantaranya perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana, pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana, penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana. Selama kurun waktu 2014 – 2018,

Bencana yang terjadi di Jawa Tengah baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia terinci pada tabel berikut.

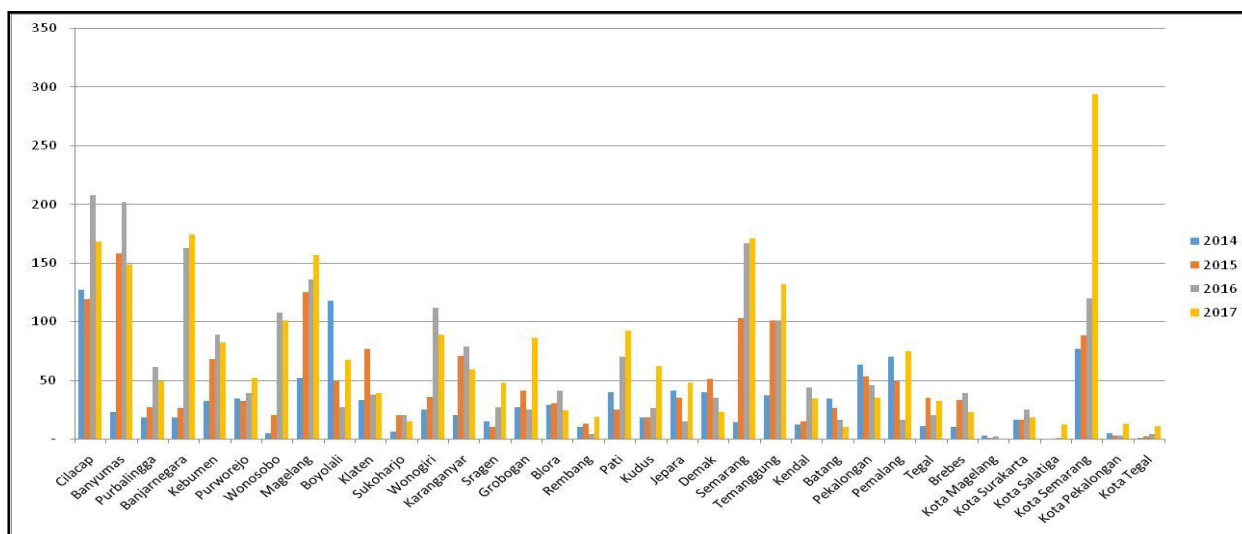
Tabel 2.91.

Jumlah Korban Akibat Bencana di Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

Tahun	Jumlah Kejadian Bencana	Jumlah Korban			
		Meninggal Dunia	Hilang	Luka Berat	Luka Ringan
2014	904	249	153	27	96
2015	1.574	25	-	25	65
2016	2.112	129	96	61	96
2017	2.463	60	3	60	107
2018	1.760	39	4	17	124

Sumber : Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2019

Jumlah kejadian bencana di 35 kabupaten/kota dari tahun 2014 – 2017 menunjukkan bahwa intensitas kejadian bencana terbesar berada di Kabupaten Cilacap, Banyumas, Banjarnegara, Semarang, Wonosobo, Magelang Temanggung dan Kota Semarang dengan kejadian bencana meliputi tanah longsor, banjir, kebakaran.



Sumber : Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.68.

Jumlah Kejadian Bencana 35 Kabupaten/Kota Tahun 2014 - 2017

Mendasarkan data kejadian bencana di Jawa Tengah tahun 2015 – 2018, menunjukkan bahwa kejadian bencana yang paling dominan dilaporkan adalah bencana tanah longsor dan banjir. Sedangkan dari aspek kerusakan/kerugian akibat bencana, jumlah kerugian terbesar akibat bencana adalah bencana kebakaran. Rekapitulasi kejadian bencana dan taksiran kerugian di Jawa Tengah selama tahun 2015 - 2018 adalah sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 2.92.**Kejadian dan Taksiran Kerugian Bencana di Jawa Tengah 2015 – 2018**

No	Jenis Bencana	2015		2016		2017		2018	
		Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)	Jml	Kerugian (Rp. 000)	jml	Kerugian (Rp.000)
1	Angin Topan	308	3.440.523	419	7.648.565	490	8.016.727	407	5.445.666
2	Banjir	176	2.481.860	298	1.914.023.342	270	7.731.340	171	2.924.463
3	Tanah Longsor	491	6.220.084	927	185.627.303	1.091	21.025.867	555	5.111.986
4	Kekeringan	-	-	-	-	-	-	30	4.311.250
5	Kebakaran	572	35.602.002	468	1.127.741.291	600	40.622.373	589	33.866.505
6	Gempa Bumi	-	-	-	-	-	-	3	65.000
7	Letusan Gunung Api	-	-	-	-	-	-	5	
8	Lainnya	27	4.152	-	-	12	9.771.788		
		1.574	47.748.621	2.112	3.235.040.501	2.463	87.168.095	1.760	51.724.870

Sumber : Sekretariat BPBD Provinsi Jawa Tengah, 2019

6. Sosial

Pada aspek pelayanan umum penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) diselenggarakan melalui empat pilar. Pilar perlindungan dan jaminan sosial diarahkan kepada jaminan sosial bagi PMKS non produktif dan terlantar serta pemenuhan kebutuhan dasar korban pada saat dan paska kejadian bencana provinsi. Sedangkan pilar rehabilitasi sosial diarahkan guna pemenuhan kebutuhan sosial dasar PMKS yang dilaksanakan pada panti pelayanan sosial baik milik pemerintah provinsi dan masyarakat, serta penguatan kapasitas PSKS baik lembaga, perorangan, maupun keluarga perorangan guna meningkatkan perannya dalam melaksanakan Usaha Kesejahteraan Sosial.

a. Sarana Sosial

Panti pelayanan sosial milik Pemerintah Provinsi memiliki peran strategis sebagai ujung tombak yang bersentuhan langsung dalam penanganan PMKS dalam hal pemenuhan kebutuhan sosial dasar di dalam panti. Ketersediaan sarana prasarana sosial meliputi bangunan perkantoran, asrama serta bangunan penunjang lainnya antara lain mushola, ruang perawatan khusus, aula, rumah dinas sebanyak 807 unit termasuk Taman Makam Pahlawan Nasional Giri Tunggal Semarang, guna optimalisasi pelayanan sosial (penyediaan kebutuhan sosial dasar tempat tinggal) yang menjamin keamanan dan kenyamanan penerima manfaat selama proses rehabilitasi sosial.

Kondisi sarana prasarana panti pelayanan sosial saat ini sebanyak 93 unit rusak berat (tidak dapat digunakan), 86 rusak sedang (dimanfaatkan tetapi dapat membahayakan keselamatan jiwa), 93 rusak ringan (dimanfaatkan dengan alih fungsi), dan 535 baik/fungsional (operasional).

Tabel 2.93.
Jumlah dan Kondisi Bangunan Sosial
Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014–2018

No	Tahun	Jumlah Unit Bangunan	Kondisi Baik	Kondisi Rusak Ringan	Kondisi Rusak Sedang	Kondisi Rusak Berat
1	2014	769	573	76	58	62
2	2015	770	550	74	77	69
3	2016	775	544	70	86	75
4	2017	807	535	93	86	93
5	2018	807	578	93	86	50

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2019

Panti Pelayanan Sosial merupakan Unit Pelaksana Teknis yang melaksanakan pelayanan sosial secara langsung kepada PMKS sesuai dengan standar teknis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM). Daftar panti pelayanan sosial milik Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut.

Tabel 2.94.
Daftar Panti Pelayanan Sosial Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

No	Nama Panti	Nama Rumah Pelayanan Sosial	Daya Tampung	Jenis Pelayanan PMKS	Tempat Kedudukan
I.	UPT Kelas A				
1	Panti Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar "MARDI UTOMO" Semarang		110	Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar	Kota Semarang
		Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Intelektual Pamardi Mulyo	50	Penyandang Disabilitas Intelektual	Kabupaten Demak
2	Panti Pelayanan Sosial Anak "MANDIRI" Semarang		55	Anak Nakal	Kota Semarang
		Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia "PUCANG GADING"	115	Lanjut Usia Terlantar	Kota Semarang
3	Panti Pelayanan Sosial Anak "WIRA ADHI KARYA" Ungaran		70	Anak Putus Sekolah	Kabupaten Semarang
		Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia "WENING WERDOYO"	90	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Semarang
		Rumah Pelayanan Sosial Anak Balita "WILOSO TOMO"	30	Balita Terlantar	Kota Salatiga
4	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental "NGUDI RAHAYU" Kendal		187	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Kendal
		Rumah Pelayanan Sos Disabilitas Mental "BINA SEJAHTERA"	50	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Kendal
5	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia "CEPIRING" Kendal		100	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Kendal
		Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia "WELERI"	40	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Kendal
6	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia "TURUSGEDE" Rembang		70	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Rembang
		Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia "MARGO MUKTI"	75	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Rembang

No	Nama Panti	Nama Rumah Pelayanan Sosial	Daya Tampung	Jenis Pelayanan PMKS	Tempat Kedudukan
7	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental "PANGRUKTIMULYO" Rembang		125	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Rembang
		Rumah Pelayanan Sos Disabilitas Mental "PAMARDI KARYA"	50	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Rembang
8	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik "PENDOWO" Kudus		50	Penyandang Penyandang Disabilitas Sensorik	Kabupaten Kudus
		Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental "MURIA JAYA"	65	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Kudus
9	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia "POTROYUDAN" Jepara		80	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Jepara
		Rumah Pelayanan Sos Disabilitas Mental "WALUYOTOMO"	80	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Jepara
10	Panti Pelayanan Sosial Wanita "WANODYATAMA" Surakarta		150	Eks Wanita Tuna Susila	Kota Surakarta
		Rumah Pelayanan Sos Disabilitas Sensorik "BHAKTI CANDRASA"	75	Penyandang Disabilitas Sensorik	Kota Surakarta
11	Panti Pelayanan Sosial Anak "TARUNA YODHA" Sukoharjo		75	Anak Putus Sekolah	Kabupaten Sukoharjo
		Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental "ESTITOMO"	110	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Wonogiri
		Rumah Pelayanan Sos Disabilitas Mental "HESTINING BUDI"	65	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Klaten
12	Panti Pelayanan Sosial Anak "DHARMA PUTERA" Purworejo		75	Anak Putus Sekolah	Kabupaten Purworejo
		Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia "WILOSO WREDHO"	60	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Purworejo
		Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik Rungu Wicara "WIRA KARYA TAMA"	50	Penyandang Disabilitas Sensorik Rungu	Kabupaten Purworejo
13	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia "ADI YUSWO" Purworejo		100	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Purworejo
		Rumah Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar "MARDIGUNO"	50	Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar	Kabupaten Kebumen
14	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia "DEWANATA"		100	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Cilacap
		Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental "MARTANI"	80	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Cilacap
		Rumah Pelayanan Sosial PMKS "PAMARDI RAHARJO"	50	PMKS	Kabupaten Banjarnegara
15	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Intelektual "RAHARJO" Sragen		100	Penyandang Disabilitas Intelektual	Kabupaten Sragen
		Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia "MOJOMULYO"	50	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Sragen
		Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Fisik Gondang	50	Penyandang Disabilitas Fisik	Kabupaten Sragen

No	Nama Panti	Nama Rumah Pelayanan Sosial	Daya Tampung	Jenis Pelayanan PMKS	Tempat Kedudukan
		Rumah Pelayanan Sosial Anak Pamardi Siwi	100	Anak Terlantar	Kabupaten Sragen
16	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Mental "SAMEKTO KARTI" Pemalang		140	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Tegal
		Rumah Pelayanan Sosial Anak "PUTERA HARAPAN"	50	Anak Putus Sekolah	Kabupaten Tegal
17	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia "BISMA UPAKARA" Pemalang		100	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Pemalang
		Rumah Pelayanan Sosial Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar "KARYA MANDIRI"	50	Pengemis Gelandangan dan Orang Terlantar	Kabupaten Pemalang
18	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia "BOJONGBATA" Pemalang		100	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Pemalang
		Rumah Pelayanan Sosial Lanjut Usia "KLAMPOK"	90	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Brebes
		Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik "DISTRARAstra"	50	Penyandang Disabilitas Sensorik	Kabupaten Pemalang
19	Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Sensorik "PENGANTHI" Temanggung		75	Penyandang Disabilitas Sensorik	Kabupaten Temanggung
		Rumah Pelayanan Sosial Anak "MARDI YUWONO"	75	Anak Terlantar	Kabupaten Wonosobo
20	Panti Pelayanan Sosial PMKS "MARGO WIDODO" Semarang		150	PMKS	Kota Semarang
		Rumah Pelayanan Sosial Disabilitas Mental "SONO RUMEKSO"	85	Penyandang Disabilitas Mental	Kabupaten Grobogan
II.	UPT Kelas B				
21	Panti Pelayanan Sosial Anak "KASIH MESRA" Demak		80	Anak Terlantar	Kabupaten Demak
22	Panti Pelayanan Sosial Anak "PAMARDI UTOMO" Boyolali		80	Anak Terlantar	Kabupaten Boyolali
23	Panti Pelayanan Sosial Anak "SUKO MULYO" Tegal		90	Anak Terlantar	Kota Tegal
24	Panti Pelayanan Sosial Anak "WORO WILOSO" Salatiga		130	Anak Terlantar	Kota Salatiga
25	Panti Pelayanan Sosial Anak "KUMUDA PUTERA PUTERI" Magelang		120	Anak Terlantar	Kota Magelang
26	Panti Pelayanan Sosial Anak "TAWANGMANGU" Karanganyar		75	Anak Jalanan	Kabupaten Karanganyar
27	Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia "SUDAGARAN" Banyumas		100	Lanjut Usia Terlantar	Kabupaten Banyumas
TOTAL DAYA TAMPUNG 54 (PANTI/RUMPELSOS) DALAM 1 TAHUN			4.472		

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2018

b. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Populasi PMKS di Jawa Tengah cenderung fluktuatif, hal ini dikarenakan masih terdapat masyarakat dengan kondisi kemiskinan, keterlantaran, disabilitas, ketunaan, korban tindak kekerasan dan perdagangan orang, serta perubahan lingkungan sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi sosial. Oleh sebab itu pemerintah daerah berupaya melaksanakan penanganan PMKS melalui perlindungan dan jaminan sosial,

rehabilitasi sosial, penanganan fakir miskin, dan pemberdayaan sosial. Penanganan PMKS yang dilaksanakan Dinsos tahun 2013-2018 sebanyak 60.381 jiwa atau 4,45 % atau melebihi target kinerja sebanyak 3,5% selama 5 tahun, dimana 12.764 jiwa diantaranya adalah PMKS non produktif dan terlantar penerima bantuan sosial program Kartu Jateng Sejahtera (KJS).

Tabel 2.95.

Penanganan PMKS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

No	Tahun	Populasi PMKS	Jumlah Penanganan	Persentase
1	2014	5.016.701	33.712	0,67
2	2015	4.982.989	34.807	0,70
3	2016	4.948.182	35.232	0,71
4	2017	4.941.435	39.446	0,80
5	2018	4.882.380	60.381	1,24

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2019

c. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Populasi PSKS, sebagaimana hasil pemuthakiran data tahun 2017 terdiri atas 43.513 orang.

Tabel 2.96.

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) DI Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

NO	JENIS	2013	2014	2015	2016	2017
1	Karang Taruna	8.577	8.578	8.578	8.578	8.578
2	LKs/Orsos	1.367	899	914	914	911
3	PSM	36.478	28.260	28.260	28.260	28.260
4	TKSK	568	573	573	573	573
5	LK3	0	39	39	39	39
6	Kader Perempuan	550	550	550	550	550
7	Dunia Usaha	1.239	3330	3.330	3.330	3.330
8	Tagana	1.377	1.272	1.272	1.272	1.272
	Jumlah	50.156	43.501	43.516	43.516	43.513

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2018

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) merupakan unsur masyarakat yang memberikan dukungan riil dalam penanganan PMKS disekitarnya. Peningkatan kapasitas PSKS merupakan upaya dalam mendorong kemampuan memberikan sumbangsih dan dukungan terhadap percepatan penanganan PMKS.

Tabel 2.97.**Penguatan Kapasitas PSKS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018**

No	Tahun	Populasi PSKS	Jumlah Penguatan Kapasitas	Persentase
1	2014	43.501	2.298	5,28
2	2015	43.516	2.368	5,44
3	2016	43.516	2.468	5,67
4	2017	43.513	3.579	8,23
5	2018	43.513	7.851	18,04

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, 2019

Dari seluruh PSKS yang ada di Jawa Tengah, jumlah PSKS yang telah diberikan penguatan pengetahuan dan ketrampilan masih belum optimal. Selama kurun waktu tahun 2013-2018 telah dilaksanakan penguatan kapasitas terhadap 20.764 orang atau 47,05% dari populasi PSKS yang akan menjadi potensi dalam rangka penanganan PMKS. Ke depan tetap diperlukan dorongan motivasi serta peran aktif masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial bagi PMKS disekitarnya.

d. Basis Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin

Basis Data Terpadu (BDT) adalah sistem data elektronik yang berisi nama, alamat, NIK (Nomor Induk Kependudukan), dan keterangan dasar sosial ekonomi rumah tangga dan individu, yang dijadikan acuan utama penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan dalam skala nasional maupun daerah. BDT juga berisi tentang identifikasi rumah tangga sangat miskin yang memiliki anak usia balita atau memiliki anak usia SD/SMP untuk calon peserta Program Keluarga Harapan, identifikasi individu sampai tingkat kesejahteraan tertentu untuk Program Jaminan Kesehatan Masyarakat, identifikasi perempuan usia subur per daerah untuk efektivitas program bantuan kontrasepsi, sampai dengan identifikasi anak usia sekolah yang bekerja untuk program pengurangan pekerja anak.

Basis Data Terpadu (BDT) diharapkan dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sasaran penerima program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial lebih akurat, memuat 40% penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah dan dikelompokkan ke dalam kelompok yang disebut dengan desil. Desil adalah kelompok persepuluhan sehingga seluruh rumah tangga dapat dibagi kedalam 10 desil. Pengelompokan desil adalah sebagai berikut:

- 1) Desil 1 rumah tangga dalam kelompok 10 % terendah;
- 2) Desil 2 rumah tangga dalam kelompok 10 - 20 % terendah;
- 3) Desil 3 rumah tangga dalam kelompok 20 - 30 % terendah;
- 4) Desil 4 rumah tangga dalam kelompok 30 - 40 % terendah.

Rekapitulasi BDT Jawa Tengah tahun 2018 mendasar Keputusan Menteri Sosial Nomor 71/HUK/2018 sebanyak 15.522.020 jiwa atau 4.483.922 KRT tersebar di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah. Rekapitulasi BDT tersebut perlu dilakukan verifikasi dan validasi sebagai dasar intervensi penanggulangan kemiskinan lintas sektor.

e. Lanjut Usia Terlantar

Paska bonus demografi kedepan, jumlah lansia akan semakin meningkat akibat penduduk usia produktif secara perlahan memasuki masa pensiun dan lansia (*Silver Revolution*). Lanjut Usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan, potensi dan kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat, sehingga penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia baik potensial dan non potensial oleh pemerintah daerah secara sinergis perlu ditingkatkan melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual; kesehatan; kesempatan kerja; pendidikan dan pelatihan; kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum serta bantuan hukum; jaminan sosial; perlindungan sosial; pemberdayaan sosial; dan pemberian penghargaan.

Lanjut usia terlantar merupakan salah satu kelompok Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang perlu mendapatkan perhatian khusus karena populasinya dari waktu ke waktu meningkat seiring dengan meningkatkan angka harapan hidup yang sebagai konsekuensi semakin membaiknya fasilitas kesehatan, konsumsi serta kesadaran sehat. Mendasar pada Basis Data Terpadu (BDT) sebagaimana Keputusan Menteri Sosial Nomor 71/HUK/2018 di Jawa Tengah terdapat 2.356.635 jiwa warga lanjut usia 60 tahun ke atas tersebar di 35 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah.

2.3.2 Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

a. Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah pencari kerja terdaftar dalam lima tahun terakhir cenderung menurun. Sampai dengan tahun 2017, jumlah pencari kerja yang terdaftar sebanyak 242.702 orang. Di tahun 2017, jumlah pencari kerja terdaftar terbanyak adalah lulusan SMK sebanyak 71.509 orang.

Tabel 2.98.

Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

Jenjang Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
SD	4.738	18.558	12.352	10.378	19.012
SMP	17.292	46.885	26.004	25.102	27.712
SLTA	147.093	188.366	169.738	136.349	142.303
D-I	10.267	7.004	6.506	7.654	-
D-II	8.790	9.686	6.544	7.390	-
D-III	15.212	13.833	17.934	21.038	18.351
D-IV	5.512	14.512	6.343	5.257	-
S-I	27.087	36.609	34.158	22.547	32.868
S-II	9.153	12.862	5.727	6.987	-
Jumlah	245.144	348.315	285.306	242.702	240.246

Sumber: Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2019

b. Jumlah Permintaan Tenaga Kerja Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah permintaan tenaga kerja terdaftar mengalami peningkatan pada tahun 2015, namun jumlahnya menurun pada tahun 2016 dan tahun 2017, tetapi kembali mengalami peningkatan permintaan tenaga kerja/lowongan pada tahun 2018. Permintaan tenaga kerja terbanyak adalah untuk lulusan SLTA di tahun 2018.

Tabel 2.99.

Jumlah Permintaan Tenaga Terdaftar Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

Pendidikan	2014	2015	2016	2017	2018
SD	5.166	8.110	13.442	830	13.428
SMP	13.351	23.612	23.331	1.551	45.656
SLTA	50.212	81.260	48.185	5.162	107.425
D-I – D.IV	5.148	8.682	9.116	993	53.713
S-I	15.725	20.196	31.436	2.112	40.284
S-II	4.818	4.679	10.199	690	8.057
Jumlah	160.935	257.429	218.398	20.369	268.563

Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2019

c. Jumlah Permintaan Tenaga Kerja Terdaftar Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha

Jumlah permintaan tenaga kerja berdasarkan sektor lapangan usaha dapat dilihat pada tabel dibawah nampak bahwa pada tahun 2018 lebih banyak didominasi sektor industri padat karya seperti sektor industri pengolahan, pertambangan, dan perdagangan besar yang pada umumnya membutuhkan lulusan dengan tingkat pendidikan menengah.

Tabel 2.100.

Jumlah Permintaan Tenaga Kerja Berdasarkan Sektor Lapangan Usaha di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

No	Sektor Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
1	Industri Pengolahan	15.632	40.125	69.443	55.478	2.686
2	Pertambangan dan Penggalian	12.812	28.211	10.009	24.041	24.171
3	Perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor	13.224	16.003	15.024	23.296	37.596
4	Pengadaan Listrik, Gas, uap/air panas dan udara dingin	10.207	13.956	7.165	15.490	-
5	Pengadaan air, pengolahan sampah dan daur ulang, pembuangan dan pembersihan limbah dan sampah	5.841	10.460	6.797	13.389	5.371
6	Transportasi dan pergudangan	10.351	15.459	6.474	12.586	13.428
7	Jasa keuangan dan asuransi	7.715	8.333	8.212	8.456	29.542
8	Konstruksi	13.030	18.125	6.314	8.240	31.691
9	Penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	6.741	14.079	5.919	8.150	24.977
10	Jasa persewaan, Ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	4.614	9.272	7.760	7.498	18.799

No	Sektor Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
11	Jasa kesehatan dan kegiatan sosial	9.004	8.561	8.534	7.009	-
12	Informasi dan komunikasi	4.936	15.221	6.959	6.957	32.228
13	Kegiatan jasa lainnya	10.025	13.734	7.201	6.524	11.548
14	Jasa professional, ilmiah dan teknis	5.126	15.321	6.868	6.415	10.743
15	Real estate	4.517	15.986	6.217	6.209	16.114
16	Jasa perorangan yang melauani rumah tangga,kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan sendiri untuk memenuhi kebutuhan	3.004	9.038	7.598	5.838	-
17	Pertanian,Kehutanan dan Perikanan	8.201	12.771	8.476	5.805	-
18	Jasa Pendidikan	4.790	17.248	7.025	5.794	8.057
19	Administrasi pemerintah, pertahanan dan jaminan sosial wajib	4.481	12.541	6.809	5.511	-
20	Kebudayaan, hiburan dan rekreasi	3.262	8.912	7.105	5.106	1.612
21	Kegiatan badan Internasional dan Badan ekstra internasional lainnya	3.009	14.827	7.297	4.910	-
	Jumlah	160.522	318.183	218.398	242.702	268.563

Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2019

d. Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas

Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas periode tahun 2013-2016 cenderung mengalami penurunan, namun kembali meningkat dari tahun 2017 menjadi 65,96 persen dan di tahun 2018 menjadi 65,50 persen.

Tabel 2.101.

Rasio Kesempatan Kerja Terhadap Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

No	Tahun	Jumlah Penduduk yang Bekerja (orang)	Jumlah Penduduk Usia Kerja (orang)	Rasio Kesempatan Kerja (%)
1	2014	16.544.552	25.181.967	65,70
2	2015	16.435.142	25.492.463	64,47
3	2016	16.511.136	25.782.899	64,04
4	2017	17.190.000	26.060.000	65,96
5	2018	17.250.000	26.340.000	65,50

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

e. Tingkat Penyelesaian Hubungan Industrial

Jumlah kasus Hubungan Industrial (HI) selama tahun 2014-2016 cenderung mengalami penurunan, namun terjadi peningkatan dari 1.285 kasus pada tahun 2016 menjadi 1.927 kasus pada tahun 2017, yang kemudian kembali mengalami penurunan kasus menjadi 265 di tahun 2018. Namun demikian, semua kasus di setiap tahun semuanya dapat diselesaikan 100 persen, yang antara lain disebabkan adanya peningkatan pembinaan hubungan industrial dan pengawasan ketenagakerjaan.

Tabel 2.102.
Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian Hubungan Industrial
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

No	Tahun	Jumlah Kasus	Status
1	2014	2.721	100% terselesaikan
2	2015	2.301	100% terselesaikan
3	2016	1.285	100% terselesaikan
4	2017	1.927	100% terselesaikan
5	2018	265	100% terselesaikan

Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2019

f. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) selama tahun 2014–2016 cenderung mengalami penurunan dari 70,72 persen menjadi 67,15 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 69,11, dan kembali menurun di tahun 2018 menjadi 68,56 persen. Penyebab penurunan TPAK tahun 2014 – 2018 dikarenakan antara lain terbatasnya lapangan pekerjaan dan berubahnya status penduduk yang termasuk dalam kategori angkatan kerja menjadi bukan angkatan kerja, serta belum sesuai permintaan tenaga kerja dengan kebutuhan calon tenaga kerja.

Tabel 2.103.
Jumlah dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

No	Tahun	Penduduk Usia Kerja	Angkatan Kerja*)	TPAK (%)
1	2014	25.181.967	17.547.026	69,68
2	2015	25.492.463	17.298.925	67,85
3	2016	25.782.899	17.312.466	67,15
4	2017	26.060.000	18.010.000	69,11
5	2018	26.340.000	18.060.000	68,56

Sumber : BPS Provinsi Jateng dan Pusdatinaker, 2019

Ket : *) data per Agustus tahun bersangkutan

g. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. Berbagai kebijakan pemerintah terkait penciptaan lapangan kerja berhasil menekan tingkat pengangguran, ditunjukkan oleh TPT yang bergerak turun dari tahun 2014 sebesar 5,68% menjadi 4,51% pada Agustus tahun 2018.

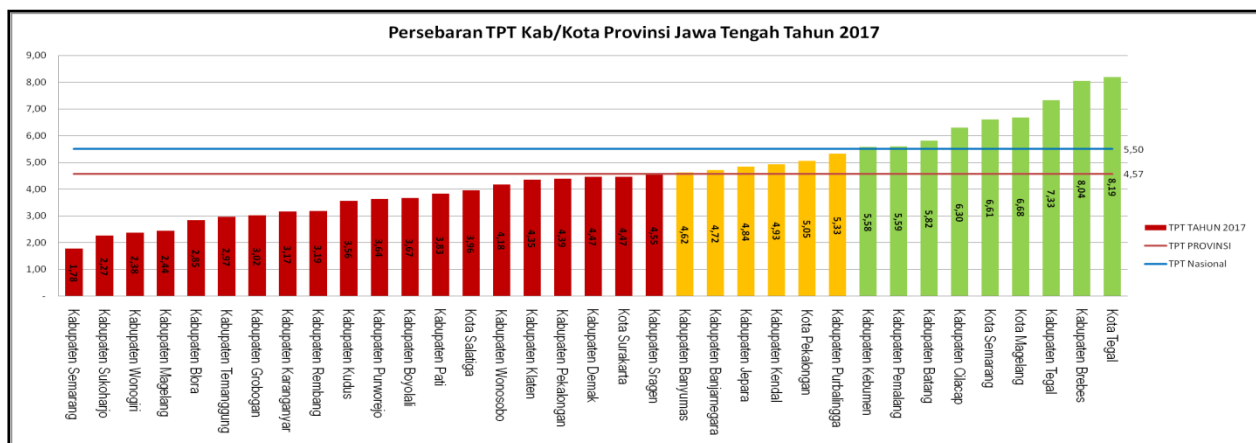
Tabel 2.104.
Jumlah Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

No	Tahun	Jumlah Penganggur (orang)*	TPT (%)*
1	2014	996.344	5,68
2	2015	863.783	4,99
3	2016	800.000	4,63
4	2017	820.000	4,57
5	2018	810.000	4,51

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Ket : *) data per Agustus tahun bersangkutan

Posisi relatif TPT kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2017 dibandingkan dengan rata-rata TPT Provinsi Jawa Tengah sebesar 4,57% dan rata-rata TPT Nasional sebesar 5,50% masih terdapat 9 kabupaten/kota berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan Nasional, yaitu Kota Tegal, Brebes, Tegal, Kota Magelang, Kota Semarang, Cilacap, Batang, Pemalang dan Kebumen. Sedangkan 6 kabupaten/kota berada di atas Provinsi Jawa Tengah dan di bawah Nasional, 20 kabupaten/kota lainnya berada di bawah atau lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.69.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

h. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Persentase pencari kerja yang ditempatkan di Jawa Tengah pada kurun waktu 2014 – 2018 cenderung menurun, dimana di tahun 2014 sebesar 71,55 persen menjadi 69,61 persen di tahun 2018. Untuk itu kedepan perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses informasi pasar kerja, serta kesesuaian kompetensi calon tenaga kerja dengan pasar kerja.

Tabel 2.105.
Pencari Kerja yang Ditempatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

Tahun	Pencari Kerja yang Terdaftar	Pencari Kerja yang Ditempatkan	Persentase
2014	426.435	305.134	71,55
2015	329.605	257.108	78,00
2016	285.306	218.398	76,55
2017	309.952	210.256	67,84
2018	240.246	167.247	69,61

Sumber : Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2019

i. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Tingkat produktivitas tenaga kerja diukur dari seberapa besar PDRB yang dihasilkan dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun terus meningkat, dari 46,30 juta rupiah di tahun 2014 menjadi 54,57 juta rupiah di tahun 2018.

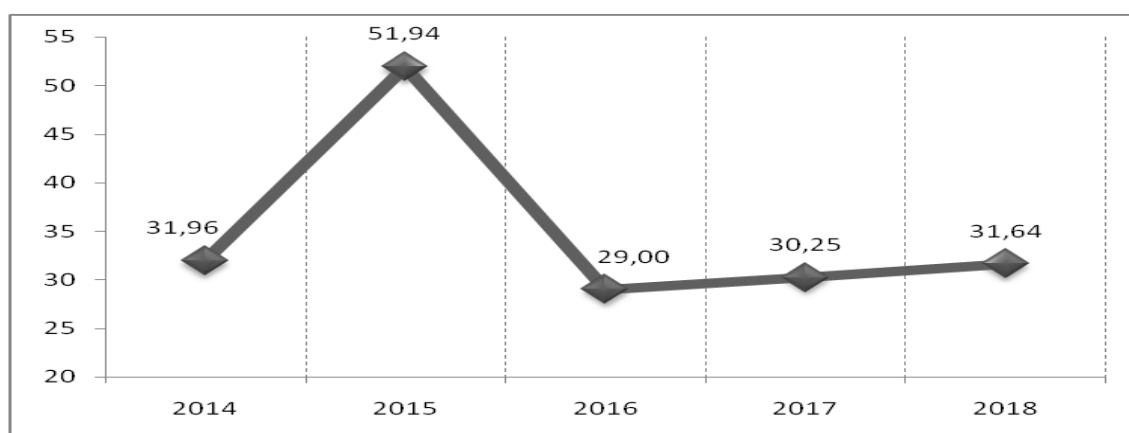
Tabel 2.106.
PDRB ADHK Tahun 2010 Per Tenaga Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

No	Tahun	PDRB ADHK 2010 (Juta Rupiah)	Jumlah Tenaga Kerja	PDRB ADHK 2010/Tenaga Kerja (Juta Rupiah)
1	2014	766.271.771,3	16.550.682	46,30
2	2015	811.715.070,0	16.512.277	49,16
3	2016	849.383.600,0	16.511.136	51,44
4	2017	894.050.470,0	17.190.000	52,01
5	2018	941.283.280,0	17.250.000	54,57

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

j. Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja (yang bekerja)

Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga terhadap total kesempatan kerja (yang bekerja) di Jawa Tengah selama periode tahun 2014 – 2018 cenderung fluktuatif. Ditahun 2105 meningkat cukup tinggi dibandingkan tahun 2014, namun kemudian turun kembali di tahun 2016, dan terus meningkat sampai tahun 2018. Proporsinya di tahun 2014 sebesar 31,96 persen, menurun menjadi 31,64 persen ditahun 2018. Angka ini menunjukkan bahwa pekerja yang berusaha sendiri dan pekerja keluarga atau pekerja di sektor informal lebih sedikit dibandingkan pekerja di sektor formal, namun angka tersebut semakin meningkat dalam 3 tahun terakhir.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.70.

Proporsi Tenaga Kerja yang Berusaha Sendiri dan Pekerja Keluarga Terhadap Total Kesempatan Kerja di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014–2018 (%)

k. Rasio Rata-rata Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibanding Kebutuhan Hidup Layak (KHL)

Pencapaian rasio UMK dibandingkan KHL di Jawa Tengah selama periode tahun 2013-2018 relatif mengalami peningkatan yang mengindikasikan bahwa pendapatan tenaga kerja telah mendekati kebutuhan hidup layak, namun demikian masih perlu ditingkatkan dengan mendekatkan tempat tinggal dan kemudahan transportasi ke lokasi pekerjaan.

Tabel 2.107.

Rasio Rata - Rata Upah Minimum Kabupaten/Kota Dibanding KHL di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No	Tahun	UMK (Rp/bln/orang)	KHL (Rp/bln/orang)	Rasio (%)
1	2014	1.066.603,43	1.077.793,30	98,96
2	2015	1.224.532,43	1.220.073,32	100,33
3	2016	1.415.552,94	1.416.985,12	100,32
4	2017	1.547.905,94	1.416.985,12	109,12
5	2018	1.685.712,17	1.416.316,73	119,02

Sumber : Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2019

l. Jumlah Kepesertaan Jamsostek dalam Hubungan Industrial

Jumlah perusahaan dan jumlah tenaga kerja (Pekerja Penerima Upah) yang telah mengikuti program Jamsostek selama periode tahun 2014 – 2018 terus mengalami peningkatan, mengindikasikan bahwa kesadaran perusahaan dan tenaga kerja terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat.

Tabel 2.108.**Perkembangan Jumlah Perusahaan dan Tenaga Kerja yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018**

No	Tahun	Jumlah Perusahaan (Unit)	Jumlah Tenaga Kerja (Orang)
1	2014	22.630	1.249.434
2	2015	22.657	1.198.925
3	2016	30.094	1.274.715
4	2017	45.121	1.425.903
5	2018	56.574	1.698.265

Sumber : Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2019

m. Jumlah pekerja/buruh sektor non formal yang menjadi peserta program Jamsostek

Kepesertaan pekerja/buruh sektor non formal (Bukan Penerima Upah) mengikuti program Jamsostek atau yang lebih dikenal dengan Tenaga Kerja Luar Hubungan Kerja (TKLHK) selama tahun 2014-2016 mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan pada tahun 2017. Kemudian mengalami peningkatan yang sangat tinggi di tahun 2018, hal ini dikarenakan pertambahan dari sektor informal seperti pelaku usaha kelautan dan perikanan (nelayan), Perum Perhutani (LMDH Kehutanan), Perangkat Desa (ASN/Non ASN), dan sebagainya. Peningkatan kepesertaan pada tahun 2014–2018 mengindikasikan bahwa kesadaran pekerja/buruh sektor non formal (Bukan Penerima Upah) terhadap jaminan sosial ketenagakerjaan semakin meningkat.

Tabel 2.109.**Perkembangan Jumlah Pekerja Sektor Non Formal yang Mengikuti Program Jamsostek di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018**

No	Tahun	Jumlah Tenaga Kerja (orang)
1	2014	44.535
2	2015	105.464
3	2016	170.980
4	2017	150.832
5	2018	1.465.847

Sumber : Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2019

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan peningkatan kesejahteraan keluarga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan kualitas hidup sumber daya manusia. Hal ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam kehidupan keluarga, masyarakat, pemenuhan hak anak, dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan buruk.

a. Perlindungan Perempuan

Perlindungan perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan merupakan implementasi negara hadir dalam melindungi segenap warga negara termasuk perempuan dan anak. Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 jumlah perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender

tercatat masih sangat tinggi yaitu 9.971 korban. Artinya dalam setahun ada 1.194 perempuan yang mengalami kekerasan, atau ada 166 perempuan yang mengalami kekerasan dalam setiap bulan, atau ada 5 perempuan yang mengalami kekerasan dalam setiap hari. Tingginya jumlah perempuan yang mengalami kekerasan mengindikasikan meningkatnya kesadaran dan keberanian masyarakat untuk mengadukan kasus kekerasan yang dialaminya baik yang terjadi di ranah rumah tangga maupun ranah publik. Selain itu membaiknya layanan yang disediakan untuk korban juga mendorong masyarakat untuk berani melaporkan kasusnya karena adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban.

Tabel 2.110.

Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2014 – 2018

Kelompok Perempuan	2014	2015	2016	2017	2018
Perempuan Dewasa	1.150	990	984	920	1.017
Anak Perempuan	1.054	981	1.060	949	866
Jumlah	2.204	1.971	2.044	1.869	1.883

Sumber: Dinas PPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah, 2019

Dari 9.971 perempuan korban, mayoritas mengalami kasus kekerasan seksual, seperti perkosaan, eksploitasi seksual dan pelecehan seksual. Tahun 2017, dari 1.869 korban, tercatat 788 kasus merupakan kasus kekerasan seksual atau sebesar 42,16%. Dan di tahun 2018, dari 1.883 korban tercatat 858 merupakan kasus kekerasan seksual atau 45,57%.

Kasus kekerasan terhadap perempuan tersebar di 35 kabupaten/kota. Di tahun 2018, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Demak merupakan kabupaten/kota dengan kasus kekerasan terhadap perempuan tertinggi.

Selain korban kekerasan, juga terdapat kelompok-kelompok perempuan lain yang sangat rentan dan membutuhkan perlindungan, seperti korban *trafficking*, ibu rumah tangga yang terpapar HIV/AIDS, perempuan pekerja rumahan, perempuan pekerja rumah tangga, perempuan pekerja migran, perempuan dalam bencana, perempuan dengan penyandang disabilitas, perempuan lansia, dan perempuan kepala keluarga.

Dari tahun 1993 sampai dengan September 2017 tercatat ada 20.168 orang dengan HIV/AIDS di Jawa Tengah dan sebesar 37% adalah perempuan. (Data Dinkes Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017). Dari IPPI (Ikatan Perempuan Positif HIV/AIDS Indonesia) telah mendampingi 2.243 ibu rumah tangga yang terpapar HIV/AIDS dari tahun 2013 sampai 2017. Sebagian besar ibu rumah tangga yang terpapar HIV/AIDS, terpapar dari pasangannya.

Untuk perempuan pekerja rumahan tahun 2016 sebesar 1.069 perempuan dan meningkat di tahun 2017 sebesar 2.140 perempuan. (Yasanti tahun 2018). Untuk kasus *trafficking* perempuan tahun 2017 tercatat 21 kasus dan meningkat di tahun 2018 sebesar 86 kasus. Untuk jumlah perempuan dengan penyandang disabilitas di Jawa Tengah di tahun 2017 tercatat 59.551 perempuan. Untuk tahun 2017 di Jawa Tengah, tercatat ada 5.463 perempuan sebagai kepala keluarga.

b. Perlindungan Anak

Dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tercatat ada 6.911 anak yang mengalami kekerasan. Artinya rata-rata dalam setiap tahun terdapat 1.382 anak mengalami kekerasan, atau terdapat 115 anak yang mengalami kekerasan dalam setiap bulannya, atau terdapat 3 sampai 4 anak yang mengalami kekerasan setiap hari. Dari 6.911 anak yang mengalami kekerasan, mayoritas mengalami kekerasan seksual yaitu sebesar 3.207 atau 46,40%.

Tabel 2.111.

Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Tahun 2014 – 2018

Kelompok Anak	2014	2015	2016	2017	2018
Anak Perempuan	1054	981	1060	949	866
Anak laki-laki	358	404	390	441	408
Jumlah	1.412	1.385	1.450	1.390	1.274

Sumber: Dinas PPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah, 2019

Selain kekerasan, terdapat situasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti anak berhadapan dengan hukum, anak berkebutuhan khusus, anak yang diperdagangkan, anak korban eksploitasi, pekerja anak, anak dengan HIV/AIDS, anak dalam situasi bencana, anak terlantar, anak korban penyalahgunaan NAPZA dan anak yang dikawinkan (perkawinan anak).

Untuk anak yang berkebutuhan khusus, dari tahun 2014 sampai dengan 2017 tercatat 113.387 anak. Untuk anak yang terpapar HIV/AIDS dari 2013 sampai dengan tahun 2017 tercatat ada 181 anak (IPPI, Tahun 2017). Untuk anak terlantar di Jawa Tengah dari tahun 2014 sampai 2017 tercatat ada 396.040 anak. Untuk perkawinan anak dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 tercatat ada 3.068 anak di Jawa Tengah. Sedangkan untuk kasus *trafficking* atau perdagangan anak dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 tercatat ada 112 kasus.

c. Pemenuhan Hak Anak

Dalam rangka peningkatan pemenuhan hak anak sebagai upaya peningkatan kualitas hidup anak dilakukan meliputi pemenuhan hak tumbuh kembang, hak kelangsungan hidup, hak partisipasi, hak perlindungan dan hak identitas. Hak tumbuh kembang meliputi hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hak kelangsungan hidup meliputi hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Hak partisipasi meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Hak perlindungan meliputi perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan keterlantaran. Hak identitas meliputi hak atas nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan dengan dokumen akta kelahiran. Capaian pemenuhan hak anak di kabupaten/kota ditunjukkan dengan capaian pemenuhan indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebanyak 24 indikator yang penilaiannya dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan hasil pemeringkatan capaian pemenuhan hak anak berdasarkan kategori tingkat

pratama, tingkat madya, tingkat nindya dan tingkat utama. Capaian pemenuhan hak anak berdasarkan kategori tingkat pratama, tingkat madya, tingkat nindya dan tingkat utama di kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.112.
Capaian Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Kategori Tingkat Pratama, Tingkat Madya, Tingkat Nindya Dan Tingkat Utama Di Kabupaten/Kota Tahun 2014 – 2018

Tahun	Tingkat Utama (kab/kota)	Tingkat Nindya (kab/kota)	Tingkat Madya (kab/kota)	Tingkat Pratama (kab/kota)	Jumlah (kab/kota)	% (kab/kota)
2014	-	1	4	15	20	57,14
2015	-	1	6	15	22	62,85
2016	-	1	6	15	22	62,85
2017	1	1	5	14	21	60,00
2018	1	1	6	21	29	82,86

Sumber: Dinas PPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah, 2019

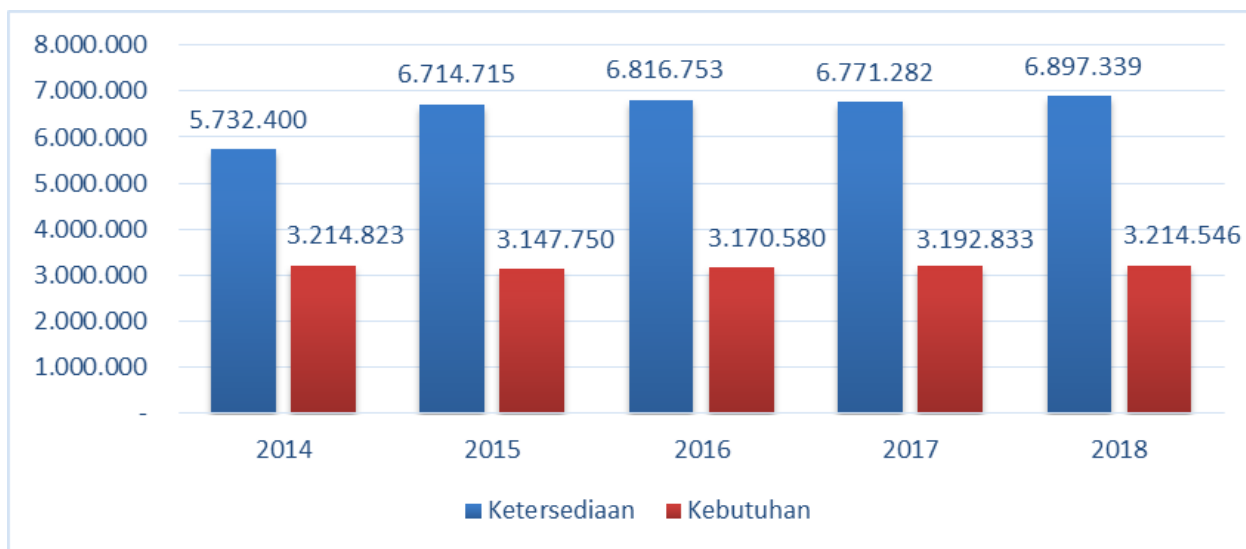
Jumlah kabupaten/kota yang telah memenuhi capaian indikator KLA pada seluruh kategori menunjukkan tren meningkat dari tahun 2014 sebesar 20 kabupaten/kota (57,14%) menjadi 29 kabupaten/kota (82,86%) di tahun 2018. Namun demikian, belum seluruh kabupaten/kota memenuhi capaian indikator minimal KLA yang perlu didorong dalam implementasinya untuk secara nyata melaksanakan pemenuhan hak anak guna peningkatan kualitas hidup anak sebagai upaya penyiapan generasi penerus bangsa ke depan. Berikut rincian kab/kota kota yang telah mendapat penghargaan KLA samapi dengan tahun 2018:

- a. Tingkat Utama (1) : Kota Surakarta;
- b. Tingkat Nindya (1) : Kota Magelang;
- c. Tingkat Madya (6) : Kabupaten Magelang, Rembang, Brebes, Pekalongan, Klaten, Kota Semarang;
- d. Tingkat Pratama (21) : Kabupaten Demak, Wonosobo, Temanggung, Tegal, Blora, Kendal, Purworejo, Sragen, Salatiga, Boyolali, Sukoharjo, Pemalang, Semarang, Cilacap, Grobogan, Pati, Kudus, Jepara, Kebumen, Kota Tegal, Kota Pekalongan.

Sedangkan 6 kabupaten/kota lainnya atau sebesar 17,14% perlu didorong peningkatan pemenuhan indikator KLA agar pemenuhan hak anak semakin meningkat dirasakan anak di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah.

3. Pangan

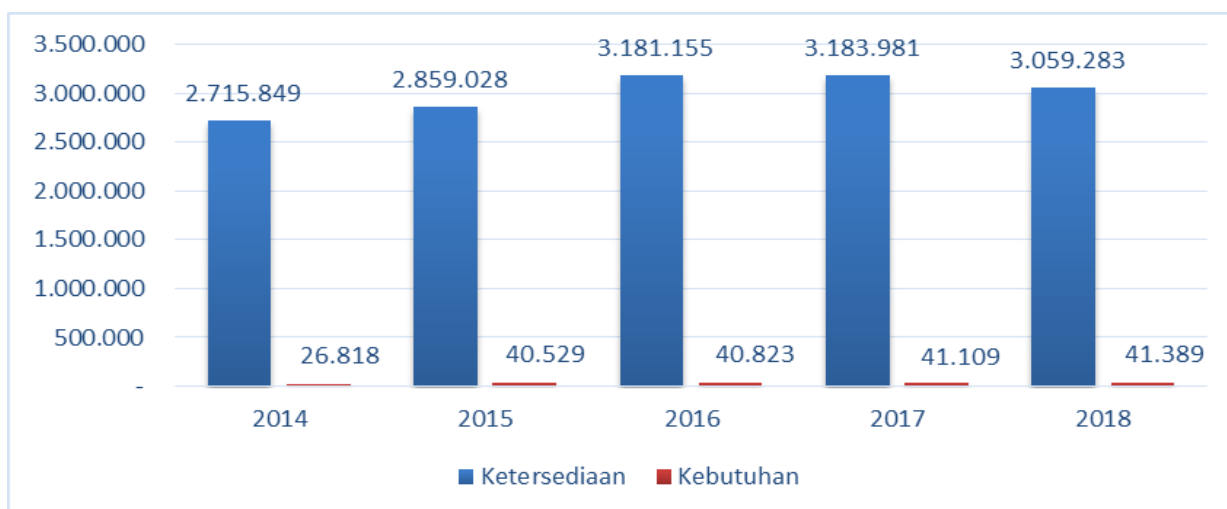
Peningkatan produksi bahan pangan tumbuh seiring dengan pertumbuhan ketersediaan komoditas pangan strategis yaitu padi, jagung, kedelai dan gula. Pada kurun tahun 2014-2018 ketersediaan dengan kebutuhan, pada komoditas padi, jagung dan gula mengalami surplus. Adapun untuk komoditas kedelai, ketersediaannya belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.71.

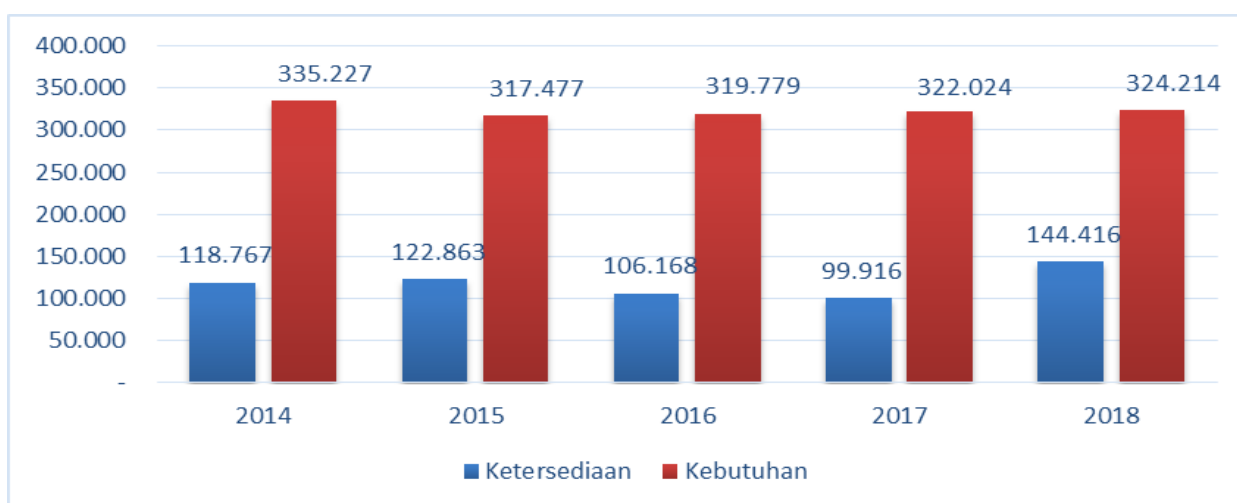
Ketersediaan dan Kebutuhan Beras di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.72.

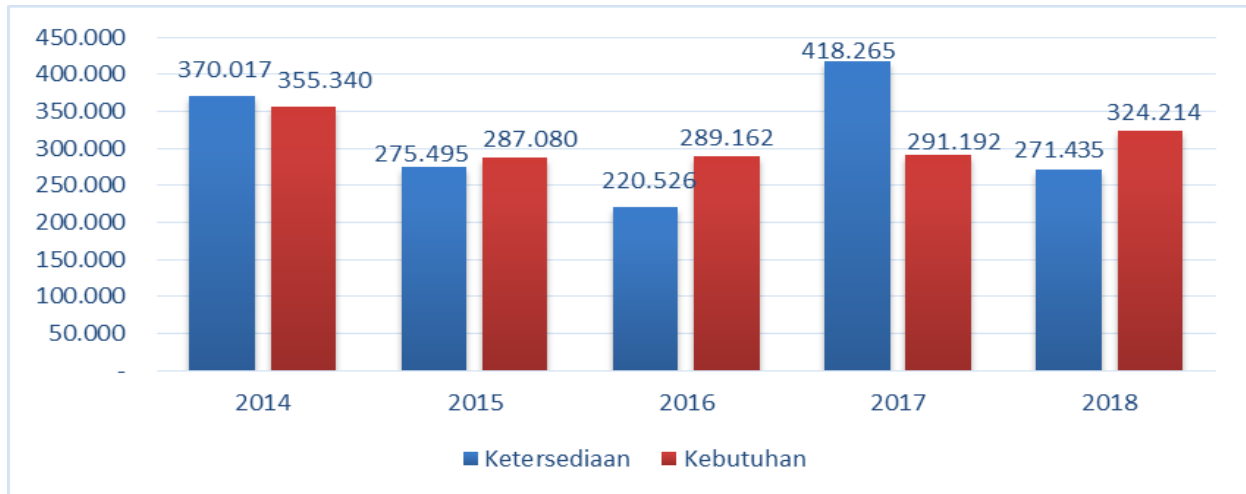
Ketersediaan dan Kebutuhan Jagung di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018



Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.73.

Ketersediaan dan Kebutuhan Kedelai di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

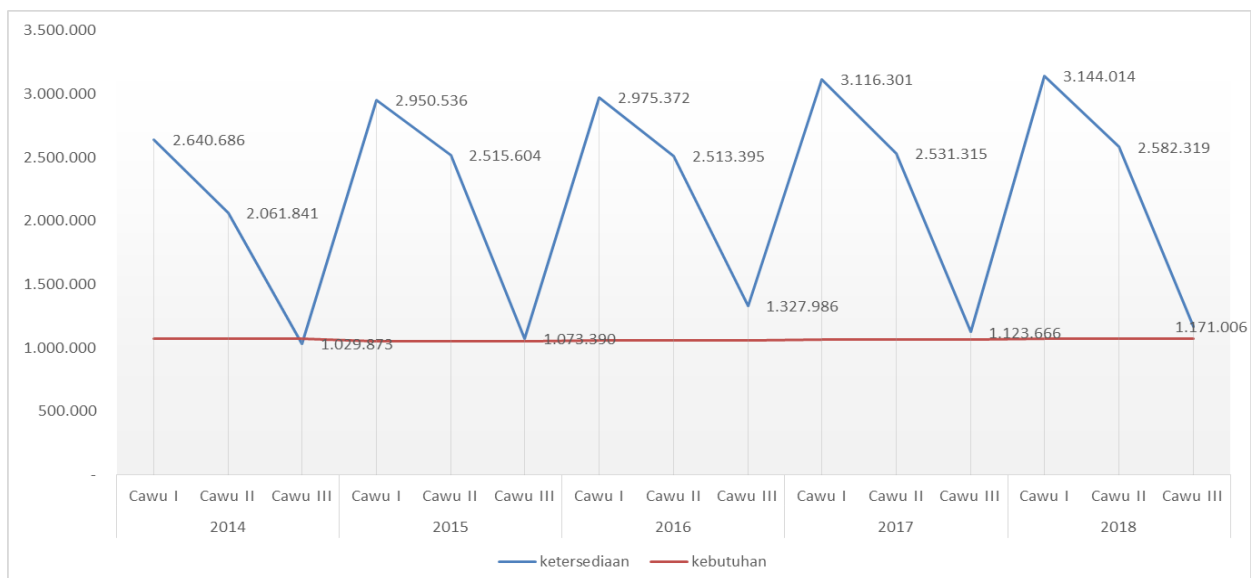


Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.74.

Ketersediaan dan Kebutuhan Gula di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

Pada komoditas beras, meskipun dari ketersediaan mengalami surplus, namun ketersediaan tersebut tidak merata sepanjang tahun. Gambar berikut menunjukkan bahwa pada akhir tahun atau caturwulan ketiga, ketersediaan relatif menurun.



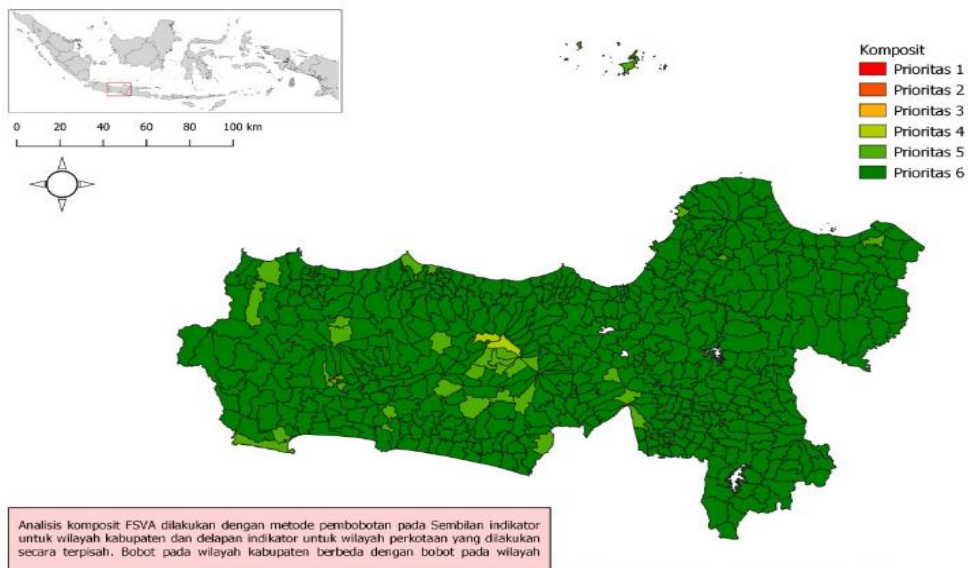
Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.75.

Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan Pokok (Beras) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

Ketahanan dan kerentanan pangan ditunjukkan dengan peta *Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA)* yang diukur berdasarkan aspek ketersediaan, akses dan pemanfaatan pangan yang dirilis setiap 3 tahun. Melalui peta FSVA dapat dilihat tingkat kerawanan pangan yang diukur pada prioritas 1 sampai 6. Kondisi ideal suatu wilayah bila termasuk pada kategori prioritas 6. Peta FSVA tahun 2018 menunjukkan bahwa dari 573 Kecamatan, kecamatan dengan kategori sangat tahan pangan (prioritas 6) terdapat 538 kecamatan, kecamatan dengan kategori tahan pangan (prioritas 5) terdapat

33 kecamatan, dan kecamatan dengan kategori cukup tahan pangan (prioritas 4) terdapat 2 kecamatan. Berdasarkan kondisi tersebut maka masih diperlukan upaya untuk peningkatan ketahanan pangan terutama pada wilayah dengan prioritas 4 dan 5.



Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.76.
Peta Food Security And Vulnerability Atlas (FSVA)
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

Terjadinya gejolak harga akan berpengaruh pada besaran tingkat akses pangan masyarakat. Fluktuasi (kenaikan atau penurunan) harga diukur dengan besarnya nilai koefisien variasi (CV). Semakin kecil CV, maka harga semakin stabil. Perkembangan stabilitas harga pangan di Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2014-2018 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.113.

Perkembangan Stabilitas Harga Pangan di Jawa Tengah Tahun 2014 –2018

No	Komoditas	Koefisien Variasi					Rata-Rata
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	Tepung Terigu	1,79	1,34	1,22	2,72	1,59	1,73
2	Minyak Goreng	5,25	3,15	6,88	2,42	3,22	4,18
3	Daging Sapi	2,18	4,03	3,17	1,21	1,63	2,87
4	Telur Ayam Ras	6,97	7,25	6,88	6,43	6,82	6,93
5	Daging Ayam Ras	5,79	9,41	5,55	3,13	6,48	6,48
6	Cabai Merah Keriting	69,22	34,31	34,55	40,47	22,60	37,62
7	Bawang Merah	11,72	24,7	9,76	17,39	20,18	18,70
8	Gula Pasir Lokal	3,53	7,99	9,89	4,20	3,25	5,09
9	Kedelai	1,06	2,43	3,65	3,17	1,27	3,30
10	Jagung	2,34	3,25	4,27	8,06	3,41	3,95
11	Beras Termurah	2,71	3,84	1,51	4,59	3,18	3,26
12	Beras Medium	3,01	4,53	1,34	2,60	4,38	3,05
13	Beras Premium	2,37	3,34	1,53	2,41	2,94	2,52

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Tabel di atas menunjukkan bahwa harga sejumlah komoditas pangan strategis di Jawa Tengah selama kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Beberapa komoditas dengan tingkat fluktuasi harga cukup tinggi antara lain cabai merah, bawang merah, telur ayam ras, daging ayam ras dan gula pasir lokal.

Keberagaman pola konsumsi pangan ditunjukkan dengan Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Pada tahun 2018, skor PPH sebesar 87,30, lebih tinggi dibandingkan capaian sebelumnya. Capaian Skor PPH tahun 2016 lebih rendah dari tahun sebelumnya karena terdapat perbedaan sumber data dalam metode penghitungan. Sebelum tahun 2016 menggunakan metode survei langsung, adapun mulai tahun 2017 menggunakan Susenas.

Tabel 2.114.
Skor PPH Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No	Kelompok Pangan	Standar	Tahun				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Padi-padian	25,0	25,00	25,00	24,90	25,00	25,00
2	Umbi-umbian	2,5	2,21	2,09	1,90	0,88	1,42
3	Pangan Hewani	24,0	17,96	17,96	19,20	19,45	17,09
4	Minyak & lemak	5,0	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5	Buah/biji berminyak	1,0	1,00	1,00	0,90	1,00	0,70
6	Kacang-kacangan	10,0	10,00	10,00	10,00	6,87	10,00
7	Gula	2,5	1,79	1,80	2,00	2,50	2,37
8	Sayur & buah	30,0	28,82	28,87	28,00	25,71	25,71
9	Lain-lain	0,0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skor PPH Jateng		100,0	91,78	91,45	91,80	86,41	87,30
Skor PPH Nasional		100,0	81,8	85,2	85,20	90,40	90,70

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jateng, 2019

Berdasarkan Skor PPH Jawa Tengah tahun 2014 - 2018 untuk kelompok pangan padi-padian dan gula diatas standar sehingga perlu upaya untuk penurunan konsumsi, sedangkan untuk kelompok pangan umbi-umbian, pangan hewani, sayur dan buah masih dibawah standar sehingga perlu upaya untuk peningkatan konsumsi.

Standar konsumsi berdasarkan WNPG VIII Tahun 2004 ditentukan sebesar 2.000 kkal/kapita/hari. Mulai tahun 2017, standar konsumsi sebesar 2.150 kkal/kapita/hari yang dihitung berdasarkan WNPG X Tahun 2012. Perkembangan capaian konsumsi per kelompok pangan dan capaian konsumsi energi per kapita/hari dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.115.
Capaian Konsumsi Kelompok Pangan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 – 2018

No	Indikator	Ideal WNP G VIII	2014	2015	2016	Ideal WNP G X	2017	2018
1	Beras (Kg/Kap/Th)	91,00	88,54	98,96	99,11	97,80	99,40	94,92
2	Umbi-umbian (Kg/Kap/Th)	35,60	24,80	21,85	15,13	39,20	21,85	18,99
3	Pangan hewani (Kg/Kap/Th)	54,80	38,53	40,04	44,37	58,80	40,04	30,17
4	Sayur dan buah (Kg/Kap/Th)	91,30	67,10	67,22	67,82	98,10	67,22	83,34

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Tabel 2.116.
Konsumsi Energi Per Kapita/Hari di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 – 2018

No	Kelompok Pangan	Ideal WNP G VIII	Tahun					
			2014	2015	2016	Ideal WNP G X	2017	2018
1	Padi-padian	1.000	1.001,12	1.007,14	1.068,58	1.075,0	1.252,6	1.235,31
2	Umbi-umbian	120	88,28	88,28	81,84	129,0	37,8	61,26
3	Pangan Hewani	240	179,59	179,59	206,63	258,0	209,1	183,77
4	Minyak & lemak	200	256,65	256,65	283,84	215,0	253,5	215,33
5	Buah/biji berminyak	60	54,85	43,90	40,12	64,0	47,0	30,22
6	Kacang-kacangan	100	223,45	214,76	195,47	108,0	73,9	125,58
7	Gula	100	71,61	72,08	84,74	108,0	128,1	102,02
8	Sayur & buah	120	115,29	115,48	120,23	129,0	110,6	110,53
9	Lain-lain	60	13,66	35,14	20,29	64,0	37,1	26,15
JUMLAH		2000	2.004,50	2.003,74	2.101,75	2.150,0	2.149,5	2.090,17

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Capaian konsumsi kelompok pangan dan konsumsi energi per kapita/hari, menunjukkan bahwa konsumsi beras perlu diturunkan. Adapun konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah dan sayur perlu ditingkatkan.

Masih ditemukannya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat merupakan salah satu permasalahan dalam mewujudkan ketahanan pangan. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan dilaksanakan secara insidental, belum secara rutin dan tersebar di semua wilayah.

Tabel 2.117.**Perkembangan Pengawasan Pangan Segar Tahun 2014 – 2018**

Uraian	Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018	
	Jumlah sampel diuji	Jumlah sampel aman	Jumlah sampel diuji	Jumlah sampel aman	Jumlah sampel diuji	Jumlah sampel aman	Jumlah sampel diuji	Jumlah sampel aman	Jumlah sampel diuji	Jumlah sampel aman
Prima 2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Prima 3	10	10	6	6	8	8	10	10	10	10
PSAT	54	54	59	59	39	39	51	51	83	83
Pengawasan Pangan Segar	33	26	66	56	70	66	79	67	168	160
Total	97	84	132	122	117	113	140	128	261	253
Prosentase Aman	86,60%		92,42%		96,58%		91,43%		96,93%	

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Memperhatikan tabel di atas, perlu ditingkatkan pengawasan pangan segar baik dari jumlah komoditas maupun waktu pelaksanaannya, mengingat persentase keamanan pangan belum mencapai 100%.

4. Pertanian

Mendasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kewenangan Pemerintah Provinsi pada Urusan Pertanian yaitu Pemberian izin lokasi lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum provinsi, Penyelesaian sengketa tanah garapan lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah Provinsi, Penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah, serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah *absentee* lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah Provinsi, Penetapan tanah ulayat yang lokasinya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Penyelesaian masalah tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Inventarisasi dan pemanfaatan tanah kosong lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi, Perencanaan penggunaan tanah yang hamparannya lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 Daerah provinsi.

Untuk mendukung kegiatan pembangunan yang ada di Jawa Tengah khususnya Proyek Strategis Nasional (PSN), lingkup bidang pertanian merupakan supporting kegiatan pembangunan fisik yaitu dengan mengkoordinasikan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dengan keluaran ditetapkan ijin penetapan lokasi yang bertujuan agar tanah masyarakat yang terkena dampak pembangunan dilindungi secara hukum sehingga tidak dapat dipermainkan makelar tanah dan diharapkan mendapat ganti kerugian yang layak dari pemerintah.

Berdasarkan data yang ada sampai dengan triwulan 2 tahun 2018 ijin penetapan lokasi aktif sebanyak 20 ijin yang terdiri dari pembangunan jalan tol, bendungan, saluran irigasi, tanggul pantai, RDMP yang kesemuanya mempunyai batas waktu selama 2 tahun dan apabila pengadaan tanah terkendala sampai lebih dari 2 tahun maka akan dilakukan perpanjangan selama 1 tahun bila belum selesai juga maka akan diperbaharui dengan ijin

lokasi yang baru. Dari 20 ijin yang masih aktif ada 3 ijin lokasi yang melakukan pembaharuan yang disebabkan karena belum selesainya proses pengadaan lahan sampai dengan batas waktu ijin lokasinya habis. Hal ini disebabkan karena (1) kesiapan instansi yang memerlukan tanah, (2) prosedur tukar menukar Tanah Kas Desa (TKD), Tanah Wakaf, tanah perhutani dan tanah negara lain yang berbeda, (3) kesiapan dana.

Terkait kesiapan instansi yang memerlukan tanah bahwa pengadaan tanah berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat sekarang dan akan datang, sehingga tidak mudah meyakinkan masyarakat bahwa dengan mendapatkan ganti kerugian akan mendapatkan penghidupan yang lebih baik ditempat yang baru apalagi bila tanah yang terkena dampak tersebut merupakan tanah satu-satunya sebagai sumber penghidupan. Untuk itu perlu kesiapan instansi yang memerlukan tanah dalam mengelola pendekatan kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat, tokoh agama dan pemuda serta koordinasi intensif dengan forkompinda dan forkompincam setempat.

Terkait prosedur TKD, Tanah Wakaf, Tanah Perhutani dan tanah negara masing-masing mempunyai mekanisme dan ketentuan peraturan sendiri-sendiri. Untuk TKD mencari tanah pengganti sesuai dengan ketentuan permendagri masih sulit, Tanah Wakaf ijinnya harus sampai ke Kementerian Agama Pusat dan Tanah Perhutani sampai ke Kementerian BUMN.

Terkait kesiapan dana, proses pengadaan tanah mulai dari tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan membutuhkan dana. Dan bagi masyarakat menjadi hal yang ditunggu-tunggu apabila proses pengadaan lahan sudah dimulai maka argo sudah berjalan dan masyarakat akan menunggu kapan ganti rugi akan dibayarkan. Apabila sampai dengan waktu yang telah dijanjikan (sesuai jadwal) kesiapan dana tidak dibayarkan maka masyarakat akan semakin resistan dan upaya pengadaan tanah dari awal akan mendapatkan kendala yang lebih sulit karena kurangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Selama kurun waktu tahun 2013 –2017, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengupayakan tanah pengganti tanah kas desa, dalam upaya mempertahankan luasan tanah kas desa yang digunakan untuk kepentingan pembangunan (seperti untuk pembangunan gedung/ruang pendidikan, perkantoran, jalan). Berdasarkan data tanah kas desa pengganti sejak tahun 2013-2017 mengalami perluasan.

Selanjutnya dalam upaya mempertahankan kawasan lindung dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), telah dilakukan upaya pelibatan/pemberdayaan masyarakat melalui dukungan sertifikasi lahan masyarakat yang berlokasi di kawasan lindung diluar hutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Diharapkan selain masyarakat berkomitmen menjaga fungsi lahannya, status lahannya juga lebih baik/bersertifikat. Namun hal ini masih belum didukung dengan regulasi yang mengatur insentif dan disinsentif untuk lebih meningkatkan animo masyarakat petani menjadikan tanahnya sebagai LP2B. Hal itu diperburuk dengan rendahnya dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang masih terbatas, yang terlihat dari masih minimnya Kabupaten/Kota yang sudah mempunyai Perda terkait Penetapan Lokasi LP2B diwilayahnya. Dalam kurun

waktu 2013-2017 luas kawasan lindung yang disertifikasi cenderung menurun, sementara lahan Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) semakin luas. Perkembangan pelayanan urusan pertanahan di Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.118.

Perkembangan Pelayanan Urusan Pertanahan Di Provinsi Jateng Tahun 2013-2017 (Penggantian Tanah Kas Desa dan Stimulan Pembuatan Sertifikat Lahan)

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Penggantian tanah kas desa					
	Luas semula (ha)	285.306	285.306	329.754	164.977	1.287.521
	Luas menjadi (ha)	351.810	351.810	474.844	87.213 & UGR 32M	1.440.194 & UGR 199 M
2	Stimulasi pembuatan sertifikat lahan					
	Kawasan lindung diluar hutan & Lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) (ha)	226	900	1.759	1.325	125

Sumber : Dinas Perakim Provinsi Jawa Tengah, 2018

Untuk mendukung Program Prioritas Nasional yaitu Reforma Agraria, bidang pertanahan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 590/37 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) mendapatkan mandat sebagai sekretariat GTRA Provinsi yang mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan Reforma Agraria tingkat provinsi.

5. Lingkungan Hidup

Kualitas lingkungan hidup di Jawa Tengah dapat ditunjukkan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan yang terdiri dari informasi status mutu air, informasi status mutu udara, persampahan, kerentanan perubahan iklim dan emisi gas rumah kaca

Dari hasil perhitungan status mutu kualitas air sungai dengan menggunakan metode indeks pencemar yang mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang Pedoman Penentuan Status Mutu Air, pada tahun 2017 menunjukkan bahwa anak sungai Bengawan Solo seperti Sungai Premulung, Mungkung, Samin Palur masuk dalam kategori cemar sedang, sedangkan lainnya dalam kondisi tercemar ringan-baik. Pada saat masuk ke sungai utama Bengawan Solo terjadi peningkatan kualitas air dikarenakan sungai yang memiliki daya pulih alami dan ditambah dengan debit air yang cukup besar sehingga dapat meningkatkan kualitas air sungai. Peningkatan kualitas air sungai Bengawan Solo tidak bisa dipisahkan oleh penanganan permasalahan di anak sungai Bengawan Solo yang kewenangannya berada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.119.
Kualitas Air Sungai di Jawa Tengah Tahun 2015-2017

No.	Nama Sungai	2015		2016		2017	
		Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu	Nilai IP	Status Mutu
1	Baki	4,16	Cemar Ringan	2,28	Cemar Ringan	4,56	Cemar Ringan
2	Premulung	9,79	Cemar Sedang	7,71	Cemar Sedang	5,52	Cemar Sedang
3	Mungskung	7,17	Cemar Sedang	6,13	Cemar Sedang	5,23	Cemar Sedang
4	Grompol	5,78	Cemar Sedang	2,05	Cemar Ringan	4,80	Cemar Ringan
5	Samin	4,32	Cemar Ringan	4,28	Cemar Ringan	5,38	Cemar Sedang
6	Jlantah	3,86	Cemar Ringan	2,46	Cemar Ringan	3,80	Cemar Ringan
7	Palur	10,19	Cemar Berat	3,94	Cemar Ringan	5,54	Cemar Sedang
8	Pepe	7,35	Cemar Sedang	2,01	Cemar Ringan	4,57	Cemar Ringan
9	Babon			4,45	Cemar Ringan	4,86	Cemar Ringan
10	Bogowonto					1,94	Cemar Ringan
11	Garang	2,85	Cemar Ringan	4,50	Cemar Ringan	4,00	Cemar Ringan
12	Gung	3,39	Cemar Ringan	2,88	Cemar Ringan	3,28	Cemar Ringan
13	Kupang					3,99	Cemar Ringan
14	Luk Ulo					1,82	Cemar Ringan
15	Lusi	2,43	Cemar Ringan	2,55	Cemar Ringan	2,21	Cemar Ringan
16	Pemali	7,63	Cemar Sedang	6,64	Cemar Sedang	3,10	Cemar Ringan
17	Sambong					3,84	Cemar Ringan
18	Serang	1,95	Cemar Ringan	2,99	Cemar Ringan	2,63	Cemar Ringan
19	Serayu	2,82	Cemar Ringan	3,26	Cemar Ringan	1,91	Cemar Ringan
20	Tuntang	2,47	Cemar Ringan	3,11	Cemar Ringan	3,49	Cemar Ringan
21	Wulan	4,70	Cemar Ringan	4,07	Cemar Ringan	4,75	Cemar Ringan
22	Bengawan Solo	7,60	Cemar Sedang	4,51	Cemar Ringan	2,18	Cemar Ringan
23	Progo	2,57	Cemar Ringan	3,26	Cemar Ringan	1,53	Cemar Ringan
24	Citanduy	2,31	Cemar Ringan	4,86	Cemar Ringan	0,92	Kondisi Baik
25	Cisanggarung	2,68	Cemar Ringan	5,13	Cemar Sedang	0,75	Kondisi Baik
Nilai IP Jawa Tengah		4,80	Cemar Ringan	3,96	Cemar Ringan	3,46	Cemar Ringan
Jumlah Sungai Dihitung		20		21		25	

Sumber : DLHK Provinsi Jawa Tengah, 2017

Berdasarkan pengukuran kualitas udara ambien yang dilakukan tahun 2013 dan 2014 di 35 kabupaten/kota, dengan titik sampel pada 3 (tiga) lokasi pengukuran yakni kawasan perumahan, kawasan industri, dan kawasan padat lalu lintas menunjukkan bahwa nilai Hidrokarbon di semua titik sampel telah melebihi baku mutu. Sedangkan nilai Total Partikel Debu (TSP) di beberapa titik sampel menunjukkan sudah melebihi batas ambang baku mutu, sementara nilai SO₂, NO₂ dan CO masih di bawah baku mutu udara ambien. Jumlah HC yang sudah melebihi baku mutu menunjukkan bahwa kendaraan bermotor yang menggunakan premium dan solar masih cukup tinggi karena hasil proses pembakaran dari kendaraan bermotor menghasilkan 71-89% HC.

Terkait dengan perubahan iklim dapat dilihat dari persebaran indeks kerentanan dan emisi gas rumah kaca (GRK). Data persebaran indeks

kerentanan perubahan iklim di Jawa Tengah menunjukkan bahwa 11 kabupaten/kota berada dalam kategori cukup rentan (skor indeks 3), 18 kabupaten/kota dalam kategori agak rentan (skor indeks 2), dan 6 kabupaten/kota berada pada kategori tidak rentan (skor indeks 1). Sesuai kondisi geografisnya maka ancaman wilayah pesisir utara berupa kenaikan muka air laut dan potensi meningkatnya genangan dan rob. Kawasan dataran rendah berpotensi terjadinya peningkatan banjir dan dataran tinggi terutama yang memiliki lereng curam dan jenis tanah yang mudah longsor akan meningkat ancaman bencana longsor. Sedangkan untuk pesisir selatan peningkatan cuaca ekstrem pada perairan laut akan meningkatkan ancaman nelayan dan masyarakat yang tinggal di pesisir terhadap terjangan gelombang laut.

Berdasarkan hasil inventarisasi, Emisi GRK di Jawa Tengah pada tahun 2016 besarnya mencapai 55.211,62 Gg CO₂eq. Kontributor tertingginya adalah dari sektor energi yang mencapai 43.463,98 Gg CO₂e atau 78% dari total emisi GRK. Sektor energi ini dikontribusikan oleh penggunaan bahan bakar fosil untuk kendaraan bermotor, kegiatan industri maupun pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar fosil.

Sektor berbasis lahan yang terdiri dari sub sektor pertanian mencapai 11.694,31 Gg CO₂e. Kontribusi sub sektor pertanian ini dikontribusikan oleh kegiatan pemupukan, penggunaan kapur, pembakaran biomassa serta sistem pengairan terutama penggenangan terus menerus yang menimbulkan gas metana. Sedangkan untuk sub sektor perubahan lahan di Jawa Tengah mengalami penyerapan (sequestrasi) sebesar 14.096,42 Gg CO₂e, yang artinya telah banyak rehabilitasi tutupan lahan pada lahan terdegradasi untuk dikembalikan fungsinya menjadi kawasan hutan.

Sektor lain yang berkontribusi besar adalah limbah yang dikontribusikan dari pengelolaan sampah dan limbah cair yang mencapai 7.908,89 Gg CO₂e. Berikut adalah komposisi emisi GRK di Jawa Tengah.



Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.77.
Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

Tabel 2.120.
Emisi GRK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

SEKTOR	2016	
	Gg CO _{2e}	%
Energi	43.463,98	78,72%
IPPU (Industri)	1.499,87	2,72%
AFOLU (Lahan)	2.338,89	4,24%
Limbah	7.908,89	14,32%
Total	55.211,63	100%

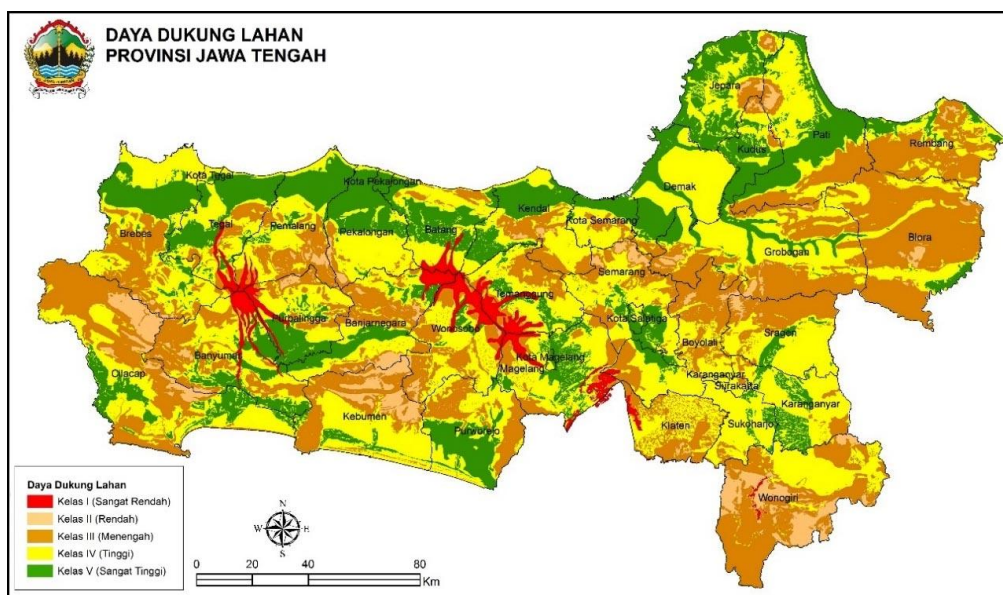
Sumber: POKJA GRK Jawa Tengah, 2018

Kemampuan lahan di Provinsi Jawa Tengah diketahui dari hasil tumpang susun (*overlay*) peta dengan menggunakan peta sekunder skala 1 : 250.000. Adapun informasi yang tersedia dan digunakan untuk mengetahui daya dukung lahan meliputi bentuk lahan, satuan batuan, hidrogeologi terwakilkan oleh produktivitas akuifer, bencana, dan penggunaan lahan. Hasil analisis yang dilakukan dalam penyusunan daya dukung dan daya tampung lahan Jawa Tengah maka dapat dibagi dalam lima kelas lahan.

Tabel 2.121.
Kelas Daya Dukung Lahan Jawa Tengah

Kelas	Luas Peta (Ha)	%
I – Sangat Rendah	65.441,23	2,01
II – Rendah	127.104,67	3,91
III – Menengah	865.343,90	26,59
IV – Tinggi	1.276.446,78	39,22
V – Sangat Tinggi	920.075,41	28,27

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.78.
Daya Dukung Lahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Pelayanan sampah di Jawa Tengah masih terpusat pada kawasan perkotaan, sehingga jika dilihat jangkauan pelayanan sampah di tingkat kabupaten relatif kecil karena hanya kawasan perkotaan saja yang terlayani

dengan luasan yang relatif kecil dibandingkan dengan total wilayah pedesaan. Berikut adalah data timbulan sampah dan persentase sampah yang terangkut ke TPA per kabupaten kota di Jawa Tengah.

Tabel 2.122.

Jumlah Sampah yang Terangkut di Jawa Tengah 2012 – 2016

2012		2013		2014		2015		2016	
Timbulan	% Angkutan	Timbulan	% Angkutan	Timbulan	% Angkutan	Timbulan	% Angkutan	Timbulan	% Angkutan
5.149.328	26,13	5.348.580	23,97	5.221.436	25,83	5.352.865	26,88	5.691.310	28,62

Sumber : Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, 2017

Total persentase pelayanan pengangkutan sampah di Jawa Tengah relatif kecil yaitu 28,62% dari total timbulan sampah. Pada wilayah kota, tingkat pelayanannya relatif tinggi yaitu 70–87%, dibanding dengan wilayah kabupaten, yaitu berkisar antara 7–40%. Dengan perkiraan timbulan sampah sebesar 5,7 juta ton pada tahun 2016 dan pengangkutan mencapai 28,62%, artinya jumlah sampah yang diangkut setiap tahunnya mencapai 1,6 juta ton sampah yang diangkut menuju TPA.

Berdasarkan data TPA di Jawa Tengah, luas total TPA yang ada sejumlah 58 TPA adalah 258,1 hektar. Dengan total sampah yang terangkut menunjukkan rata-rata setiap 1 hektar TPA menerima sampah sebesar 6.310 ton untuk dikelola. Berikut adalah tipe pengelolaan TPA di Jawa Tengah.

Tabel 2.123.

Usia Pakai dan Tipe Pengelolaan Sampah TPA di Jawa Tengah

No	Kabupaten/ Kota	Nama TPA	Tipe Pengelolaan Sampah di TPA			Luas (Ha)	Usia TPA s.d. Tahun
			Control Landfill	Unmanaged Shallow	Unmanaged Deep		
1	Cilacap 1	TPA Majenang			√	1,6	2025
2	Cilacap 2	TPA Sidareja			√	1,4	2025
3	Cilacap 3	TPA Kroya			√	0,8	2017
4	Cilacap 4	TAP Jeruklegi	√			6,3	2019
5	Banyumas 1	TPA Kaliori	√			4,7	2018
6	Banyumas 2	TPA Gunung Tugel			√	6,7	2014
7	Banyumas 3	TPA Ajibarang			√	2,0	2014
8	Purbalingga	TPA Banjaran			√	4,0	2018
9	Banjarnegara	TPA Winong			√	3,8	2049
10	Kebumen 1	TPA Kaligending			√	5,0	2033
11	Kebumen 2	TPA Semali	√			3,7	2033
12	Purworejo	TPA Jetis Loana	√			4,7	2019
13	Wonosobo	TPA Wonorejo			√	4,5	2018
14	Kab. Magelang 1	TPA Pasuruhan			√	1,8	2017
15	Kab. Magelang 2	TPA Klegen			√	0,2	2017
16	Boyolali	TPA Winong		√		3,7	---
17	Klaten 1	TPA Jomboran			√	0,2	2014
18	Klaten 2	TPA Joho			√	0,9	2015
19	Klaten 3	TPA Candirejo			√	1,0	2016
20	Klaten 4	TPA Pedan			√	7,0	belum dioperasikan

No	Kabupaten/ Kota	Nama TPA	Tipe Pengelolaan Sampah di TPA			Luas (Ha)	Usia TPA s.d. Tahun
			Control Landfill	Unmanaged Shallow	Unmanaged Deep		
21	Sukoharjo	TPA Mojorejo			√	3,7	2017
22	Wonogiri 1	TPA Ngadirojo			√	8,2	2023
23	Wonogiri 2	TPA Baturetno			√	1,5	2026
24	Wonogiri 3	TPA Purwantoro			√	0,5	2021
25	Wonogiri 4	TPA Slogohimo			√	0,3	2026
26	Karanganyar	TPA Sukosari			√	4,4	2021
27	Sragen	TPA Tanggan			√	4,2	2016
28	Grobogan 1	TPA Ngembak	√			9,8	2033
29	Grobogan 2	TPA Godong		√		1,0	2015
30	Grobogan 3	TPA Mojorebo		√		1,0	2013
31	Grobogan 4	TPA Gubug			√	1,0	2013
32	Blora 1	TPA Lebok			√	1,5	2019
33	Blora 2	TPA Temurejo	√			4,0	2018
34	Rembang	TPA Kerep			√	3,2	2035
35	Pati 1	TPA Sukoharjo	√			12,5	2026
36	Pati 2	TPA Plosojenar			√	1,7	2018
37	Kudus	TPA Tajungrejo	√			5,6	2019
38	Jepara 1	TPA Bandengan	√			5,5	2015
39	Jepara 2	TPA Krasak			√	0,7	2020
40	Jepara 3	TPA Gemulung			√	0,9	2016
41	Demak 1	TPA Kalikondang			√	2,5	2016
42	Demak 2	TPA Candisari			√	0,8	2016
43	Kab. Semarang	TPA Blondo	√			5,7	2009
44	Temanggung	TPA Sanggrahan	√			4,0	2031
45	Kendal 1	TPA Darupono			√	0,9	2015
46	Kendal 2	TPA Pagergunung			√	1,8	2025
47	Batang	TPA Randu Kuning			√	2,5	2019
48	Kab.Pekalongan	TPA Linggoasri	√			4,7	2019
49	Pemalang	TPA Pegongsoran	√			6,0	2031
50	Kab. Tegal	TPA Penujah			√	3,0	2018
51	Brebes 1	TPA Kaliwlingi			√	4,0	2040
52	Brebes 2	TPA Kalijurang			√	2,0	2021
53	Kota Magelang	TPA Banyu Urip			√	7,8	2016
54	Surakarta	TPA Putri Cempo			√	17,0	2018
55	Salatiga	TPA Ngronggo			√	5,3	2017
56	Kota Semarang	TPA Jatibarang			√	46,0	2026
57	Kota Pekalongan	TPA Degayu			√	4,0	2013
58	Kota Tegal	TPA Muararejo		√		5,0	2022
	JUMLAH		13	4	41	258,1	

Sumber: Dinas LHK Provinsi Jawa Tengah, 2018

Keterangan:

Unmanaged deep : Open dumping ketinggian > 5 mtr

Unmanaged shallow : Open dumping ketinggian < 5 mtr

Control Landfill : penutupan dengan tanah 7 hari

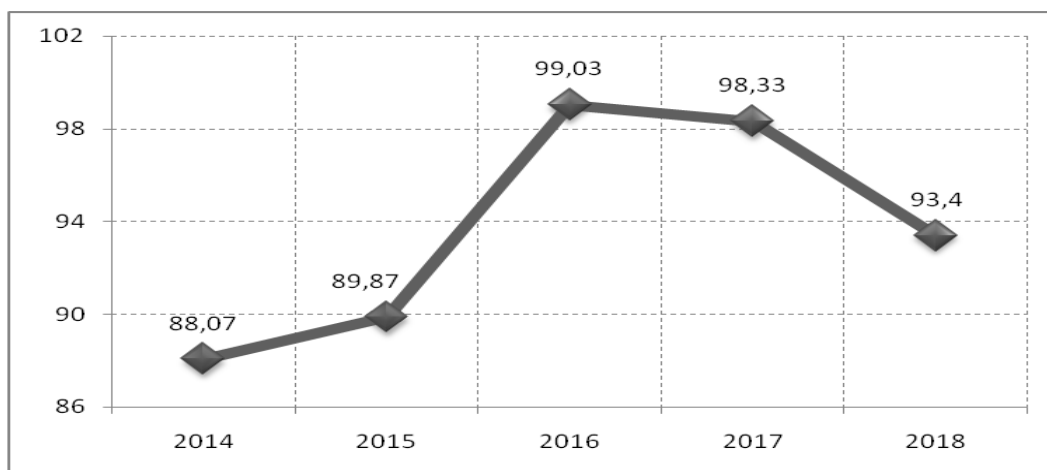
Berdasarkan data menunjukkan bahwa dari 58 TPA, sebanyak 22 TPA telah melebihi usia pakai secara teknis atau sebesar 38% dari total TPA. Berdasarkan sistem pengelolaannya maka hanya 22% yang menggunakan

sistem *controlled landfill*, sedangkan sisanya sebanyak 71% atau 41 TPA masih menggunakan sistem open dumping dengan ketinggian lebih dari 5 meter.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

a. Kepemilikan KTP

Kepemilikan KTP bagi penduduk wajib KTP di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dari 88,07% menjadi 93,4%.



Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2019

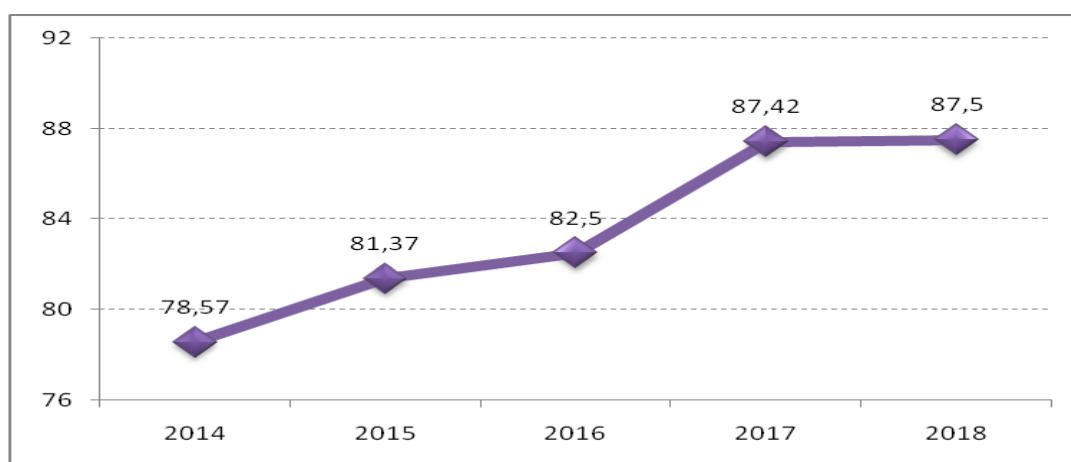
Gambar 2.79.

Persentase Kepemilikan KTP (KTP-el) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Kenaikan tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat yang cukup tinggi akan pentingnya KTP, selain adanya sosialisasi dari pemerintah yang cukup intensif. Penurunan persentase di tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2017 cenderung disebabkan adanya penambahan wajib rekam KTP-el pemula yang melebihi kapasitas rekam di kabupaten/kota.

b. Kepemilikan Akta Kelahiran

Kepemilikan akta kelahiran menjadi hal yang vital karena menyangkut identitas diri dan status kewarganegaraan. Akta kelahiran menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran pembangunan, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual. Secara yuridis, anak berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.



Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.80.
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk
Usia 0-18 Tahun di Jawa Tengah Tahun 2014–2018

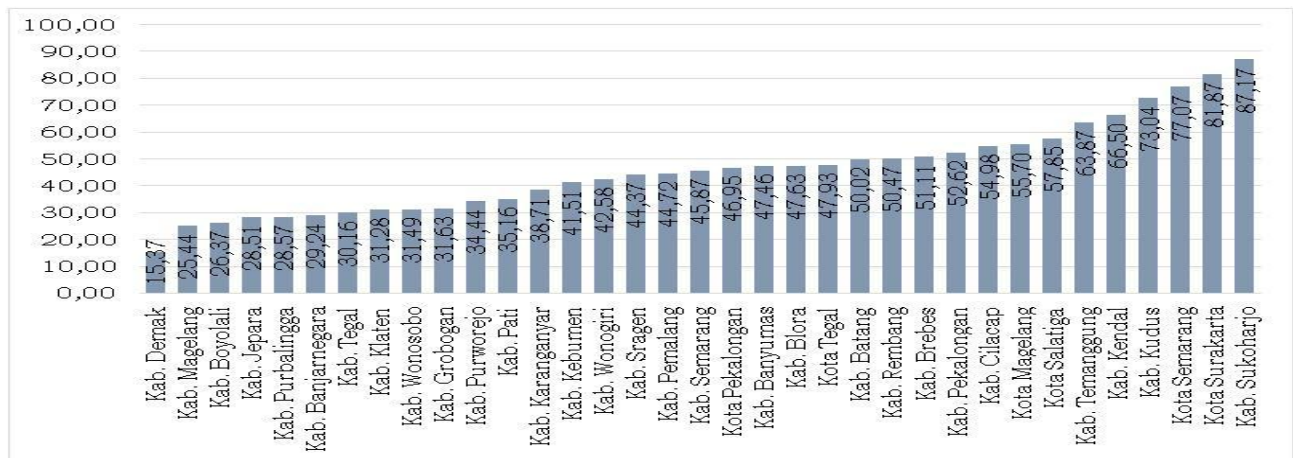
Berdasarkan gambar tersebut diketahui bahwa persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-18 tahun di Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dari 78,57% menjadi 87,50%. Peningkatan yang sangat signifikan ini didorong oleh beberapa faktor, antara lain: (1) diberlakukannya UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, khususnya terkait peran aktif pemerintah dan masyarakat (semula menganut stelsel aktif masyarakat); (2) pendaftaran akta berdasarkan azas domisili; (3) dihapuskannya mekanisme sidang pengadilan untuk keterlambatan lebih dari satu tahun; (4) pelayanan gratis (dikenakan denda keterlambatan mengurus sesuai dengan peraturan daerah di masing-masing kabupaten/kota); (5) serta kerja sama lintas sektor (dengan rumah sakit bersalin, bidan dan pelayanan kesehatan lainnya).

Tabel 2.124.
Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk per Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Kepemilikan Akta Kelahiran			Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran
		Memiliki	Tidak Memiliki	Jumlah	
1	Cilacap	1.013.216	829.697	1.842.913	54,98
2	Banyumas	827.330	915.998	1.743.328	47,46
3	Purbalingga	273.078	682.787	955.865	28,57
4	Banjarnegara	293.645	710.339	1.003.984	29,24
5	Kebumen	566.518	798.387	1.364.905	41,51
6	Purworejo	266.572	507.545	774.117	34,44
7	Wonosobo	271.289	590.298	861.587	31,49
8	Magelang	326.527	956.878	1.283.405	25,44
9	Boyolali	262.115	731.812	993.927	26,37
10	Klaten	407.441	895.215	1.302.656	31,28
11	Sukoharjo	784.111	115.439	899.550	87,17
12	Wonogiri	457.055	616.250	1.073.305	42,58
13	Karanganyar	348.797	552.279	901.076	38,71
14	Sragen	436.328	547.147	983.475	44,37

No	Kabupaten/Kota	Kepemilikan Akta Kelahiran			Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran
		Memiliki	Tidak Memiliki	Jumlah	
15	Grobogan	458.559	991.232	1.449.791	31,63
16	Blora	426.734	469.191	895.925	47,63
17	Rembang	317.274	311.305	628.579	50,47
18	Pati	452.365	834.043	1.286.408	35,16
19	Kudus	610.119	225.199	835.318	73,04
20	Jepara	331.392	831.137	1.162.529	28,51
21	Demak	171.880	946.726	1.118.606	15,37
22	Semarang	464.028	547.607	1.011.635	45,87
23	Temanggung	490.764	277.575	768.339	63,87
24	Kendal	647.265	326.027	973.292	66,50
25	Batang	387.785	387.535	775.320	50,02
26	Pekalongan	493.005	443.965	936.970	52,62
27	Pemalang	659.439	815.157	1.474.596	44,72
28	Tegal	446.651	1.034.216	1.480.867	30,16
29	Brebes	970.502	928.436	1.898.938	51,11
30	Kota Magelang	72.268	57.468	129.736	55,70
31	Kota Surakarta	460.743	102.058	562.801	81,87
32	Kota Salatiga	111.123	80.955	192.078	57,85
33	Kota Semarang	1.278.165	380.387	1.658.552	77,07
34	Kota Pekalongan	143.691	162.376	306.067	46,95
35	Kota Tegal	135.083	146.726	281.809	47,93
	Total	16.062.857	19.749.392	35.812.249	44,85

Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2018



Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.81.
Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan tabel dan gambar di atas diketahui bahwa pada sebagian besar kabupaten/kota persentase kepemilikan akte kelahiran masih sangat rendah. Faktor penyebabnya antara lain karena banyaknya penduduk pada usia 19 tahun ke atas yang tidak memiliki akta kelahiran. Persentase kepemilikan akte kelahiran tertinggi berada di Kabupaten Sukoharjo (87,17%) sedangkan yang terendah berada Kabupaten Magelang (15,37%).

c. Kepemilikan Akta Perkawinan

Akta perkawinan merupakan salah satu dokumen penting karena sebagai dasar jaminan hukum atas perkawinan (bukti otentik) apabila dikemudian hari terjadi sengketa dalam keluarga.

Pencatatan perkawinan pada hakikatnya untuk mewujudkan tertib administrasi perkawinan. Berdasarkan pencatatan tersebut dapat dipenuhi jaminan memperoleh hak-hak administratif tertentu seperti hak memperoleh akte kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain. Pencatatan juga bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap status perkawinan, memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak; dan sekaligus memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan.

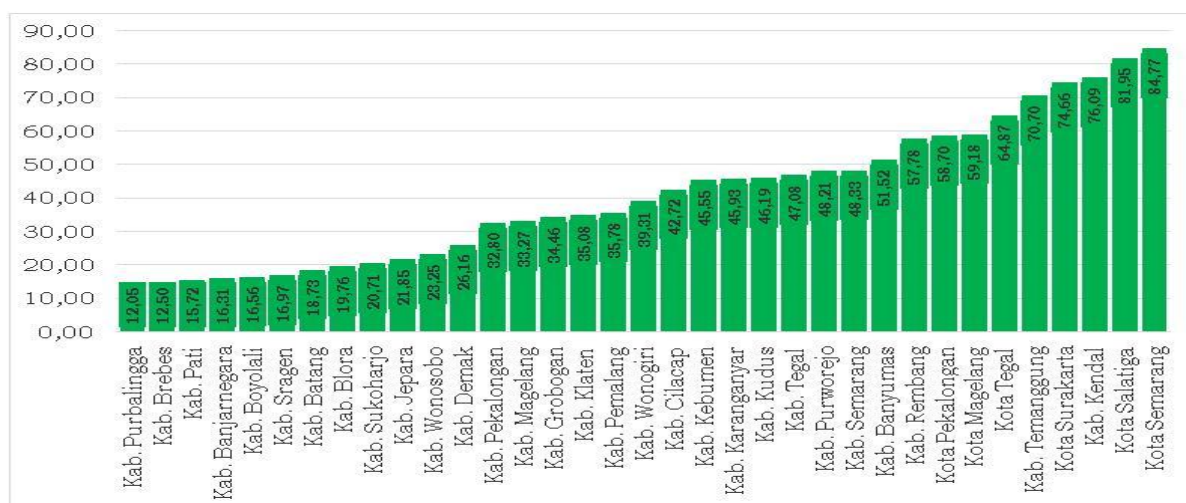
Tabel 2.125.

Kepemilikan Akta Perkawinan Per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

No	Kabupaten/ Kota	Kepemilikan akta perkawinan			Persentase Kepemilikan akta perkawinan
		Memiliki	Tidak memiliki	Jumlah	
1	Kab. Cilacap	411,216	551,479	962,695	42.72
2	Kab. Banyumas	478,828	450,528	929,356	51.52
3	Kab. Purbalingga	61,543	449,338	510,881	12.05
4	Kab. Banjarnegara	89,441	458,891	548,332	16.31
5	Kab. Kebumen	313,143	374,289	687,432	45.55
6	Kab. Purworejo	196,582	211,200	407,782	48.21
7	Kab. Wonosobo	108,738	358,858	467,596	23.25
8	Kab. Magelang	224,825	450,944	675,769	33.27
9	Kab. Boyolali	91,585	461,607	553,192	16.56
10	Kab. Klaten	236,179	437,113	673,292	35.08
11	Kab. Sukoharjo	94,825	362,969	457,794	20.71
12	Kab. Wonogiri	231,333	357,083	588,416	39.31
13	Kab. Karanganyar	223,821	263,497	487,318	45.93
14	Kab. Sragen	88,995	435,358	524,353	16.97
15	Kab. Grobogan	272,473	518,223	790,696	34.46
16	Kab. Blora	98,978	401,923	500,901	19.76
17	Kab. Rembang	204,533	149,449	353,982	57.78
18	Kab. Pati	112,120	601,323	713,443	15.72
19	Kab. Kudus	194,511	226,622	421,133	46.19
20	Kab. Jepara	131,950	471,829	603,779	21.85
21	Kab. Demak	154,363	435,779	590,142	26.16
22	Kab. Semarang	262,044	280,208	542,252	48.33
23	Kab. Temanggung	302,589	125,374	427,963	70.70
24	Kab. Kendal	368,353	115,780	484,133	76.09
25	Kab. Batang	75,227	326,470	401,697	18.73
26	Kab. Pekalongan	147,530	302,242	449,772	32.80
27	Kab. Pemalang	259,459	465,599	725,058	35.78
28	Kab. Tegal	354,328	398,235	752,563	47.08
29	Kab. Brebes	122,437	856,699	979,136	12.50
30	Kota Magelang	35,495	24,481	59,976	59.18

No	Kabupaten/ Kota	Kepemilikan akta perkawinan			Persentase Kepemilikan akta perkawinan
		Memiliki	Tidak memiliki	Jumlah	
31	Kota Surakarta	210,464	71,434	281,898	74.66
32	Kota Salatiga	77,377	17,041	94,418	81.95
33	Kota Semarang	675,007	121,264	796,271	84.77
34	Kota Pekalongan	82,631	58,126	140,757	58.70
35	Kota Tegal	84,970	46,016	130,986	64.87
	Total	7,077,893	11,637,271	18,715,164	37.82

Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2018



Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.82.
Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan per Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan tabel dan gambar di atas diketahui bahwa pada sebagian besar kabupaten/kota persentase kepemilikan akte perkawinan masih sangat rendah. Faktor penyebabnya antara lain karena perkawinan penduduk muslim tercatat di Kementerian Agama yang pada umumnya tidak melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sedangkan yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya perkawinan penduduk non muslim. Persentase kepemilikan akte perkawinan tertinggi berada di Kota Semarang (84,77%) sedangkan yang terendah berada Kabupaten Purbalingga (12,05%)

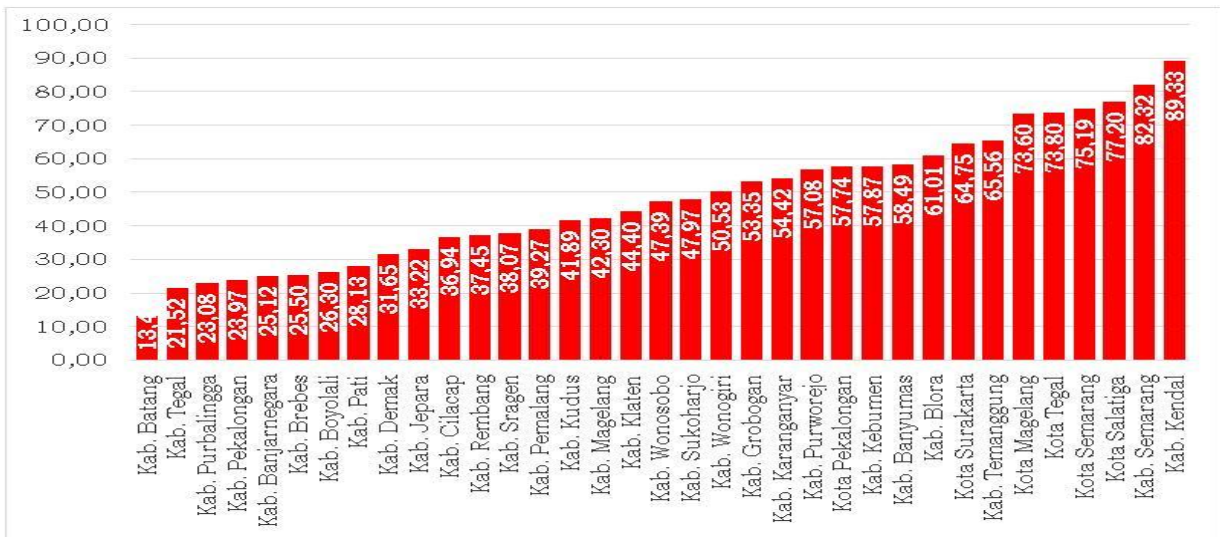
d. Kepemilikan Akta Perceraian

Akta perceraian digunakan untuk melakukan perubahan status kependudukan dari cerai hidup menjadi kawin dan sebagai implikasi perdata dan status kawin yang bersangkutan sehingga dapat menuntut hak-haknya.

Tabel 2.126.
Kepemilikan Akta Perceraian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

No	Kabupaten/kota	Kepemilikan akta perceraian			Persentase Kepemilikan Akta Perceraian
		Memiliki	Tidak memiliki	Jumlah	
1	Kab. Cilacap	10,293	17,569	27,862	36.94
2	Kab. Banyumas	17,254	12,245	29,499	58.49
3	Kab. Purbalingga	3,421	11,401	14,822	23.08
4	Kab. Banjarnegara	3,681	10,972	14,653	25.12
5	Kab. Kebumen	10,052	7,318	17,370	57.87
6	Kab. Purworejo	4,606	3,463	8,069	57.08
7	Kab. Wonosobo	6,522	7,239	13,761	47.39
8	Kab. Magelang	7,548	10,294	17,842	42.30
9	Kab. Boyolali	2,909	8,151	11,060	26.30
10	Kab. Klaten	7,599	9,516	17,115	44.40
11	Kab. Sukoharjo	5,351	5,804	11,155	47.97
12	Kab. Wonogiri	7,593	7,435	15,028	50.53
13	Kab. Karanganyar	7,258	6,079	13,337	54.42
14	Kab. Sragen	6,249	10,167	16,416	38.07
15	Kab. Grobogan	12,031	10,521	22,552	53.35
16	Kab. Blora	5,712	3,651	9,363	61.01
17	Kab. Rembang	3,481	5,814	9,295	37.45
18	Kab. Pati	4,828	12,337	17,165	28.13
19	Kab. Kudus	3,704	5,138	8,842	41.89
20	Kab. Jepara	4,607	9,260	13,867	33.22
21	Kab. Demak	4,482	9,679	14,161	31.65
22	Kab. Semarang	11,804	2,535	14,339	82.32
23	Kab. Temanggung	7,791	4,092	11,883	65.56
24	Kab. Kendal	13,394	1,600	14,994	89.33
25	Kab. Batang	1,750	11,273	13,023	13.44
26	Kab. Pekalongan	2,652	8,413	11,065	23.97
27	Kab. Pemasang	7,786	12,043	19,829	39.27
28	Kab. Tegal	3,584	13,074	16,658	21.52
29	Kab. Brebes	6,133	17,917	24,050	25.50
30	Kota Magelang	2,083	747	2,830	73.60
31	Kota Surakarta	7,289	3,968	11,257	64.75
32	Kota Salatiga	2,960	874	3,834	77.20
33	Kota Semarang	28,629	9,447	38,076	75.19
34	Kota Pekalongan	2,405	1,760	4,165	57.74
35	Kota Tegal	2,614	928	3,542	73.80
	Total	240,055	272,724	512,779	46.81

Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2018



Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.83.
Persentase Kepemilikan Akta Perceraian Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

Berdasarkan tabel dan gambar tersebut diketahui bahwa pada sebagian besar kabupaten/kota persentase kepemilikan akte perceraian masih sangat rendah. Faktor penyebabnya antara lain karena banyaknya penduduk yang cerai hidup namun belum melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Persentase kepemilikan akte perceraian tertinggi berada di Kota Kendal (89,33%) sedangkan yang terendah berada Kabupaten Batang (13,40%).

e. Pemanfaatan Data Kependudukan

Kerjasama pemanfaatan data kependudukan menjadi hal yang penting, karena menjadi salah satu program prioritas pemerintah. Data kependudukan sangat diperlukan untuk kepentingan pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum, pencegahan kriminal. Namun demikian data kependudukan di Jawa Tengah belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah maupun lembaga non pemerintah. Pemanfaatan data kependudukan melalui integrasi sistem harus didorong untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat yang cepat, tepat, serta mudah.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan merupakan upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup melalui penguatan pemerintahan desa dan kelurahan, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan dalam suatu kerangka pembangunan partisipatif yang dilaksanakan dari, oleh dan untuk masyarakat yaitu sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan serta pengembangan tindak lanjut hasil pembangunan. Perencanaan pembangunan desa disusun dengan

mengacu kepada perencanaan pembangunan kabupaten/kota, provinsi dan nasional. Program-program pembangunan yang diarahkan ke desa wajib disinkronisasikan dan diintegrasikan dengan perencanaan pembangunan desa.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan dilakukan dengan melibatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K).

Tabel 2.127.

**Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017**

No	Tahun	Jumlah LPMD/K
1.	2013	8.578
2.	2014	8.578
3.	2015	8.559
4.	2016	8.559
5.	2017	8.559

Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2018

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa setiap desa/kelurahan telah dibentuk LPMD/K. Namun dari sisi kelembagaanya masih belum optimal dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga setiap tahun masih perlu difasilitasi peningkatan kapasitas pengurusnya agar dapat meningkatkan tugas dan fungsinya sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) merupakan salah satu Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat terutama untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Posyandu di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sejumlah 47.012 unit, lembaga ini sangat strategis namun kenyataan dilapangan posyandu masih berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan sektor yang mendampingi untuk itu agar posyandu dapat sinergi dan optimal maka perlu difasilitasi posyandu Model/Integrasi di Jawa Tengah.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan Posyandu kepada masyarakat, dalam kurun waktu tahun 2013-2017 telah dilakukan pembinaan posyandu model (terintegrasi) sebanyak 4.170 unit sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.128.

**Posyandu Model/Integrasi yang Dibina
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017**

No.	Tahun	Jumlah Posyandu
1.	2013	500 unit
2.	2014	750 unit
3.	2015	1.250 unit
4.	2016	770 unit
5.	2017	900 unit
Jumlah		4.170 unit

Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2018

Kelembagaan PKK sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat desa/kelurahan memiliki peran penting terutama dalam hal pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga. Sampai dengan tahun 2017 persentase PKK aktif telah mencapai 100% sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.129.

Jumlah PKK Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017

No.	Tahun	Jumlah PKK Aktif	% PKK Aktif
1.	2013	8.578	100
2.	2014	8.578	100
3.	2015	8.559	100
4.	2016	8.559	100
5.	2017	8.559	100

Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2018

Dalam rangka peningkatan kapasitas Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) sampai dengan tahun 2017 telah dilaksanakan penguatan kelembagaan terhadap 274 Unit Ekonomi Desa-Simpan Pinjam (UED-SP), 236 unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan 288 unit Pasar Desa, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel 2.130.

Penguatan Kelembagaan UED-SP, BUMDES dan Pasar Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

NO	KEGIATAN	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	UED-SP	173	205	216	245	274
2.	BUMDes	119	152	-	207	236
3.	Pasar Desa	196	223	230	259	288

Sumber: Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2018

Perkembangan lembaga ekonomi desa di Provinsi Jawa Tengah dalam kurun waktu tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.131.

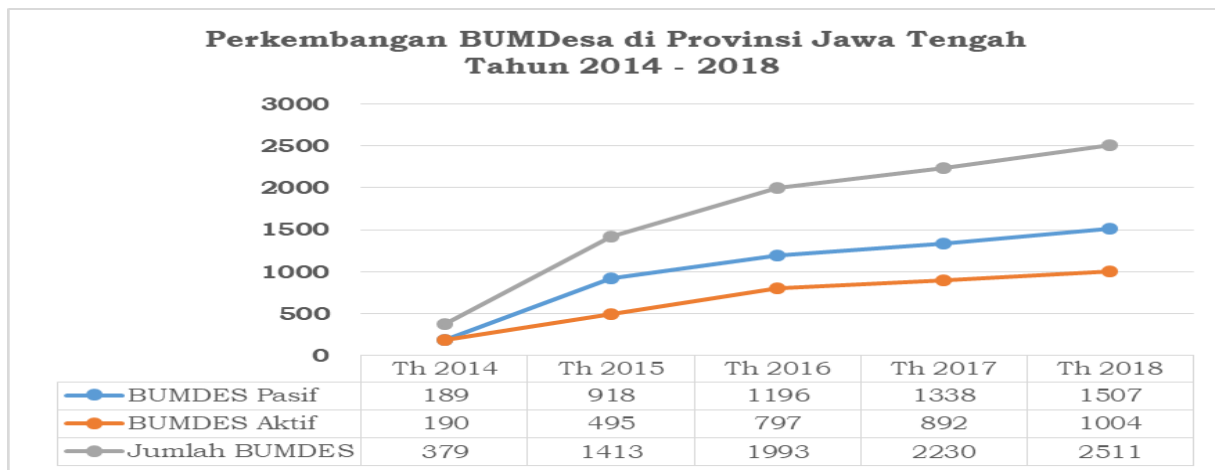
Perkembangan Lembaga Ekonomi Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No	Jenis Lembaga Ekonomi Desa	Jumlah (unit)				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	BUMDesa	379	1.413	1.993	2.230	2.511
2	Pasar desa	1.396	1.387	1.369	1.369	1.369
3	UED-SP	786	851	1.011	1.029	1.029
4	CPPD	110	117	140	140	140
5	UP2K-PKK	17.814	18.140	20.382	22.326	22.326
Jumlah Total		20.485	21.908	24.895	27.094	27.375

Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2019

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa dalam kurun waktu tahun 2014-2018 perkembangan lembaga ekonomi masyarakat khususnya BUMDesa meningkat signifikan dari 379 BUMDesa di tahun 2014 menjadi 2.511 BUMDesa di tahun 2018. Namun demikian persentase BUMDesa yang aktif

baru mencapai 40% dari jumlah BUMDesa yang ada. Perkembangan BUMDesa di Jawa Tengah tahun 2014-2018 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.84.

Perkembangan BUMDesa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Masih banyaknya BUMDesa yang pasif, cenderung disebabkan karena sebagian besar pembentukan BUMDesa belum didahului dengan proses identifikasi unit usaha yang sesuai dengan potensi di desa, permodalan yang masih mengandalkan bantuan dari pemerintah serta kurangnya pemahaman kelembagaan BUMDes, keberpihakan pemerintah desa untuk mengembangkan BUMDesa masih belum optimal, unit usaha yang dikembangkan belum melakukan jejaring usaha, serta produk unggulan belum mampu menembus pasar luas.

Strategi pengembangan BUMDesa agar lebih aktif berkembang antara lain dilakukan melalui 1) penguatan kapasitas kelembagaan (pelatihan/bimtek manajemen SDM dan usaha); 2) mendorong kelompok masyarakat untuk ikut mengembangkan BUMDesa melalui penyertaan modal masyarakat; 3) mendorong pembentukan forum BUMDesa di 29 kabupaten; 3) penguatan permodalan melalui bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan dana desa; dan 4) mendorong sinergitas dengan dunia usaha melalui program CSR/kemitraan.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

a. Peserta KB Aktif

Mewujudkan keluarga kecil berkualitas merupakan tujuan dari pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga tersebut diarahkan pada peningkatan kesertaan ber-KB serta peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Peserta KB aktif di Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 fluktuatif. Pada tahun 2014 jumlah peserta KB aktif mengalami kenaikan, namun mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 secara umum mengalami penurunan yaitu sebesar 78,24% di tahun 2015 dan sebesar 73,69 di tahun 2018.

Tabel 2.132.**Peserta KB Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018**

Tahun	Jumlah PUS	Peserta KB Aktif	Persentase
2014	6.754.814	5.307.068	78,57
2015	6.736.249	5.270.734	78,24
2016	6.727.894	5.290.679	78,64
2017	6.610.377	5.082.844	76,89
2018	6.527.869	4.810.077	73,69

Sumber: BKKBN RI, 2019

Penurunan tersebut antara lain disebabkan rendahnya pemakaian alat kontrasepsi MKJP, keyakinan sebagian masyarakat, takut efek samping, kurangnya kesadaran masyarakat tentang KB, serta terbatasnya jumlah Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) yang ada saat ini. Belum adanya kebijakan pengendalian penduduk di provinsi dan kabupaten/kota menyebabkan kurangnya perencanaan yang komprehensif dalam pengendalian laju pertumbuhan penduduk di Jawa Tengah. Pemakaian alat kontrasepsi MKJP tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 semakin meningkat secara berkelanjutan yaitu sebesar 27,24% pada tahun 2015 menjadi 28,45% di tahun 2017. Namun peningkatan persentase pemakaian alat kontrasepsi MKJP tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah peserta KB MKJP yang bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Sedangkan tahun 2018 menurun menjadi sebesar 27,43%.

Tabel 2.133.**Pemakaian Alat Kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2018**

Tahun	Peserta KB Aktif	Peserta KB MKJP					
		IUD	MOW	MOP	IMPLAN	Jumlah	%
2015	5.270.734	476.701	278.427	47.950	632.526	1.435.604	27,24
2016	5.290.679	478.157	294.931	47.399	667.103	1.487.590	28,12
2017	5.082.844	516.068	254.987	39.649	635.232	1.445.936	28,45
2018	4.810.077	428.981	233.859	32.886	623.677	1.319.403	27,43

Sumber: BKKBN RI, 2019

b. Drop Out (DO) KB

Secara persentase maupun absolut DO peserta KB periode tahun 2014 - 2018 mengalami tren penurunan. Tahun 2018 menurun menjadi 9,85% atau sebesar 594.184 orang dibanding tahun 2014 yang sebesar 15,02% atau sebesar 937.982. Meskipun mengalami tren penurunan, namun secara absolut angka DO KB relatif masih besar. Kondisi ini menjadi angin segar dan keberhasilan dalam menekan angka putus pakai KB sehingga dapat mencegah banyaknya penurunan peserta KB aktif yang pada tahun 2018 apabila dibanding tahun 2017 mencapai 1,84% (207.835 orang).

Tabel 2.134.**Peserta DO KB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018**

No	Tahun	DO KB	
		Jumlah (orang)	Persentase
1	2013	960.277	15,09
2	2014	937.982	15,02
3	2015	857.572	13,99
4	2016	775.177	12,78
5	2017	594.184	11,69
	2018	594.184	9,85

Sumber: BKKBN RI, 2019

c. Unmet Need

Perkembangan PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi tapi tidak ber-KB (*unmetneed KB*) dari tahun 2014 – 2018 secara umum mengalami tren peningkatan dan hanya di tahun 2016 terjadi penurunan. Tahun 2018 sebesar 13,06% atau 852.677 orang meningkat dari tahun 2014 yang sebesar 10,56% (713.104 orang), sedangkan tahun 2016 sebesar 9,95% atau 669.582 orang. Peningkatan ini disebabkan keyakinan agama sebagian masyarakat, takut efek samping, kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti program KB. Upaya yang dilakukan untuk mengurangi *unmetneed KB* antara lain melalui penggerakan kesertaan KB bersama mitra kerja dan institusi masyarakat, advokasi kabupaten/kota yang persentase *unmetneed KB* nya tinggi, optimalisasi media Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), dan fasilitasi pelaksanaan kampung KB.

Tabel 2.135.**Unmet Need KB di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018**

No.	Tahun	Jumlah PUS	Jumlah (orang)	Unmet Need KB (%)
1	2014	6.754.814	713.104	10,56
2	2015	6.736.249	706.188	10,48
3	2016	6.727.894	669.582	9,95
4	2017	6.610.377	773.808	11,70
5	2018	6.527.869	852.677	13,06

Sumber: BKKBN RI, 2019

d. Peran Aktif Kelompok Tribina

Peningkatan ketahanan keluarga sangat ditentukan pada peran aktif Tribina yang terdiri dari Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Keaktifan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 mengalami penurunan yaitu pada tahun 2015 sebesar 96,35% menjadi sebesar 95,97% di tahun 2018. Sedangkan keaktifan kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Bina Kelompok Lansia (BKL) pada tahun 2018 cenderung mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yang menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya ketahanan keluarga bagi remaja dan lansia.

Tabel 2.136.**Keaktifan Kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL) Tahun 2015 – 2018**

Tahun	BKB			BKR			BKL		
	Jumlah	Aktif	%	Jumlah	Aktif	%	Jumlah	Aktif	%
2015	14.209	13.690	96,35	6.621	6.328	95,57	9.188	8.716	94,86
2016	13.931	13.029	93,53	6.783	6.250	92,14	9.356	8.427	90,07
2017	13.676	12.562	91,85	6.700	6.219	92,82	9.136	8.276	90,59
2018	12.717	12.204	95,97	6.418	6.236	97,16	8.673	8.273	95,39

Sumber: BKKBN RI, 2019

e. Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera

Peningkatan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) memberi peluang bagi setiap keluarga untuk belajar berusaha, mengelola modal, bermitra usaha, berorganisasi, mempelajari teknis produksi dan belajar menganalisis pasar bertujuan untuk memberdayakan ekonomi keluarga dalam rangka mengurangi keluarga pra sejahtera/keluarga miskin sekaligus memantapkan keikutsertaan masyarakat ber-KB. Jumlah kelompok UPPKS yang aktif dari tahun 2015 cenderung menurun yaitu sebanyak 21.191 kelompok menjadi 15.033 di tahun 2018. Demikian pula persentase keaktifannya juga cenderung mengalami penurunan yaitu sebesar 89,52% di tahun 2015 menjadi 87,73% di tahun 2018, walaupun mengalami kenaikan di tahun 2016 sebesar 94,52%.

Tabel 2.137.**Keaktifan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Tahun 2015 – 2018**

Tahun	Kelompok UPPKS		
	Jumlah	Aktif	%
2015	23.671	21.191	89,52
2016	21.147	19.989	94,52
2017	20.756	18.198	87,68
2018	17.135	15.033	87,73

Sumber: BKKBN RI, 2019

f. Keluarga Pra Sejahtera

Perkembangan persentase keluarga pra sejahtera periode tahun 2013-2017 mengalami tren penurunan (27,10% menjadi 22,24%), demikian juga dengan angka absolut (2.724.692 KK menjadi 2.186.088 KK).

Tabel 2.138.**Jumlah Keluarga Pra Sejahtera Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2017**

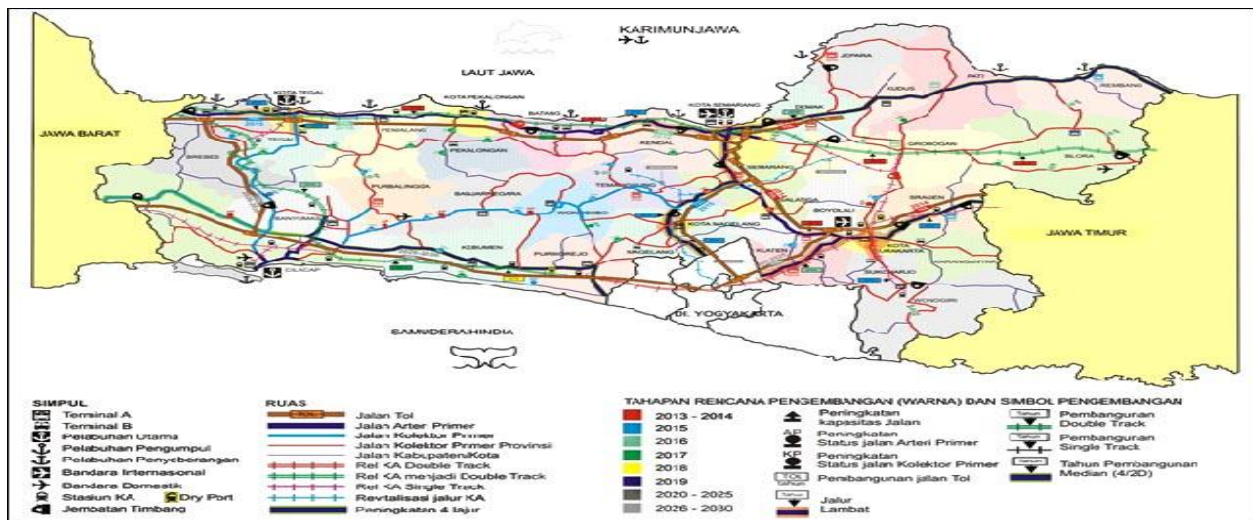
Tahun	Jumlah KK	Keluarga Pra Sejahtera	
		Jumlah	%
2013	10.024.478	2.724.692	27,10
2014	10.185.469	2.659.070	26,11
2015	9.719.925	2.175.667	22,38
2016	9.757.258	2.177.297	22,31
2017	9.825.208	2.186.088	22,24

Sumber: Dinas PPPA DALDUK KB Provinsi Jawa Tengah, 2018

9. Perhubungan

Infrastruktur perhubungan mempunyai peran cukup penting dan sangat strategis dalam menunjang pengembangan wilayah di Jawa Tengah, diantaranya terkait dengan Kawasan Strategis Nasional (KSN) Kawasan Perkotaan Kedung Sepur, Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Industri Terpadu (Rembang, Demak – Semarang – Kendal, Brebes, Cilacap dan Kebumen), KSN Candi Prambanan, Borobudur dan Sangiran, KSP Keraton Surakarta, Masjid Agung Demak, Candi Dieng dan Sukuh – Cetho.

Untuk mendukung kawasan strategis dimaksud, secara umum *grand design* pengembangan perhubungan di Jawa Tengah mendasarkan Dokumen Review Penataan Transportasi Wilayah (Tatrawil). Konsep rencana pengembangan infrastruktur perhubungan di Jawa Tengah sesuai dengan gambar berikut.



Sumber: Review Tatrawil, Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.85.

Konsep Pengembangan Infrastruktur Perhubungan di Jawa Tengah

Pelayanan umum pada urusan perhubungan meliputi perhubungan darat (angkutan darat dan ASDP), perhubungan laut, perhubungan udara dan perkeretaapian. Pemerintah provinsi hanya mempunyai kewenangan pada perhubungan darat dan laut. Pelayanan urusan perhubungan dapat dilihat dari jumlah penumpang dan barang yang dapat terangkut oleh angkutan baik darat, laut maupun udara.

a. Perhubungan Darat

1) Terminal Penumpang

Terminal penumpang di Jawa Tengah pada tahun 2018 sejumlah 192 terminal yang terdiri dari 17 terminal tipe A (kewenangan pusat), 24 terminal tipe B (kewenangan provinsi) dan ±151 terminal tipe C (kewenangan kabupaten/kota). Terjadi peralihan tipe terminal pada tahun 2016, dimana sebagian terminal tipe B menjadi terminal tipe C. Pada tahun 2017 Terminal tipe A Terboyo di Kota Semarang tidak dioperasikan dan direncanakan dialih fungsikan menjadi terminal barang.

Tabel 2.139.
Perkembangan Jumlah Terminal Penumpang di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah terminal tipe A	18	18	18	17	17
2.	Jumlah terminal tipe B	47	47	24	24	24
3.	Jumlah terminal tipe C	55	55	78	77*)	151**)
Total Terminal di Jawa Tengah		120	120	120	118	118

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Keterangan: *) Kementerian Perhubungan

**) Bappeda Kabupaten/ Kota tahun awal 2019

Jumlah dan persebaran terminal tipe A dan tipe B, jika dibandingkan dengan kebutuhan terminal berdasarkan Dokumen Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah belum dapat memenuhi kebutuhan. Sampai dengan tahun 2018 masih terdapat kebutuhan pembangunan terminal tipe A di 9 kabupaten/kota dan tipe B di 11 kabupaten/kota.

Tabel 2.140.
Persebaran Terminal Tipe A dan B di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

No	Kabupaten / Kota	Terminal Tipe A		Terminal Tipe B	
		Eksisting	Revisi RTRW Provinsi	Eksisting	Revisi RTRW Provinsi
	Kedungsepur				
1	Kab. Kendal				Ada
2	Kab. Demak		Ada	Bintoro	Ada
3	Kab. Semarang	Bawen	Ada		
4	Kota Semarang	Mangkang	Ada	Penggaron	Ada
5	Kota Salatiga	Tingkir	Ada		
6	Kab. Grobogan		Ada	Purwodadi	Ada
	Wanarakuti				
7	Kab. Jepara		Ada		Ada
8	Kab. Kudus	Jati	Ada		
9	Kab. Pati		Ada		Ada
	Subosukowonosraten				
10	Kab. Sukoharjo			Kartosuro, Sukoharjo	Ada
11	Kab. Boyolali		Ada	Sunggingan	Ada
12	Kota Surakarta	Tirtonadi	Ada		
13	Kab. Karanganyar			Tegalgede, Tawangmangu	Ada
14	Kab. Wonogiri	Giriadipura	Ada	Jatisrono, Pracimantoro, Purwantoro, Baturetno	Ada
15	Kab. Sragen		Ada	Pilangsari	Ada
16	Kab. Klaten	Ir. Soekarno	Ada		
	Bregasmalang				
17	Kab. Brebes			Bumiayu, Tanjung	Ada
18	Kab. Tegal				Ada

No	Kabupaten / Kota	Terminal Tipe A		Terminal Tipe B	
19	Kota Tegal		Ada		Ada
20	Kab. Pemalang	Pemalang	Ada		Ada
	Petanglong				
21	Kab. Pekalongan			Kajen	Ada
22	Kab. Batang			Banyuputih	Ada
23	Kota Pekalongan	Pekalongan	Ada		
	Barlinmascakeb				
24	Kab. Banjarnegara		Ada	Banjarnegara	Ada
25	Kab. Purbalingga	Bobotsari	Ada	Purbalingga	Ada
26	Kab. Banyumas	Bulupitu	Ada		Ada*
27	Kab. Cilacap	Gunuung Simping	Ada		Ada
28	Kab. Kebumen	Kebumen	Ada		Ada
	Purwomanggung				
29	Kab. Purworejo	Purworejo	Ada	Suronegaran, Nampurejo	Ada
30	Kab. Wonosobo	Mendolo	Ada		
31	Kab. Magelang			Drs. Prayitno	Ada
32	Kota Magelang	Tidar	Ada		
33	Kab. Temanggung			Madureso	Ada
	Banglor				
34	Kab. Rembang		Ada		Ada
35	Kab. Blora	Cepu	Ada	Gagak Rimang	Ada
J U M L A H		17 Terminal	26 Terminal	24 Terminal	27 Terminal

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah & Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah, Diolah, 2018

Mendasarkan Peraturan Gubernur No. 25 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan Tipe B di Jawa Tengah, terdapat 24 terminal tipe B yang tersebar di 17 kabupaten/kota. Kondisi tahun 2017, 3 terminal tidak layak menjadi terminal tipe B, yaitu Terminal Suronegaran dan Nampurejo di Kabupaten Purworejo, serta Terminal Drs Prayitno Muntilan Kabupaten Magelang. Sisanya belum memenuhi persyaratan minimal operasional terminal dan secara fisik fasilitas utama serta pendukungnya mengalami kerusakan.

Dari status aset, 9 terminal belum sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sebagai antisipasi pada tahun 2017 telah disusun Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RIJLLAJ) Jawa Tengah. Salah satu rekomendasi RIJLLAJ adalah pembangunan simpul transportasi terminal tipe B. Kebutuhan pembangunan terminal tipe B sebanyak 12 terminal di 11 kabupaten yaitu Kabupaten Kendal, Rembang, Pati, Jepara, Magelang, Temanggung, Kebumen, Cilacap Bagian Timur dan Bagian Barat, Banyumas, Brebes serta Purworejo.

Tabel 2.141.**Kondisi Terminal Tipe B di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018**

Kabupaten / Kota	Nama Terminal	Kondisi	Status Aset
1. Kota Semarang	1. Penggaron	Layak Operasi	Milik Pemprov
2. Kab. Grobogan	2. Purwodadi	Layak Operasi	Milik Pemprov
3. Kab. Blora	3. Gagak Rimang	Layak Operasi	Milik Pemprov
4. Kab. Demak	4. Bintoro	Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik PT. KAI
5. Kab. Batang	5. Banyu Putih	Layak Operasi	Milik Pemprov
6. Kab. Pekalongan	6. Kajen	Layak Operasi	Milik Pemprov
7. Kab. Temanggung	7. Madureso	Layak Operasi	Milik Pemprov
8. Kab. Magelang	8. Drs. Prayitno	Tidak Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik PT. KAI
9. Kab. Boyolali	9. Sunggingan	Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Pemkab
10. Kab. Sragen	10. Pilangsari	Layak Operasi	Milik Pemprov
11. Kab. Karanganyar	11. Tegalgede	Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Pemkab
	12. Tawangmangu	Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Pemkab
12. Kab. Wonogiri	13. Jatisrono	Layak Operasi	Milik Pemprov
	14. Baturetno	Layak Operasi	Milik Pemprov
	15. Pracimantoro	Layak Operasi	Milik Pemprov
	16. Purwantoro	Layak Operasi	Milik Pemprov
13. Kab. Purworejo	17. Suronegaran	Tidak Layak Operasi	Bangunan (Pos Jaga) Milik Pemprov, Tanah Milik PT. KAI
	18. Nampurejo	Tidak Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Bondo Deso
14. Kab. Sukoharjo	19. Kartosuro	Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Bondo Deso
	20. Sukoharjo	Layak Operasi	Bangunan Milik Pemprov, Tanah Milik Pemkab
15. Kab. Banjar	21. Banjarnegara	Layak Operasi	Milik Pemprov
16. Kab. Purbalingga	22. Purbalingga	Layak Operasi	Milik Pemprov
17. Kab. Brebes	23. Bumiayu	Layak Operasi	Milik Pemprov
	24. Tanjung	Layak Operasi	Milik Pemprov

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Fasilitas perlengkapan jalan sampai dengan tahun 2018, tingkat pemenuhan kebutuhan fasilitas perlengkapan pada jalan yang menjadi kewenangan provinsi mencapai 7,48%.

Tabel 2.142.
Perkembangan Pemasangan Fasilitas Perlengkapan Jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Rambu Jalan	2.642	3.124	2.133	280	375
2.	RPPJ	119	101	179	50	50
3.	APILL	4	11	7	-	8
4.	Guardrail	1.704	2.324	2.000	560	448
5.	Marka Jalan	83.311	99.056	80.470	15.835	12.001
6.	LPJU	30	79	205	263	263

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan berupa Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) Jawa Tengah pada tahun 2018 sejumlah 263 unit meningkat dibanding tahun 2016 sejumlah 205 unit.

2) Lalu Lintas Angkutan Jalan

Terkait dengan aspek peningkatan keselamatan jalan, kondisi tahun 2018 setidaknya terdapat 155 titik lokasi di jalan provinsi dan nasional yang termasuk dalam kategori daerah rawan kecelakaan. Data kecelakaan lalu lintas di Jawa Tengah pada tahun 2018 (Semester I) terdapat 8.452 kejadian kecelakaan lalu lintas dengan korban 1.943 meninggal dunia, 45 luka berat, 9.959 luka ringan dan jumlah kerugian materiil Rp. 6.501.017.000,-.

Tabel 2.143.
Data Kejadian Kecelakaan Lalu Lintas Di Jawa Tengah Tahun 2017-2018

No.	Uraian	Satuan	Jumlah	
			Smt. I 2017	Smt. I 2018
1.	Jumlah Kejadian	Kejadian	8.434	8.452
2.	Jumlah Korban MD	Jiwa	1.987	1.943
3.	Korban Luka Berat	Orang	67	45
4.	Korban Luka Ringan	Orang	10.041	9.959
5.	Kerugian Materiil	Rupiah	5.724.489.000	6.501.017.000

Sumber: Direktorat Lalu Lintas Polda Jateng, 2019

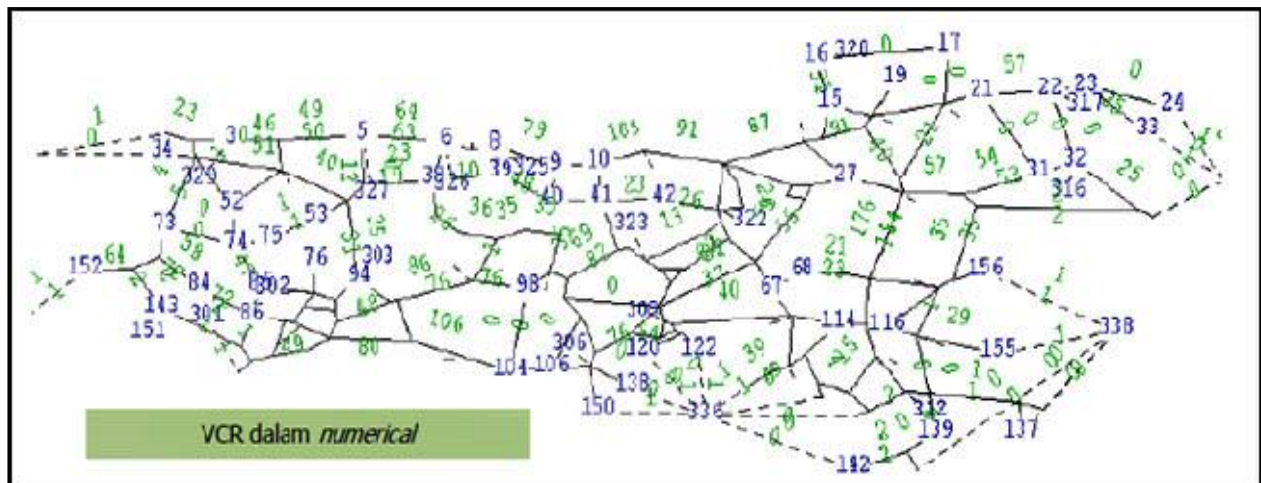
Sebagai gambaran kepadatan lalu lintas di jalan kewenangan provinsi, setidaknya terdapat 13 ruas kewenangan provinsi yang masuk dalam kriteria rawan macet jika dilihat dari aspek perbandingan antara volume lalu lintas dan kapasitas jalan (VCR).

Tabel 2.144.
Ruas Jalan Provinsi yang Berpotensi Terjadi Kemacetan Tahun 2016

No.	Ruas jalan	Status	Fungsi	Kap.	Vol.	VCR
1.	Purbalingga - Bobotsari	P	K2	2.564	1311,05	0,51
2.	Semarang - Godong	P	K2	2.932	1499,22	0,51
3.	Sukoharjo - Nguter (Skb)	P	K2	2.606	1332,53	0,51
4.	Sukorejo (Blimbing) - Boja - Cangkiran	P	K2	2.061	1097,76	0,53
5.	Kudus - Margoyoso	P	K2	2.482	1348,44	0,54
6.	Kretek - Kepil	P	K2	1.610	874,69	0,54

No.	Ruas jalan	Status	Fungsi	Kap.	Vol.	VCR
7.	Sukoharjo - Weru - Watu Kelir	P	K2	1.333	738,4	0,55
8.	Purwodadi - Wirosari	P	K2	1.745	985,22	0,56
9.	Patean (Kdt) - Parakan	P	K2	2.532	1456,52	0,58
10.	Palur - Karanganyar	P	K2	4.605	2698,06	0,59
11.	Kalimanah - Purbalingga (Bmu)	P	K2	2.137	1752,89	0,82
12.	Surakarta - Gemolong - Geyer (Skt)	P	K2	1.803	1613,37	0,89
13.	Jati - Klambu (Ptb)	P	K2	1.763	1652,7	0,94

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2018



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.86.

Peta Persebaran Kemacetan Mendasarkan Beban Jalan (VCR)

3) Perijinan Trayek Angkutan Umum

Jumlah ijin trayek Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) sampai dengan tahun 2018 sebanyak 902 trayek dan jumlah ijin trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sejumlah 269 trayek, sedangkan Mobil Penumpang Umum (unit) sejumlah 397.667 unit. Kondisi tersebut tidak mengalami perubahan sejak tahun 2014. Perkembangan pelayanan angkutan jalan di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.145.

Perkembangan Pelayanan Angkutan Jalan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah Izin Trayek Antar Kota Antar Provinsi/AKAP (trayek)	902	902	902	902	902
2.	Jumlah Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi/AKDP (trayek)	269	269	269	269	269
3.	Angkutan wisata (kendaraan)	3.359	3.755	3.757	4.422	4.666
4.	Jumlah bus (unit)	10.583	11.959	12.686	12.689	12.737
5.	Mobil Penumpang Umum (unit)	397.667	397.667	397.667	397.667	397.667

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Pelayanan angkutan jalan di Provinsi Jawa Tengah yang mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun adalah jumlah angkutan wisata

(kendaraan) dan jumlah bus (unit). Untuk pelayanan angkutan pemadu moda telah ditetapkan jaringan trayek sebagai berikut :

- Pemadu moda Bandara Ahmad Yani – Kudus PP
- Pemadu moda Bandara Ahmad Yani – Salatiga PP
- Pemadu moda Bandara Ahmad Yani – Pekalongan PP
- Pemadu moda Bandara Adi Sumarmo – Wonogiri PP
- Pemadu moda Bandara Adi Sumarmo – Sragen PP
- Pemadu moda Bandara Adi Sumarmo – Terminal Tirtonadi PP

Dari jaringan trayek pemadu moda di atas sampai dengan saat ini baru terlayani 2 (dua) trayek, yaitu Bandara Adi Sumarmo – Sragen PP dan Bandara Adi Sumarmo – Terminal Tirtonadi PP.

4) Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Pelabuhan penyeberangan yang ada di Jawa Tengah melayani lintas Jepara – Karimunjawa dan Semarang – Karimunjawa. Jumlah penumpang KM. Siginjai pengganti KM. Muria yang melayani lintas Jepara – Karimunjawa pp pada tahun 2018 melayani penumpang sebanyak 68.737 orang. Sementara KM. Kartini yang melayani lintas Semarang – Karimunjawa – Jepara pp, jumlah penumpang yang diangkut di tahun 2018 sebanyak 1.796 orang menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan penumpang KM Bahari Ekspres 1 yang melayani Jepara-Karimunjawa, di tahun 2018 mengalami peningkatan jumlah penumpang menjadi 95.211 orang.

Tabel 2.146.

Perkembangan Pelayanan ASDP di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jumlah penumpang KM. Muria (orang)/KMC. Siginjai ^{*)}	77.356 ^{*)}	80.152	90.818	68.015	68.737 ^{***)}
2.	Jumlah penumpang KMC. Kartini I (orang)	6.266	9.185	1.498	3.939	1.796
3.	Jumlah penumpang KMC. Bahari Ekspres 1 (Jepara –Karimunjawa) (orang)	70.200	61.543	82.791	82.913	95.211 ^{***)}
4.	Jumlah penumpang KMC. Bahari Ekspres 2 (Kendal –Karimunjawa) (orang)	-	-	3.053 ^{**)}	13.853	off

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Keterangan : ^{*)}KM. Muria pada tahun 2014 tidak beroperasi lagi, dan diganti dengan KMC Siginjai

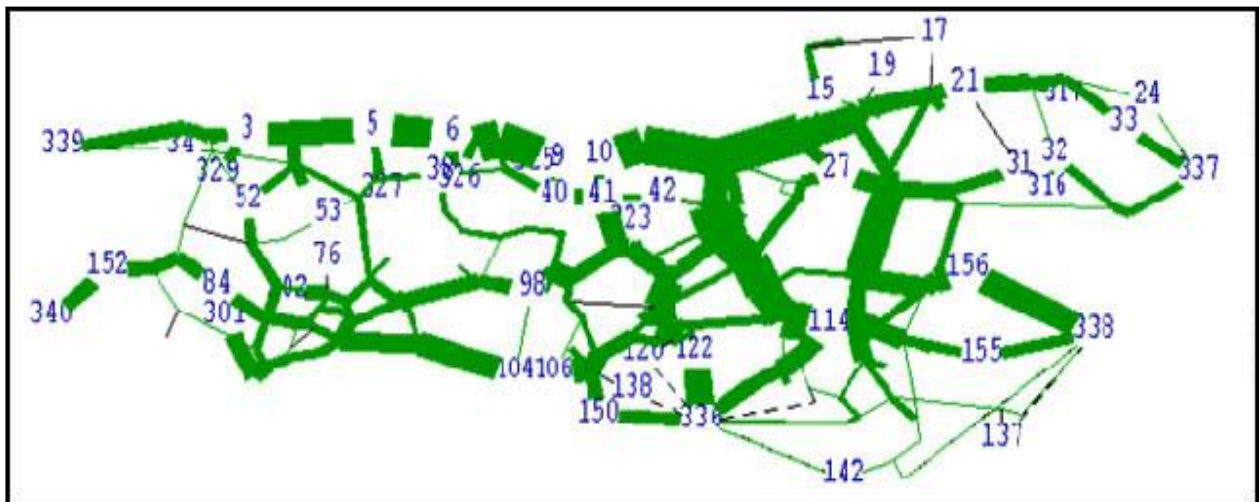
^{**)} KMC Bahari Ekspres II (Kendal – Karimunjawa) mulai beroperasi bulan Agustus 2016

^{***)} Data s/d Bulan November 2018

5) Aglomerasi Angkutan Umum Perkotaan

Besaran bangkitan tarikan perjalanan yang membebani jalan di Provinsi Jawa Tengah digunakan untuk mengetahui pergerakan perjalanan, dimana pergerakan internal didominasi ke pusat – pusat kegiatan seperti Kota Semarang, Kota Surakarta dan Kota Yogyakarta. Pusat – pusat kegiatan tersebut belum dilayani angkutan umum yang menghubungkan antar wilayah perkotaan. Sehingga kebutuhan untuk pelayanan angkutan umum massal

yang melayani antar wilayah perkotaan sudah menjadi suatu kebutuhan untuk mengurangi beban lalu lintas di jalan raya.



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.87.
Distribusi Perjalanan Antar Wilayah Perkotaan Di Jawa Tengah

Angkutan umum massal di kawasan perkotaan di Jawa Tengah dilayani oleh Trans Jateng. Kondisi sampai dengan tahun 2018 telah terdapat pelayanan pada koridor Terminal Bawen – Stasiun Tawang dan Purwokerto – Purbalingga. Sehingga masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan jumlah koridor angkutan aglomerasi yang sejumlah 14 koridor dengan pelayanan pada tahun 2018 yang baru melayani 2 koridor.

Tabel 2.147.
Kebutuhan Pengembangan Jaringan Trayek Aglomerasi

No.	Wilayah Aglomerasi	Jaringan Trayek
1	KEDUNGSEPUR (Kendal, Ungaran, Semarang, Purwodadi)	1. Semarang – Bawen (Operasional)
		2. Semarang – Kendal
		3. Semarang – Demak
		4. Semarang – Purwodadi
2	SUBOSUKAWONOSRATEN (Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen dan Klaten)	5. Boyolali – Surakarta
		6. Surakarta – Sragen
		7. Surakarta – Karanganyar
		8. Surakarta – Sukoharjo
		9. Surakarta – Klaten
3	BARLINGMASCAKEB (Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen)	10. Purwokerto – Purbalingga (Operasional)
		11. Purwokerto – Wangon
4	PURWOMANGGUNG (Purworejo, Wonosobo, Kota Magelang, Kab. Magelang, Temanggung)	12. Terminal Secang – Muntilan (via Borobudur)
		13. Terminal Secang – Terminal Parakan
		14. Stasiun Kutoarjo - Borobudur

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Sampai dengan tahun 2018 untuk angkutan umum di kawasan perbatasan (angkutan perintis) khususnya pada perbatasan Kabupaten Cilacap dengan Brebes sekaligus juga berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat

telah terdapat pada 2 trayek angkutan perintis yang dilayani oleh DAMRI (Rute : Sidareja – Cinangsi, Kawunganten – Gandrungmangu - Citembong).

6) Angkutan Umum *Online*

Perkembangan angkutan umum mengalami dinamika yang cukup tinggi, dimana terdapat angkutan umum yang berbasis teknologi informasi atau *online*, baik kendaraan roda 2 maupun roda 4. Secara teknis kendaraan roda 2 tidak termasuk kategori angkutan umum.

Mendasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus di Wilayah Operasi Dalam Provinsi Jawa Tengah Peraturan Gubernur dimaksud mengatur salah satunya untuk penerbitan ijin operasi angkutan sewa khusus/daring (*online*). Pada Tahun 2017 telah diterbitkan 662 Surat Persetujuan Ijin Operasi (SPIO).

Tabel 2.148.

Penerbitan Surat Persetujuan Ijin Operasi (SPIO) Untuk Angkutan Sewa Khusus/Daring (*Online*) Tahun 2017

No.	Uraian	Kendaraan Roda 4 Berjin Operasional
1.	Kedungsepur	266
2.	Bregasmalang	105
3.	Barlingmascakeb	60
4.	Subosukowonosraten	90
5.	Purwomanggung	81
6.	Petanglong	60
JUMLAH		662

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Namun demikian dalam perkembangannya, pada Bulan Agustus tahun 2018 diterbitkan Surat Keputusan Mahmakah Agung tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017. Sehingga Pemerintah Provinsi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengatur atau memberikan perijinan terkait dengan operasional angkuta sewa khusus/daring (*online*).

b. Perhubungan Laut

Mendasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Induk Pelabuhan Nasional (RIPN) sebagaimana Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 432 Tahun 2017, terdapat 11 Pelabuhan di Jawa Tengah yang terdiri dari 1 Pelabuhan Utama (Tanjung Emas Semarang), 5 Pelabuhan Pengumpul (Tanjung Intan Cilacap, Tegal, Batang, Juwana, dan Sluke) dan 5 Pelabuhan Pengumpan Regional.

Tabel 2.149.
Hierarki Pelabuhan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017

No.	Pelabuhan	Hierarki	Keterangan
1.	Tanjung Emas Semarang	Utama	
2.	Tanjung Intan Cilacap	Pengumpul	
3.	Tegal	Pengumpul	
4.	Batang	Pengumpul	PP No 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan PP 26 Tahun 2008 tentang RTRWN
5.	Jejara	Pengumpan Regional	
6.	Karimunjawa Jejara	Pengumpan Regional	
7.	Legon Bajak	Pengumpan Regional	
8.	Kendal	Pengumpan Regional	
9.	Juwana Pati	Pengumpul	PP No 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan PP 26 Tahun 2008 tentang RTRWN
10.	Sluke Rembang	Pengumpul	PP No 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan PP 26 Tahun 2008 tentang RTRWN
11.	Tasik Agung Rembang	Pengumpan Regional	

Sumber : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Keputusan Menteri Perhubungan No. KP. 432 Tahun 2017 Tentang RIPN

Pelabuhan regional dimanfaatkan untuk melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muatan angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan atau barang serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayaran dalam provinsi (pengumpan regional) atau dalam kabupaten (pengumpan lokal).

Kondisi sampai dengan tahun 2018, walaupun pelabuhan pengumpan regional sudah merupakan kewenangan pemerintah provinsi, namun aset dan pengelolaannya masih terdapat di Pemerintah Pusat (Kementerian Perhubungan), proses pengalihan aset dan kewenangan direncanakan tahun 2019.

Jumlah kunjungan kapal tahun 2018 di Pelabuhan Tanjung Emas mencapai 3.410 *call* mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2017 yang mencapai 2.791 *call*. Namun pada Pelabuhan Tanjung Intan Cilacap jumlah kunjungan kapal pada tahun 2018 mencapai 354*call* menurun dibandingkan dengan tahun 2017 yang mencapai 410 *call*.

Tabel 2.150.
Perkembangan Pelayanan Angkutan Laut di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah pelabuhan	9	9	9	9	9
2	Pelabuhan Tanjung Emas					
	a. Kunjungan kapal (<i>call</i>)	4,400	2.932	2.001	2.791	3.410*)
	b. GRT (GT)	21.500.751	13.108.126	15.390.022	21.819.637	24.902.093*)
	c. Kargo (ton)	4.131.527	11.340.333	11.071.023	12.690.037	13.919.940*)
	d. Kontainer (<i>Teus</i>)	575.671	608.201	602.473	593.575	539.158*)
	e. Penumpang (orang)	467.486	369.688	286.106	254.947	280.142*)
	f. <i>Dweelling Time</i> TPKS Impor	-	-	-	5,94	4,5
	g. <i>Dweelling Time</i> TPKS Expor	-	-	-	2,49	3,4
3	Pelabuhan Tanjung Intan					
	a. Kunjungan kapal (<i>call</i>)	1.560	1.535	1.359	410	354**)
	b. GRT (GT)	24.134.255	21.497.195	20.764.992	4.778.416	1.971.910**)
	c. Kargo (ton)	5.466.479	4.098.381	6.195.006	5.889.713	6.276.236**)

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Keterangan: *) Data s/d Bulan Oktober 2018

**) Data s/d Bulan September 2018

Selama tahun 2018 kondisi *dweelling time* Pelabuhan Tanjung Emas mencapai 4,5 hari yang mengalami perbaikan kinerja jika dibandingkan tahun 2017 sebesar 5,94 hari.

c. Perhubungan Udara

Terdapat 4 bandara komersial yang sudah beroperasi yaitu Bandara Ahmad Yani Semarang, Adi Sumarmo Surakarta, Dewadaru Karimunjawa Jepara, dan Tunggul Wulung Cilacap, serta 2 rencana pengoperasian dan pengembangan bandara yaitu Bandara Jenderal Besar Soedirman Purbalingga (Wirasaba) dan Bandara Ngloram Kabupaten Blora.

Telah dioperasikan terminal penumpang baru Bandara Ahmad Yani Semarang pada tahun 2018 dengan kapasitas ±6 juta penumpang per tahun, atau hampir 9 kali lipat dari kapasitas terminal sebelumnya.



Gambar 2.88.

Terminal Penumpang Baru Bandara Internasional A. Yani Semarang

Untuk Bandara Adi Sumarmo Surakarta saat ini sedang dilakukan pengembangan intermoda transportasi dengan membangun kereta api bandara yang menghubungkan Bandara Adi Sumarmo dengan Stasiun Solo Balapan, dimana telah dilaksanakan pembebasan lahan, pembangunan jalur KA menuju Bandara Adi Sumarmo, serta pembangunan jembatan pendukung jalur kereta api.

Jumlah penumpang di Bandara Ahmad Yani dan Bandara Adi Soemarmo baik domestik dan internasional tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2017. Jumlah barang baik domestik maupun internasional di Bandara Ahmad Yani dan Adi Soemarmo pada tahun 2018 juga mengalami peningkatan jika dibanding dengan tahun 2017.

Tabel 2.151.

Perkembangan Pelayanan Perhubungan Udara di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah bandara	4	4	4	4	4
2	Bandara Ahmad Yani					
	a. Penumpang domestik (orang)	3.313.331	3.533.403	3.690.633	4.239.732	4.943.701
	b. Penumpang internasional	152.380	136.001	143.860	188.691	216.548
	c. Barang domestik (kg)	19.370.583	14.029.413	22.262.578	16.844.792	29.485.686
	d. Barang internasional (kg)	1.536.071	1.779.993	1.765.117	766.173	2.226.842
3	Bandara Adi Soemarmo					
	a. Penumpang domestik (orang)	1.303.747	1.417.444	1.819.288	1.193.606	1.303.570
	b. Penumpang internasional	53.141	52.941	100.245	57.489	60.032
	c. Barang domestik (kg)	7.938.228	5.712.150	5.746.845	3.238.753	7.808.387
	d. Barang internasional (kg)	580.244	560.028	2.023.610	4.316	968.226

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Sebagai dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Karimunjawa, telah dikembangkan Bandara Dewadaru dimana saat ini telah dilaksanakan

perpanjangan *runway* dari 1.200 meter menjadi 1.400 meter agar dapat memenuhi kebutuhan jasa angkutan udara terkait dengan kepariwisataan dan penyusunan pembaharuan studi terkait dengan pengembangan bandara.

Bandara Tunggul Wulung Cilacap melayani penerbangan reguler dengan rute Jakarta – Cilacap (Susi Air dua kali sehari dan Pelita Air dua kali seminggu). Selain melayani penerbangan reguler, juga digunakan sebagai sarana pendidikan lima sekolah penerbangan (*flying school*) termasuk milik Kementerian Perhubungan. *Run way* sepanjang 1.400 m dengan lebar 30 meter dapat dilandasi oleh pesawat sejenis ATR 72 atau CN 235 (kapasitas 60 – 70 penumpang) atau yang lebih kecil.

Sedangkan progres pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman Kabupaten Purbalingga, telah dilakukan penandatanganan MoU antara kementerian Perhubungan, PT. Angkasa Pura II, TNI AU, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Untuk mendukung pengembangan Jawa Tengah khususnya untuk wilayah timur akan dilakukan Pengembangan Bandara Ngloram Kabupaten Blora, dimana sampai dengan saat ini sedang dilakukan penyusunan studi kelayakan, AMDAL dan proses pembahasan pembagian hak serta kewajiban antara Kementerian Perhubungan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten Blora.

d. Perkeretaapian

Untuk pelayanan perkeretaapian jumlah penumpang dan jumlah barang terangkut pada kurun waktu 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Jumlah penumpang kereta api tahun 2018 sebesar 25.624.133 orang mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 18.334.400 orang. Jumlah stasiun KA di Jawa Tengah cenderung tetap, yaitu sejumlah 140 stasiun. Sebab penurunan jumlah perlintasan KA di Jawa Tengah mulai pada tahun 2015 karena ditutup sehubungan dengan pembangunan *double track / rel ganda* kereta api oleh Kementerian Perhubungan.

Tabel 2.152.

**Perkembangan Pelayanan Perkeretaapian di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 – 2018**

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Jml penumpang (orang)	11.030.089	10.849.607	19.711.021	18.334.400	25.624.133
2.	Jumlah barang terangkut (ton)	1.505.040	1.541.389.	1.480.612	1.617.727	1.939.940
3.	Jml stasiun KA	140	140	140	140	140
4.	Jml Perlintasan KA di Jawa Tengah	1.614	1.403	1.395	1.317	1.369

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Pada tahun 2018 dari 1.369 perlintasan sebidang dengan kereta api, yang sudah berpalang pintu dan dijaga pada tahun 2018 sejumlah 373

perlintasan sedangkan masih terdapat 889 perlintasan tidak ada palang pintu.

Tabel 2.153.

Perlintasan Jalan Dengan Rel Kereta Api di Jawa Tengah Tahun 2018

No	Status Jalan	Jumlah Perlintasan Dengan Rel Kereta Api		Perlintasan Tidak Sebidang				Perlintasan Sebidang			
				Fly Over		Underpass		Berpalang Pintu dan Dijaga		Tidak Ada Palang Pintu	
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%
1.	Nasional	39	2,85	10	43,48	5	5,95	23	6,17	1	0,11
2.	Provinsi	26	1,90	0	0,00	1	1,19	24	6,43	1	0,11
3.	Kab./Kota	1304	95,25	13	56,52	78	92,86	326	87,40	887	99,78
Jumlah		1369	100,00	23	100,00	84	100,00	373	100,00	889	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Di Jawa Tengah terdapat kegiatan pembangunan rel ganda kereta api (*double track*) yang terdiri dari Lintas Utara dan Lintas Selatan. *Double track* lintas selatan Jawa terdiri dari *double track* Purwokerto - Kroya dan Solo - Sragen (Palur - Kedungbanteng) yang direncanakan selesai pada tahun 2018. Progres fisik pembangunan *double track* Purwokerto - Kroya pada Tahun 2017 sebesar 72,62%, sedangkan untuk Kroya - Kutoharjo sebesar 15,211%. Progres fisik pembangunan *double track* Solo - Sragen (Palur - Kedungbanteng) sudah mencapai 100% dengan panjang lintasan 27,9 Km.

Total panjang jalur kereta api di Jawa Tengah sepanjang ±1.557 km yang terdiri dari ±894 km jalur operasi (57,42%) dan ±663 km jalur non operasi (42,58%). Adapun rencana revitalisasi jalur kereta api non aktif di Jawa Tengah mendasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS) sepanjang ±507,5 km di 9 jalur lintas kereta api.

Tabel 2.154.

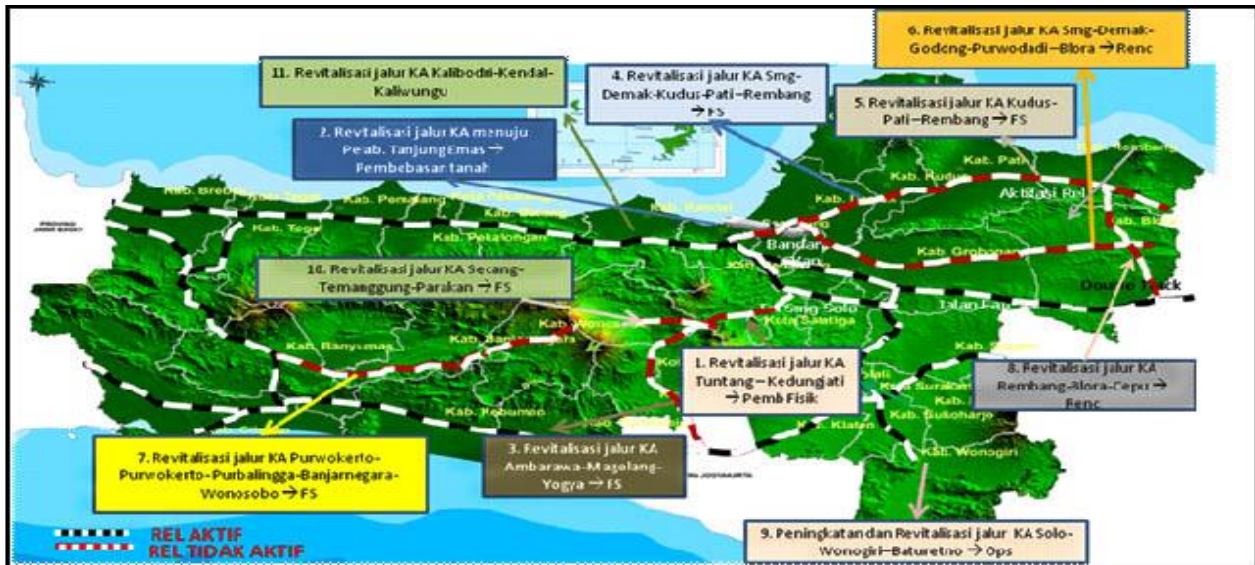
Progres Revitalisasi Jalur Kereta Api Non Aktif di Jawa Tengah

No.	Reaktivasi Jalur KA Lintas	Panjang ± (km)	Keterangan
1.	Kedungjati - Tuntang	32	FS 2009, MoU & PKS 2013, DED 2014, AMDAL 2015, Tanah 2016, Proses Review DED
2.	Stasiun Tawang - Pelabuhan Tanjung Emas	2,9	FS 2012, MoU 2014, PKS 2015, DED 2015, UKL-UPL 2015, Ijin Lingkungan 2016, Masih ada tanah warga yang proses gugatan pengadilan
3.	Purwokerto - Wonosobo	94	FS 2009, Study Trase 2015, Rekom Gub kesesuaian RTRW 2016, Rencana : 2018 - 2023
4.	Semarang - Demak - Kudus	52	Studi KA Regional Semarang - Demak - Rembang 2006, FS Semarang - Rembang - Bojnegoro 2015. Rencana 2021 - 2030
5.	Kudus - Pati - Rembang	60	Studi KA Regional Semarang - Demak - Rembang 2006, FS Semarang - Rembang - Bojnegoro 2015, Rencana 2021 - 2030
6.	Bedono - (Secang - Parakan) - Magelang - Yogyakarta :		FS 2013, Kajian Trase Bedono - Secang - Magelang 2014, Rencana 2018 - 2024
	- Magelang - Yogyakarta	46	
	- Magelang - Secang - Parakan	37	

No.	Reaktivasi Jalur KA Lintas	Panjang ± (km)	Keterangan
7.	Cepu – Rembang	72	Masuk RIPNAS (Belum Ada Persiapan Dokumen) : Rencana 2025 – 2030
8.	Purwosari – Wonogiri - Baturetno	82	Masuk RIPNAS (Belum Ada Persiapan Dokumen) : Rencana 2025 – 2030
9.	Wonosobo – Magelang	29,6	Belum Ada Persiapan Dokumen
Total Panjang		507,5	

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Diolah, 2018

Adapun peta sistem jaringan rel kereta api di Jawa Tengah sebagaimana gambar berikut.



Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.89.
Sistem Jaringan Rel Kereta Api di Jawa Tengah

10. Komunikasi dan Informatika

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah membangun sarana komunikasi dua arah antara pemerintah dengan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui *website* (www.jatengprov.go.id) sebagai wujud peningkatan keterbukaan informasi kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2016 seluruhnya telah memiliki *website* dan telah melakukan *up dating* data di *website* yang di miliki. Pembaharuan informasi dan data yang disajikan dalam *website* pada setiap OPD perlu dilakukan agar informasi yang disajikan dapat aktual sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dan data yang akurat. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.155.
Persentase SKPD Provinsi Jawa Tengah Memiliki Website dan meng-update Data di Website Tahun 2014–2018

No	Tahun	Total Jumlah OPD Provinsi	OPD Provinsi Memiliki Website		OPD Provinsi yang Meng-update Data di website	
			Jumlah	%	Jumlah	%
1	2014	59	54	91	51	94
2	2015	59	59	100	59	100
3	2016	59	59	100	59	100
4	2017	41	41	100	41	100
5	2018	41	41	100	41	100

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jateng, 2018

Dalam rangka menunjang reformasi birokrasi menuju tata kelola sistem pemerintah berbasis teknologi informasi maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mendapat predikat Baik dengan memperoleh penilaian indeks Pemeringkatan *e-Government* Indonesia dengan nilai 2,64 pada tahun 2015 yang dinilai dari sisi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan.

Akses layanan universal telekomunikasi dan informatika telah menjangkau seluruh Kecamatan di Jawa Tengah meskipun masih terdapat wilayah tanpa layanan jaringan seluler ataupun data *broadband*, utamanya di daerah perbukitan dan pegunungan dengan kepadatan penduduk rendah.

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah koperasi dalam kurun waktu 2013 – 2016 cenderung mengalami kenaikan jumlah, namun terjadi penurunan di tahun 2017 menjadi sebanyak 25.906 unit jika dibandingkan dengan tahun 2016 (28.460 unit). Hal ini disebabkan terdapat koperasi yang tidak aktif dibubarkan. Demikian juga untuk koperasi aktif yang selalu mengalami kenaikan jumlah pada kurun waktu 2013 – 2016 yang turun pada tahun 2017.

Tingkat keaktifan koperasi di Jawa Tengah dalam kurun waktu 2013 - 2017 cenderung meningkat, dari sebesar 79,73 persen pada tahun 2013 menjadi sebesar 82,51 persen pada tahun 2017. Secara umum tingkat keaktifan koperasi dipengaruhi oleh keaktifan pengurus dalam melakukan pengelolaan koperasi. Terdapat pula koperasi yang dibentuk karena adanya bantuan yang mengharuskan kelompok membentuk koperasi, sehingga pasca penerimaan bantuan, koperasi tidak lagi aktif dalam mengembangkan usaha koperasi.

Tabel 2.156.
Persentase Koperasi Aktif di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

No.	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Koperasi	27.215	27.784	28.227	28.460	25.906
2	Jumlah Koperasi aktif (unit)	21.832	22.563	23.059	23.276	21.455
3	Persentase koperasi aktif (%)	79,73	81,20	81,69	81,78	82,81

Sumber :Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2018

Pengelolaan KSP yang baik dapat dilihat dari capaian indikator persentase koperasi sehat. Persentase koperasi sehat di Jawa Tengah pada tahun 2017 (angka sementara kondisi 11 Desember 2017) sebesar 27,58 persen. Total jumlah KSP tahun 2017 sebanyak 13.369 unit, dengan jumlah KSP sehat sebanyak 3.687 unit. Perkembangan tingkat kesehatan koperasi di Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.157.

Jumlah KSP/USP Sehat di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah koperasi simpan pinjam (KSP/USP)	21.928	17.125	22.522	15.375	13.369
2	Jumlah koperasi sehat (unit)	3.400	2.734	3.763	2.891	3.687
3	Persentase koperasi sehat (%)	15,50	15,96 ^{*)}	16,71	18,80	27,58 ^{**}

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2018

Ket: ^{*)}Untuk menghindari bias penafsiran terhadap makna Presentase Koperasi Sehat, maka mulai Tahun 2014 presentase Koperasi Sehat dibandingkan dengan Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya, bukan berdasar jumlah absolut.

Dalam rangka pemberdayaan UMKM, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan pembinaan UMKM. Jumlah UMKM yang telah dibina menunjukkan peningkatan dari sebanyak 90.339 unit pada tahun 2013 menjadi 133.679 unit pada tahun 2017. Penyerapan tenaga kerja dari UMKM juga meningkat dari sebesar 480.508 orang pada tahun 2013 menjadi sebanyak 918.455 orang pada tahun 2017. Aset UMKM juga meningkat dari sebesar Rp.9.634 milyar pada tahun 2013 menjadi Rp 26.249 milyar pada tahun 2017. Demikian juga omset mengalami peningkatan dari sebesar Rp.20.345 milyar pada tahun 2013 menjadi Rp 49.247 milyar pada tahun 2017. Secara rinci data UMKM binaan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.158.

Data UMKM Binaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah UMKM	unit	90.339	99.681	108.937	115.751	133.679
	Produksi/Non Pertanian	unit	30.103	34.309	38.084	39.799	45.963
	Pertanian	unit	15.819	17.738	19.010	19.535	22.329
	Perdagangan	unit	33.958	35.829	38.243	42.599	49.198
	Jasa	unit	-	11.805	13.600	14.018	16.189
2	Penyerapan Tenaga Kerja	orang	480.508	608.893	714.740	791.767	918.455
3	Aset	Rp. Milyar	9.634	13.947	19.046	22.891	26.249
4	Omset	Rp. Milyar	20.345	24.587	29.113	43.570	49.247

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2018

Dukungan kredit perbankan menjadi hal yang cukup penting dalam rangka pengembangan UMKM. Penyaluran kredit bagi UMKM dapat dilihat dari realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana di tahun 2016-2017 diberikan oleh 10 (sepuluh) bank penyalur yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, Bank Bukopin, Bank Jateng, Artha Graha Internasional, BCA, Sinar Mas, BTPN, dan BPD DIY. Perkembangan realisasi KUR di Jawa Tengah yang disalurkan melalui bank pelaksana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.159.
Realisasi KUR Menurut Bank Pelaksana di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

No	Bank Pelaksana	TAHUN									
		2013		2014		2015		2016		2017	
		UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)	UMKM	Realisasi (Rp)
1	Bank Mandiri	14.718	820.624.589.577	30.623	1.101.777.429.725	6.393	341.980.000.000	123.303	2.274.808.889.000	11.712	207.377.857.000
2	BRI	1.849.864	13.524.550.474.729	2.085.082	17.872.766.146.711	259.830	1.950.000.000.000	816.379	15.056.052.284.193	320.893	4.445.205.300.000
3	BNI	61.167	1.732.815.155.325	95.384	2.223.406.488.460	1.968	231.870.000.000	94.348	1.740.680.827.194	291	6.314.592.000
4	Bank Bukopin	843	113.934.002.509	844	114.434.002.509	0	0	97	1.790.000.000	-	-
5	Bank Syariah Mandiri	7.799	267.565.991.472	10.266	332.607.175.418	0	0	Tidak sebagai bank pelaksana	0	-	-
6	BTN	4.111	445.933.609.688	4.302	499.404.954.564	0	0	Tidak sebagai bank pelaksana	0	-	-
7	Bank Jateng	27.293	1.724.711.991.500	33.311	2.178.102.147.054	0	0	7.754	143.693.833.301	127	2.458.000.000
8	Bank artha graha Internasional							163	3.177.102.600	1.582	39.530.000.000
9	BCA							49	905.000.000	39	798.000.000
10	Sinar Mas							857	15.814.068.200	-	-
11	BTPN							897	16.543.000.000	1.223	16.537.750.000
12	BPD DIY							108	2.286.000.000	50	1.103.000.000
	Jumlah	1.965.765	18.630.135.814.800	2.259.812	24.322.498.344.441	268.191	2.523.850.000.000	1.043.955	19.255.751.004.488	335.917	4.719.324.499.000

Sumber : Dinas Koperasi & UMKM Provinsi Jawa Tengah, 2018

12. Penanaman Modal

Kinerja pembangunan urusan penanaman modal ditunjukkan melalui indikator pertumbuhan proyek PMA dan PMDN, dan pertumbuhan nilai investasi PMA dan PMDN. Jumlah proyek investasi di Jawa Tengah pada tahun 2014 – 2018 cenderung meningkat. Pada tahun 2014 sebanyak 407 proyek, dan meningkat menjadi sebanyak 3.653 proyek di tahun 2018, yang terdiri dari 1.380 proyek PMA dan 2.273 proyek PMDN.

Tabel 2.160.

Jumlah Proyek PMDN dan PMA di Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan LKPM Tahun 2014 – 2018

Tahun	Jumlah Proyek			Pertumbuhan Proyek PMA dan PMDN (%)
	PMA	PMDN	Jumlah	
2014	224	183	407	38,91
2015	608	873	1.481	263,88
2016	1.060	1.008	2.068	39,64
2017	955	1.403	2.358	14,02
2018	1.380	2.273	3.653	54,9

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Tengah, 2019

Realisasi investasi PMDN dan PMA di Jawa Tengah pada periode tahun 2014 – 2018 menunjukkan tren peningkatan yang cukup baik, dimana tahun 2014 realisasi investasi yaitu sebesar Rp.18,588 trilyun meningkat tajam menjadi Rp. 59,27 trilyun di tahun 2018. Peningkatan jumlah proyek dan realisasi investasi ini mengindikasikan bahwa Jawa Tengah memiliki prospek dan daya tarik bagi para investor seiring dengan peningkatan kualitas infrastruktur, penetapan upah tenaga kerja yang kompetitif, rencana pembangunan kawasan industri pada beberapa daerah, peningkatan pelayanan melalui penyelenggaraan PTSP di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan komitmen pemerintah daerah melalui kebijakan pro investasi. Perkembangan nilai investasi PMDN dan PMA, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.161.

Pertumbuhan Nilai Investasi PMDN dan PMA Berdasarkan LKPM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Tahun	Nilai Investasi (Rp Trilyun)			Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN (%)
	PMA	PMDN	Jumlah	
2014	4,986	13,602	18,588	9,45
2015	10,630	15,411	26,041	40,10
2016	14,113	24,070	38,183	46,63
2017	31,673	19,866	51,539	34,98
2018	31,790	27,474	59,270	15,00

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Tengah, 2019

Jumlah tenaga kerja yang terserap pada PMA dan PMDN pada tahun 2014 sebanyak 81.362 orang, meningkat pada tahun 2018 menjadi sebanyak 84.447 orang.

Tabel 2.162.
Penyerapan Tenaga Kerja Berdasarkan LKPM di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018
Jumlah tenaga kerja pada perusahaan PMA/PMDN	81.362	89.638	175.212	129.240	84.447
Jumlah seluruh Proyek PMA/PMDN	407	1.481	2.068	2.358	2.279

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Tengah, 2019

Berkaitan dengan kawasan industri di Jawa Tengah yang selama ini menjadi salah satu sumber investasi, berikut peta persebarannya.



Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.90.
Kawasan Industri Eksisting Di Provinsi Jawa Tengah

Dari data di atas, nampak bahwa sampai dengan tahun 2017, persebaran kawasan industri paling banyak berada di wilayah utara Jawa Tengah dengan dominasi berada di Kota Semarang, dan pada saat ini bertambah dengan berdirinya Kawasan Industri di Kendal dan Demak.

Sedangkan dari sisi kebijakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Tahun 2012 - 2025 sebagaimana ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025. Hal ini dilakukan untuk mendorong kinerja di urusan penanaman modal. Selanjutnya, untuk meningkatkan pelayanan publik telah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu (UPT PTSP) pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012.

Keberadaan UPT PTSP dimaksud diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi para investor dalam pengurusan perijinan dan non perijinan yang dimulai pada tahun 2014. Kegiatan penanaman modal di Jawa Tengah

juga didukung oleh adanya penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di 35 kabupaten dan kota.

Untuk meningkatkan kualitas layanan maka berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 72 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, maka layanan perizinan UPT PTSP diubah strukturnya menjadi dua bidang yaitu Bidang Pelayanan Perizinan dan Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan. Selain itu untuk mengantisipasi perkembangan era digital maka didukung pula dengan pembentukan Bidang Pengelolaan Data dan Informasi.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu upaya penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia seutuhnya. Hal ini dapat dilakukan diantaranya melalui pembinaan kepemudaan terhadap lembaga/organisasi kepemudaan. Jumlah Organisasi Kepemudaan (OK) di Jawa Tengah yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program pada tahun 2014-2018 cenderung mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 sebanyak 62 OK, meningkat menjadi sebanyak 65 OK di tahun 2018.

Selain itu dalam rangka meningkatkan kepedulian dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah, dilaksanakan Program Penyadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan melalui pembinaan Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan (SP3) yang pada tahun 2015 program SP3 diubah nomenklaturnya menjadi Program Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP). Jumlah SP3/PKKP dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan dari 40 orang menjadi 200 orang.

Peran pemuda juga didukung dengan adanya Program Pemuda Pelopor. Jumlah Pemuda Pelopor mengalami penurunan pada tahun 2014-2018 dari 12 orang di tahun 2014 menjadi 9 orang di tahun 2013. Hal tersebut dikarenakan berkurangnya bidang – bidang kepeloporan dengan masing-masing bidang mengirimkan 3 peserta. Upaya peningkatan peran serta aktif dan partisipasi pemuda dalam pembangunan lainnya yaitu melalui fasilitasi kader kewirausahaan sesuai dengan minat, bakat dan potensi pemuda serta potensi daerah. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam pembentukan kader kewirausahaan yaitu pelatihan, pembimbingan, pendampingan dan akses permodalan. Capaian jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan pada tahun 2014 sebanyak 560 orang melalui *sharing* penganggaran dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), dan terjadi peningkatan di tahun 2018 menjadi sebanyak 2.000 orang, yang disebabkan adanya penambahan pelatihan kewirausahaan bidang pariwisata. Kewirausahaan tersebut merupakan program unggulan yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dengan fokus pada pemuda miskin di daerah wilayah Zona Merah. Jumlah pemuda miskin sebanyak 1.500.000 pemuda (pendataan basis data terpadu) yang dilaksanakan pada tahun 2015, kemudian menurun pada tahun 2016 menjadi sebanyak 1.499.745 pemuda dan sebanyak 1.497.745

pemuda pada tahun 2017 hingga tahun 2018 berkurang menjadi sebanyak 1.495.745 pemuda. Pengurangan tersebut berasal dari jumlah pemuda miskin yang difasilitasi kewirausahaan.

Peranan kemitraan bersama *stakeholder* juga menjadi fokus, yang dapat dilihat bahwa ada peningkatan kemitraan dari tahun 2014-2018, dari 4 kemitraan menjadi 5 kemitraan. Kemitraan tersebut antara lain dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah, Palang Merah Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Purna Paskibra Indonesia Provinsi Jawa Tengah, dan Purna Sarjana Penggerak Pemuda di Perdesaan (PSP3) Provinsi Jawa Tengah. Kemitraan yang telah dilaksanakn tersebut diharapkan dapat juga berdampak pada meningkatnya persentase organisasi pemuda yang aktif di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2014, persentase organisasi pemuda yang aktif di Provinsi Jawa Tengah sebesar 56,45% dari 55 Organisasi yang terdaftar di Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Jawa Tengah meningkat hingga tahun 2018 menjadi sebesar 69,23% atau sebanyak 45 organisasi yang aktif dari 65 organisasi yang terdaftar di Komite Nasional Pemuda Indonesia Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.163.

Perkembangan Kepemudaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen dan perencanaan program	62	62	62	63	65
2	Jumlah Sarjana Penggerak Pemuda di Perdesaan (SP3)/ Pengembangan Kepedulian dan Kepeloporan Pemuda (PKKP)	40	50	60	60	200
3	Jumlah Pemuda Pelopor	12	9	9	9	9
4	Jumlah pemuda yang difasilitasi kader kewirausahaan	560	575	255	2.000	2.000
5	Jumlah pemuda miskin pengangguran	na	1.500.000	1.499.745	1.497.745	1.495.745
6	Jumlah kemitraan dengan <i>stakeholder</i>	3	4	5	5	5
7	Persentase organisasi pemuda yang aktif	56,45	64,52	64,52	65,07	69,23

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2019

Jumlah atlet berprestasi di tingkat nasional yang diraih oleh Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 tersebut berasal dari beberapa kejuaraan *multievent* baik di tingkat pelajar ataupun di tingkat prestasi seperti Pekan Olahraga Pelajar Nasional, Pekan *Paralympic* Pelajar Nasional, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional, Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren

Nasional yang dilaksanakan setiap 2 (dua) tahun sekali. Jumlah atlet yang berprestasi pada tahun 2014 sebanyak 24 atlet pada 8 cabang olahraga meningkat menjadi sebanyak 200 orang pada 20 cabang olahraga. Selain tingkat nasional tersebut, Provinsi Jawa Tengah juga selalu menjadi salah satu penyumbang atlet nasional pada kejuaraan tingkat internasional seperti ASIAN GAMES, ASIAN PARAGAMES, SEA GAMES, dan ASEAN PARAGAMES. Adapun untuk jumlah atlet yang berprestasi dari tahun 2014 – 2018 meningkat dari sebanyak 22 atlet di tahun 2014 menjadi 46 atlet di tahun 2018. Hasil di atas tentu tidak lepas dari pola pembibitan dan pembinaan yang telah dilakukan melalui Pusat Pendidikan Dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) meskipun masih perlu ditingkatkan karena selama tahun 2014 – 2018 hanya terjadi peningkatan sebesar 0,34% dengan data awal pada cakupan pembinaan atlet muda tahun 2014 sebesar 2,78% dan di tahun 2018 menjadi sebesar 3,12% atau sebesar 170 atlet dari 5.450 atlet peserta Pekan Olahraga Pelajar Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Dalam rangka meningkatkan persaingan prestasi di tingkat nasional dan internasional, juga dilakukan pendataan wasit dan pelatih bersertifikat pada tahun 2015 dan menghasilkan angka sebanyak 39 wasit bersertifikat tingkat provinsi hingga tahun 2018. Sedangkan pelatih bersertifikat tingkat provinsi pada tahun 2015 sebanyak 65 pelatih atau sebesar 2,63% dari seluruh pelatih di Provinsi Jawa Tengah yang berjumlah 2.466 orang, dan hingga tahun 2018 terus mengalami peningkatan menjadi 34,55%. Peningkatan tersebut dikarenakan ada upaya peningkatan kualitas SDM Pelatih tingkat muda sebanyak 300 orang pada tahun 2016 dan 2017. Sedangkan di tahun 2018 peningkatan SDM Pelatih dilaksanakan sebanyak 210 orang. Sehingga persentase cakupan pelatih yang bersertifikat selama tahun 2014 – 2018 sebesar 35,48% atau sebanyak 875 orang dari 2.466 orang pelatih yang terdaftar dalam *database* keolahragaan.

Jumlah gedung olahraga adalah jumlah gedung olahraga yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan status kepemilikan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten Kota, dan Swasta dengan ketentuan standar gedung olahraga tingkat nasional dan internasional pada tahun 2014 sebanyak 80 sarpras dan terus meningkat hingga tahun 2018 menjadi 84 sarpras. Provinsi Jawa Tengah juga terus berupaya membangun sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang berstandar nasional dan/atau internasional. Keinginan tersebut, dapat terlaksana pada tahun 2015 melalui pembangunan sarana prasarana di kawasan olahraga Jatidiri yang diawali pada tahun 2014 untuk penyusunan *master plan* kemudian disusul dengan *Detail Engineering Design* (DED) dan *Feasibility Study* (FS) pada Stadion Jatidiri dan GOR Jatidiri. Pembangunan tersebut dimulai pada tahun 2015 untuk 1 (satu) *venue* dari 16 (enam belas) *venue* yaitu Stadion Jatidiri atau sebesar 6,25% dan kemudian pada tahun 2016 menjadi dua *venue* dengan tambahan GOR Jatidiri atau sebesar 17,5%. Pada tahun 2017 persentase pembangunan sarpras kawasan olahraga Jatidiri menjadi 25% dengan adanya penambahan pada *venue* kolam renang dan asrama atlet, sehingga total pembangunan menjadi 4 (empat) *venue* dari 16 (enam belas) *venue*. Persentase pembangunan sarpras kawasan olahraga Jatidiri pada tahun 2018 meningkat menjadi 28,57% karena adanya

perubahan *venue* menjadi 14 *venue* dalam *review* dokumen masterplan kawasan olahraga Jatidiri.

Kemitraan dengan *stakeholder* juga terus tingkatkan, antara lain kerjasama melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dengan perguruan tinggi, kerjasama pembibitan dan pembinaan atlet muda maupun pola bapak asuh untuk cabang olahraga dengan BUMD, BUMN dan Swasta serta kerjasama dengan organisasi keolahragaan yang membantu dalam pembinaan cabang olahraga prestasi yaitu dengan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah, *National Paralympic Committee* Indonesia Provinsi Jawa Tengah, Federasi Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia, *Special Olympic* Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Kemitraan tersebut terlihat pada tahun 2014–2018 mengalami peningkatan yang semula 4 kemitraan menjadi 6 kemitraan.

Tabel 2.164.

Perkembangan Olahraga Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat nasional	24	174	395	193	200
2	Jumlah atlet yang berprestasi di tingkat internasional	22	43	39	46	46
3	Jumlah prestasi olahraga	8	18	33	20	20
4	Cakupan pembinaan atlet muda	2,78	3,14	3,56	3,37	3,12
5	Jumlah wasit yang bersertifikat	na	39	39	39	39
6	Cakupan pelatih yang bersertifikat	na	2,63	14,80	26,97	35,48
7	Jumlah gedung olahraga (GOR, Stadion, Lapangan Olahraga) yang berstandar	80	84	84	84	84
8	Persentase pembangunan sarpras kawasan olahraga jatidiri	NA	6,25	17,5	25	28,57
9	Jumlah kemitraan dengan <i>stakeholder</i>	4	5	6	6	6

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2019

14. Statistik

Mendasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada ayat 274, perencanaan pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan Daerah. Pengembangan statistik untuk menyediakan data/informasi yang *reliable, up to date*, dan relevan diperlukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah sebagai salah satu bahan analisis pengambilan kebijakan pembangunan yang tepat.

Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta keterpaduan antar sektor, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengembangkan program Satu Data Jawa Tengah melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan dan integrasi data statistik sektoral OPD dan Kabupaten/Kota dalam aplikasi *Single Data System* dan *Open Data* yang mudah di akses oleh masyarakat secara luas.

Penyusunan data dan informasi pembangunan Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS), OPD, instansi dan lembaga terkait di Tingkat Pusat dan Daerah. Selain data yang bersifat numerik, juga dilakukan koordinasi dan pengelolaan data yang bersifat spasial antara lain pengelolaan Jaringan Peta Daerah.

Capaian kinerja sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 yaitu tersedianya data statistik umum, dasar dan sektoral skala provinsi melalui penerbitan buku Jawa Tengah Dalam Angka, PDRB Provinsi dan Tinjauan PDRB Kabupaten/Kota, serta Tabel I-O pada Tahun 2018.

15. Persandian

Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah. Kegiatan lingkup persandian meliputi pembinaan peralatan sandi, sistem sandi, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian; pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan materiil persandian; penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian serta pemeliharaan sarana telekomunikasi di lingkungan SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Pelaksanaan bidang persandian dan keamanan informasi se-Jawa Tengah telah dilaksanakan sampai tahun 2018 ini. Sampai dengan tahun 2017 didukung oleh 294 personil dengan komposisi terdiri dari 1 orang ahli sandi tingkat III, 30 orang ahli sandi tingkat II, 26 orang ahli sandi tingkat I, 70 orang pembantu juru sandi, serta 149 orang personil non sandi. Selain itu peralatan sandi milik Lembaga Sandi Negara telah terdistribusi kepada seluruh OPD dan 3 unit kamar sandi SETDA Provinsi Jawa Tengah dengan sistem pinjam pakai. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tidak memproduksi sistem sandi sendiri melainkan menggunakan sistem sandi yang dibuat oleh Lembaga Sandi Negara. Penggunaan dan pemberlakuan sistem sandi mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Lembaga Sandi Negara.

16. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan keseluruhan gagasan, perilaku, dan karya cipta manusia yang dapat menuntun kehidupan manusia agar lebih bermartabat. Pembangunan kebudayaan tidak dapat dilepaskan dari pengaruh budaya baru di era globalisasi, namun demikian harus tetap berpijak pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, sehingga terwujud karya-karya seni budaya yang memiliki kepribadian. Disisi lain kesenian merupakan hasil karya yang mengacu pada nilai keindahan (estetika) dan mewujud dari proses pengendapan makna relasi antar manusia dan manusia dengan lingkungan hidupnya.

Kurun waktu 2013-2017 pembangunan kebudayaan di Jawa Tengah menunjukkan perkembangan sebagai berikut:1) jumlah kelompok kesenian dari 8.162 meningkat menjadi 21.040; 2) jumlah seniman dari 11.269 menurun menjadi 9.878; dan jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya meningkat dari 2 lokasi tahun 2013 menjadi 21 lokasi ditahun 2017.

Meskipun aktivitas seni budaya di Jawa Tengah mengalami peningkatan, namun demikian ke depan upaya untuk lebih memberdayakan nilai adiluhung budaya Jawa; mengembangkan ajaran Ki Hajar Dewantoro yaitu *Ing Ngarso Sung Tulodho, Ing Madyo Mangun Karso, Tut Wuri Handayani*; mendayagunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari, dan mengembangkan serta melestarikan kesenian Jawa perlu terus ditingkatkan.

Jumlah cagar budaya (candi, situs) dari tahun 2013-2014 mengalami peningkatan, namun pada tahun 2014-2017 jumlah tetap tercatat 228 cagar budaya. Adapun jumlah cagar budaya yang dilestarikan (candi, situs) mengalami peningkatan, namun pada tahun 2017 terjadi penurunan menjadi ada 5 lokasi yang dilestarikan. Perkembangan seni, budaya, dan permuseuman di Jawa Tengah sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.165.

Perkembangan Seni dan Budaya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya	8 kali	7 kali	8 kali	15 kali	23 kali
2	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	2 lokasi	8 lokasi	9 lokasi	11 lokasi	21 lokasi
3	Jumlah seniman	11.269	12.176	18.058	9.787	9.878
4	Jumlah kelompok kesenian	8.162	9.857	11.014	11.183	21.040
5	Jumlah cagar budaya (candi, situs)	199	228	228	228	228
6	Jml cagar budaya yang dilestarikan (candi, situs)	4 lokasi	8 lokasi	6 lokasi	6 lokasi	5 lokasi
7	Jumlah Museum	48	55	56	56	56
8	Jumlah Pengunjung Museum	1.201.642	1.800.275	2.249.445	2.298.445	1.600.000

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Organisasi penghayat dan upacara tradisional merupakan bagian tak terpisahkan dari kebudayaan. Jumlah penghayat dalam kurun waktu 2013-2017 fluktuatif mengalami perubahan. Sedangkan jumlah siswa SMA/SMALB/SMK penghayat, organisasi dan upacara tradisional cenderung tetap.

Tabel 2.166.

Jumlah Organisasi Penghayat dan Upacara Tradisionaldi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017

No	Komponen	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Penghayat (orang)	190.000	187.684	188.116	188.325	188.172
2	Siswa Penghayat	32	32	32	32	36
3	Organisasi (Unit)	58	58	58	68	68
4	Upacara Tradisional (buah)	190	190	190	191	190

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, 2018

17. Perpustakaan

Perkembangan perpustakaan di Jawa Tengah pada tahun 2014-2018 dapat ditunjukkan dengan beberapa indikator antara lain jumlah perpustakaan umum dan daerah di Jawa Tengah tidak mengalami perubahan, yaitu 1 unit perpustakaan umum dan 35 perpustakaan daerah di kabupaten/kota; jumlah perpustakaan desa sesuai dengan standar Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 sebanyak 851 unit; jumlah koleksi perpustakaan umum mengalami peningkatan dari 219.626 menjadi 294.244 eksemplar; jumlah pengunjung perpustakaan umum provinsi mengalami peningkatan dari 781.169 orang per tahun menjadi 3.041.019 orang per tahun. Capaian kinerja pada tahun 2014-2018 selengkapnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.167.

Perkembangan Perpustakaan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

No	Uraian Data	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Perpustakaan					
	a. Perpustakaan Desa	851	851	851	851	851
	b. Jumlah Perpustakaan Umum Provinsi	1	1	1	1	1
	c. Jumlah Perpustakaan Daerah Kab/Kota	35	35	35	35	35
	d. Jumlah Perpustakaan Keliling	80	80	85	91	143
	Catatan :					
	- Jumlah Perpustakaan Keliling Provinsi	9	10	9	9	11
2	Jumlah Koleksi Perpustakaan (Provinsi)	219.626	251.129	256.364	281.424	294.244
3	Jumlah Pengunjung Perpustakaan	781.169	956.082	1.035.290	3.117.285	3.041.019
	- Perpustakaan Umum & Perpus Keliling	781.169	286.825	300.234	656.064	781.323
	- Online (iJateng)	-	669.257	735.056	2.461.221	2.259.696
4	SDM Pustakawan (fungsi pelayanan)	28	29	32	36	41
	- Pustakawan yang sudah uji kompetensi	28	29	32	32	37
	- Pustakawan yang lulus sertifikasi	-	-	-	4	4

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Prov. Jateng, 2019

Perpustakaan Nasional RI sebagai rujukan seluruh perpustakaan di Indonesia mengembangkan standar nasional perpustakaan Provinsi sebagai acuan dalam melaksanakan layanan, pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional No 9 tahun 2017 tentang Standar Nasional Perpustakaan Provinsi digunakan sebagai dasar acuan penyelenggaraan perpustakaan umum di tingkat Provinsi.

Tabel 2.168.

Persandingan Kondisi Aktual Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 terhadap Standar Nasional Perpustakaan Provinsi

No	Standar Nasional Perpustakaan Perka 9/2017	Kondisi Aktual Perpustakaan Umum Provinsi Jateng	Analisis
1	<p>Koleksi Perpustakaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koleksi karya Tulis, karya cetak, karya rekam, koleksi <i>digital</i> - Koleksi per kapita Perpustakaan Tipe A paling sedikit 70.000 judul - Kemutakhiran koleksi : koleksi terbaru yang terbit 3 tahun terakhir paling sedikit 5% dari jumlah koleksi yang ada 	<p>Koleksi Perpustakaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koleksi karya Tulis, karya cetak, karya rekam, koleksi <i>digital</i> : tersedia - Koleksi per kapita Perpustakaan 142.335 judul - Kemutakhiran koleksi : 5% dari 294.244 eksemplar = 14.712. Perpustakaan Provinsi Jateng, pengadaan buku baru sejumlah 11.500 eksemplar (lebih dari 5%) 	Sesuai standar
2	<p>Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi/Lahan :strategis, mudah dijangkau - Gedung : permanen, ± 3.000 m², status kepemilikan Pemerintah Provinsi - Area parkir dan fasilitas umum - Ruang Perpustakaan : minimal memiliki area koleksi, baca dan pengelola; wajib memiliki sarana ruang penyimpanan koleksi, akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan - Sarana perpustakaan yang memadai (perabot kerja, penyimpanan, dan lainnya) 	<p>Sarana dan Prasarana</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lokasi/Lahan : berada di Jl Sriwijaya (dekat dengan pusat kota) - Gedung : permanen, 3.609 m², status kepemilikan Pemerintah Provinsi Jateng - Area parkir dan fasilitas umum berupa kantin - Ruang Perpustakaan : memiliki area koleksi, baca dan pengelola, sarana ruang penyimpanan koleksi, akses informasi, dan sarana pelayanan perpustakaan - Sarana perpustakaan yang memadai (perabot kerja, penyimpanan, dan lainnya) 	Sesuai standar
3	<p>Pelayanan Perpustakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jam pelayanan : minimal 8 jam per hari - Kunjungan Perpustakaan : jumlah kunjungan (termasuk layanan keliling dan <i>online</i>) paling sedikit 0,005 per kapita per tahun 	<p>Pelayanan Perpustakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jam pelayanan : 10 jam per hari - Kunjungan Perpustakaan : 0.091 per kapita per tahun 	Sesuai standar

No	Standar Nasional Perpustakaan Perka 9/2017	Kondisi Aktual Perpustakaan Umum Provinsi Jateng	Analisis
4	<p>Tenaga Perpustakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tenaga perpustakaan (staf) paling sedikit 1 orang per 250.000 penduduk provinsi - Jumlah tenaga berkualifikasi paling sedikit 1 orang per 750.000 penduduk provinsi - Pustakawan memiliki kualifikasi akademik Diploma II dalam bidang Perpustakaan 	<p>Tenaga Perpustakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tenaga perpustakaan (staf) 56 orang - Jumlah tenaga berkualifikasi 37 sudah uji kompetensi, dan 4 orang memiliki sertifikasi. - Pustakawan yang memiliki kualifikasi akademik hanya 7 orang (D-3 dan S1 bidang Perpustakaan) 	<p>Idealnya untuk tenaga Perpustakaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah tenaga perpus untuk layanan provinsi : 137 org, - Jumlah tenaga berkualifikasi untuk layanan provinsi 46 org, untuk layanan kota Semarang : 3 org. Sedangkan pustakawan yang memiliki kualifikasi akademik bidang perpustakaan di Dinas Arpus sebanyak 7 orang

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

18. Kearsipan

Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, salah satunya dengan membangun birokrasi yang baik, efisien, efektif produktif, transparan dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal tersebut tidak terlepas dari tata kelola kearsipan yang baik. Arsip mempunyai peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena arsip sebagai sumber informasi yang akurat dan alat bukti otentik serta bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja birokrasi sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.169.

Pengelolaan Arsip Secara Baku di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No	Tahun	Jumlah PD	Jumlah PD yang Mengelola Arsip Secara Baku
1	2014	59	59
2	2015	59	59
3	2016	59	59
4	2017	41	41
5	2018	41	41

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Tabel 2.170.
Perkembangan Pengolahan/Pelestarian Arsip di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014- 2018

No	Uraian Data	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Pengolahan dan Pelestarian Arsip					
	Jumlah Arsip yang masuk/akuisisi	10.000	88.256	39.431	33.324	49.923
	Jumlah Arsip yang diolah/lestarikan	6.384	14.456	6.394	12.138	20.434
2	SDM Kearsipan (Arsiparis)	21	23	22	23	26
3	Jumlah Pengunjung/pengguna arsip	3.708	4.293	5.782	5.538	4.373
4	Jumlah Arsip yang dialih media					
	a. Foto	2.750	3.500	6.500	7.000	5.000
	b. Kaset Rekaman Suara	100	100	125	150	50
	c. Video	25	40	50	50	50
	d. Teksstual	14.000	16.250	20.000	25.000	20.000
e. Kearsitekturan	250	500	500	750	450	
5	Pengembangan Kearsipan berbasis TI (aplikasi)	2	1	1	2	1

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Mendasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah telah mengolah arsip secara baku sesuai dengan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Namun demikian selama kurun waktu 5 tahun capaian pengolahan/pelestarian arsip mengalami penurunan, terutama jumlah pengunjung arsip dan jumlah arsip yang dialihmedia. Sumber daya manusia pengelola kearsipan tidak sebanding dengan jumlah arsip yang harus diolah/lestarikan. Mengingat pentingnya kearsipan sebagai bukti otentik kinerja pemerintah dan wahana pelestari serta sumber informasi maka sangat diperlukan sumberdaya manusia yang kompeten serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Pengelolaan kearsipan dimulai sejak penciptaan, penyusutan sampai dengan pelestarian dan dilakukan pada semua jenis arsip, yaitu arsip statis dan dinamis. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2012 Tentang Desain Pembinaan Kearsipan Pada Pemerintahan Daerah sebagai acuan didalam penyelenggaraan kearsipan. Pada tabel berikut disajikan data kondisi aktual Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan dengan Perka 22 Tahun 2012.

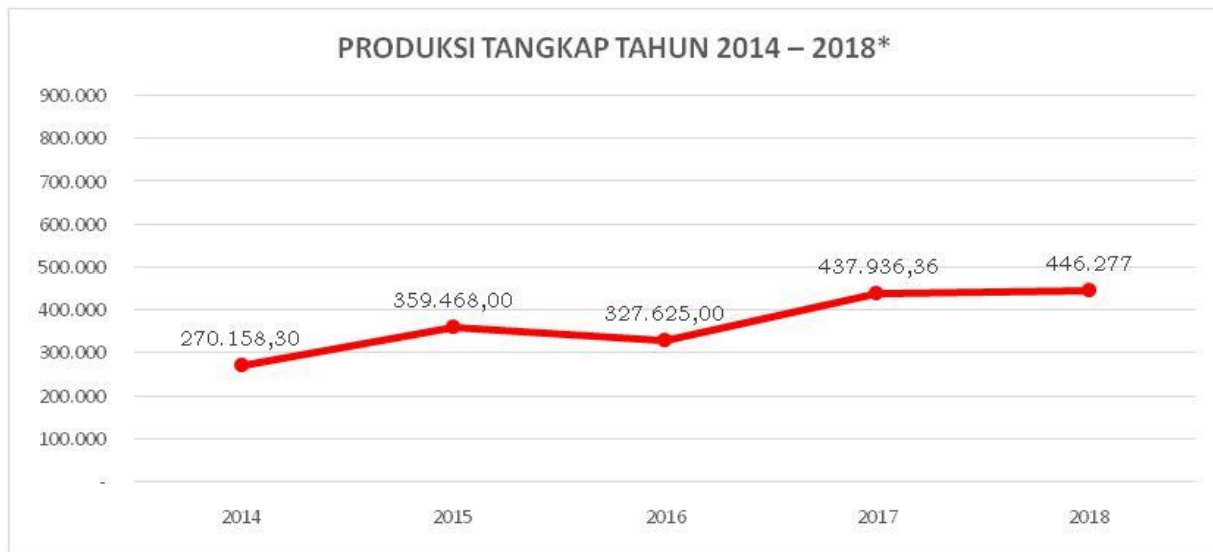
Tabel 2.171.**Persandingan Kondisi Aktual Kearsipan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Terhadap Peraturan Kepala ANRI Nomor 22 Tahun 2012**

No	Peraturan Kepala ANRI No. 22 Tahun 2012	Kondisi Aktual Kearsipan Provinsi Jateng	Analisis
1	BAB II Sub C. Point 3.e berbunyi LKD mengelola arsip statis secara optimal di daerahnya, sehingga menjadi pusat pelayanan informasi berdasarkan arsip yang disimpannya	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sudah menerapkan dengan pelayanan kearsipan yang terbuka untuk masyarakat umum	Sesuai aturan
2	BAB III Sub B. Point 1 berbunyi Pembinaan diharapkan dapat berjalan secara konsisten sesuai dengan peran dan tanggung jawab yang dimiliki oleh masing-masing LK. Guna meningkatkan efisiensi dan mendorong kemandirian Lembaga Pembina pada masing-masing tingkatan, pembinaan dilaksanakan secara berjenjang.	- Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sudah melaksanakan pengembangan, pembinaan dan pengawasan kearsipan	Sesuai aturan
3	BAB I Sub F Point 4.b berbunyi Tersedianya berkas arsip yang dapat diakses dengan aman, mudah, dan murah dengan informasi yang benar, akurat, dan tidak menyesatkan.	- Dari sejumlah 41 PD Provinsi Jawa Tengah yang aktif, jumlah PD yang mengirimkan arsipnya berjumlah 15 PD	Sesuai aturan
4	BAB I Sub F point 2.a berbunyi Pemenuhan kecukupan kebutuhan arsiparis secara kuantitatif dan kualitatif. Koordinasi untuk pengembangan arsiparis dilaksanakan lebih intensif dengan lembaga-lembaga terkait.	Jumlah arsip yang diakuisisi dalam kurun waktu 2014-2018 sebesar 220.934 berkas. Sementara kemampuan Arsiparis dalam mengolah arsip sebanyak 41.400 berkas per tahun. Jika dikali 5 tahun sebanyak 207.000 berkas. Jadi masih ada 13.934 arsip yang belum terolah, sementara tupoksi Arsiparis tidak hanya mengolah arsip tetapi juga pelayanan, pembinaan, alihmedia, dan sebagainya. Oleh karena itu perlu penambahan SDM tenaga fungsional arsiparis	Perlu penambahan SDM tenaga fungsional arsiparis minimal dari masing masing PD 2 arsiparis dengan asumsi 1 di Unit Kearsipan 1 di Unit Kerja PD.

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah, 2019

2.3.3 Urusan Pemerintahan Pilihan**1. Kelautan dan Perikanan**

Provinsi Jawa Tengah memiliki panjang garis pantai 791,73 km, dengan rincian pantai utara 502,69 km dan pantai selatan 289,04 km. Potensi perikanan laut cukup besar, yang tersebar di sebanyak 17 kabupaten/kota. Dalam kurun waktu lima tahun produksi perikanan tangkap meningkat dari sebesar 270.153,30 ton pada tahun 2014 menjadi sebesar 446.227,16 ton pada tahun 2018, meski mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu sebesar 327.625 ton.



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.91.
Produksi Perikanan Tangkap Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014-2018

Capaian produksi perikanan tangkap didukung dengan armada kapal perikanan. Pada tahun 2018, terdapat 24.954 unit kapal yang terdiri dari ukuran di bawah 5 GT sampai di atas 30 GT. Berdasarkan Keputusan Menteri Nomor 86 Tahun 2016 tentang Produktivitas Kapal Penangkap Ikan, produktivitas kapal perikanan tergantung pada ukuran *toonage* kapal, bahan kapal yang digunakan, kekuatan mesin kapal, jenis alat penangkapan ikan yang digunakan, jumlah *trip* operasional penangkapan per tahun, kemampuan tangkap rata-rata per *trip* dan wilayah penangkapan ikan.

Berdasarkan referensi dimaksud, maka penghitungan perkiraan kapasitas produksi perikanan tangkap tahun 2017 di Jawa Tengah sebesar 474.572 ton. Kapasitas produksi tersebut masih lebih tinggi dibanding dengan capaian produksi perikanan tangkap pada tahun 2017. Perbandingan angka produksi ideal dengan produksi perikanan tangkap menunjukkan bahwa produksi perikanan tangkap di Jawa Tengah masih belum optimal.

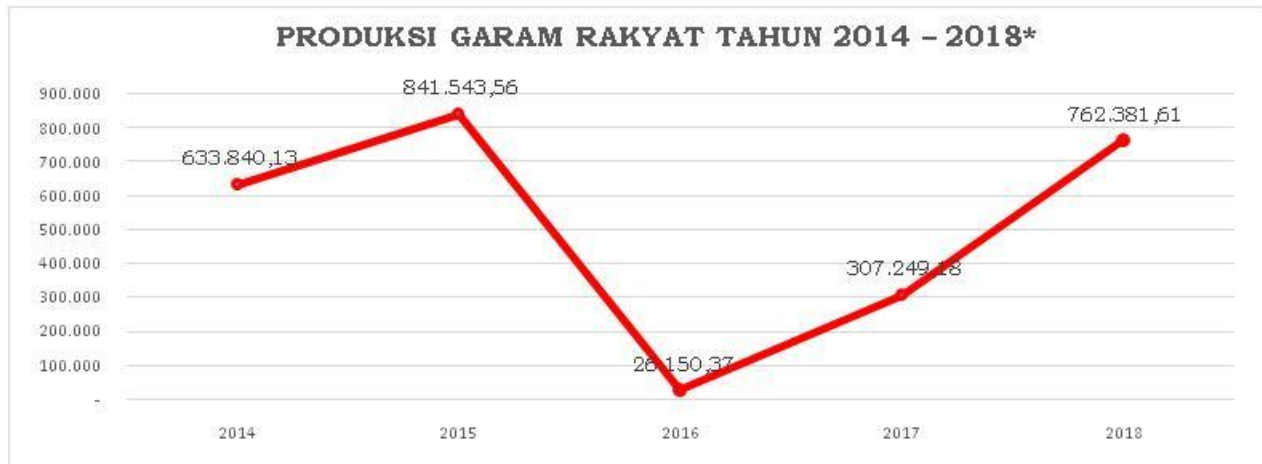
Tabel 2.172.
Jumlah Armada Perikanan Tangkap dan Kapasitas Produksi Ideal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

No	Ukuran (GT)	Jumlah Kapal	Kapasitas Produksi Ideal
1	< 5	16.823	63.086
2	05-10	4.696	61.048
3	10-30	2.595	136.238
4	> 30	840	214.200
	Jumlah	24.954	474.572

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi penghasil garam nasional dengan sentra produksi berada di Kabupaten Brebes, Demak, Jepara, Pati dan Rembang dengan total lahan seluas 6.608,78 Ha. Kontribusi produksi garam rakyat di Jawa Tengah terhadap produksi nasional cukup signifikan, yaitu sebesar 22,15 – 27,93% dan berada di urutan ke-2 setelah Jawa Timur

dari total 21 Provinsi penghasil garam. Pada tahun 2013 produksi garam sebesar 633.840 ton, namun mengalami fluktuasi dan turun tajam pada tahun 2016 dan 2017.



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.92.

Produksi Garam Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Produktivitas ideal garam rakyat nasional ditargetkan oleh Pemerintah Pusat sebesar 100 ton/Ha. Produktivitas garam rakyat Jawa Tengah pada kurun waktu tahun 2013-2017 mencapai puncaknya pada tahun 2015 yaitu sebesar 127,34 ton/ha, namun turun pada periode tahun lainnya dan titik terendah pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,96 ton/ha. Beberapa faktor yang mempengaruhi fluktuasi produksi garam yaitu antara lain masih rendahnya pemanfaatan sarana prasarana, musim, teknologi dan kelembagaan petani garam. Mendasarkan hal tersebut, maka potensi Jawa Tengah sebagai penghasil garam masih perlu ditingkatkan terutama dalam penerapan teknologi untuk adaptasi musim.

Tabel 2.173.

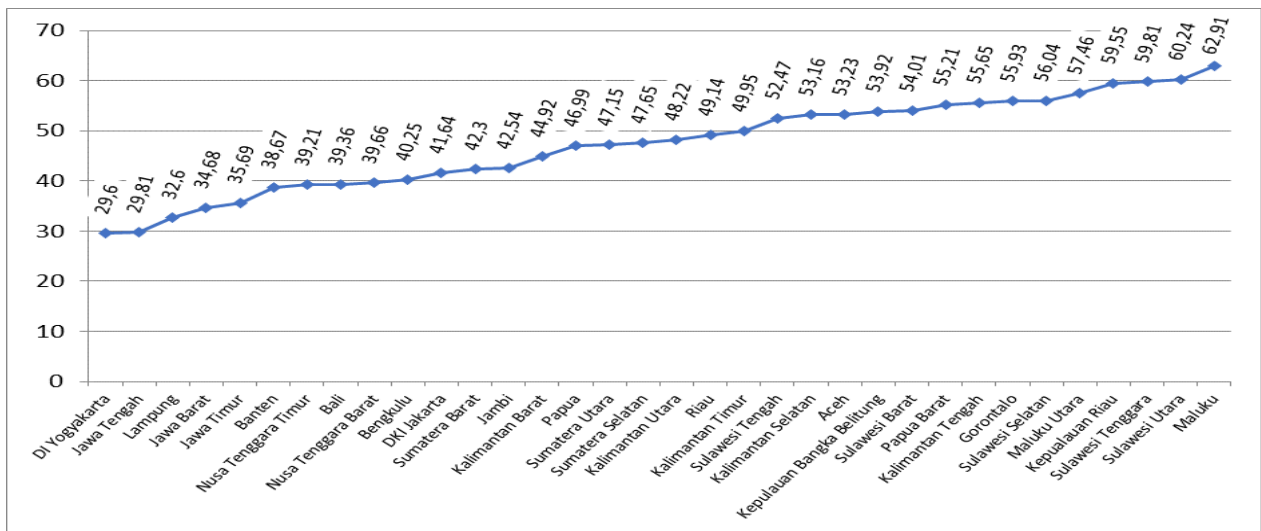
Produksi dan Produktivitas Garam Rakyat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

No	URAIAN	2014	2015	2016	2017	2018*)
1	Luas Lahan (ha)	6.608,78	6.608,78	6.608,78	6.608,78	6.713,72
2	Jumlah Petambak (orang)	15.445	15.445	15.445	15.445	14.061
3	Produksi (ton)	633.840,13	841.543,56	26.150,37	307.249,18	302.001,32
4	Produktivitas (ton/ha/musim)	95,91	127,34	3,96	46,49	44,98
5	Rata2 curah hujan (mm/tahun)	2.009,00	1.724,00	2.225,00	2.313,00	1.140,00
6	Rata2 bulan kemarau (bulan)	5	6-7	2-3	4-5	4

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Usaha perikanan tangkap oleh nelayan mempunyai resiko cukup tinggi. Pada kurun waktu tahun 2016 sampai dengan 2017, telah terjadi kecelakaan kerja dengan korban meninggal dunia sebanyak 189 kejadian. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan upaya penjaminan usaha penangkapan ikan.

Keragaman konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah juga dapat digambarkan dari tingkat konsumsi ikan. Pada tahun 2017 tingkat konsumsi ikan Jawa Tengah sebesar 29,81 kg/kapita/tahun, meningkat dibandingkan tahun 2014 sebesar 20,92 kg/kapita/tahun, namun masih dibawah angka nasional yaitu sebesar 47,34 kg/kapita/tahun. Perkembangan tingkat konsumsi ikan Jawa Tengah dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.93.
Tingkat Konsumsi Ikan Per Kapita Penduduk
Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017 (Kg/Kapita/Tahun)

Daya dukung ekosistem perairan terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap semakin menurun. Berdasarkan kajian kondisi pesisir dalam rangka penyusunan rencana zonasi, luas kawasan peruntukan kawasan konservasi seluas 134.935,114 Ha. Kerusakan wilayah pesisir ditunjukkan pada abrasi dan akresi. Pada kurun waktu tahun 2013 sampai dengan 2017, telah terjadi abrasi seluas 8.606,53 Ha dan akresi seluas 4.774,87 Ha. Berdasarkan tingkat kerusakan tersebut, diperlukan upaya rehabilitasi kerusakan pesisir baik secara vegetatif maupun sipil teknis.

Pada tahun 2015, produk hasil perikanan yang diolah oleh Unit Pengolah Ikan (UPI) di Jawa Tengah sebanyak 240.540 ton. Bila disandingkan dengan produksi perikanan tangkap dan budidaya pada tahun 2015 yaitu sebesar 780.489 ton, maka masih terdapat 539.949 ton produk perikanan yang belum diolah. Hal ini menunjukkan bahwa produk hasil perikanan yang diolah masih sebesar 30,81% dari total produksi. Pengolahan hasil perikanan perlu ditingkatkan untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

Tingkat kesejahteraan masyarakat pesisir dilihat dari jumlah kepala rumah tangga pada Basis Data Terpadu (BDT) tahun 2018. Jumlah KRT yang bekerja di sektor kelautan dan perikanan pada wilayah pesisir di 17 kabupaten/kota pesisir sebanyak 57.907 KRT. Jumlah KRT dimaksud merupakan sasaran intervensi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir khususnya sektor kelautan dan perikanan.

2. Pariwisata

Perkembangan kepariwisataan di Jawa Tengah dilihat dari jumlah daya tarik wisata mulai kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung meningkat. Jumlah daya tarik wisata pada tahun 2017 terdiri dari 201 DTW alam, 98 DTW Budaya, 152 DTW Buatan dan 26 DTW Minat Khusus, 182 Desa Wisata Berbasis *Eco Sosio Tourism*, serta 255 *Event* Pariwisata di kabupaten/kota. Perkembangan daya tarik wisata di Jawa Tengah, sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Tabel 2.174.

Jumlah Daya Tarik Wisata di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah DTW Alam	132	148	160	182	201
2	Jumlah DTW Budaya	88	85	82	110	98
3	Jumlah DTW Buatan	105	117	131	146	152
4	Jumlah DTW Minat Khusus	21	19	27	31	26
5	Jumlah Desa Wisata Berbasis Eco Sosio Tourism	125	126	126	147	182
6	Lain-Lain (Event di Kab./Kota)	71	98	77	82	255

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2018

Sebagai penerima manfaat langsung dengan adanya perkembangan kepariwisataan di Jawa Tengah adalah bertambahnya jumlah tenaga kerja pada usaha pariwisata yang pada tahun 2016 berjumlah 51.126 orang, pada tahun 2017 menjadi 57.739 orang. Dan jumlah pramuwisata yang semula berjumlah 745 orang (tahun 2016) menjadi 856 orang (tahun 2017), seperti pada tabel berikut.

Tabel 2.175.

Jumlah Tenaga Kerja Bidang Pariwisata dan Pramuwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Jumlah Tenaga Kerja di bidang pariwisata (orang)	30.486	39.781	50.414	51.126	57.739
2.	Jumlah Pramuwisata (orang)	380	445	524	745	856

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2018

Keberhasilan perkembangan beberapa indikator tersebut di atas juga berjalan seimbang dengan pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan yang semakin meningkat pada tahun 2013 - 2017. Tahun 2013 jumlah wisatawan nusantara sebanyak 29.430.609 orang naik menjadi 40.118.470 orang di tahun 2017, dan jumlah wisatawan mancanegara sebanyak 388.143 orang di tahun 2013 naik menjadi 781.107 orang pada tahun 2017. Demikian juga dengan rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara tahun 2017 naik menjadi 3.00 dan rata-rata pengeluaran belanja wisatawan nusantara menjadi

Rp. 1.315.000,- per kunjungan. Adapun rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara mengalami penurunan menjadi 1,46 hari pada tahun 2017 dan rata-rata pengeluaran wisatawan mancanegara pada tahun 2017 turun menjadi US dolar 801,3 per kunjungan. Perkembangan rata-rata lama tinggal menginap wisatawan dan pengeluaran belanja wisatawan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.176.

Rata-Rata Lama Tinggal Wisatawan dan Pengeluaran Belanja Wisatawan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara (org)	29.430.609	29.808.674	33.030.843	36.893.055	40.118.470
2	Jumlah kunjungan wisa-tawan manca-negara (org)	388.143	419.584	421.191	578.924	781.107
3	Rata-rata lama tinggal wisatawan mancanegara (hari)	2,34	2,33	2,41	2,82	3,00
4	Rata-rata lama tinggal wisatawan nusantara (hari)	2,05	2,00	2,01	1,89	1,46
5	Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan mancanegara (US dolar per hari)	296,85	507,5	685,27	1.028,00	801.3
6	Rata-rata pengeluaran belanja wisatawan nusantara (rupiah per hari)	514,70	1.237.178	1.289.243	1.123.500	1.315.774

Sumber: Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2018

Dalam rangka meningkatkan jumlah kunjungan wisata, lama tinggal wisatawan dan pengeluaran belanja wisatawan, promosi dan pemasaran pariwisata memiliki peran yang sangat penting. Beberapa aktivitas promosi yang dilakukan antara lain promosi melalui media cetak, penyelenggaraan *event* pariwisata dan partisipasi *event* pariwisata luar negeri. Pada tahun 2015, jumlah wisatawan yang datang ke daya tarik wisata di Jawa Tengah yaitu sebesar 33,452,034 orang atau naik 66.45% dari tahun 2011 sebesar 22,231,246 orang. Perkembangan kinerja promosi dan pemasaran wisata dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.177.**Jumlah Kunjungan Wisata Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 - 2015**

Tahun	Wisatawan Mancanegara (Orang)	Wisatawan Nusantara (Orang)	Total
2014	419.584	29.852.095	30.271.679
2015	421.191	33.030.843	33.452.034
2016	578.924	36.899.776	37.478.700
2017	781.107	40.118.470	40.899.577
2018	677.168	48.943.607	49.620.775

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2018

Dalam bidang pemberdayaan masyarakat dibidang kepariwisataan, di Jawa Tengah pada tahun 2013 memiliki 435 kelompok sadar wisata (pokdarwis), sedangkan tahun 2017 meningkat menjadi 448 pokdarwis seperti terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.178.**Jumlah Masyarakat dan Kelompok Sadar Wisata serta Kerjasama dengan Asosiasi/Lembaga Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017**

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah kelompok sadar wisata (kelompok)	435	336	608	645	448
2	Jumlah kerjasama dengan Asosiasi/ Lembaga Pariwisata (lembaga)	1	2	2	19	5

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah, 2018

Sumbangan di sektor pariwisata terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah ditunjukkan melalui beberapa indikator usaha pariwisata antara lain hotel, restoran, hiburan dan rekreasi. Dibandingkan tahun 2013, sumbangan dari sektor pariwisata di tahun 2017 terutama pada usaha hotel meningkat menjadi Rp. 4.129.349.600,-, untuk usaha restoran meningkat menjadi Rp. 24.296.454.400,-. Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.179.**Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap Total PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017**

No	Uraian	Tahun				
		2013	2014*)	2015*)	2016*)	2017**)
1	Jumlah Sektor Pariwisata	18.279.752,84	20.808.971,44	23.465.640,11	27.991.032	28.425.804
	- Hotel	1.898.282,67	2.154.096,05	3.559.870,5	5.349.817	4.129.349,6
	- Restoran	15.982.272,76	18.201.699,74	19.905.770,6	22.641.215	24.296.454,4
	- Hiburan dan Rekreasi	399.197,41	453.175,65	tidak menjadi komponen penghitungan oleh BPS	tidak menjadi komponen penghitungan oleh BPS	tidak menjadi komponen penghitungan oleh BPS
5	Sumbangan Sektor Pariwisata Terhadap PDRB (%)	3,28	3,34	3,02*)	3,02	3,18*

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2018

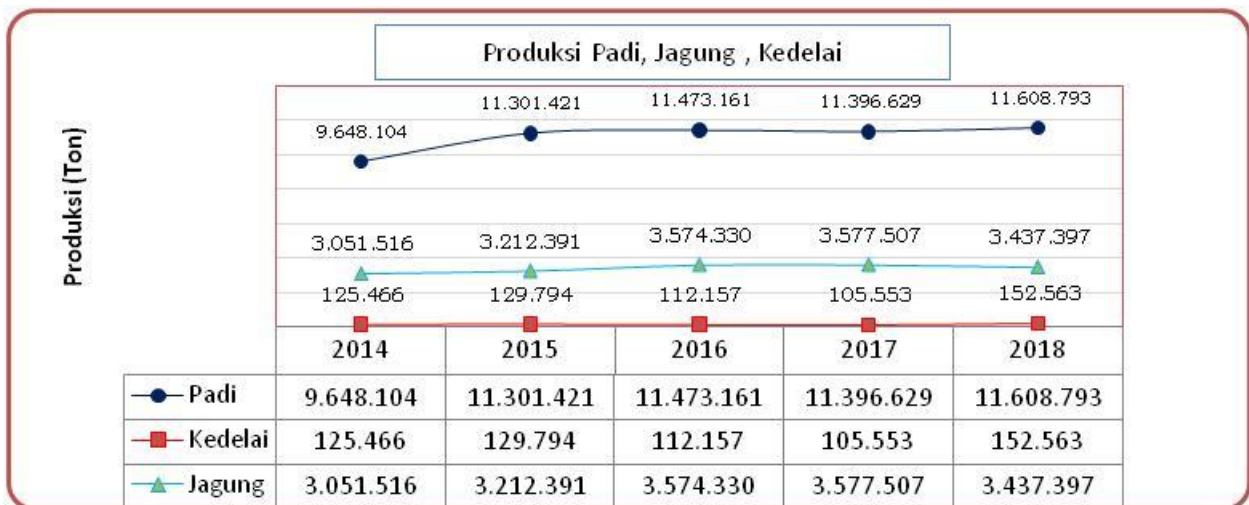
Keterangan : *) data sementara

***) Triwulan 3

3. Pertanian

Urusan pertanian mencakup sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan. Komoditas tanaman pangan utama di Jawa Tengah terdiri dari padi, jagung dan kedelai. Pada periode tahun 2014 sampai 2018, komoditas padi dan jagung meningkat, demikian juga untuk kedelai mengalami peningkatan.

Produksi padi pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan, yaitu sebesar 9,64 juta ton pada tahun 2014, dan meningkat pada tahun 2018 menjadi 11,6 juta ton, namun pada tahun 2014 sempat mengalami penurunan disebabkan gangguan bencana alam banjir dan kekeringan. Produksi jagung relatif meningkat yaitu tahun 2014 sebesar 3,05 juta, meningkat pada tahun 2018 menjadi sebesar 3,4 juta ton. Adapun untuk produksi kedelai relatif fluktuatif, mengalami peningkatan pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, namun turun pada tahun 2016 dan tahun 2017.

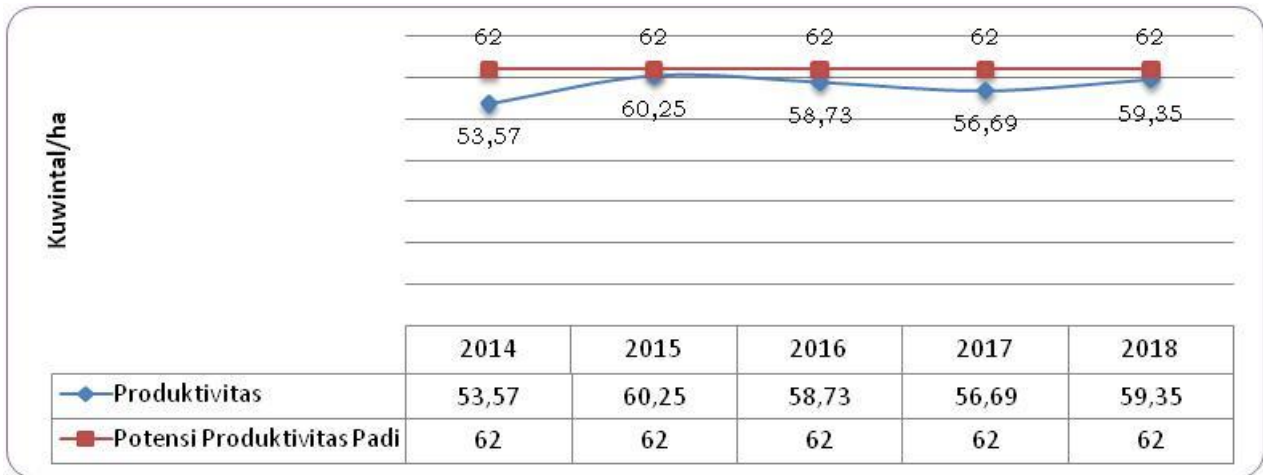


Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.94.
Produksi Tanaman Pangan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 (Ton)

Berdasarkan capaian produksi tanaman pangan tahun 2014-2018, dapat disimpulkan bahwa produksi kedelai belum optimal karena masih relatif mengalami fluktuatif.

Produktivitas padi pada kurun waktu tahun 2014-2018 relatif berfluktuatif, dengan tingkat produktivitas tertinggi pada tahun 2018 yaitu sebesar 59,35 kuintal/ha (angka perkiraan). Pada komoditas jagung produktivitas meningkat pada tahun 2014-2018, dari 56,71 kuintal/ha tahun 2014 menjadi 60,45 kuintal/ha tahun 2018. Namun demikian untuk komoditas kedelai mengalami fluktuatif pada kurun waktu tahun 2014-2018, dengan produktivitas tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 18,53 kuintal/ha.



Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.95.
Persandingan Potensi Produktivitas dengan Produktivitas Padi Tahun 2014-2018 (Kuintal/Ha)



Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.96.
Persandingan Potensi Produktivitas dengan Produktivitas Jagung Tahun 2014-2018 (Kuintal/Ha)

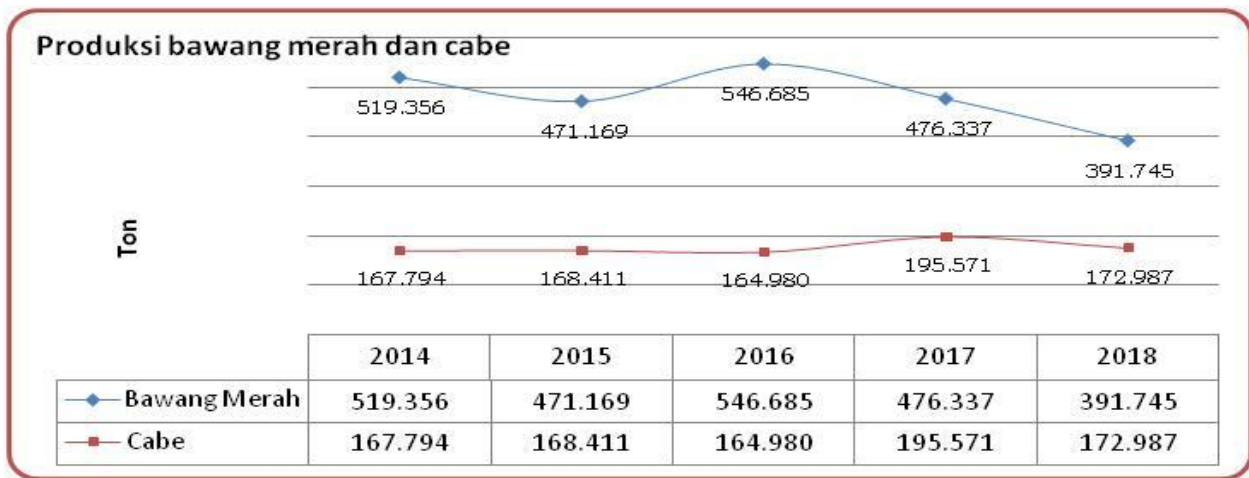


Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.97.
Persandingan Potensi Produktivitas dengan Produktivitas Kedelai Tahun 2014-2018 (Kuintal/Ha)

Pada budidaya tanaman pangan, terdapat potensi produktivitas untuk masing-masing varietas. Berdasarkan potensi dimaksud, dapat dihitung potensi rata-rata di Jawa Tengah untuk komoditas padi sebesar 62 kuintal/ha, jagung sebesar 63 kuintal/ha dan kedelai sebesar 22,5 kuintal/ha. Bila disandingkan antara potensi rata-rata produktivitas dengan capaian di Jawa Tengah, maka produktivitas pada komoditas tanaman pangan masih belum optimal.

Komoditas utama hortikultura di Jawa Tengah terdiri dari bawang merah dan cabai besar. Produksi bawang merah pada kurun waktu tahun 2014-2018 relatif berfluktuatif, dengan produksi tertinggi pada tahun 2016 yaitu sebesar 546,68 ribu ton. Produksi cabai besar pada kurun waktu tahun 2014-2018 relatif meningkat, meski mengalami penurunan pada tahun 2016 yaitu sebesar 164,98 ribu ton.

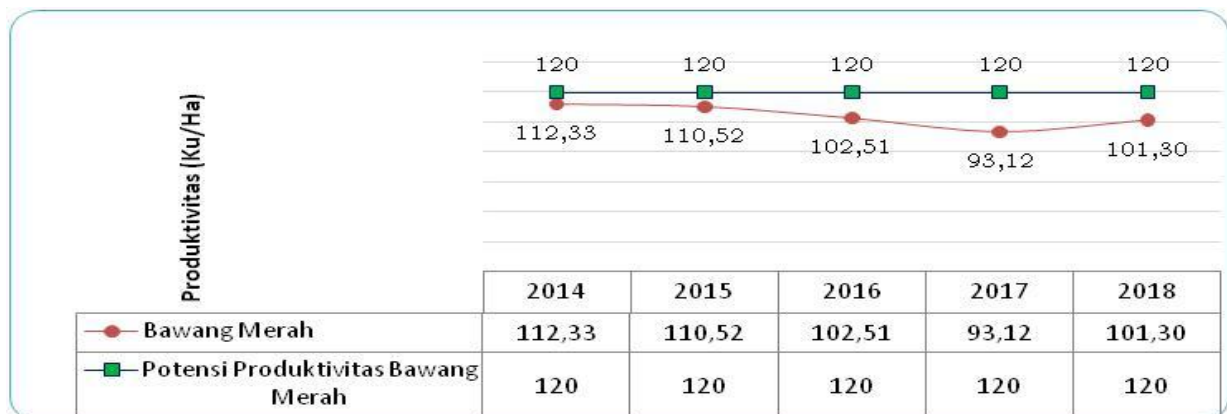


Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.98.

Produksi Tanaman Hortikultura Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 (Ton)

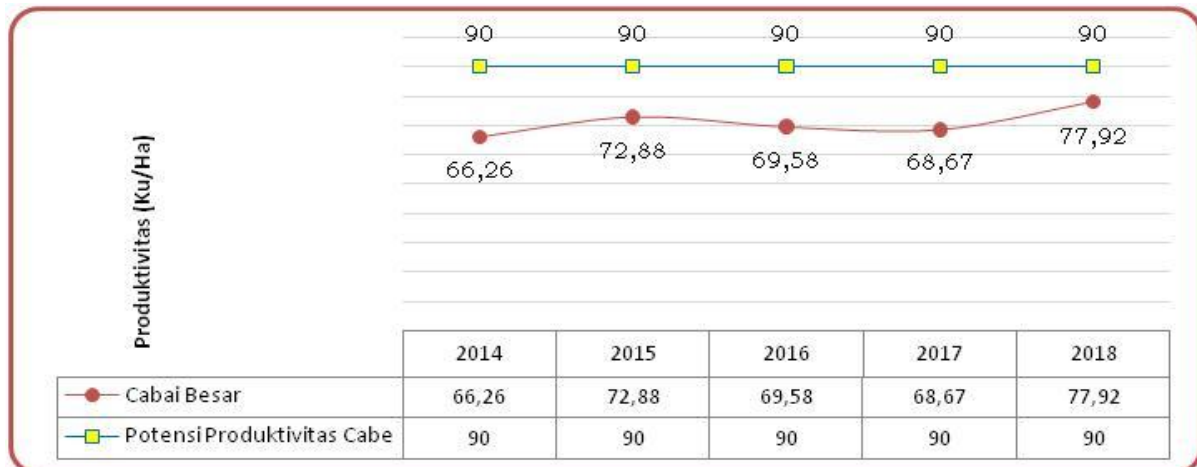
Adapun untuk produktivitas komoditas hortikultura pada kurun waktu tahun 2014-2018, pada komoditas bawang merah mengalami penurunan tetapi di tahun 2018 mengalami peningkatan, sedangkan komoditas cabai besar mengalami fluktuatif. Capaian produktivitas bawang merah dan cabai besar dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2019
Angka Tahun 2018 merupakan angka perkiraan

Gambar 2.99.

Persandingan Potensi Produktivitas dengan Produktivitas Bawang Merah Tahun 2014-2018 (Kuintal/Ha)

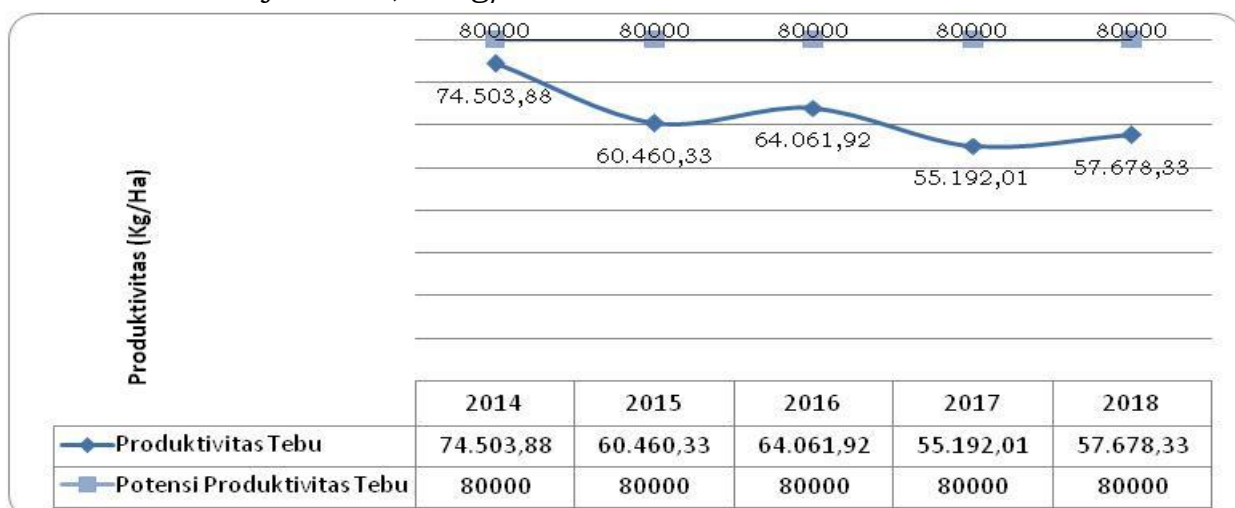


Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2019
 Angka Tahun 2018 merupakan angka perkiraan

Gambar 2.100.
Persandingan Potensi Produktivitas dengan Produktivitas Cabai Besar Tahun 2014-2018 (Kuintal/Ha)

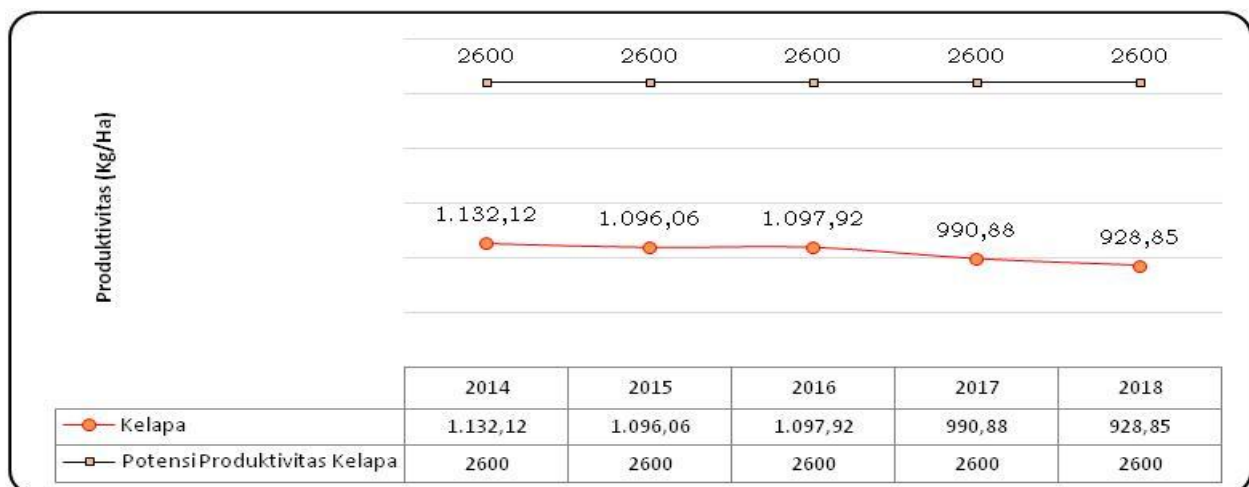
Pada komoditas hortikultura, potensi produktivitas rata-rata di Jawa Tengah untuk komoditas bawang merah sebesar 120 – 140 kuintal/ha dan cabai besar sebesar 90 – 95 kuintal/ha. Bila disandingkan antara potensi rata-rata produktivitas dengan capaian di Jawa Tengah, maka produktivitas pada komoditas tanaman pangan masih belum optimal.

Komoditas utama perkebunan di Jawa Tengah terdiri dari tebu, kopi dan kelapa. Produktivitas tebu pada kurun waktu tahun 2014-2018 relatif turun, dengan produktivitas tahun 2014 sebesar 74,503 ribu kg/ha menjadi sebesar 57,678 ribu kg/ha pada tahun 2018. Demikian juga produktivitas kelapa pada kurun waktu tahun 2014-2018 mengalami penurunan dari 1,132 ribu kg/ha di tahun 2014 menjadi 928,85 kg/ha. Produktivitas kopi juga mengalami penurunan pada periode tahun yang sama, dari 822,2 kg/ha di tahun 2014 menjadi 491,61 kg/ha di tahun 2018.



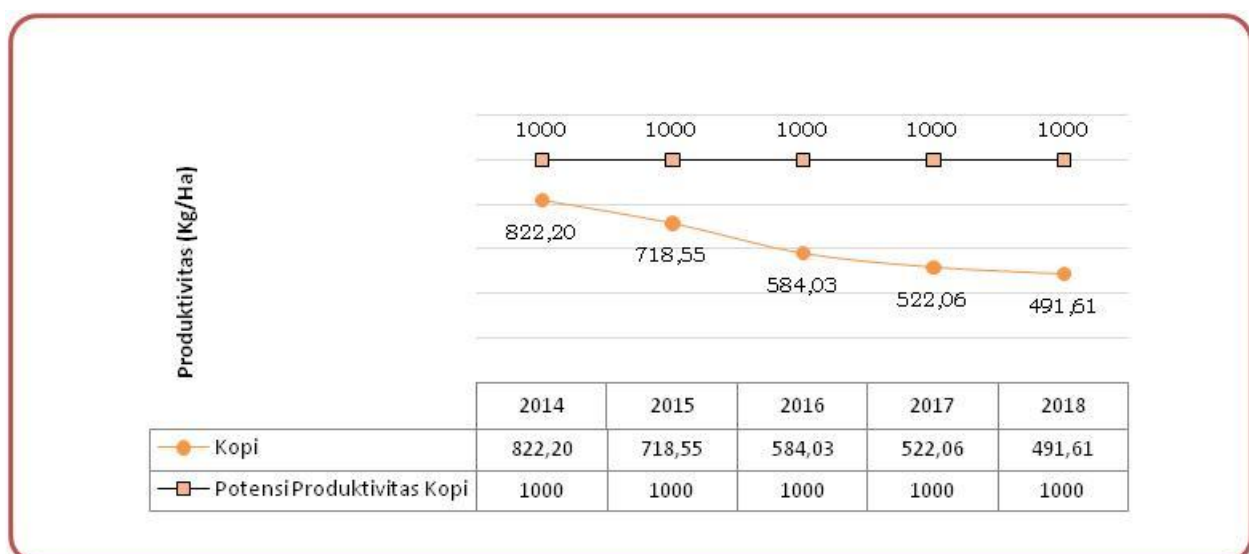
Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2019
 Angka Tahun 2018 merupakan angka perkiraan

Gambar 2.101.
Persandingan Potensi Produktivitas dengan Produktivitas Tebu Tahun 2014-2018 (Kg/Ha)



Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2019
 Angka Tahun 2018 merupakan angka perkiraan

Gambar 2.102.
Persandingan Potensi Produktivitas dengan Produktivitas Kelapa Tahun 2014-2018 (Kg/Ha)



Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2019
 Angka Tahun 2018 merupakan angka perkiraan

Gambar 2.103.
Persandingan Potensi Produktivitas dengan Produktivitas Kopi Tahun 2014-2018 (Kg/Ha)

Pada komoditas utama perkebunan, potensi produktivitas rata-rata di Jawa Tengah untuk tanaman tebu sebesar 800 kuintal/ha, kelapa sebesar 26 kuintal/ha, dan kopi 10 kuintal/ha. Bila disandingkan antara potensi rata-rata produktivitas dengan capaian di Jawa Tengah, maka produktivitas pada komoditas utama perkebunan masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan Survey Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) tahun 2016, jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian dalam kurun waktu 2010-2015 mengalami penurunan dari 5.616.529 orang menjadi 4.709.707 orang. Menurunnya jumlah tenaga kerja sektor pertanian perlu mendapat perhatian. Diperlukan upaya untuk menarik minat petani muda, salah satunya dengan menjadikan sektor pertanian mempunyai daya tawar dan memberikan jaminan usaha pertanian. Lebih lanjut bila usaha pertanian mempunyai jaminan usaha dan menarik bagi usia muda, maka dapat meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB.

Kegagalan usaha pertanian dapat terjadi akibat serangan hama, bencana alam banjir dan kekeringan. Pada komoditas padi, gangguan akibat OPT tahun 2013 sampai tahun 2017 mengalami fluktuatif, dan mengalami frekuensi tinggi pada tahun 2013, 2014 dan 2017. Komoditas jagung dan kedelai relatif tidak banyak mengalami gangguan akibat OPT.

Tabel 2.180.

Luas lahan Pusor Akibat Serangan OPT Tahun 2013-2017 (Ha)

Komoditas	Luas Pusor (Ha)				
	2013	2014	2015	2016	2017
Padi	2.741	2.512	51	272	2.421
Jagung	117	1	5	5	14
Kedelai	-	2	-	17	92

Sumber : Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gangguan terhadap usaha tani juga diakibatkan dari bencana alam banjir dan kekeringan. Pada komoditas padi, gangguan banjir tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebanyak 33.781 kejadian, dan kekeringan tertinggi pada tahun 2015 yaitu sebesar 18.410 kejadian. Gangguan usaha tani akibat OPT dan bencana mengakibatkan usaha tani tidak mendapatkan jaminan. Diperlukan upaya untuk memberikan kepastian dan jaminan petani dalam berusaha.

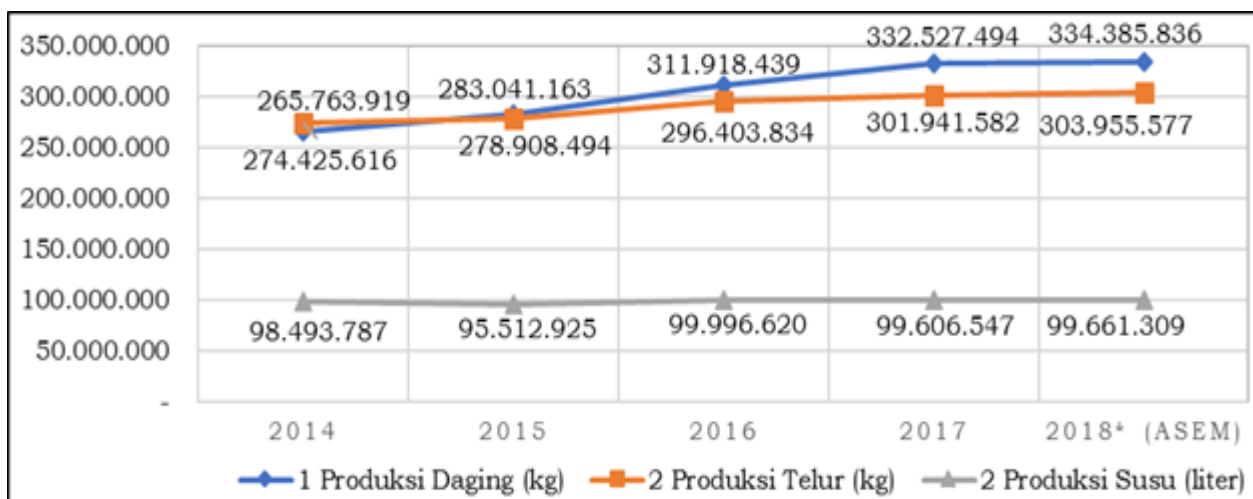
Tabel 2.181.

Luas lahan Pusor Akibat Banjir dan Kekeringan Tahun 2013-2017 (Ha)

Komoditas	Luas Pusor (Ha)									
	2013		2014		2015		2016		2017	
	Banjir	Kekeringan	Banjir	Kekeringan	Banjir	Kekeringan	Banjir	Kekeringan	Banjir	Kekeringan
Padi	13310	1357	33781	2913	1718	18410	8046	3027	6646	98
Jagung	107	1	335	4	82	324	5686	5	237	0
Kedelai	2	0	322	9	0	0	2917	0	64	0

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Produksi hasil peternakan di Jawa Tengah tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2014. Produksi daging meningkat dari sebesar 265.763.919 ton pada tahun 2014, menjadi sebesar 334.385.836 ton pada tahun 2018. Produksi telur juga mengalami peningkatan dari sebesar 274.425.616 ton pada tahun 2014, meningkat menjadi sebesar 303.955.577 ton pada tahun 2018. Pada komoditas susu, relatif mengalami peningkatan pada kurun waktu tahun 2014-2018, dari 98.493.787 liter di tahun 2014 menjadi 99.661.309 liter ditahun 2018. Capaian produksi komoditas peternakan dapat dilihat pada gambar berikut.

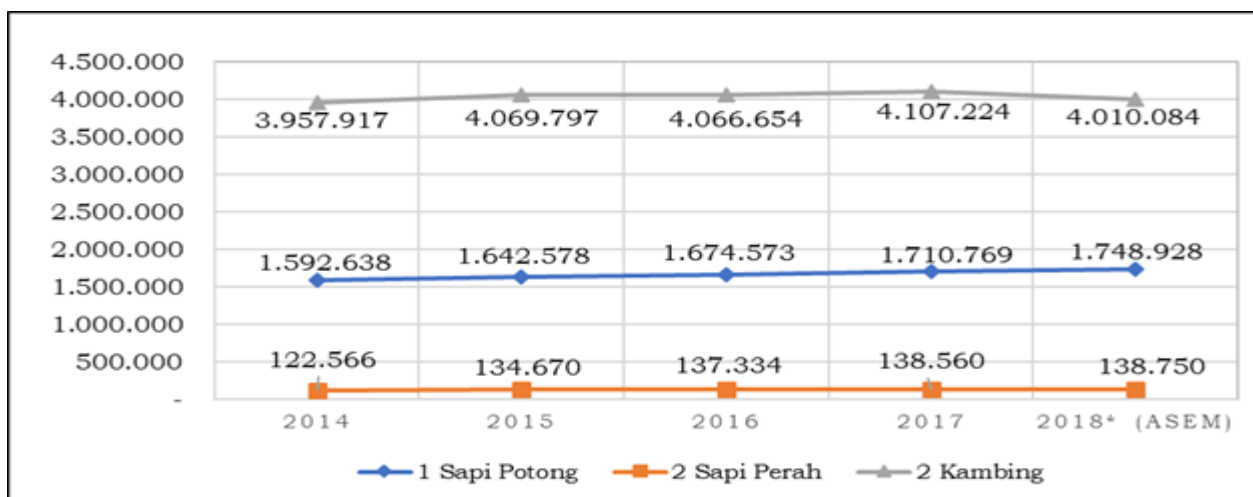


Sumber: Dinas Peternakan dan Keswan Prov. Jateng, 2019

Gambar 2.104.

Produksi Hasil Peternakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

Perkembangan populasi ternak sapi potong, sapi perah dan kambing pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2018 juga relatif mengalami peningkatan, meskipun tidak besar peningkatannya dari tahun ke tahun.



Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Keterangan: *) ASEM

Gambar 2.105.

Populasi Ternak di Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 (Ekor)

Di sisi lain, optimalisasi produksi dan populasi dapat dilihat dari daya tampung ternak (*carrying capacity*) di Jawa Tengah. *Carrying capacity* ternak dapat dilihat dari ketersediaan pakan dan daya tampung ternak. Populasi ternak di Jawa Tengah masih potensial untuk dikembangkan mengingat pemanfaatan daya tampung dan ketersediaan pakan baru dimanfaatkan pada angka 52 – 67%. Kondisi *carrying capacity* pada satuan ternak di Jawa Tengah dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.182.
Kondisi Carrying Capacity Pada Satuan Ternak di Jawa Tengah Tahun 2014-2018

Tahun	Populasi ternak (satuan ternak)	Carrying Capacity	% pemanfaatan Pemanfaatan daya tampung dan ketersediaan pakan ternak
2014	2.914.000	5.104.630	57
2015	3.036.258	5.326.626	57
2016	3.288.264	5.063.976	65
2017	3.330.188	4.985.664	67
2018	3.724.566	4.619.512	81

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Skala usaha peternakan di Jawa Tengah masih relatif kecil sehingga kurang ekonomis karena tidak efisien dan efektif dari aspek curahan waktu kerja. Pada ternak ruminansia, yaitu pada komoditas sapi potong, sapi perah dan kambing, secara umum skala usaha peternakan di Jawa Tengah masih belum memenuhi standar usaha ekonomis. Oleh karena itu agar lebih ekonomis, maka perlu penambahan kepemilikan jumlah ternak.

Tabel 2.183.
Skala Usaha di Tingkat Peternak

No	Komoditas	Skala Usaha Ekonomis (BEP)	Skala Kepemilikan (ekor)				
			2014	2015	2016	2017	2018
1	Sapi Potong	10	2	2	2	2	2
2	Sapi Perah	10	2	5	3	3	3
3	Kambing	50	5	5	5	5	5
4	Domba	50	52	5	5	5	5
5	Ayam buras	100	8	9	9	9	9
6	Ayam Layer	1000	6.702	8.856	5.847	7.454	7.069
7	Ayam Broiler	50	11.795	16.048	22.965	19.692	20.376
8	Itik	100	48	43	43	44	49

Sumber : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, 2019

4. Kehutanan

Kondisi kehutanan dapat dilihat dari daya dukung fungsi lindung dan indek kualitas tutupan lahan. Untuk daya dukung fungsi lindung ditinjau dari luas guna lahan yang memiliki fungsi lindung, koefisien lindung untuk guna lahan dan luasan wilayah. Dalam penghitungan daya dukung fungsi lindung seluruh penggunaan lahan memiliki fungsi lindung tetapi dengan koefisien yang berbeda-beda. Tutupan lahan hutan dan badan air memiliki fungsi lindung yang tinggi dibandingkan dengan tutupan lahan bangunan atau terbuka. Berikut perhitungan luas lahan yang dengan fungsi lindung tiap tutupan lahan di Jawa Tengah.

Tabel 2.184.**Perhitungan Luas Guna Lahan Fungsi Lindung Provinsi Jawa Tengah 2016**

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Koefisien Lindung	Luas Lahan/Lgl (Ha)
1	Cagar Alam	2.770,03	1,00	2.770,03
2	Danau	16.731,58	0,98	16.396,94
3	Hutan Lindung	84.430	1,00	83.586,77
4	Hutan Produksi Terbatas	183.930	0,68	124.077,63
5	Hutan Produksi Tetap	362.360	0,68	244.577,03
6	Industri	10.546,57	0,18	1.898,38
7	Kebun	647.343,99	0,21	135.942,24
8	Lahan Terbuka	5.184,23	0,01	51,84
9	Mangrove	2.894,14	1,00	2.894,14
10	Pasir Darat	178,62	0,01	1,79
11	Permukiman	560.312,00	0,18	100.856,16
12	Sawah Irigasi	307.943,47	0,46	141.654,00
13	Sawah Tadah Hujan	873.438,57	0,46	401.781,74
14	Semak	30.975,38	0,28	8.673,11
15	Suaka Margasatwa	102,48	1,00	102,48
16	Sungai	25.608,98	0,98	25.096,80
17	Taman Hutan Raya	249,66	1,00	249,66
18	Taman Nasional	11.681,50	1,00	11.681,50
19	Taman Nasional Laut	183,63	1,00	183,63
20	Taman Wisata Alam	216,39	1,00	216,39
21	Tambak	55.017,77	0,98	53.917,41
22	Tegalan	260.635,01	0,21	54.733,35
	TOTAL	3.437.739,98		1.411.343,03

Sumber: Analisis, 2017; $DDL\ Lindung\ 2016 = 1.411.343,03 / 3.437.739,98 = 0,41$

Pada tahun 2017 hutan negara di Jawa Tengah seluas 651.214,02 ha dan hutan rakyat seluas 597.890 ha, sehingga luas lahan yang berfungsi sebagai kawasan hutan seluas 1.249.104,02 ha. Pada tahun 2014 melalui Keputusan Nomor 522/22, Gubernur Jawa Tengah telah menetapkan data dan peta lahan kritis Provinsi Jawa Tengah. Sesuai keputusan tersebut, luas lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah sebesar 634.601 ha terdiri dari 469.664 ha di luar kawasan dan 164.937 ha di dalam kawasan. Dalam rangka pemulihan lahan kritis tersebut, pada tahun 2017 telah dilakukan peningkatan tutupan lahan di lahan kritis dan sangat kritis melalui penanaman dan pembuatan bangunan sipil teknis pada luasan 181.441 Ha di luar kawasan. Perkembangan upaya penanganan lahan kritis tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.185.
Kondisi Hutan (dalam dan luar kawasan) Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 - 2017

No.	Luas (Ha)	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Luas hutan	1.394.006	1.289.104,54	1.289.104,54	1.289.104,54	1.249.104,02*)
2	Luas lahan kritis	634.601	634.601	634.601	634.601	634.601
3	Lahan yang direhabilitasi	107.095	68.854	109.189	146.108	181.441
4	% Lahan yang direhabilitasi	16,88	10,85*)	17,21	23,02	28,59

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2018

* Penghitungan persentase lahan yang direhabilitasi tahun 2014 berdasarkan penghitungan review lahan kritis tahun 2013

Kerusakan di kawasan hutan antara lain disebabkan oleh terjadinya pencurian pohon dan kebakaran hutan. Pada tahun 2017, pencurian pohon di kawasan hutan seluas 29,82 ha yang mengalami penurunan dibanding dengan tahun 2016 seluas 31,38 ha. Sementara itu, luas kebakaran hutan pada tahun 2017 sebesar 1.320,96 ha, mengalami kenaikan dibanding dengan tahun 2016 sebesar 116,20 ha. Gambaran tentang kerusakan hutan di Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat dalam Tabel berikut.

Tabel 2.186.
Kerusakan Kawasan Hutan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Tahun (Ha)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1.	Luas pencurian pohon	28	30,74	4,49	31,38	29,82
2.	Luas Kebakaran hutan	1.215,31	1.196,68	6.136	116,20	1.320,96
	Total Luas Kerusakan hutan	1.243,31	1.227,42	6.140,49	147,58	1.350,78

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2018

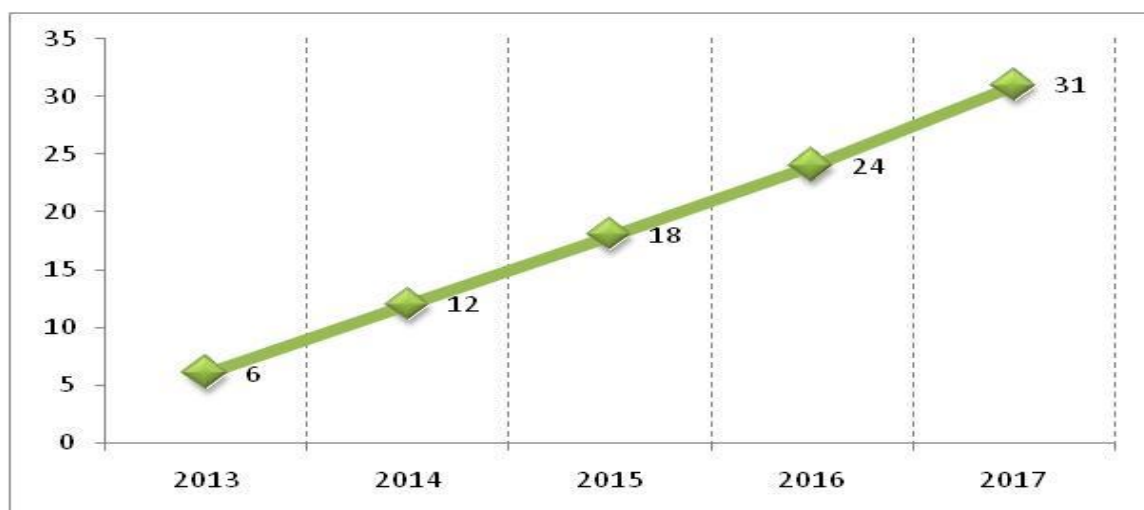
Terkait pemanfaatan hasil hutan, jumlah industri pengolahan hasil hutan kayu menunjukkan kecenderungan meningkat. Arah pengembangan selanjutnya adalah membentuk industri pengolahan hasil hutan kayu yang mempunyai Sertifikat Verifikasi Legal Kayu (SVLK). Gambaran mengenai produksi hasil hutan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.187.
Produksi Hasil Hutan Asal Hutan Rakyat dan Hutan Negara Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 – 2016

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2012	2013	2014	2015	2016
1	Produksi Hasil Hutan Asal Hutan Rakyat	m ³	1.391.812,986	582.548,810	1.664.718,440	2.123.742,400	2.687.298,843
2	Produksi Hasil Hutan Asal Hutan Negara	m ³	301.215,0	291.944,0	289.205,0	319.831,0	255.717,9
	Total Produksi Hasil Hutan	m ³	1.693.027,99	874.492,81	1.953.923,44	2.443.573,40	2.943.016,74

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Perkembangan sertifikasi hutan rakyat di Jawa Tengah yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola sektor kehutanan serta memastikan bahwa kayu dan produk kayu yang di ekspor ke luar negeri diproduksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun jumlah sertifikasi hutan rakyat di Jawa Tengah selama tahun 2013-2017 dapat dilihat dalam tabel berikut.



Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.106.
Perkembangan Sertifikasi Hutan Rakyat di Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017

Jumlah sertifikasi hutan rakyat sampai dengan tahun 2017 sebanyak 31 unit. Adapun sertifikasi industri primer yang mengolah kayu sebanyak 536 unit dari 643 unit. Besarnya kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB tahun 2013 sebesar 0,53% menurun menjadi 0,43% pada tahun 2017. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.188.
Kontribusi Sektor Kehutanan Terhadap PDRB Jawa Tengah
Tahun 2013 – 2017

No	Kontribusi Terhadap PDRB	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Nilai Sektor Kehutanan (juta rupiah)	4.093.448,74	4.073.354,75	3.997.568,24	3.823.956,28	3.830.296,81
2	Nilai Total PDRB (juta rupiah)	726.655.118,06	764.959.150,65	806.765.092,17	849.313.199,72	894.050.472,53
3	Kontribusi (%)	0,56	0,53	0,50	0,45	0,43

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Sistem ketenagalistrikan di Jawa Tengah merupakan bagian dari satu kesatuan sistem di Pulau Jawa, Pulau Madura, dan Pulau Bali yang terhubung secara interkoneksi dengan Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 KV dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV. Dengan sistem interkoneksi Jawa–Madura–Bali (JAMALI) ini, kebutuhan energi di Jawa Tengah tidak hanya dipenuhi dari pembangkit yang ada di Jawa Tengah, akan tetapi juga dipasok dari pembangkit yang ada di Jawa Barat maupun Jawa Timur.

Sampai dengan Bulan Oktober 2017 jumlah total produksi sebesar 25.020 GWh dengan distribusi sebesar 22.168 GWh, sehingga terdapat surplus energi listrik. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan dalam rangka memenuhi kebutuhan listrik bagi industri serta peningkatan rasio elektrifikasi, masih diperlukan pembangunan pembangkit baru. Diproyeksikan hingga tahun 2021 terdapat 4 (empat) pembangkit yang akan beroperasi/*Commercial Operation Date* (COD), yaitu PLTU Batang (2x1000 MW), PLTU Karangandri Cilacap (1x1000 MW), PLTU Tanjung Jati B Unit 5 dan 6 (2x1000 MW), dan PLTU Tambak Lorok (700 MW).

Tabel 2.189.
Produksi dan Distribusi Pembangkit di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2012 – 2017 (kWh)

No	Pembangkit	Jenis	TAHUN (KWh)					
			2012	2013	2014	2015	2016	Okt 2017
1	PLTA Tulis	1. Produksi Listrik	12.449.489	12.875.235	2.485.417	4.140.326	17.306.484	14.562.968
		2. Distribusi Listrik	10.968.000	11.355.957	2.194.623	3.660.048	15.316.238	12.902.790
2	PLTM Siteki & Plumbungan	1. Produksi Listrik	13.527.590	13.864.244	10.014.230	7.244.447	8.505.959	8.640.167
		2. Distribusi Listrik	11.917.807	12.228.263	8.842.565	6.404.091	7.527.774	7.655.188
3	PLTD Karimunjawa	1. Produksi Listrik	-	-	-	-	-	3.296.840
		2. Distribusi Listrik	-	-	-	-	-	2.921.000
4	PLTMH*	1. Produksi Listrik	2.316.156	7.246.825	8.492.477	9.739.836	39.149.801	46.265.357

No	Pembangkit	Jenis	TAHUN (KWh)					
			2012	2013	2014	2015	2016	Okt 2017
		2. Distribusi Listrik	2.040.533	6.391.700	7.498.857	8.610.015	34.647.574	40.991.106
5	Sistem Jamali	1. Produksi Listrik	22.606.806.369	24.646.444.259	26.511.583.245	27.550.289.795	29.251.415.167	24.877.161.147
		2. Distribusi Listrik	19.916.596.411	21.738.163.836	23.409.728.005	24.354.456.179	25.887.502.423	22.041.164.776
6	Embedeed Generator	1. Produksi Listrik	66.669.696	73.206.100	71.557.344	82.685.662	96.675.795	70.345.615
		2. Distribusi Listrik	58.736.002	64.567.780	63.185.135	73.094.125	85.558.079	62.326.215
	TOTAL	1. Produksi Listrik	22.701.769.300	24.753.636.662	26.604.132.712	27.654.100.066	29.413.053.207	25.020.272.094
		2. Distribusi Listrik	20.000.258.753	21.832.707.536	23.491.449.185	24.446.224.458	26.030.552.088	22.167.961.075

Sumber : PT PLN (Persero) UPB Jawa Tengah dan DIY 2017

Keterangan :

Nama PLTMH : PLTMH Wangan Aji, Rakit, Sigebang, Singgi, Kincang, Adipasir 3, Merden, Timbangreja, Lebakbarang, Banyumlayu, Kalipelus, Logawa Baseh, Semawung, Danarwarih

Rasio elektrifikasi Jawa Tengah hingga tahun 2018 sebesar 98,52% sehingga masih terdapat 1,48% KK belum berlistrik, yang sebagian besar merupakan rumah tangga miskin. Perkembangan rasio elektrifikasi selama tahun 2013-2017 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.190.

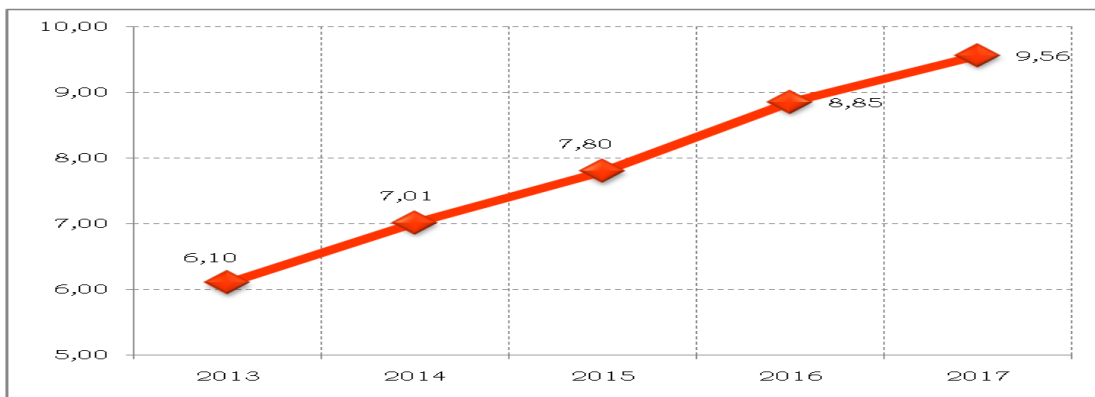
Rasio Elektrifikasi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Sampai Dengan Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Elektrifikasi (%)	85,29	88,37	91,10	93,51	96,30
2.	Sambungan Listrik Murah	-	100	1.100	2.175	8.338

Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2018

Pemenuhan kebutuhan energi Jawa Tengah masih didominasi oleh penggunaan energi fosil yaitu sebesar 90,44% pada tahun 2017 yang berdampak pada tingginya emisi gas rumah kaca Jawa Tengah. Untuk itu diperlukan upaya penggunaan energi yang ramah lingkungan yaitu energi baru terbarukan (EBT). Provinsi Jawa Tengah memiliki potensi EBT yang cukup banyak antara lain energi surya, air, biogas, *waste to energy (biomassa)*, gas rawa dan panas bumi. Pengembangan potensi panas bumi menjadi prioritas karena diharapkan akan menambah pasokan energi listrik di Jawa Tengah. Selain penggunaan EBT, upaya untuk penurunan emisi gas rumah kaca antara lain melalui pelaksanaan Lomba Hemat Energi dan Air, dan Audit Energi. Khusus untuk kegiatan Audit Energi, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi agar pelaksanaannya sesuai dengan harapan yang diinginkan yaitu

penghematan energi di gedung pemerintahan. Perkembangan persentase EBT dalam bauran energi selama tahun 2013-2017 sebagai berikut.

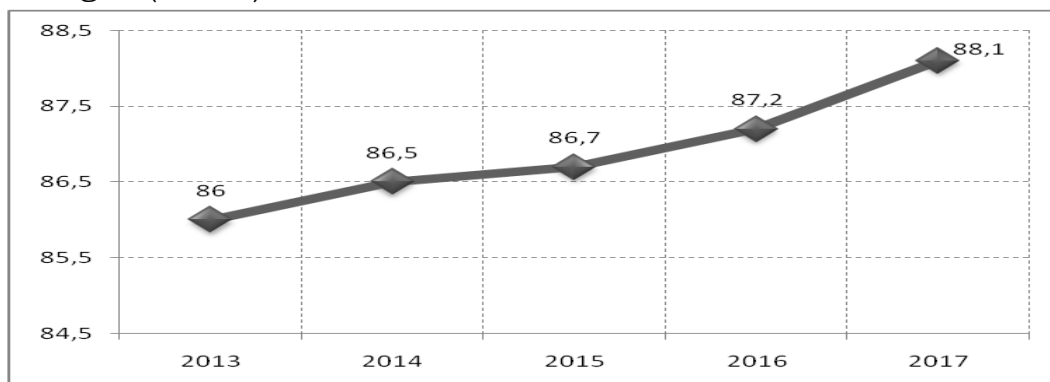


Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.107.

Persentase EBT Dalam Bauran Energi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2017

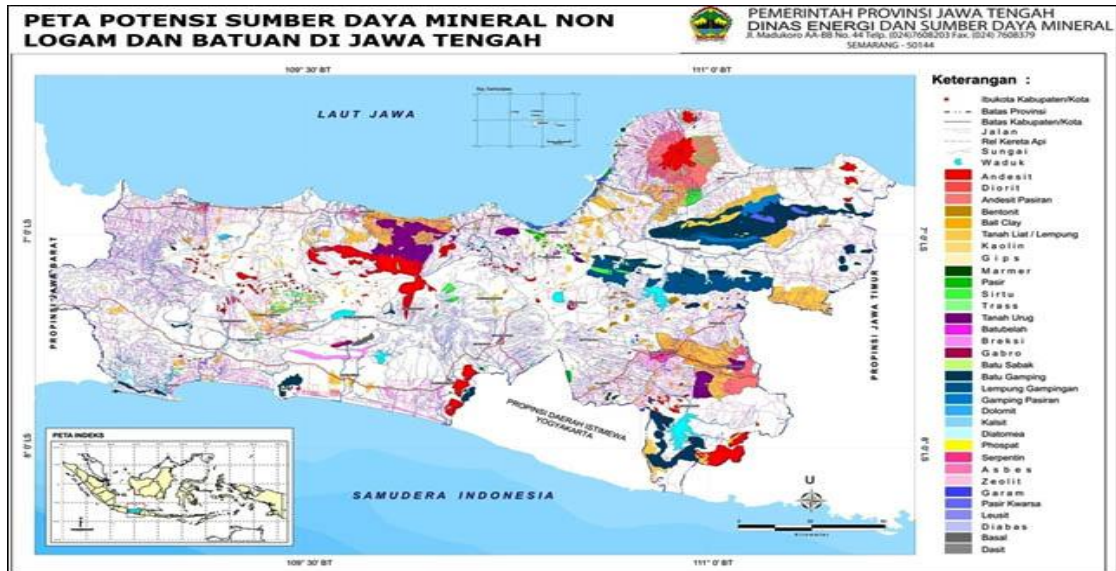
Kegiatan pertambangan bahan galian meningkat seiring dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah, yang tidak menutup kemungkinan akan berdampak pada maraknya pertambangan tanpa izin. Hingga tahun 2017, luas area pertambangan tanpa izin di Jawa Tengah mencapai 550 ha, menurun dibandingkan tahun 2016 seluas 593 ha. Karakter pertambangan tanpa izin bersifat sporadik dan setempat-setempat sehingga luas areanya tidak bisa ditetapkan secara pasti. Pertambangan tanpa izin tidak hanya melanggar peraturan sektor mineral dan batubara, tetapi juga dimungkinkan melanggar sektor lain seperti lingkungan dan tata ruang sehingga penertibannya dapat dilakukan oleh instansi yang berwenang di sektor tersebut, baik instansi provinsi maupun kabupaten/kota. Pemerintah provinsi bersama Tim Terpadu telah melakukan penertiban penambangan liar, dengan persentase luasan pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan mencapai sebesar 88,10% pada 2017, meningkat dibandingkan pada 2016 sebesar 87,20%. Penertiban pertambangan tanpa izin diarahkan pada pemenuhan aspek legalitas berupa Izin Usaha Pertambangan sehingga dapat dilakukan penindakan dan pengendalian yang didukung dengan Sistem Pelaporan Usaha Pertambangan (SILUP).



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.108.

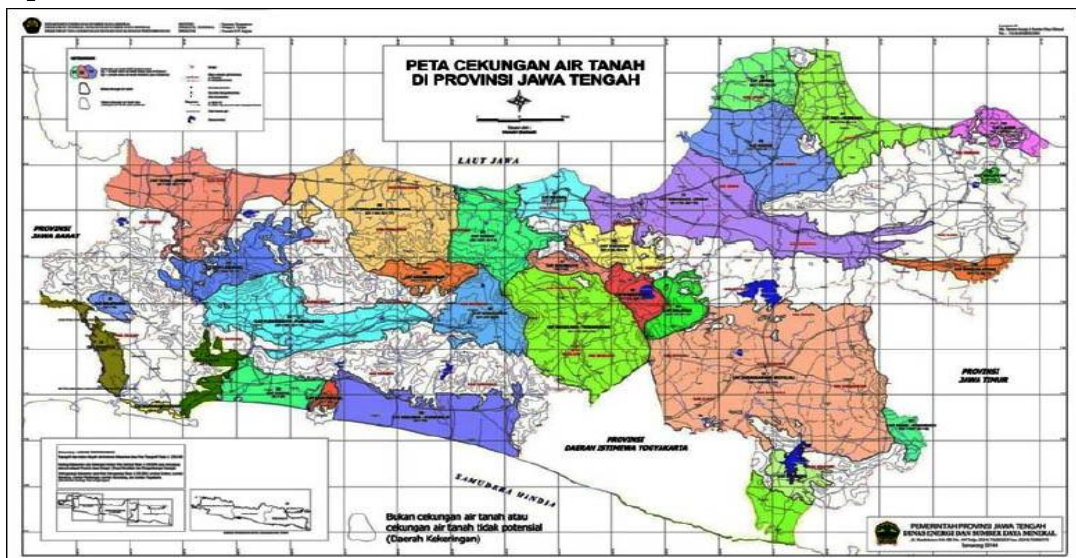
Penertiban Area Penambangan Liar di Jawa Tengah Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.109.
Peta Potensi Sumber Daya Mineral Jawa Tengah

Pengelolaan air tanah di Jawa Tengah didasarkan pada Cekungan Air Tanah (CAT). Jumlah CAT di Jawa Tengah sebanyak 31 CAT, terdiri dari 6 CAT dalam wilayah satu kabupaten/kota, 6 CAT lintas Provinsi dan 19 CAT lintas kabupaten/kota (kewenangan provinsi). Potensi air tanah bebas CAT lintas Provinsi sebesar 411,15 juta m³/tahun, CAT lintas kabupaten/kota sebesar 6.575,64 juta m³/tahun dan CAT dalam kabupaten sebesar 355,20 juta m³/tahun. Dalam rangka menjaga kualitas dan kuantitas air tanah maka diperlukan konservasi air tanah berupa pengendalian pengambilan air tanah dan perbaikan degradasi air tanah. Pentingnya konservasi air tanah belum banyak disosialisasikan dalam bentuk visualisasi meskipun upaya visualisasi telah dilakukan kepada masyarakat khususnya generasi muda, melalui Lomba Hemat Energi dan Air di sekolah-sekolah, sebagai upaya membudayakan hemat pemakaian air.



Sumber: Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.110.
Peta CAT Jawa Tengah

6. Perdagangan

Sektor perdagangan semenjak dari tahun 2013 hingga tahun 2018 memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian di Jawa Tengah dan hingga saat ini merupakan dua besar sub sektor dengan kontribusi terbesar setelah sektor industri pengolahan. Nilai PDRB ADHK sektor perdagangan tahun 2018 sebesar Rp. 136.673.489,19 juta, nilai PDRB ADHB sektor perdagangan Rp 171.376.943,63 juta yang memberikan kontribusi terhadap total PDRB ADHB Jawa Tengah sebesar 13,51 persen. Nilai dan kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.191.

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017*)	2018**)
1	Nilai total PDRB	764.959.150,95	806.765.092,17	849.099.354,69	893.750.437,17	941.283.278,28
2	Nilai Sektor Perdagangan	110.899.193,58	115.430.120,84	121.970.807,00	129.301.748,05	136.673.489,19
3	Kontribusi (%)	14,50	14,31	14,36	14,47	14,52

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Keterangan: *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.192.

Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB ADHB Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017*)	2018**)
1	Nilai total PDRB	922.471.181,11	1.010.986.637,17	1.087.316.682,68	1.172.400.482,46	1.268.700.965,90
2	Nilai Sektor Perdagangan	124.942.793,59	135.033.870,69	146.523.161,98	158.582.154,56	171.376.943,63
3	Kontribusi (%)	13,54	13,36	13,48	13,53	13,51

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Keterangan: *) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Nilai ekspor non migas pada tahun 2013 sampai dengan 2018 selalu mengalami peningkatan. Nilai ekspor non migas pada tahun 2018 sebesar US\$ 6.437,66 juta tercatat diatas dari target akhir RPJMD sebesar 104,52% sebesar US\$ 6.159,00 Juta,

Sedangkan ekspor migas Jawa Tengah lebih berfluktuatif dengan tren yang cenderung menurun sejak tahun 2013. Pada tahun 2017 ekspor migas Jawa Tengah sempat membaik ke angka US\$ 223.93 juta, namun di tahun 2018 kembali menurun menjadi US\$ 150.35 juta. Untuk perkembangan ekspor Jawa Tengah baik migas dan non migas dapat dilihat di tabel berikut.

Tabel 2.193.
Ekspor Bersih Perdagangan di Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 – 2018

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018*)
Ekspor	5.633,67	5.374,70	5.389,14	5.991,37	6.588,01
- Migas	336,48	113,04	113,47	223,93	150,35
- Non Migas	5.297,19	5.261,66	5.275,67	5.767,44	6.437,66

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Nilai impor Jawa Tengah untuk migas sejak tahun 2013 mengalami penurunan, dimana pada tahun 2013 tercatat impor migas sebesar US\$ 10.542,67 juta, dan di tahun 2018 berhasil ditekan menjadi US\$5.635,27 juta. Semenatar itu, nilai impor Non Migas pada tahun 2013 sampai dengan 2018 mengalami fluktuasi. Nilai impor non migas pada tahun 2018 sebesar US\$ 9.143,59 juta mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar US\$ 6.470,59 juta, hal ini disebabkan karena meningkatnya kebutuhan bahan penolong serta barang modal yang belum dapat dipenuhi dari dalam negeri. Hal yang harus digarisbawahi dari peningkatan impor Jawa Tengah adalah impor ini terutama dalam bentuk non bangunan, yaitu barang modal selain peralatan transportasi dan aksesoris barang modal untuk kepentingan industri. Hal tersebut juga tercermin dari pertumbuhan impor komoditas mesin dan alat transportasi. Berdasarkan komoditasnya, peningkatan impor permesinan terutama berupa mesin pembangkit listrik, mesin industri dan perlengkapan, dan mesin listrik, dan peralatannya. Peningkatan impor barang modal ini sejalan dengan menguatnya kinerja investasi non bangunan pada periode laporan, terutama terkait dengan penyelesaian investasi pembangkit listrik di sejumlah daerah di Jawa Tengah.

Tabel 2.194.
Perkembangan Nilai Impor Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018 (Juta US \$)

Uraian	Tahun				
	2014	2015	2016	2017	2018*)
Impor	15.801,09	10.738,86	8.811,04	10.658,25	14.778,86
- Migas	10.004,66	5.459,91	3.653,80	4.187,66	5.635,27
- Non Migas	5.796,43	5.278,95	5.157,24	6.470,59	9.143,59

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Keterangan: *) Angka Sementara

Neraca Perdagangan Jawa Tengah pada kurun waktu 2014 sampai dengan 2018 selalu mencatatkan nilai defisit dengan *dinali deficit* yang bertfluktuatif. Di tahun 2015 neraca perdagangan Jawa Tengah sempat mengalami perbaikan dengan nilai defisit yang menurun tajam dari (US\$ 10.446,55 juta) di tahun 2013 menjadi (US\$ 5.364,16 juta) di tahun 2015. Namun pada tahun 2018 nilai defisit Neraca Perdagangan kembali melonjak menjadi (US\$ 8.190,85 juta).

Tabel 2.195.
Perkembangan Neraca Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2018 (Juta US \$)

Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018*)
Ekspor	5.633,67	5.374,70	5.389,14	5.991,37	6.588,01
- Migas	336,48	113,04	113,47	223,93	150,35
- Non Migas	5.297,19	5.261,66	5.275,67	5.767,44	6.437,66
Impor	15.801,09	10.738,86	8.811,04	10.658,25	14.778,86
- Migas	10.004,66	5.459,91	3.653,80	4.187,66	5.635,27
- Non Migas	5.796,43	5.278,95	5.157,24	6.470,59	9.143,59
SURPLUS/DEFISIT NERACA PERDAGANGAN	(10.167,42)	(5.364,16)	(3.421,90)	(4.666,88)	(8.190,85)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Keterangan: *) Angka Sementara

Tabel diatas menunjukkan nilai impor yang meningkat di tahun 2018 yang berkorelasi positif dengan kenaikan investasi berupa pembangunan pabrik-pabrik maupun infrastruktur lainnya. Meningkatnya impor barang modal terutama berupa mesin-mesin yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan PLTU serta investasi pembelian mesin oleh swasta. Komponen mesin dan perlengkapannya yang paling banyak diimpor meliputi impor mesin pembangkit, alat listrik dan alat telekomunikasi.

Sedangkan untuk penerbitan sertifikasi mutu barang sejak tahun 2014 sampai dengan 2018 mengalami capaian yang fluktuatif. Pada tahun 2016 mencapai 1416 sertifikat. namun pada tahun 2017 menurun menjadi sebesar 256 sertifikat untuk 5 jenis barang, dan ditahun 2018 menjadi 260 sertifikat untuk 5 jenis barang. Jumlah ijin usaha perdagangan luar negeri dan jenis barang bersertifikat mutu di Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.196.
Jumlah Izin Usaha Perdagangan Luar Negeri dan Jumlah Jenis Barang
Bersertifikat Mutu Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

No	Jenis Usaha Perdagangan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah izin usaha perdagangan luar negeri (Angka Pengenal Impor - unit)	265	1.265	1.100	1.517	
2	Jumlah jenis barang bersertifikat mutu (jenis)	1.050	618	1.416	256 sertifikat, 5 jenis barang	260 sertifikat, 5 jenis barang

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2018

Jumlah Usaha Dagang Kecil dan Menengah dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan 2018 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2018 jumlah usaha dagang kecil dan menengah tercatat sebanyak 848.601 unit .

Izin usaha perdagangan dalam negeri berupa penerbitan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dalam kurun waktu 2013 – 2018 mengalami peningkatan dari sebanyak 529.688 unit di tahun 2013 menjadi 848.601 unit

di tahun 2018. Sedangkan untuk penerbitan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) selalu mengalami peningkatan sejak 2013 hingga 2018. Kondisi tersebut selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.197.

Jumlah Usaha Dagang Kecil dan Menengah dan Izin Usaha Perdagangan Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

No	Jumlah UDKM	2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Usaha Dagang Kecil dan Menengah (unit)	513.013	566.341	611.731	660.718	848.601
2	Jumlah izin usaha perdagangan dalam negeri (unit)					
	- SIUP	403.705	426.010	447.450	475.637	486.670
	-TDP	109.308	140.331	164.281	185.081	361.931

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2019

Dalam rangka pelaksanaan konsumen cerdas, yang diharapkan konsumen dapat untuk memperoleh barang atau jasa sesuai dengan mutu dan kualitas maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan kabupaten/kota melakukan upaya perlindungan konsumen. Namun demikian apabila terjadi perselisihan maka dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang sampai dengan tahun 2018 telah terbentuk sebanyak 14 unit. Selain BPSK, keberadaan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) juga penting. Jumlah LPKSM sampai dengan tahun 2018 sebanyak 28 yaitu di 29 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Tabel 2.198.

Kinerja Perlindungan Konsumen Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 - 2018

No	Indikator	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah kabupaten/kota memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen/BPSK (kab/kota)	18	18	18	14	14
2	Jumlah kabupaten/kota memiliki Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat/LPKSM (kab/kota)	4	54	28	58 di 35 Kab/Kota	28 di 29 Kab/Kota
3	Persentase penyelesaian sengketa Konsumen melalui BPSK kabupaten/kota (%)	29 kasus (100%)	47 kasus (100%)	62 kasus (100%)	2 Kasus (100%)	68 Kasus (100%)
4	Jumlah jenis barang beredar yang dilakukan pengawasan oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) (jenis)	528	579	1.281	2.195	1.124

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2019

7. Perindustrian

Kinerja pembangunan urusan perindustrian dapat tergambarkan dari capaian beberapa indikator, seperti kontribusi sektor industri terhadap PDRB;

pertumbuhan industri; jumlah klaster industri; cakupan bina kelompok pengrajin; dan pengembangan kelembagaan usaha industri.

a. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

Sektor industri memiliki kinerja terhadap sumbangan PDRB Jawa Tengah yang menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) untuk sektor industri pada tahun 2018 sebesar Rp 322.203.738,34 Juta dan memberikan kontribusi sebesar 34,23% terhadap total PDRB sebesar Rp 941.283.278,28 Juta. Nilai PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) untuk sektor industri pada tahun 2018 sebesar Rp 437.715.450,91 Juta dan memberikan kontribusi sebesar 34,50% terhadap total PDRB sebesar Rp 1.268.700.965,90 Juta, Kontribusi sektor industri terhadap PDRB Jawa Tengah tahun 2013 – 2018 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 2.199.
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 – 2018

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017*)	2018**)
1	Nilai total PDRB	764.959.150,95	806.765.092,17	849.099.354,69	893.750.437,17	941.283.278,28
2	Nilai Sektor Perdagangan	271.526.773,18	284.306.592,45	295.960.836,46	308.770.221,90	322.203.738,34
3	Kontribusi (%)	35,50	35,24	34,86	34,55	34,23

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Keterangan: *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

Tabel 2.200.
Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHB Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2018 (Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun				
		2014	2015	2016	2017*)	2018**)
1	Nilai total PDRB	922.471.181,11	1.010.986.637,17	1.087.316.682,68	1.172.400.482,46	1.268.700.965,90
2	Nilai Sektor Perdagangan	329.025.312,38	354.642.135,00	377.237.312,37	406.034.161,42	437.715.450,91
3	Kontribusi (%)	35,67	35,08	34,69	34,63	34,50%34,50

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Keterangan: *) Angka Sementara

***) Angka Sangat Sementara

b. Pertumbuhan Industri

Capaian pertumbuhan industri besar di Jawa Tengah sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan. Industri besar dari 815 unit usaha pada tahun 2013 menjadi 1228 unit usaha pada tahun 2018. Untuk jumlah IKM terjadi tren yang cenderung menurun sejak tahun 2016 yang mencatat sebanyak 449.090 unit usaha, turun dari 565.453 unit pada tahun 2015. Dan pada tahun 2018 tercatat sebanyak 325.091 unit.

Tabel 2.201.**Pertumbuhan Industri Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018**

No	Jenis Industri	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Besar	867	906	972	1.162	1.228
2	Kecil dan Menengah	423.124	565.453	449.090	472.039	325.091

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2019

c. Pengembangan Klaster Industri

Jawa Tengah memiliki industri unggulan daerah dan dijadikan sebagai kompetensi inti industri adalah industri mebel, tekstil produk tekstil, makanan ringan, mesin dan perlogaman, komponen otomotif dan kerajinan. Pola pengembangan industri tersebut diarahkan melalui pendekatan pembentukan klaster industri potensial untuk meningkatkan jejaring dan rantai nilai industri unggulan daerah yang melibatkan industri utama, industri pendukung dan usaha terkait. Sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 telah terbentuk kelembagaan klaster industri sebanyak 19 klaster, terdiri dari 6 klaster logam mesin dan tekstil, 7 klaster komponen otomotif, elektronika, aneka, dan 6 klaster agro, kimia dan hasil hutan.

Tabel 2.202.**Pengembangan Klaster Industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018**

No	Jenis industri	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1	Jumlah Klaster Logam, Mesin, Tekstil	6	6	6	6	6
2	Jumlah Klaster Komponen Otomotif, elektronika & Aneka	6	7	6	7	7
3	Jml Klaster agro, kimia & hasil hutan	7	6	7	6	6
4	Pengembangan Klaster Industri	19	19	19	19	19

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah, 2019

d. Pengembangan Kelembagaan Usaha Industri

Selain itu dalam pengembangan kelembagaan usaha sektor industri tidak mengalami perubahan, yaitu sebanyak 3 lembaga industri meliputi Pokja Industri pada FPESD, Dekranasda, dan Mitra Praja Utama.

8. Transmigrasi**a. Sinkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan transmigrasi di 22 provinsi lokasi transmigrasi di luar Jawa**

Upaya sinkronisasi antar wilayah dalam penyelenggaraan transmigrasi dilakukan melalui kerjasama antara daerah transmigrasi. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi lahan transmigrasi yang ideal yaitu 2C (*clean and clear*) dan 4L (Layak huni, Layak berkembang, Layak usaha, dan Layak lingkungan) bagi calon transmigran. Upaya kerjasama yang telah dilakukan adalah kerjasama dengan 22 provinsi lokasi transmigrasi diluar Jawa yaitu Provinsi Riau, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua,

Kalimantan Utara, Aceh, dan Bangka Belitung. Pada tahun 2015 telah dilakukan kerjasama penempatan transmigrasi dengan pola *sharing* penyiapan permukiman transmigran asal Jawa Tengah di Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara.

b. Nota kesepakatan kerjasama antar wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan koordinasi dan fasilitasi dengan daerah calon penerima transmigran agar dapat segera merealisasikan *MoU* yang telah disepakati. Sampai dengan tahun 2015 telah disusun *MoU* sebanyak 393 naskah di 22 Provinsi luar Jawa.

c. Capaian Pengiriman Trasmigran

Selama tahun 2014-2018, persentase penempatan transmigran Jawa Tengah cenderung meningkat. Tahun 2014 sebesar 3,36 persen, meningkat menjadi 7,52 persen di tahun 2018. Apabila dilihat dari animo masyarakat terhadap transmigrasi cukup baik, namun terkendala kuota yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, sehingga realisasi penempatannya tidak cukup besar setiap tahunnya.

Tabel 2.203.
Capaian Pengiriman Transmigran Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014 - 2018

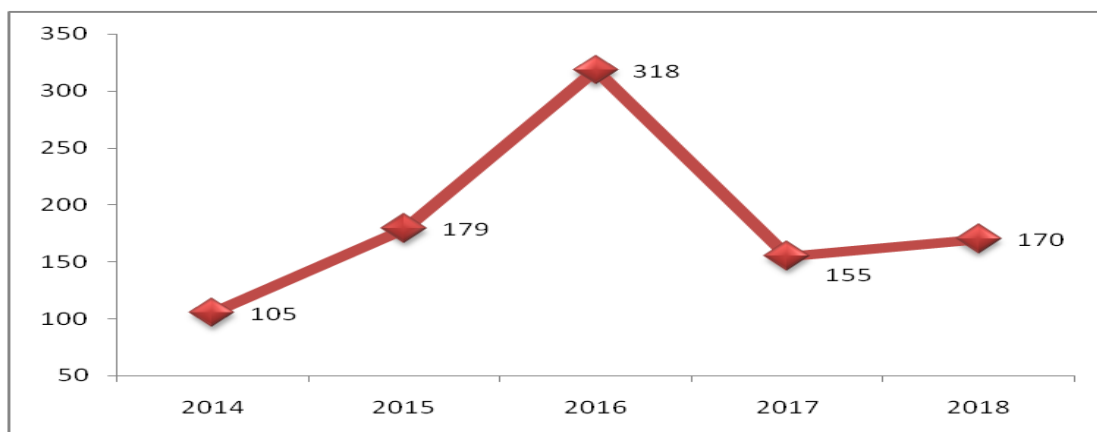
No	Tahun	Animo (KK)	Kuota Pusat (KK)	Jumlah Penempatan (KK)	Persentase
1	2014	3.624	142	122	3,36
2	2015	2.408	239	179	7,43
3	2016	2.397	326	318	13,26
4	2017	2.211	155	153	6,91
5	2018	2.246	170	169	7,52
Jumlah		37.080	1.527	1.412	3,81

Sumber : Dinakertrans Provinsi Jawa Tengah, 2019

Dalam rangka meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan dan pelayanan kepada calon transmigran telah dilaksanakan pembinaan di 35 kabupaten/kota diantaranya melalui pembenahan data transmigrasi, penyebarluasan informasi transmigrasi, dan pembenahan mekanisme rekrutmen.

d. Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan Pelatihan Dasar Umum (PDU)

Dalam rangka peningkatan pengetahuan dan ketrampilan transmigran sebagai bekal di daerah tujuan, telah dilaksanakan pelatihan dan pembekalan pengetahuan mengenai kondisi tempat tujuan, budaya dan tradisi masyarakat setempat kepada calon transmigran yang dilakukan oleh Balai Latihan Transmigrasi dan Penyandang Cacat (Balatranspenca) Provinsi Jawa Tengah. Tahun 2017, pelatihan dasar umum calon transmigran dialihkan ke Balai Latihan Pertanian dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah di Klampok, Banjarnegara.



Sumber : Dinakertrana Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.111.
Perkembangan Pelatihan Calon Transmigran Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

2.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Kinerja urusan perencanaan pembangunan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2013 - 2017 antara lain diwujudkan melalui kerjasama perencanaan pembangunan yaitu terselenggaranya forum kerjasama antar daerah di 35 kabupaten/kota dan pada SKPD Provinsi, kesepakatan kerjasama pembangunan wilayah perbatasan Provinsi Jawa Tengah - Jawa Barat Tahun 2015-2018, kerjasama pengembangan ekonomi antar daerah meliputi kawasan Barlingmascakeb, Subosukawonosraten, Kedungsepur, Kedu Plus, Sapta Mitra Pantura dan Pakudjembara, serta pengembangan Sistem Inovasi Daerah di Jawa Tengah.

Untuk menjamin terciptanya perencanaan pembangunan yang konsisten dan berkelanjutan serta sebagai dasar penyusunan dokumen penganggaran, telah disusun dokumen perencanaan pembangunan secara periodik untuk setiap tahunnya.

2. Keuangan

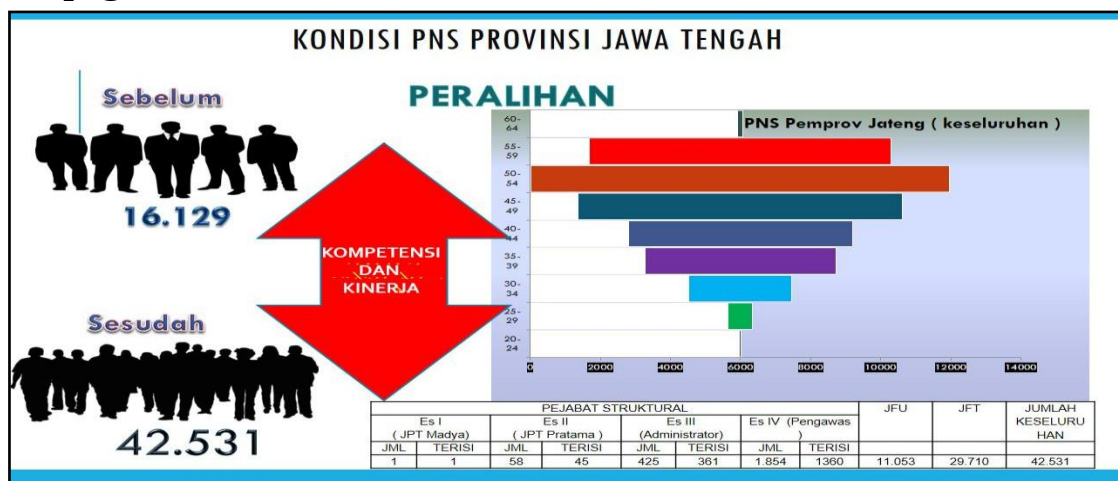
a. Administrasi Keuangan Daerah

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Opini WTP tersebut menunjukkan kinerja keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah terus membaik.

b. Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah

Dalam rangka optimalisasi pengelolaan aset daerah, secara periodik dilakukan evaluasi manajemen pengelolaan aset sehingga keberadaan aset Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD secara signifikan. Upaya-upaya yang ditempuh antara lain melalui pemberdayaan aset dalam bentuk kerjasama pemanfaatan dengan pihak ketiga termasuk pendayagunaan aset-aset yang idle; pengamanan aset, melalui sertifikasi, pemasangan label dan patok batas tanah; inventarisasi dan identifikasi nilai aset serta validasi neraca aset; serta penyelesaian kasus/sengketa.

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan



Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.112.
Kondisi PNS Provinsi Jawa Tengah

Salah satu area reformasi birokrasi adalah aspek penataan sistem manajemen SDM yang difokuskan pada peningkatan profesionalisme dan kompetensi SDM aparatur. Peningkatan profesionalisme PNS dilaksanakan berdasarkan PP No 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS antara lain melalui kegiatan pengadaan CPNS, tes kompetensi pejabat struktural, kenaikan pangkat, hasil promosi jabatan secara terbuka dan *talent scouting*, serta fasilitasi tugas belajar dan ijin belajar PNS Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Adapun data jumlah PNS yang melaksanakan tugas belajar dan ijin belajar tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.204.
Jumlah PNS yang Melaksanakan Tugas Belajar dan Ijin Belajar S2/S3 Tahun 2014 – 2018 (Orang)

No	Fasilitasi Tugas Belajar dan Ijin Belajar	Tahun					Jumlah
		2014	2015	2016	2017	2018	
1	S3	1	1	12	10	6	30
2	S2	10	7	15	415	521	968

Sumber: BKD Provinsi Jawa Tengah, 2019

Sedangkan pengembangan kompetensi sumber daya aparatur merupakan upaya untuk pemenuhan kebutuhan kompetensi PNS dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karier.

Pengembangan kompetensi dilakukan melalui diklat pengembangan kompetensi jabatan fungsional, diklat pengembangan kompetensi teknis, dan diklat pengembangan kompetensi manajerial. Adapun data ASN yang telah mengikuti diklat tahun 2014-2018 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.205.

Diklat Aparatur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018 (Orang)

No	Jenis Diklat	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Diklat Teknis, Fungsional dan Kepemimpinan	4.232	5.765	3.550	4.046	2.771
2.	Sertifikasi Kompetensi	0	0	202	279	112

Sumber : BPSDMD Provinsi Jawa Tengah, 2019

Dalam proses pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN di Jawa Tengah belum menunjukkan perbaikan kinerja yang signifikan menuju ASN yang profesional dan kompeten. Hal ini ditandai dengan belum adanya *blue print* pemetaan kompetensi ASN yang dijadikan dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN. Kondisi ini menyebabkan masih terdapatnya *gap* kompetensi ASN yang belum terpetakan secara baik, sistem penilaian kinerja yang belum akurat, serta analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilaksanakan secara maksimal dalam satu sistem yang terintegrasi. Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut, metode pendekatan sistem merit pada manajemen SDM diperlukan untuk menciptakan sinergitas pengembangan ASN yang ideal dan profesional. Dalam sistem merit ini, disyaratkan adanya kesesuaian antara kompetensi (kualifikasi pengetahuan, keahlian, dan pengalaman), kualifikasi (pendidikan dan pelatihan), kinerja (target dan pencapaian), kompensasi (tingkat kebutuhan dan kondisi eksternal), serta disiplin ASN.

4. Penelitian dan Pengembangan

Guna mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang mengedepankan proses kelitbangan dan IPTEK, pengembangan dan penerapannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya adalah dengan mendorong kabupaten/kota untuk menerapkan Sistem Inovasi Daerah (SIDa). Pengembangan SIDa di Jawa Tengah dilakukan melalui 3 aspek/pilar yaitu pengembangan Kabupaten/Kota inovatif, pengembangan desa inovatif dan pengembangan klaster. Dalam kurun waktu tahun 2014-2018, kondisi capaian kinerja pengembangan SIDa sesuai dengan target RPJMD 2013-2018 sebagai berikut.

Tabel 2.206.

Perkembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

No	Aspek/Pilar	2014	2015	2016	2017	2018	Total
1.	Kabupaten/Kota Inovatif	3	6	8	10	8	35
2.	Desa Inovatif	9	11	12	11	10	58
3.	Klaster Unggulan berbasis teknologi	6	6	6	6	6	30

Sumber : Bappeda Provinsi Jawa Tengah 2019

5. Pengawasan

Pengawasan dilaksanakan untuk menjaga kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah agar sesuai dengan regulasi, kebijakan, dan peraturan yang berlaku. Pelaksanaan pengawasan difokuskan pada tercapainya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), dan terwujudnya peningkatan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam rangka mencegah penyimpangan penyelenggaraan pemerintahan daerah, meningkatkan kepercayaan (*trust*) masyarakat, dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat secara responsif (*quick response*). Data kinerja bidang pengawasan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2014-2018 selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.207.
Capaian Kinerja Bidang Pengawasan Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2014-2018

No.	Kinerja Pengawasan	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Opini BPK (WTP)	Prov dan 10 Kab/Kota	Prov dan 11 Kab/Kota	Prov dan 20 Kab/Kota	Prov dan 30 Kab/Kota	Prov dan 31 Kab/Kota
2.	Jumlah SKPD yang Menerapkan SPIP	2 SKPD	59 SKPD	59 SKPD	48 SKPD	48 SKPD
3.	Tingkat Maturitas SPIP	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3	Level 3
4.	Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan yang Profesional	92%	94%	95%	98%	100%
5.	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 1	Level 1	Level 2	Level 3	Level 3

Sumber: Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, 2019

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa tercapainya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LPKD) dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dapat diukur dengan indikator Opini BPK (WTP). Jumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah yang memperoleh Opini WTP sebanyak 10 Kabupaten/Kota pada tahun 2014, sedangkan pada tahun 2018 jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh Opini WTP mengalami peningkatan pesat yaitu sebanyak 31 Kabupaten/Kota.

Kinerja penyelenggaraan SPIP dapat diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu jumlah SKPD yang menerapkan SPIP dan tingkat maturitas SPIP. Mulai tahun 2016, seluruh SKPD di wilayah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (48 SKPD) telah menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) SPIP setiap tahunnya, termasuk penyusunan RTP SPIP tingkat Provinsi. Sedangkan hasil penilaian yang dilakukan Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015-2018, tingkat maturitas SPIP Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara

berturut-turut ditetapkan berada pada level 3, yang artinya kebijakan pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik.

Sedangkan untuk kinerja perwujudan peningkatan kapabilitas APIP dapat diukur dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu persentase tenaga pemeriksa dan aparat pengawasan yang profesional serta tingkat kapabilitas APIP. Persentase APIP yang profesional dan berkompoten sudah mencapai 100 % pada tahun 2018, dan sesuai dengan hasil reuiu atas *quality assurance* Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah terhadap penilaian mandiri kapabilitas APIP, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dinyatakan telah mencapai level 3 Dengan Catatan (DC) pada tahun 2017 dan 2018, yang artinya telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu terwujudnya peran APIP yang efektif baik dari sisi *quality assurance* maupun *consulting partner*.

2.3.5 Fungsi Lain

a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Salah satu aspek penilaian kinerja pemerintahan dan reformasi birokrasi adalah penguatan akuntabilitas dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan hasil evaluasi SAKIP oleh Menpan RB, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 mendapatkan predikat A dengan nilai 80,18. Nilai dan predikat ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Dari 5 komponen SAKIP yang dievaluasi, semua komponen mengalami peningkatan meskipun peningkatannya relatif tidak terlalu besar. Hal ini perlu mendapat perhatian bagaimana kedepan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah lebih baik yang dimulai dari perbaikan proses perencanaan.

Tabel 2.208.

Hasil Evaluasi SAKIP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 – 2018

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai			
			2015	2016	2017	2018
1	Perencanaan Kinerja	30	24,88	25,39	25,24	26,38
2	Pengukuran Kinerja	25	16,37	17,95	18,13	19,87
3	Pelaporan Kinerja	15	11,71	12,68	10,79	11,68
4	Evaluasi Internal	10	7,37	8,01	8,23	8,26
5	Capaian Kinerja	20	11,76	12,57	13,55	13,99
	Hasil Nilai SAKIP		72,09	76,60	75,94	80,18
	Predikat		BB	BB	BB	A

Sumber : Kemenpan RB, 2019

Capaian pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang sangat baik di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, belum diikuti seluruhnya oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Berdasarkan Hasil Evaluasi Kementerian PAN dan RB pada tahun 2018, terdapat 4 kabupaten/kota yang mencapai predikat BB, 23 kabupaten/kota dengan predikat B, dan sebanyak 8 kabupaten dengan predikat CC. Kedelapan kabupaten tersebut yaitu

Kabupaten Magelang, Temanggung, Purbalingga, Kebumen, Rembang, Semarang, Grobogan, dan Sukoharjo.

b. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Penataan desa/kelurahan pada tahun 2010 dan 2011 terjadi pembentukan 4 (empat) desa baru dan perubahan status 2 (dua) desa menjadi kelurahan. Kedepan dimungkinkan terjadi pembentukan/penggabungan/penghapusan/perubahan status desa/kelurahan berdasarkan prakarsa pemerintah desa/kelurahan dengan mempertimbangkan saran dan pendapat masyarakat serta telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan.

Penyelenggaraan pemerintahan berbasis teknologi informasi telah dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai suatu upaya penataan sistem manajemen dan proses kerja melalui pengembangan *website* www.jatengprov.go.id yang dapat diakses oleh masyarakat. Di samping itu, untuk mendukung penciptaan transparansi dan akuntabilitas kinerja, telah tersedia berbagai sistem informasi manajemen, antara lain Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (SIPPD), Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) kemudian diubah menjadi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG), Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIMBANGDA), Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), dan berbagai sistem informasi lainnya.

Untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, transparan dan memberikan kepastian hukum, telah dibentuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang disertai pelimpahan kewenangan penandatanganan perijinan dan non perijinan dari Gubernur kepada lembaga PTSP. Bidang perijinan dan non perijinan yang dilayani meliputi bidang penanaman modal, tenaga kerja, koperasi dan UMKM, kesbangpolinmas dan politik, sosial, energi dan sumber daya mineral, sumber daya air, kelautan dan perikanan, kehutanan, pekerjaan umum, perhubungan, komunikasi dan informatika, perindustrian dan perdagangan, kesehatan, pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan, serta keamanan.

c. Kerjasama Daerah

Kerjasama daerah dilaksanakan sebagai sarana untuk lebih memantapkan hubungan dan keterikatan daerah yang satu dengan daerah yang lain, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi, dan kapasitas fiskal. Bentuk kerjasama daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meliputi kerjasama daerah dengan lembaga pemerintah dan pihak ketiga dalam negeri, sertakerjasama daerah dengan lembaga pemerintah dan pihak ketiga luar negeri.

Dalam kurun waktu tahun 2014-2017, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menandatangani 443 naskah kerjasama dengan lembaga pemerintah dalam negeri dan 148 naskah kerjasama dengan pihak ketiga dalam negeri. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan kerjasama *sister province* dengan 4 provinsi di luar negeri, yaitu Negara Bagian *Queensland* Australia, Provinsi Fujian China, Chung Cheong Buk Do Korea

dan Siem Reap Kamboja. Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga melakukan kerjasama dengan 8 lembaga non pemerintah luar negeri (*International Non Governmental Organization*) yaitu *Vredeseilanden-Coopibo Non-Profit Association (VECO)* Swedia dengan program pemberdayaan masyarakat desa, *Interchurch Organization For Development Cooperation (ICCO)* Belanda dengan program Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Desa, *PLAN International Incorporation (PLAN)* Spanyol dengan program pengembangan sosial ekonomi masyarakat, *Arbeiter Samariter Bund (ASB)* Jerman dengan program pengembangan sosial ekonomi masyarakat pedesaan secara terpadu dan berkelanjutan, *Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV)* Belanda dengan program pembangunan wilayah terpadu yang berkelanjutan, *Swiss Contact (SC)* Swiss dengan program pengembangan kegiatan ekonomi masyarakat, *Konrad Adeneur Stiftung (KAS)* Belanda dengan program pemberdayaan masyarakat di Kota Semarang, *The Organization For Industrial, Spiritual And Cultural Advancement International (OISCA)* Jepang dengan program pemberdayaan masyarakat desa.

d. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Pelaksanaan penerapan SPM urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan mempedomani RPJMD 2013-2018 dan RKPD, telah dilaksanakan di Jawa Tengah. berdasarkan pembagian urusan pada lampiran Undang-Undang 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah. Adapun capaian kinerja SPM selama tahun 2013-2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.209.

Capaian Penerapan SPM Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

No.	Urusan/IKK	Sat	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
A.	Urusan Pendidikan						
1	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SD/MI	%	43,06	51,96	53,44	53,10	58,38
2	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMP/MTS	%	39,94	47,35	52,96	56,12	58,81
3	Pendidikan Luar Biasa (PLB) jenjang SMA/SMK/MA	%	21,04	58,39	47,75	57,07	54,40
4	Pembinaan Guru jenjang SD/MI	%	47,48	67,71	76,76	23,14	54,34
5	Pembinaan Guru jenjang SMP/MTS	%	86,77	90,10	90,25	61,57	65,86
6	Pembinaan Guru jenjang SMA/SMK/MA	%	93,67	93,97	96,19	53,60	68,34
B.	Urusan Kesehatan						
1	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	83,62	90,46	88,49	97,12	97,75
2	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	95,98	94,81	98,24	97,76	98,88
3	CakupanDesa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	%	97,34	99,01	99,61	99,82	99,93
4	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	97,14	93,89	100,00	100,00
5	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	55,81	57,48	61,55	60,93	62,63
6	Cakupan penemuan dan penanganan	%	100	99,98	97,11	99,68	100,00

No.	Urusan/IKK	Sat	Capaian				
			2013	2014	2015	2016	2017
	penderita penyakit DBD						
7	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	56,67	57,60	52,72	43,03	60,49
8	Cakupan kunjungan bayi	%	91,47	95,82	94,52	92,58	98,15
9	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	83,62	90,46	88,49	97,12	97,75
10	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	95,98	94,81	98,24	97,76	98,88
C.	Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman						
1	Rumah tangga pengguna air bersih	%	48,81	58,84	65,94	75,31	81,07
2	Rumah layak huni	%	59,58	62,89	79,69	83,96	84,64
D.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						
1	Panjang jalan provinsi dalam kondisi baik	%	86,18	99,75	86,92	88,72	97,10
2	Rumah Tangga berSanitasi	%	50,10	49,10	63,22	73,02	77,92
3	Kawasan Kumuh	%	2,81	3,89	3,12	2,20	2,27
4	Ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB	%	20,55	14,03	22,90	20,30	26,60
E.	Urusan Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat						
1	Kegiatan pembinaan politik daerah	Keg	52,00	32,00	43,00	28,00	42,00
2	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Keg	42,00	50,00	47,00	84,00	30,00
F.	Urusan Sosial						
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	bua h	1367	1438	62,00	938,00	911,00
2	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	0,12	0,58	0,58	0,13	74,91

Sumber: Biro PemOtdaKer Setda Provinsi Jawa Tengah, 2019

e. Perkembangan BUMD

Ada 2 BUMD yang sepenuhnya menjadi milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yaitu PD. Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT) dan PDAB Tirta Utama, dan 7 BUMD di mana Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi pemegang saham pengendali yaitu PT SPJT, PT. SPHC, PT. PRPP, PT. Jamkrida Jateng, PT. Bank Jateng, 33 unit PD. BPR BKK dan 29 unit PD. BKK. Di samping itu Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi pemegang saham di 1 BUMN yaitu PT. KIW dan di 1 perusahaan yaitu PT. Asuransi Bangun Askrida.

Saat ini seluruh PD. BPR BKK sedang dalam proses perubahan badan hukum menjadi PT, sedangkan PD. BKK se-Jateng sedang dalam proses konsolidasi menjadi PT. BPR BKK Jateng. Diharapkan antara PT. BPR BKK Jateng dengan 33 PT. BPR BKK se-Jateng dapat merger/konsolidasi di tahun 2023.

Dari tahun 2013 – 2018 deviden yang diberikan BUMD sebagai PAD bagi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus meningkat, dari Rp 263,26 milyar di tahun 2013 meningkat setiap tahun hingga menjadi Rp 459,62 milyar di

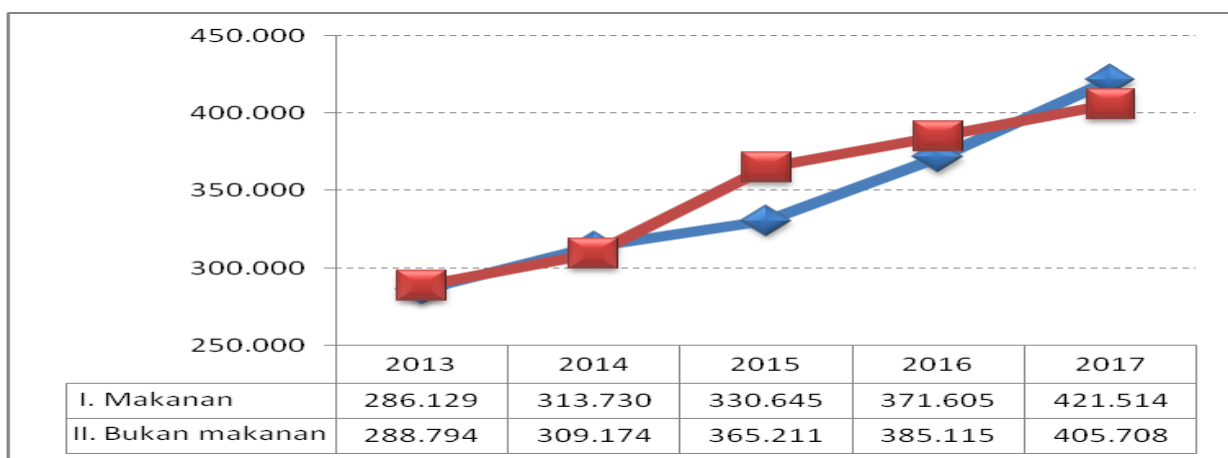
tahun 2018, dengan rata-rata pertumbuhan Rp 39,27 milyar atau 11,95% per tahun.

Dari sisi manajemen BUMD selalu ada perbaikan dan peningkatan, dengan penerapan *Good Corporate Governance* (Tata Kelola Perusahaan yang Baik) di BUMD. Pemilihan direksi juga selalu dilaksanakan melalui seleksi secara terbuka, objektif dan transparan, sehingga didapatkan personil yang kompeten dan berintegritas.

2.4 Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1 Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Tiap Bulan

Pengeluaran rata-rata per kapita tiap bulan penduduk Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2013-2016 lebih besar diperuntukkan untuk bahan bukan makanan, dan di tahun 2017 bergeser ke pengeluaran makanan.



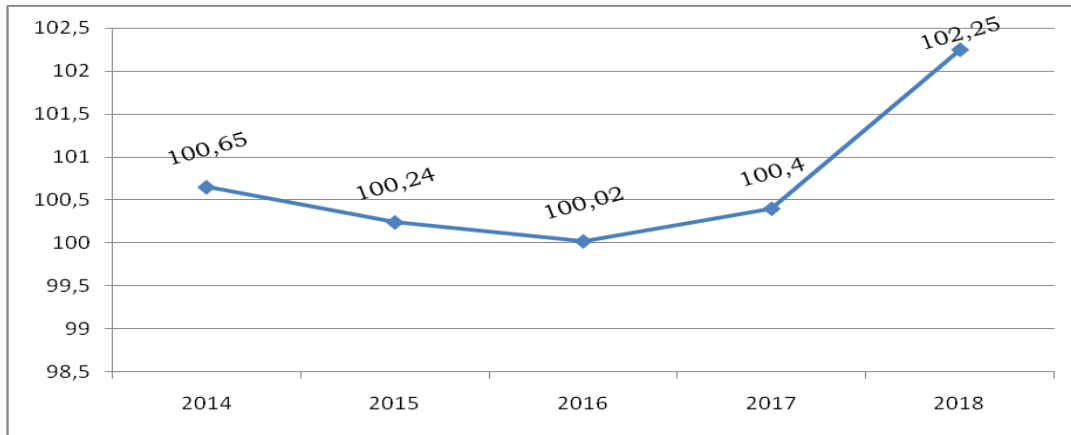
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 2.113.

Pengeluaran Rata-Rata Per Kapita Tiap Bulan Untuk Makanan Dan Bukan Makanan Daerah Perkotaan dan Perdesaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017

2.4.2 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (*term of trade*) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. NTP umum Jawa Tengah Tahun 2018 sebesar 102,25 meningkat 1,85 dari NTP umum Tahun 2017 sebesar 100,40, dengan demikian perubahan indeks harga yang diterima petani (It) lebih tinggi dibandingkan dengan perubahan indeks harga yang dibayar petani (Ib), secara relatif semakin kuat tingkat kemampuan/ daya beli petani.



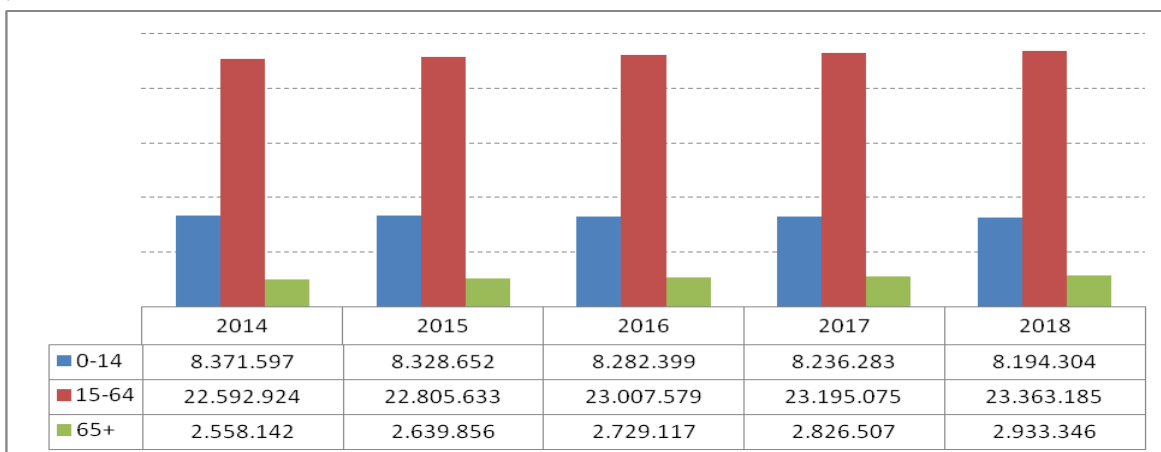
Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.114.
Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018

2.4.3 Sumber Daya Manusia

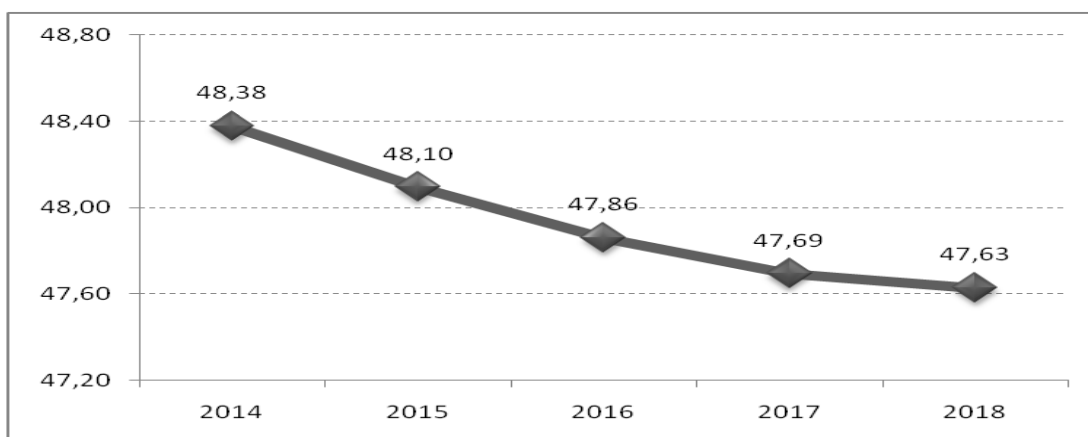
a. Rasio Ketergantungan

Rasio ketergantungan dalam kurun waktu 2014-2018 terus menurun, pada tahun 2014 sebesar 48,38 dan pada tahun 2018 menjadi sebesar 47,63%.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.115.
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 – 2018



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2019

Gambar 2.116.
Rasio Ketergantungan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014-2018

b. Rasio Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan

Rasio penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut pendidikan yang ditamatkan selama 5 tahun terakhir masih didominasi lulusan SD ke bawah, walaupun cenderung semakin menurun. Menurunnya dominasi pekerja lulusan SD ke bawah serta meningkatnya lulusan DI/II/III dan universitas berdampak kepada tingkat produktivitas pekerja yang semakin membaik.

Tabel 2.210.

Rasio Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan yang Ditamatkan di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 (Orang)

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	2013	2014	2015	2016	2017
Tidak Punya Ijasah SD/ <i>Did not Completed Primary School</i>	3.515.1 85	3.510.2 63	3.219.9 39	3.035.3 69	3.074.3 76
Sekolah Dasar/ <i>Primary School</i>	5.485.9 12	5.472.8 91	5.388.4 71	5.404.3 63	5.327.4 38
Sekolah Menengah Pertama / <i>Junior High School</i>	3.219.7 75	3.118.1 91	3.156.8 65	3.290.0 41	3.348.5 60
Sekolah Menengah Atas / <i>Senior High School</i>	1.826.0 50	1.845.5 38	1.911 979	1.782.9 53	2.107.2 92
Sekolah Menengah Atas Kejuruan/ <i>Vacational Senior High School</i>	1.313.5 44	1.450.4 03	1.490.8 23	1.713.3 08	1.821.3 76
Diploma I/II/III/Akademi/ <i>Diploma I/ II/ III/ Academy</i>	349.347	326.53 4	356.24 9	353.76 0	390.01 3
Universitas/ <i>University</i>	760.147	826.86 2	910.81 6	931.34 2	1.117.6 19
Jumlah/ <i>Total</i>	16.469. 960	16.550. 682	16.435. 142	16.511. 136	17.186. 674

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

c. Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama

Sektor pertanian memberikan kontribusi paling tinggi terhadap penyerapan kerja penduduk usia 15 tahun ke atas menurut lapangan pekerjaan utama selama kurun waktu 2013 - 2017, kemudian diikuti sektor perdagangan dan sektor industri. Namun jika dilihat perkembangan tiap tahun, pekerja pada sektor pertanian selama 2013 - 2017 mengalami perkembangan yang menurun. Disisi lain penduduk usia kerja di sektor perdagangan dan industri pengolahan, bahkan jasa cenderung meningkat dalam lima tahun terakhir. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.211.**Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2017 (Orang)**

Lapangan pekerjaan Utama/ Main Industry	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian/ <i>Agriculture</i>	5.173.387	5.173.986	4.709.707	5.067.891	4.323.993
Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	68.434	87.212	124.545	123.108	120.541
Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing Industry</i>	3.104.519	3.173.217	3.267.676	3.251.749	3.563.275
Listrik, Gas, dan Air/ <i>Electricity, Gas, and Water</i>	20.461	27.989	33.925	37.600	47.987
Bangunan/ <i>Construction</i>	966.353	1.269.113	1.529.103	1.430.779	1.493.314
Perdagangan / <i>Trade</i>	3.694.115	3.715.488	3.803.763	3.711.052	4.125.776
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi/ <i>Transportation, Warehousing, and Communication</i>	617.669	587.391	547.674	549.732	613.021
Keuangan/ <i>Financial</i>	314.879	322.402	343.870	301.484	419.244
Jasa/ <i>Services</i>	2.510.143	2.193.884	2.074.879	2.037.741	2.479.523
Jumlah/Total	16.469.960	16.550.682	16.435.142	16.511.136	17.186.674

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Untuk melihat gambaran hasil kinerja pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2013-2018 dapat dilihat pada Tabel 2.212 berikut.

Tabel 2.212

Hasil Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
A.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR													
1	Urusan Pendidikan													
	1. Program Pendidikan Menengah	a. Angka Putus Sekolah SMA/SMALB/MA/SMK	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06	0,05	0,06	0,059	0,06	0,05	0,05	Hijau
		b. % Ruang kelas SMA/MA/SMK sesuai standar nasional pendidikan	80,5	81	84	86	88	90	82	84,33	86	90,02	90,00	Hijau
		c. % SMA/MA/SMK yang memiliki perpustakaan sesuai standar	90,02	91	92	93	94	95	91,05	91,36	93	95,04	95,00	Hijau
		d. % SMA/MA/SMK yang memiliki sanitasi layak	10	26,01	28,63	31,28	33,87	36,49	19,09	28,37	31,28	36,62	36,49	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		e. % Keterserapan lulusan SMK pada DUDI dan kewirausahaan	69,76	-	-	72	72,5	73	71,23	70,05	72	73	73	Hijau
		f. Jumlah Siswa Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM)	14.007	16.000	16.000	16698	10.490	10.230	16.054	16.244	16.224	76.965	69.418	Hijau
	2. Program Pendidikan Khusus	a. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Khusus	52	54	56	58	60	62	54	56,01	58	65,39	62,00	Hijau
		b. Angka Lulus pendidikan Khusus	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	Hijau
		c. Persentase Ruang kelas Pendidikan Khusus sesuai Standar Nasional Pendidikan	73	75	76	78	79	80	75	76,03	78	80,02	80,00	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
	3. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	a. Persentase Pendidik PAUD berkualifikasi S1/D4	31,05	31,1	31,85	47,27	47,81	48,43	31,1	46,66	47,27	49,85	48,43	Hijau
		b. Persentase Pendidik SD/SDLB/MI berkualifikasi S1/D4	51,58	53,61	56,47	78,8	80,2	81,1	53,61	77,9	78,8	86,44	81,1	Hijau
		c. Persentase Pendidik SMP/SMPLB/M Ts berkualifikasi S1 / D4	85,05	86,41	87,71	92,55	93,94	94,88	86,41	91,45	92,55	95,72	94,88	Hijau
		d. Persentase Pendidik PAUD bersertifikat pendidik	15	16	16,75	17,5	18,25	19	16	24,91	17,5	31,07	19,00	Hijau
		e. Persentase Pendidik SD/SDLB/MI bersertifikat Pendidik	47	47,52	48,14	48,76	49,38	50	47,52	52,11	48,76	55,55	50,00	Hijau
		f. Persentase Pendidik SMP/SMPLB/M Ts bersertifikat Pendidik	55	56,6	58,7	60,8	62,9	65	56,6	62,97	60,8	67,25	65,00	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US	
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	
		g. Persentase Pendidik SMA/SMALB/MA dan SMK bersertifikat pendidik	51	59,93	64	66	68	70	59,93	64,97	66	70,04	70,00	Hijau	
	4. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	a. % SD/SDLB/MI yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	Hijau	
		b. % SMP/SMPLB/MTs yang terakreditasi	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	Hijau
		c. % SD/MI melaksanakan MBS dengan baik	30	30	35	40	45	50	33	37,86	40	50,04	50,00	Hijau	
		d. % SMP/MTs melaksanakan MBS dengan baik.	50	55	60	65	70	75	54	60,79	65	75,02	75,00	Hijau	
		e. % SMA/SMK/MA melaksanakan program MBS dengan baik.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	Hijau
	5. Program Pendidikan Berkelanjutan	a. APK PAUD/TK (3-6 th)	-	-	-	tidak ada, indikator baru 2017	79	80	-	-	-	79,04	80	Hijau	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		b. % lembaga PAUD yang terakreditasi	47	50	53	56	59	62	50	53,25	56	59,18	62,00	Hijau
		c. APK SD/SDLB/MI/Paket A	109,08	109,1	109,13	109,31	109,36	109,39	109,1	109,31	109,31	109,47	109,39	Hijau
		d. APM SD/SDLB/MI/Paket A	98,60	99,42	100	98,48	98,53	98,62	98,32	98,43	98,48	98,97	98,62	Hijau
		e. APK SMP/SMPLB/MTs/Paket B	100,52	100,54	100,56	100,69	100,72	100,74	100,54	100,69	100,69	100,73	100,74	Hijau
		f. APM SMP/SMPLB/MTs/Paket B	79	79,2	79,3	79,51	79,75	80	77,83	79,51	79,51	80,11	80	Hijau
		g. Angka Putus Sekolah SD/SDLB/MI	0,11	0,09	0,08	0,07	0,06	0,05	0,09	0,077	0,07	0,060	0,05	Merah
		h. Angka Putus Sekolah SMP/SMPLB/MTs	0,34	0,3	0,25	0,2	0,15	0,1	0,3	0,232	0,20	0,19	0,10	Merah
		i. Angka Kelulusan SD/SDLB/MI	99,95	99,96	99,97	99,99	99,99	99,99	99,95	99,99	99,99	99,99	99,99	Hijau
		j. Angka Kelulusan SMP/MTs/SMPLB	99,17	99,17	99,19	99,81	99,81	99,81	99,98	99,81	99,81	99,99	99,81	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US		
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17		
		k % Ruang kelas SD/MI sesuai standar nasional pendidikan	64,5	64,5	65	67,97	70	70,5				67,97	67,97	70,15	70,5	Hijau
		l. % Ruang kelas SMP/MTs sesuai standar nasional pendidikan	78,4	78,4	79	79,55	80,25	80,75				79,36	79,55	80,50	80,75	Hijau
		m . % SD/MI yang memiliki perpustakaan sesuai standar	44,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	44,53			45,96	46,5	70,15	48,5	Hijau
		n. % SMP/MTs yang memiliki perpustakaan sesuai standar	73,22	76	78	80	82	84	76,01			78,43	80	80,50	84	Hijau
		o. % SD/MI yang memiliki sanitasi layak	48	69,5	70,5	71,5	72,5	73,5	69,52			71,32	71,5	82,12	73,5	Hijau
		p. % SMP/MTs yang memiliki sanitasi layak	50	68,1	70,1	72,25	76,12	80	68,19			70,92	72,25	76,16	80	Hijau
		q Angka lulus pendidikan kesetaraan paket A	94,47	95,35	95,4	95,45	95,5	96	98,2			98,22	95,45	96,16	96	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		r Angka lulus pendidikan kesetaraan paket B	90,8	96,2	96,25	96,3	96,35	96,5	94,33	99,78	96,3	96,39	96,5	Hijau
		s Angka lulus pendidikan kesetaraan paket C	75,2	98,2	98,25	98,3	98,4	98,5	92,28	99,74	98,3	98,41	98,5	Hijau
		t Persentase Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) berkinerja A dan	2	2,6	3,2	3,8	4,4	5	3	8,02	3,8	5,46	5	Hijau
		u Persentase Buta Aksara >15 tahun	4	3,5	3	2,5	2	1,5	3,4	2,57	2,5	1,98	1,5	Merah
		v Persentase Kecamatan memiliki PKBM dan TBM	14	15	15,5	16	17	17,5	17,92	46	16	51,32	17,5	Hijau
		w % perguruan tinggi yang terfasilitasi	10	25	30	35	45	50	48	51,55	35	56,08	50	Hijau
		x % sekolah/madrasah yang berwawasan kebangsaan	0,5	1,0	5,0	10	25,0	50	9,0	9,0	10,0	83,2	50,00	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		y % sekolah yang melaksanakan ekstrakurikuler pramuka	0,5	0,5	10,0	25	50,0	100	85,0	85,0	25,0	100	100	Hijau
2	Urusan Kesehatan													
	1. Program Pencegahan dan Penanggulang-an Penyakit	a. Angka Penemuan Kasus Baru TB yang Tercatat (CNR)	115	116	117	118	120	122	114	117	118	143,00	122	Hijau
		b. Angka Penemuan Kasus Baru HIV/AIDS	20	18	16	15	14	13	26,09	28,6	15	16,00	13	Hijau
		c. Angka Penemuan Kasus Baru Kusta	5,8	6	6,5	7	5,5	6	5,15	5,3	7	6,2	8	Merah
		d. Angka Penemuan Kasus Diare Balita	35	40	45	50	55	60	59,5	58,2	50	63,7	60	Hijau
		e. Angka Penemuan Kasus ISPA Balita	42	45	48	52	56	60	35,9	48,74	52	60,39	60	Hijau
		f. Angka Kesakitan Malaria	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,06	0,05	0,06	0,07	0,03	0,06	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		g. Proporsi Kasus Hipertensi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	<30	<30	<25	<25	<20	<20	52,9	23,4	<25	18,70	<20	Hijau
		h. Proporsi Kasus Diabetes Melitus di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (%)	<55	<55	<50	<50	<25	<20	15,1	17,40	<50	19,7	<45	Hijau
		i. AFP Rate (/100000)	2	2	2	2	2	2	2,29	2,01	2	3,22	3,22	Hijau
		j. Cakupan UCI (%)	98,9	98,9	98,9	99	99	99	99,48	100	99	99,80	99	Hijau
		k. Proporsi KLB PD31 (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Hijau
	2. Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan 6)	a. Proporsi sarana produksi dan distribusi di bidang farmasi dan perbekes sesuai standar (%)	55	60	65	70	75	80	72,79	77,13	70	85,75	80	Hijau
		b. Proporsi sarana pelayanan kefarmasian sesuai standar (%)	30	40	50	60	70	80	46,87	59,12	60	88,25	80	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		c. Proporsi Kab/Kota melakukan binwas makanan minuman sesuai standar (%)	28,57	42,86	57,14	71,43	85,71	100	71,43	85,71	71,43	100	100	Hijau
	3. Program Pelayanan Kesehatan 6)	a. Cakupan Pertolongan Persalinan nakes (%)	97,5	97,5	98	98	98,5	99	99,17	98,09	98	99,30	98,50	Hijau
		b. Cakupan Neonatal Komplikasi yg ditangani (%)	75	80	81	83	84	85	83,32	87,63	83	85,20	85,00	Hijau
		c. Cakupan kunjungan Bayi (%)	97	97	97,50	97,5	98	98	96,34	97,55	97,50	98,09	98,00	Hijau
		d. Prevalensi Gizi Buruk	0,08	0,05	0,05	0,05	0,04	0	0,03	0,04	0,05	0,03	0,04	Hijau
		e. Proporsi Puskesmas memiliki Ijin Operasional (%)	NA	10,00	25,00	50	75	100	45,00	65,71	50,00	100,00	100,00	Hijau
		f. Proporsi Puskesmas PONE D sesuai standar (%)	11,00	13,00	16,00	18	20,00	22	16,00	17,00	18,00	24,00	22,00	Hijau
		g. Proporsi Puskesmas	6,00	7,00	10,00	12	13,00	15	8,90	11,30	12,00	76,46	15,00	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		terakreditasi (%)												
		h. Rasio Puskesmas per jumlah penduduk	1: 38.110	1:37.50 0	1:37.00 0	1:3650 0	1:36.000	1:35.500	1:37.61 0	1:38.599	1:36.50 0	1:24922	1:35500	Hijau
		i. Proporsi RS yg memiliki ijin operasional (%)	98	43,7	60	79,26	97,41	100	100	100	79,26	100	100	Hijau
		j. Proporsi RS terakreditasi (%)	0,37	4,44	11,11	18,52	29,93	37,04	4,1	11,46	18,52	70,03	37,04	Hijau
		k. Proporsi RS terklasifikasi (%)	68,4	6,67	21,11	27,41	36,3	40	7,75	21,86	27,41	99,3	75	Hijau
		l. Proporsi RS PONEK terstandar (%)	6,16	16,33	24,49	28,57	32,65	40,82	16,1	24,52	28,57	54,34	50	Hijau
		m. NDR RSUD per mill	32,5	30,5	28,5	27	38	37,5	21,3	27,37	27	33,86	37,5	Hijau
		n. BOR RSJD (%)	63	65	70	73	75	65	74,86	64,68	73	66,56	65	Hijau
		o. LOS RSJD (%)	28	30	29	28	27	25	25,28	22,98	28	17,37	25,00	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		p. Cakupan Pelayanan Rawat Jalan RSJD (jiwa)	24.645	118.000	123.300	128.950	132.700	146.000	189.130	147.360	128.950	210.103	146.000	Hijau
		q. Cakupan Pelayanan Rawat Inap RSJD (jiwa)	3.146	10.200	10750	11.100	11440	11.900	13.084	7.548	11.900	13.464	11.900	Hijau
	4. Program Kesehatan Lingkungan	a. Desa melakukan STBM	2.147	2.247	2.347	2.447	2.547	2.697	2.347	4.392	2.697	7.467	2.697	Hijau
		b. Proporsi TTU yang memenuhi syarat (%)	77,00	78,00	79,00	80	81,00	82,00	78,00	79,00	82,00	83	82,00	Hijau
		c. Proporsi TPM yang memenuhi syarat (%)	50,00	53,00	56,00	59	62,00	65	53,00	56,51	65,00	65,26	65,00	Hijau
	5. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan	a. Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi (%)	80,5	81	81,5	82	82,5	83	81	85	83	100,00	83	Hijau
		b. Proporsi Pelatihan Kesehatan yg terakreditasi (%)	10,50	11,00	11,50	12	12,50	13	89,00	100	13,00	100,00	13,00	Hijau
		c. Proporsi Institusi Pendidikan Kesehatan yang terakreditasi (%)	50,50	51,00	51,50	52	52,50	53	75,00	80,00	53,00	90,08	53,00	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
6.	Program Promosi dan Pemberdayaan	a. Proporsi Rumah Tangga Sehat (%)	74,8	74,9	75	75,20	75,4	76	71,95	76,73	75,5	77,98	75,5	Hijau
		b. Proporsi Kab/Kota yg menerbitkan regulasi bid kesehatan (ASI,PSN, KTR) (%)	NA	5,71	11,43	17,43	17,14	29	5,71	11,43	28,57	100,00	28,57	Hijau
		c. Proporsi pasar yg menyediakan garam beryodium (%)	NA	70	70	70	70	70	70	70	70	70,00	70	Hijau
		d. Proporsi desa/kelurahan siaga aktif mandiri (%)	5,5	6	7	8	9	10	6,84	7,06	10	12,50	10	Hijau
		e. Proporsi penduduk miskin non kuota yang mempunyai JPK (%)	28,31	28,01	27,79	27,57	50	51	59,22	32,37	27,12	88,31	51	Hijau
		f. Persentase Kab/Kota mengalokasikan 10 % APBD untuk kesehatan (%)	11,42	14,2	17,14	20	22,85	26	20	22,85	25,71	91,00	25,71	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
	7. Program Manajemen, Informasi dan Regulasi Kesehatan	a. Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, evaluasi dan informasi kesehatan	21	21	21	21	21	21	21	21	21	22	21	Hijau
	8. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan (BLUD)	a. Persentase cakupan pelayanan BLUD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Hijau
3.	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang													
	1. Program Peningkatan Jalan dan Penggantian Jembatan 9)	a. Persentase panjang jalan dengan lebar \geq 6,00 m	50,44	54,14	59,00	75,55	77,46	77,87	55,24	66,46	75,55	77,87	77,87	Hijau
		b. Persentase panjang jembatan dengan lebar \geq 9,00 m	78,13	78,92	79,72	81,85	82,00	84,27	80,22	81,43	81,85	84,27	84,27	Hijau
		c. Persentase Panjang Jalan Provinsi sebagai jalan kolektor (MST \geq 8,0 Ton)	67,62	69,60	72,20	77,71	79,63	82,3	70,69	74,80	77,71	82,30	82,30	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		d. Persentase panjang Jembatan dengan beban sesuai standar Bina Marga	13,31	14,10	14,42	18,28	18,88	20,89	14,10	17,73	18,28	20,89	20,89	Hijau
	2. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	a. Persentase panjang jalan dalam kondisi baik	86,54	86,92	87,56	88,88	88,92	89,6	86,92	88,27	88,88	89,84	89,60	Hijau
		b. Persentase panjang jembatan dalam kondisi baik	79,00	79,72	81,24	82,76	83,61	85,8	79,72	81,98	82,76	94,60	85,80	Hijau
	3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	a. Persentase pemenuhan kebutuhan alat kebinamargaan (alat berat dan alat laboratorium)	83,33	84,26	85,66	87,05	88,28	89,84	48,58	82,33	87,05	89,84	89,84	Hijau
		b. Meningkatnya Persentase panjang jalan yang sudah dileger	73,46	76,00	80,60	85,20	89,80	94,6	81,87	84,88	85,20	94,60	94,60	Hijau
		c. Terfasilitasnya Prasarana dan Sarana Kebinamargaan	100	100	100	100	100	100	100	75	100	100	100	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		d. Terfasilitasinya pembangunan infrastruktur strategis	100	100	100	100	100	100	100	75	100	100	100	Hijau
	4. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa serta Jaringan Pengairan Lainnya	a. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	72,00	74,00	76,00	78,00	80,00	82,00	74,00	76,00	78,00	82,00	82,00	Hijau
	5. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air	a. Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	50,12	52,00	54,00	56,20	58,50	60,80%	52,33	54,49	56,20	60,89	60,80	Hijau
	6. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumberdaya Air lainnya	a. Persentase sungai dalam kondisi baik	51,66	51,76	51,86	51,96	52,06	52,16%	51,76	51,86	51,96	52,16	52,16	Hijau
	7. Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai	a. Luas Penurunan Daerah genangan akibat banjir (ha)	100% (167.000 Ha)	5.000	5.000	5.000	5000	5.000	5.139	5.188	5.000	141.801	25.000 (167.000 menjadi 142.000)	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		b. Terfasilitasinya peningkatan pengamanan pantai dan rob di wilayah Pantura	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Hijau
	8. Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perkotaan Dan Perdesaan	Prasarana dan sarana pendukung kegiatan perekonomian, kawasan perbatasan kab/kota dan kawasan strategis yang tertangani	40	13	14	14	1	2	1	2	1	4	3	Hijau
	9 Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi	Cakupan pelayanan air minum dan sanitasi:												
		a. Air Minum Perkotaan (%)	63,99	67,00	75,00	76,50	78,00	79,50	72,48	75,76	76,50	82,89	79,50	Hijau
		b. Air Minum Perdesaan (%)	49,13	50,50	52,80	67,00	71,00	72,50	65,57	68,00	67,00	74,78	72,50	Hijau
		c. Sanitasi (%)	64,50	69,00	72,00	76,97	80,00	81,50	76,94	77,00	76,97	82,00	81,50	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
10	Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi	Meningkatnya pengelolaan jasa konstruksi:												
		a. Jumlah uji dan penyebaran informasi jakon												
		- Sertifikasi Hasil Uji	573	400	400	400	400	400	899	1.426	1.671	2.301	2.000	Hijau
		- Informasi Konstruksi	2	3	3	3	4	4	2	4	3	17	17	Hijau
		b. Jumlah pelaku jasa konstruksi (orang)	585	630	710	790	970 orang	1.050	630	1.230	1.065	5.203	4.230	Hijau
11	Program Perencanaan Tata Ruang	a. Persentase KSP yang memiliki rencana tata ruang (RTR)	-	3,30	6,60	9,90	15,10	16,5	6,54	13,64	9,90	17,06	16,50	Hijau
		b. Persentase Kab/Kota terfasilitasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)	-	20,00	40,00	60,00	80	100	20,00	40,00	60,00	100,00	100,00	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
	12 Program Pemanfaatan dan Pengenda-lian Pemanfaatan Ruang	a. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang	62,00	63,00	64,00	66,00	68,00	70	63,00	63,00	66,00	70,12	70,00	Hijau
4.	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman													
	1 Program Pembangunan Perumahan	a. Rasio Rumah Layak Huni	76,67	76,73	76,74	76,75	78,74	78,78	78,67	78,67	76,75	80,56	78,78	Hijau
	2 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 9)	a. Persentase kawasan permukiman kumuh yang tertangani	7,80	12,83	14,88	16,92	14,03%	14,13	12,83	14,03	16,92	16,62	14,13	Hijau
5.	Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat													
	1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	a. Kondusivitas daerah provinsi dan kabupaten/kota di Jawa Tengah	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35,00	35,00	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
	2. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1)	a. Meningkatnya efektivitas penyelenggaraan pembangunan bidang wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala provinsi (Kab/Kota)	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	Hijau
	3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1)	a. Meningkatnya kapasitas aparatur kesbangpol tentang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kesbangpol)kebangsaan (jmlh aparatur	280	300	320	340	360	380	335	320	340	480	380	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
	4. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	a. Persentase Penanganan Konflik Sosial	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Hijau
		b. Pembentukan kader Tibumtranmas	-	1.350	1.350	1.350	1.350	675	5.184	1.416	1.350	9.300	6.075	Hijau
	5. Program Peningkatan Pendidikan Politik Masyarakat 1)	a. Persentase Penggunaan hak pilih dalam:												
		- Pemilu Legislatif	-	75,00	-	-	-	0	74,00	-	-	74,00	75,00	Hijau
		- Pemilu Presiden dan Wakil Presiden	-	75,00	-	-	-	0	71,25	-	-	71,25	75,00	Hijau
		- Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur	58,46	-	-	-	-	75	-	-	-	73,91	75,00	Hijau
		- Pilkada kabupaten/kota (%)	64,40	66,52	68,64	-	72,88	75	68,54	-	68,06	75,00	Hijau	
		b. Indeks Demokrasi Indonesia di Jawa Tengah	60,84	67,48	68,11	70	70,25	70,5	77,44	69,75	66,71	70,85	70,50	Hijau
	6. Program Peningkatan Kemampuan Perlindungan Masyarakat (LINMAS) dan Rakyat Terlatih (RATIH)	a. Rasio jumlah Ratih/ Linmas dengan jumlah penduduk	0,0084	0,0085	0,0086	0,0087	0,0088	0,0089	0,0085	0,0076	0,0087	0,0091	0,0089	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
	7. Program Pemeliharaan Kamtrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	a. Pengendalian dan penanganan ketenteraman dan ketertiban umum (kab/kota)	35	35	35	35	35 kab/kota	35	35	35	35	35	35	Hijau
6.	Urusan Sosial													
	1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	a. Jumlah PMKS yang ditangani	6.177	6.421	7.411	6.776	18.644	18.444	6.421	7.359	6.776	52.814,00	57.708	Hijau
		b. Jumlah perintis kemerdekaan/keluarganya, warakawuri dan veteran yang mendapatkan dukungan pelyanan kesejahteraan sosial	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	54	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
	2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 3)	a. Jumlah Panti yang melaksanakan standar pelayanan sesuai dengan SOP	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	Hijau
		b. Jumlah PMKS yang ditangani melalui panti sosial milik pemerintah (orang)	4.112	4.092	4.092	4.092	4.092	4.092	4.092	4.092	4.092	22.588	20	Hijau
		c. Jumlah Sarana dan Prasarana Sosial	10	10	10		10	10	10	12	12	47	52	Hijau
	3. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	a. Jumlah PMKS yang mendapatkan penanganan (orang)	18.075	33.712	34.807	35.352	38.136	37.936	34.157	34.807	35.352	204.143	179.943	Hijau
	4. Program Pemberdayaan Kelemba-gaan Kesejahtera-an Sosial	a. Jumlah PSKS yang memperoleh penguatan Kapasitas dalam penanganan PMKS dan UKS	2.200	2.298	2.368	2.468	3.207	3.229	2.493	2.528	2.468	18.919	14.995	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
	5. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	a. Jumlah TAGANA yang dikerahkan pada kejadian bencana	13	13	14	14 (302 orang)	15 (324 orang)	16 (346 Orang)	13400	14400	14 (324 orang)	182268	72972	Hijau
		b. Kabupaten/Kota memiliki prasarana penanggulangan bencana	35	35	35	35	35	35	32	35	35	35	35	Hijau
B.	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR													
1.	Urusan Tenaga Kerja													
	1. Program Peningkatan Kesempatan Kerja													
		a. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,02 (Agustus)	5,31-4,77	4,93-4,62	4,66-4,43	4,2	4,13	5,68	4,99	4,66-4,43	4,51	4,13	Hijau
		b. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	70,72 (Agustus)	72,27	72,58	72,90	73,22	73,55	69,68	67,86	72,90	68,56	73,55	Merah
		c. Rasio Kesempatan Kerja terhadap penduduk usia kerja	68,43	69,32	70,18	71,01	71,83	72,63	65,72	64,49	71,01	65,5	72,63	Merah
		d. Jumlah AKAN (orang)	84.700	85.000	85.300	85.500	62.900	60.500	92.631	57.107	49.581	395.152	379.200	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
	2. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	a. Produktivitas tenaga kerja (dalam juta rupiah)	13,9	14,43	14,91	15,63	53,5	56,00	55,93 (KLUI 21Sektor)	49,16	15,63	52,01	56	Merah
		b. Laju PDRB per tenaga kerja (%)	13,9	14,43	14,91	15,63	4,9	4,90	11,13 (KLUI 21Sektor)	6,18	15,63	5,41	4,9	Hijau
		c. Proporsi tenaga kerja yang berusaha sendiri dan pekerja bebas keluarga terhadap total kesempatan kerja	38,48	37,27	36,08	34,91	33,77	32,68	31,96	30,50	34,91	31,64	32,68	Hijau
	3. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	a. Rasio Upah Minimum Kabupaten/Kota dibanding KHL (%)	97,3	97,4	97,5	97,6	97,7	97,8	98,96	100,33	97,6	119,02	97,8	Hijau
		b. Jumlah Kasus dan Status Penyelesaian HI	4.000	3.500	3.000	2.500	2.000	1.500	2.721	2.301	1.285	12.499	12.500	Hijau
2.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak													
	1. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan kualitas anak dan perempuan	a. Jumlah kebijakan perlindungan hak perempuan hak perempuan	5	1	1	1	1	1	3 (Dokumen)	2 (Dokumen)	1	7	3	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
	2. Program Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	a. Rasio Program dan Kegiatan responsif gender di OPD Provinsi (%)	35	40	48	58	63	68	41	47	51,6	68	68	Hijau
		b. Rasio Anggaran responsif gender di OPD Provinsi (%)	14,1	16,3	19,2	23,2	26,1	28,3	1,29	1,6	32	32	28,3	Hijau
		c. Rasio kabupaten/kota yang dan menerapkan kebijakan responsif gender dalam RPJMD, Renstra OPD dan Renja OPD (%)	62,85	62,85	65,99	69,28	72,74	76,37	65,71	65,99	100	100	76,37	Hijau
	3. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	66,8	67,63	68,22	68,81	69,40	69,99	91,89	NA	92,21	92,21	69,99	Hijau
		b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	69,06	69,99	70,49	70,99	71,49	71,99	74,46	NA	74,8	74,8	71,99	Hijau
		c. Rasio Kabupaten/kota Menuju Kota Layak Anak	48,6	62,8	77,1	2,4	100	100	80	88,57	94,3	100	100	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		d. Rasio Kab/Kota yg memenuhi perlindungan anak, kesejahteraan dan hak anak	2,8 : 2,8	5,7; 2,8	11,4; 5,7	17,1:8,6	22,8;11,4	28,6;14,3	5,7 : 2,8	11,4 : 5,7	62,86;62,86	82,5;82,5	28,6:14,3	Hijau
		e. Rasio KDRT pada perempuan dan anak	0,03	0,028	0,026	0,022	0,019	0,017	0,009	0,0059	0,014	0,0064	0,017	Hijau
	4 Program Peningkatan Peran serta Anak dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan	a. Rasio Forum Anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan	11,4	14,3	28,6	42,9	57,1	71,4	14,3	28,6	42,9	83,33	71,4	Hijau
3.	Urusan Pangan													
	1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan													
		a. Jumlah regulasi kedaulatan pangan	6	1	1	1	1	1	1	1	1	11	11	Hijau
		b. Ketersediaan pangan utama (ton beras)	5.701.257	5.724.620	5.746.958	5.769.946	5.793.026	5.816.198	5.732.400	6.562.656	5.769.946	6.897.339	5.816.198	Hijau
		c. Persentase Penguatan cadangan pangan	60	75	80,00	90,00	95,00	100	100,24	130,57	90,00	137,29	100,00	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		d. Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, harga dan akses pangan di daerah	95,00	97,00	100	100	100	100	97,22	100	100	100	100	Hijau
		e. Persentase Penanganan daerah rawan pangan	50,00	55,00	60,00	60,00	60,00	60	56,25	61,29	60,00	100,00	60,00	Hijau
	2. Program Pengembangan Diversifikasi dan Pola Konsumsi Pangan	a. Skor PPH	90	90,75	91,13	91,50	86,00	87,00	91,78	91,45	91,50	87,30	87,00	Hijau
	3. Program Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	a. Persentase Pengawasan dan Pembinaan keamanan pangan	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80	86,60	92,42	80,00	96,93	80,00	Hijau
4.	Urusan Pertanian													
	1. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah	a. Meningkatkan Bidang tanah yang terpetakan (bidang tanah yang terpetakan): · Identifikasi HGU	48	10	10	16	16	15	10	12	16	67	67	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		· Identifikasi HGB	35	8	8	0	0	0	8	8	0	16	16	Hijau
		· Identifikasi HP	55	10	10	14	16	17	10	10	14	67	67	Hijau
		b. Tersesainya konflik-konflik pertanahan (jumlah konflik)	48	7	13	12	8	10	7	13	12	52,00	50	Hijau
		c. Tergantikannya tanah kas desa untuk pembangunan kepentingan umum dg tanah yang lebih baik nilainya	1.360.821 dengan 1.832.032	173.550	212.079	124.824	173.550	124824 dg 181.436	285.306 dengan 350.810	329.754 dengan 474.844	124.824 dengan 181.439	326521 dengan 385.660 dan UGR Rp. 27.531.733.609	808.827 dengan 1.198.368	Hijau
		d. Jumlah sertifikasi tanah masyarakat dalam kawasan lindung LP2B	15.183	1.500	1.750	1250	1500 bidang	1500 bidang	900	1.750	1.334	7.750	7.750	Hijau
5.	Urusan Lingkungan Hidup													
	1. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan	a. Informasi status mutu air (SPM)	100 (6)	100	100	100	100	100	100 (7)	100 (8)	100	100	100	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		b. Persentase pengaduan akibat dugaan pencemaran/kerusakan lingkungan yang ditindaklanjuti (SPM)	100 (2012)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Hijau
		c. Terlaksananya pengendalian dan pengawasan terhadap sumber pencemaran pada UMKM/obyek Terlaksananya pengendalian dan pengawasan thd sumber domestik dan usaha dan/atau kegiatan menengah/besar serta penanganan pemukiman kumuh	27 UMKM/ Obyek domestik	8 UMKM/ Obyek	8 UMKM/ Obyek	8 UMKM/ Obyek	8 UMKM/ Obyek	8 UMKM/ Obyek Domestik	28	18	8 UMKM/ Obyek domestik	71 UMKM/ Obyek	40 UMKM/ Obyek domestik	Hijau
			190 Usaha dan/atau Kegiatan	205 Usaha	220 Usaha	235 Usaha	250 Usaha	265 Usaha dan/atau	175	243	235 Usaha dan/atau	268 Usaha	268 Usaha dan/atau	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
								Kegiatan			Kegiata n		kegiatan	
			Obyek Kumuh Nihil	1 Obyek Kumuh	1 Obyek Kumuh	1 Obyek Kumuh	1 Obyek Kumuh	1 Obyek Kumuh	1	1	1 Obyek Kumuh	5 Obyek Kumuh	5 Obyek Kumuh	Hijau
				2 Bank Sampah	2 Bank Sampah	2 Bank	2 Bank	2 Bank Sampah		5	2 Bank Sampah	18 Bank Sampah	10 Bank Sampah	Hijau
		d. Terlaksananya pembinaan perbaikan kinerja pengelolaan B-3 dan limbah B-3 bagi pelaku usaha dan/kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (di luar Proper) (pelaku)	175	100	100	100	100 pelaku	100 pelaku	150	120	125	655	500	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		e. Pengawasan pelaksanaan dan pengelolaan lingkungan hidup bagi usaha dan/keg wajib AMDAL atau UKL-UPL (usaha/keg)	7	9	10	12	11	8 usaha/keg	12	33	12	76	50	Hijau
	2. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	a. Penanaman bibit tanaman konservasi di kawasan lindung di luar kawasan hutan (ha)	450	220	220	220	220	220	233	199,19	220	1162,89	1.100	Hijau
		b. Penanaman tanaman unggulan lokal daerah/ tanaman langka (jenis)	22	20	20	15	15	15	80	50	15	175	85	Hijau
	3. Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 10)	a. Jumlah luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di wilayah perkotaan (ha)	70	40	40	40	40	40	66,03	77,01	40	263,04	200	Hijau
	4. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 10)	a. Tanaman penghijauan di wilayah pesisir (ha)	40	40	40	40	40	40	55	59,33	40	234,33	200	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		b. Persentase Informasi status mutu udara ambien (SPM)	35	35	35	35	100	100,00	35	35	35	100,00	100	Hijau
		c. Lokasi lahan bekas pertambangan yg direklamasi	6	3	2	2	2	2	5	0	2	21,00	14,00	Hijau
		d. Pembangunan sumur pantau (unit)	11	6	5	5	5	5	6	6	5	29,00	26	Hijau
	5. Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	a. Peningkatan kapasitas SDM dan kelem-bagaannya	9	12	17	21	22	24	95	149	21	24,00	24	Hijau
	6. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam	a. Tersedianya informasi lingkungan hidup Jawa Tengah (jenis)	3	3	3	3	3	3	2	2	3	3,00	3	Hijau
6.	Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
	1. Program Penataan Administrasi Kependudukan	a. Rasio penduduk memiliki e- KTP per wajib e-KTP (%)	85,17 juli 2013) (sampai 9	100	100	100	100	100	88,07	89,87	99,03	93,40	100	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		b. Persentase Penduduk 0 - 18 Tahun memiliki Akta Kelahiran	31,49	45	55	65	85	90	81,37	81,37	82,5	88,72	90	Hijau
		c. Jumlah kabupaten/kota mengoperasikan SIAK	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	Hijau
7.	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa													
	1. Program Fasilitasi Pengembangan Masyarakat dan Desa	a. Jumlah LPMD/K yang dilatih (orang)	8.578	70	70	150	150 orang	150 orang	0	70	330	700	520	Hijau
		b. Jumlah Modul yang disusun dan anggota BPD yang dilatih (orang)	-	-	-	300	500	-	-	150	824	800	Hijau	
		c. Kebijakan dan jumlah Desa yang uji coba/pilot model (desa)	-	-	-	75	75	-	-	-	242	150	Hijau	
		d. Jumlah Desa Mandiri/Berdikari (desa)	NA	-	6	55	100 Pendampingan	pendampingan 100	-	45	100	100	100	Hijau
	2 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat 4)	a. Meningkatnya Kepedulian Pokmas terhadap budaya kearifan lokal (pokmas)	-	-	-	-	6	12	-	-	30	80	18	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		b. Persentase PKK aktif di kab/kota	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Hijau
		c. Jumlah Posyandu Model/Integrasi yang dibina	15.838	500	750	700	770	900	500	750	700	4120	3.620	Hijau
	3 Program Penguatan Kelembagaan Masyarakat	a. Jumlah BUMDes yang difasilitasi (unit)	119	148	183	29 (fasilitasi)	20	29	153	0	55 (fasilitasi)	176	58	Hijau
		b. Jumlah lembaga ekonomi masyarakat yang difasilitasi menjadi badan hukum bagi lembaga ekonomi di pedesaan (UED-SP, UP2K-PKK)	-	-	-	-	58	58	-	-	-	58	58	Hijau
8.	Urusan Pengendalian Penduduk dan KB													
	1. Program Pelayanan Keluarga Berencana	a. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/Peserta KB Aktif (%)	76	77	78	79	79,50	80	78,57	78,24	78,64	74,89	80	Hijau
		b. DO KB (%)	15,09	14,75	14,5	14	13,75	13,50	15,02	13,99	13,99	9,89	13,50	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		c. Unmet Need (%)	10,26	10,00	9,75	9,5	9,25	9	10,56	10,48	9,95	13,59	9,00	Merah
	2. Program Peningkatan Kesehatan Reproduksi Remaja	a. Persentase usia perkawinan perempuan Pasangan Usia Subur (PUS) kurang dari 20 tahun	2,22	2,21	2,2	2,19	2,18	2,17	2,42	1,05	2,19	1,08	2,17	Hijau
	3. Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu dan PAUD	a. Persentase Kelompok BKB Aktif	-	-	-	-	96,45	96,50	-	-	-	95,87	96,50	Hijau
	4. Pembinaan Peran serta masyarakat dalam Pelayanan KB Mandiri	a. Jumlah KB Mandiri	2.964.527	2.994.172,27	3.024.113	3.054.355	3.084.898	3.115.747	2.858.375	2.812.891	3.054.355	3.851.572	3.115.747	Hijau
		b. Persentase UPPKS ber KB	82,97	83,5	83,75	84	84,25	84,50	98,44	81,15	81,97	80,29	84,50	Hijau
	5. Program Promosi Kesehatan Ibu Bayi dan Anak melalui Kelompok Bina Keluarga dan Bina Balita	a. Persentase kabupaten/ kota yang telah membentuk jaringan KB/KS	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100	Hijau
9.	Urusan Perhubungan													
	1. Program Pengembangan Perhubungan Darat	a. Persentase perijinan AKDP	100	100	100	100	100	100	100	75,00	100	100	100	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		b. Jumlah Kab/Kota yang melakukan pengembangan Angkutan Umum dan Massal di Jateng	1 Kab, 1 Kota	1 Kota	2 kota	2	2 kota 1 kab.	2 kota		1 Kota Semarang , 1 Kota Surakarta , 1 kawasan Barlingm ascakeb	2 kota	3	3 kab/ kota	Hijau
		c. Jumlah Desa yang terlayani angkutan pedesaan perintis	-	-	1	1	2	2 trayek (7 desa)	1	2	1	7	4	Hijau
		d. Meningkatkan Ketersediaan Prasarana Keselamatan :												
		- jalan provinsi (%)	18,71	22,00	34,00	47,00	54,00	60,00	37,80	42,39	47,00	92,15	60,00	Hijau
		- perlintasan kereta api di jalan provinsi (lokasi)	43	9	25	25	25 lokasi	25 lokasi	12	15	47	167	152	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		e. Meningkatkan Pengembangan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)	Waduk Malahayu, Sempor, Wadaslintas , Kd.Ombo, Gajahmungkur, Cacaban,Rawapening, Mrica	Serayu, Semarang,	Kendal, Jepara,	Waduk Mrica dan	5 (Waduk Mrica	2 (Sungai Bengawan, Solo,Serayu)	3 Paket	3 Lok	Waduk Mrica dan waduk Penjalin , Malahayu, sempor, Jepara, Kendal	19	10 Lok	Merah
		f. Jumlah terminal type B dioperasikan	-	-	-	-	3	5	-	-	-	24	8	Hijau
		g. Terlaksananya fasilitas Pengembangan Perkeretaapian (%)	100	100	100	100	100	100	100	75,00	100	100	100	Hijau
	2. Program Pengembangan Perhubungan Laut 9)	a. Beroperasinya Kapal KMC Kartini 1 dan Kemujan	KMC Kartini 312 trip/th dan Kemujan 108 trip/th	312 trip/th dan 108	312 trip/th dan	312 trip/th dan	64 trip	KMC Kartini 64 Trip/th	KMC Kartini I : 67 trip, KM Kemujan : 2 Trip	KMC Kartini I : 100 Trip; KM. Kemujan : 2 Trip	30 trip/th dan 0 trip	27 Trip KMC Kartini 52 Trip Kemujan	KMC Kartini I : 64 trip/Th & Kemujan 108 trip/Th	Merah

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		b. Meningkatkan Ketersediaan Fasilitas Ketersediaan Fasilitas Pelabuhan Kendal	Terbangunn ya lapangan penumpuka n seluas 200x126,5 m	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	0	0	75,00	1 paket	1	Kewajib an Pemprov Jateng utk Pamban gunan Pelabuhan Kendal terpenu hi tahun 2017	Hijau
		c. Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Pelabuhan dan Keselamatan Pelayaran (%)	100	100	100	100	100	100	100	75,00	100	100	100	Hijau
	3 Program Pos, Telekomunikasi dan SAR 9)	a. Terlaksananya fasilitas Pengembangan pelayanan Pos, Telekomunikasi dan SAR	100	100	100	100	100	100	100	75,00	100	100	100	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
10	Urusan Komunikasi dan Informatika													
	1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	a. Jumlah kabupaten/kota yang membentuk lembaga Forum Komunikasi Media Tradisional (FK Metra)	11	3	5	5	5	6	3	2	5	35	35	Hijau
	2 Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	a. Persentase kegiatan lembaga penyiaran yang sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku	68,55	70,00	75,00	80,00	95	100	70,00	75,00	80,00	100,00	100,00	Hijau
		b. Persentase pelayanan pengaturan bidang penyiaran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		c. SKPD bidang kominfo yang melakukan sosialisasi kebijakan nasional	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
	3 Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi	a. Jumlah kajian dan penelitian untuk menetapkan kebijakan di bidang Kominfo	5	5	5	3	3	3	8	4	7	25,00	19	Hijau
	4 Program Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	a. Persentase SKPD yang mengembangkan teknologi informasi	58 (2012)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Hijau
		b. Persentase SKPD yang telah mengupdate data di website nya hingga tahun n-1	85 (2012)	85	90	95	97	100	94	75	95	100	100	Hijau
11	Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah													
	1. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi dan UMKM	a. Persentase Koperasi Aktif	79,73	80,71	81,05	81,45	81,90	82,50	80,71	81,69	81,45	82,50	82,5	Hijau
		b. Persentase Koperasi Sehat	15,02	15,70	16,20	17,15	18,3	19,50	15,96	18,11	17,15	20,38	19,5	Hijau
		c. Persentase Koperasi Provinsi Berkualitas	-	32,75	43,00	52,00	61	71	40,41	40,45	52,00	71,5	71,00	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
	2. Program Pengembangan Produk Unggulan Daerah Berbasis Sumber Daya Lokal	a. Jumlah Produk/komoditas OVOP (komoditas)	70	105	140	175	210	245	105	140	175	245	245	Hijau
	3. Program Pengembangan Akses Permodalan dan Efektivitas Pembiayaan	a. Persentase UMKM yang telah mengakses kredit usaha	17,97	22,00	24,00	25,00	25,50	25,80	28,78	29,65	25,00	40,77	25,80	Hijau
	4. Program Peningkatan Produktivitas Pemasaran dan Jaringan Usaha	a. Jangkauan Pemasaran Produk KUMKM	5 prov	7prov	10 prov,1 LN	13 prov, 2 LN	16 prov, 3 LN	19 prov, 4 LN	7 Provinsi	7 Prov; 1 LN	13 prov, 2 LN	26 Prov, 8 LN	19 prov, 4 LN	Hijau
	5. Program Peningkatan kualitas SDM Koperasi dan UMKM	a. Jumlah SDM KUMKM yang terlatih (orang)	11.912	12.950	14.175	15.625	17.375	19.575	13.140	13.900	15.625	19.600	19.575	Hijau
12	Urusan Penanaman Modal													
	1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	a. Jumlah Usaha Menengah Besar yang Bermitra dengan Usaha Menengah Kecil	-	-	-	-	70	75	-	-	-	264	145	Hijau
		b. Rasio Jumlah Ijin Prinsip dan terhadap Jumlah Kepeminatan	-	-	-	-	20	25,00	-	-	-	80,89	45	Hijau
	2. Program Peningkatan Iklim Investasi	a. Pertumbuhan Proyek PMA dan PMDN (%)	-	-	-	-	10	12	-	-	-	33,14	12	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		b. Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	-	-	-	-	10	12	-	-	-	27,01	12	Hijau
		c. - Penyelesaian Izin dan Non Perizinan sesuai SOP (%)	-	-	-	-	85	90	-	-	-	96,90	99,95	Hijau
		d. -Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik (%)	-	-	-	-	85	90	-	-	-	84,65	90	Hijau
		e. Tersesainya pengaduan masyarakat terhadap pelayanan publik (%)	-	-	-	-	100	100	-	-	-	100,00	100	Hijau
		f. Penyederhanaan Perijinan dan Penyusunan SOP Pelayanan Perijinan (Unit Jenis/Non Ijin)	-	-	-	-	10	15	-	-	-	17	15	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		g Elektronik service yang terbangun untuk percepatan pengurusan pelayanan perijinan, keterbukaan informasi publik dan mendorong peningkatan realisasi investasi (paket)	-	-	-	-	4	6	-	-	-	6	6	Hijau
		h - % Proyek penanaman modal 'sesuai jadwal	-	-	-	-	20	25	-	-	-	25,6	25	Hijau
		i - %Penyelesaian permasalahan penanaman modal lintas sektor	-	-	-	-	80	90	-	-	-	100	90	Hijau
		j - % pelanggaran ketentuan penanaman modal	-	-	-	-	10	5	-	-	-	6,28	5	Merah
		k - Proyek penanaman modal yang 'gagal	-	-	-	-	30	20	-	-	-	0,99	20	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		l Rasio perusahaan yang memperluas penanaman modal terhadap perusahaan yang dilakukan pembinaan	-	-	-	-	10	20	-	-	-	18,06	20	Merah
		m - Database penanaman modal yang terbangun	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	Hijau
		n - Terlayani permintaan layanan informasi publik penanaman	-	-	-	-	100	100	-	-	-	100	100	Hijau
-	- -	o Terwujudnya sistem informasi layanan publik tentang penanaman modal dan pemanfaatan media sosial (web/twitter/sms/dll)(paket)	=	=	=	=	<u>1</u>	<u>1</u>	=	=	=	<u>1</u>	<u>1</u>	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
	3. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	a. Tersedianya Informasi Peluang Usaha Sektor/Bidang Usaha Unggulan (sektor/bidang/usaha/tahun)	1	1	1	1	3	3	2	2	2	12	10	Hijau
		b. Tersedianya rencana umum penanaman modal tahunan dan jangka menengah (dokumen)	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	2	Hijau
		c. Tersedianya wilayah peruntukan pengembangan penanaman modal (satuan kawasan/wilayah kab/kota)	-	-	-	-	4	6	-	-	-	6	6	Hijau
13	Urusan Kepemudaan dan Olahraga													
	1. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kepemudaan dan Olahraga	Meningkatnya kinerja manajemen dan harmonisasi kebijakan kepemudaan dan keolahragaan												

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		a. Jumlah fasilitasi Pengembangan Kemitraan	105 orang dan 2 paket	210 orang dan 3	210 orang dan 3	210 orang	210 orang	210 orang dan 3	210 Orang dan 3 paket	350 orang dan 3 paket	210 orang dan 3 paket	351 dan 1 Paket	210 orang dan 3 paket	Hijau
	2. Program Peningkatan Penysadaran dan Pemberdayaan Kepemudaan	Meningkatnya partisipasi/peran aktif pemuda dalam pembangunan												
		a. Jumlah Pengembangan Kepedulian Kepeloporan Pemuda (PKKP)	40	-	-	60	60	70	40	50	60	410	280	Hijau
		b. Jumlah Organisasi Pemuda yang difasilitasi dalam pelatihan kepemimpinan, manajemen, dan perencanaan program	55	-	-	-	63	65	59	62	62	65	65	Hijau
	3. Program Peningkatan Kewirausahaan dan	Meningkatnya kewirausahaan dan ketrampilan/kecakapan hidup pemuda												

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		a. Jumlah Kewirausahaan Pemuda	380 orang dan 80 kelompok	560 orang	650 orang	255 orang	2000 orang	2000 orang	560 orang 113 kelompok	575 orang 34 kelompok	255 orang dan 28 kelompok	5.770	5.465 orang	Merah
							-	-				175	193 kelompok	
	4. Program Pembibitan, Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Meningkatnya pembibitan atlet, prestasi dan budaya olahraga												
		a. Jumlah partisipasi kompetisi keolahragaan dan fasilitasi olahraga pendidikan, rekreasi dan tradisional (orang)					75.754	42669			27.106	42.700	42.669	Hijau
		b. Jumlah atlet yg dibina melalui PPLPD (atlet)	120 (2012)	142	150	160	165 atlet	170 atlet	142	160	160	170	170	Hijau
		c. Jumlah Cabang Olahraga Unggulan	8 cabor	-	-	-	10	12	-	-	10	12	12 cabor	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
	5. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/Organisasi Olahraga	Meningkatnya kualitas kapasitas kelembagaan organisasi olahraga												
		a. Peningkatan kualitas SDM Olahraga, mutu manajemen organisasi olahraga, pengembangan IPTEK dan industri olahraga (orang)	1.290	1.430	1.545	1545	1.545 orang	1545 orang	1.430	1.579	1.545	1.615	1.545	Hijau
	6. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keolahragaan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana keolahragaan												
		a. Jumlah Klub Olah Raga	105	105	105	105	105	105	254	87	105	662	525	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		b. Jumlah peningkatan venue Jatidiri			1 master plan, 1 DED		2 Venue (stadion	2 Venue (asrama		1 masterplan, 1 DED	4 DED (GOR, SKO, Asrama Atlet, Gedung Terpadu II), 2 venue (GOR dan Stadion tahap I)	5	5 DED, 4 Venue	Hijau
14	Urusan Statistik													
	1. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah	Tersedianya data statistik umum, dasar, dan sektoral skala provinsi												
		JDA (dokumen)	1	1	1	1	1 dokumen	1 dokumen	1	1	1	5	5	Hijau
		a. PDRB Provinsi (dokumen)	1	1	1	1	1 dokumen	1 dokumen	1	1	1	5	5	Hijau
		b. Tabel I-O (dokumen)	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	Hijau
		c. Tinjauan PDRB Kab/Kota (dokumen)	1	1	1	1	1 dokumen	1 dokumen	1	1	1	5	5	Hijau
		d.												

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
15	Urusan Persandian													
	1. Program Peningkatan Persandian Daerah	a. Persentase Perangkat Daerah yang mengimplementasikan pengamanan informasi dan persandian	-	-	-	-	100	100	-	-	0	100	100	Hijau
16	Urusan Kebudayaan													
	1. Program Pembinaan Tradisi, Kesenian dan Nilai Budaya 11)	Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai tradisi, kesenian dan budaya daerah :												
		a. Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya (kali)	8	7	7	7	7	8	7	8	7	7	8	Merah
		b. Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya (lokasi)	2	8	8	8	8	9	8	9	8	8	9	Merah
		c. Jumlah regulasi pengembangan kebudayaan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		d. Cakupan kelompok budaya yang dibina	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745	Hijau
		e. Cakupan SDM Kesenian (jumlah seniman yang dibina sejarah-wan, ahli keurbakalaan)	11.269	4.725 orang	175	175 kelompok (4,725 Orang)	175 Kelompok (4,725 Orang)	175 Kelompok (4725 orang)	12.176 orang	175 kelompok 18.058 orang	175 kelompok 4.725 orang	175 kelompok 32570 orang	175 Kelompok 22.508 orang	Hijau
		f. Cakupan fasilitas seni	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Hijau
		g. Cakupan tempat kesenian (lokasi)	3	3	3	4	7	9	3	3	4	9	9	Hijau
		h. Jumlah misi kesenian (pengiriman seni ke LN)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	Hijau
		i. Cakupan kajian seni	1	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	Hijau
		j. Cakupan gelar seni:	20 Kab/Kota	30 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab/Kota	35 Kab / Kota	35 Kab / Kota	35 Kab/Kota	35	35 Kab/Kota	Hijau
		- jumlah pagelaran,pameran, festival, lomba dan	2 kali	2 kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 Kali	2 kali	2 Kali	2	2 Kali	Hijau
		k. Jumlah kelompok kesenian	9.857	35	35	35	35 kab/Kota	35 kab/Kota (9.857 orang)	35 (9.857 orang)	35 (11.014 orang)	35	35 (30897 orang)	35 (30.728 orang)	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
	2. Program Pelestarian dan Pengembangan Kesenian dan Cagar Budaya	Terpeliharanya pelestarian kesenian dan BCB daerah												
	a. Jumlah cagar budaya yang dilestarikan :													
	- jumlah cagar budaya (situs)	199	200	200	200	200	200	200	228	228	200	319	200	Hijau
	- jumlah cagar budaya yang dilestarikan (candi, situs) lokasi	4	5	5	5	5	5	5	8	6	5	29	25	Hijau
	- Persentase (%)	2,01	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	3,51	2,63	2,5	13,64	12,5	Hijau
	b. Jumlah warisan budaya dunia nasional yang ditetapkan dan dikelola secara terpadu	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Hijau
	c. Jumlah situs/kawasan yang diinventarisir dan ditetapkan	143	200	200	200	200	200	200	549	1.757	200	2.500	1.000	Hijau
	d. Jumlah museum yang dioptimalkan	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	16	8	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US	
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17	
		e. Jumlah pengunjung museum	1.201.642	1.300.000	1.400.000	1.500.000	1.600.000	1.800.000	1.800.275	1.137.532	1.500.000	1.878.612	1.800.000	Hijau	
	3. Program Pembinaan Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	Meningkatnya penghayatan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa													
		- Jumlah organisasi penghayat dan upacara tradisional di Jateng:													
		a. Jumlah penghayat (orang)	188.172	188.172	188.172	188.172	188.172	188.172	188.172	188.172	188,324	188.172	188.172	188.172	Hijau
		b. Jumlah organisasi penghayat	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	68	Hijau
		c. Jumlah upacara tradisional	190	190	190	190	190	190	190	201	201	190	190	190	Hijau
17	Urusan Perpustakaan														
	1. Program Pengembangan Budaya Baca	a. Jumlah pengunjung perpustakaan provinsi per tahun (orang)	732.050	768.653	807.085	847.439	889.811	934.302	781.169	956.082	1.035.290	3.041.019	934.302	Hijau	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		b. Jumlah pendataan dan pemberian Nomor Pokok Perpustakaan	700	525	525	525	525 perpus	525 perpus	569	525	525	2.669	2.625	Hijau
	2. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Perpustakaan	a. Jumlah perpustakaan penerima bantuan rak dan koleksi buku (perpusling)	35 perpusling	35 perpusling	35 perpusling	35 perpusling	35 perpusling	35 perpusling	35 Perpusling	35 perpusling	35 perpusling	35 perpusling	35 perpusling	Hijau
		b. Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Provinsi (eksemplar)	203.126	213.282	223.946	235144	246.901	259.246	219.626	251.129	256.364	294.244	259.246	Hijau
	3. Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perpustakaan	a. Jumlah SDM perpustakaan yang telah mengikuti bintek (orang)	210	105	105	105	105 orang	105 orang	210	105	105	630	525	Hijau
	4. Program Pengembangan Manajemen Perpustakaan	a. Jumlah pengembangan perpustakaan se Jateng (kab/kota)	35	35	35	35	35 kab/kota	35 kab/kota	35	35	35	35	35	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
18	Urusan Kearsipan													
	1. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan	a. Jumlah SKPD/UPTD yang melakukan pengelolaan arsip secara baku	50	12	12	12	12	12	12	12	12	60	60	Hijau
		b. Peningkatan kualitas SDM Pengelola Kearsipan melalui Bintek	250 SDM Pengelola Kearsipan	250	250	250	250	250	250	250	250	1355	1.250	Hijau
	2. Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah	a. Jumlah arsip yang dilestarikan (arsip)	75.000	3.000	3.500	4.000	4.500 arsip	5.000 arsip	10.000	88.256	45.889	231.915	95.000	Hijau
	3. Program Peningkatan Pemasyarakatan Kearsipan Kepada Masyarakat	a. Jumlah Media pemasyarakatan Kearsipan	5	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	Hijau
	4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi	a. Jumlah pengunjung/ pengguna arsip	1.534	2.400	2.700	2900	3.100	3.300	3.708	3272	2.900	19.791	14.400	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
	URUSAN PILIHAN													
1.	Urusan Kelautan dan Perikanan													
	1 Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Pesisir	a. Rata-rata Pendapatan Pemberdayaan Wanita Pesisir (Rp/Kap/Th)	2.742.951,61	2.849.926,73	2.961.073,87	3.076.555,75	6.800.000	7.600.000	5.528.000	5.704.000	6.008.400,00	8.595.784,80	7.600.000	Hijau
		b. Rata-rata Pendapatan taruna Pesisir (Rp/Kap/Th)	4.133.005,79	4.300.805,83	4.475.418,54	4.657.120,53	9.000.000	10.000.000	4.800.000	5.085.000,00	5.343.750,00	10.632.242,95	10.000.000	Hijau
		c. Produksi Garam Rakyat (ton)		-	-	-	694.575	729.304				767.629	729.304	Hijau
	2 Program Perberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan													
		a. Jumlah Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumber Daya Kelautan yang Aktif (kelompok)	10	20	20	20	20	20	20	20	20	160	100	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
3	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	a. Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	243.694,50	296.663,00	306.868,21	317.424,48	283.714,75	293.474,54	270.158,30	359.468,00	327.625,00	446.277,16	293.474,54	Hijau
		b. Rata-rata Pendapatan Nelayan (Rp/Kap/Th)	10.765.779,48	11.566.477,04	12.546.157,65	13.608.817,20	11.718.192,54	12.710.723,45	14.200.605,94	32.657.488,12	41.319.676,00	61.150.319,76	12.710.723,50	Hijau
4	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	a. Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	315.458,68	288.084,05	309.949,63	333.474,81	463.123,90	509.436,29	501.811,74	421.021,73	448.897,00	510.324,49	509.436,29	Hijau
		b.	23.160.988,43	16.339.722,52	17.298.864,23	18.314.307,57	32.587.070,28	35.845.777,31	32.191.966,26	35.322.004,47	39.790.969,00	44.955.518,32	35.845.777,31	Hijau
5	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	a. Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kapita/tahun)	17,82	18,69	19,59	20,55	21,55	22,59	20,92	23,64	26,71	30,65	22,59	Hijau
		b. Ekspor Produk Perikanan (ton)	22.898,18	25.093,46	25.770,99	26.466,80	27.181,41	27.915,31	35.500,97	31.296,34	43.873,16	53.038,38	27.915,31	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
	6 Program rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan													
	a. Luas Penanaman Mangrove (Ha)	8,08	7,5	8,13	8,25	8,38	8,5	7,61	15,13	31	78,14	40,75	Hijau	
	b. Luas Terumbu Karang Buatan (Ha)	17,28	4,68	5,13	5,58	6,03	6,48	5,4	5,4	18,79	43,54	27,9	Hijau	
2.	Urusan Pariwisata													
	1. Program Pemasaran Pariwisata													
	a. Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara (orang)	26.502.007	27.827.107	29.218.463	33.679.386	34.123.356	34.825.055	29.852.095	33.030.843	33.679.386	36.954.257	34.825.055	Hijau	
	b. Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara (orang)	379.912	387.511	395.261	425.000	430.000	435.000	419.584	421.191	425.000	617.254	435.000	Hijau	
	c. Rata Rata Lama Tinggal Wisman	2,34	2,37	2,41	2,45	2,53	2,73	2,33	2,41	2,45	2,01	2,73	Merah	
	d. Rata Rata Lama Tinggal Wisnus	2,57	2,75	2,94	2,03	2,1	2,3	2	2,01	1,89	1,28	2,3	Merah	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		e. Rata Rata Pengeluaran Wisman (US \$)	326,76	392,11	490,14	700,84	794,32	812,36	507,5	685,27	808	908,8	812,36	Hijau
		f. Rata Rata Pengeluaran Wisman Wisnus (RP)	520.964	583,48	671,00 2	1.343.5 00	1.400.03 8	1.458.95 7	1.237.1 78	1.289.24 3	1.815.0 27	1.481.35 8	1.458.9 57	Hijau
		g. Kontribusi Sektor Pariwisata thd PDRB (%)	3,544	3,548	3,553	-	3,07	3,08	3,06	3,06*	3,07	3,19	3,08	Hijau
	2. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata													
		a. Persentase Daya Tarik Wisata yang Difasilitasi	408	2,37	2,41		25 (428)	25 (433)	0	0	0	477	100 (433)	Hijau
		b. Persentase Desa Wisata yang Difasilitasi	125	2,75	2,94		20 (140)	20 (150)	0,00	0	0	229	100 (150)	Hijau
	3 Program Pengembangan Kemitraan													
		a. Jumlah Kelompok Sadar Wisata (Kelompok)	435	575	605	412	415	420	336	409	412	463	420	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		b. Persentase Forum/Klaster Masyarakat Peduli Wisata yang Difasiliatasi		5	5		33% (5)	33% (5)	-		33% (5)	15	100% (15)	Hijau
3	Urusan Pertanian													
	1. Program Pengembangan Agribisnis													
	a. Produksi Padi (ton)	10.146.860	10.187.447	10.228.197	10.269.110	10.310.186	10.351.427	9.648.104	11.301.421 (ATAP)	11.473.161	11.608.793	10.351.427	Hijau	
	b. Produksi Jagung (ton)	2.992.843	3.004.814	3.016.834	3.028.901	3.041.017	3.053.181	3.051.516	3.212.392 (ATAP)	3.574.331	3.437.397	3.053.181	Hijau	
	c. Produksi Kedelai (ton)	135.785	139.587	143.389	147.191	150.993	154.795	125.467	129.794 (ATAP)	112.157	152.563	154.795	Hijau	
	d. Produksi Bawang Merah (ton)	426.975	428.042	429.112	430.185	431.260	432.338	519.356	471.169 (ATAP)	546.685	394.983	432.388	Hijau	
	e. Produksi Kentang (ton)	288.106	288.826	289.548	290.272	290.998	291.725	292.215	278.552 (ATAP)	272.976	314.234	291.725	Hijau	
	f. Produksi Cabe Besar (ton)	121.275	122.488	123.713	124.950	126.200	127.462	167.794	168.411 (ATAP)	164.980	172.469	127.462	Hijau	
	g. Produksi Tebu (ton)	5.025.000	5.125.500	5.228.010	5.332.570	4.450.000	4.460.000	5.560.701,69	3.826.118 (ATAP)	3.713.547	968.510	4.460.000	Merah	
	h. Produksi Kopi (ton)	16.550	16.881	17.219	17.563	17.914	18.273	23.548	20.690 (ATAP)	16.811	10.093	18.273	Merah	
	i. Produksi Kakao	2.000	2.040	2.081	2.122	1.890	1.890	1.854	1.865	1.992	614	1.890	Merah	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		(ton)								(ATAP)				h
		j. Produksi Kelapa (ton)	182.529	184.354	186.198	188.060	189.940	191.840	184.360	177.794 (ATAP)	177.865	119.350	191.840	Merah
		k. Produksi Karet (ton)	3.000	1.612	1.644	1.677	2.450	2.650	2.030	2.085 (ATAP)	2.235	2.111	2.650	Merah
		l. Produksi Cengkeh (ton)	6.400	6.528	6.659	6.792,00	6.928,00	7.066,00	6.850	6.434 (ATAP)	6.274	2.507	7.066	Merah
		m. Produksi Teh (ton)	7.000	6.696	6.830	6.967	6.400	6.350	7.399	6.242 (ATAP)	5.711	3.780	6.350	Merah
		n. Produksi Daging (Kg)	265.148.307	274.428.498	282.661.352	291.141.193	286.198.672	293.353.639	265.763.919	283.041.163 (ATAP)	311.918.439	334.385.836	293.353.639	Hijau
		o. Produksi Susu (liter)	97.527.340	98.990.250	101.456.006	104.001.631	106.601.672	109.799.722	98.493.787	95.512.925 (ATAP)	99.996.620	99.661.309	109.799.722	Hijau
		p. Produksi Telur (Kg)	268.036.393	278.757.849	285.726.795	292.869.965	300.191.714	307.696.507	274.425.616	278.908.494 (ATAP)	296.403.834	303.955.577	307.696.507	Hijau
	2. Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian													
		a. Jumlah Balai Penyuluhan yang Berkualitas dan Penumbuhan Posluhdes	527 dan 3.233	-	378 dan 3.333	398 dan 3.383	418 dan 3.433	438 dan 3.483	358 dan 3.333	378 dan 3.383	398 dan 3.383	438 dan 3496	438 dan 3483	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		b. Persentase Penyuluh yang Memiliki Kompetensi sesuai dengan Bidang Keahlian	34,01	40,00	50,00	60,00	70,00	80,00	40,50	52,63	57,60	92,00	80,00	Hijau
		c. Jumlah Kabupaten/Kota yang Didampingi dalam Pendataan Petani	18			-	13 kab/kota	35			22 kab/kota	35 kab/kota	35	Hijau
4.	Urusan Kehutanan													
	1. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan													
		a. Persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis	5	10	15	20	25	30	10,85	17,20	20	28,64	30	Hijau
		b. Luas hutan yang dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman bawah tegakan (Ha)	8.959	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000	15.109	30.869	30.000	50.000	50.000	Hijau
	2. Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan													

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		a. Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang memiliki sertifikat/SVLK	13	14	15	16	17	18	14	20	16	18	18	Hijau
		b. Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%)	0,53	0,53	0,63	0,73	0,83	0,93	0,53	0,60	0,73	0,45	0,93	Merah
	3. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan													
		a. Persentase Pertimbangan teknis dalam proses pemantapan dan penatagunaan kawasan hutan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Hijau
	4. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan													
		a. Menurunnya potensi gangguan keamanan hutan (lokasi)	15	20	25	30	35	40	20	25	30	40	40	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
	5. Program Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan													
		a. Persentase unit usaha masyarakat sekitar hutan yang berkembang	6	10	20	30	40	50	10	20	30	50	50	Hijau
5	Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral													
	1. Program Pengembangan Pertambangan dan Air Tanah													
		a. Persentase luasan pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan	86	86	86	87	87	87	86,5	86,7	87,2	89,00	87	Hijau
		b. Persentase kajian cekungan air tanah	52,63	63,16	68,42	73,68	84,21	89,47	63,16	63,42	73,68	89,47	89,47	Hijau
	2. Program Pengembangan Ketenagalistrikan dan Migas													
		a. Rasio Elektrifikasi (%)	82,12	85,02	87,42	90,01	91,70	94	88,37	91,10	93,51	98,52	94,00	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
	3. Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi						-	-						
	a. Persentase pemanfaatan EBT terhadap total konsumsi energi	6,10	6,92	7,74	8,54	9,38	10,20	7,01	7,80	8,54	10,80	10,20	Hijau	
6	Urusan Perdagangan													
	1. Program Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor													
	a. Nilai ekspor Non Migas (Jt US\$)	4.603	4.879	5.171	5.482	5.811	6.159	5.297,1 ₉	5.261,66	5.482	5.896	6.159	Hijau	
	b. Nilai impor non migas (Jt US\$)	5.186	5.134	5.082	5.032	5.751	6.471	5.796,4 ₃	5.284,44	5.032	8.411	5.729	Hijau	
	c. Ekspor bersih perdagangan (Jt US\$)	-583	-255	89	450	60	13,6	-499,24	-22,78	450	-2.515	430	Merah	
	d. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (%)	20,39	20,47	20,55	20,62	13,53	13,57	13,54	13,34	20,62	13,47	13,57	Hijau	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
	2. Program Peningkatan Logistik Daerah, Akses Pasar Dalam Negeri dan Pemberdayaan UDKM													
	a. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	25	5	5	5	5	5	5	5	0	5	57	50	Hijau
	b. Jumlah ijin usaha perdagangan dalam negeri - SIUP	378,636	398,539	418,442	438.345	458.248	478.151	401.318	411.445	438.345	486.670	478.151	Hijau	
	- TDP	67.404	77.713	88.022	98.333	108.639	118.948	110.999	121.631	98.333	361.931	118.948	Hijau	
	c. Ketersediaan data harga jenis komoditas bahan pokok.	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	Hijau
	3. Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri													
	a. Jumlah BPSK (kab/kota)	18	22	26	30	14 tingkat	14	18	18	30	14	14	Hijau	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		b. Persentase penyelesaian sengketa Konsumen melalui BPSK kabupaten/ kota	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Hijau
7	Urusan Perindustrian													
	1. Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil													
		a. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	31,60	32,10	32,30	32,5	35%	35,1%	35,67	35,14	35,00	34,46	35,10	Hijau
		b. Pertumbuhan produksi industri pengolahan	4,70	5,20	5,20	5,20	5,200	5,20	6,39 (Tahun dasar 2010 = 8,04)	5,44	5,20	8,83	5,20	Hijau
		c. Jumlah Kluster Logam, Mesin, Tekstil;	3	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	Hijau
		d. Persentase kemampuan sentra ILMT menjadi pemasok Industri besar.	6,00	15-20	15-20	15-20	15-20%	15-20%	19,00	19,00	15-20	20,48	15-20	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
	2. Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan													
	a. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	31,60	32,10	32,30	32,5	35%	35,1%	35,67	35,14	35,00	34,46	35,10	Hijau	
	b. Pertumbuhan produksi industri pengolahan	4,70	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	6,39 (Tahun dasar)	5,44	5,20	5,86	5,20	Hijau
	c. Jumlah Klaster agro, kimia & hasil hutan	7	6	6	6	6	6	6	7	6	6	6	6	Hijau
	d. Persentase kemampuan sentra IAKHH menjadi pemasok Industri besar	5,00	12-18	12-18	12-18	12 - 18	12-18%	14,00	20,00	12-18	12,8	12-18	Hijau	
	3. Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika dan Aneka													
	a. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	31,60	32,10	32,30	32,5	35%	35,1%	35,67	35,14	35,00	34,46	35,10	Hijau	
	b. Pertumbuhan produksi industri pengolahan	4,70	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	5,20	6,39 (Tahun dasar 2010 = 8,04)	5,44	5,20	3,93	5,20	Merah

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		c. Jumlah Kluster Komponen Otomotif, elektronika & Aneka	4	6	6	6	6	7	6	6	6	7	6	Hijau
		d. Persentase kemampuan sentra IATEA menjadi pemasok Industri besar	3,00	6-10	6-10	6-10	6-10%	6-10%	13,00	8,00	6-10	10,84	6-10	Hijau
	4. Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Usaha Industri													
		a. Pengembangan Kelembagaan Usaha Industri	3	5	5	5	5	5		5	5	5	5	Hijau
8	Urusan Transmigrasi													
	1. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi													
		a. Kesepakatan kerjasama antar wilayah dalam pengembangan kawasan transmigrasi	19 Prov	9 Prov	10 Prov	12 Prov	12 Prov	12 Prov	6 Provinsi	13 Provinsi	12 Prov	16	12 Provinsi	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		b. Calon Transmigran yang meningkat keterampilannya setelah mendapatkan pelatihan dasar umum (PDU) (KK)	540	200	275	300	200 KK	200 KK	105	179	300	1.449	1.175	Hijau
3	Urusan Penunjang Urusan Pemerintahan													
1	Perencanaan													
	1 Program Pengembangan Wilayah Perbatasan													
		a. Persentase program/ kegiatan hasil kesepakatan perbatasan yang terakomodir dalam RKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Hijau
		b. Jumlah kebijakan pengembangan wilayah perbatasan	1 forum; 1 rekomendasi	1 forum;	1 forum;	1 forum;	1 forum;	1 forum;	1 forum; 1 rekomendasi	1 forum; 1 rekomendasi	1 forum; 1 rekomendasi	4 forum; 4 rekomendasi	3 forum; 3 Rekomendasi	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
	2 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Jumlah FGD, Forum Fungsional Perencana dan Penilaian Angka kredit	26 kali FGD; 1 forum fungsional perencana; 4 kali penilaian angka kredit fungsional perencana	5 forum	5 forum	5 forum	5 forum	5 forum	8 forum peningkatan Kapasitas Pegawai; 1 forum fungsional perencana; penilaian Angka Kredit 12 orang Fungsional Perencana	5 forum peningkatan Kapasitas Pegawai; 1 forum fungsional perencana; penilaian Angka Kredit 5 orang Fungsional Perencana	5 forum peningkatan Kapasitas Pegawai; 1 forum fungsional perencana; penilaian Angka Kredit 5 orang Fungsional Perencana	29 forum peningkatan kapasitas pegawai; 5 forum fungsional perencana; penilaian angka kredit 40 orang fungsional perencana	25 forum peningkatan kapasitas pegawai; 5 forum fungsional perencana; penilaian angka kredit 25 orang fungsional perencana	Hijau
	3 Program Perencanaan Pembangunan Daerah	a. Dokumen perencanaan pembangunan daerah yang ditetapkan tepat waktu	1 Pergub RKPd	1 Pergub RKPd	1 Pergub RKPd	1 PERGUB	2 Pergub RKPd	2 pergub	2 Pergub RKPd; 1 Perda RPJMD	2 Pergub	2 pergub	10 pergub 1	5 Pergub RKPd 1 Perda RPJMD	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		b. Persentase kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen penganggaran	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Hijau
		c. Persentase capaian antara target perencanaan program/kegiatan dengan realisasi	100	100	100	100	100	100,00	100	100	100	92,99	100	Hijau
		d. Evaluasi Dokumen Perencanaan	1 dokumen evaluasi RKPd	1 dokumen evaluasi	1 dokumen evaluasi	1 dokumen evaluasi	1 dokumen evaluasi	1 dokumen evaluasi RKPd	1 dokumen evaluasi RKPd	1 dokumen evaluasi RKPd; 1 dokumen evaluasi paruh waktu RPJMD	1 dokumen evaluasi RKPd	5 dokumen evaluasi RKPd	5 evaluasi dokumen RKPd; 2 dokumen evaluasi paruh waktu RPJMD	Hijau
4	Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi													

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGET KINERJA AKHIR RPJMD	STATUS
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		a. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi daerah (dokumen)	5	2	2	2	2 dokumen	2	2	2	2	10	10	Hijau
	5 Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya													
		a. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kesejahteraan rakyat (dokumen)	4	3	3	3	3 dokumen	3	3	3	3	15	15	Hijau
		b. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintahan dan kependudukan (dokumen)	5	4	4	4	4 dokumen	4 dokumen	4	4	4	20	20	Hijau
	6 Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam													

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		a. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang prasarana wilayah dan sumber daya alam (dokumen)	9	5	4	4	4 dokumen	4 dokumen	6	6	4	24	21	Hijau
	7 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		a. Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah rawan bencana (dokumen)	1	2	2	2	2 dokumen	2 dokumen	2	2	2	10	10	Hijau
2	Keuangan													
	1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah													
		a. Peningkatan PAD	11,82	12,61	19,53	13,48	15,95	3,34	33,80	68,74	13,48	8,18	3,34	Hijau
		b. Persentase laporan keuangan daerah berbasis aktual	0%	0%	0%	-	100%	100%			0%	100	100%	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
	2. Program Pengelolaan Aset Daerah													
	- Sertifikasi bidang tanah (bidang)			-	-	-	125	125				371	250	Hijau
	- Pemagaran bidang tanah (bidang)			-	-	-	30	30				42	60	Merah
	- Sewa tanah dan bangunan (bidang)			-	-	-	2	2				4	4	Hijau
3.	Kepegawaian Dan Diklat													
	1. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah													
	a. Promosi jabatan struktural secara terbuka	Eselon III dan IV	Eselon I, II, III dan IV	Eselon II, III dan IV	Eselon II, III dan IV	Eselon II, III, dan IV	Eselon II, III, dan IV	Eselon I, II, III, IV	Eselon I, II, III, IV	Eselon II, III dan IV	Eselon II, III, dan IV	Eselon I, II, III, dan IV	Eselon I, II, III dan IV	Hijau
	b. Jumlah PNS yang mengikuti Diklat (orang)	29.581	32.837	36.133	39313	42.658 orang	45.853 orang	33.814	39.578	43.128	51.911	45.853	Hijau	
	c. Jumlah PNS yang melaksanakan tugas belajar dan ijin belajar (S2 dan S3) S2	0	-	-	-	15	18	0	0	15	521	S2 : 23 orang Target BKD S2 : 33	Hijau	

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		S3		-	-	-	8	4			12	6	S3 : 12 orang Target BKD S3 : 12	
		d. Jumlah PNS yang mengikuti sertifikasi kompetensi	0			100	50	50	0	0	202	762	100	Hijau
4.	Penelitian dan Pengembangan													
	1. Program Pengembangan IPTEK dan Inovasi Daerah													
	a. Persentase Peningkatan Kualitas dan Penerapan Litbang (rekomendasi)	29 (2012)	12	12	12	20	25%	43,33	96,66	20	171,99	100	Hijau	
	b. Pengembangan SIDA di Jateng:													
	- Persentase Peningkatan Kapasitas kelembagaan Kab/Kota (paket)	-	1	1	1	20	20	20	20	20	20	100	100	Hijau
	- Persentase Kluster Inovatif	-	6	6	6	20	20	20	20	20	20	100	100	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		- Persentase Pengembangan Desa Inovatif	5	9	11	12	18,96	17,24%	9	11	63,79	119,99	100	Hijau
		- Persentase Pengembangan Kab/Kota Inovatif	-	3	6	8	28,57	22,86%	8,57	17,14	22,86	100,00	100	Hijau
5.	Fungsi Lainnya													
	1. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan													
	a. Jumlah Peraturan Perundang-undangan Daerah yang Disusun (dok perda)	17	17	15	15	15	15 Perda	17	7	10	60	77	Merah	
	b. Persentase Penindakan Pelanggaran Perda	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Hijau
	2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum													

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		a. Jumlah Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Bersertifikasi ISO	19 UPP	21 UPP	23 UPP	31 UPP	31 UPP	34 UPP	22 UPP	25 UPP	27 UPP	83	34 UPP	Hijau
		b. Jumlah UPP yang Dilakukan Pengukuran IKM	9 UPP	11 UPP	13 UPP	20 UPP	24 UPP	28 UPP	12 UPP	16 UPP	20 UPP	115	28 UPP	Hijau
		c. Perapatan Pilar Batas	40 pilar	50 pilar	75 pilar	50 pilar	50 pilar	50 pilar	50 Pilar	100 pilar	50 pilar	300	275 pilar	Hijau
		d. Perawatan Pilar Batas	55 pilar	0	50 pilar	60 pilar	80 pilar	80 pilar	0	135 pilar	60 pilar	355	270 pilar	Hijau
		e. Pengendalian Kinerja SKPD	48 SKPD	48 SKPD	48 SKPD	48 SKPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48 OPD	48	48 OPD	Hijau
		f. Penyusunan LKPJ	1 Dok LKPJ	1 Dok LKPJ	1 Dok LKPJ	1 Dok LKPJ	1 Dok LKPJ	1	1 Dok LKPJ	1 dok LKPJ	1 Dok LKPJ	5	5 Dok LKPJ	Hijau
		g. Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Kemasyarakatan, dan Pembangunan Lintas Kabupaten/Kota	3 Bakorwil	3 Bakorwil	3 Bakorwil	3 Bakorwil	Provinsi	3 Bakorwil	3 Bakorwil	3 Bakorwil	3 Bakorwil	Provinsi 35 kab/kota	Provinsi 35 kab/kota	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		h. Jumlah Dokumen Pengembangan dan Pengendalian Mutu Diklat (dokumen)	1.130	1353	1.618	1910	2.196	2.613 dokumen	1.355	1.589	2.021	2.589	2.613	Hijau
	3. Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah													
		a. Laporan LPPD Provinsi	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1	1 Laporan	Hijau
		b. Pemetaan Kapasitas Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi di 35 Kab/Kota	7 Kab/kota	7 Kab/kota	7 Kab/kota	7 Kab/kota	7 Kab/kota	5 Kab / Kota	10 kab/kota	7 Kab/kota	35	35 Kab/kota	Hijau
		c. Desk Pilkada	1 provinsi, 7 kab/kota	-	17 kab/kota	0	7 kab/kota	1 provinsi, 7 kab/kota	3 Kab/ Kota	21 kab/kota	0	1 Provinsi, 7 Kab/Kota	1 provinsi, 35 Kab/kota	Hijau
	4. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	a. Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan LPSE dlm Pengadaan Barang dan Jasa	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
	5. Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah 2)	a. Negara, MoU dan Perjanjian Teknis (PT)		-	-	3 NEGAR A, 1 MoU, 5	2 Negara,	3 Negara, 5 PT	4 Negara, 4 MoU, 4 Keg	4 Negara, 4 MoU, 4 Keg	4 Negara, 1 MoU, 5 PT	8	8 Negara, 4 MoU , 15 PT	Hijau
		b. Naskah Kerjasama (NK)		-	-	-	50 NK	50 NK	79	42	367 NK	660	182	Hijau
	6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan KDH		-	-	-									
		a. Opini BPK (WTP)	provinsi & 10 kab/kota	provinsi & 13 kab/kota	provinsi & 16 kab/kota	provinsi & 16	provinsi & 16	provinsi & 22	Provinsi dan 11 Kab/Kota	NA	provinsi & 16 kab/kota	prov dan 31 K/K	provinsi & 22 kab/kota	Hijau
		b. Jumlah SKPD yang Menerapkan SPIP	2 SKPD	2 SKPD	15 SKPD	Seluruh SKPD	Seluruh SKPD	Seluruh SKPD	2 SKPD	59 SKPD	Seluruh SKPD	45	Seluruh (48) SKPD	Hijau
		c. Tingkat Maturitas SPIP	level 1	level 1	level 2		level 3	level 3	level 1	level 2	level 2	level 3	level 3	Hijau
	7. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan													
		a. Persentase Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan	85	90	92	94	97	100	90	92	94	100,00	100,00	Hijau

NO	URUSAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)	KONDISI KINERJA PADA AWAL RPJMD 2013-2018	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM			Realisasi Capaian RPJMD s/d 2018	TARGE T KINERJ A AKHIR RPJMD	STAT US
				2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	17
		yang Professional												
		b. Tingkat Kapabilitas APIP	level 1	level 1	level 1		level 2	Level 3	level 1	level 1	level 2	level 3	level 3	Hijau
	8. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Tercapainya Peningkatan Profesionalisme dan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	100	100	100	100,00	100	100	84,45	57,39	87,90	95,45	100	Hijau

Keterangan :

No	Simbol	Status Evaluasi Kinerja	Kriteria Status Evaluasi Kinerja
1	Hijau	Tercapai/Melampaui	Apabila persentase capaian indikator s/d tahun 2018 (TW II) dibandingkan dengan target Akhir RPJMD sebesar $\geq 100\%$
2	Kuning	Akan Tercapai	Apabila persentase capaian indikator s/d tahun 2018 (TW II) dibandingkan dengan target Akhir RPJMD sebesar $\geq 85\%$ s/d $< 100\%$
3	Merah	Perlu upaya keras	Apabila persentase capaian indikator s/d tahun 2018 (TW II) dibandingkan dengan target Akhir RPJMD sebesar $< 85\%$

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kondisi Perekonomian Global dan Nasional

Setelah pada tahun 2017 perekonomian global menunjukkan tanda pemulihan (*recovery*) secara gradual, tren perkembangan ekonomi global di tahun 2018 cenderung melambat. Pertumbuhan ekonomi global yang melandai serta resiko hubungan dagang antar negara dan geo politik yang masih tinggi, yang berdampak pada rendahnya volume perdagangan dunia. Namun demikian pemulihan secara lambat masih terus berlanjut pada investasi, manufaktur, dan perdagangan, dan juga negara-negara berkembang yang mengeksport komoditas mendapatkan keuntungan dari menguatnya harga komoditas. Selanjutnya, peningkatan ekspor dan dorongan stimulus fiskal melalui belanja infrastruktur secara perlahan turut meningkatkan keyakinan korporasi untuk melakukan investasi. Secara keseluruhan, perkembangan positif pada ekspor dan investasi berkontribusi besar pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2018 yang tercatat 5,17 persen, lebih baik dari capaian 2017 sebesar 5,07 persen.

Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya sebesar 8,99 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) sebesar 9,08 persen. Struktur PDB Indonesia menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku pada tahun 2018 tidak menunjukkan perubahan berarti. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 19,86 persen; diikuti oleh Perdagangan Besar- Eceran, Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 13,02 persen; Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 12,81 persen; dan Konstruksi sebesar 10,53 persen. Sementara itu, struktur ekonomi Indonesia secara spasial tahun 2018 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,48 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,58 persen, dan Pulau Kalimantan 8,20 persen.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi tersebut, ekspor barang dan jasa Indonesia juga mengalami pertumbuhan baik dalam nilai maupun volume. Meskipun demikian, struktur perekonomian Indonesia cenderung mengalami perubahan dari waktu ke waktu, salah satunya ditunjukkan dengan perubahan kontribusi ekspor terhadap perekonomian. Kontribusi ekspor jasa terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional cenderung stabil pada kisaran 2,5% tetapi kontribusi ekspor barang cenderung mengalami penurunan dari sekitar 27% pada tahun 2016 menjadi 17% pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2018 secara umum kontribusi ekspor terhadap PDB juga tidak berubah di sepanjang Januari-November dan kecil kemungkinan mengalami perubahan besar pada tahun 2019.

Perekonomian Indonesia ke depan akan didorong oleh menguatnya konsumsi di semua wilayah, di tengah terbatasnya investasi, terutama investasi pemerintah, karena postur fiskal 2019 yang lebih konsolidatif. Ekspor juga

diperkirakan lebih terbatas seiring perkiraan stagnasi pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia serta melambatnya pertumbuhan negara mitra dagang utama, terutama AS, Eropa, dan Tiongkok. Sementara itu, komitmen pemerintah untuk memperkecil defisit neraca pembayaran diperkirakan akan mengurangi impor serta diharapkan mampu memperbaiki struktur perekonomian nasional.

Tahun 2018 mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa tetap solid. Seluruh provinsi di Jawa mencatatkan pertumbuhan ekonomi di atas nasional. Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta bahkan mencapai 6,17%, yang sedikit lebih rendah dibandingkan dengan capaian pertumbuhan pada 2017 sebesar 6,20%. Selain itu, keenam provinsi di Jawa mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi dari capaian 2017. Perkembangan perekonomian Jawa yang tetap solid pada gilirannya berkontribusi menopang pertumbuhan ekonomi nasional karena pangsa ekonomi Jawa yang mencapai 58,48 % dari total perekonomian nasional.

3.2. Kondisi Perekonomian Daerah

Ekonomi Jawa Tengah tahun 2018 tumbuh sebesar 5,32 persen. Selama rentang waktu 5 tahun, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah berfluktuasi secara positif dari 5,14% tahun 2014 menjadi 5,32% pada tahun 2018. Struktur perekonomian daerah Jawa Tengah tahun 2018 masih didominasi tiga lapangan usaha utama, yaitu industri pengolahan (34,50%); pertanian, kehutanan dan perikanan (14,04%); dan perdagangan besar-eceran dan reparasi mobil-sepeda motor (13,51%). Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2018, Industri Pengolahan menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 1,50 persen, diikuti Perdagangan Besar-Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,82 persen, serta Konstruksi sebesar 0,63 persen. Sedangkan pertanian hanya memberikan sumbangan sebesar 0,35 persen di bawah infokom yang memberikan sumbangan 0,56 persen.

Kondisi kinerja keuangan daerah tahun 2014-2017, diwarnai oleh dinamika perubahan sistem pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 yang menjadi dasar pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan secara efektif pada tahun 2017 melalui perubahan struktur organisasi pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016. Pengalihan urusan kabupaten/ kota menjadi kewenangan provinsi, kewenangan provinsi menjadi kewenangan pusat, dan sebaliknya sangat mempengaruhi pendapatan dan belanja daerah.

Prospek ekonomi Jawa Tengah ke depan oleh Bank Indonesia diperkirakan mengalami perbaikan. Hal ini didukung dengan perbaikan ekonomi global terutama mitra dagang utama Jawa Tengah yang diperkirakan dapat meningkatkan kegiatan usaha. Selanjutnya, komitmen pemerintah yang tinggi dalam meningkatkan kemudahan investasi dan berusaha di Indonesia serta komitmen dalam penyelesaian pembangunan infrastruktur mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi. Namun demikian, upaya untuk memperbaiki neraca perdagangan ekspor impor harus menjadi perhatian dengan melakukan perbaikan pada infrastruktur yang mendorong produksi dan produktifitas dalam semua sektor yang berbasis sumber daya lokal. Demikian halnya dengan

sumber-sumber pendapatan daerah akan terus dapat ditingkatkan meskipun peningkatannya akan mengalami tantangan terhadap tingginya permintaan untuk belanja pembangunan. Hal tersebut menuntut pemerintahan daerah untuk memulai inovasi pembiayaan pembangunan dengan mendorong peran masyarakat dan swasta melalui mekanisme Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA), dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), melakukan pinjaman daerah dan penerbitan surat berharga (obligasi daerah). Belanja pemerintah terus didorong untuk peningkatan iklim usaha dan kewirausahaan yang ditopang oleh kebijakan akses permodalan dari lembaga keuangan dengan skema bunga murah.

3.3. Kinerja Keuangan Daerah

3.3.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah meliputi pencapaian kinerja pendapatan daerah, perkembangan belanja daerah dan pembiayaan daerah yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2013-2017
Provinsi Jawa Tengah

No	URAIAN	TAHUN						Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018*(unaudited)	
1.	PENDAPATAN DAERAH	<u>13.343.358.327.576</u>	<u>15.157.460.004.461</u>	<u>16.828.153.996.157</u>	<u>19.632.577.136.890</u>	<u>23.703.174.631.507</u>	<u>24.701.017.599.994</u>	<u>13,25</u>
1.1	Pendapatan Asli Daerah	8.212.800.640.888	9.916.358.231.432	10.904.825.812.504	11.541.029.720.310	12.547.513.389.400	13.711.732.768.298	10,91
	Pajak Daerah	6.716.170.095.198	8.213.117.977.920	9.090.677.397.011	9.672.518.189.424	10.572.698.332.610	11.507.119.643.262	11,50
	Retribusi Daerah	69.970.595.550	79.475.022.663	95.871.359.549	106.225.058.566	107.372.397.279	104.957.567.382	8,77
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	263.267.978.393	291.844.276.152	320.604.409.928	340.397.111.367	371.072.481.501	459.626.767.964	11,95
	Lain-Lain PADYang Sah	1.163.391.971.747	1.331.920.954.697	1.397.672.646.016	1.421.889.360.953	1.496.370.178.010	1.640.028.789.690	7,20
1.2	Dana Perimbangan	2.467.814.628.973	2.542.626.744.680	2.257.142.994.740	8.017.297.595.983	11.067.786.491.093	10.933.776.831.696	56,77
	Dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak	714.432.749.973	659.530.315.680	569.741.071.740	893.673.221.918	848.309.911.393	769.449.921.024	2,71
	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.670.859.369.000	1.803.931.189.000	1.629.429.283.000	1.859.907.223.000	3.652.586.431.000	3.652.586.431.000	21,76
	Dana Alokasi Khusus (DAK)	82.522.510.000	79.165.240.000	57.972.640.000	5.263.717.151.065	6.566.890.148.700	6.511.740.479.672	1.794,5 5
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	2.662.743.057.715	2.698.475.028.349	3.666.185.188.913	74.249.820.597	87.874.751.014	55.508.000.000	(15,85)
	Pendapatan Hibah	24.326.664.073	29.186.771.349	34.513.356.452	34.228.172.341	36.938.923.844	22.008.000.000	136,08
	Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya	1.315.400.207	1.322.069.000	1.146.299.114	1.074.462.256	737.884.170	0	

No	URAIAN	TAHUN						Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018*(unaudited)	
	Dana Penyesuaian	2.615.274.862.435	2.664.966.188.000	3.606.197.997.347	0	0	0	
	Dana Insentif Daerah	21.826.131.000	3.000.000.000	24.327.536.000	38.947.186.000	50.197.943.000	33.500.000.000	0,98
2.	BELANJA DAERAH	<u>12.724.776.308.434</u>	<u>15.086.065.034.422</u>	<u>17.820.760.495.342</u>	<u>19.354.374.825.983</u>	<u>22.884.713.018.754</u>	<u>24.993.659.858.000</u>	14,94
2.1.	Belanja Tidak Langsung	9.213.696.622.973	10.808.021.354.077	12.396.063.965.861	13.717.072.628.435	17.583.623.562.444	18.253.540.993.000	15,75
2.1.	Belanja Pegawai	1.368.517.191.270,0 0	1.887.758.056.061	2.186.704.011.852	2.239.683.999.741	5.626.847.225.304	6.021.320.139.000	43,53
	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	0	
	Belanja Hibah	3.499.864.176.508,0 0	2.963.856.035.218	3.745.182.609.434	5.246.848.624.464	4.953.383.281.751	5.641.553.798.000	11,52
	Belanja Bantuan Sosial	14.362.375.000,00	23.281.040.000	18.715.300.000	36.531.500.000	238.268.220.000	48.292.000.000	156,04
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	2.503.166.398.279,0 0	3.263.403.899.363	4.130.087.481.106	4.088.437.191.480	4.812.323.251.641	4.589.057.727.000	16,94
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kab/Kota, Pemdes, Pemda Lain dan Parpol	1.825.598.247.238,0 0	2.661.510.573.135	2.303.371.332.753	2.100.703.904.365	1.951.670.633.748	1.933.317.329.000	2,42
	Belanja Tidak Terduga	2.188.234.678,00	8.211.750.300	12.003.230.716	4.867.408.385	1.130.950.000	20.000.000.000	25,11
2.2.	Belanja Langsung	3.511.079.685.461	4.278.043.680.345	5.424.696.529.481	5.637.302.197.548	5.301.089.456.310	6.740.118.865.000	13,48
	Surplus/(Defisit)	618.582.019.142,00	71.394.970.039	(992.606.499.185)	278.202.310.907	818.461.612.753	(580.000.000.000)	
3.	PEMBIAYAAN DAERAH							
3.1.	Penerimaan	1.306.017.471.526,0	1.689.438.284.603	1.689.436.791.747	417.920.564.252	646.575.639.755	650.000.000.000	18,67

No	URAIAN	TAHUN						Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2013	2014	2015	2016	2017	2018*(unaudited)	
	Pembiayaan Daerah	0						
	Penggunaan SILPA	755.371.554.796,00	1.688.808.490.668	1.688.833.254.642	416.830.292.562	646.122.875.159	300.000.000.000	22,07
	Pencairan Dana Cadangan	549.991.811.737,00					350.000.000.000	
	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Talangan Pengadaan Pangan	67.272.727,00	254.090.908			2.727.273		
	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir	586.832.266,00	375.703.027	603.537.105	1.090.271.690	450.037.323		(3,47)
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	235.791.000.000,00	72.000.000.000	280.000.000.000	50.000.000.000	304.000.000.000	70.000.000.000	132,64
	Pembentukan Dana Cadangan	-		200.000.000.000	-	154.000.000.000		
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	235.791.000.000,00	72.000.000.000	80.000.000.000	50.000.000.000	150.000.000.000	70.000.000.000	95,15
	Pemberian Dana Talangan Pengadaan Pangan	-						
	PEMBIAYAAN NETTO	1.070.226.471.526,00	1.617.438.284.603	1.409.436.791.747	367.920.564.252	342.575.639.755	580.000.000.000	13,65
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	1.688.808.490.668,00	1.688.833.254.642	416.830.292.562	646.122.875.159	1.161.037.252.508		36,59

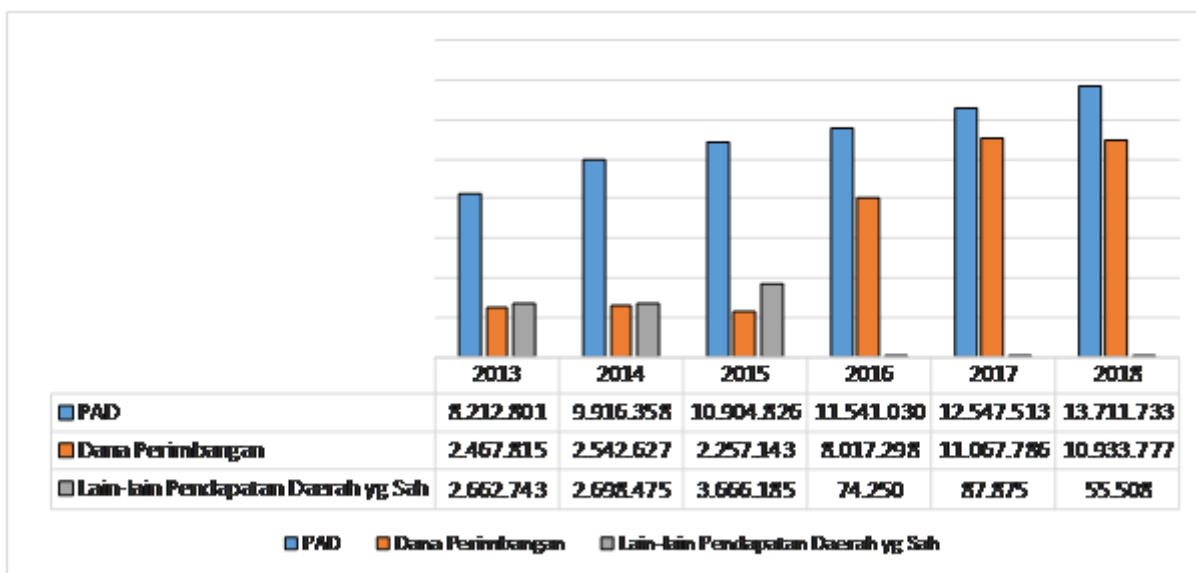
Sumber : BPKAD, BPPD dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

3.3.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih. Sumber penerimaan Provinsi Jawa Tengah berasal dari Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan. Pendapatan Daerah meliputi:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 2) Dana Perimbangan yang meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus; serta
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah meliputi Pendapatan Hibah, Dana Bagi Hasil dari Pemda Lainnya, dan Dana Insentif Daerah.

Total Pendapatan Daerah mulai tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 rata-rata mengalami peningkatan 13,25% per tahun tetapi tidak merata pada setiap komponen pembentuknya. Selama kurun waktu tersebut, secara proporsional Pendapatan Asli Daerah (PAD) menempati porsi terbesar (rata-rata 60,22%) dibandingkan dengan dana perimbangan (rata-rata 30,39%) dan dana dari sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah (rata-rata 10,09%). Sampai dengan tahun 2018 Pendapatan Daerah dalam APBD induk meningkat sebesar 4,03% dari tahun 2017. Namun demikian komposisi PAD terhadap pendapatan daerah semakin menurun. Kondisi ini akan berdampak terhadap kemandirian daerah yang menurun dan ketergantungan daerah terhadap dana perimbangan semakin tinggi sehingga perlu upaya untuk peningkatan PAD dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Untuk mengetahui trend dan proporsi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada diagram di bawah ini.



Sumber : BPKAD, BPPD dan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 3.1.
Trend dan Proporsi Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2018 (Dalam Juta Rupiah)

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 (empat) yaitu:

1) Pajak daerah

Sebagaimana diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah dan Pergub No 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Jenis pajak yang menjadi sumber pendapatan pemerintah tingkat provinsi, meliputi: Pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, Pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

2) Retribusi Daerah

Sesuai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah, Retribusi Daerah meliputi Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penerimaan ini berasal dari deviden Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah yaitu: PT Bank Jateng, PT Kawasan Industri Wijayakusuma, PT Asuransi Bangun Askrida, PT Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP), PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), PT Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC), PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida), PD Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK), PD Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT) dan PD Air Bersih Tirta Utama.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diantaranya: Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Bank, Tuntutan Ganti rugi, Pendapatan Denda Kelambatan Pekerjaan, Pendapatan BLUD, dll.

Sumber utama PAD berasal dari Pajak Daerah dengan kontribusi rata-rata selama kurun waktu 2013–2018 sebesar 83,33% diikuti Lain-lain PAD yang Sah sebesar 10,94%; Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar 3,06%; dan Retribusi Daerah sebesar 0,85%. Namun demikian, pertumbuhan Pajak Daerah sebagai sumber PAD dalam kurun waktu tersebut, cenderung mengalami penurunan. Tahun 2018, kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD sebesar 83,92%; Lain-lain PAD yang Sah sebesar 11,96%; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3,35%; dan retribusi daerah sebesar 0,77%. Perkembangan data realisasi PAD Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPPD Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 3.2.
Trend dan Proporsi Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2018 (Dalam Juta Rupiah)

b. Dana Perimbangan

Dalam rangka menciptakan suatu sistem perimbangan keuangan yang proporsional, demokratis, adil dan transparan berdasarkan atas pembagian kewenangan pemerintah antara pemerintah pusat dan daerah, maka diterbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dana Perimbangan terdiri dari:

1) Dana Bagi Hasil

Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka presentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam.

2) Dana Alokasi Umum

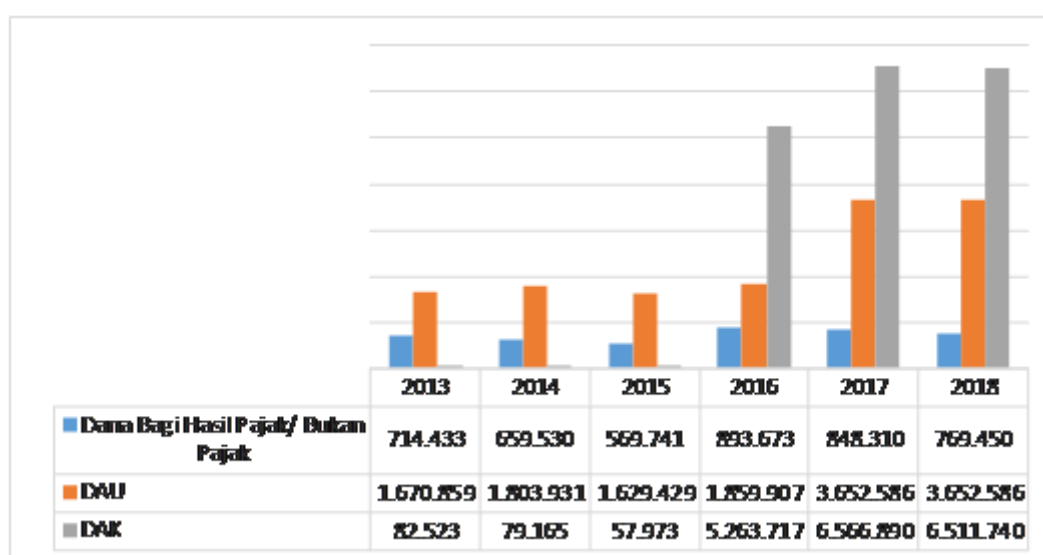
Dana alokasi umum merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam mencapai tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan dan pengeluaran dalam pelaksanaan desentralisasi.

3) Dana Alokasi Khusus

Dana alokasi khusus merupakan dana berasal dari anggaran (APBN) dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang khusus.

Selama kurun waktu 2013–2018, sumber utama Dana Perimbangan berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan kontribusi rata-rata sebesar 50,08% diikuti oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar 32,26% dan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak sebesar 17,66%. Tahun 2016 DAK mengalami peningkatan signifikan dikarenakan kebijakan Pemerintah Pusat yang mengalihkan pembiayaan dana BOS dari

komponen Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ke Dana Perimbangan. Hal ini terjadi pula pada DAU yang mengalami peningkatan signifikan pada Tahun 2017 dikarenakan adanya pelimpahan pegawai (Guru SMA/SMK, penyuluh, staf kehutanan, pengawas ketenagakerjaan dan staf TU SMA/SMK) dari pemerintah kabupaten/ kota dan pemerintah pusat ke pemerintah provinsi sebagai konsekuensi pemberlakuan kebijakan pengalihan kewenangan berdasarkan UUNomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah juncto PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2014. Proporsi sumber Dana Perimbangan tahun 2018 terdiri dari DAK sebesar 59,56%; DAU sebesar 33,41%; dan Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak sebesar 7,04%. Perkembangan Data realisasi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPPD Provinsi Jawa Tengah, 2018

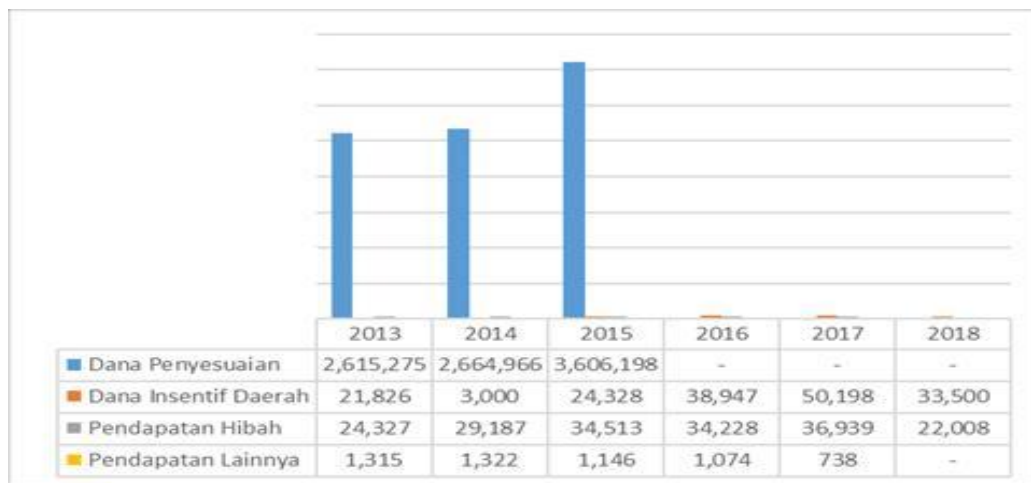
Gambar 3.3.

Trend dan Proporsi Dana Perimbangan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Dalam Juta Rupiah)

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan jenis penerimaan daerah yang terdiri dari pendapatan hibah di antaranya pendapatan hibah dari pemerintah (WISMP), pendapatan hibah dari Badan/ Lembaga swasta/ organisasi, pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/ perorangan. Dana Bagi Hasil Pajak dari provinsi dan Pemda Lainnya yang terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Kabupaten/ Kota, Dana Bagi Hasil Retribusi dari Kabupaten/Kota. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang terdiri dari Dana Penyesuaian untuk tambahan penghasilan, dana BOS, dan Dana Insentif Daerah (DID).

Proporsi terbesar sumber lain-lain pendapatan daerah yang sah tahun 2016-2018 adalah DID, namun kurun waktu tahun 2013-2015 didominasi oleh dana penyesuaian dan otonomi khusus yang didalamnya terdapat belanja BOS. Perkembangan realisasi lain-lain pendapatan yang sah sebagaimana data selengkapnya pada gambar berikut.



Sumber : BPPD Provinsi Jawa Tengah, 2018

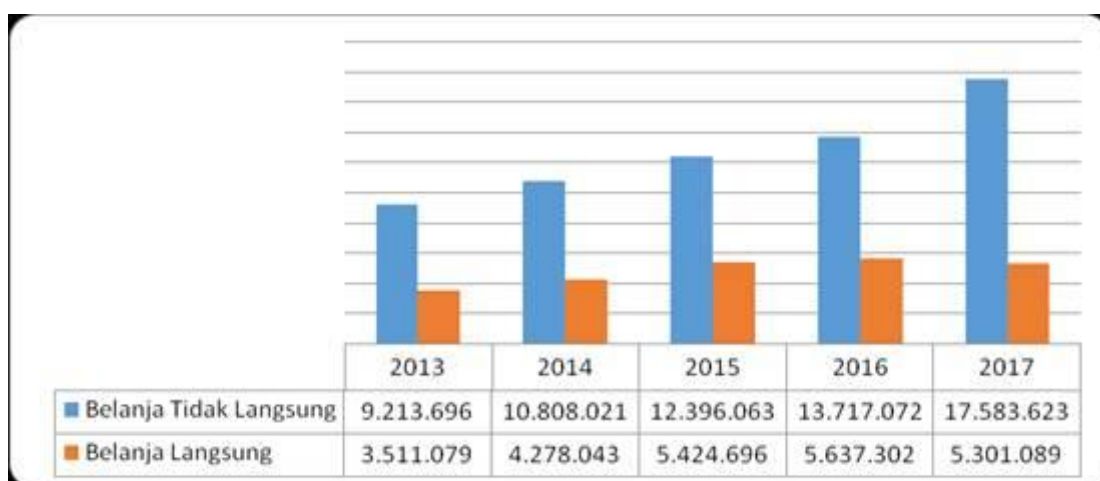
Gambar 3.4.

Trend dan Proporsi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Dalam Juta Rupiah)

3.3.1.2. Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran. Belanja Daerah dikelompokkan dalam dua jenis yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Selama kurun waktu lima tahun dari 2013-2017, Belanja Daerah mengalami peningkatan rata-rata sebesar 14,94% per tahun, dengan rincian Belanja Langsung meningkat rata-rata 13,48% per tahun dan Belanja Tidak Langsung meningkat rata-rata 15,75% per tahun.

Gambaran realisasi belanja pemerintah provinsi Jawa Tengah sebagaimana gambar sebagai berikut.



Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 3.5.

Realisasi Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 (Dalam Juta Rupiah)

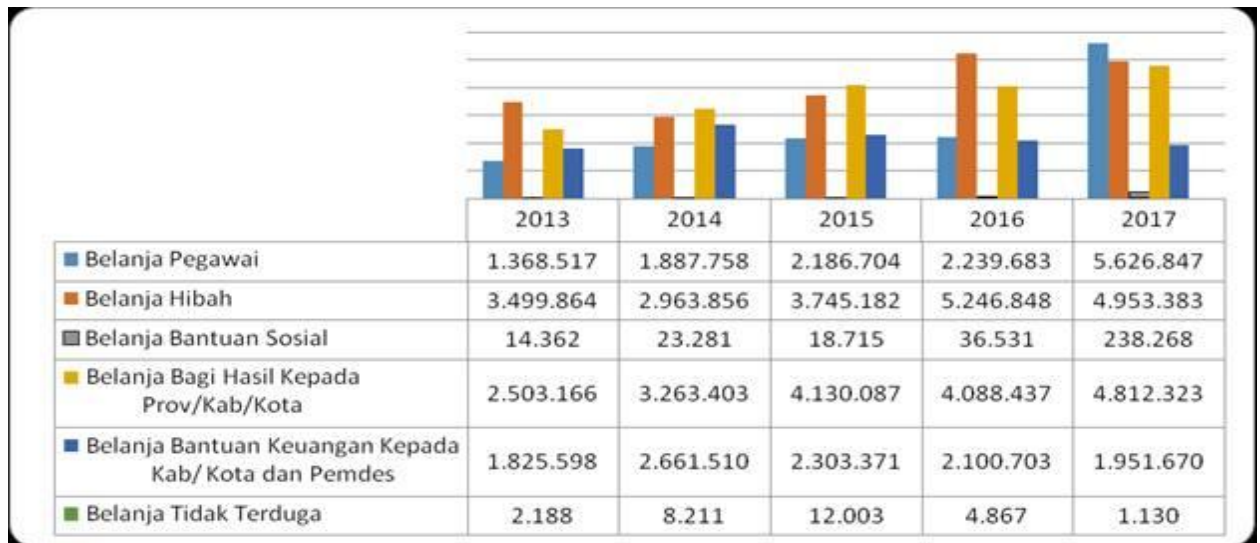
a. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari:

- 1) Belanja Pegawai dialokasikan untuk penyediaan gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 2) Belanja Hibah, dialokasikan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Lainnya, BUMN, BUMD, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan Hukum Indonesia dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Belanja Bantuan Sosial, dialokasikan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk mengalokasikan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/ kota atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya yang disesuaikan dengan kemampuan belanja daerah yang dimiliki.
- 5) Belanja Bantuan Keuangan terdiri dari bantuan keuangan yang bersifat umum dan khusus dari pemerintah daerah kepada pemerintah kabupaten/ kota, pemerintah daerah lainnya dan Partai Politik. Bantuan keuangan yang bersifat umum diberikan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus dapat dialokasikan dalam rangka membantu capaian program prioritas pemerintah daerah yang dilaksanakan sesuai urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pemberian bantuan keuangan kepada partai politik tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang terkait.
- 6) Belanja Tidak Terduga ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran sebelumnya dan perkiraan kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta sifatnya tidak biasa/ tanggap darurat, yang tidak diharapkan berulang dan belum tertampung dalam bentuk program/ kegiatan.

Belanja tidak langsung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kurun waktu 2013-2017 mengalami pertumbuhan rata-rata 15,75%. Pertumbuhan tertinggi pada komponen belanja bantuan sosial sebesar 156,04% diikuti belanja pegawai 43,53%, belanja tidak terduga sebesar 25,11%, belanja bagi hasil 16,94%, belanja hibah sebesar 11,52%, serta belanja bantuan kepada Kabupaten/ Kota dan Pemerintah Desa sebesar 2,42%. Peningkatan signifikan belanja bantuan sosial pada tahun 2017 dikarenakan adanya kebijakan pengurangan kemiskinan dengan stimulan perbaikan kualitas Rumah Tidak Layak Huni. Sedangkan pada belanja pegawai dikarenakan konsekuensi pelimpahan kewenangan sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk mengetahui rincian belanja daerah tidak langsung dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 3.6.
Realisasi Belanja Tidak Langsung
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017 (Dalam Juta
Rupiah)

b. Belanja Langsung

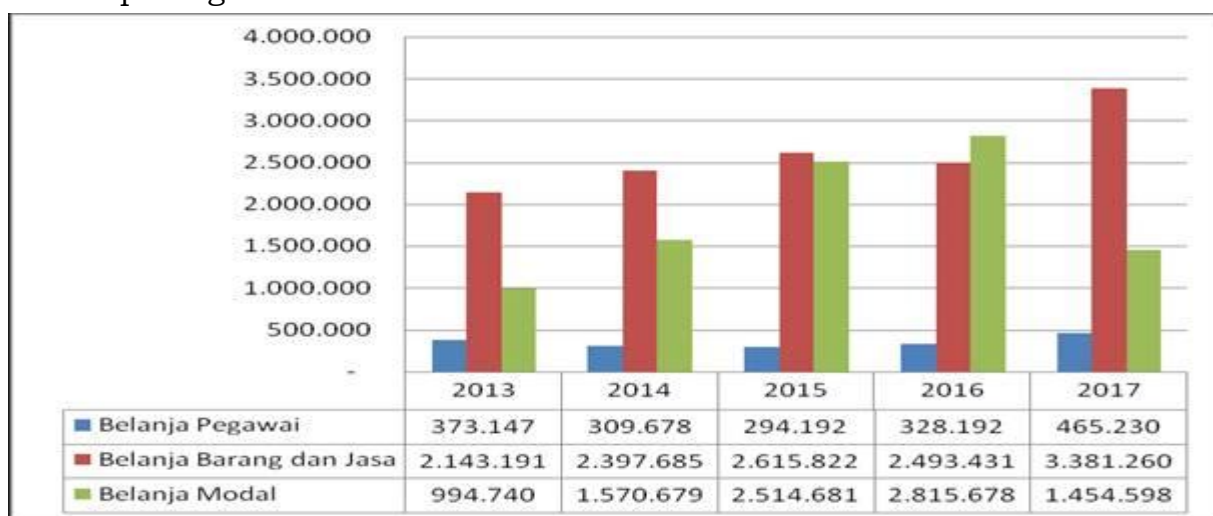
Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, yang terdiri dari jenis belanja:

- 1) Belanja pegawai merupakan pengeluaran untuk honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 2) Belanja barang dan jasa merupakan pengeluaran untuk pembelian/ pengadaan barang yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 3) Belanja modal merupakan pengeluaran untuk pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.

Proporsi Belanja Langsung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terhadap Belanja Daerah kurun waktu tahun 2013-2017 cenderung fluktuatif yang semula 27,59% pada tahun 2013 naik menjadi 30,44% pada tahun 2015 dan kembali menurun pada tahun 2017 sebesar 23,16% dikarenakan konsekuensi pelimpahan kewenangan sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berimbas pada meningkatnya belanja gaji dan tunjangan pegawai pada komponen Belanja Tidak Langsung.

Komposisi Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal selama kurun waktu Tahun 2013-2017 didominasi oleh belanja barang jasa dan belanja modal. Proporsi belanja modal terhadap belanja langsung meningkat dari 28,33% di tahun 2013 menjadi 49,95% di tahun 2016 dikarenakan kebijakan Tahun Infrastruktur yang memprioritaskan belanja pada peningkatan kualitas dan kapasitas jalan dengan semangat “Jawa Tengah Tanpa Lubang”. Sementara itu komposisi belanja barang dan jasa meningkat

menjadi 63,78% pada tahun 2017 dikarenakan pembiayaan sekolah menengah dan pendidikan khusus yang beralih kewenangan ke pemerintah provinsi sebagaimana amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. Untuk mengetahui rincian belanja langsung daerah dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 3.7.
Realisasi Belanja Langsung
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017
(Dalam Juta Rupiah)

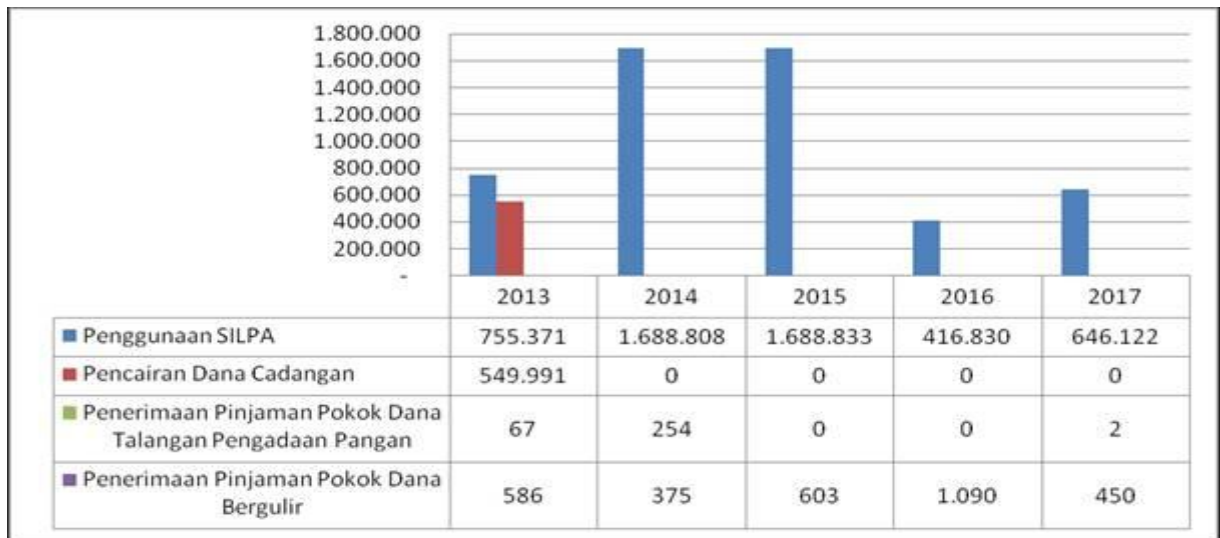
3.3.1.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah. Pembiayaan terdiri dari penerimaan dan pengeluaran yang dirinci sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan dan penerbitan surat obligasi.

Penerimaan pembiayaan daerah Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2015-2017 sebagian besar bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya. Untuk mengetahui realisasi penerimaan pembiayaan tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 3.8.
Realisasi Penerimaan Pembiayaan Tahun 2013-2017
(Dalam Juta Rupiah)

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Penyertaan Modal (Investasi) dan Pembentukan Dana Cadangan.

Selama kurun waktu Tahun 2013-2017, pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan tujuan untuk meningkatkan deviden, memperkuat kelembagaan, dan pengembangan usaha.

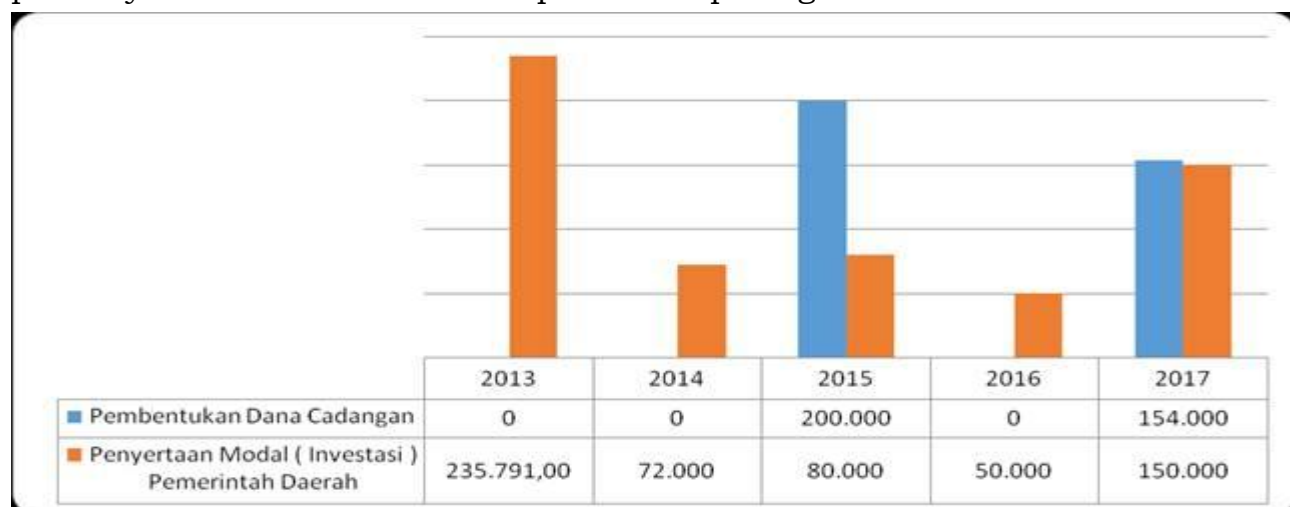
Peningkatan modal yang disetor pada BUMD dalam kurun waktu tahun 2013-2017 diikuti dengan kenaikan Deviden, namun tidak secara signifikan. Tahun 2017 persentase deviden terhadap modal yang disetorkan sebesar 11,94% cenderung menurun dari tahun 2013 sebesar 12,67%, sehingga perlu upaya dalam meningkatkan kinerja BUMD. Persentase deviden terhadap modal ditunjukkan tahun 2013–2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.2.
Persentase Deviden terhadap Modal pada BUMD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2017

Modal yang Disetor dan Deviden										
	2013		2014		2015		2016		2017	
BUMD	Modal disetor (Rp. Juta)	Deviden (Rp. Juta)	Modal disetor (Rp. Juta)	Deviden (Rp. Juta)	Modal disetor (Rp. Juta)	Deviden (Rp. Juta)	Modal disetor (Rp. Juta)	Deviden (Rp. Juta)	Modal disetor (Rp. Juta)	Deviden (Rp. Juta)
Total	2.078.487	263.264	2.155.487	291.847	2.230.710	320.614	2.280.710	340.394	3.107.778	371.112
(%)	12,67		13,54		14,37		14,92		11,94	

Sumber : Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Selain itu, pengeluaran pembiayaan juga diarahkan untuk pembentukan dana cadangan Pilkada. Untuk mengetahui realisasi pengeluaran pembiayaan tahun 2013-2017 dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 3.9.
Realisasi Pembiayaan Pengeluaran Tahun 2013-2017
(Dalam Juta Rupiah)

3.4. Analisis Keuangan Daerah

3.4.1. Analisis Fiskal Daerah

Analisis fiskal merupakan analisis yang menggunakan indikator rasio sederhana untuk memotret kondisi “kesehatan fiskal” Pemerintah Daerah, yang setiap rasionya terfokus pada empat aspek kesehatan fiskal yaitu pendapatan, pengeluaran, posisi operasi, dan struktur hutang. Analisis fiskal di pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 dijelaskan sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah Per Kapita

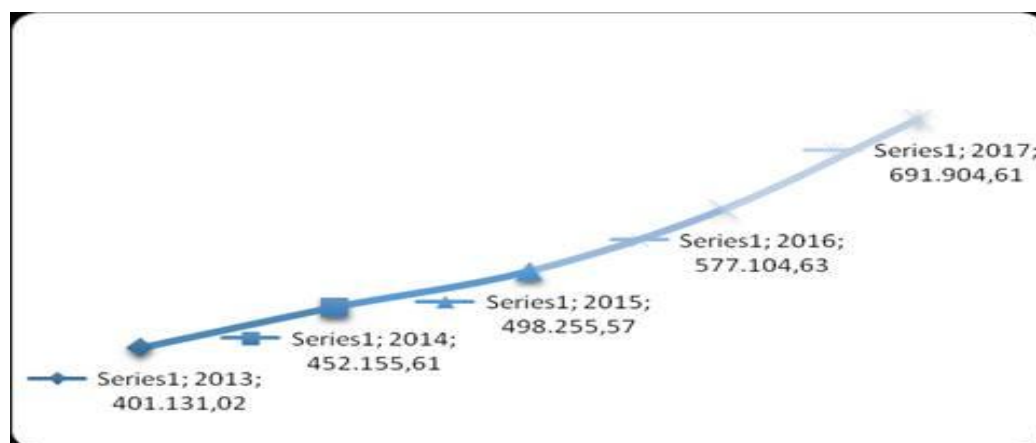
Rasio ini menunjukkan ukuran riil dari besarnya pendapatan daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang harus dilayani oleh Pemda. Semakin besar jumlah penduduk, maka semakin besar pula beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah. Hal ini perlu diatasi dengan mendorong upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah di masa mendatang. Pendapatan Perkapita Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kondisi yang baik yaitu 401.131 pada tahun 2013 meningkat menjadi 689.283 pada tahun 2017, dikarenakan terjadi kenaikan pendapatan daerah yang tinggi sebesar 76,96% dari tahun 2013 ke tahun 2017.

Peningkatan pertumbuhan penduduk dari tahun 2013-2017 dengan rata rata sebesar 2,9% harus diimbangi dengan upaya dalam meningkatkan pendapatan daerah yang lebih tinggi agar pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih baik. Gambaran pendapatan per kapita Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 3.3.
Pendapatan Daerah Per Kapita Tahun 2013-2017

Tahun	Total Pendapatan Daerah (Rupiah)	Jumlah Penduduk	Pendapatan Per kapita (Rupiah)
2013	13.343.358.327.576,00	33.264.339,00	401.131,02
2014	15.157.460.004.461,00	33.522.663,00	452.155,61
2015	16.828.153.996.157,00	33.774.141,00	498.255,57
2016	19.632.577.136.889,70	34.019.095,00	577.104,63
2017	23.703.174.631.507,00	34.257.865,00	691.904,61

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2018



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 3.10.
Pendapatan Daerah Perkapita Tahun 2013-2017

2. Kemandirian Keuangan Daerah

a. *Input Based*

Secara teori, kemandirian daerah melalui aspek kemandirian pendanaan APBD dapat direpresentasikan oleh indikator Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) baik Sumber Daya Alam (SDA) maupun pajak. Komponen PAD sendiri terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang sah termasuk di dalamnya pendapatan dari laba BUMD. Kemandirian PAD inilah sejatinya yang menjadi dasar utama pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia melalui penyerahan sumber-sumber pembiayaan kepada daerah sesuai asas *money follows function* atau saat ini disebut dengan *money follows program*.

Di dalam penghitungan DBH sendiri baik DBH Sumber Daya Alam (SDA) maupun DBH perpajakan, peran pemerintah pusat hanya bersifat akuntansi pembukuan untuk kemudian diserahkan kembali kepada masing-masing daerah sesuai dengan mekanisme alokasi persentase yang sudah diatur di dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dengan demikian, meski peran pemerintah daerah relatif kecil namun strategi pengembangan juga wajib diciptakan oleh masing-masing daerah tersebut.

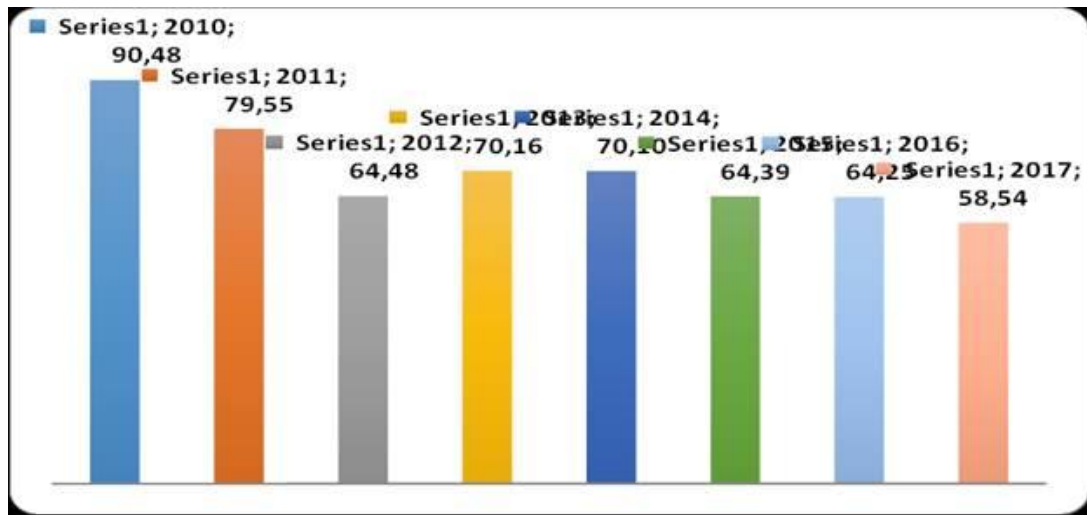
Bertolak dari teori tersebut, kemandirian daerah (APBD) kemudian dihitung dengan menggunakan rumusan PAD ditambah DBH (Pajak dan SDA) dibagi Total Belanja sebagai kewajiban yang harus dijalankan oleh pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan pelayanan pemerintahan, umum sekaligus pembangunan di daerah. Berdasarkan data realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah yang

digunakan sejak tahun 2010 hingga 2017, dapat dilihat bahwa terdapat tren yang fluktuatif di dalam penggambaran tingkat kemandirian APBD Provinsi Jawa Tengah. Satu hal yang pasti jika dibandingkan persentase kemandirian dari tahun 2010 hingga 2017, terlihat adanya penurunan yang signifikan dari 90,48% di tahun 2010 menjadi 58,54 % di tahun 2017. Kemandirian APBD Provinsi Jawa Tengah sempat mengalami perbaikan positif di tahun 2013-2014 sebesar rata-rata 70% namun kembali mengalami tekanan di periode APBD tahun-tahun berikutnya.

Penurunan *share* PAD dan DBH di tahun 2017 dikarenakan adanya pengalihan posting dana BOS dari pos hibah ke Dana Alokasi Khusus (DAK). Kondisi tersebut apabila dilihat lebih dalam maka peningkatan terbesar di Dana Perimbangan pada komponen alokasi untuk BOS yang bersifat *mandatory*. Dari aspek penggolongan kategori, mendasarkan angka *share* ini, dapat dikatakan bahwa keuangan Provinsi Jawa Tengah masih termasuk dalam kategori mandiri dengan *share* PAD dan DBH lebih besar dibandingkan Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Namun demikian tren penurunan kemandirian tetap wajib diwaspadai.

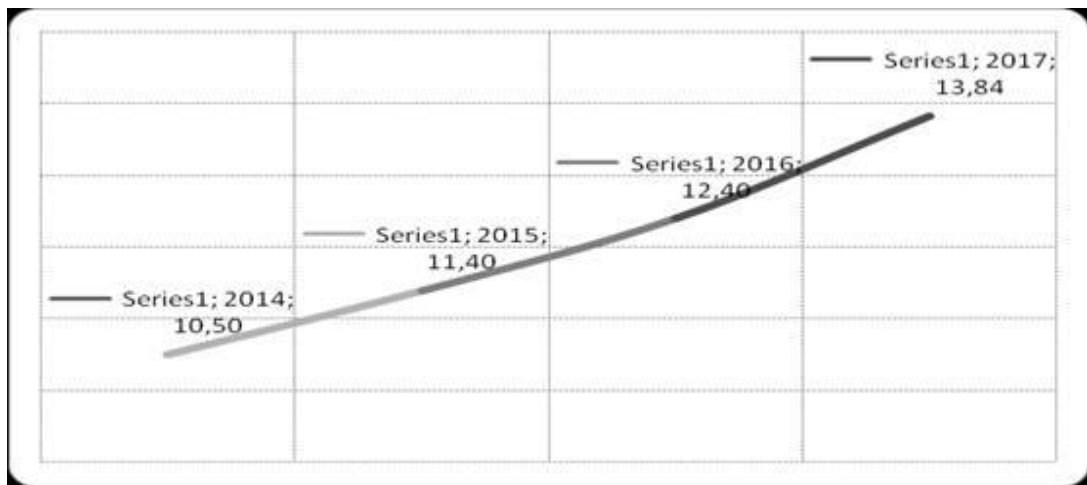
Ada beberapa hipotesis yang dapat menjawab tren tersebut diluar kondisi peningkatan BOS di tahun 2017. Hipotesis pertama terkait dengan belum optimalnya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD di Provinsi Jawa Tengah. Sumber-sumber PAD yang ada selama ini (kondisi eksisting) sepertinya sudah tidak lagi mampu membiayai kenaikan beban belanja APBD Provinsi Jawa Tengah yang terus meningkat setiap tahunnya. Karenanya perlu dilihat lagi sekaligus dilakukan evaluasi secara menyeluruh berbagai kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi PAD yang selama ini dilakukan oleh OPD yang terkait.

Hipotesis berikutnya yang dapat dikemukakan adalah adanya kenaikan secara signifikan beban belanja APBD Provinsi Jawa Tengah yang relatif memberikan tekanan pembiayaan APBD. Kenaikan beban belanja APBD ini menjadi positif jika memiliki dampak pertumbuhan dan pembangunan daerah namun menjadi berbahaya jika alokasi lebih banyak menyasar kegiatan yang tidak produktif dan memberikan dampak pertumbuhan ke depannya. Evaluasi kualitas spending dari APBD dapat dideteksi dengan menggunakan analisis penandaan anggaran (*budget tagging*) yang sedang dikembangkan oleh pemerintah pusat.



Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2018

Gambar 3.11.
Share Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Tahun 2010 - 2017



Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2018

Gambar 3.12.
Laju Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Tahun 2014–2017

Jika analisis *share* digunakan untuk melihat aspek kemandirian dari APBD suatu daerah, maka analisis *growth* ditujukan untuk menganalisis potensi pertumbuhan ekonomi ke depannya. Di dalam rumusannya, digunakan metode laju pertumbuhan dari analisis *share*. Dari hasil perhitungan, nilai *growth* dari 2013-2017 terlihat meningkat positif dari 10,50% di tahun 2014 menjadi 13,30% di tahun 2017. Hampir sama dengan peningkatan PDRB, pola kenaikan pertumbuhan PAD dan DBH Provinsi Jawa Tengah juga terlihat meningkat secara landai.

Dengan menggunakan data realisasi APBD Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017, hipotesis yang diajukan di dalam analisis PDRB, *share* dan *growth* sepertinya masih terkoneksi satu dengan lainnya serta memperlihatkan pola yang hampir sama: meningkat positif setiap tahunnya dengan proporsional yang stabil. Jika dikaitkan dengan aspek stabilitas, kondisi ini relatif cukup memadai. Namun dikaitkan dengan tantangan pembangunan tematik pemerintah yang semakin kompleks ke depannya, pola tersebut dikhawatirkan tidak mampu mengimbangi laju kebutuhan belanja yang naik secara signifikan.

Opsi yang diajukan jelas yaitu opsi realokasi belanja APBD menuju pola spending yang produktif dan berkualitas atau pola ekspansi pendapatan daerah serta pembiayaan inovatif APBD. Dilihat dari aspek pro dan kontra, opsi realokasi belanja APBD memiliki risiko yang lebih rendah dengan kendali utama di pemerintah serta tekanan politik yang lebih rendah. Namun output yang dihasilkan tidak akan terlalu signifikan dan masih berpotensi memunculkan adanya konflik kepentingan antar sektoral.

Sebaliknya opsi ekspansi pendapatan daerah melalui perluasan ekstensifikasi dan intensifikasi sekaligus pembiayaan inovatif daerah tentu memiliki risiko yang lebih tinggi namun dapat dimitigasi dengan kesiapan yang memadai. Kelebihannya output yang dihasilkan akan lebih besar dan mampu mengimbangi laju pertumbuhan belanja pembangunan yang lebih besar ke depannya.

b. Output Based

PDRB Jawa Tengah Tahun 2017 ditinjau dari pengeluaran, didominasi oleh komponen konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga dihitung dari pendapatan seluruh penduduk Jawa Tengah, baik yang bersumber dari gaji, upah, atau yang berusaha dan mendapatkan untung. Selain itu juga berasal dari transfer, baik transfer pemerintah (pensiunan), maupun transfer dari rumah tangga lain (dari anak yang bekerja di luar negeri atau tempat lain). Sebagian besar konsumsi rumah tangga berasal dari penduduk yang bekerja di sektor non pemerintah. Di sisi lain perlu untuk memacu komponen pengeluaran pada konsumsi pemerintah utamanya pada belanja infrastruktur dan sarana pendukung perekonomian wilayah yang mampu mendorong pergerakan pada sektor riil dan meningkatkan konsumsi lembaga swasta dari sisi pembiayaan. Secara detail dapat dilihat pada tabel berikut.

Berdasarkan analisis kontribusi PDRB Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2017, terlihat dominasi komponen konsumsi rumah tangga sebesar 62,70% di tahun 2013 dan berfluktuasi setiap tahunnya dikisaran 60% hingga tahun 2017. Dengan demikian laju pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah relatif masih didominasi oleh belanja konsumsi rumah tangga. Aspek pendorong konsumsi lainnya adalah konsumsi pemerintah yang berkisar 7-8% dari tahun 2013-2017. Aspek pembentukan investasi daerah melalui PMTB, relatif tetap di kisaran 29-30% dari tahun 2013-2017.

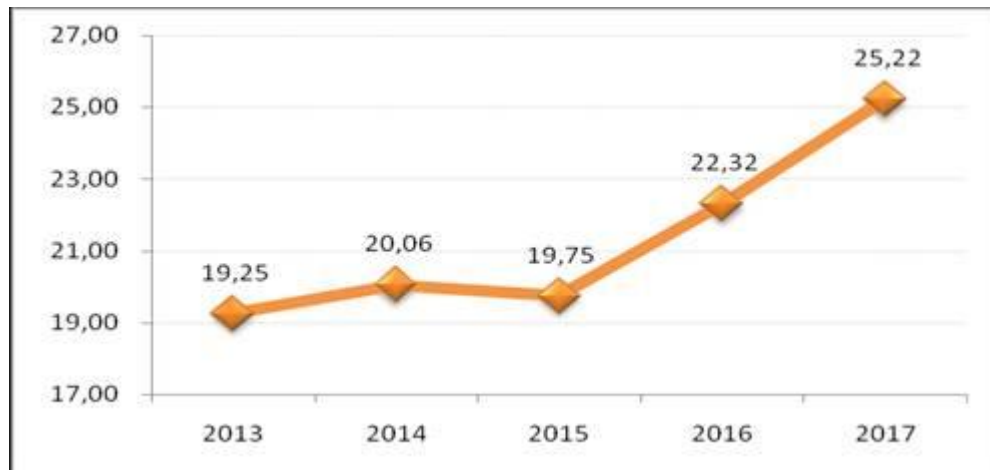
Tabel 3.4.

Kontribusi PDRB Jawa Tengah Menurut Pengeluaran Tahun 2013–2017 (%)

No	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Konsumsi Rumah Tangga	62,70	61,84	61,35	60,98	60,71
2	Konsumsi Lembaga Swasta	1,12	1,17	1,13	1,12	1,11
3	Konsumsi Pemerintah	8,35	8,19	8,43	8,05	7,89
4	PMTB	29,18	29,76	30,53	30,55	30,90
5	Perubahan Inventori	4,92	2,93	1,41	0,75	0,98
6	Ekspor	37,79	39,94	38,19	38,08	13,47
7	Impor	44,05	43,83	41,05	39,54	15,07
	PDRB Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah, 2018

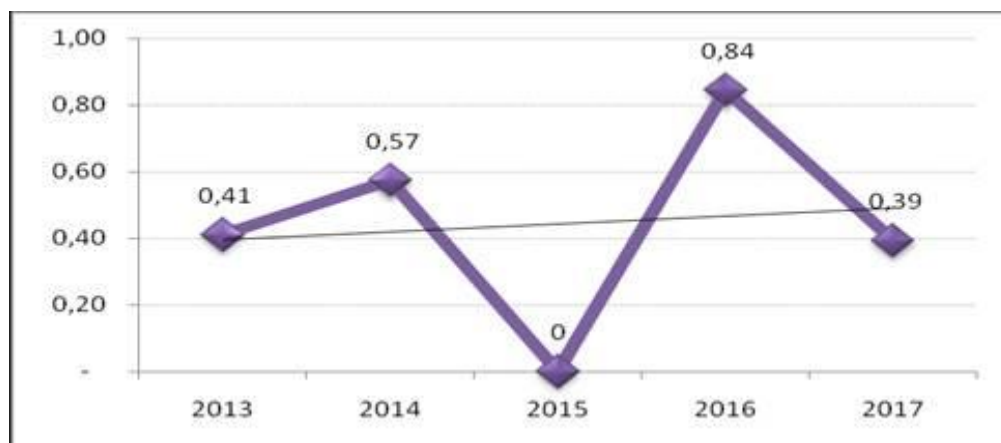
Peran pemerintah provinsi dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah dapat dilihat dari *share* APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB. Kontribusi APBD Provinsi Jawa Tengah dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir terhadap konsumsi pemerintah pada PDRB mengalami peningkatan, dari 19,25% (2013) menjadi 25,22% (2017). Sedangkan peran APBD dalam pembentukan modal tetap bruto dalam 5 (lima) tahun terakhir yang dilihat dari kontribusi belanja modal terhadap PMTB juga mengalami tren peningkatan, meskipun angkanya cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini berkorelasi dengan pertumbuhan PMTB yang relatif tetap, dimana belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum bisa berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan PMTB.



Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2018

Gambar 3.13.

**Kontribusi APBD Terhadap PDRB
Pada Komponen Konsumsi Pemerintah Tahun 2013-2017**



Sumber : Hasil Analisis Bappeda, 2018

Gambar 3.14.

**Kontribusi APBD Terhadap PDRB pada Komponen PMTB
Tahun 2013-2017**

Dominasi konsumsi rumah tangga di dalam pembentukan PDRB Provinsi Jawa Tengah seharusnya dapat diimbangi dengan pembentukan modal investasi produktif ke depannya. Hal ini menjadi urgen jika dikaitkan dengan status bonus demografi yang sudah dinikmati saat ini oleh Provinsi Jawa Tengah. Status bonus demografi yang dinikmati Provinsi Jawa Tengah menandakan adanya tenaga kerja produktif yang dapat dimanfaatkan.

Dari sektor lapangan usaha prioritas juga terlihat potensi industri pengolahan, pertanian/ kehutanan dan perikanan serta perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor. Keseluruhan lapangan usaha tersebut tentu membutuhkan penempatan bonus demografi secara memadai. Ketika sumbangan konsumsi rumah tangga ke depannya dapat diubah menjadi PMTB melalui pembentukan produktivitas masyarakat dan dunia usaha, maka benefit yang dihasilkan oleh Provinsi Jawa Tengah akan lebih berdampak jangka dan permanen. Peran pemerintah provinsi sangat vital dalam periode pembentukan modal awal melalui spending berkualitas di dalam struktur belanja APBD.

3. Ruang Fiskal Daerah.

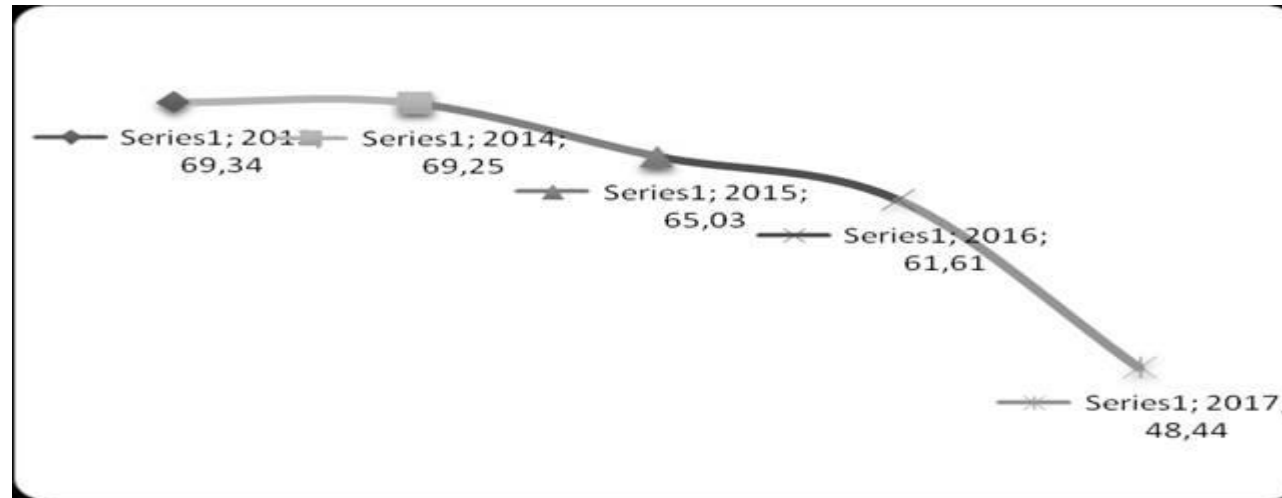
Ruang fiskal (*fiscal space*) secara sederhana dapat diartikan sebagai pengeluaran yang sifatnya tidak mengikat. Indikator ini menunjukkan keleluasaan (diskresi) yang dimiliki Pemda dalam menggunakan dananya secara bebas dalam menentukan prioritas belanja semakin kurang baik, sehingga perlu menjadi perhatian dalam menentukan prioritas agar dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di Jawa Tengah.

Pada tahun 2013-2017 kondisi ruang fiskal pada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah fluktuatif yaitu pada tahun 2013 sebesar 69,34%, mencapai puncaknya pada tahun 2014 sebesar 69,25% dan menurun tajam tahun 2017 menjadi 48,44%. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh 2 (dua) komponen utama yaitu peningkatan alokasi DAK dan peningkatan belanja pegawai pada tahun 2017 dengan adanya pelimpahan pegawai kabupaten/ kota ke provinsi. Sehubungan itu kedepan perlu lebih selektif dan cermat dalam menentukan prioritas dan pengalokasian anggaran untuk menyelesaikan permasalahan dan tantangan pembangunan Jawa Tengah. Untuk mengetahui ruang fiskal daerah Jawa Tengah tahun 2013-2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5.
Ruang Fiskal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Tahun	Total Pendapatan	Pendapatan Hibah	Dana Alokasi Khusus	Dana Otonomi Khusus/dana darurat	Belanja Pegawai	selisih	Ruang Fiskal
2013	13.343.358.327.576,00	24.326.664.073,00	82.522.510.000,00	2.615.274.862.435,00	1.368.517.191.270,00	9.252.717.099.798,00	69,34
2014	15.157.460.004.461,00	29.186.771.349,00	79.165.240.000,00	2.664.966.188.000,00	1.887.758.056.061,00	10.496.383.749.051,00	69,25
2015	16.828.153.996.157,00	34.513.356.452,00	57.972.640.000,00	3.606.197.997.347,00	2.186.704.011.852,00	10.942.765.990.506,00	65,03
2016	19.632.577.136.889,70	34.228.172.341,00	5.263.717.151.065,00	-	2.239.683.999.741,00	12.094.947.813.742,70	61,61
2017	23.703.174.631.507,00	36.938.923.844,00	6.556.890.148.700,00	-	5.626.847.225.304,00	11.482.498.333.659,00	48,44

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2018



Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2018

Gambar 3.15.
Ruang Fiskal Daerah Jawa Tengah Tahun 2013-2017

4. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

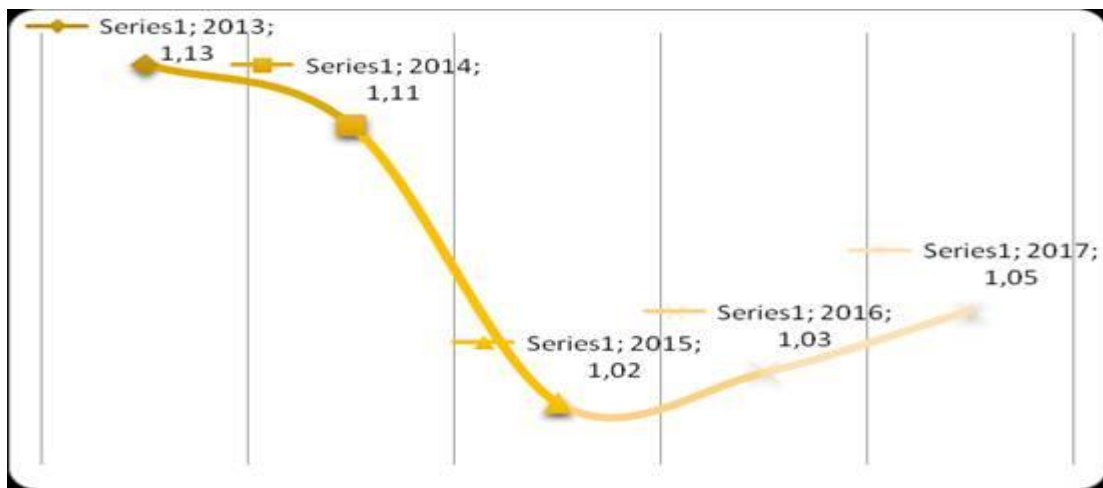
Kemampuan keuangan daerah tentu saja tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula. Kondisi kemampuan mendanai Belanja Daerah mengalami penurunan pada tahun sejak tahun 2014 sebesar 1,11 dan pada tahun 2015 sebesar 1,02 dan pada tahun 2016 sebesar 1,03 kemudian pada tahun 2017 sebesar 1,05.

Dengan kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain termasuk opsi pinjaman daerah/ obligasi ataupun kerjasama pemerintah dan badan usaha/ swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan dan menyikapi tantangan kedepan. Kemampuan mendanai belanja daerah Jawa Tengah tahun 2013-2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.6.
Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Tahun	Total Pendapatan	Penerimaan Pembiayaan	Total Belanja	Pengeluaran Pembiayaan	Jumlah		Kemampuan Mendanai Belanja Daerah
					6 (2+3)	7 (4+5)	
2013	13.343.358.327.576	1.306.017.471.526	12.724.776.308.434	235.791.000.000	14.649.375.799.102	12.960.567.308.434	1,13
2014	15.157.460.004.461,00	1.689.438.284.603	15.086.065.034.422	72.000.000.000	16.846.898.289.064	15.158.065.034.422	1,11
2015	16.828.153.996.157	1.689.436.791.747	17.820.760.495.342	280.000.000.000	18.517.590.787.904	18.100.760.495.342	1,02
2016	19.632.577.136.890	417.920.564.252	19.354.374.825.983	50.000.000.000	20.050.497.701.142	19.404.374.825.983	1,03
2017	23.703.174.631.507	646.575.639.755	22.884.713.018.754	304.000.000.000	24.349.750.271.262	23.188.713.018.754	1,05

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2018



Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2018

Gambar 3.16.
Rasio Kemampuan Pendanaan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2017

5. Belanja Modal

Kondisi rasio belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berfluktuatif sejalan dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah dan nasional. Belanja modal yang besar diharapkan akan memberikan dampak yang positif karena manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat untuk membiayai pembangunan fisik ataupun non fisik, dan berpengaruh bagi pertumbuhan ekonomi di daerah yang kemudian akan meningkatkan potensi penerimaan daerah yang baru selain dari sektor swasta, rumah tangga dan luar negeri. Pada tahun 2017 sebesar 6,36% lebih rendah dari 2013-2015 dengan puncak pada tahun 2015-2016 yaitu sebesar 14,11% dan 14,55% sebagai tahun infrastruktur yang merupakan kebijakan Gubernur untuk memperbaiki infrastruktur jalan dengan semangat “Jawa Tengah Tanpa Lubang”.

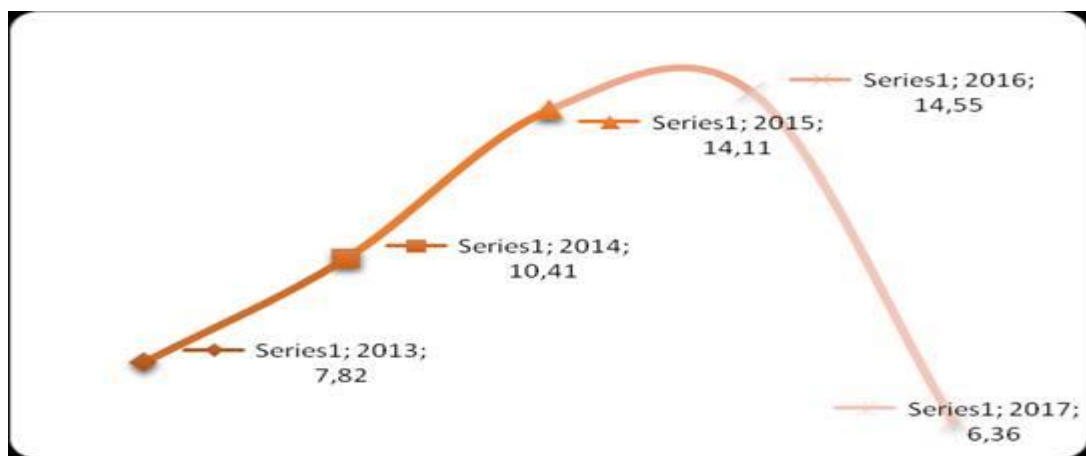
Penurunan belanja modal pada Tahun 2017 dikarenakan belanja untuk infrastruktur jalan telah mencapai 88,92% mantap dan untuk kondisi irigasi telah mencapai 79% pada tahun 2016 mantap dengan tetap menganggarkan biaya pemeliharaan dan perawatan yang memadai. Namun demikian, Pemerintah Provinsi juga mendorong belanja modal khususnya untuk infrastruktur melalui bantuan keuangan kabupaten/ kota yang diperuntukan bagi pembangunan sarpras untuk mengimbangi jalan provinsi dan kabupaten/ kota tidak mengalami ketimpangan. Rincian rasio belanja modal Jawa Tengah tahun 2013-2017 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.7.

Rasio Belanja Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Tahun	Belanja Modal	Total Belanja	Ratio Belanja Modal Terhadap Total Belanja
2013	994.740.520.114,00	12.724.776.308.434,00	7,82
2014	1.570.679.410.770	15.086.065.034.422,00	10,41
2015	2.514.681.555.008	17.820.760.495.342,00	14,11
2016	2.815.678.180.450	19.354.374.825.983,00	14,55
2017	1.454.598.084.464	22.884.713.018.754,00	6,36

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2018



Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2018

Gambar 3.17.

Rasio Belanja Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

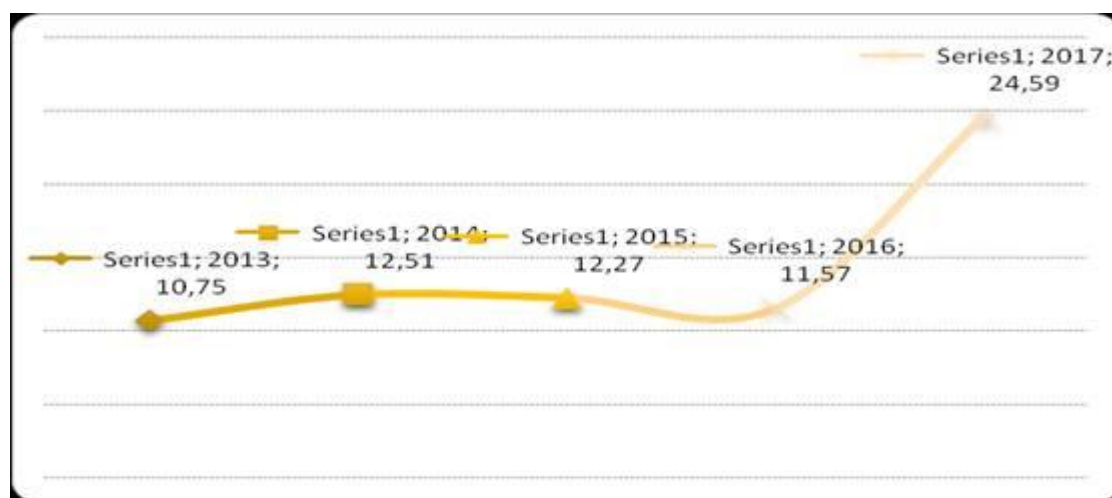
6. Belanja Pegawai Tidak Langsung

Belanja pegawai tidak langsung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah fluktuatif, pada tahun 2013 sebesar 10,75%; 2014 sebesar 12,51 %; tahun 2015 sebesar 12,27%; tahun 2016 sebesar 11,57 %; dan tahun 2017 sebesar 24,59%. Kenaikan belanja pegawai tidak langsung yang terjadi pada tahun 2017 disebabkan oleh pemberlakuan kebijakan pengalihan kewenangan dari kabupaten/ kota ke provinsi berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda dan PP Nomor 18 Tahun 2016 (Guru SMA/SMK, penyuluh, staf kehutanan, pengawas ketenagakerjaan dan staf TU SMA/SMK). Efisiensi, efektifitas dan profesionalisme sumber daya aparatur kedepan perlu untuk semakin di tingkatkan utamanya pada sisi peran sebagai keperantaraan dan *entrepreneur*, dengan demikian maka selain peran sebagai regulator, pelayanan dan pelaksana pembangunan tetapi juga ikut berupaya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dan meningkatkan pendapatan daerah. Rincian belanja pegawai tidak langsung Jawa Tengah tahun 2013-2017 sebagai berikut.

Tabel 3.8.
Belanja Pegawai Tidak Langsung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Tahun	Belanja Pegawai	Total Belanja	Belanja Pegawai Tidak Langsung
2013	1.368.517.191.270,00	12.724.776.308.434,00	10,75
2014	1.887.758.056.061,00	15.086.065.034.422,00	12,51
2015	2.186.704.011.852,00	17.820.760.495.342,00	12,27
2016	2.239.683.999.741,00	19.354.374.825.983,00	11,57
2017	5.626.847.225.304,00	22.884.713.018.754,00	24,59

Sumber: Bappeda Prov. Jateng, BPPDProv. Jawa Tengah, dan BPKAD Prov. Jateng, 2018



Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2018

Gambar 3.18.
Rasio Belanja Pegawai Tidak Langsung Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

7. Tax Ratio

Tax Ratio Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, yang semula pada tahun 2013 sebesar 0,92%, meningkat pada tahun 2016 sebesar 1,14%, hal ini masih perlu ditingkatkan karena masih berada dikisaran 1%. Indikasi penyebab rendahnya angka *tax ratio* daerah diantaranya belum optimalnya unit pemungut pajak dalam melakukan intensifikasi maupun ekstensifikasi dan tingkat kesadaran dari pembayar pajak yang masih perlu ditingkatkan.

Rasio tersebut dipergunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat dalam suatu daerah dan digunakan untuk mengetahui kira-kira seberapa besar porsi pajak dalam perekonomian daerah. Dengan demikian, pada hakikatnya *tax ratio* bisa dipergunakan untuk melihat indikasi besarnya beban pajak (*tax burden*) yang harus ditanggung masyarakat. Karena sifatnya yang demikian itu, maka sebenarnya *tax burden* terkait dengan *ability to pay*, di mana orang yang lebih mampu seharusnya membayar pajak lebih banyak. *Tax burden* terkait pula dengan keadilan.

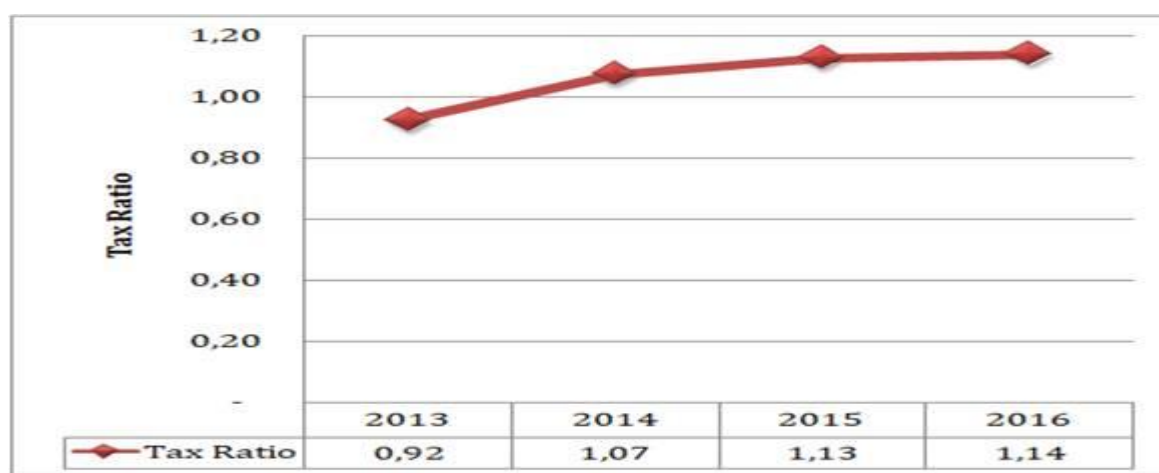
Tax ratio sebesar 1,14% pada tahun 2016 masih belum menggambarkan kondisi kepatuhan membayar pajak. Namun demikian, penjelasan sumber pajak yang realistis ,sesuai otoritas provinsi. Perhitungan *tax ratio* sesuai dengan kewenangan provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor, pajak air permukaan,

pajak rokok, pajak BPNKB, PBBKB, sehingga perluasan basis pajak masih di perlukan. Untuk mengetahui rincian *tax ratio* Jawa Tengah tahun 2013-2016 dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 3.9.
Tax Ratio Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2016

Tahun	Y Pajak	PDRB	Tax Ratio
2013	6.716.170.095.198,00	726.655.118.000.000,00	0,92
2014	8.213.117.977.920,00	764.959.150.950.000,00	1,07
2015	9.090.677.397.011,00	806.775.362.180.000,00	1,13
2016	9.672.518.189.424,00	849.383.564.590.000,00	1,14

Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2018



Sumber: Hasil Analisis Bappeda, 2018

Gambar 3.19.
Tax Ratio Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

3.4.2. Rasio Keuangan (Likuiditas, Solvabilitas, dan Rasio Aktivitas)

Kondisi rasio keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah diukur dengan menggunakan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013–2017 akan dijelaskan sebagai berikut:

- a. Rasio likuiditas yang diukur dengan rasio lancar kondisinya fluktuatif, dengan tren yang menurun sampai dengan tahun 2017. Untuk mengetahui rincian rasio lancar daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.10.
Ratio lancar Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

No	Rasio Lancar	Kas	Hutang Jangka Pendek	Persentase (%)
1	2013	475.981.254.971	226.494.585.623	2,102
2	2014	802.556.953.565,95	438.546.807.320,29	1,830
3	2015	317.676.320.662,68	673.411.011.288,46	0,472
4	2016	556.645.231.065,68	457.654.797.113,72	1,216
5	2017	1.163.279.517.548,72	369.458.500.479,62	3,148

Sumber: Bappeda Prov. Jateng (Hasil Analisis), BPPD Prov. Jawa Tengah, dan BPKAD Prov. Jateng, 2018

Demikian pula yang diukur menggunakan *Ratio Quick*, menunjukkan hasil dengan kondisi fluktuatif. Namun demikian, tiap tahunnya memiliki kemampuan membayar kewajiban jangka pendek baik. Untuk mengetahui rincian *ratio quick* daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.11.
Ratio Quick Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

No	Rasio Cair	Aset Lancar	Hutang Jgk Pndk	Persentase (%)
1	2013	2.589.949.172.591,50	226.494.585.623	11,435
2	2014	3.148.625.959.013,06	438.546.807.320,29	7,180
3	2015	2.414.080.083.141,02	673.411.011.288,46	3,585
4	2016	2.416.507.892.458,13	457.654.797.113,72	5,280
5	2017	3.131.058.914.994,58	369.458.500.479,62	8,474

Sumber: Bappeda Prov. Jateng (Hasil Analisis), BPPD Prov. Jawa Tengah, dan BPKAD Prov. Jateng, 2018

b. Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas:

1) Rasio Total Hutang terhadap Total Aset, menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Besar Rasio Total Hutang terhadap Total Aset pada tahun 2017 sebesar 0,011, hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

Rasio total hutang terhadap total aset pada tahun 2017 sebesar 0,011 lebih tinggi dibandingkan tahun 2013 sebesar 0,010. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap pembiayaan pada tahun 2017 lebih tinggi dan pengaruh hutangnya terhadap aktiva sangat kecil. Untuk mengetahui rincian rasio hutang terhadap aset daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.12.
Ratio Hutang terhadap Aset Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

No	Rasio Hutang Terhadap Aset	Total kewajiban	Total Aset	Persentase (%)
1	2013	226.494.485.623	23.688.246.919.958,30	0,010
2	2014	438.546.807.330,30	25.057.414.797.937,60	0,018
3	2015	673.411.011.288,46	23.671.833.181.231,30	0,028
4	2016	457.654.797.113,72	30.749.242.076.898,30	0,015
5	2017	369.458.500.479,62	34.193.587.532.658,30	0,011

Sumber: Bappeda Prov. Jateng (Hasil Analisis), BPPD Prov. Jawa Tengah, dan BPKAD Prov. Jateng, 2018

2) Rasio Hutang Terhadap Modal, menunjukan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya diartikan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pada tahun 2017 rasio ekuitas dana terhadap modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,989% lebih tinggi dibandingkan tahun 2016 yang hanya sebesar 0,985%. Dengan demikian nilai equitas dana masih di bawah total aset sehingga semakin mandiri tidak tergantung pada hutang. Untuk mengetahui rincian *ratio equitias* terhadap total aset daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.13.
Rasio Ekuitas Dana Terhadap Total Aset Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013-2017

No	Tahun	Total Ekuitas Dana	Total Aset	Persentase (%)
1	2013	22.406.839.128.361,30	23.688.246.919.958,30	0,946
2	2014	24.618.867.990.617,20	25.057.414.797.937,60	0,982
3	2015	22.998.422.169.942,90	23.671.833.181.231,30	0,972
4	2016	30.291.587.279.784,60	30.749.242.076.898,30	0,985
5	2017	33.824.129.032.178,70	34.193.587.532.658,30	0,989

Sumber: Bappeda Prov. Jateng (Hasil Analisis), BPPD Prov. Jawa Tengah, dan BPKAD Prov. Jateng, 2018

Adapun perkembangan kondisi neraca daerah selama kurun waktu 2013–2017 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.14.
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Tahun 2013-2018
Provinsi Jawa Tengah

No.	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	r (%)
1.	Aset						
1.1	Aset Lancar	2.589.949.172.592	3.148.625.959.013	2.414.080.083.141,02	2.416.507.892.458	3.131.058.914.995	6,98
	Kas	475.981.254.971	802.556.953.566	317.676.320.662,68	556.645.231.065,68	1.163.279.517.549	48,10
1.1.1	Kas di Kas Daerah	416.593.835.227	575.265.938.018	132.754.747.212,00	477.823.976.126,00	1.001.596.763.923	82,68
1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.845.400.855	5.024.555.724	133.316.903,00	5.219.569,00	51.864.956864.956	194,20
1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	1.668.594.932	2.108.720.965	1.846.028.100,68	3.552.954.854,68	2.627.762.537	20,09
1.1.4	Kas di Bendahara BLUD	54.873.423.957	220.157.738.859	182.942.228.447,00	74.742.024.751,00	120.568.201.007	71,62
	Kasa di Bendahara Sekolah				521.055.765,00	38.434.925.126	
1.2	Setara Kas	1.215.000.000.000	893.273.921.739	101.000.000.000,00	90.000.000.000,00		-56,52
	Deposito	1.215.000.000.000	893.273.921.739	101.000.000.000,00	90.000.000.000,00		-56,52
1.3	Piutang	805.546.707.847	1.318.410.156.591	1.765.213.318.422	1.552.612.178.395	1.744.590.456.609	24,47
1.3.1	Piutang Pajak	968.832.178.221	1.498.379.025.616	1.626.186.681.320,74	1.457.552.186.371,76	1.535.069.503.674	14,53
1.3.2	Piutang Retribusi	131.318.991.576	180.651.954.521	1.757.622.984,66	3.404.321.818,17	2.739.320.821	3,17
1.3.3	Piutang Lainnya	1.976.726.344	5.947.156.991	137.269.014.114,40	91.655.670.205,33	206.781.632.113	625,35
1.3.4	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-					
1.3.5	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-					
1.3.6	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Pusat	-					
1.3.7	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-					

No.	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	r (%)
1.3.8	Bagian Lancar Tagihan Angsuran	-					
1.3.9	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan	-					
1.3.10	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	-					
1.3.11	Belanja dibayar di muka	-	4.331.206.268	4.899.456.806,73	4.084.420.887,23	4.330.424.760,08	0,84
1.3.12	Cadangan Piutang tak tertagih	-296.581.188.294	-370.899.186.805				25,06
1.4	Persediaan	93.421.209.774	134.384.927.117	225.290.987.249	213.166.062.109,97	218.858.516.077	27,20
1.4.1	Persediaan	93.421.209.774	134.384.927.117	225.290.987.248,81	213.166.062.109,97	218.858.516.077	27,20
	Jumlah Aktiva Lancar	2.589.949.172.592	3.148.625.959.013	2.414.080.083.141,00	2.416.507.892.458	3.131.058.914.995	6,98
2	Investasi Jangka Panjang						
2.1	Investasi Non Permanen	3.723.344.671	1.059.214.274	1.190.193.680	-		-29,59
2.1.1	Pinjaman kepada Perusahaan Negara	-	-				
2.1.2	Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	-	-				
2.1.3	Pinj kepada Perusahaan Daerah Lainnya	-	-				
2.1.4	Investasi dalam surat utang negara	-	-				
2.1.5	Investasi dalam Proyek Pembangunan	-	-				
2.1.6	Investasi Non Permanen Lainnya	14.386.198.113	14.010.495.086	12.951.643.320	12.767.221.630,00	12.317.184.307	-3,78
2.1.7	Investasi Non Permanen Lainnya – Diragukan tertagih	-10.662.853.443	-12.951.280.813	-11.761.449.640	-12.767.221.630	-12.317.184.307	4,33
	Jumlah Investasi Non Permanen	3.723.344.671	1.059.214.274	1.190.193.680	-	-	-29,59
2.2	Investasi Permanen	3.075.623.667.878	3.370.353.787.663	3.944.341.596.781	4.938.525.484.030	5.915.900.631.546	17,90

No.	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	r (%)
2.2.1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	3.075.623.667.878	3.370.353.787.663	3.944.341.596.780,64	4.938.525.484.029,65	5.915.900.631.546	17,90
2.2.2	Investasi Permanen Lainnya	-	-				
	Jumlah Investasi Jangka Panjang	3.079.347.012.549	3.371.413.001.936	3.945.531.790.461,14	4.938.525.484.029,65	5.915.900.631.546	17,87
3	Aset Tetap						
3.1	Tanah	12.049.282.614.343	12.022.545.538.308	12.041.546.258.603	14.047.602.867.753,00	14.082.405.659.121	4,21
3.1.2	Tanah	12.049.282.614.343	12.022.545.538.308	12.041.546.258.603,00	14.047.602.867.753,00	14.082.405.659.121	4,21
3.2	Peralatan dan Mesin	1.639.440.311.001	2.026.913.136.723	2.487.822.453.681	4.137.036.035.629,00	4.550.345.023.097	30,66
3.2.1	Alat-alat Berat	123.464.114.017	163.543.485.846	217.254.848.408,00	243.855.189.735,00		25,85
3.2.2	Alat-alat Angkutan	235.912.834.816	279.515.708.271	316.847.081.273,00	411.271.317.168,00		20,55
3.2.3	Alat Bengkel	66.064.883.844	74.834.517.800	83.725.274.722,00	343.731.546.152,00		111,90
3.2.4	Alat Pertanian & Peternakan	23.489.938.495	26.904.453.295	29.245.519.220,00	43.371.360.507,00		23,85
3.2.5	Alat Kantor & Rumah Tangga	585.700.981.617	668.453.341.107	766.377.753.250,00	1.439.141.277.242,00		38,85
3.2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	65.917.900.185	76.941.765.087	89.738.545.041,00	169.386.903.541,00		40,70
3.2.7	Alat Metrologi dan Geofisika/Alat Ukur	2.931.528.313	-				
3.2.8	Alat-alat Kedokteran	437.604.370.764	628.420.951.941	861.758.387.334,00	1.050.764.214.609,00		34,22
3.2.9	Alat Laboratorium	95.855.993.727	106.194.730.073	120.049.806.075,00	430.397.304.339,00		94,12
3.2.10	Alat Keamanan	1.727.433.303	2.104.183.303	2.825.238.358,00	5.116.922.336,00		45,73
3.2.11	Alat Olah Raga	770.331.920	-				
3.3	Gedung dan Bangunan	1.988.851.891.747	2.187.298.919.043	2.451.498.857.074,00	5.220.907.723.607,00	5.730.805.806.182	36,20
3.3.1	Bangunan Gedung	1.959.893.947.970	2.140.462.007.630	2.384.090.117.288,00	5.135.111.123.667,00		45,33
3.3.2	Bangunan Monumen	28.957.943.777	46.836.911.413	67.408.739.786,00	85.796.599.940,00		44,31
3.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.819.295.718.257	3.751.629.233.518	6.571.963.506.130	8.936.327.703.915,00	9.735.406.904.806	38,29
3.4.1	Jalan dan Jembatan	2.360.448.190.266	3.193.735.838.374	5.876.612.131.115,00	7.950.504.088.588,00		51,53
3.4.2	Bangunan Air (Irigasi)	404.782.832.592	483.571.271.334	590.488.098.426,00	826.469.929.467,00		27,18

No.	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	r (%)
3.4.3	Instalasi dan Jaringan	54.064.695.399	74.322.123.810	104.863.276.589	159.353.685.860,00		43,51
3.5	Aset Tetap Lainnya	31.730.537.928	36.897.164.217	44.109.511.986,00	261.991.131.016,00	980.536.910.439,00	201,01
3.5.1	Buku dan perpustakaan	18.417.783.897	20.029.871.982	23.183.364.597,00	212.048.980.968,00		279,72
3.5.2	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan	8.023.024.797	9.706.188.492	12.684.909.271,00	39.999.772.780,00		89,00
3.5.3	Hewan/ Ternak dan tumbuhan	5.289.729.234	7.161.103.743	8.241.238.118,00	9.942.377.268,00		23,70
3.6	Kontruksi dalam pengerjaan	18.094.523.922	37.525.354.352	70.574.203.570,00	189.374.916.641,00	353.075.638.925,00	112,56
3.6.1	Kontruksi dalam pengerjaan	18.094.523.922	37.525.354.352	70.574.203.570,00	189.374.916.641,00	353.075.638.925,00	112,56
3.7	Akumulasi Penyusutan	-738.332.883.719	-2.016.146.708.987	(6.949.286.269.519,97)	(9.931.038.158.053,56)	(11.021.353.520.343,90)	117,91
3.7.1	Akumulasi Penyusutan	-738.332.883.719	-2.016.146.708.987	(6.949.286.269.519,97)	(9.931.038.158.053,56)	(11.021.353.520.343,90)	117,91
	Jumlah Asset Tetap	17.808.362.713.479	18.046.662.637.175	16.718.228.521.524	22.862.202.220.507	24.411.222.422.226	9,38
4.	Dana Cadangan						
4.1	Dana Cadangan	-		200.000.000.000,00	215.303.256.647,00	382.861.505.239,00	42,74
	Jumlah Dana Cadangan	-		200.000.000.000,00	215.303.256.647,00	382.861.505.239,00	42,74
5.	Aset Lainnya	-	-				
5.1	Tagihan Penjualan Anggaran	-	-				
5.2	Tuntutan Perbendaharaan	-					
5.3	Tuntutan Ganti Rugi	-					
5.4	Kemitraan dengan pihak ketiga	-					
5.5	Aset tak berwujud	-					
5.6	Aset Lain-lain	1.570.569.684	1.570.569.684	-		40.880.972.687,27	0,00
5.7	Aset yang dikerjasamakan	110.705.765.000	409.489.765.000	388.831.665.000,00	300.625.848.000,00	304.791.745.656,00	60,89
5.8	Aset tak berwujud	1.739.031.214	7.893.869.267	5.161.121.105,13	5.806.325.113,34	6.871.340.309,14	87,54
5.9	Aset Rusak Berat	96.572.665.441	71.758.995.863	-	10.271.050.142,73		-25,69
	Jumlah Aset Lainnya	210.588.021.339	490.713.199.814	393.992.786.105	316.703.223.256	352.544.058.652,41	26,25
	Jumlah Aset	23.688.246.919.958	25.057.414.797.938	23.671.833.181.231	30.749.242.076.898,00	34.193.587.532.658,30	10,34

No.	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	r (%)
6.	Kewajiban		-				
6.1	Kewajiban Jangka Pendek		-				
6.1.1	Uang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-				
6.1.2	Utang Bunga	-	-				
6.1.3	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	-	-				
6.1.4	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Pemda Lainnya	-	-				
6.1.5	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	-	-				
6.1.6	Bagian Lancar Utang Dalam Negeri – Lembaga Keu Bukan Bank	-	-				
6.1.7	Bagian Lancar Utang dalam Negeri – Obligasi	-	-				
6.1.8	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-				
	Pendapatan diterima di muka			932.847.400	352.809.133,66	29.298.716.441,33	4071,12
	Utang belanja			64.214.146.755	21.964.775.660,00		-65,79
6.1.9	Utang jangka Pendek Lainnya	226.494.485.623	438.546.807.320	608.264.017.134	435.337.212.320,06	340.159.784.038,29	20,51
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	226.494.485.623	438.546.807.320	673.411.011.288	457.654.797.114	369.458.500.480	23,97
6.2	Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-		-	
6.2.1	Utang Dalam Negeri – Pemerintah Pusat	-	-				
6.2.2	Utang Luar Negeri – Pemerintah Daerah Lainnya	-	-				
6.2.3	Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan Bank	-	-				
6.2.4	Utang Dalam Negeri – Lembaga Keuangan bukan Bank	-	-				

No.	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	r (%)
6.2.5	Utang Dalam Negeri – Obligasi	-	-				
6.2.6	Utang Jangka Panjang Lainnya	-	-				
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	-	-				
	Jumlah Kewajiban	226.494.485.623	438.546.807.320	673.411.011.288	457.654.797.114	369.458.500.480	23,97
7.	Ekuitas Dana Cadangan	-					
7.1	Ekuitas dana Lancar	-					
7.1.1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	1.688.808.490.668	1.688.833.254.642				0,00
7.1.2	Kas di Kasda Hutang Pihak Ketiga (Non SILPA)	-	-				
7.1.3	Kas di Pengeluaran Kas Hutang Pihak Ketiga (Non SILPA)	-	-				
7.1.4	Pendapatan yang ditangguhkan	1.687.109.695	2.134.741.557				26,53
7.1.5	Cadangan Piutang	805.546.707.847	1.318.410.156.591				63,67
7.1.6	Cadangan Persediaan	93.421.209.774	134.384.927.117				43,85
7.1.7	Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek	-226.286.011.673	-433.683.928.214				91,65
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar	2.363.177.506.310	2.710.079.151.693				14,68
7.3	Ekuitas Dana Investasi						
7.3.1	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Pendek	-	-				
7.3.2	Diinvestasikan Dalam Investasi Jangka Panjang	3.079.347.012.549	3.371.413.001.936				9,48
7.3.3	Diinvestasikan dalam aset Tetap	16.753.726.588.164	18.046.662.637.175				7,72
7.3.4	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	210.588.021.339	490.713.199.814				133,02

No.	Uraian	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	r (%)
7.3.5	Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	-	-				
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi	20.043.661.622.052	21.908.788.838.925	-			9,31
7.4	Ekuitas Dana Cadangan	-	-				
7.4.1	Diinvestasikan dalam dana cadangan	-	-				
	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	-	-				
	JUMLAH EKUITAS DANA	22.406.839.128.361	24.618.867.990.617	22.998.422.169.942	30.291.587.279.785	33.824.129.032.178,70	11,67
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	22.633.333.613.984	25.057.414.797.938	23.671.833.181.231	30.749.242.076.898	34.193.587.532.658	11,57

Sumber : BPKAD dan Hasil Analisis Bappeda, 2018

3.5. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa lalu

Kebijakan ini bermuatan tentang proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan, adapun secara terinci dijelaskan sebagai berikut:

3.5.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran Provinsi Jawa Tengah bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan pada periode tahun anggaran sebelumnya yang digunakan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa akan datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu lima tahun (2013–2017) cenderung mengalami peningkatan, baik belanja langsung maupun tidak langsung. Secara proporsional, belanja tidak langsung lebih besar dibandingkan belanja langsung. Hal tersebut dikarenakan dalam struktur belanja tidak langsung terdapat belanja hibah termasuk hibah dana BOS, bantuan sosial, bantuan keuangan, dan bagi hasil kepada kabupaten/kota dengan persentase yang relatif besar.

Dari realisasi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama kurun waktu 2013–2014, menunjukkan terjadi kenaikan pada Tahun 2017. Hal ini dikarenakan peningkatan belanja pegawai sebagai konsekuensi pelimpahan pegawai kabupaten/ kota ke provinsi pasca pelaksanaan Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di lihat dari proporsi belanja aparatur terhadap belanja daerah selama kurun waktu 2013–2017, terjadi penurunan dari 21,45% pada tahun 2013 menjadi 11,99% pada tahun 2017. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan penggunaan anggaran daerah Provinsi Jawa Tengah semakin baik. Realisasi dan proporsi belanja pemenuhan kebutuhan aparatur selama Tahun 2013–2017 secara rinci dapat di lihat pada tabel berikut.

Tabel 3.15.
Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

No	Uraian	Realisasi (Rp)				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	Belanja Tidak Langsung	1.368.517.191.270	1.887.758.056.061	2.188.078.731.611	2.239.683.999.741	5.626.847.225.304
1.1	Gaji dan Tunjangan	1.368.517.191.270	1.887.758.056.061	2.188.078.731.611	2.239.683.999.741	5.626.847.225.304
2	Belanja Langsung	1.411.013.192.003	1.934.688.454.760	3.213.456.867.978	2.821.624.017.098	9.008.108.071.937
2.1	Belanja Pegawai	373.147.586.146	309.678.431.527	310.260.340.657	232.791.665.630	5.519.915.399.959
2.2	Belanja Pegawai BLUD	43.125.085.743	54.330.612.463	78.335.061.468	95.400.725.304	106.931.825.345
2.3	Belanja Barang & Jasa	994.740.520.114	1.570.679.410.770	2.824.861.465.853	2.493.431.626.164	3.381.260.846.633
3	Total Belanja	2.779.530.383.273	3.822.446.510.821	5.401.535.599.589	5.061.308.016.839	14.634.955.297.241

Sumber : BPKAD dan Hasil Analisis Bappeda, 2018

Tabel 3.16.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

No	Tahun	Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp)	Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) (Rp)	Persentase (%)
1	2013	2.779.530.383.273	12.960.567.308.434	21,45
2	2014	3.822.446.510.821	15.158.065.034.422	25,22
3	2015	5.401.535.599.589	18.123.498.484.229	29,80
4	2016	5.061.308.016.839	19.404.374.825.983	26,08
5	2017	2.779.530.383.273	23.188.713.018.754	11,99

Sumber : BPKAD dan Hasil Analisis Bappeda, 2018

3.5.2. Analisis Pembiayaan

Analisis Pembiayaan Daerah bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa yang akan datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah.

Untuk menutup defisit maka diperlukan pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pada analisis ini dapat kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2015 mengalami defisit sebesar 7,56%, sedangkan tahun 2016 dan 2017 secara berturut-turut mengalami surplus sebesar 1,16% dan 2,17%. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pendapatan untuk membiayai semua belanja semakin baik. Adapun kondisi defisit yang terjadi pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 ditutup dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, penerimaan dana talangan pengadaan pangan dan dana bergulir. Untuk melihat kondisi defisit riil anggaran secara terinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.17.
Defisit Riil Anggaran dan Penutup Defisit Riil Anggaran
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	13.343.358.327.576	100	15.157.460.004.461	100	16.828.153.996.157	100	19.632.577.136.889	100	23.703.174.631.507	100
	Dikurangi Realisasi :										
	a. Belanja Daerah	12.724.776.308.434	95,36	15.086.065.034.422	99,53	17.820.760.495.342	105,89	19.354.374.825.983	98,58	22.884.713.018.754	96,55
	b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	235.791.000.000	1,77	72.000.000.000	0,48	280.000.000.000	1,66	50.000.000.000	0,25	304.000.000.000	1,28
	Surplus/Defisit Riil	382.791.019.142	2,87	-605.029.961	-0,003	-1.272.606.499.185	-7,56	228.202.310.906	1,16	514.461.612.753	2,17
2	Surplus/Defisit Riil Ditutup oleh Realisasi Penerimaan Pembiayaan										
2.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya	755.371.554.796	57,83	1.688.808.490.668	99,96	1.688.833.254.642	99,96	416.830.292.562	99,74	646.122.875.159	99,93
2.2	Pencairan Dana Cadangan	549.991.811.737	42,11	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)
2.4	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5	Penerimaan Kembali Penyertaan Modal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6	Penerimaan Dana Talangan Pengadaan Pangan	67.272.727	0,005	254.090.908	0,15	-	-	-	-	-	-
2.7	Penerimaan Dana Bergulir	586.832.266	0,04	375.703.027	0,02	603.537.105	0,04	1.090.271.690	0,26	452.764.596	0,07
2.8	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Kemitraan Hutan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir UKM dan IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Sapi Kereman	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.11	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Bantuan Peralatan Untuk IKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)
2.12	Penerimaan Kembali Dana Bergulir Pembangunan Gedung BPR/ BKK	-	-	-	-	-	-				
2.13	Penerimaan Dana Bergulir Fasilitas Usaha Perikanan	-	-	-	-	-	-				
2.14	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir Penempatan Tenaga Kerja Ke Luar Negeri	-	-	-	-	-	-				
2.15	Penerimaan Pinjaman Pokok Dana Bergulir kepada Kelompok Tani di seluruh Kecamatan	-	-	-	-	-	-				
2.16	Penerimaan Dana Bergulir Badan Kredit Desa	-	-	-	-	-	-				
3	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	1.306.017.471.526	100	1.689.438.284.603	100	1.689.436.791.747	100	417.920.564.252	100	646.575.639.755	100

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)	(Rp)	Proporsi (%)
4	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berjalan	1.688.808.490.668	100	1.688.833.254.642	100	416.830.292.562	100	646.122.875.159	100	1.161.037.252.508	100

Sumber: BPKAD Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 3.18.

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Provinsi Jawa Tengah 2013–2017

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp.)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA
1.	Jumlah SiLPA	755.371.554.796	-	1.688.808.490.668	-	1.688.833.254.642	-	416.830.292.562	-	646.122.875.159	-
2.	Pelampauan penerimaan PAD	799.713.959.888	105,87	818.881.962.432	48,48	1.163.203.946.496	-68,87	1.226.519.202.690	-2,94	398.101.202.233	61,61
3.	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	-9.371.983.027	-1,24	-74.974.417.320	-3,75	-196.033.458.260	-11,6	-134.036.423.017	-32,16	-331.891.763.907	-51,37
4.	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	- 112.087.573.285	-14,83	-11.587.647.651	-6,88	-35.335.001.087	-2,09	4.753.834.597	1,14	1.377.308.014	0,21
5.	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	959.908.170.566	127,07	952.883.562.578	56,42	1.810.799.160.658	107,22	-317.613.869.452	-76,20	- 1.070.465.984.246	-165,68

No	Uraian	2013		2014		2015		2016		2017	
		(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp.)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA	(Rp)	% dari SiLPA
6.	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	-	-	-	-	-					
7.	Kegiatan lanjutan	-	-	-	-	-		-	-	-	-

Sumber : BPKAD dan Hasil Analisis Bappeda, 2018

3.6. Kerangka Pendanaan

3.6.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja Tahun 2019-2023

Mendasarkan capaian kinerja pendapatan daerah tahun 2013-2018, maka pendapatan daerah tahun 2019–2023 diupayakan dapat meningkat. Peningkatan kinerja pendapatan daerah tersebut dapat ditempuh melalui kebijakan umum pengelolaan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi. Upaya intensifikasi pendapatan ditempuh melalui upaya:
 - a. Pemetaan potensi daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
 - b. Meningkatkan porsi pembayaran pajak melalui digitalisasi System (e-SAMSAT).
 - c. Meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam pembayaran pajak.
 - d. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI.
 - e. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan retribusi daerah.
 - f. Meningkatkan peran dan fungsi UPT, UPPD dan Balai Penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.

Sedangkan upaya ekstensifikasi pendapatan daerah melalui:

- a. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dan menjaga tingkat kesehatan BUMD untuk dapat meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
- b. Penguatan kelembagaan dan sinergitas antar BUMD dan OPD serta mengembangkan potensi usaha.
- c. Revitalisasi dan pendayagunaan aset milik pemerintah sebagai sumber pendapatan daerah.
- d. Perlunya menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan.

Belanja daerah tahun 2018-2023 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta perkiraan situasi dan kondisi pada tahun mendatang, serta dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2018–2023 diarahkan untuk:

1. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah yang dijamin melalui aspirasi masyarakat dalam Musrenbang sesuai dengan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;
2. Mengutamakan pemenuhan belanja untuk urusan wajib yang terkait pelayanan dasar sesuai standar pelayanan minimal;
3. Mengedepankan program-program yang menunjang pengentasan kemiskinan, peningkatan penyediaan lapangan kerja, peningkatan kualitas sumberdaya manusia, dan pertumbuhan ekonomi;
4. Memenuhi alokasi prosentase belanja untuk fungsi pendidikan diantaranya untuk pengembangan kelembagaan, sarana prasarana pendidikan termasuk pengembangan SMK *boarding*, potensi siswa, keterjangkauan pendidikan

(bantuan operasional untuk SMA, SMK, SLB negeri dan swasta serta madrasah aliyah), peningkatan kualitas, kompetensi guru dan kesejahteraan guru (kesejahteraan GTT-PTT dan pendidik keagamaan); fungsi kesehatan; dan infrastruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, kondisi fiskal Provinsi Jawa Tengah menunjukkan penurunan dan ke depan Pemerintah Daerah akan mengalami kesulitan dalam membiayai proyek-proyek pembangunan utamanya infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat apabila tidak ada inovasi dalam pembiayaan daerah. Adanya keterbatasan anggaran (*budget constrain*) ini memunculkan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan daerah, khususnya melalui penerbitan obligasi daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mendefinisikan obligasi daerah sebagai pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal. Penerbitan obligasi daerah secara khusus diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 147/PMK.07/2006 tentang Tata Cara Penerbitan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi Obligasi Daerah, yang telah direvisi menjadi PMK Nomor 111/PMK.07/2012 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pertanggungjawaban Obligasi Daerah. Saat ini, peraturan tersebut telah diubah menjadi PMK Nomor 180/PMK.07/2015.

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, penerbitan Obligasi Daerah dilakukan melalui penetapan Peraturan Daerah (Perda). Pembuatan peraturan daerah tentang obligasi daerah dibuat setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan. Diperlukan penetapan 2 (dua) Perda sebagai prasyarat penerbitan obligasi daerah. Pertama adalah Perda Penerbitan Obligasi Daerah yang antara lain memuat jumlah nominal, penggunaan dana, tanggung jawab atas pembayaran pokok bunga, dan biaya lainnya yang timbul sebagai akibat penerbitan obligasi daerah. Kemudian Perda Pembentukan Dana Cadangan yang berisi tentang kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan dana cadangan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan dana cadangan tersebut tidak dapat digunakan untuk keperluan lainnya.

Obligasi daerah sebagai instrumen keuangan layak untuk menjadi pilihan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah khususnya infrastruktur publik di daerah. Opsi pilihan obligasi daerah ini mengingat obligasi daerah adalah jenis pembiayaan atau pinjaman jangka panjang dari masyarakat yang sesuai sifat usia infrastruktur publik itu sendiri yang juga berjangka panjang. Pilihan jenis infrastruktur daerah yang dibiayai melalui penerbitan obligasi daerah juga mempertimbangkan nilai keekonomian infrastruktur tersebut yang memberikan penghasilan berupa pendapatan dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta dapat menjamin kelancaran pembayaran pokok, bunga dan denda atas obligasi daerah dimaksud.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur sesungguhnya dapat dilakukan sendiri oleh daerah dan secara keseluruhan dapat menunjang keberhasilan pembangunan nasional sebagaimana dimaksud dalam tujuan Negara Indonesia, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan

kehidupan bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pemerintah Daerah dapat menerbitkan Obligasi Daerah hanya untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang menjadi urusan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Obligasi yang diterbitkan dapat digunakan untuk membiayai beberapa kegiatan yang berbeda.

Kegiatan pemerintah daerah yang dapat dibiayai dengan obligasi daerah adalah pembangunan untuk pelayanan publik yang menjadi kewenangan Provinsi dan berpotensi menghasilkan pendapatan daerah, di antaranya:

- a. rumah sakit;
- b. infrastruktur olahraga;
- c. infrastruktur penunjang perekonomian daerah diantaranya pembangunan/ pengembangan terminal;
- d. pengembangan kawasan pariwisata;
- e. kegiatan lainnya yang berpotensi meningkatkan pendapatan daerah.

Analisis Ekonomi Makro dari Bank Indonesia tentang kondisi perekonomian ditandai dengan likuiditas global yang menegat dan ketidakpastian pasar keuangan tetap tinggi, di tengah kenaikan pertumbuhan ekonomi global 2018 yang diperkirakan terus berlanjut. PDB Dunia 2018 dan 2019 diasumsikan tetap tumbuh sebesar 3,9% dan 3,8%. Berlanjutnya perbaikan ekonomi global terutama didorong akselerasi pertumbuhan ekonomi AS, lebih lanjut diprediksi akan terjadi kenaikan *The Federal Funds Rate* (FFR) yaitu 4 kali di 2018 dan 3 kali di 2019, sementara defisit fiskal AS akan tetap besar sehingga berkontribusi pula pada tren kenaikan *Yield Government Bond* AS.

Besaran kenaikan Suku Bunga kebijakan diikuti dengan besaran perubahan yield obligasi yang bervariasi. Pasca implementasi BI *7 Day (Reserve) Repo Rate* (BI 7DRR), rata-rata selisih *yield* obligasi pemerintah dengan Suku Bunga (SB) kebijakan berada pada kisaran 1,9-2,5%. Sedangkan kenaikan suku bunga kebijakan hampir selalu direspon dengan kenaikan *yield* obligasi korporasi, kecuali pada November 2004. Sama halnya dengan *government bond*, besaran kenaikan SB kebijakan diikuti dengan besaran perubahan *yield* obligasi korporasi yang bervariasi. Pasca implementasi BI 7DRR, rata-rata selisih *yield* obligasi korporasi dengan SB kebijakan berada pada kisaran 3,6-4,3%. Dengan BI Rate saat ini sebesar 5,25% maka *yield* obligasi daerah yang mengacu pada obligasi korporasi diperkirakan akan sebesar 9,65%, yang berarti masih dibawah buffer yang dialokasikan yaitu sebesar 10%.

PDB Triwulan II 2018 on track ditopang permintaan domestik. Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Juni 2018 tetap terkendali dan berada dalam kisaran sasaran inflasi $3,5\% \pm 1\%$ (yoy). Intermediasi perbankan semakin membaik, namun diiringi dengan peningkatan Risiko kredit. Penyaluran kredit Mei tumbuh meningkat dibandingkan April 2018, diiringi berlanjutnya tren kenaikan pembiayaan dari pasar keuangan.

Sebagai catatan penting bahwa dalam beberapa tahun terakhir ekonomi Indonesia mengalami perbaikan. *Investment Grade* Indonesia meningkat dari BAA3 menjadi BAA2. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dianggap sangat bertanggung jawab dan berhati-hati dalam mengelola keuangannya. Dengan demikian, maka penerimaan pembiayaan daerah Jawa Tengah tidak hanya fokus

dari pemanfaatan SiLPA sebagai sumber utama penerimaan, namun diupayakan melalui optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber penerimaan lain yaitu:

1. Rencana penerbitan obligasi daerah;
2. Revitalisasi dan restrukturisasi BUMD dan BLUD;
3. Kerjasama pemerintah dengan swasta (KPBU);

Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah diarahkan untuk:

1. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban dalam prinsip kehati-hatian (*prudential*) dan pengelolaannya berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal diantaranya untuk pembentukan BUMD holding migas.
2. Pembentukan dana cadangan untuk pelaksanaan Pilkada dan pengembalian pokok pinjaman obligasi daerah.

Proyeksi pendanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan angka optimal yang berdasarkan atas asumsi dan tren rata-rata pertumbuhan dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Dari sisi pendapatan yang dipakai adalah Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-Lain PAD yang Sah. Dari sisi belanja untuk membiayai program strategis dan prioritas pembangunan daerah serta pencapaian indikator kinerja utama Jawa Tengah tahun 2018-2023. Dari sisi pembiayaan, pemerintah akan melakukan kebijakan hutang daerah untuk membiayai investasi publik yang menghasilkan pendapatan daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kemudian, proyeksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan tersebut akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan serta perubahan terhadap asumsi makro ekonomi, harga minyak, nilai tukar rupiah, inflasi, dan perkembangan situasi serta kondisi ekonomi global, nasional, dan regional.

Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.19.
Proyeksi Anggaran pendapatan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2019–2023

No	Uraian	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
1	PENDAPATAN	<u>25.965.581.322.000</u>	<u>27.243.838.043.000</u>	<u>28.523.967.683.000</u>	<u>29.906.003.181.000</u>	<u>31.505.807.166.000</u>
A	Pendapatan Asli Daerah	<u>14.112.159.378.000</u>	<u>15.414.716.099.000</u>	<u>16.694.845.739.000</u>	<u>18.076.881.237.000</u>	<u>19.676.685.222.000</u>
1	Pajak Daerah	11.712.670.654.000	12.973.821.192.000	14.173.421.047.000	15.423.329.514.000	16.748.052.566.000
2	Retribusi Daerah	126.080.182.000	128.621.850.000	142.241.253.000	157.311.990.000	175.946.077.000
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	513.121.184.000	546.749.969.000	606.878.709.000	673.663.767.000	756.261.106.000
4	Lain-Lain PAD	1.760.287.358.000	1.765.523.088.000	1.772.304.730.000	1.822.575.966.000	1.996.425.473.000
B	Dana Perimbangan	<u>11.766.733.523.000</u>	<u>11.766.733.523.000</u>	<u>11.766.733.523.000</u>	<u>11.766.733.523.000</u>	<u>11.766.733.523.000</u>
1	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak	786.265.656.000	786.265.656.000	786.265.656.000	786.265.656.000	786.265.656.000
2	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.784.512.513.000	3.784.512.513.000	3.784.512.513.000	3.784.512.513.000	3.784.512.513.000
3	Dana Alokasi Khusus (DAK)	7.195.955.354.000	7.195.955.354.000	7.195.955.354.000	7.195.955.354.000	7.195.955.354.000
C	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	<u>86.688.421.000</u>	<u>62.388.421.000</u>	<u>62.388.421.000</u>	<u>62.388.421.000</u>	<u>62.388.421.000</u>
	Dana Insentif Daerah	62.388.421.000	62.388.421.000	62.388.421.000	62.388.421.000	62.388.421.000
	Pendapatan Hibah	24.300.000.000				
	Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak					
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus					
2	BELANJA	<u>26.632.340.745.000</u>	<u>27.316.783.043.000</u>	<u>28.913.022.683.000</u>	<u>29.573.003.181.000</u>	<u>31.940.807.166.000</u>
A	Belanja Tidak Langsung	<u>18.805.819.699.000</u>	<u>18.898.864.359.000</u>	<u>19.793.007.683.000</u>	<u>20.628.643.181.000</u>	<u>23.163.080.166.000</u>
1	Belanja Pegawai	6.154.016.100.000	6.156.635.153.000	6.213.882.668.000	6.283.668.602.000	6.392.052.204.000
2	Belanja Bunga	-	50.633.550.000	173.353.500.000	195.583.500.000	195.583.500.000
3	Belanja Subsidi	-				
4	Belanja Hibah	5.417.699.400.000	5.701.910.500.000	5.886.946.600.000	6.045.165.600.000	7.403.415.600.000
5	Belanja Bantuan Sosial	48.292.000.000	48.292.000.000	48.292.000.000	48.292.000.000	48.292.000.000
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota	5.105.018.278.000	5.701.393.156.000	6.205.532.915.000	6.690.933.479.000	7.283.736.862.000
7	Belanja Bantuan Keuangan	2.057.793.921.000	1.200.000.000.000	1.225.000.000.000	1.325.000.000.000	1.800.000.000.000
8	Belanja Tidak Terduga	23.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000

No	Uraian	Tahun				
		2019*	2020	2021	2022	2023
B	BelanjaLangsung	7.826.521.046.000	8.417.918.684.000	9.120.015.000.000	8.944.360.000.000	8.777.727.000.000
	Surplus/Defisit	(666.759.423.000)	(72.945.000.000)	(389.055.000.000)	333.000.000.000	(435.000.000.000)
3	PEMBIAYAAN NETTO	666.759.423.000	72.945.000.000	389.055.000.000	(333.000.000.000)	435.000.000.000
A	Penerimaan	686.759.423.000	762.595.000.000	1.563.555.000.000	447.000.000.000	1.000.000.000.000
	SiLPA	686.759.423.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000
	Penerimaan Obligasi Daerah**		562.595.000.000	1.363.555.000.000	247.000.000.000	
	Pencairan data cadangan Pilgub	-				800.000.000.000
B	Pengeluaran	20.000.000.000	689.650.000.000	1.174.500.000.000	780.000.000.000	565.000.000.000
	Dana cadangan Pilgub	-	300.000.000.000	300.000.000.000	200.000.000.000	-
	Dana cadangan Obligasi Daerah		150.000.000.000	300.000.000.000	450.000.000.000	450.000.000.000
	Penyertaan Modal	20.000.000.000	239.650.000.000	574.500.000.000	130.000.000.000	115.000.000.000
	Total APBD	27.299.100.168.000	27.243.838.043.000	28.523.967.683.000	29.906.003.181.000	31.505.807.166.000

Sumber: Hasil Analisis, 2019;

Ket: * Perda APBD TA. 2019

** Penerimaan Obligasi akan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku

3.6.2. Kerangka Pendanaan

Guna menghitung kerangka pendanaan selama lima tahun ke depan, dilakukan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah, sebagaimana dapat dilihat pada tabel di berikut.

Tabel 3.20.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Untuk Mendanai Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2023

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan	25.965.581.322.000	27.243.838.043.000	28.523.967.683.000	29.906.003.181.000	31.505.807.166.000
2	Pencairan Dana Cadangan					800.000.000.000
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	686.759.423.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000

No	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
4	Obligasi Daerah**	-	562.595.000.000	1.363.555.000.000	247.000.000.000	-
	Total Penerimaan	26.652.340.745.000	28.006.433.043.000	30.087.522.683.000	30.353.003.181.000	32.505.807.166.000
	Dikurangi					
4	Belanja Tidak Langsung (Belanja Gaji Pegawai)	3.067.891.189.000	3.066.635.153.000	3.113.882.668.000	3.163.668.602.000	3.226.281.963.000
5	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000.000	689.650.000.000	1.174.500.000.000	780.000.000.000	565.000.000.000
	Kapasitas Riil Kemampuan Daerah	23.564.449.556.000	24.250.147.890.000	25.799.140.015.000	26.409.334.579.000	28.714.525.203.000

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Ket:

* Perda APBD TA. 2019

** Penerimaan Obligasi akan disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku

Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh proyeksi kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah. yang kemudian akan dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan Anggaran Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dengan proyeksi seperti digambarkan pada Tabel berikut.

Tabel 3.21.
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 – 2023

No	Uraian	Proyeksi (Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kapasitas riil kemampuan keuangan	23.564.449.556.000	24.250.147.890.000	25.799.140.015.000	26.409.334.579.000	28.714.525.203.000
2	Rencana alokasi pengeluaran prioritas I	17.908.263.924.000	19.163.669.990.000	20.492.626.015.000	20.824.601.579.000	22.525.771.962.000
	Belanja Program Prioritas dalam rangka pencapaian visi misi KDH dan Prioritas Pembangunan Daerah	7.826.521.046.000	8.417.918.684.000	9.120.015.000.000	8.944.360.000.000	8.777.727.000.000
	Bantuan Hibah :					
	- Hibah BOS	4.905.432.600.000	4.905.432.600.000	4.905.432.600.000	4.905.432.600.000	4.905.432.600.000
	- Hibah KPU dan Bawaslu (Pilkada)	0	0	0	0	1.275.000.000.000
	Bantuan Sosial	48.292.000.000	48.292.000.000	48.292.000.000	48.292.000.000	48.292.000.000

No	Uraian	Proyeksi (Rp)				
		2019	2020	2021	2022	2023
	Belanja Bagi Hasil Kab/Kota	5.105.018.278.000	5.701.393.156.000	6.205.532.915.000	6.690.933.479.000	7.283.736.862.000
	Belanja Bunga Obligasi	0	50.633.550.000	173.353.500.000	195.583.500.000	195.583.500.000
	Belanja Tidak Terduga	23.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
3	Rencana alokasi pengeluaran prioritas II	5.656.185.632.000	5.086.477.900.000	5.306.514.000.000	5.584.733.000.000	6.188.753.241.000
	Tambahan Penghasilan	3.086.124.911.000	3.090.000.000.000	3.100.000.000.000	3.120.000.000.000	3.165.770.241.000
	Bantuan Hibah :					
	- Hibah Lainnya	512.266.800.000	796.477.900.000	981.514.000.000	1.139.733.000.000	1.222.983.000.000
	Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa	2.057.793.921.000	1.200.000.000.000	1.225.000.000.000	1.325.000.000.000	1.800.000.000.000
4	Surplus Anggaran Riil/Berimbang	0	0	0	0	0

Sumber : Hasil Analisis, 2019

Ket : * APBD TA. 2019

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Gambaran kondisi Jawa Tengah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya menunjukkan fakta bahwa masih ada persoalan pembangunan daerah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan. Permasalahan pembangunan daerah juga tidak terlepas dari pengaruh global, regional, dan nasional, seperti kondisi sosial, politik, dan ekonomi global, serta berbagai kebijakan di tataran global dan nasional. Kondisi lingkungan global, regional, dan nasional yang semakin dinamis dan *unpredictable* dalam jangka menengah akan menjadi tantangan sekaligus peluang dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah Jawa Tengah lima tahun kedepan.

4.1. Lingkungan Strategis

4.1.1. Lingkungan Global

Kondisi lingkungan global yang menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pembangunan daerah Jawa Tengah lima tahun kedepan antara lain:

Pertama, pemulihan perekonomian global yang diprediksikan semakin membaik secara moderat, meskipun bisa dikatakan belum pulih sepenuhnya. Perekonomian negara-negara maju mulai ke arah tumbuh kembali dan tidak lagi terseret permintaan negara-negara berkembang. Perekonomian di kawasan Eropa, Jepang, Cina, dan negara-negara *emerging market* lainnya diperkirakan akan tumbuh sekitar 2-5 persen. Demikian pula perekonomian Amerika Serikat yang mulai pulih, dengan mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang mulai meningkat. Meskipun pertumbuhan ekonomi global mulai menunjukkan gejala positif, perlu tetap diwaspadai terjadinya inflasi global yang meningkat, seperti yang terjadi di Amerika Serikat, Cina, dan negara-negara sedang berkembang Eropa. Ditambah dengan gejolak harga minyak dunia dimana disatu sisi memberi dampak positif pada perekonomian nasional, namun juga dapat berdampak pada tekanan inflasi apabila tidak diantisipasi sejak awal.

Kebijakan perekonomian AS saat ini juga perlu tetap diantisipasi dampaknya ke depan, terkait dengan normalisasi kebijakan moneter seperti meningkatnya suku bunga FFR (*Federal Funds Rate*), yang berpotensi memicu gejolak di pasar keuangan. Gejolak tersebut dapat mengakibatkan arus modal keluar (*capital outflow*) tiba-tiba dari negara-negara berkembang, seperti Indonesia, yang dapat memicu kenaikan pinjaman dan fluktuasi harga saham sehingga investasi bisa terhambat. Kebijakan perpajakan AS (*tax policy*) yang baru juga dapat memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian Indonesia, dimana Pemerintah AS berencana memotong pajak AS yang dapat mendorong perpindahan arus modal ke AS dan pelemahan mata uang global terhadap dolar AS. Selain kebijakan Pemerintah AS, kebijakan ekonomi Pemerintah Cina yang sedang melakukan restrukturisasi perekonomian dalam upaya menyeimbangkan komposisi pertumbuhannya dinilai juga dapat berpengaruh pada perekonomian nasional dan daerah.

Kedua, pergeseran peran ekonomi Kawasan Asia Pasifik dalam perekonomian global. Kawasan Asia Pasifik mulai mengalami pergeseran gravitasi

perekonomian global karena kurang lebih 41 persen penduduk dunia berada di kawasan ini dan 50 persen transaksi dunia terjadi di kawasan ini. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, perekonomian Asia Pasifik mulai pulih dan membaik. Pertumbuhan kawasan akan terus ditopang oleh permintaan domestik yang kuat, termasuk dari publik dan investasi swasta. Tren ini akan ditopang oleh kenaikan ekspor secara bertahap, seiring dengan pemulihan perekonomian yang berkembang. Berbagai kerjasama lintas negara Asia Pasifik yang dibangun dalam beberapa tahun ini menempatkan posisi kawasan Asia Pasifik sebagai kawasan ekonomi perdagangan yang semakin kuat. Kerjasama tersebut antara lain *Trans Pacific Partnerships (TPP)*, *ASEAN Regional Forum (ARF)*, *Shanghai Cooperation Organization (SCO)*, *East Asia Summit (EAS)*, serta *Expand ASEAN Maritime Forum (EAMF)*.

Ketiga, stabilitas politik global yang dinamis. Kebijakan proteksi ekonomi Amerika Serikat dengan jargon *America First*, dan diikuti dengan penarikan diri AS dari komitmen Kemitraan Trans Pasifik/TPP, akan memberikan pengaruh pada inisiatif perdagangan dunia, termasuk Indonesia, karena AS merupakan salah satu negara tujuan ekspor komoditas Indonesia. Selain itu, ketegangan politik di kawasan Korea Utara dan Timur Tengah saat ini, serta di negara Arab Saudi juga dapat mempengaruhi ketidakstabilan ekonomi dan politik regional dan global.

Gerakan radikalisme dan terorisme juga terus menjadi tantangan stabilitas politik nasional, serta merebaknya peredaran NAPZA lintas negara yang semakin tidak terbandung. Perkembangan transportasi dunia yang semakin cepat, berakibat pada terbukanya kemudahan akses distribusi barang dan jasa, serta pergerakan manusia lintas negara. Hal ini perlu menjadi perhatian dalam pembangunan kedepan, untuk bisa lebih pro aktif mengantisipasi perubahan dan pergerakan tersebut.

Keempat, keterbukaan pasar ASEAN dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang sudah diimplementasikan sejak tahun 2016. Pemberlakuan MEA sebagai pasar tunggal ASEAN, tetap menjadi sebuah peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dan bahkan Jawa Tengah kedepan. Kebutuhan pasar tenaga kerja terampil, aliran barang, investasi, dan modal yang lintas batas negara, menuntut kesiapan negara dan daerah mengantisipasinya secara tepat dan cepat. Apalagi Indonesia yang memiliki penduduk dengan jumlah terbesar ketiga dunia, merupakan potensi pasar komoditas utama MEA. Disisi lain, ketersediaan tenaga kerja produktif, terampil, dan kompeten, seharusnya menjadi peluang kompetitif, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak.

Kelima, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batas-batas negara. Globalisasi yang terjadi saat ini salah satunya ditandai dengan kecepatan arus informasi dan ekonomi digital yang tidak dapat dilepaskan oleh pengaruh besar teknologi. Kemampuan teknologi dalam mengintegrasikan tradisi perdagangan, dapat mengubah bentuknya menjadi lebih sempurna, universal, dan spasial temporal (mampu menembus ruang dan waktu). Bagaimana kemudian teknologi juga mampu menggerakkan arus informasi dan gagasan tanpa batas, sehingga yang diperlukan adalah kemampuan mentransformasikan teknologi informasi menjadi sebuah aktivitas positif, baik secara ekonomi, sosial, maupun budaya yang tetap sejalan dengan nilai-nilai luhur kepribadian bangsa Indonesia. Selain itu, bagaimana

mengantisipasi dimulainya era industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi) terutama pada garmen, petrokimia, otomotif, serta industri makanan dan minuman dan lainnya, yang saat ini masih menjadi komoditas industri unggulan nasional maupun Jawa Tengah serta bagaimana mengkombinasikan dengan penyerapan dan penciptaan lapangan kerja baru.

4.1.2. Lingkungan Nasional

Lingkungan strategis nasional juga menjadi penting untuk diperhatikan dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah Jawa Tengah lima tahun kedepan, antara lain:

Pertama, kebhinekaan bangsa Indonesia dari segi geografis, etnis, ras, budaya, dan agama. Perbedaan dan keragaman bangsa Indonesia juga menjalar sampai ke daerah, yang menjadikan kondisi tersebut peluang sekaligus tantangan pembangunan kedepan. Modal sosial berupa keberagaman tersebut dijadikan sebagai satu pondasi penguat bangunan bangsa. Namun disisi lain, keberagaman juga menimbulkan kerentanan tersendiri, berupa potensi kerenggangan dan konflik horisontal antar kelompok masyarakat yang saat ini mulai marak terjadi. Pemahaman ideologi Pancasila menjadi penting sebagai upaya antisipatif membendung perpecahan, konflik vertikal dan horisontal yang mengancam keutuhan bangsa.

Kedua, kebijakan pembangunan nasional di Jawa Tengah. Kebijakan tersebut antara lain pembangunan infrastruktur strategis nasional yaitu jalan tol (Brebes – Semarang, Semarang – Solo, Solo – Kertosono, Semarang – Demak, Bawen – Yogya), Jaringan Jalan Lintas Selatan, pengembangan bandara (Jenderal Soedirman, Dewadaru, Ngloram, Tunggul Wulung, Adi Sumarmo, dan Ahmad Yani), pengembangan pelabuhan (Tanjung Emas, Tanjung Intan, Sluke, dan Batang), revitalisasi rel kereta api (Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang, Kedungjati – Tuntang, Ambarawa – Secang – Magelang - Yogyakarta), pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur yang meliputi Kawasan Borobudur – Yogyakarta - Dieng, Solo - Sangiran, dan Semarang - Karimunjawa, pembangunan Kawasan Industri Kendal (KIK), pembangunan bendungan/waduk (Logung, Bener, Pidekso, Gondang, Randugunting, Jatibarang), pengembangan SPAM Regional (Wosusokas, Bregas, Keburejo), dan pembangunan PLTU. Pembangunan infrastruktur strategis ini memberikan peluang bagi percepatan pembangunan di Jawa Tengah.

Ketiga, bonus demografi. Indonesia mempunyai peluang untuk dapat menikmati manfaat bonus demografi, yaitu percepatan pertumbuhan ekonomi seiring dengan bergesernya struktur umur penduduk dimana penduduk usia produktif lebih besar dibandingkan penduduk usia non produktif. Perubahan struktur tersebut memungkinkan meningkatnya suplai angkatan kerja (*labor supply*). Apabila dibarengi dengan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia (*human capital*), penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, serta didukung dengan kebijakan menjaga penurunan fertilitas, dan peningkatan literasi tentang tabungan (*saving*) maka manfaat adanya bonus demografi akan dapat terwujud.

Selain memperhatikan lingkungan strategis, dalam penentuan isu strategis pembangunan daerah dilakukan juga dengan memperhatikan isu-isu global, nasional, maupun regional yang teridentifikasi sebagai berikut:

Tabel 4.1.

Isu-Isu Pembangunan Global, Nasional, dan Daerah

Isu Global (SDG's)	Isu Nasional (RPJMN 2014-2019)	Isu Daerah (RPJPD 2005-2025)
1. Kemiskinan	1. Stabilitas politik dan keamanan	1. Sosial budaya dan kehidupan beragama
2. Pangan dan Gizi	2. Tata kelola birokrasi efektif dan efisien	2. Ekonomi
3. Kesehatan	3. Pemberantasan korupsi	3. Iptek
4. Pendidikan	4. Pertumbuhan ekonomi	4. Sarpras
5. Gender	5. Percepatan pemerataan dan keadilan	5. Politik dan Tata Pemerintahan
6. Air bersih dan sanitasi	6. Keberlanjutan pembangunan	6. Keamanan dan Ketertiban
7. Energi	7. Peningkatan kualitas SDM	7. Hukum dan Aparatur
8. Pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja	8. Kesenjangan antar wilayah	8. Wilayah dan Tata Ruang
9. Infrastruktur	9. Percepatan pembangunan kelautan	9. SD Alam dan LH
10. Kesenjangan		
11. Kota dan Permukiman		
12. Produksi dan konsumsi berkelanjutan		
13. Perubahan iklim		
14. Sumberdaya kelautan		
15. Ekosistem daratan		
16. Masyarakat inklusif dan damai, akses keadilan, dan membangun kelembagaan		
17. Kemitraan global		

4.2. Permasalahan Pembangunan

Pembangunan daerah dilaksanakan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang diidentifikasi dari adanya gap antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal. Mendasarkan pada kondisi yang tergambar pada Bab 2, maka dapat diidentifikasi permasalahan pembangunan pada setiap urusan penyelenggaraan pemerintahan Jawa Tengah yang harus diselesaikan dalam lima tahun kedepan sebagai berikut.

a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pembangunan pendidikan memiliki fungsi strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia. Keberhasilan pembangunan pendidikan akan mampu memberikan kontribusi bagi terciptanya insan yang mandiri dan bermartabat yang dilandasi kesadaran spiritualisme dan kebangsaan. Namun demikian, pembangunan pendidikan di Jawa Tengah tidak terlepas dari berbagai macam permasalahan dan tantangan yang memerlukan penanganan antara lain:

- a) Masih perlunya peningkatan lulusan SMK yang memiliki sertifikasi kompetensi sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja;
- b) Belum meratanya kualitas layanan pendidikan;

- c) Masih perlunya peningkatan akses pendidikan bagi siswa miskin dan berkebutuhan khusus;
- d) Perlunya penguatan nilai-nilai kebangsaan dan spiritualisme.

2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan juga menjadi salah satu faktor strategis dalam mendukung pembangunan sumberdaya manusia secara paripurna. Pembangunan kesehatan dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan pada semua kelompok masyarakat sesuai siklus kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan lanjut usia. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat di Jawa Tengah yang telah dilakukan selama ini, masih ditemui berbagai tantangan dan permasalahan antara lain:

- a) Masih ditemukannya kasus kematian ibu dan bayi, serta gizi buruk;
- b) Masih ditemukannya kasus *stunting* di kabupaten/kota;
- c) Masih ditemukannya kasus penyakit menular dan adanya kecenderungan meningkatnya kasus penyakit tidak menular;
- d) Perlunya kesadaran masyarakat untuk melaksanakan pola hidup bersih dan sehat serta menjaga kesehatan lingkungan;
- e) Perlunya meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit;
- f) Perlunya meningkatkan kualitas sumber daya kesehatan;
- g) Perlunya perluasan cakupan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin dengan lebih proaktif atau dengan metode “jemput bola”.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a) Jalan dan Jembatan

Pembangunan prasarana jalan dan jembatan diperlukan untuk membuka akses antar wilayah, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan. Dalam pelaksanaannya, perlu diperhatikan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- 1) Masih adanya jalan dan jembatan kewenangan Provinsi Jawa Tengah yang belum dalam kondisi baik dan memenuhi standar (lebar minimal 7 meter dengan MST 8 ton) sesuai Perda Jateng Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Standardisasi Jalan Provinsi Jawa Tengah;
- 2) Adanya perlintasan sebidang rel kereta api di jalan provinsi dan persimpangan jalan yang berpotensi menyebabkan kemacetan dan kecelakaan.

b) Sumber Daya Air

Air mempunyai peran strategis dalam aktivitas ekonomi, sosial maupun pertanian, diantaranya untuk pemenuhan kebutuhan air baku dan pengairan lahan pertanian. Sehingga dalam upaya mewujudkan hal tersebut, perlu diperhatikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- 1) Masih terdapat jaringan irigasi kewenangan provinsi dalam kondisi rusak;
- 2) Masih rendahnya proporsi antara kebutuhan dengan ketersediaan air baku;
- 3) Adanya potensi rawan banjir limpahan yang disebabkan daerah pengaliran sungai di Jawa Tengah yang cukup luas dengan debit yang cukup besar.

c) Air Minum dan Sanitasi

Ketersediaan air minum dan pelayanan sanitasi menjadi hal penting dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian, dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan permasalahan yang harus diatasi yaitu:

- 1) Masih tingginya jumlah penduduk yang mengakses air dari sumber air terlindungi;
- 2) Akses pelayanan sanitasi air limbah domestik masih harus dikembangkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

d) Jasa Konstruksi

Dalam sektor jasa konstruksi, daya saing pelaku jasa konstruksi dan kelayakan bangunan gedung milik daerah masih memerlukan perhatian pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Kualitas dan kompetensi pelaku jasa konstruksi perlu ditingkatkan untuk menghadapi kompetisi pasar bebas;
- 2) Belum adanya data dan informasi kondisi kelayakan bangunan gedung milik daerah.

e) Penataan Ruang

Penataan ruang menjadi hal strategis dalam pembangunan terutama sebagai matra spasial pembangunan. Untuk itu, diperlukan perhatian pada permasalahan-permasalahan di sektor penataan ruang sebagai berikut:

- 1) Perlunya penyusunan rencana rinci kawasan strategis provinsi;
- 2) Masih banyaknya RTRW kabupaten/kota yang perlu direvisi dan seluruh kabupaten/kota belum memiliki rencana detail tata ruang (RDTR) sebagai dasar perijinan;
- 3) Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang perlu ditingkatkan utamanya pada RTH perkotaan, kawasan dengan fungsi lindung, dan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B).

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rumah dengan lingkungan permukimannya yang sehat dan aman merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Namun demikian dalam upaya pemenuhannya masih ditemukan beberapa permasalahan yaitu:

- a) Ketimpangan antara kebutuhan dengan ketersediaan rumah (*Backlog* Rumah) yang masih tinggi;
- b) Masih banyaknya Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) khususnya masyarakat dengan tingkat kesejahteraan 40% terendah dan penanganan rumah di daerah rawan bencana yang belum optimal;
- c) Perlunya penanganan kawasan permukiman kumuh pada kawasan perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan baru.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka meningkatkan kondusivitas wilayah di Jawa Tengah, beberapa upaya telah dilakukan antara lain peningkatan kualitas kehidupan demokrasi, ketertiban umum, pendidikan politik, menjaga kerukunan antar umat beragama, serta penanggulangan bencana. Namun demikian, masih ada tantangan dan permasalahan yang perlu perhatian antara lain sebagai berikut:

- a) Ancaman terorisme, intoleransi, kebebasan berdemokrasi dan ketahanan nasional, potensi gangguan keamanan, ketentraman masyarakat, dan ketertiban umum yang masih membutuhkan upaya peningkatan pencegahan dan penanganan secara komprehensif dan terpadu;
- b) Belum optimalnya pendidikan politik di masyarakat, terutama terkait pemahaman bahwa politik dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat;
- c) Tingkat partisipasi pemilih dalam pilkada masih dibawah nasional;
- d) Tingginya risiko bencana di Jawa Tengah, yang memerlukan upaya mitigasi lebih optimal.

6. Sosial

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan salah satu upaya dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat untuk mewujudkan kehidupan yang layak, bermartabat, dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan kesejahteraan sosial diselenggarakan melalui perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, serta pemberdayaan sosial termasuk subyek didalamnya lansia dan penyandang disabilitas. Pembangunan kesejahteraan sosial di Jawa Tengah senantiasa dilakukan oleh pemerintah daerah, namun demikian masih dijumpai beberapa permasalahan penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial antara lain:

- a) Perlunya peningkatan pelayanan sosial dasar PMKS dan keterpaduan penanganan PMKS antar pemerintahan dan antar sektor;
- b) Perlunya pengelolaan data dan pemanfaatan Basis Data Terpadu (BDT) oleh seluruh pemangku kepentingan sebagai dasar penanganan kemiskinan dan PMKS lainnya;
- c) Perlunya penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dan Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk mendukung usaha kesejahteraan sosial;
- d) Belum semua infrastruktur dan lingkungan yang ada ramah lansia dan difabel.

b. Urusan Pemerintahan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Sebagai implikasi dari bonus demografi yang menciptakan banyak penduduk usia kerja, serta tantangan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar ekonomi global, maka pembangunan ketenagakerjaan saat ini menjadi penting untuk perhatian berbagai pihak. Pemerintah Jawa Tengah telah berupaya melakukan peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar mampu menghadapi tantangan tersebut. Namun demikian, masih ada permasalahan yang memerlukan perhatian kedepan antara lain:

- a) Tingginya jumlah tenaga kerja dengan produktivitas dan kompetensi yang rendah termasuk pekerja rumahan;
- b) Belum optimalnya penempatan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki;
- c) Belum optimalnya fungsi kelembagaan tripartit dan bipartit di kabupaten/kota;
- d) Masih terdapatnya anak putus sekolah yang terpaksa harus bekerja.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pembangunan sumber daya manusia berperspektif gender dilaksanakan untuk menjamin dan melindungi hak perempuan dan anak terhadap diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi dalam kehidupan. Disamping itu peningkatan kualitas hidup perempuan dan anak diperlukan untuk meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui peran partisipasi aktif dalam proses pembangunan. Dalam pelaksanaannya, permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

- a) Belum optimalnya kesetaraan gender di berbagai bidang;
- b) Belum optimalnya pemenuhan hak anak;
- c) Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta belum kuatnya sinergi layanan untuk penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

3. Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat sub sistem yaitu ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, dan keamanan pangan. Dalam mewujudkannya masih terdapat permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a) Ketersediaan pangan antar waktu dan antar wilayah yang belum merata dan masih ada beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan;
- b) Konsumsi pangan yang belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA);
- c) Masih adanya pangan segar tidak aman yang beredar di masyarakat.

4. Pertanahan

Pembangunan membutuhkan adanya kepastian akan lahan termasuk pemanfaatannya terutama untuk mempertahankan fungsi sebagai lahan pertanian berkelanjutan, infrastruktur strategis dan aset tanah kas desa. Terkait hal tersebut permasalahan pertanahan yang muncul diantaranya:

- a) Belum optimalnya pengelolaan pertanahan;
- b) Belum semua lahan bersertifikat termasuk Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

5. Lingkungan Hidup

Pengelolaan lingkungan menjadi hal penting dalam menjamin keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan. Dalam pelaksanaannya, ditemukan permasalahan meliputi:

- a) Masih adanya sungai dalam kondisi tercemar;
- b) Meningkatnya jumlah timbulan sampah yang tidak sebanding dengan cakupan pelayanan;
- c) Meningkatnya emisi gas rumah kaca yang didominasi oleh sektor energi dan transportasi;
- d) Indikator hidrokarbon (HC) sudah melebihi baku mutu, meskipun kualitas udara masih dalam kondisi baik (bawah baku mutu).

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penyediaan data dan informasi kependudukan secara nasional dan terpadu sebagai rujukan dasar dalam perumusan kebijakan dan pembangunan, masih dihadapkan permasalahan meliputi:

- a) Belum semua kabupaten/kota mewujudkan masyarakat tertib administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dengan baik

diantaranya kepemilikan akta kelahiran, akta perkawinan, dan akta perceraian;

- b) Data kependudukan belum sepenuhnya digunakan sebagai rujukan dalam berbagai sektor pembangunan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Perubahan paradigma dalam pembangunan desa yang menempatkan desa sebagai subjek pembangunan bertujuan agar desa mampu mendayagunakan dan mengoptimalkan potensi sumber daya dan nilai-nilai kearifan setempat seperti ekonomi, pariwisata, kebudayaan, sosial, dan lingkungan hidup. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga berperan cukup penting dalam proses pembangunan sebuah daerah, dimana masyarakat berpartisipasi dan berinisiatif untuk melaksanakan proses kegiatan ekonomi maupun sosial untuk perbaikan situasi dan kondisi diri sendiri. Proses tersebut tidaklah mudah, karena beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu:

- a) Belum semua masyarakat dan desa memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan yang sama untuk mendapatkan akses terhadap manfaat aset milik negara, pengetahuan, teknologi, alat produksi, modal dan pasar, serta akses terhadap sumber sumber daya keuangan;
- b) Belum optimalnya perkembangan dan pemberdayaan lembaga ekonomi dan peran masyarakat desa dalam mengembangkan potensi dan nilai kearifan lokal dan kawasan untuk meningkatkan kesejahteraannya;
- c) Keterlibatan masyarakat miskin dan rentan, kelompok perempuan, dan kelompok/forum anak dalam pembangunan desa yang masih perlu ditingkatkan.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dilakukan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan penduduk dengan kapasitas sumber daya. Jumlah penduduk yang meningkat harus diikuti dengan pemenuhan kebutuhan untuk menunjang kehidupannya. Permasalahan yang masih perlu perhatian antara lain:

- a) Belum optimalnya keterpaduan antar daerah dan sektor dalam upaya pengendalian kependudukan;
- b) Menurunnya kesertaan KB;
- c) Perlunya peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

9. Perhubungan

Transportasi memiliki peran penting dan strategis dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menunjang pengembangan wilayah di Jawa Tengah. Namun demikian masih terdapat berbagai permasalahan di sektor perhubungan diantaranya:

- a) Belum baiknya tingkat pelayanan terminal penumpang utamanya tipe B dari aspek jumlah, persebaran dan kondisi fisik fasilitas utama beserta pendukungnya;
- b) Pengembangan pelayanan angkutan belum optimal dalam mendukung aksesibilitas dan aglomerasi wilayah perkotaan, kawasan perbatasan dan kawasan strategis lainnya;
- c) Potensi kerawanan kecelakaan dan kemacetan lalu lintas pada ruas jalan provinsi dan perlintasan sebidang dengan jalur rel kereta api masih perlu diminimalisir;

- d) Keterbatasan pengembangan infrastruktur perhubungan strategis yang merupakan kewenangan Pusat (terminal tipe A, bandara, pelabuhan, dan perkeretaapian).

10. Komunikasi dan Informatika

Pemanfaatan aplikasi informatika dan *website* harus terus ditingkatkan guna mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja Pemerintah Daerah. Upaya tersebut masih menemui beberapa permasalahan yang harus diselesaikan diantaranya:

- a) Belum semua sistem informasi pembangunan *e-Government* lengkap, aman, terintegrasi, dan terkelola dengan baik serta akuntabel;
- b) Keterbatasan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informatika;
- c) Masih adanya wilayah yang belum tersedia akses internet.

11. Koperasi dan UKM

Pemberdayaan koperasi secara terstruktur dan berkelanjutan diharapkan akan mampu menyelaraskan struktur perekonomian nasional, mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional, mengurangi tingkat pengangguran terbuka, menurunkan tingkat kemiskinan, mendinamisasi sektor riil, dan memperbaiki pemerataan pendapatan masyarakat. Namun demikian, dalam pembangunan sektor koperasi dan UMKM masih ditemukan permasalahan yaitu:

- a) Pendampingan kelembagaan koperasi masih perlu penguatan;
- b) Skala pembiayaan dan akses sumberdaya koperasi dan UMKM masih terbatas dan rendah;
- c) Tingkat produktifitas koperasi dan UMKM belum maksimal;
- d) Belum optimalnya pemasaran produk koperasi dan UMKM.

12. Penanaman Modal

Investasi diperlukan sebagai salah satu pendorong peningkatan perekonomian daerah. Namun demikian, masih terdapat permasalahan yang harus ditangani dalam pertumbuhan investasi, yaitu:

- a) Belum optimalnya realisasi penanaman modal;
- b) Pertumbuhan dan persebaran investasi dan ketersediaan kawasan industri belum merata di Jawa Tengah.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kapasitas pemuda dalam keikutsertaannya membangun dan menjadi tulang punggung pembangunan serta meingkatkan prestasi olahraga Jawa Tengah, masih dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

- a) Masih banyaknya pemuda menganggur dari keluarga miskin;
- b) Belum optimalnya prestasi atlet di tingkat nasional dan internasional;
- c) Kurang dan belum memadainya kapasitas dan kondisi sarana dan prasarana olahraga sesuai standar;
- d) Belum optimalnya kesinambungan pembibitan dan pembinaan atlet serta rendahnya kemitraan dengan *stakeholder*.

14. Statistik

Penyediaan data dan informasi yang *reliable, up to date*, dan relevan harus terus ditingkatkan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara terintegrasi. Beberapa permasalahan yang kerap dihadapi terkait dengan

data dan informasi antara lain validitas data dan informasi, belum *link and match* antara data yang tersedia dengan dinamika kebutuhan pembangunan, serta belum optimalnya sistem informasi satu data yang dapat diakses masyarakat dengan mudah.

15. Persandian

Sistem pengamanan pada jaringan komunikasi dan sistem informasi harus terus ditingkatkan untuk menghadapi dinamika perkembangan teknologi informasi yang semakin cepat berkembang. Permasalahan yang dihadapi utamanya terkait dengan kuantitas dan kualitas personil, serta sistem dan sarana prasarana untuk menangkal dan menjaga keamanan sistem.

16. Kebudayaan

Nilai-nilai budaya Jawa Tengah merupakan keunikan yang harus terus dijaga dan dipertahankan agar dapat semakin memperkuat daya tahan dan daya saing daerah, terutama dalam menghadapi arus globalisasi dan era industri 4.0. Hal ini tentunya tidak mudah untuk diwujudkan karena dalam implementasinya menjumpai berbagai persoalan antara lain adanya indikasi yang mengarah pada melunturnya identitas dan nilai budaya masyarakat terutama di kalangan muda, terbatasnya ruang publik untuk pengembangan kesenian lokal dan kebudayaan, serta didukung kondisi sarana prasarana dan pengelolaan cagar budaya yang belum optimal untuk menjadi sebuah tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, pariwisata, pelestarian dan pengembangan nilai budaya lokal.

17. Perpustakaan

Dalam rangka mengembangkan perpustakaan dan minat baca masyarakat di Jawa Tengah, permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah belum optimalnya pelayanan perpustakaan dalam mendukung peningkatan minat baca masyarakat, terbatasnya jumlah fungsional pustakawan, dan tenaga pengelola perpustakaan.

18. Kearsipan

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, salah satunya didukung oleh sistem penyelenggaraan kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Sistem penyelenggaraan kearsipan agar dipastikan menjamin ketersediaan, keselamatan, dan keamanan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti pertanggungjawaban, dan dapat dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan perundang-undangan yang ada. Dalam pelaksanaannya di Jawa Tengah, penyelenggaraan kearsipan masih menjumpai beberapa permasalahan antara lain belum optimalnya penyelamatan/pelestarian arsip daerah sebagai upaya peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, ketersediaan SDM pengelola kearsipan yang tidak sebanding dengan jumlah arsip yang harus diolah/lestarikan, serta sarana dan prasarana yang belum memadai.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Pembangunan urusan kelautan dan perikanan diarahkan untuk menjaga produksi perikanan dan garam, peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui usaha pengolahan guna meningkatkan nilai tambah produk

perikanan, serta menjaga kelestarian ekosistem pesisir. Beberapa permasalahan yang masih dihadapi urusan kelautan dan perikanan yaitu:

- a) Belum optimalnya produksi perikanan tangkap dan produktivitas garam;
- b) Belum optimalnya jaminan terhadap risiko usaha penangkapan ikan;
- c) Masih rendahnya konsumsi ikan;
- d) Tingginya kerusakan ekosistem pesisir;
- e) Belum optimalnya upaya peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan.

2. Pariwisata

Pariwisata merupakan sektor yang potensial untuk dikembangkan sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, berkontribusi dalam penyediaan lapangan kerja, mampu memberdayakan perempuan dan anak muda melalui karya-karya kreatif, serta berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan usaha mikro kecil menengah. Namun demikian, dalam pengembangannya terdapat hal-hal yang memerlukan perhatian, yaitu:

- a) Belum optimalnya konsep *eco socio tourism*;
- b) Arah kebijakan pariwisata belum terintegrasi dan terpetakan;
- c) Belum optimalnya kerjasama lintas sektor Pariwisata (lembaga);
- d) Belum optimalnya pengembangan usaha pariwisata sekitar DTW yang berbasis budaya lokal;
- e) Belum adanya design untuk menggambarkan kebutuhan pariwisata;
- f) Belum optimalnya kinerja lembaga/forum pariwisata dan ekosistem Ekonomi Kreatif.

3. Pertanian

Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk menjaga tingkat produksi dan produktivitas dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat. Selain itu, dari sisi *off-farm* upaya peningkatan kesejahteraan perlu dilakukan melalui pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk. Permasalahan yang dihadapi pada urusan pertanian yaitu:

- a) Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian;
- b) Menurunnya minat dan jumlah tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian;
- c) Belum optimalnya nilai tambah produk pertanian;
- d) Belum optimalnya perlindungan terhadap petani.

4. Kehutanan

Pengelolaan hutan secara lestari diperlukan dalam rangka meningkatkan daya dukung fungsi lindung secara berkelanjutan. Berbagai permasalahan masih terjadi dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan, yaitu:

- a) Masih adanya lahan kritis walaupun kondisi daya dukung fungsi lindung dalam kategori baik;
- b) Meningkatnya kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan kebakaran hutan;
- c) Tuntutan dunia internasional hasil hutan kayu berasal dari hutan lestari;
- d) Masih tingginya tingkat kemiskinan masyarakat sekitar hutan.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Kebutuhan energi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan industri. Sementara itu pada sektor sumber daya mineral, kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur semakin meningkat sehingga perlu ditingkatkan lagi pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tanpa ijin. Terkait hal tersebut, pembangunan sektor energi dan sumber daya mineral masih menjadi tantangan dan menghadapi permasalahan yang memerlukan perhatian, yaitu:

- a) Masih terdapat rumah tangga yang belum mendapatkan akses tenaga listrik secara layak;
- b) Masih tingginya investasi energi baru terbarukan (EBT) dan harganya belum mencapai keekonomian, sehingga mengganggu keberlanjutan pemanfaatan EBT karena energi fosil harganya lebih murah;
- c) Masih maraknya penambangan tanpa ijin (PETI) yang dilakukan oleh masyarakat dan kurangnya pemahaman penambangan yang benar (*good mining practice*);
- d) Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah.

6. Perdagangan

Pembangunan perdagangan dalam perekonomian memiliki peran strategis yaitu mendukung kelancaran penyaluran arus barang dan jasa, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mendorong pembentukan harga yang wajar, penciptaan lapangan usaha dan perluasan kesempatan kerja, serta mendukung peningkatan dan pemerataan pendapatan. Selain itu, sektor perdagangan penting untuk terus dikembangkan mengingat sifat sektor perdagangan yang saling berkaitan dan saling menunjang dengan kegiatan sektor lainnya seperti sektor produksi (pertanian, industri dan pertambangan), sektor keuangan, sektor perhubungan, dan sektor telekomunikasi. Namun demikian, ada beberapa hal yang masih perlu mendapat perhatian, yaitu:

- a) Rendahnya daya saing pasar yang disebabkan oleh belum adanya pemetaan pasar baik komoditi maupun produk, domestik maupun internasional, yang diharapkan dapat memberikan info pasar dan menciptakan struktur pasar yang efisien dan berdaya saing;
- b) Belum adanya pendampingan untuk menangkap arah perdagangan ke depan (isu milenial), dimana model distribusi pasar berubah kedepannya.

7. Industri

Pembangunan perindustrian memiliki fungsi sebagai mesin pembangunan atau motor penggerak perekonomian. Hal ini disebabkan oleh besarnya nilai kapitalisasi modal yang tertanam di sektor industri, tingginya kemampuan menyerap tenaga kerja serta kemampuan menciptakan nilai tambah (*value added creation*) dari setiap input atau bahan dasar yang diolah. Dengan demikian, pembangunan sektor industri akan memacu dan mengangkat pembangunan sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya meningkatkan daya beli masyarakat. Permasalahan dalam pembangunan sektor industri yang perlu mendapat perhatian yaitu:

- a) Masih rendahnya produk industri kecil dan menengah yang memenuhi standarisasi;

- b) Belum optimalnya inovasi teknologi industri;
- c) Belum meratanya persebaran industri di wilayah Jawa Tengah;
- d) Kurangnya ketersediaan dukungan sarana dan prasarana industri, yang meliputi pengelolaan lingkungan, kawasan industri, lahan industri dan infrastruktur penunjang (lembaga uji, kawasan berikat, kawasan pergudangan, dan lainnya);
- e) Belum optimalnya keterkaitan sektor industri dengan sektor lainnya;
- f) Tingginya ketergantungan terhadap bahan baku impor baik bahan baku, bahan penolong maupun bahan setengah jadi, terutama industri makanan, tekstil dan logam.

8. Transmigrasi

Pengembangan transmigrasi memiliki fungsi strategis tidak hanya semata-mata mengatasi permasalahan demografi, namun juga mempercepat pembangunan, mengentaskan kemiskinan, dan menekan angka pengangguran. Masalah utama urusan transmigrasi yaitu terbatasnya kuota dan lokasi penempatan transmigrasi dibanding dengan animo calon transmigran.

d. Fungsi Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan

Perencanaan adalah fungsi awal dalam proses pembangunan daerah. Tuntutan akan kualitas perencanaan yang semakin partisipatif, akuntabel, dan terbuka serta adanya dinamika perkembangan pembangunan yang semakin dinamis, *unpredictable* dan *unbounderless* menjadi bagian yang harus diakomodasi sebagai masukan dalam proses perencanaan. Sejalan dengan hal tersebut terdapat permasalahan meliputi:

- a) Perlunya meningkatkan kualitas perencanaan seiring dengan dinamika peraturan dan masyarakat yang selalu berkembang;
- b) Sistem informasi perencanaan pembangunan yang belum sepenuhnya dapat menjawab tantangan akuntabilitas kinerja;
- c) Perlunya meningkatkan kualitas proses evaluasi perencanaan pembangunan sebagai *feed back* dalam proses pembangunan daerah.

2. Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah termasuk didalamnya pengelolaan terhadap pendapatan daerah yang efektif dan akuntabel akan berpengaruh pada pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk menjawab beberapa permasalahan pengelolaan keuangan antara lain:

- a) Belum optimalnya pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah;
- b) Belum semua aset daerah dapat dimanfaatkan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.

3. Kepegawaian dan Diklat

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik maka diperlukan SDM ASN Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang handal, memiliki integritas, profesional, dan netral serta bebas dari intervensi politik, bebas dari praktik KKN. Untuk mencapai hal tersebut masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

- a) Belum optimalnya pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN sebagai dasar dalam pengembangan kompetensi dan karir ASN;
- b) Sistem penilaian kinerja ASN yang belum terlalu akurat.

4. Penelitian dan Pengembangan

Meningkatnya kebutuhan terhadap hasil-hasil penelitian dan pengembangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan daya saing daerah dihadapkan permasalahan:

- a) Pemanfaatan hasil litbang guna mendukung kebutuhan perencanaan pembangunan masih belum optimal;
- b) Hilirisasi hasil litbang dan inovasi belum optimal untuk mendukung daya saing daerah.

5. Pengawasan

Penerapan sistem integritas serta pengawasan internal yang independen, profesional, dan sinergis, masih menghadapi permasalahan dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin responsif, transparan dan akuntabel. Permasalahan lain yang dihadapi antara lain tentang bagaimana kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) harus selalu dapat meningkat, dan bagaimana Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tetap terselenggara dengan baik dalam dinamika pergantian ASN.

e. Fungsi lain

Akuntabilitas kinerja pemerintahan belum cukup untuk menjawab tantangan kinerja pemerintahan kedepan. Hal-hal yang masih perlu mendapat perhatian yaitu:

- a) Perbaikan nilai pada komponen pengukuran kinerja dan evaluasi internal;
- b) Masih rendahnya nilai evaluasi SAKIP kabupaten/kota;
- c) Perlu peningkatan kualitas pelayanan publik.

4.3. Isu-Isu Strategis

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, serta dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka diidentifikasi isu strategis pembangunan daerah Jawa Tengah dalam lima tahun mendatang yaitu sebagai berikut.

1. Penanggulangan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan isu global yang juga menjadi isu daerah saat ini. Sejalan dengan amanat SDG's, kemiskinan di tahun 2030 diupayakan menjadi nol (*zero poverty*).

Penduduk Jawa Tengah yang berada di bawah garis kemiskinan sampai dengan September 2018 sebanyak 3,87 juta jiwa atau 11,19 persen, membaik dibandingkan bulan September 2017 (12,23 persen). Namun demikian angka ini masih di atas capaian nasional yaitu sebesar 9,66 persen. Sebaran penduduk miskin di Jawa Tengah masih didominasi di wilayah pedesaan sebanyak 2,16 juta jiwa (12,80 perse), sedangkan penduduk miskin perkotaan sebanyak 1,71 juta jiwa (9,67 persen). Masih tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan khususnya pada kelompok sasaran petani (buruh petani, petani gurem dan pekerja serabutan) dan kelompok nelayan (buruh nelayan dan

nelayan kecil).

Tiga kelompok rumah tangga yang diperkirakan berada pada 40 persen penduduk berpendapatan terbawah adalah: (1) angkatan kerja yang bekerja tidak penuh (*underutilized*) terdiri dari penduduk yang bekerja paruh waktu (*part time worker*), termasuk di dalamnya adalah rumah tangga nelayan, rumah tangga petani berlahan sempit, rumah tangga sektor informal perkotaan, dan rumah tangga buruh perkotaan; (2) usaha mikro kecil termasuk rumah tangga yang bekerja sebagai pekerja keluarga (*unpaid worker*); dan (3) penduduk miskin yang tidak memiliki aset maupun pekerjaan.

Kondisi faktual yang dihadapi penduduk miskin Jawa Tengah adalah masih rendahnya akses pelayanan dasar (*basic needs access*) meliputi akses rumah layak, pangan terjangkau, pendidikan, dan kesehatan; serta lemahnya pengembangan kehidupan ekonomi berkelanjutan (*sustainable livelihood*) yang ditunjukkan dengan rendahnya kesempatan berusaha dan bekerja, akses permodalan, pasar, aset produksi, keterampilan, dan produktivitas yaitu ketidakmampuan rumah tangga untuk menghasilkan pendapatan. Kondisi ini didukung dimensi sosial masyarakat yang menyangkut dengan kerentanan, ketidakberdayaan, keisolasian, kelemahan jasmani dan psikologi, serta munculnya gejala kultur komodifikasi data di masyarakat, dengan memanfaatkan data untuk kepentingan mencari keuntungan sendiri.

Selain itu, masih adanya ketidaktepatan sasaran program kegiatan maupun lokasi intervensi penanganan kemiskinan juga menjadi penyebab penanganan kemiskinan yang tidak optimal dilakukan oleh pemerintah. Hal ini akibat belum terintegrasinya program/kegiatan penanggulangan kemiskinan, belum tervalidasinya data kemiskinan secara periodik, belum efektifnya sistem pengawasan secara partisipatif, dan belum optimalnya pemberdayaan kelompok sasaran (petani dan nelayan) menuju industrialisasi komoditas pertanian (industri pengolahan hasil pertanian), dan belum optimalnya pendampingan berkelanjutan kepada kelompok sasaran penerima program.

Kemiskinan juga dipengaruhi dimensi politik yang dikarenakan struktur politik dan ekonomi yang timpang, serta tidak memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan pondasi masyarakat miskin yang kokoh, dalam dimensi politik yang lebih luas, dengan menciptakan ruang aspirasi masyarakat dalam proses politik dan pembangunan, dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan daerah.

2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia

Keberhasilan pembangunan SDM salah satunya diukur dari nilai IPM. Sampai dengan tahun 2017, IPM Jawa Tengah membaik dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 70,52 dan masuk dalam kategori tinggi. Namun demikian angka ini masih dibawah angka nasional sebesar 70,81. Kondisi ini terutama ditunjukkan dari indikator rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita disesuaikan, yang angkanya masih dibawah rata-rata provinsi lain di Pulau Jawa dan nasional. Harapan lama sekolah Jawa Tengah tahun 2017 sebesar 12,85 tahun, rata-rata lama sekolah sebesar 7,27 tahun (setara SMP kelas I atau kelas VII), dan pengeluaran per

kapita sebesar 10.377 ribu rupiah, yang angka tersebut dibawah provinsi lain di Pulau Jawa dan nasional.

Gambaran tersebut menunjukkan bahwa sektor pendidikan menjadi sektor yang sangat penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah Jawa Tengah. Isu pendidikan yang utama adalah bagaimana sistem pendidikan yang ada dapat diakses oleh setiap penduduk usia sekolah yang memiliki hak untuk memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas, mulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, bahkan sampai pendidikan tinggi. Isu lain adalah terkait pemerataan pendidikan guna mendorong partisipasi sekolah masyarakat, serta memperkuat pendidikan budaya dan pendidikan karakter.

Isu lain berkaitan sumber daya manusia adalah tantangan bonus demografi dimana usia produktif lebih besar dibandingkan usia non produktif. Tantangan lima tahun kedepan adalah bagaimana memanfaatkan bonus demografi untuk mendorong percepatan pembangunan daerah, dengan memanfaatkan penduduk usia produktif sebagai tenaga kerja yang berkualitas dan berdaya saing. Paska terjadinya bonus demografi yang diproyeksikan terjadi di Jawa Tengah sampai dengan sepuluh tahun kedepan adalah terjadinya penuaan penduduk (*population ageing*) dimana jumlah penduduk usia lanjut akan meningkat proporsinya. Lanjut usia mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam semua aspek kehidupan. Potensi dan kemampuan yang dimiliki dapat dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan diri, keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan lanjut usia baik potensial maupun non potensial oleh pemerintah daerah secara sinergis perlu ditingkatkan antara lain melalui pelayanan keagamaan dan mental spiritual, kesehatan, pelayanan penyakit ketuaan (*senescent diseases*) dan degeneratif, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum serta bantuan hukum, jaminan sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, serta pemberian literasi tentang pentingnya tabungan (*savings*) sebagai bentuk jaminan perlindungan hari tua.

Isu kesehatan juga masih menjadi hal penting kaitannya dengan kualitas hidup manusia. Meskipun angka harapan hidup masyarakat Jawa Tengah lebih baik dibandingkan daerah lain di Pulau Jawa dan nasional, namun angka kesakitan dan angka kematian masih cukup tinggi. Sehingga penanganan kesehatan masyarakat tetap menjadi hal penting untuk diperhatikan dalam pembangunan kedepan. Paradigma pembangunan kesehatan selama ini yang mengarah pada tindakan kuratif, yang kedepan akan mulai bergeser pada tindakan preventif dan promotif. Apalagi dengan melihat gejala penuaan penduduk sebagai dampak bonus demografi, serta tren penyakit katastropik yang semakin meningkat dan berdampak pada beban pembiayaan jaminan kesehatan yang semakin tinggi, maka upaya-upaya kesehatan masyarakat mulai mengarah pada tindakan preventif dan promotif. Hal tersebut tetap harus didukung dengan upaya penurunan disparitas akses dan mutu pelayanan kesehatan, pemenuhan prasarana dan sarana kesehatan, serta tenaga kesehatan, yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Ancaman terhadap sumber daya manusia lainnya yang saat ini tengah

menggejala secara nasional adalah melemahnya pemahaman budaya bangsa, dan sendi “kebinekatunggalikaan”, serta banyaknya kasus kekerasan karena tumbuhnya paham radikalisme dan terorisme yang memungkinkan akan merambat masuk di Jawa Tengah. Selain itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, terutama kasus kekerasan seksual dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang cenderung meningkat telah mengawatirkan semuanya dan dapat mengancam kualitas sumber daya manusia. Ancaman peredaran NAPZA juga telah menjadi isu krusial secara nasional, bahkan Indonesia telah menetapkan “darurat narkoba” sebagai implikasi peredaran NAPZA yang semakin tak terkendali. Kelompok anak dan remaja merupakan salah satu yang menjadi sasaran korban penyalahgunaan NAPZA. Isu ini menjadi isu penting tersendiri yang harus tetap diperhatikan, mengingat bonus demografi telah terjadi di Jawa Tengah saat ini.

Bukan hanya pemahaman tentang budaya bangsa, namun isu pentingnya adalah bagaimana menginternalisasi nilai-nilai budaya ke dalam perilaku masyarakat Jawa Tengah. Penguatan identitas dan bangunan nilai masyarakat demikian penting ditegaskan untuk memastikan jalinan hubungan antar masyarakat untuk maju dan berkembang bersama, maupun sikap dalam menghadapi tantangan global yang pada satu sisi membuka ruang komunikasi dan informasi seluas-luasnya, pada sisi lain menghadirkan ancaman melunturnya identitas dan kekuatan budaya, sehingga terdominasi dan disubordinasi oleh kepentingan materialisme komersial pasar dan neoliberalisme.

Upaya internalisasi nilai-nilai budaya dapat dilakukan dengan mengembangkan nilai-nilai dan menguatkan identitas kebudayaan Jawa Tengah melalui pengakuan keragaman budaya dan memfasilitasi ruang-ruang ekspresi dan kreasi berbagai budaya yang hidup di masyarakat. Ekspresi kebudayaan dipahami dalam cakupan ekspresi kebudayaan materiil yang menunjuk pada hasil karya dan kerja produktif masyarakat berbasis potensi wilayah maupun ilmu pengetahuan, teknologi dan kearifan lokal; maupun ekspresi kebudayaan non-materiil menyangkut hasil karya dan kreatifitas seni budaya maupun ekspresi upacara adat, kenduri dan perayaan. Keseluruhan ekspresi kebudayaan materiil dilandasi bangunan sistem nilai yang menjadi preferensi sikap, watak dan perilaku masyarakat.

3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha

Ekonomi Jawa Tengah dalam konstelasi nasional dalam beberapa tahun terakhir masih dinilai cukup baik, dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang relatif stabil dan berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah tahun 2018 mencapai angka 5,32 persen, membaik dari tahun 2017 (5,26 persen). Tiga sektor unggulan ekonomi Jawa Tengah (industri pengolahan, pertanian, perdagangan dan jasa) juga menunjukkan pertumbuhan yang positif meskipun lajunya tidak cukup tinggi.

Meskipun pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah relatif stabil, namun kondisi ekonomi global dan regional yang tidak dapat diprediksi tepat, harus diantisipasi karena akan memberikan pengaruh pada kondisi perekonomian Jawa Tengah kedepan. Beberapa kondisi yang akan dihadapi dalam lima tahun kedepan sebagai berikut.

a. Sektor Industri Pengolahan

Industri pengolahan masih merupakan sektor penyumbang terbesar pada ekonomi Jawa Tengah. Namun demikian kondisinya saat ini industri yang berkembang masih didominasi oleh industri padat karya, yang lebih banyak menyerap tenaga kerja dengan tingkat pendidikan dan keterampilan rendah. Disisi lain perkembangan industri sudah mulai mengarah pada industri padat modal yang menuntut tingkat pendidikan, keterampilan, dan kompetensi tenaga kerja tinggi. Ditambah dengan perkembangan industri global menuju pada industri 4.0 (industri yang mengkombinasikan kecerdasan buatan, data raksasa, komputasiawan, serba internet dan cetak tiga dimensi).

Kondisi lain yang harus diantisipasi adalah ketergantungan industri terhadap bahan baku dan barang modal impor. Secara nasional, hampir 75 persen impor nasional berupa bahan baku/penolong industri. Hal ini mendorong pemerintah daerah untuk dapat menjamin ketersediaan bahan baku lokal, dan mendukung industri dengan tingkat kandungan dalam negeri tinggi. Ketersediaan energi juga menjadi tantangan penting kedepan untuk disiapkan dalam rangka pengembangan industri di Jawa Tengah. Persoalan lainnya adalah ketersediaan sarana dan prasarana industri yang belum memadai, kurang tersedianya sumber daya manusia sesuai kebutuhan industri, serta tingkat kesiapterapan teknologi yang masih rendah.

b. Sektor Perdagangan dan Jasa

Salah satu sektor unggulan Jawa Tengah lainnya adalah perdagangan dan jasa, yang trennya dari tahun ke tahun mulai meningkat. Meskipun meningkat, persoalan yang dihadapi di sektor perdagangan adalah neraca perdagangan defisit, dimana impor masih lebih tinggi dibandingkan ekspor. Penyebabnya antara lain rendahnya ekspor antardaerah, dan pasar ekspor yang masih terbatas pada pangsa pasar konvensional.

Selain itu, sektor produksi didominasi pada skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang menghadapi teknologi sederhana, lemahnya akses permodalan, akses pasar, daya saing produk, dan manajemen usaha. Tren pengembangan *e-commerce* juga belum dibarengi kemampuan sumberdaya manusia dalam pemanfaatan *e-commerce* tersebut.

Pengembangan usaha pada sektor jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif juga masih perlu didorong untuk menjadi kekuatan pertumbuhan ekonomi yang baru. Pariwisata sebagai salah satu penyumbang ekonomi daerah dan pendapatan daerah, perlu didorong terutama bagaimana menyiapkan prasarana dan sarana pariwisata pada destinasi wisata unggulan, konektivitas antar destinasi wisata, promosi wisata, dan penyiapan sumberdaya manusia.

Pengembangan pariwisata Jawa Tengah mempertimbangkan potensi geografis dan sosiografis yang dimiliki Jawa Tengah dan diharapkan dapat dikembangkan menjadi daya tarik serta memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) dan ke belakang (*backward linkage*) yang kuat. Pengembangan sektor pariwisata Jawa Tengah mestinya ditekankan pada pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan lingkungan hidup (*Eco-*

Socio Tourism), dengan memperhatikan kekhasan geografis dengan konteks zonasi pegunungan, laut, sungai, karts, danau, dan pantai, serta melalui berbagai koridor sektoral dan budaya, dengan kreativitas termasuk eduwisata. Pengembangan pariwisata juga diarahkan dengan menempatkan masyarakat desa sebagai subyek pembangunan serta didukung interkoneski antar desa, pemerintah, swasta, perguruan tinggi, komunitas dan pelaku wisata.

c. Sektor Pertanian

Sebagai salah satu sektor unggulan dan penyumbang PDRB ketiga terbesar di Jawa Tengah, sektor pertanian menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Persoalan terjadi saat ini adalah justru sektor pertanian makin terdesak dan menurun kontribusinya pada PDRB dari tahun ke tahun. Selain itu, persoalan lain adalah makin kurangnya minat angkatan kerja yang menekuni sektor pertanian, dan memilih untuk bekerja di sektor industri serta perdagangan. Hal tersebut didukung dengan semakin terbatasnya lahan pertanian karena meningkatnya permintaan perubahan fungsi lahan pertanian menjadi lahan permukiman dan industri.

Persoalan sektor pertanian sudah seharusnya menjadi perhatian utama dalam pembangunan Jawa Tengah kedepan. Hal tersebut dikarenakan pertama, sebagian besar masyarakat Jawa Tengah bekerja di sektor pertanian, meskipun kecenderungannya semakin menurun dan yang tersisa adalah petani usia tua. Kedua, dinamika sektor pertanian masih terbatas karena penggunaan teknologi yang belum begitu maju. Ketiga, sebagian besar penduduk yang dikategorikan hidup dalam garis kemiskinan adalah masyarakat petani. Keempat, infrastruktur yang mendukung proses produksi dan pemasaran, seperti irigasi serta transportasi dan komunikasi belum memadai. Kelima, terbatasnya akses pada informasi pasar. Sebagian besar petani belum memiliki atau menggunakan teknologi untuk pertukaran informasi tentang kebutuhan dan harga-harga komoditas di pasar. Kondisi tersebut kemudian pada akhirnya menyebabkan nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan rendah.

d. Investasi

Realisasi investasi Jawa Tengah membaik dari tahun ke tahun, namun pertumbuhannya belum cukup tinggi. Apabila dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa dan Bali, investasi di Jawa Tengah cenderung lebih kecil. Permasalahan investasi adalah pada belum optimalnya kecepatan pelayanan perijinan, promosi investasi yang belum optimal, jaminan keamanan dan kenyamanan investasi, informasi peluang investasi yang belum optimal, didukung dengan pelayanan birokrasi yang belum efisien dan penggunaan teknologi belum optimal. Selain itu juga, pertumbuhan dan persebaran investasi belum merata di Jawa Tengah khususnya di wilayah perbatasan barat dan timur, serta wilayah selatan.

Selain itu, isu penting terkait dengan ekonomi daerah adalah peran pemerintah provinsi dalam pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang dapat dilihat dari kontribusi APBD terhadap PDRB pada komponen pengeluaran konsumsi pemerintah dan PMTB. Kontribusi APBD Provinsi Jawa Tengah dalam waktu lima tahun terakhir terhadap konsumsi pemerintah pada PDRB

mengalami peningkatan, dari 19,25 persen (2013) menjadi 25,22 persen (2017). Sedangkan peran APBD dalam pembentukan modal tetap bruto dalam lima tahun terakhir yang dilihat dari kontribusi belanja modal terhadap PMTB juga mengalami tren peningkatan, meskipun angkanya cukup fluktuatif dari tahun ke tahun. Hal ini berkorelasi dengan pertumbuhan PMTB yang relatif tetap, dimana belanja modal Pemerintah Provinsi Jawa Tengah belum bisa berkontribusi cukup besar terhadap pertumbuhan PMTB.

Namun demikian, kondisi perekonomian daerah yang stabil akan memberikan peluang kesempatan kerja dan kesempatan berwirausaha yang semakin luas. Akan tetapi persoalan kualitas calon tenaga kerja dan tenaga kerja menjadi hal penting untuk diperhatikan. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Jawa Tengah berdampak pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dengan dominasi pendidikan sekolah dasar pada usia angkatan kerja, dan pengangguran terbesar pada pendidikan SMK, diperlukan peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, program *link and match* antara dunia pendidikan dengan dunia usaha, penguasaan teknologi dan inovasi, serta hasil litbang sebagai instrumen peningkatan perekonomian dan daya saing daerah. Kondisi ini berkaitan juga dengan kualitas dan daya serap tenaga kerja yang mampu bersaing dengan tenaga kerja daerah lain. Maka tantangan ke depan adalah bagaimana menyiapkan tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar kerja global.

4. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam

Isu pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup menjadi isu yang penting baik secara global maupun nasional khususnya terkait dengan isu perubahan iklim. Adanya dampak yang ditimbulkan oleh perubahan iklim seperti bencana banjir, longsor dan kekeringan menuntut adanya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini seiring dengan isu pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di mana 3 dari 17 tujuannya adalah berkaitan dengan lingkungan, yaitu penanganan perubahan iklim, pemeliharaan ekosistem laut dan pemeliharaan ekosistem darat.

Isu berkaitan dengan sumberdaya air di Jawa Tengah adalah penurunan kuantitas dan kualitas cadangan air baku/air bersih di Jawa Tengah, yang disebabkan oleh terganggunya kawasan tangkapan air/*catchment area*, pencemaran industri, eksploitasi air tanah oleh industri, dan pemanfaatan kawasan pesisir/mangrove untuk tambak. Kondisi ini menjadi ancaman bagi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Dalam pengelolaan hutan, berbagai permasalahan masih terjadi seperti tekanan pemanfaatan kawasan hutan oleh masyarakat, pencurian dan kebakaran hutan, kurang terpenuhinya kebutuhan hasil hutan berasal dari pengelolaan hutan berkelanjutan dan serta konflik satwa liar dengan masyarakat, serta pengelolaan hutan negara belum mampu memenuhi standar pengelolaan hutan lestari.

Persoalan penting lainnya terkait pengelolaan lingkungan adalah peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada peningkatan jumlah

timbulan sampah. Jika melihat dari sisi pelayanan persampahan secara total, tingkat pelayanannya masih rendah yaitu masih di bawah 30 persen. Sedangkan untuk tingkat pelayanan persampahan perkotaan sudah relatif tinggi yaitu 70-78 persen. Dari sejumlah 58 TPA yang ada, kondisi sebagian TPA telah melebihi usia pakai dengan sistem pengelolaannya 22 persen TPA menggunakan sistem *controlled landfill* dan sisanya masih menggunakan sistem *open dumping*.

Selain itu, isu lainnya adalah masih maraknya kegiatan pertambangan tanpa ijin (PETI) yang berpotensi merusak lahan. Kondisi ini didorong oleh meningkatnya kebutuhan material untuk pembangunan infrastruktur, sementara disisi lain perijinan belum banyak dipahami oleh masyarakat karena berpindahnya kewenangan dari kabupaten/kota ke provinsi. Sehingga perlu ditingkatkan lagi pengawasan terhadap kegiatan pertambangan tanpa ijin yang melibatkan penegak hukum.

Sedangkan dari sisi kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup juga dirasa masih rendah antara lain ditunjukkan dengan kebiasaan membuang sampah tidak pada tempatnya, pengolahan lahan yang kurang memperhatikan konservasi tanah dan air, serta kurangnya budaya hemat energi dan air.

Persoalan sumberdaya daya alam yang juga tidak kalah penting adalah kerusakan sumber daya pesisir. Kondisi tersebut dapat dilihat dari adanya abrasi dan sedimentasi akibat rusaknya ekosistem mangrove karena beberapa varietas mangrove tidak bisa beradaptasi, konflik kewenangan pengelolaan kawasan pesisir (pusat, provinsi, kabupaten/kota), dan konflik sosial terkait pengkaplingan lahan tambak yang menyulitkan pengelolaan, dan kurangnya SDM yang terlibat baik masyarakat dan aparatur. Pemanfaatan pesisir yang tidak sesuai dengan peruntukannya (sebagian wilayah dimiliki oleh masyarakat/pihak tertentu dengan hak ijin guna pakai), serta adanya penambangan di wilayah pesisir dan pantai (pasir laut) juga menjadi persoalan yang cukup penting untuk diperhatikan kedepan.

Akibat dari pengelolaan sumber daya alam yang kurang memperhatikan keberlanjutannya adalah semakin meningkatnya kejadian bencana. Jawa Tengah merupakan daerah dengan risiko bencana yang cukup tinggi dilihat dari frekuensi kejadian bencana yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kejadian bencana yang sering terjadi antara lain tanah longsor, banjir, rob, kebakaran hutan dan kekeringan yang disebabkan perubahan iklim global. Berbagai permasalahan yang harus ditangani kedepan antara lain rendahnya pelaksanaan kegiatan konservasi di wilayah rawan longsor dan wilayah yang memiliki potensi sumber air, kurangnya SDM dan prasarana sarana dalam penanganan bencana, dan perilaku masyarakat (buang sampah sembarangan, penggundulan hutan). Selain itu, masih kurangnya pengetahuan mitigasi/deteksi dini bencana oleh masyarakat dan tanggap bencana masyarakat untuk mengantisipasi bencana tsunami, banjir, kekeringan, longsor, belum optimalnya koordinasi dan integrasi antar sektor, lintas sektor/lintas bidang dan lintas wilayah, serta kurangnya dukungan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan, dan kurangnya keterlibatan masyarakat.

5. Kedaulatan pangan dan energi

Produksi pertanian akan mempengaruhi pada penyediaan pangan bagi masyarakat. Perkembangan produksi pertanian di Jawa Tengah saat ini secara statistik mampu mencukupi kebutuhan pangan masyarakat utamanya beras, bahkan mampu berkontribusi terhadap produksi beras nasional. Namun tidak demikian dengan produksi pertanian lainnya seperti kedelai dan jagung, yang masih harus ditingkatkan kedepan. Disisi lain, arus bahan pangan impor semakin terbuka dan tidak dibarengi dengan kebijakan mekanisme pengamanan yang kuat dari pemerintah. Menyempitnya lahan pertanian (LP2B) karena desakan kebutuhan lahan untuk industri dan permukiman, serta makin menurunnya tenaga kerja di sektor pertanian akan berpotensi menurunnya persediaan dan produksi pangan.

Isu lain adalah terkait sistem distribusi pangan, dimana pemerintah harus mampu memfasilitasi kemudahan akses pasar produk-produk pangan lokal yang sehat, yang terbentuk dalam satu sistem logistik daerah. Hal tersebut juga harus didukung dengan penyediaan jaringan informasi tepat guna hingga level desa guna memudahkan akses informasi pasar dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan pertanian lokal. Selain itu, penting juga untuk penguatan jaringan pergudangan melalui sistem resi gudang, penguatan kelembagaan koperasi pertanian melalui pendampingan secara berkelanjutan, dan penyediaan infrastruktur sebagai sarana distribusi pangan, kesemuanya harus berbasis masyarakat.

Tingkat keberagaman konsumsi pangan masyarakat juga masih menjadi isu penting dalam kedaulatan pangan. Melihat skor Pola Pangan Harapan dibawah angka 100 dan cakupan konsumsi masyarakat Jawa Tengah tertinggi adalah beras, bisa digambarkan bahwa konsumsi pangan masyarakat Jawa Tengah belum beragam. Hal tersebut berkaitan dengan budaya pangan masyarakat pada umumnya, yang memiliki ketergantungan pada beras. Mutu dan keamanan pangan juga harus tetap diperhatikan, karena saat ini mulai banyak ditemukan produk pangan yang diindikasikan tidak terjamin mutu dan keamanannya.

Satu tantangan lain adalah bagaimana menyiapkan produk pangan kita berorientasi ekspor, dan mampu bersaing di pasar global nasional, baik produk pangan mentah maupun olahan dalam rangka meningkatkan nilai tambah bagi petani.

Isu lain adalah terkait dengan kedaulatan energi. Kebutuhan energi masyarakat yang dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan pemakaian energi menunjukkan masih adanya kecenderungan yang sama sebagaimana dialami di tingkat nasional, yaitu ketergantungan terhadap sumber energi fosil, yang potensinya semakin lama semakin berkurang. Komposisi pemakaian energi sampai dengan tahun 2017 berdasarkan Dokumen Rencana Umum Energi Daerah (RUED) adalah minyak bumi 39,76 persen, gas bumi 13,51 persen, batubara 37,16 persen, dan energi baru terbarukan (EBT) 9,67 persen. Dalam dokumen RUED Provinsi Jawa Tengah diharapkan sampai dengan tahun 2050 terjadi peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan sebesar 28,82 persen, sehingga akan mengurangi ketergantungan pemanfaatan energi fosil.

Tantangan pemenuhan energi di Jawa Tengah kedepan adalah penyediaan energi untuk industri, perlunya penguatan kehandalan sistem dan sistem pasokan bagi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dalam upaya mendorong investasi, serta pemanfaatan energi baru terbarukan yang masih rendah saat ini.

Permasalahan lainnya adalah terkait pelayanan energi (listrik dan migas) yang masih terbatas, belum merata dan optimal serta belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan dari potensi energi lokal setempat. Rasio elektrifikasi Jawa Tengah sampai dengan bulan Agustus tahun 2018 sebesar 98,15 persen. Masih terdapat 1,85 persen kepala keluarga (KK) belum berlistrik yang sebagian besar berasal dari rumah tangga miskin dan terdapat di wilayah pedesaan terpencil. Pemenuhan tersebut akan dilakukan melalui sambungan listrik murah bagi rumah tangga miskin.

Dalam rangka kehandalan penyediaan listrik beberapa upaya akan dilakukan antara lain dengan pengembangan jaringan listrik pedesaan yang sudah ada dengan *upgrading*, serta mengembangkan sumber energi baru terbarukan seperti mikro hidro, *solar cell*, dan panas bumi. Pengembangan potensi energi baru terbarukan juga masih mengalami banyak kendala antara lain teknologi yang digunakan masih mahal, efisiensinya masih rendah, potensi energi yang ada biasanya bersifat lokal sehingga pemanfaatannya juga oleh masyarakat setempat, padahal biasanya keterdapatan potensi pada wilayah dengan kepadatan penduduk yang jarang, dan belum optimal kelembagaannya.

Budaya hemat energi di masyarakat juga masih perlu digalakkan lagi. Upaya pemerintah daerah untuk mendorong gerakan budaya hemat energi telah dilakukan dengan mengadakan kompetisi hemat energi bagi kantor pemerintah kabupaten/kota dan sekolah-sekolah menengah atas/kejuruan yang telah dilakukan sejak tahun 2014. Provinsi Jawa Tengah sendiri telah menjadi contoh pengelolaan hemat energi di tingkat nasional 5 (lima) tahun berturut-turut.

6. Kesenjangan wilayah

Isu lainnya bukan hanya tentang daya saing ekonomi, namun juga ekonomi yang berkualitas, inklusif, dan merata. Wilayah Jawa Tengah saat ini perkembangannya belumlah merata, yang ditunjukkan dengan Indeks Williamson sebesar 0,62 di tahun 2016. Selain itu masih cukup banyak kabupaten yang masuk kategori relatif tertinggal dibanding kabupaten/kota lain di Jawa Tengah. Di samping itu juga terdapat kesenjangan antara wilayah desa dan kota. Kesenjangan pembangunan antara desa-kota maupun antara kota-kota perlu ditangani secara serius untuk mencegah terjadinya urbanisasi, yang pada gilirannya akan memberikan beban dan masalah sosial di wilayah perkotaan.

Untuk itu membuka akses antar wilayah menjadi isu penting, terutama untuk menghubungkan daerah-daerah tertinggal dengan pusat-pusat pertumbuhan, transportasi kota-desa, pergantian antar moda, serta untuk meningkatkan kemudahan distribusi barang dan jasa. Penyediaan akses berupa prasarana jalan dan jembatan, dilengkapi dengan transportasi publik yang memadai (termasuk revitalisasi kereta api antar kota), jaringan komunikasi, dan jaringan energi menjadi penting.

Untuk mendukung perkembangan wilayah dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah juga diperlukan rencana pengembangan/*grand* desain infrastruktur perhubungan diantaranya meliputi pengembangan pelabuhan utama di wilayah utara Jawa Tengah yang setara dengan Pelabuhan Tanjung Perak, dan pengembangan pelabuhan pengumpul di selatan Jawa yang dilengkapi dengan kapal logistik ke Indonesia Bagian Timur, serta pengembangan bandara sebagai hub/transit internasional.

7. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah

Siklus manajemen pembangunan akan berjalan dengan baik dan mencapai tujuan yang diinginkan, apabila didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, meliputi kualitas dan profesionalisme aparatur, akuntabilitas kinerja pembangunan, serta pelayanan publik yang prima.

Aparatur sebagai pelayan publik dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan prima. Keterbukaan dan transparansi informasi serta komunikasi menjadi penting dalam membangun bentuk pelayanan publik yang prima. Ruang pengaduan masyarakat harus lebih semakin terbuka, guna meningkatkan nilai aparatur sebagai pelayan bagi masyarakat. Maka pengembangan teknologi menjadi hal cukup penting sebagai instrumen komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Selain itu pelayanan perijinan, kemudahan berusaha, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pelayanan pendidikan dan kesehatan juga harus semakin ditingkatkan.

Akuntabilitas kinerja pembangunan juga menjadi satu kriteria menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Akuntabilitas kinerja dibangun sejak proses perencanaan dan penganggaran, hingga implementasi. Dalam rangka mempertahankan kinerja akuntabilitas daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan terus meningkatkan kinerja, yang dimulai dari proses perencanaan dalam menentukan tujuan, sasaran, program, kegiatan pembangunan daerah, beserta indikator kinerjanya agar relevan, selaras, dan konsisten.

Isu yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah salah satunya adalah tentang kemandirian fiskal. Dari tingkat kontribusi PAD dan DBH Provinsi Jawa Tengah terhadap pendapatan daerah, Jawa Tengah termasuk daerah yang mandiri. Namun demikian, dari tren selama lima tahun terakhir diketahui bahwa kemampuan fiskal daerah Jawa Tengah yang dilihat dari kontribusi PAD dan DBH terhadap pendapatan daerah cenderung menurun. Kondisi tersebut menggambarkan dua hal, yaitu pertama adalah belum optimalnya kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi sumber-sumber PAD di Provinsi Jawa Tengah. Sumber-sumber PAD yang ada selama ini (kondisi eksisting) sepertinya sudah tidak lagi mampu membiayai kenaikan beban belanja APBD Provinsi Jawa Tengah yang terus meningkat setiap tahunnya. Yang kedua adalah adanya kenaikan secara signifikan beban belanja APBD Provinsi Jawa Tengah yang relatif memberikan tekanan pembiayaan APBD. Implikasinya adalah pada kewajiban pemerintah daerah untuk menjaga kelangsungan pelayanan pemerintahan, umum sekaligus pembangunan di daerah.

Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih akan tercapai apabila didukung dengan ASN yang berkualitas dan profesional, serta kelembagaan

yang optimal. Untuk itu, peningkatan kompetensi dan kualitas ASN menjadi kunci mutlak yang harus dilakukan, disertai penempatan ASN sesuai dengan formasi yang dibutuhkan. Demikian juga penguatan kelembagaan agar efektif dan efisien, mulai dari kelembagaan tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.

Sedangkan dalam rangka menjaga kondusivitas wilayah selama 5 (lima) tahun ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus melaksanakan koordinasi dan kerjasama antar tingkat pemerintahan serta lintas sektor sebagai upaya peningkatan kualitas kehidupan demokrasi yang damai, aman, dan toleran bagi seluruh elemen masyarakat Jawa Tengah. Aspek kondusivitas wilayah menjadi prasyarat penting dan strategis dalam menunjang kelancaran dan keberhasilan program-program pembangunan di Jawa Tengah. Penciptaan kondusivitas wilayah ini juga diharapkan mampu mewujudkan iklim sejuk untuk menjaga kerukunan antar umat beragama, meningkatkan perlindungan bagi kebebasan sipil masyarakat, dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang harmonis dari dimensi ketertiban sosial.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah lima tahun kedepan. Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

5.1. Visi

Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2018-2023 yaitu:

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” ***Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi***

Visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Jawa Tengah tahun 2013-2018. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

Sejahtera

Masyarakat Jawa Tengah Sejahtera adalah masyarakat yang tercukupi segala kebutuhan dasarnya secara adil dan merata berprinsip pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Masyarakat sejahtera juga terbebas dari ketidakmerdekaan, kebodohan, kesakitan, kelaparan, serta ancaman dari perlakuan atau tindak kekerasan fisik maupun non fisik. Dalam lingkungan masyarakat yang sejahtera akan tercipta hubungan sosial yang nyaman dan aman, tanpa adanya diskriminasi SARA, serta tercipta relasi yang dinamis, saling menghargai, saling pengertian, dan toleransi yang tinggi. Ketercukupan kebutuhan masyarakat juga didukung dengan pemenuhan prasarana dan sarana dasar, pelayanan publik, ruang publik, transportasi, serta teknologi yang harus disediakan secara cukup dan menerus, untuk mencapai kemajuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera.

Berdikari

Berdikari merupakan sebuah tujuan agar masyarakat mampu memenuhi segala kebutuhan dasarnya secara mandiri dan cukup. Dengan begitu, berdikari menjadi sebuah metode untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidupnya berbasis modal pokok milik sendiri, baik sumberdaya alam, manusia, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Sedangkan sumberdaya yang berasal dari luar merupakan tambahan apabila diperlukan.

Perwujudan masyarakat Jawa Tengah yang sejahtera dan berdikari dilandasi semangat dan nilai utama ***Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi***. Nilai ini dimanifestasi dalam sikap, tindakan, dan laku seluruh masyarakat Jawa Tengah untuk dapat bersama mencapai kesejahteraan yang berdikari.

5.2. Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. **Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia**

Misi ini menggambarkan sebuah kondisi yang ingin diciptakan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang sejahtera, tercermin dari rasa aman dan nyaman yang dirasakan dalam kehidupan masyarakat. Kondisi yang tercipta merupakan manifestasi implementasi nilai-nilai religius dalam kehidupan masyarakat. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyub ini adalah dengan menciptakan kondisi obyektif yang memungkinkan interaksi antar umat beragama untuk saling menghormati dan menghargai satu sama lain, mendorong keberagaman, kebhinekaan, dan toleransi dalam kerangka kesatuan.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan menguatkan pemahaman keberagaman dan kebhinekaan sejak usia dini, mengembangkan ruang-ruang publik untuk membangun komunikasi antar masyarakat melalui kegiatan seni dan rekreasi, serta mendorong kearifan lokal dalam bentuk gerakan-gerakan masyarakat termasuk gerakan gotong royong. Dalam misi ini terkandung tujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, tanpa ada konflik sosial maupun agama, bahkan konflik SARA, dan tercipta kohesi sosial masyarakat yang baik.

2. **Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota**

Misi kedua ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan Jawa Tengah berlandaskan nilai "*Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*". Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi diharapkan semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, kapasitas kelembagaan, serta manajemen sumber daya manusia aparatur yang semakin baik. Pelayanan publik yang dinamis diwujudkan dengan membangun *open government* dan pemerintahan yang responsif. *Open government* dilakukan dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Sedangkan pemerintahan yang responsif tercermin dalam respon pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, dengan cepat dan tepat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan. Pelayanan publik yang dinamis, terbuka, dan responsif diikat dalam satu *tagline* pelayanan yang mudah, murah, cepat, serta didukung inovasi dan teknologi informasi.

Efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan tergambar dalam proses perencanaan, penganggaran, serta evaluasi pembangunan yang akuntabel. Manajemen pembangunan Jawa Tengah kedepan tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (*outcome*). Untuk

itu perlu juga dilakukan pengawasan dalam prosesnya, sejak dimulainya proses perencanaan, implementasi hingga evaluasi.

Agar dapat melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan bersih maka dibutuhkan kelembagaan/organisasi yang tepat dan didukung dengan penataan sistem manajemen sumberdaya manusia aparatur yang baik. Manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik terejawantahkan dalam bentuk integritas aparatur yang dibangun melalui kompetensi dan etika menuju integritas pribadi dan institusi, mendorong birokrasi yang inovatif, dan dijamin dalam *quality assurance* aparatur.

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran

Misi ini adalah untuk mengarahkan kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin, yang didukung oleh perekonomian daerah yang stabil, berkualitas, inklusif, dan menyebar.

Program pengentasan kemiskinan difokuskan kepada kelompok sasaran utama, seperti petani, nelayan, pelaku UKM dan pekerja dan kelompok rentan lainnya. Program pengentasan kemiskinan tersebut perlu didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang tersebar, inklusif, dan berkualitas, yakni pertumbuhan ekonomi yang menyebar di seluruh wilayah Jawa Tengah, memperhitungkan kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ketersediaan sumber daya, melibatkan seluruh kelompok masyarakat dengan mengutamakan peran dan kontribusi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, dan menghapus praktek ekonomi biaya tinggi. Program pengentasan kemiskinan ke depan juga diarahkan untuk fokus pada pendidikan dan kesehatan terutama bagi rumah tangga miskin pada dua desil terbawah, serta masyarakat terlantar melalui penyediaan data BDT yang telah tervalidasi dengan sebaran pada wilayah kabupaten/kota miskin di Jawa Tengah. Perluasan lapangan pekerjaan juga menjadi penting bukan hanya untuk mengatasi pengangguran, namun juga bagaimana meningkatkan produktivitas tenaga kerja untuk bisa bekerja lebih dari 15 jam per minggu.

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan. Era globalisasi yang semakin terbuka menuntut kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing secara kompetitif dalam kompetensi dan kualifikasi. Bonus demografi yang saat ini telah dialami oleh Jawa Tengah dapat dijadikan sebagai peluang sekaligus tantangan, bagaimana kedepan modal sosial ini akan menempatkan Jawa Tengah sebagai salah satu daerah dengan sumberdaya manusia yang mampu bersaing. Sehingga diharapkan, dapat memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang semakin baik, dan menciptakan masyarakat Jawa Tengah yang semakin sejahtera.

Tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia yang diharapkan, namun juga bagaimana membentuk karakter masyarakat Jawa Tengah yang semakin berbudaya. Di tengah arus keterbukaan informasi

dunia yang nyata kemudian bagaimana masyarakat Jawa Tengah tetap kuat menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Jawa Tengah, serta menjaga kearifan lokal sejak dini.

5.3. Program Unggulan

Visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 juga didukung dengan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023 yaitu:

1. Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;

Sekolah tanpa sekat merupakan integrasi pendidikan formal, informal, dan non formal kepada seluruh masyarakat yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi serta sebagai perwujudan bahwa urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat.

2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru agama;

Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah, dan guru agama sebagai media komunikasi antar agama dan penghayat untuk membangun hubungan yang saling menyejahterakan menuju kehidupan yang saling menghormati, terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi.

3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, efisiensi kelembagaan, dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik.

4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;

Satgas kemiskinan secara fungsional merupakan upaya penguatan tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk memastikan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana, terutama dalam pengelolaan data, perumusan masalah dan perumusan kebijakan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pelaporan.

Bantuan desa merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan prasarana dan sarana desa, pembangunan kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan masyarakat desa, dan operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Program unggulan rumah sederhana layak huni dimaknai sebagai upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga Miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dengan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin di 7.809 desa dan 750 kelurahan di Jawa Tengah dengan dukungan keswadayaan dan sifat gotong royong dari masyarakat. Selain itu, penyediaan rumah sederhana layak huni diperuntukkan juga bagi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan akses dan keterjangkauan rumah layak huni dalam rangka meningkatkan iklim kondusif bagi pengembangan industri.

5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan *startup* untuk wirausaha muda;

Program unggulan obligasi daerah dilatarbelakangi karena menurunnya kapasitas fiskal daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah, namun masih ada kebutuhan kegiatan strategis yang harus segera dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah dilakukan melalui obligasi daerah yang merupakan pembiayaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi diluar pendapatan asli daerah.

Program ekonomi lainnya adalah program kemudahan akses kredit UMKM yaitu program fasilitasi bagi UMKM untuk mendapatkan kemudahan akses kredit dari perbankan. Program unggulan lainnya adalah penguatan BUMDes yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan produktivitas BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa melalui lembaga keuangan milik desa.

Salah satu program yang juga menjadi unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam lima tahun ke depan adalah peningkatan *startup* wirausaha baru untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan keterampilan bagi masyarakat terutama bagi kelompok pemuda, dan penganggur dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja.

6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;

Program menjaga harga komoditas merupakan upaya untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan perlindungan harga dan menjamin pemasaran produk pertanian; intervensi dan penguasaan stok oleh pemerintah dengan membeli secara langsung produk pertanian dengan menugaskan BUMD sebagai operator; serta penguatan kelembagaan petani di tingkat desa. Sedangkan asuransi gagal panen untuk petani merupakan upaya pemberian jaminan bagi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama penyakit dan gangguan lainnya.

Untuk program melindungi kepentingan nelayan adalah rangka memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan dari risiko selama beraktifitas dan kecelakaan kerja, termasuk fasilitasi kepentingan dasar.

7. Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;

Program ini dilakukan dengan melakukan pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan (BRT); pengelolaan BRT Trans Jateng dengan Sistem BLUD; fasilitasi peningkatan layanan KA Semarang-Solo; fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur kereta api diantaranya yang menghubungkan wilayah Kedungsepur dengan PSN Borobudur, wilayah pantura timur serta wilayah tengah; fasilitasi pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas wilayah.

Program pembangunan embung/irigasi dan didukung dengan pemeliharaan prasarana/sarana embung/irigasi dilakukan dalam rangka menciptakan ketahanan air dan pemenuhan air baku guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan pangan, penyediaan air bersih bagi masyarakat, dan mendukung pengembangan kawasan industri.

8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;

Program ini dilakukan dengan mendorong afirmasi kebijakan tumbuhnya kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan, dalam mempercepat proses persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan untuk pengembangan rintisan pertanian terintegrasi dimaksudkan dengan integrasi vertikal hulu hilir, integrasi holistik perpanjangan rantai energi untuk menghasilkan 5F (*food, feed, fuel, fertilizer, fiber*). Selain itu juga mengembangkan konsep pertanian terintegrasi sektoral (mayor sektoral) dan sektor terintegrasi dalam pertanian (pertanian mayor), integrasi berbasis konsolidasi lahan (penerapan mekanisasi penuh), integrasi berbasis organisasi pertanian contoh pertanian organik, gula semut, serta kawasan pertanian terintegrasi berbasis unggulan.

9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;

Rumah sakit tanpa dinding diharapkan untuk mengubah paradigma kesehatan dari kuratif ke promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan ini menempatkan tenaga medis jemput bola untuk mendatangi pasien; penyediaan ambulan; bidan, perawat, dokter datang ke orang sakit. Program ini dilakukan dengan memastikan pemerataan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan dasar terutama di wilayah dengan angka kematian dan angka kesakitan tinggi. Program ini juga disamping mempercepat pelayanan sekaligus memberikan penyuluhan kesehatan sesuai dengan kasus-kasus yang ditangani, juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat.

Program unggulan lainnya adalah sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin yang dikembangkan untuk anak sekolah dari keluarga miskin, yang pembiayaan operasionalnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara penuh. Selain itu program lainnya adalah pemberian bantuan kepada sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah, dan difabel yang merupakan stimulan Bantuan Operasional Sekolah kepada SMK/SMK/SLB Swasta dan bantuan lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jenjang pendidikan dan unsur pendidikan.

10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan;

Program festival seni dilakukan dengan mendorong kegiatan-kegiatan seni, pengembangan dan penguatan hubungan kebudayaan melalui rembug dan pertukaran kesenian dan budaya, penyelenggaraan festival dan gelar seni budaya dengan masyarakat dan provinsi lain maupun dengan masyarakat negara lain, serta pengembangan ekonomi kreatif untuk penciptaan nilai tambah yang berbasis kreativitas pada seni pertunjukan dan seni rupa. Sedangkan program pengembangan infrastruktur olahraga dilakukan dalam rangka meningkatkan kebugaran masyarakat serta meningkatkan prestasi olahraga Jawa Tengah.

Program pengembangan rumah kebudayaan Jawa Tengah. Program ini diarahkan pada penyediaan ruang bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk penggiatan, pengembangan dan pemajuan daya kritis, kreatif, produktif dan apresiatif terhadap hasil kerja dan temuan karya yang

berakar pada nilai budaya masyarakat Jawa Tengah. Rumah Budaya dibentuk di tingkat eks-Karesidenan dengan pendayagunaan gedung dan pekarangan peninggalan Rumah Dinas Residen, dan pemanfaatan taman budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

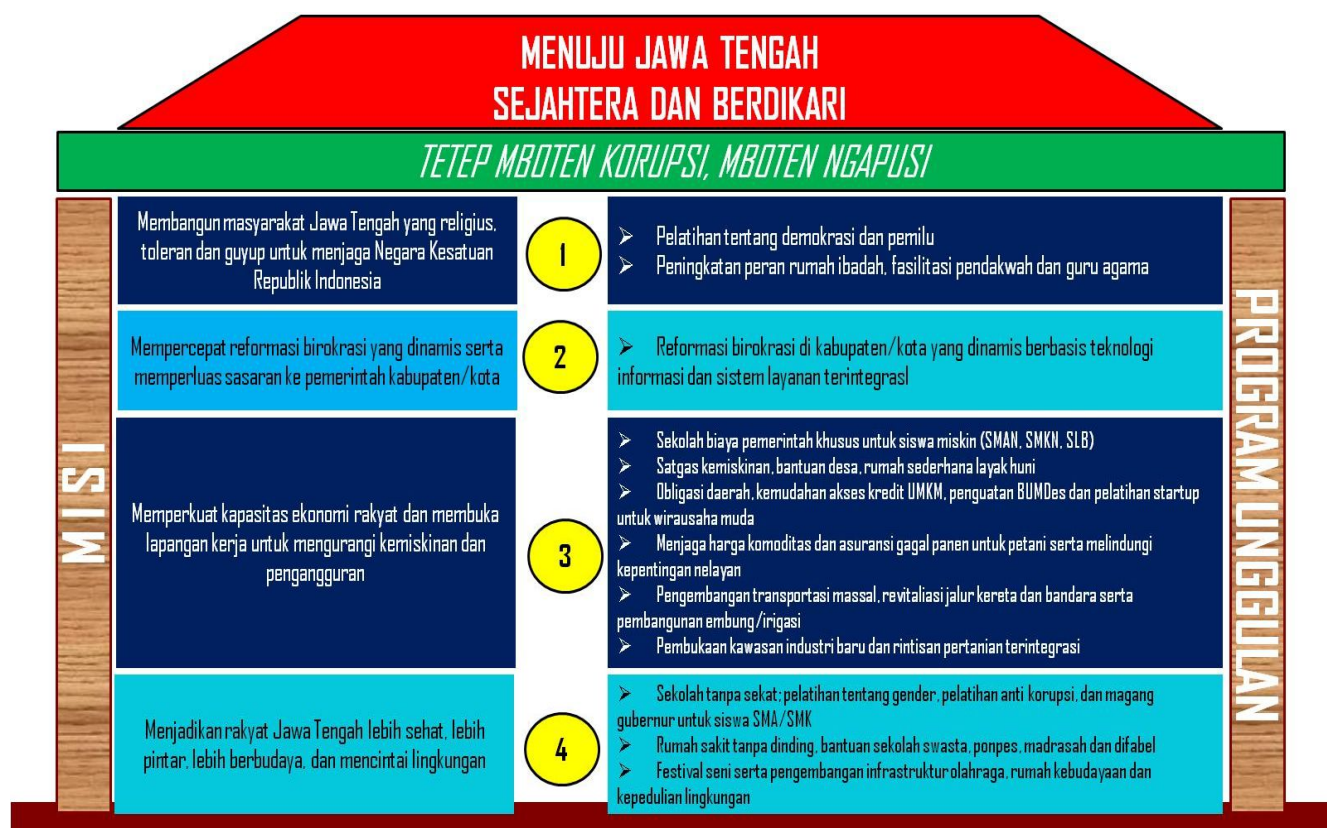
Selain itu, program lainnya adalah mendorong peningkatan kepedulian lingkungan. Program ini mendorong peningkatan kesadaran bahwa manusia menjadi bagian yang tidak terpisah dari lingkungan sekaligus berusaha untuk berbuat sebaik mungkin bagi lingkungannya. Sikap kepedulian lingkungan ini harus dibangun sebagai salah satu nilai karakter masyarakat Jawa Tengah, yang akan mendukung upaya konservasi dan pemulihan kembali fungsi lingkungan. Ditambah dengan meningkatkan masyarakat tangguh bencana sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana agar terwujud keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan.

Dalam mencapai visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah lima tahun kedepan, menggunakan Trisakti Bung Karno sebagai haluan politik. Yang pertama adalah berdaulat di bidang politik yang diartikan sebagai keikutsertaan masyarakat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup mereka, yang menjadikan masyarakat juga sebagai subyek politik dalam pembangunan. Hal ini didasari berbagai situasi bangsa saat ini, sehingga Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk aktif menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pertama, nilai-nilai Pancasila harus ditanamkan di benak rakyat; kedua, rakyat harus dibangkitkan kesadarannya untuk berani membela Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, rakyat secara sistematis merawat kelangsungan hidup bangsa dan negara, sekaligus menjaga kedaulatannya sebagai warga negara. Sebab, tanpa negara, rakyat tidak mungkin berdaulat; tanpa rakyat berdaulat, negara tidak akan nyata.

Yang kedua adalah berdikari dibidang ekonomi, yang digambarkan sebagai berikut. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada umumnya dan di Jawa Tengah khususnya harus memberikan dampak pada peningkatan kesejahteraan sekaligus kualitas hidup rakyat Jawa Tengah secara berkelanjutan. Kesejahteraan harus meliputi, tercukupinya kebutuhan dasar warga, seperti pangan, perumahan, sandang, air bersih, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, alat transportasi, alat komunikasi dan lain-lain. Kemudian, terciptanya relasi sosial yang aman dan tidak diskriminatif, serta tersedianya infrastruktur sosial, ekonomi, politik, keamanan dan kebudayaan yang nyaman, memadahi dan terjangkau. Untuk itu, perlu mengembangkan ekonomi berbasis pada sumber daya manusia dan sumber daya alam lokal, demi mengurangi ketergantungan ekonomi dari pihak luar. Sedang unsur luar merupakan tambahan apabila diperlukan, serta membuka akses seluas-luasnya kepada rakyat untuk penghidupan ekonomi yang lebih baik dengan prinsip berdikari dibidang ekonomi.

Ketiga adalah berkepribadian dalam kebudayaan, yang dijelaskan sebagai berikut. Demi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara, pemanfaatan teknologi informasi harus diarahkan agar mampu mendorong transparansi pemerintahan, penghargaan atas perbedaan, penggalangan solidaritas sosial, dan penguatan gotong royong. Transparansi pemerintahan diperlukan untuk

menanamkan nilai-nilai kejujuran untuk memerangi korupsi; membangun sikap menghormati atas perbedaan merupakan keniscayaan mengingat keragaman merupakan kodrat alam; menggalang solidaritas sosial untuk mempertahankan dan memajukan kehidupan bersama; dan menguatkan budaya gotong royong sebagai landasan untuk mempertahankan kepribadian bangsa. Semua itu perlu dilakukan guna mencapai apa yang disebut dengan berkepribadian dalam kebudayaan.



Gambar 5.1.

Keterkaitan Visi, Misi, dan Program Unggulan Daerah Tahun 2018-2023

5.4. Tujuan Dan Sasaran

Agar visi dan misi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 meliputi 6 (enam) tujuan dan 12 (duabelas) sasaran, yang diuraikan sebagai berikut.

1. Misi 1: Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia

Misi ini memiliki tujuan menjadikan masyarakat Jawa Tengah semakin religius, toleran, dan guyup, dengan sasaran terciptanya kohesi sosial masyarakat. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator persentase penurunan kejadian konflik bernuansa SARA di Jawa Tengah, dengan indikator sasarannya adalah indeks toleransi dan persentase tindak pidana yang tertangani.

2. Misi 2: Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota

Misi kedua bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), dengan indikator kinerja

tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu: 1) meningkatnya kualitas pelayanan publik; 2) meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan; dan 3) meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik.

3. Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran

Misi ketiga ini memiliki 2 (dua) tujuan yaitu: 1) kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata; dan 2) menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan. Ukuran keberhasilan yang diharapkan dari tujuan ini adalah angka kemiskinan, Indeks Gini, pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB per kapita, dan Indeks Williamson. Untuk itu sasaran yang ingin dihasilkan dalam rangka mencapai tujuan ini adalah: 1) meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga dua desil terbawah; 2) menurunnya pengangguran terbuka; dan 3) meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah.

4. Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan

Misi ini bertujuan untuk: 1) mewujudkan sumberdaya manusia yang semakin berkualitas dan berdaya saing dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM); dan 2) mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sasaran yang ingin dicapai adalah: 1) meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas; 2) meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 3) meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender; 4) meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan; dan 5) meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana.

Penjabaran tujuan, sasaran, dan indikator kinerjanya pada setiap misi dapat dilihat pada Tabel 5.1.

Tabel 5.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia	Masyarakat Jawa Tengah yang semakin religius, toleran, dan guyup		Persentase penurunan konflik SARA	%	17,64	na	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		Terciptanya kohesi sosial masyarakat	Indeks Toleransi	Angka	73,90	na	74,40	74,48	75,30	75,90	76,60	76,60
			Persentase tindak pidana yang tertangani	%	74,30	na	80,00	83,00	85,00	87,00	90,00	90,00
Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota	Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)		Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	76,53	74,49	75,50	77,00	78,00	78,00	80,00	80,00
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Angka	78,48	81,36	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00	88,00

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,64*)	2,64*)	2,76	2,88	3,00	3,12	3,24	3,24
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Nilai SAKIP	Angka	75,94	80,18	80,00	82,00	83,00	84,00	85,00	85,00
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,66	3,43	3,45	3,47	3,48	3,49	3,50	3,50
			Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka	na	na	17,00	20,00	23,00	26,00	29,00	29,00
			Indeks Sistem Merit	Angka	na	0,66	0,67	0,68	0,69	0,70	0,71	0,71
Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata		Angka Kemiskinan	%	12,23	11,19	10,57-9,57	9,81-8,81	9,05-8,05	8,27-7,27	7,48-6,48	7,48-6,48

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
			Indeks Gini	Angka	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,30	0,30
		Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah	Persentase penduduk miskin perkotaan	%	10,55	9,67	9,54	9,44	9,37	9,21	9,17	9,17
			Persentase penduduk miskin pedesaan	%	13,92	12,80	12,74	12,65	12,35	12,12	11,97	11,97
			Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Ribu Rupiah	451,28	na	464,81	478,76	493,12	507,91	523,15	523,15
			Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Angka	60,83	na	60,85	61,00	61,25	61,50	61,75	61,75
			Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan keluhan kesehatan	%	30,86	na	30,75	30,50	30,25	30,00	29,75	29,75

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir	
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
		Menurunnya pengangguran terbuka	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,57	4,51	4,43	4,33	4,23	4,13	4,00	4,00	
			Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu	%	5,71	na	5,70	5,65	5,60	5,55	5,50	5,50	
	Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan		Pertumbuhan Ekonomi		%	5,26	5,32	5,3-5,7	5,4-5,7	5,4-5,8	5,5-5,8	5,6-6,0	5,6-6,0
				Inflasi	%	3,71	2,82	3,5±1	3,0±1	3,0±1	3,0±1	3,0±1	3,0±1
				PDRB per kapita	Juta Rupiah	34,23	36,78	37,44	39,25	41,15	43,20	45,35	45,35
			Indeks Williamson	Angka	0,62	na	0,60	0,59	0,58	0,57	0,56	0,56	

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	%	1,66	2,63	2,90	2,90	3,00	3,00	3,10	3,10
			Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	4,33	4,35	4,85	5,10	5,35	5,60	5,65	5,65
			Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	%	6,01	5,70	5,67	5,67	5,70	5,70	5,90	5,90
			Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD	%	3,00	3,00	3,15	3,15	3,15	3,20	3,20	3,20
			Pertumbuhan investasi	%	34,98	15,00	9,00	9,00	9,00	10,00	10,00	10,00
			Nilai Tukar Petani	Angka	100,40	102,25	101,20	102,42	102,72	102,96	103,15	103,15
Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	Sumberdaya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,52	na	71,60	72,00	72,50	72,70	73,00	73,00

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,27	na	7,31	7,34	7,37	7,41	7,45	7,45
			Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,57	na	12,84	12,92	13,00	13,08	13,17	13,17
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,08	na	74,09	74,09	74,10	74,10	74,10	74,10
		Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	91,94	na	92,00	92,06	92,12	92,18	92,25	92,25
	Sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	66,33	66,51	66,69	66,87	67,02	67,14	67,26	67,26

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal		Target Capaian					Kondisi Akhir
					2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan	Indeks Kualitas Air	Angka	48,17	48,47	48,77	49,17	49,47	49,77	50,07	50,07
			Indeks Kualitas Udara	Angka	83,91	84,21	84,51	84,71	84,91	85,01	85,11	85,11
			Indeks Tutupan Lahan	Angka	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76
		Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Angka	3,50	na	3,52	3,54	3,56	3,58	3,60	3,60

Keterangan:

**) Nilai konversi Indeks Pemeringkatan E-Government Indonesia (PEGI) tahun 2015; di tahun 2017 dan 2018 belum ada perhitungan Indeks SPBE.*



Gambar 5.2.

Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah Jawa Tengah Tahun 2018-2023

BAB VI

STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama lima tahun kedepan.

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

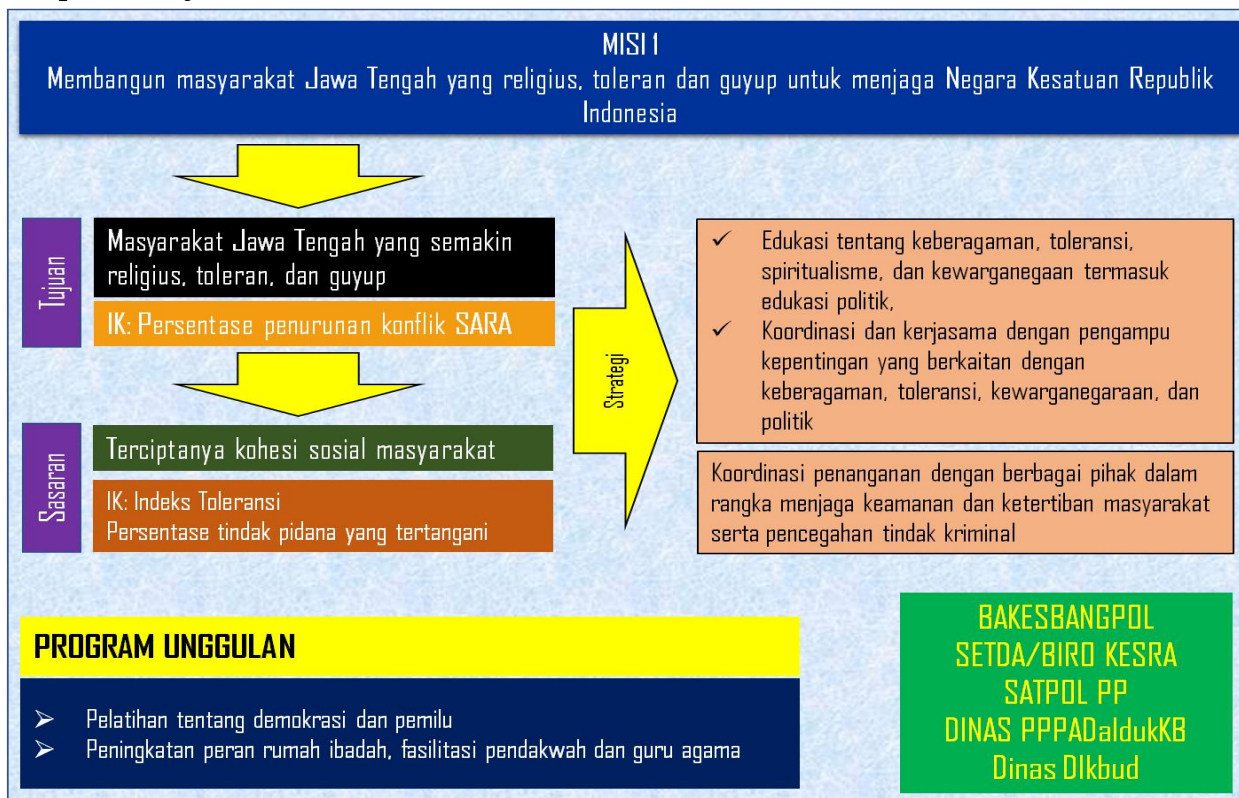
1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia

Makna yang terkandung dalam misi ini adalah bagaimana menciptakan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang aman dan nyaman, kerukunan antar umat beragama, pluralisme, tanpa ada konflik sosial maupun agama bahkan konflik SARA, dan tercipta kohesi sosial masyarakat yang baik. Dengan ukuran tujuan pada misi ini yaitu persentase penurunan konflik bernuansa SARA, melalui penciptaan kohesi sosial di masyarakat, maka beberapa strategi yang akan dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi yaitu:

- a. Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, toleransi, spiritualisme, dan kewarganegaraan, termasuk edukasi politik kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman, toleransi, kewarganegaraan, dan politik;
- b. Meningkatkan koordinasi penanganan dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal termasuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan fokus pada peningkatan kebebasan sipil masyarakat, peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang harmonis pada aspek kerukunan dan ketertiban sosial, serta menjaga kerukunan antar umat beragama.

Salah satu program unggulan yang mendukung pada pencapaian tujuan dan sasaran misi ini adalah pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, yang merupakan salah satu bentuk implementasi program sekolah tanpa sekat. Program tersebut merupakan bagian dari upaya edukasi politik bagi masyarakat yang mengajarkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan. Edukasi politik bagi masyarakat juga akan mendorong inisiatif masyarakat untuk mampu menyelesaikan permasalahan, menjawab tantangan dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada serta menegaskan bahwa Negara milik rakyat, dikelola oleh rakyat dan diperuntukkan bagi kepentingan rakyat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dan untuk memperkuat landasan kehidupan masyarakat Jawa Tengah yang semakin religius, toleran, dan guyup, juga dilakukan upaya peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah, dan guru agama. Program ini adalah sebagai media komunikasi antar agama dan penghayat untuk membangun hubungan yang saling menyejahterakan menuju kehidupan yang saling menghormati, serta terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi.



Gambar 6.1.
Skema Strategi Pencapaian Misi 1

2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota

Selama tahun 2013-2018 capaian reformasi birokrasi yang paling mendasar adalah berhasil menempatkan rakyat pada tempat yang terhormat dimana ruang rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, penentuan arah dan pengawasan pembangunan menjadi semakin terbuka. Pada gilirannya partisipasi masyarakat mampu mendorong reformasi birokrasi yang semakin berpihak kepada kepentingan publik dan tanggap terhadap permasalahan yang dihadapi rakyat secara dinamis. Birokrasi telah ditempatkan sebagai subyek reformasi yang mendapatkan manfaat (*benefit*) dari reformasi itu sendiri, serta juga telah berhasil meningkatkan semangat dan kenyamanan bekerja, kemauan bekerjasama, transparansi, dan akuntabel.

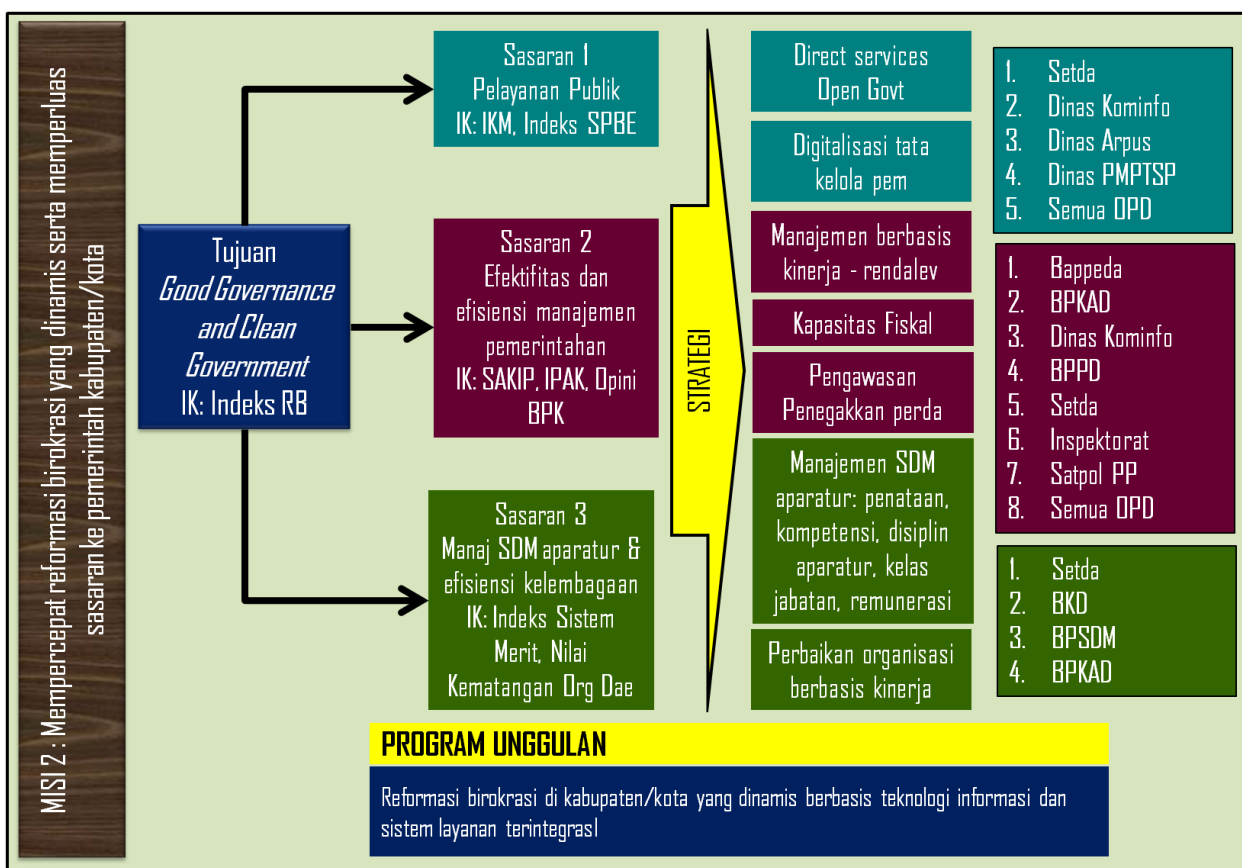
Dalam lima tahun kedepan, reformasi birokrasi di Jawa Tengah tetap dilandaskan pada nilai utama *tetep mboten korupsi, mboten ngapusi*, yang diarahkan pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis dan terbuka; efektivitas, efisiensi dan akutabilitas manajemen pemerintahan; serta efisiensi kelembagaan, dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik. Cakupan penguatan reformasi birokrasi tidak hanya pada lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, namun juga semakin diperluas sampai ke pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah.

Misi kedua ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean government*), dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 3 (tiga) hal yaitu: 1) meningkatnya kualitas pelayanan publik; 2) meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan; dan 3) meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (*direct services*), serta membangun pemerintahan yang terbuka (*open government*) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik antara lain melalui kunjungan lapangan (*roadshow*);
- b. meningkatkan pemanfaatan dan perkembangan teknologi informasi dalam birokrasi (digitalisasi tata kelola pemerintahan), dengan memperkuat jaringan infrastruktur teknologi informasi, pengelolaan sistem informasi pemerintah berbasis elektronik (*e-government*), dan meningkatkan kemampuan ASN dalam penggunaannya;
- c. meningkatkan efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan melalui:
 - a) pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu dan responsif; b) penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; c) peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (SPIP) secara baik, perkuatan kapabilitas APIP dari sisi *quality assurance* dan *consulting partner*, serta pengendalian produk hukum dan penegakkan perda dengan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum dan penindakan produk hukum daerah;
- d. mewujudkan efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur yang baik, melalui:
 - a) pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN; pengembangan sistem penilaian kinerja, penerapan sistem renumerasi, penataan ASN; penyusunan kelas jabatan, evaluasi jabatan, serta pemetaan nilai jabatan; penerimaan pegawai secara transparan dan akuntabel, promosi jabatan secara terbuka dengan *talent scouting* (penelusuran bakat), serta mutasi ASN dilakukan dengan dasar merit sistem secara transparan, obyektif dan akuntabel; penegakan disiplin aparatur; serta pengembangan jabatan fungsional tertentu; b) perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja yang tidak hanya diukur dari hasil (*output*) tetapi juga dampak (*outcome*) dan didukung perbaikan tata laksana organisasi.

Pencapaian tujuan dan sasaran misi kedua ini didukung dengan program unggulan reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi. Program ini ditunjukkan tidak hanya untuk pemerintah provinsi namun juga diarahkan untuk pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Karena keberhasilan reformasi birokrasi tidak hanya sampai pada tataran pemerintah provinsi

tetapi juga hingga level pemerintah kabupaten/kota. Upaya yang dilakukan pemerintah provinsi antara lain adalah koordinasi, pembinaan, dan advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota terkait dengan penerapan reformasi birokrasi, terutama mendorong penerapan teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi di kabupaten/kota.



Gambar 6.2.

Skema Strategi Pencapaian Misi 2

3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran

Penurunan kemiskinan di Jawa Tengah tahun 2018 merupakan penurunan tertinggi selama kurun waktu lima tahun, bahkan menjadi provinsi dengan penurunan kemiskinan tertinggi di Indonesia. Penurunan ini juga didukung dengan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil meskipun tidak tumbuh tinggi sebagaimana provinsi lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah semakin berkualitas dan inklusif.

Untuk itu, pembangunan ekonomi Jawa Tengah lima tahun kedepan juga didorong untuk semakin inklusif dan berkualitas. Artinya bahwa pembangunan ekonomi Jawa Tengah diarahkan untuk semakin banyak melibatkan masyarakat utamanya pelaku ekonomi usaha mikro, kecil dan menengah, dan terintegrasi dengan usaha besar, sehingga diharapkan masyarakat akan mendapatkan manfaat atas kontribusi mereka. Kapabilitas individual ataupun kelompok masyarakat akan semakin meningkat dan merata secara bersama-sama sehingga akan mempersempit kesenjangan antar pelaku ekonomi. Disisi lain, pembangunan ekonomi ke depan juga harus tetap memperhatikan aspek lingkungan hidup, sosial dan budaya yang diukur dari nilai-nilai sosial, kearifan hidup bersama alam, kelembagaan sosial dan budaya hidup masyarakat.

Dengan pembangunan ekonomi yang semakin berkualitas dan inklusif, diharapkan akan berdampak pada percepatan penurunan kemiskinan di Jawa Tengah selama lima tahun ke depan. Upaya tersebut diperkuat dengan dukungan dan komitmen para pemangku kepentingan untuk bekerja bersama dan gotong royong dalam mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah. Dalam rangka pencapaian kondisi tersebut, maka strategi yang akan dilakukan sebagai berikut.

Tujuan kesatu adalah menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara merata, dengan sasaran meliputi: 1) meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga dua desil terbawah serta kelompok rentan lainnya; dan 2) menurunnya pengangguran terbuka. Strategi yang dilakukan adalah:

a. Penyediaan *basic life access* untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan utamanya pada kelompok petani, nelayan, buruh, pelaku UKM dan kelompok rentan lainnya, dengan upaya diantaranya:

- 1) meningkatkan akses pendidikan berupa Beasiswa Siswa Miskin (BSM), penyelenggaraan SMK Negeri *Boarding School*, penyelenggaraan SMK Negeri *Semi Boarding* di kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi, Sekolah Tanpa Sekat, fasilitasi uji kompetensi siswa SMK, pemantapan pendidikan karakter, serta vokasi bidik miskin;
- 2) peningkatan cakupan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin, pola hidup bersih dan sehat dan rumah sakit tanpa dinding;
- 3) stimulan lumbung pangan pada daerah rawan pangan dan pemberian bantuan sumber pangan lainnya;
- 4) bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni (RSLH) dan perbaikan kualitas lingkungan kawasan permukiman kumuh termasuk diantaranya air bersih, sanitasi, dan listrik. Bantuan stimulan RSLH untuk menumbuhkan kembali gotong royong masyarakat; memperluas akses pembiayaan; serta sinergi penanganan dengan pusat, provinsi, kabupaten/kota, CSR, Baznas, dan lainnya;
- 5) pemberian Kartu Jateng Sejahtera, dan pemenuhan kebutuhan dasar PMKS melalui peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, pemberian bantuan jaminan sosial bagi fakir miskin tidak produktif dan terlantar, penyiapan bimbingan sosial bagi fakir miskin, serta peningkatan peran PSKS dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial;
- 6) kepemilikan dan kemudahan perolehan dokumen administrasi kependudukan;
- 7) meningkatkan penggunaan MKJP melalui advokasi kepada masyarakat; kemitraan dengan perusahaan, TNI, Polri, dan ormas, serta dengan upaya pengembangan Kampung KB.

b. Penguatan *sustainable livelihood* (keberlanjutan ekonomi masyarakat) melalui:

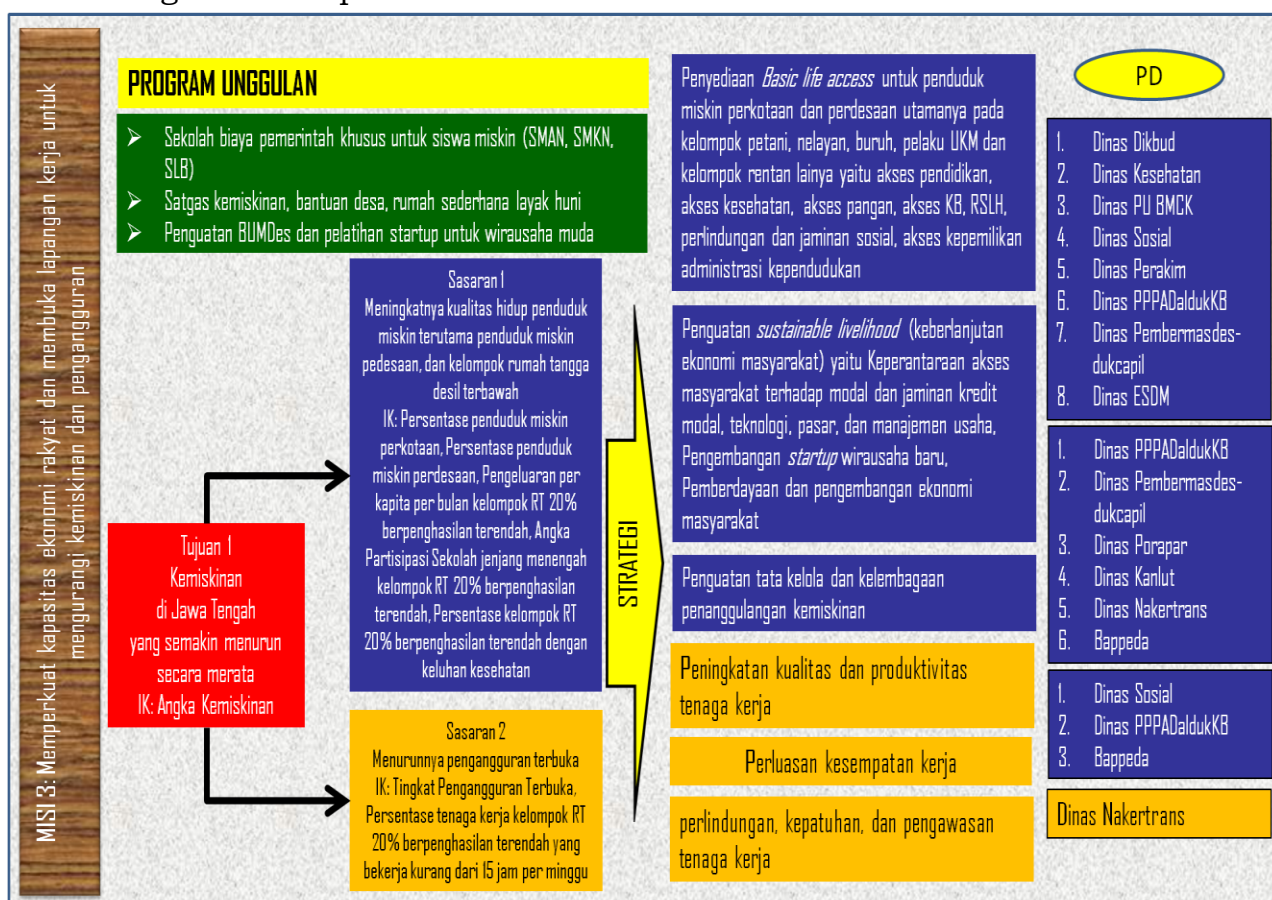
- 1) Keperantaraan akses masyarakat terhadap modal dan jaminan kredit modal, teknologi, pasar, dan manajemen usaha, diantaranya dengan menyambungkan informasi tentang program pembiayaan/kredit (KUR/Kredit Usaha Rakyat, Mitra Jateng 25, Ultra Mikro/UMi) bagi KUMKM;

- 2) Pengembangan *startup* wirausaha baru melalui pelatihan keterampilan usaha produktif berbasis sumber daya lokal/permintaan pasar/wirausaha pemula dan pelatihan penumbuhan wirausaha baru termasuk bagi pemuda, perempuan rentan dan penumbuhan ekonomi pesantren (ekotren);
 - 3) Pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat terutama pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, industri kreatif dan usaha kecil termasuk peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam rumah tangga (ekonomi rumah tangga); peningkatan peran dan produktivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)/Badan Usaha Milik Antar Desa (BUMADes); peningkatan peran dan keaktifan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Tri Bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia).
- c. Penguatan tata kelola dan kelembagaan penanggulangan kemiskinan antara lain melalui peningkatan dan perluasan pengelolaan basis data, dan basis spasial dengan pengelolaan dan pemanfaatan Basis Data Terpadu; penanggulangan kemiskinan berbasis komunitas, didukung pendampingan yang kontinyu, dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan; pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat miskin yang belum memperoleh intervensi program penanggulangan kemiskinan; peningkatan peran PSKS dalam mendukung usaha kesejahteraan sosial; serta mengkonsolidasikan dan mensinergikan program kerja seluruh pemangku kepentingan dalam satu lembaga Satuan Tugas Pengentasan Kemiskinan.
- d. Menurunkan pengangguran melalui upaya:
- 1) peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki kompetensi, kualifikasi, daya saing, dan jiwa kewirausahaan tinggi, yang *link and match* dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan perekonomian kedepan melalui pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja, dan penguatan program *link and match* melalui pengembangan dan penyelarasan kurikulum SMK dengan industri Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI);
 - 2) perluasan kesempatan kerja dengan menciptakan kondisi lingkungan yang bersaing dan ramah bagi investasi utamanya investasi industri padat karya yang dapat menyerap banyak tenaga kerja dan industri dengan *supply chain* dari UMKM lokal, membuka akses pasar tenaga kerja dan pelaksanaan padat karya pekerjaan umum;
 - 3) peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja diantaranya melalui BPJS Ketenagakerjaan, dan perlindungan tenaga kerja perempuan dan anak.

Strategi tersebut didukung dengan program unggulan daerah yaitu:

- a. Satgas kemiskinan, yang secara fungsional merupakan upaya penguatan tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk memastikan kebijakan, rencana program, kegiatan, dan sasaran penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana, terutama dalam hal pengelolaan data, perumusan masalah dan perumusan kebijakan,

- pelayanan pengaduan masyarakat, serta pelaporan penanggulangan kemiskinan;
- Bantuan desa, merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan prasarana dan sarana desa, pembangunan kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan masyarakat desa, dan operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD);
 - Rumah sederhana layak huni, dimaknai sebagai upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga Miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dengan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin dengan dukungan keswadayaan dan sifat gotong royong dari masyarakat;
 - Penguatan BUMDes, melalui peningkatan peran, dan produktivitas BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa melalui lembaga keuangan milik desa;
 - Pelatihan *startup* untuk wirausaha muda, merupakan program daerah untuk mendorong penumbuhan jiwa kewirausahaan dan keterampilan bagi masyarakat terutama bagi kelompok pemuda, dan penganggur dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja;
 - Sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB), merupakan sekolah yang dikembangkan untuk anak sekolah dari keluarga miskin, yang pembiayaan operasionalnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara penuh.



Gambar 6.3.
Skema Strategi Pencapaian Misi 3 Tujuan 1

Tujuan kedua misi ketiga adalah menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan, dengan sasaran meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai

- dengan kesejahteraan petani dan peran investasi terhadap ekonomi daerah. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran adalah:
- a. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, melalui:
 - 1) Peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Kemampuan petani pada aspek *on-farm* dilakukan melalui penerapan teknologi berbasis kearifan lokal termasuk mekanisasi pertanian dan pengembangan pertanian organik. Selain itu untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian (*off-farm*), usaha tani diarahkan melalui pengolahan hasil pertanian potensi lokal kawasan perdesaan dan fasilitasi akses pemasaran serta permodalan;
 - 2) Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani. Kelembagaan diarahkan untuk mengelola usaha pada skala lebih besar berbasis korporasi;
 - 3) Pengembangan kawasan pertanian dengan konsep "*agriculture estate*", yaitu pendampingan dan pengembangan usaha tani melalui integrasi usaha pertanian dari hulu sampai hilir berbasis kawasan sesuai dengan potensi lokal kawasan;
 - 4) Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya disertai upaya-upaya menjaga ketersediaan airnya.
 - b. Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui:
 - 1) Peningkatan kapasitas nelayan, jaminan kemudahan dan perlindungan bagi nelayan, peningkatan teknologi dan akses permodalan, serta asuransi nelayan;
 - 2) Peningkatan prasarana sarana perikanan tangkap dan air payau, melalui peningkatan fasilitas pelabuhan dan teknologi dalam penangkapan ikan;
 - 3) Peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan;
 - 4) Perbaikan tata niaga perikanan.
 - c. Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu, melalui legalisasi sertifikasi kayu dan perijinan industri primer pengolahan hasil hutan kapasitas lebih besar menuju 6.000 m³ dengan tetap memperhatikan fungsi hutan sebagai fungsi lindung dan keterlibatan serta kesejahteraan masyarakat sekitar hutan.
 - d. Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan dilakukan melalui perwujudan sistem logistik daerah yang menjamin ketersediaan terutama ketersediaan stok pangan yang ada di masyarakat, memperpendek rantai distribusi serta adanya pengelolaan stok melalui cadangan pangan dan stabilisasi harga, konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta mutu dan keamanan pangan segar.
 - e. Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah melalui:
 - 1) pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja, yang tersebar merata di seluruh wilayah Jawa Tengah;
 - 2) peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi industri melalui standarisasi produk dan inovasi produk;

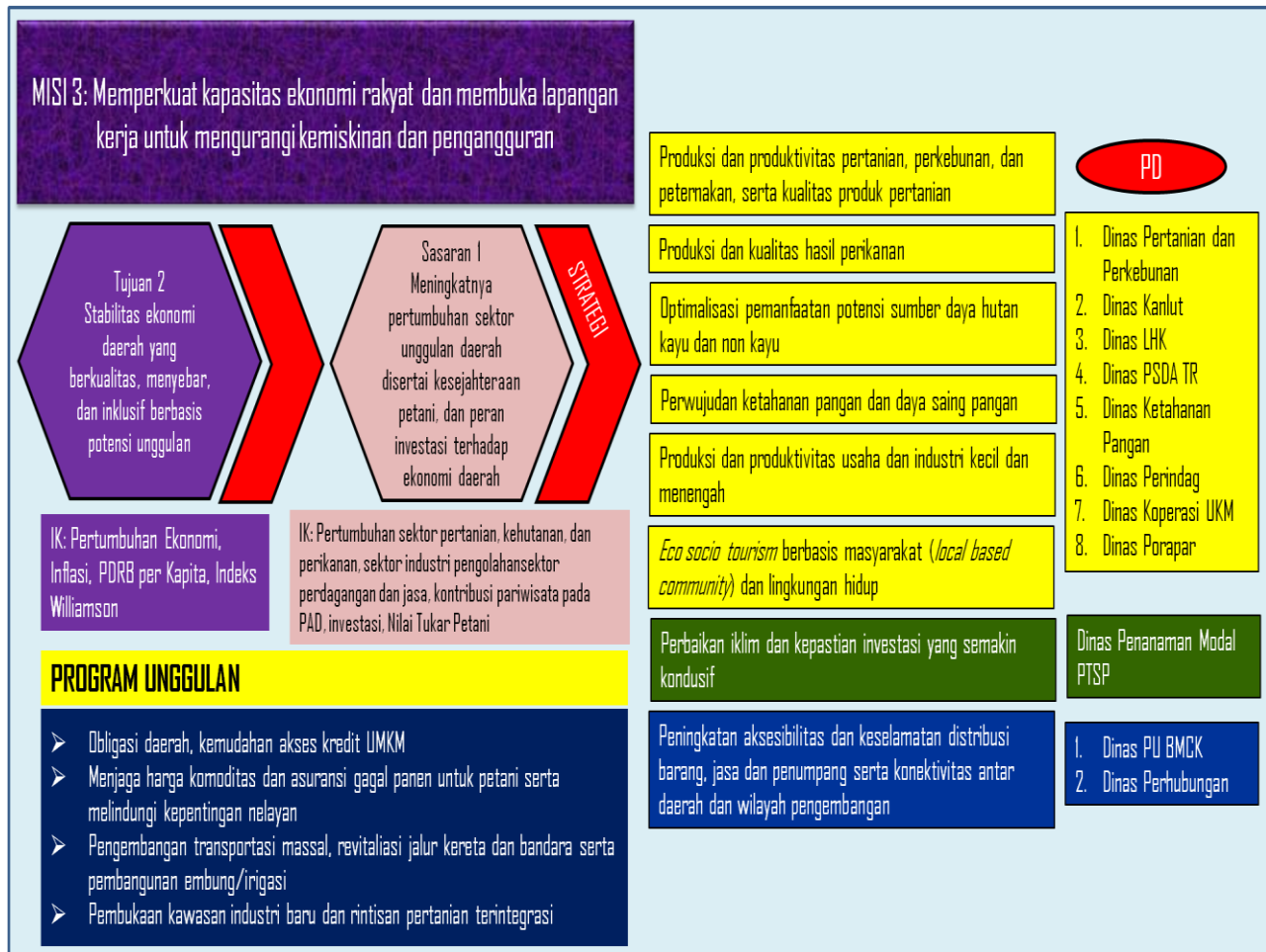
- 3) pengembangan inovasi teknologi produksi, agar tingkat efisiensi industri dapat menjadi lebih baik;
 - 4) penguatan industri kecil dan menengah yang mencakup didalamnya aspek modal, pemasaran, dan standarisasi produk melalui program pembiayaan/kredit (KUR/Kredit Usaha Rakyat, Mitra Jateng 25), program standarisasi produk yang dapat meningkatkan nilai tambah produk;
 - 5) pengembangan bahan baku industri substitusi impor melalui pengembangan industri yang menghasilkan produk antara yang digunakan sebagai bahan baku bagi industri lain;
 - 6) penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi dalam rangka mendukung pengembangan UMKM melalui peningkatan, pendampingan, pembinaan dan pengawasan dengan tujuan koperasi dan UMKM dapat berkembang dan berjalan baik;
 - 7) integrasi antar sektor pendukung urusan industri melalui keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) dan keterkaitan ke depan (*forward linkage*).
- f. Peningkatan *eco socio tourism* berbasis masyarakat (*local based community*) dan lingkungan hidup dengan mempertimbangkan potensi keunggulan spesifik Jawa Tengah yaitu kekhasan geografis, yang dilakukan melalui pengembangan desa ekowisata sebagai upaya menyelaraskan pendekatan ekologi dan ekonomi. Disamping itu, juga dikembangkan Daya Tarik Wisata untuk mendukung koridor pariwisata Jawa Tengah, khususnya pada kawasan yang memiliki tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi melalui program pengembangan destinasi pariwisata dan program pengembangan pemasaran pariwisata. Pengembangan pariwisata perlu memperhatikan industri dan ekonomi kreatif dengan mengembangkan pariwisata sebagai ruang temu budaya masyarakat dan berdaya dukung hasil-hasil produksi masyarakat setempat. Hal ini diimplementasikan dengan strategi utamanya sebagai berikut:
- 1) Perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata;
 - 2) Peningkatan promosi wisata melalui pemanfaatan teknologi media promosi dan informasi pariwisata;
 - 3) Peningkatan kerjasama dengan pelaku wisata;
 - 4) Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata;
 - 5) Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata.
- g. Perbaikan iklim dan kepastian investasi yang semakin kondusif melalui: 1) Perbaikan sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, dan tepat serta terbuka; 2) Pengembangan digital *investment promotion*; 3) Mendorong perwujudan investasi hijau; serta didukung dengan peningkatan sinergi pengembangan investasi Pemerintah dengan dunia usaha.
- h. Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan. Upaya yang akan dilakukan antara lain peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata, kawasan industri, pusat pertumbuhan, wilayah kemiskinan dengan fasilitasi pengembangan bandara, pelabuhan dan

terminal; peningkatan jalan-jalan provinsi dan sinergi dengan jalan Nasional dan Kabupaten/Kota; konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan melalui pengembangan angkutan umum massal berbasis jalan pada kawasan aglomerasi perkotaan diantaranya pada wilayah Kedungsepur, Barlingmascakeb, Subosukowonosraten, dan Purwomanggung, serta pembangunan dan revitalisasi Terminal Tipe B; peningkatan jalan provinsi di daerah perbatasan dengan Jatim, Jabar, dan DIY; serta menghubungkan kawasan pengembangan industri dan pusat pertumbuhan baru di Barlingmascakeb, Purwomanggung, Bregasmalang, Kedungsapur, dan Banglor.

Program unggulan daerah yang mendukung pada tujuan kedua misi ketiga ini yaitu:

- a. Obligasi daerah, merupakan pembiayaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi di luar Pendapatan Asli Daerah;
- b. Kemudahan akses kredit UMKM merupakan program fasilitasi bagi UMKM untuk mendapatkan akses kredit dari perbankan;
- c. Menjaga harga komoditas yaitu program untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan perlindungan harga dan menjamin pemasaran produk pertanian; intervensi dan penguasaan stok oleh pemerintah dengan membeli secara langsung produk pertanian dengan menugaskan BUMD sebagai operator; serta penguatan kelembagaan petani di tingkat desa;
- d. Asuransi gagal panen untuk petani merupakan upaya pemberian jaminan bagi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama penyakit dan gangguan lainnya;
- e. Melindungi kepentingan nelayan merupakan program untuk memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan dari risiko selama beraktifitas dan kecelakaan kerja, termasuk fasilitasi kepentingan dasar;
- f. Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara, yang dilakukan dengan melakukan pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan (BRT); pengelolaan BRT Trans Jateng dengan Sistem BLUD; fasilitasi peningkatan layanan KA Semarang-Solo; fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur kereta api diantaranya yang menghubungkan wilayah Kedungsepur dengan PSN Borobudur, wilayah pantura timur serta wilayah tengah; fasilitasi pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas wilayah;
- g. Pembangunan embung/irigasi dalam rangka menciptakan ketahanan air dan pemenuhan air baku guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan pangan, penyediaan air bersih bagi masyarakat, dan mendukung pengembangan kawasan industri;
- h. Pembukaan kawasan industri baru melalui afirmasi kebijakan tumbuhnya kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan, dalam mempercepat proses persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi;
- i. Rintisan pertanian terintegrasi merupakan konsep integrasi vertikal hulu hilir, integrasi holistik, pertanian terintegrasi sektoral (mayor sektoral) dan sektor terintegrasi dalam pertanian (pertanian mayor), integrasi berbasis konsolidasi lahan (penerapan mekanisasi penuh), serta integrasi berbasis organisasi pertanian, yang dikembangkan antara lain melalui

pengembangan *agriculture estate*, integrasi dibawah tegakan, *zero waste*, agrowisata, minapadi, dan pertanian organik.



Gambar 6.4.
Skema Strategi Pencapaian Misi 3 Tujuan 2

4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan

Misi keempat mengarah pada kualitas dan daya saing sumberdaya manusia Jawa Tengah, agar semakin sehat, pintar, berbudaya, dan lebih mencintai lingkungan.

Tujuan pertama pada misi ini adalah membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing dengan sasaran meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas; dan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan meningkatnya akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak. Strategi yang akan dilakukan adalah:

- Perbaikan kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas melalui:
 - peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah dengan program bantuan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta;
 - peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan;
 - peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan;
 - pengembangan kurikulum berbasis *skill, knowledge, attitude* dan *learning culture*;
 - penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi;
 - peningkatan literasi masyarakat;
 - pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat.
 Strategi ini dilakukan dengan tetap mengarusutamakan gender dan anak, untuk dapat memberikan kesempatan yang sama kepada perempuan dan anak di dibidang pendidikan;

- b. Meningkatkan upaya promotif, dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif, dan rehabilitatif, dengan upaya:
- 1) Peningkatan upaya penerapan paradigma sehat melalui optimalisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat/GERMAS dan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); intervensi pencegahan dan penanganan *stunting*; peningkatan peran posyandu dalam peningkatan kesehatan ibu dan anak; pelaksanaan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) kesehatan di lingkungan masyarakat; dan mendorong pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) termasuk penuntasan *Open Defecation Free* (ODF); serta peningkatan peran dan keaktifan Tri Bina (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia);
 - 2) Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan melalui standarisasi pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan di 35 kabupaten/kota; peningkatan pelayanan kesehatan rujukan dengan pengembangan teknologi informasi di 7 RSUD/RSJD; peningkatan pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat dengan kegiatan bakti sosial dan aksi penanganan cepat termasuk penyediaan RS Lapangan dalam rangka mendukung penanggulangan bencana dan Kejadian Luar Biasa sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - 3) Peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan, serta sumberdaya kesehatan melalui pembangunan rumah sakit rujukan khusus daerah, serta pengembangan rumah sakit rujukan kanker; peningkatan sarana prasarana kesehatan dan farmasi; serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
 - 4) Pembudayaan/permasalahan olahraga kepada masyarakat, termasuk melalui sekolah yang didukung dengan peningkatan prasarana sarana olahraga sekolah.
- c. Peningkatan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak melalui: a) pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; b) pengurangan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak; c) peyelenggaraan layanan terpadu bagi korban kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan layanan dasar, program perlindungan sosial, serta penerapan kebijakan di sekolah.

Program unggulan daerah yang sejalan dengan strategi pencapaian tujuan tersebut yaitu:

- a. Sekolah tanpa sekat merupakan integrasi pendidikan formal, informal, dan non formal kepada seluruh masyarakat yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi serta sebagai perwujudan bahwa urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat, antara lain melalui penerapan pendidikan terjangkau bagi seluruh siswa SMA/SMK dan SLB;
- b. Pelatihan tentang gender merupakan salah satu bentuk implementasi program sekolah tanpa sekat, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gender, termasuk kepada pendidik dan anak usia sekolah;
- c. Magang gubernur untuk siswa SMA/SMK merupakan salah satu bentuk implementasi program sekolah tanpa sekat, yang diperuntukkan bagi siswa untuk dapat mengikuti aktifitas gubernur dalam menjalankan

tugasnya dalam waktu tertentu, dan diharapkan siswa dapat mengetahui dinamika penyelenggaraan pemerintahan secara nyata yang dijalankan oleh pejabat publik;

- d. Pendidikan anti korupsi, juga merupakan salah satu bentuk program sekolah tanpa sekat, yang dilakukan melalui internalisasi kurikulum pemahaman tentang korupsi dan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan;
- e. Bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel dengan pemberian stimulan Bantuan Operasional Sekolah kepada SMA/SMK/SLB Swasta dan bantuan lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jenjang pendidikan dan unsur pendidikan;
- f. Rumah sakit tanpa dinding diharapkan untuk mengubah paradigma kesehatan dari kuratif ke promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan ini menempatkan tenaga medis jemput bola untuk mendatangi pasien; penyediaan ambulans; bidan, perawat, dokter datang ke orang sakit. Program ini dilakukan dengan memastikan pemerataan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan dasar terutama di wilayah dengan angka kematian dan angka kesakitan tinggi. Program ini juga disamping mempercepat pelayanan sekaligus memberikan penyuluhan kesehatan sesuai dengan kasus-kasus yang ditangani, juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat;
- g. Festival seni dilakukan dengan mendorong kegiatan-kegiatan seni, pengembangan dan penguatan hubungan kebudayaan melalui rembug dan pertukaran kesenian dan budaya, penyelenggaraan festival dan gelar seni budaya dengan masyarakat dan provinsi lain maupun dengan masyarakat negara lain, serta pengembangan ekonomi kreatif untuk penciptaan nilai tambah yang berbasis kreativitas pada seni pertunjukan dan seni rupa;
- h. Rumah kebudayaan diarahkan pada penyediaan ruang bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk penggiatan, pengembangan dan pemajuan daya kritis, kreatif, produktif dan apresiatif terhadap hasil kerja dan temuan karya yang berakar pada nilai budaya masyarakat Jawa Tengah;
- i. Pengembangan infrastruktur olahraga, dilakukan dalam rangka meningkatkan kebugaran masyarakat serta meningkatkan prestasi olahraga Jawa Tengah.

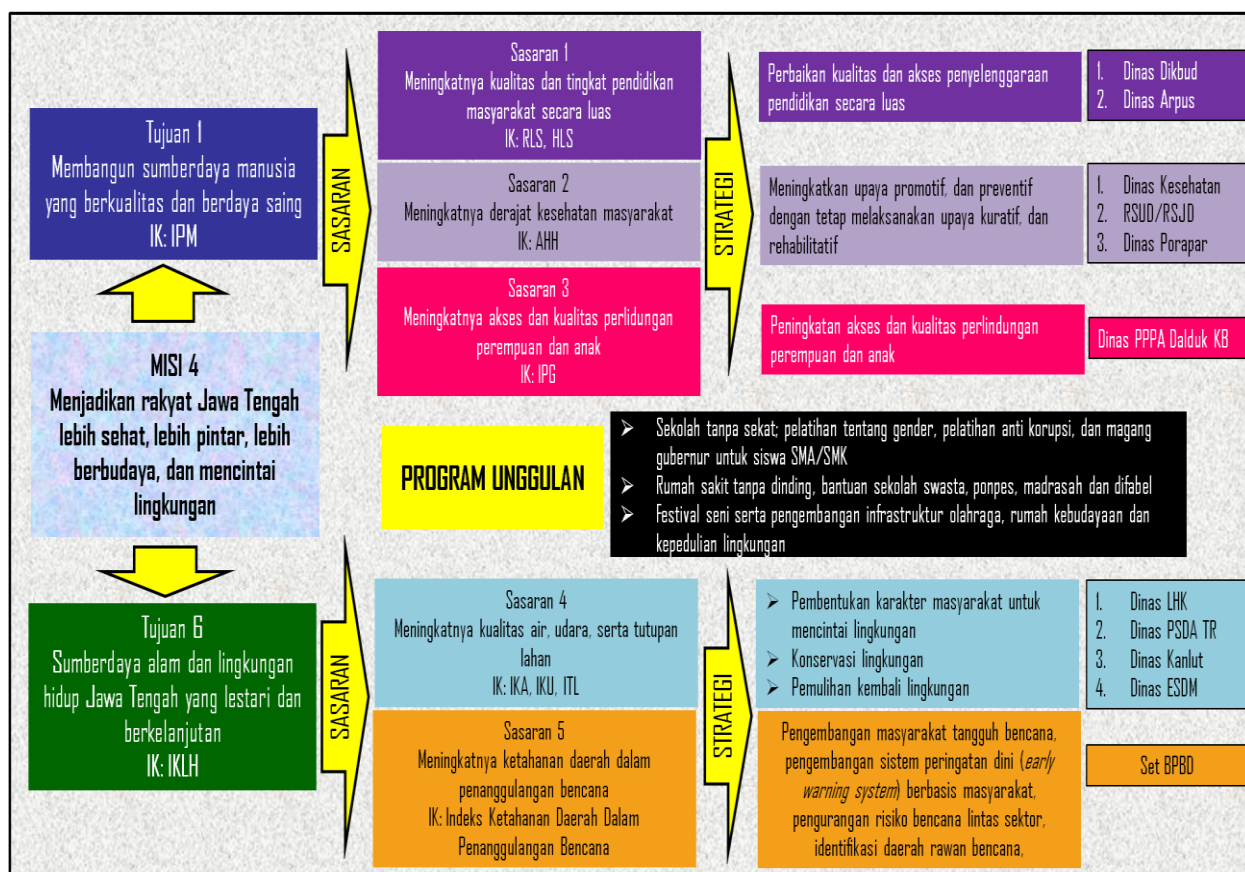
Tujuan kedua dalam misi ini adalah mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan dengan sasaran pertama yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan dengan:

- a. pembentukan karakter masyarakat untuk mencintai lingkungan melalui pendidikan lingkungan bagi masyarakat mulai usia dini, dan pengembangan budaya hemat energi dan hemat air;
- b. konservasi lingkungan melalui rehabilitasi hutan dan lahan; peningkatan konservasi sumberdaya air, peningkatan pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, pengendalian banjir; rehabilitasi kawasan mangrove dan terumbu karang; serta konservasi energi dan audit energi;

c. pemulihan kembali lingkungan melalui penanganan limbah industri dan rumah tangga; peningkatan perijinan dan pemantauan lingkungan; serta penegakkan hukum.

Sasaran kedua yang ingin dicapai adalah meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana, yang dilakukan dengan strategi meningkatkan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana dengan upaya diarahkan pada pengembangan masyarakat tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini (*early warning system*) berbasis masyarakat, pengurangan risiko bencana lintas sektor, identifikasi daerah rawan bencana, dan inventarisasi daerah terdampak bencana.

Program unggulan daerah yang mendukung pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu program kepedulian lingkungan. Program ini mendorong peningkatan kesadaran bahwa manusia menjadi bagian yang tidak terpisah dari lingkungan sekaligus berusaha untuk berbuat sebaik mungkin bagi lingkungannya. Sikap kepedulian lingkungan ini harus dibangun sebagai salah satu nilai karakter masyarakat Jawa Tengah, yang akan mendukung upaya konservasi dan pemulihan kembali fungsi lingkungan. Ditambah dengan peningkatan masyarakat tangguh bencana sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana agar terwujud keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan.



Gambar 6.5.
Skema Strategi Pencapaian Misi 4

Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan jangka menengah Jawa Tengah tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 6.1.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Visi: MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia	Membangun masyarakat Jawa Tengah semakin religius, toleran, dan guyup	Terciptanya kohesi sosial masyarakat	Meningkatkan edukasi tentang keberagaman, dan toleransi kepada seluruh lapisan masyarakat sejak usia dini, termasuk kepada anak-anak usia sekolah, serta didukung upaya peningkatan koordinasi dan kerjasama dengan pengampu kepentingan yang berkaitan dengan keberagaman dan toleransi
			Meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta pencegahan tindak kriminal
Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>good governance and clean government</i>)	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan pelayanan publik langsung kepada masyarakat (<i>direct services</i>), serta membangun pemerintahan yang terbuka (<i>open government</i>) dengan perkuatan keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik
			Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam birokrasi (<i>digitalisasi tata kelola pemerintahan</i>)
		Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan	Meningkatkan manajemen pemerintahan yang bersih dan akuntabel melalui: a) pengembangan sistem manajemen pembangunan berbasis kinerja dengan penguatan proses perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah secara terpadu; b) penguatan kapasitas fiskal utamanya pada peningkatan kemandirian fiskal; c) peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dengan penguatan implementasi kebijakan pengendalian intern Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (SPIP) secara baik, perkuatan kapabilitas APIP dari sisi <i>quality assurance</i> dan <i>consulting partner</i> , serta pengendalian produk hukum dan penegakkan perda dengan fasilitasi dan harmonisasi produk hukum dan penindakan produk hukum daerah

Visi: MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik	Mewujudkan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik dan efisiensi kelembagaannya, melalui: a) pemetaan, penilaian, dan pengembangan kompetensi ASN; pengembangan sistem penilaian kinerja, kesejahteraan ASN, penataan ASN; penyusunan kelas jabatan, evaluasi jabatan, serta pemetaan nilai jabatan; penerimaan pegawai secara transparan dan akuntabel, promosi jabatan secara terbuka; penegakan disiplin aparatur; serta pengembangan jabatan fungsional tertentu; b) perbaikan kinerja organisasi menuju struktur berbasis kinerja dan didukung perbaikan tata laksana organisasi
Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran	Menurunkan kemiskinan di Jawa Tengah secara merata	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah	Penyediaan <i>basic life access</i> untuk penduduk miskin perkotaan dan perdesaan, pada kelompok petani, nelayan, buruh, dan pelaku UKM, meliputi: a) Akses pendidikan, kesehatan, dan pangan; b) Akses rumah sederhana dan lingkungan kawasan permukiman layak huni termasuk air bersih, sanitasi, dan listrik; c) Perlindungan, dan jaminan sosial; d) Kepemilikan administrasi kependudukan; e) Akses KB.
			Penguatan <i>sustainable livelihood</i> (keberlanjutan ekonomi masyarakat) melalui: a) Keperantaraan akses masyarakat terhadap modal dan jaminan modal, teknologi, pasar, dan manajemen usaha; b) Pengembangan <i>startup</i> wirausaha baru; c) Pemberdayaan ekonomi masyarakat.
			Penguatan kelembagaan, basis data, basis spasial, berbasis komunitas, pendampingan yang kontinyu, serta pelibatan seluruh pemangku kepentingan, peningkatan peran PSKS, serta mengkonsolidasikan dan mensinergikan program kerja seluruh pemangku kepentingan dengan pembentukan Satuan Tugas Pengentasan Kemiskinan

Visi: MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
		Menurunnya pengangguran terbuka	Menurunkan pengangguran melalui upaya: a) peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja agar memiliki kompetensi, kualifikasi, serta berdaya saing tinggi dan disesuaikan dengan kebutuhan pasar tenaga kerja b) perluasan kesempatan kerja; dan c) peningkatan perlindungan, kepatuhan, dan pengawasan tenaga kerja
	Menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah	<p>Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, dan peternakan, serta kualitas produk pertanian dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani, utamanya melalui: a) Peningkatan kemampuan petani dalam budidaya pertanian, pengolahan, dan pemasaran hasil pertanian. Kemampuan petani pada aspek <i>on-farm</i> dilakukan melalui penerapan teknologi berbasis kearifan lokal termasuk mekanisasi pertanian dan pengembangan pertanian organik. Selain itu untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian (<i>off-farm</i>), usaha tani diarahkan melalui pengolahan hasil pertanian potensi lokal kawasan perdesaan dan fasilitasi akses pemasaran serta permodalan; b) Penguatan kelembagaan dan dukungan jaminan usaha/asuransi petani. Kelembagaan diarahkan untuk mengelola usaha pada skala lebih besar berbasis korporasi; c) Pengembangan kawasan pertanian dengan konsep "<i>agriculture estate</i>", yaitu pendampingan dan pengembangan usahatani melalui integrasi usaha pertanian dari hulu sampai hilir berbasis kawasansesuai dengan potensi lokal kawasan; d) Peningkatan prasarana sarana pertanian termasuk jaringan irigasi, waduk/embung dan tampungan air lainnya disertai upaya-upaya menjaga ketersediaan airnya</p> <p>Meningkatkan produksi dan kualitas hasil perikanan melalui: a) Peningkatan kapasitas nelayan, jaminan kemudahan dan perlindungan bagi nelayan, melalui peningkatan kapasitas SDM</p>

Visi: MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			nelayan, peningkatan teknologi dan akses permodalan serta asuransi nelayan; b) Peningkatan prasarana sarana perikanan tangkap dan air payau, melalui peningkatan fasilitas pelabuhan dan teknologi dalam penangkapan ikan; c) Peningkatan kualitas dan kapasitas unit pengolah ikan; d) Perbaikan tata niaga perikanan
			Optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya hutan kayu dan non kayu, melalui legalisasi sertifikasi kayu dan perijinan industri primer pengolahan hasil hutan kapasitas lebih besar sama dengan 6.000 m ³
			Perwujudan ketahanan pangan dan daya saing pangan melalui perwujudan sistem logistik daerah yang menjamin ketersediaan, distribusi, cadangan pangan, stabilitas harga dan pasokan pangan, konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA), serta mutu dan keamanan pangan
			Peningkatan produksi dan produktivitas usaha dan industri kecil dan menengah melalui: a) pengembangan kawasan industri dan industri yang menyerap banyak tenaga kerja; b) peningkatan nilai tambah, diversifikasi produk, dan hilirisasi industri; c) pengembangan inovasi teknologi produksi; d) penguatan industri kecil dan menengah yang mencakup didalamnya aspek modal, pemasaran, dan standarisasi produk; e) pengembangan bahan baku industri substitusi impor; f) penguatan kelembagaan dan manajemen koperasi mendukung pengembangan UKM; dan g) integrasi antar sektor pendukung urusan industri
			Peningkatan <i>eco socio tourism</i> berbasis masyarakat (<i>local based community</i>) dan lingkungan hidup melalui: a) Perbaikan prasarana dan sarana destinasi pariwisata, manajemen pengelolaan daerah wisata, dan kapasitas pelaku pariwisata; b) Peningkatan promosi wisata; c) Peningkatan kerjasama dengan

Visi: MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			pelaku wisata; d) Peningkatan aksesibilitas menuju daerah tujuan wisata; e) Optimalisasi peran serta swasta dan masyarakat dalam industri pariwisata
			Perbaiki iklim investasi yang semakin kondusif melalui: a) Perbaiki sistem dan layanan perijinan mudah, murah, cepat, dan tepat; b) Pengembangan digital investment promotion; serta c) Mendorong perwujudan investasi hijau.
			Peningkatan aksesibilitas dan keselamatan distribusi barang, jasa dan penumpang serta konektivitas antar daerah dan wilayah pengembangan
Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas	Perbaiki kualitas dan akses penyelenggaraan pendidikan secara luas melalui: a) peningkatan keterjangkauan biaya pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah dengan program bantuan pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah dan khusus, baik sekolah negeri maupun swasta; b) peningkatan distribusi prasarana dan sarana pendidikan; c) peningkatan kualitas, dan distribusi pendidik dan tenaga kependidikan; d) pengembangan kurikulum berbasis <i>skill, knowledge, attitude</i> dan <i>learning culture</i> ; e) penguatan pendidikan kejuruan dan vokasi; f) peningkatan literasi masyarakat; g) pengembangan nilai-nilai budaya masyarakat
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, melalui: a) Peningkatan upaya penerapan paradigma sehat; b) Peningkatan akses, mutu, dan standarisasi pelayanan kesehatan masyarakat; c) Peningkatan dan pemerataan prasarana sarana kesehatan, serta sumberdaya kesehatan; d) Pembudayaan/permassalan olahraga.
		Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender	Meningkatkan akses dan kualitas perlindungan perempuan dan anak melalui: a) Pencegahan terhadap kekerasan perempuan dan anak; b) pengurangan risiko kekerasan terhadap perempuan dan anak; c) penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban

Visi: MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI “Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”			
Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi
			kekerasan sesuai standar dan terintegrasi dengan layanan dasar, program perlindungan sosial, serta penerapan kebijakan di sekolah
	Mewujudkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan	Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup melalui: a) rehabilitasi hutan dan lahan; b) peningkatan konservasi sumberdaya air, konservasi daerah hulu dan tangkapan air berbasis pemberdayaan masyarakat; c) peningkatan pengendalian pemanfaatan air permukaan dan air tanah, dan pengendalian banjir; d) penanganan limbah industri dan rumah tangga; e) peningkatan perijinan dan pemantauan lingkungan, serta penegakan hukum; f) pendidikan lingkungan bagi masyarakat mulai masyarakat usia dini, pengembangan budaya hemat energi dan hemat air; g) konservasi energi dan audit energi; h) rehabilitasi kawasan mangrove dan terumbu karang
		Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana	Meningkatkan upaya penanggulangan bencana berbasis risiko bencana dengan upaya diarahkan pada pengembangan masyarakat tangguh bencana, pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) berbasis masyarakat, pengurangan risiko bencana lintas sektor, identifikasi daerah rawan bencana dan inventarisasi daerah terdampak bencana

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sejalan dengan visi dan misi pembangunan Jawa Tengah lima tahun kedepan, ditetapkan arah kebijakan yang akan menjadi arah kebijakan perencanaan pembangunan tahunan dalam lima tahun. Arah kebijakan ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman penentuan fokus dan prioritas pembangunan setiap tahunnya selama lima tahun kedepan Arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2018-2023 sebagaimana gambar berikut.



Gambar 6.6.
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023

1. Arah Kebijakan Tahun 2019

Tahun 2019 merupakan tahun perencanaan pertama untuk pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Jawa Tengah lima tahun kedepan. Arah kebijakan pembangunan tahun 2019 ditujukan untuk **“Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Pemerataan Pembangunan Dan Pemanfaatan Iptek”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- Penanggulangan kemiskinan;
- Penguatan daya saing ekonomi daerah;
- Peningkatan kualitas hidup dan daya saing SDM dalam rangka mendukung bonus demografi;
- Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta penanggulangan bencana;
- Perwujudan ketahanan pangan dan energi;
- Pengurangan kesenjangan wilayah;
- Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.

2. Arah Kebijakan Tahun 2020

Arah kebijakan pembangunan tahun 2020 ditujukan pada **“Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Didukung Peningkatan Kualitas Hidup dan Kapasitas Sumber Daya Manusia”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah;
- c. Peningkatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;
- d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta perbaikan kapasitas fiskal daerah.

3. Arah Kebijakan Tahun 2021

Arah kebijakan pembangunan tahun 2021 ditujukan pada **“Peningkatan Kesejahteraan Dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing SDM”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Peningkatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
- c. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;
- d. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah serta peningkatan kapasitas fiskal daerah.

4. Arah Kebijakan Tahun 2022

Arah kebijakan pembangunan tahun 2022 ditujukan pada **“Penguatan Kesejahteraan Dan Perekonomian Masyarakat Didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Penguatan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
- c. Penguatan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan risiko bencana;
- d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta kondusivitas wilayah serta penguatan kapasitas fiskal daerah.

5. Arah Kebijakan Tahun 2023

Arah kebijakan pembangunan tahun 2023 ditujukan pada **“Perwujudan Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera Dan Berdikari”**, dengan prioritas daerah diarahkan pada:

- a. Pemantapan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
- b. Pemantapan kualitas hidup dan kapasitas sumber daya manusia Jawa Tengah Menuju SDM Jawa Tengah Berdaya Saing;
- c. Pemantapan kapasitas dan daya saing ekonomi rakyat secara berkelanjutan dan semakin berdikari;
- d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan kondusivitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.

6.3. Penjabaran Implementasi Program Unggulan Daerah

Program unggulan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang merupakan program unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam lima tahun kedepan, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dijabarkan dalam strategi rencana tindak sebagai berikut:

1. Sekolah tanpa sekat; pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;

Sekolah tanpa sekat merupakan integrasi pendidikan formal, informal, dan non formal kepada seluruh masyarakat yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi serta sebagai perwujudan bahwa urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat.

Bentuk implementasi sekolah tanpa sekat diantaranya adalah penerapan pendidikan yang terjangkau bagi seluruh SMA/SMK dan SLB melalui pemberian stimulan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada seluruh SMA/SMK dan SLB Negeri, serta pemberian tambahan penghasilan bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Implementasi lainnya dari sekolah tanpa sekat adalah pelatihan tentang demokrasi dan pemilu. Pelatihan ini merupakan salah satu bentuk edukasi politik kepada masyarakat, yang mengajarkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan. Program pelatihan tentang demokrasi dan pemilu ini terutama adalah untuk bagaimana memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam berdemokrasi termasuk berpartisipasi dalam pemilu termasuk kepada pemilih pemula dan kelompok perempuan. Kegiatan lainnya adalah dialog dan tatap muka langsung Gubernur/Wakil Gubernur dengan berbagai kalangan masyarakat dengan materi diantaranya nilai-nilai kebangsaan dan spiritualisme, globalisasi, kebangsaan, politik, dan pemerintahan. Selain itu juga dilakukan upaya untuk menumbuhkan kesadaran politik dengan mendorong tumbuhnya politik gotong royong.

Program pendidikan anti korupsi juga menjadi salah satu program unggulan dalam konteks sekolah tanpa sekat. Pendidikan anti korupsi ini dilakukan melalui internalisasi kurikulum sekolah mengenai pemahaman tentang sekolah-sekolah, dan sosialisasi pendidikan anti korupsi di lingkungan sekolah. Program lain adalah magang gubernur untuk SMA/SMK. Program ini diperuntukkan bagi siswa untuk dapat mengikuti aktifitas gubernur dalam menjalankan tugasnya dalam waktu tertentu, dan diharapkan siswa dapat mengetahui dinamika penyelenggaraan pemerintahan secara nyata yang dijalankan oleh pejabat publik.

2. Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru agama;

Peningkatan peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah, dan guru agama sebagai media komunikasi antar agama dan penghayat untuk membangun hubungan yang saling menyejahterakan menuju kehidupan yang saling menghormati, terwujudnya kehidupan yang aman dan nyaman tanpa adanya diskriminasi. Bentuk implementasi program unggulan ini antara lain

dengan memberikan stimulan bantuan kesejahteraan bagi guru pendidikan agama serta peningkatan/perbaikan prasarana sarana peribadatan.

3. Reformasi birokrasi di kabupaten/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;

Reformasi birokrasi yang diharapkan kedepan adalah pada tiga dimensi utama yaitu pelayanan publik yang semakin dinamis, efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan, serta efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumberdaya aparatur yang baik. Bentuk penjabaran program unggulan yang dilakukan pemerintah provinsi antara lain adalah koordinasi, pembinaan, dan advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota terkait dengan penerapan reformasi birokrasi, terutama mendorong penerapan teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi di kabupaten/kota.

Penerapan teknologi informasi dilakukan melalui pengembangan teknologi informasi secara terintegrasi sampai di level kabupaten/kota dengan pengembangan sistem informasi terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan, sistem pelayanan pengaduan, dan didukung penguatan keamanan sistem informasi. Selain itu juga dilakukan pelayanan langsung kepada masyarakat, dan kunjungan lapangan Gubernur/Wakil Gubernur serta ASN untuk berdialog dan tatap muka secara rutin guna menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

Bentuk pelayanan publik lainnya yang didorong untuk dikembangkan adalah Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta Pelayanan Samsat yang mudah dan cepat sesuai dengan aturan yang ada. Implementasi program ini juga didukung dengan upaya penyelenggaraan sistem merit dalam manajemen ASN dan implementasi standar pelayanan kepada publik untuk mencegah pungli, tidak hanya di tataran pemerintah provinsi tetapi juga sampai kabupaten/kota.

4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;

Satgas kemiskinan secara fungsional merupakan upaya penguatan tugas dan fungsi dari Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) untuk memastikan kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dapat terlaksana, terutama dalam pengelolaan data, perumusan masalah dan perumusan kebijakan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pelaporan. Bentuk kegiatan yang dilakukan antara lain koordinasi dan *focussing* penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota, pengembangan Kepeloporan dan Kepedulian Pemuda (PKPP), dan program “Maju Bareng” untuk penanggulangan kemiskinan melalui gerakan bersama “1 OPD minimal 1 desa miskin” dengan konsep kolaborasi berjenjang dengan menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi).

Bantuan desa, merupakan bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk peningkatan prasarana dan sarana desa, pembangunan kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan masyarakat desa, dan operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).

Program unggulan rumah sederhana layak huni dimaknai sebagai upaya perbaikan rumah tidak layak huni terutama bagi Rumah Tangga

Miskin dalam rangka mengurangi beban pengeluaran dengan bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin di 7.809 desa dan 750 kelurahan di Jawa Tengah dengan dukungan keswadayaan dan sifat gotong royong dari masyarakat. Selain itu, penyediaan rumah sederhana layak huni diperuntukkan juga bagi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan produktivitas, meningkatkan akses dan keterjangkauan rumah layak huni dalam rangka meningkatkan iklim kondusif bagi pengembangan industri. Bentuk implementasi program ini adalah pemberian bantuan keuangan untuk stimulan bantuan RSLH, untuk seluruh desa, dan/atau kelurahan.

5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan *startup* untuk wirausaha muda;

Program unggulan obligasi daerah dilatarbelakangi karena menurunnya kapasitas fiskal daerah terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah, namun masih ada kebutuhan kegiatan strategis yang harus segera dilaksanakan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pembiayaan pembangunan daerah dilakukan melalui obligasi daerah yang merupakan pembiayaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi diluar pendapatan asli daerah. Dalam lima tahun kedepan, obligasi daerah diperuntukkan bagi pembangunan rumah sakit khusus di Kota Pekalongan dan Magelang, pengembangan rumah sakit khusus di RSUD Kelet, pengembangan RSUD Moewardi (pengembangan onkologi terpadu), pembangunan kawasan olahraga Jatidiri, pengembangan infrastruktur penunjang kawasan industri, dan pengembangan kawasan *Edu Park* Tlogi Wening.

Program kemudahan akses kredit UMKM adalah program fasilitasi bagi UMKM untuk mendapatkan kemudahan akses kredit dari perbankan. Bentuk penerapan program ini antara lain melalui program pembiayaan/kredit (KUR/Kredit Usaha Rakyat, Mitra Jateng 25, Ultra Mikro/UMi) bagi KUMKM.

Program unggulan lainnya adalah penguatan BUMDes yang bertujuan untuk meningkatkan peran dan produktivitas BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa melalui lembaga keuangan milik desa. Implementasi penguatan BUMDes kedepan dilakukan melalui pelatihan peningkatan manajemen usaha, peningkatan sarana prasarana, dan pemberian bantuan permodalan.

Salah satu program yang juga menjadi unggulan Gubernur dan Wakil Gubernur dalam lima tahun ke depan adalah peningkatan *startup* wirausaha baru untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan keterampilan bagi masyarakat terutama bagi kelompok pemuda, dan penganggur dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja. Upaya implementasi program tersebut antara lain bimtek dan pendampingan wirausaha baru, fasilitasi akses pasar dan modal bagi wirausaha baru, pengembangan aplikasi *e-commerce*, pelatihan padat karya produksi di desa miskin, pelatihan kerja bagi masyarakat di berbagai bidang, serta pemagangan ke luar negeri.

6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;

Program menjaga harga komoditas merupakan upaya untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan perlindungan harga dan menjamin pemasaran produk pertanian; intervensi dan penguasaan stok oleh pemerintah dengan membeli secara langsung produk pertanian dengan menugaskan BUMD sebagai operator; serta penguatan kelembagaan petani di tingkat desa. Upaya menjaga harga komoditas pertanian dilakukan melalui implementasi Sistem Logistik Daerah (Sislogda). Pemerintah melalui BUMD menyerap produk hasil pertanian untuk kemudian dilakukan distribusi kepada masyarakat. BUMD selaku operator Sislogda menjual produk pertanian kepada masyarakat dengan kebijakan *dual price*, yaitu langsung kepada masyarakat umum sesuai harga pasar dan menjual dibawah harga pasar. Melalui mekanisme penjualan di bawah harga pasar, diharapkan dapat menstabilkan harga. Selain itu, pembelian produk hasil pertanian oleh BUMD, berfungsi untuk menjaga stok dan pasokan. Pengembangan Sislogda didukung dengan pengembangan sistem informasi untuk mengetahui ketersediaan stok dan arus barang secara *real time*.

Sedangkan asuransi gagal panen untuk petani merupakan upaya pemberian jaminan bagi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama penyakit dan gangguan lainnya. Sasaran penerima asuransi adalah petani yang sudah memiliki kartu tani.

Untuk program melindungi kepentingan nelayan adalah rangka memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan dari risiko selama beraktifitas dan kecelakaan kerja, termasuk fasilitasi kepentingan dasar. Jaminan perlindungan atas risiko yang dialami individu nelayan (nelayan kecil/tradisional/buruh) dalam rangka keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan, berupa pemberian bantuan asuransi bagi nelayan Jawa Tengah dengan jangka waktu selama 1 tahun. Implementasi lainnya dari program ini adalah Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dan Akses Permodalan (Pasca SeHAT), pengembangan Gerai Perizinan Kapal Perikanan (SIUP, SIPI/SIKPI, Pas Kecil/Besar, BPKP, Andon, Rekomendasi, BKP), serta pengadaan "Rumah dan Apartemen Ikan".

7. Pengembangan transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;

Program ini dilakukan dengan melakukan pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan (BRT); pengelolaan BRT Trans Jateng dengan Sistem BLUD; fasilitasi peningkatan layanan KA Semarang-Solo; fasilitasi revitalisasi/reaktivasi jalur kereta api diantaranya yang menghubungkan wilayah Kedungsepur dengan PSN Borobudur, wilayah pantura timur serta wilayah tengah; fasilitasi pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas wilayah.

Program pembangunan embung/irigasi dan didukung dengan pemeliharaan prasarana/sarana embung/irigasi dilakukan dalam rangka menciptakan ketahanan air dan pemenuhan air baku guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan pangan, penyediaan air bersih bagi masyarakat, dan mendukung pengembangan kawasan industri.

Implementasinya berupa perbaikan daerah irigasi, serta perbaikan dan pembangunan embung.

8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;

Program ini dilakukan dengan mendorong afirmasi kebijakan tumbuhnya kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan, dalam mempercepat proses persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Upaya yang dilakukan antara lain dengan menginternalisasi kebijakan tersebut dalam rencana tata ruang wilayah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu juga, pembukaan kawasan industri baru juga didukung dengan pemenuhan infrastruktur pendukung kawasan industri seperti penyediaan air baku, listrik, akses jalan, dan permukiman bagi pekerja.

Rintisan pertanian terintegrasi dimaksudkan dengan integrasi vertikal hulu hilir, integrasi holistik perpanjangan rantai energi untuk menghasilkan 5F (*food, feed, fuel, fertilizer, fiber*). Selain itu juga mengembangkan konsep pertanian terintegrasi sektoral (mayor sektoral) dan sektor terintegrasi dalam pertanian (pertanian mayor), integrasi berbasis konsolidasi lahan (penerapan mekanisasi penuh), integrasi berbasis organisasi pertanian. Pola pengembangan pertanian terintegrasi yaitu:

- a. Integrasi pertanian berorientasi hasil *food, feed, fuel, fertilizer, fiber* (5f), yaitu budidaya di bawah tegakan dan integrasi tanaman pangan-peternakan;
- b. Integrasi sektor pertanian dengan sektor lain, antara lain melalui agrowisata dan minapadi;
- c. Integrasi berbasis organisasi antara lain melalui pengembangan pertanian organik, gula semut dan kopi;
- d. Pengembangan pertanian terintegrasi melalui program *agriculture estate*, yaitu integrasi hulu-hilir dan kerjasama antara kelompok tani dengan BUMD pangan dalam bentuk korporasi, dengan konsolidasi lahan dan usaha pada petani dengan lahan sempit, didukung pinjaman kredit dari perbankan dan jaminan kredit dari BUMD penjamin kredit.

9. Rumah sakit tanpa dinding, sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin (SMAN, SMKN, SLB) dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;

Rumah sakit tanpa dinding diharapkan untuk mengubah paradigma kesehatan dari kuratif ke promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan ini menempatkan tenaga medis jemput bola untuk mendatangi pasien; penyediaan ambulan; bidan, perawat, dokter datang ke orang sakit. Program ini dilakukan dengan memastikan pemerataan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan dasar terutama di wilayah dengan angka kematian dan angka kesakitan tinggi. Program ini juga disamping mempercepat pelayanan sekaligus memberikan penyuluhan kesehatan sesuai dengan kasus-kasus yang ditangani, juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat. Implementasi program ini antara lain penyuluhan paradigma sehat, edukasi pasien dan keluarga pasien, *homecare, homevisit, daycare*, kolaborasi/interkoneksi pelayanan kesehatan lintas sektor, peningkatan *Public Safety*

Center (PSC) 119 tingkat provinsi, peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, dan peningkatan mutu di fasyankes.

Program unggulan lainnya adalah sekolah biaya pemerintah khusus untuk siswa miskin yang dikembangkan untuk anak sekolah dari keluarga miskin, yang pembiayaannya operasionalnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara penuh. Implementasinya antara lain pengelolaan SMK boarding dengan membangun gedung asrama SMK Negeri semi boarding, pembiayaan operasional asrama SMK Negeri semi boarding, bantuan beasiswa miskin (BSM), Pemberian biaya pendidikan bagi siswa miskin berprestasi di SMA Taruna Nusantara, serta uji kompetensi siswa SMK miskin.

Program selanjutnya adalah pemberian bantuan kepada sekolah swasta, pondok pesantren, madrasah, dan difabel, yang merupakan stimulan Bantuan Operasional Sekolah kepada SMA/SMK/SLB Swasta dan bantuan lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jenjang pendidikan dan unsur pendidikan. Bentuk kegiatan dari program ini adalah pemberian BOSDa untuk sekolah swasta, dan pemberian bantuan hibah sarpras keagamaan, pendidikan keagamaan, dan hibah kepada lembaga keagamaan.

10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olahraga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan;

Festival seni dilakukan dengan mendorong kegiatan-kegiatan seni, pengembangan dan penguatan hubungan kebudayaan melalui rembug dan pertukaran kesenian dan budaya, penyelenggaraan festival dan gelar seni budaya dengan masyarakat dan provinsi lain maupun dengan masyarakat negara lain, serta pengembangan ekonomi kreatif untuk penciptaan nilai tambah yang berbasis kreativitas pada seni pertunjukan dan seni rupa. Bentuk implementasinya antara lain parade seni budaya, pagelaran seni, pertunjukan kesenian rakyat, pengembangan daya tarik wisata, dan Jambore Ekonomi Kreatif (*Workshop* Ekonomi Kreatif Bidang Seni Pertunjukan dan Seni Rupa).

Sedangkan program pengembangan infrastruktur olahraga dilakukan dalam rangka meningkatkan kebugaran masyarakat serta meningkatkan prestasi olahraga Jawa Tengah. Program ini dilakukan melalui peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Olahraga Jatidiri, serta pemberian bantuan alat-alat olahraga sekolah.

Program lainnya adalah pengembangan rumah kebudayaan Jawa Tengah. Program ini diarahkan pada penyediaan ruang bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk penggiatan, pengembangan dan pemajuan daya kritis, kreatif, produktif dan apresiatif terhadap hasil kerja dan temuan karya yang berakar pada nilai budaya masyarakat Jawa Tengah. Rumah Budaya dibentuk di tingkat eks-Karesidenan dengan pendayagunaan gedung dan pekarangan peninggalan Rumah Dinas Residen, dan pemanfaatan taman budaya yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.

Selain itu, program lainnya adalah mendorong peningkatan kepedulian lingkungan. Program ini mendorong peningkatan kesadaran bahwa manusia menjadi bagian yang tidak terpisah dari lingkungan sekaligus berusaha untuk berbuat sebaik mungkin bagi lingkungannya. Sikap kepedulian

lingkungan ini harus dibangun sebagai salah satu nilai karakter masyarakat Jawa Tengah, yang akan mendukung upaya konservasi dan pemulihan kembali fungsi lingkungan. Ditambah dengan peningkatkan masyarakat tangguh bencana sebagai salah satu upaya pengurangan risiko bencana agar terwujud keseimbangan dan keberlanjutan lingkungan. Bentuk implementasinya antara lain edukasi lingkungan di tingkat sekolah, pengembangan budaya hemat energi, rehabilitasi dan konservasi lingkungan (hutan, lahan, air tanah), pengembangan energi baru terbarukan, pengembangan desa ekowisata, pemantauan kualitas air dan udara, pengelolaan sampah, serta pembentukan desa tangguh bencana.

Tabel 6.2.
Rencana Implementasi Program Unggulan Daerah Tahun 2018 – 2023

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	a. Sekolah tanpa sekat	Integrasi pendidikan formal, informal dan non formal kepada seluruh masyarakat yang berkeadilan dan tanpa diskriminasi sebagai perwujudan bahwa urusan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga menjadi tanggung jawab keluarga dan masyarakat, salah satu bentuk implementasinya adalah penerapan pendidikan terjangkau bagi seluruh siswa SMA/SMK dan SLB			
	Penerapan pendidikan terjangkau bagi seluruh SMA/SMK dan SLB	Program ini dilakukan dengan memberikan stimulan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) kepada seluruh SMA/SMK dan SLB Negeri, serta pemberian tambahan penghasilan bagi Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT)	Pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMA Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah siswa penerima BOP sesuai dengan kondisi tahun berkenaan - Alokasi sebesar Rp.1.000.000/siswa/tahun - Tahun 2019 sebanyak 303.205 siswa
			Pemberian dana BOS SMA Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah siswa penerima BOS sesuai dengan kondisi tahun berkenaan - Alokasi sebesar Rp.1.400.000/siswa/tahun - Tahun 2019 sebanyak 254.543 siswa

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SMK Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah siswa penerima BOP sesuai dengan kondisi tahun berkenaan - Alokasi sebesar Rp.1.000.000/siswa/tahun - Tahun 2019 sebanyak 254.543 siswa
			Pemberian dana BOS SMK Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah siswa penerima BOS sesuai dengan kondisi tahun berkenaan - Alokasi sebesar Rp.1.600.000/siswa/tahun - Tahun 2019 sebanyak 254.543 siswa
			Pemberian dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) SLB Negeri SLBN	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah siswa penerima BOP sesuai dengan kondisi tahun berkenaan - Alokasi sebesar Rp.1.000.000/siswa/tahun - Tahun 2019 sebanyak 7.523 siswa
			Pemberian dana BOS SLB Negeri	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah siswa penerima BOS sesuai dengan kondisi tahun berkenaan - Alokasi sebesar Rp.2.000.000/siswa/tahun - Tahun 2019 sebanyak 7.523 siswa

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Akses siswa berkebutuhan khusus untuk sekolah di sekolah umum	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	20 RKB dan 200 Guru Pendamping Khusus
			Pemberian kesejahteraan GTT dan PTT SMA 8.046 orang/ tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah GTT dan PTT SMA Tahun 2019 sebanyak 8.046 orang
			Pemberian kesejahteraan GTT dan PTT SMK 8.328 orang/ tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah GTT dan PTT SMA Tahun 2019 sebanyak 8.328 orang
			Pemberian kesejahteraan GTT dan PTT SLB 497 orang/ tahun	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah GTT dan PTT SMA Tahun 2019 sebanyak 497 orang
	b. Pelatihan tentang demokrasi dan pemilu	Pelatihan ini merupakan salah satu bentuk edukasi politik kepada masyarakat, terutama bagaimana memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam berdemokrasi termasuk berpartisipasi dalam pemilu. Program ini juga ditujukan kepada pemilih pemula dan kelompok perempuan. Edukasi politik mengajarkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan dan penentuan arah pembangunan	Fasilitasi forum OSIS SMA	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendampingan Pemilu Raya OSIS, Debat dan Pemilihan Ketua OSIS
			Fasilitasi forum OSIS SMK	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendampingan Pemilu Raya OSIS, Debat dan Pemilihan Ketua OSIS
			Pesta Demokrasi Sekolah (simulasi pemilu dalam pemilihan Pengurus OSIS)	Badan Kesbangpol	Pendampingan Pemilu Raya OSIS, Debat dan Pemilihan Ketua OSIS
			Peningkatan Demokrasi Indonesia (Pemahaman aspek-aspek Indeks Demokrasi Indonesia kepada elemen masyarakat)	Badan Kesbangpol	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Pendidikan Politik Perempuan	DPPPA DALDUK KB	termasuk kader politik perempuan
			Pendidikan Politik Bagi Masyarakat	Badan Kesbangpol	
			Wakil Rakyat Mengajar SMA/SMK/Ponpres	Setwan	
			Sekolah Politik Kebangsaan	Badan Kesbangpol	Sasaran masyarakat umum utamanya generasi muda milenial
			Kesbang Sambang Sekolah	Badan Kesbangpol	- Sasaran siswa SMA/SMK (pemilih pemula)
					- Dilakukan bersama dengan KPU dan Bawaslu
			Pendidikan melalui media masa, online dan sosial.	Dinas Kominfo	
		Bentuk edukasi politik lainnya adalah dialog dan tatap muka langsung Gubernur/Wakil Gubernur dengan berbagai kalangan masyarakat dengan materi diantaranya nilai nilai kebangsaan dan spiritualisme, globalisasi, kebangsaan, politik, dan pemerintahan.	Mengajar di Perguruan Tinggi / Akademi/ SMA/ SMK/ SLB	Dinas Dikbud	
			Mengajar di kelompok / lembaga non formal	Badan Kesbangpol	
			Mengajar di Kelompok/lembaga kemasyarakatan desa	Dispermasdesdukcapil	
			Menyapa melalui media Radio/TV Lokal dan Nasional.	Dinas Kominfo	
			Ngopi bareng Gubernur/Wakil Gubernur	Biro Umum dan Biro Adm. Bangda	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Ngaji bersama Gubernur/Wakil Gubernur	Biro Kesejahteraan Rakyat	
		Bentuk lainnya adalah menumbuhkan kesadaran politik dengan mendorong tumbuhnya Politik Gotong Royong	Hari jumat hari pengabdian masyarakat	Semua OPD	Gerakan Jumat OPD bersama masyarakat untuk bergotong royong meningkatkan kebersihan dan menyelesaikan permasalahan masyarakat sekitar
			Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat	Dispermadesdukcapil	"Gebrak Gotong Royong" yaitu Gerakan Bersama Rakyat untuk menumbuhkan dan memelihara semangat gotong royong
	c. Pelatihan Gender	Merupakan salah satu bentuk implementasi program sekolah tanpa sekat, yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gender, termasuk kepada pendidik dan anak usia sekolah	Pelatihan daan TOT tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi pendidik dan siswa SMA/SMK/SLB	DPPPA DALDUK KB dan Dinas Dikbud	
	d. Pendidikan Anti Korupsi	Merupakan salah satu bentuk program sekolah tanpa sekat, yang dilakukan melalui internalisasi kurikulum sekolah mengenai pemahaman tentang korupsi dan dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan	Pengembangan Kurikulum Pendidikan Karakter yang didalamnya terdapat Pendidikan Anti Korupsi sosialisasi/ asistensi/ fasilitasi	Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Termasuk didalamnya Gerakan Anti Korupsi di lingkungan Sekolah

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					Dorongan kepada Kabupaten/Kota untuk melakukan hal yang sama
			Sosialisasi/asistensi/fasilitasi pendidikan anti korupsi di lingkungan SMA/SMK/SLB	Inspektorat	Dasarnya adalah Mou antara KPK dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tentang pendidikan anti korupsi di lingkungan SMA/SMK/SLB se Jawa Tengah
	e. Program magang Gubernur untuk SMA/SMK	Program ini diperuntukkan bagi siswa untuk dapat mengikuti aktifitas gubernur dalam menjalankan tugasnya dalam waktu tertentu, dan diharapkan siswa dapat mengetahui dinamika penyelenggaraan pemerintahan secara nyata yang dijalankan oleh pejabat publik	Siswa hadir dan bersama Gubernur/Wakil Gubernur dalam setiap pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh Gubernur /Wakil Gubernur ("Program Sehari Bersama Gubernur")	Dinas Dikbud	
2.	Peningkatan rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji	Peningkatan stimulan bantuan kesejahteraan bagi guru pendidikan agama yang terdaftar pada Kanwil Kemenag Jateng dan peningkatan/perbaikan prasarana sarana peribadatan	Pemberian bantuan honorarium untuk pendidik keagamaan	Biro Kesejahteraan Rakyat	Alokasi sebesar Rp.1.200.000/orang/tahun Tahun 2019 sebanyak untuk 171.131 pendidik Keagamaan
			Peningkatan Kualitas pelaksanaan kebijakan bidang Keagamaan (Hibah Sarana prasarana peribadatan)	Biro Kesejahteraan Rakyat	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah Di Kabupaten Magelang	Dinas PU BMCK	Selesai Pembangunan Tahun 2022
3.	Reformasi birokrasi di kab/kota yang dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi	<p>Program ini ditunjukkan tidak hanya untuk pemerintah provinsi namun juga diarahkan untuk pemerintah kabupaten/kota di Jawa Tengah. Upaya yang dilakukan pemerintah provinsi antara lain adalah koordinasi, pembinaan, dan advokasi kepada pemerintah kabupaten/kota terkait dengan penerapan reformasi birokrasi, terutama mendorong penerapan teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi di kabupaten/kota.</p> <p>Pengembangan teknologi informasi secara terintegrasi sampai di level kabupaten/kota dengan pengembangan sistem informasi terintegrasi mulai perencanaan sampai dengan pelaporan, sistem pelayanan pengaduan, didukung penguatan keamanan sistem informasi.</p> <p>Pelayanan langsung kepada masyarakat, dan kunjungan lapangan Gubernur/Wakil Gubernur serta ASN untuk berdialog dan tatap muka secara rutin untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat</p>	<p>Pengembangan dan integrasi sistem pelayanan pengaduan masyarakat Provinsi dan Kabupaten/Kota; integrasi FO; <i>Smart City/ Smart Province; single data</i> sistem; didukung dengan penguatan keamanan sistem.</p> <p>- Tinjauan Lapangan</p> <p>- Dialog / Tatap muka dengan berbagai media</p>	<p>Dinas Kominfo</p> <p>Semua OPD Prov. Jateng</p>	<p>Pengembangan GRMS terintegrasi dengan Kabupaten/Kota</p>

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			<i>Roadshow</i>	Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
			Evaluasi dan Peningkatan penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) dan Kelurahan	Biro Pem, Otda Dan Kerjasama Setda Prov.Jateng	
		Peningkatan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu (PTSP), serta Pelayanan Samsat yang mudah dan cepat sesuai dengan aturan yang ada	a. Pelayanan perijinan terpadu yang mudah dan cepat dengan :		
			- Penyelenggaraan proses pelayanan perizinan sesuai SOP	DPMPTSP	
			- Penanganan pengaduan, penyederhanaan proses pelayanan perizinan, Gelar Inovasi Pelayanan Publik, dan Analisa Survei Kepuasan Masyarakat	DPMPTSP	
			b. Pelayanan samsat yang mudah dan cepat :		
			- Publikasi PKB melalui media elektronik dan media cetak serta reward bagi masyarakat taat pajak kenadaraan	BPPD	
			- Jaringan SAMSAT Online	BPPD	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		<p>Penyelenggaraan sistem merit dalam manajemen ASN</p> <p>Implementasi standar pelayanan kepada publik untuk mencegah pungli</p>	<p>Pengembangan karier dan peningkatan kompetensi ASN</p> <p>Penjaminan mutu kompetensi ASN</p> <p>Penggajian, penghargaan dan disiplin</p> <p>Pembinaan dan evaluasi (Analisis Jabatan)</p> <p>Standar Pelayanan OPD</p>	<p>BKD dan BPSDMD</p> <p>BPSDMD</p> <p>BKD dan BPKAD</p> <p>Biro Organisasi</p> <p>Biro Organisasi</p>	
4	a. Satgas Kemiskinan	<p>Secara fungsional merupakan penguatan lebih lanjut dari tugas dan fungsi TKPKD utamanya memastikan kebijakan, rencana program, kegiatan, dan sasaran penanggulangan kemiskinan dapat tercapai, terutama dalam hal pengelolaan data, perumusan masalah dan perumusan kebijakan, pelayanan pengaduan masyarakat, serta pelaporan penanggulangan kemiskinan</p>	<p>Koordinasi dan <i>focussing</i> penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota</p> <p>Kepeloporan dan Kepedulian Pemuda (PKKP)</p>	<p>Dinsos, Bappeda yang dikoordinatori Assisten Kesejahteraan Rakyat</p> <p>Disporapar</p>	<p>Satgas Kemiskinan bagian dari TKPKD dengan pelibatan Unsur-unsur non Pemerintah</p> <p>Pemuda diarahkan sebagai bagian dari satgas kemiskinan. Dilakukan pembinaan sebanyak 200 orang per tahun</p>

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Program "Maju Bareng" untuk penanggulangan kemiskinan	48 OPD	Gerakan bersama "1 OPD minimal 1 Desa Miskin" menggunakan konsep "Kolaborasi Berjenjang" dengan menjalin kemitraan bersama pihak-pihak lain termasuk non pemerintah (swasta, lembaga zakat, perguruan tinggi)
	b. Bantuan Desa	Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk peningkatan sarana dan prasarana desa, pembangunan kawasan perdesaan, peningkatan ketahanan masyarakat desa, operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).	Operasional KPMD, Stimulan Ketahanan Masyarakat Desa, Pengembangan Kawasan	Dispermasdesdukcakil dan BPKAD	Intervensi Provinsi tahun 2019 : Operasional KPMD 7809 desa @ Rp 5 juta Peningkatan ketahanan masyarakat desa 7809 desa @ Rp 50 juta (Rp 30 juta untuk RSLH) Pembangunan kawasan perdesaan 50 desa @ Rp 50 juta
	c. Rumah Sederhana Layak Huni	Bantuan stimulan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi Rumah Tangga Miskin dengan dukungan nilai keswadayaan dan sifat gotong royong masyarakat.	Bantuan Keuangan untuk Stimulan Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Dispermasdukcakil dan BPKAD	1 Unit @Rp. 10 Juta untuk desa dan/atau Kelurahan
5.	a. Obligasi Daerah	Pembiayaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi di luar pendapatan asli daerah	Pembangunan Rumah Sakit Khusus di Kota Pekalongan dan Magelang	Dinas Kesehatan	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Pengembangan Rumah Sakit Khusus di RSUD Kelet	RSUD Kelet Jepara	
			Pengembangan RSUD Moewardi (Pengembangan Onkologi Terpadu)	RSUD Dr. Moewardi	
			Pembangunan Kawasan Olahraga Jatidiri	Disporapar	
			Infrastruktur Penunjang Kawasan Industri	Disperindag	
			Pengembangan Kawasan <i>Edu Park</i> Tlogo Wening	CMJT	
	b. Kemudahan akses kredit UMKM	Fasilitasi Bagi UMKM untuk mendapatkan akses kredit dari perbankan	Pelatihan pengajuan kredit ke perbankan	Dinkop UKM	
			Pemberian Pinjaman untuk UMKM (Kredit Mitra 25 dan Mitra 2)	Bank Jateng dan Dinkop UMKM untuk memfasilitasi	
	c. Penguatan BUMDes	Peningkatan peran dan produktivitas BUMDes sebagai lembaga perekonomian desa dalam upaya meningkatkan perekonomian desa melalui lembaga keuangan milik desa	Penyusunan Road Map BUMdes di Jawa Tengah; pelatihan peningkatan manajemen usaha; dan pemberian bantuan permodalan.	Dispermadesdukcapi	
	d. Pelatihan <i>startup</i> untuk wirausaha muda	Menumbuhkan jiwa kewirausahaan dan keterampilan bagi masyarakat terutama bagi kelompok pemuda, dan penganggur dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja	Bimtek dan pendampingan wirausaha baru	Disporapar, Disperindag, Distanbun, Dinkop UKM	
			Akses pasar dan modal bagi wirausaha baru		

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Pengembangan aplikasi <i>e-commerce</i> Pak De Gayeng	Disperindag	<i>"Market Place"</i> untuk memudahkan penjualan produk para pelaku UMKM - IKM
			Pengembangan Kemitraan, Permodalan, Akses Pasar dan Bahan Baku Bagi Industri Non Agro	Disperindag	Kemitraan Industri Besar dengan Industri Kecil di Jateng; kemudahan akses bahan baku bagi IKM
			Pelatihan padat karya produktif di desa miskin	Disnakertrans	Peningkatan ketrampilan melalui pelatihan selama 4 hari untuk 20 paket pelatihan/tahun (20 orang per paket). Pelaksanaan lokasi di desa miskin, dengan target 1.000 orang per tahun
			Pelatihan kerja di bidang industri	Disnakertrans	Peningkatan ketrampilan bagi pencari kerja/tenaga kerja dengan pelatihan kerjaselama 20 - 30 hari per kejuruan (7 kejuruan), 20 orang per paket, dengan target 800 orang per tahun

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Pelatihan kerja di bidang pertanian	Disnakertrans	Peningkatan ketrampilan bagi tenaga kerja dibidang pertanian selama 20 hari per kejuruan (4 kejuruan), 16 orang per paket. Pelaksanaan lokasi di desa miskin, institusional (di BLK) atau non institusional (diluar BLK)
			Pemagangan ke luar negeri	Disnakertrans	Peningkatan ketrampilan bagi calon tenaga kerja, dengan target 2.600 orang per tahun
6.	a. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani				
	1) Menjaga Harga Komoditas	Program untuk menjaga stabilitas harga yang dilakukan dengan perlindungan harga dan menjamin pemasaran produk pertanian; intervensi dan penguasaan stok oleh pemerintah dengan membeli secara langsung produk pertanian dengan menugaskan BUMD sebagai operator; serta penguatan kelembagaan petani di tingkat desa	Pelaksanaan Sistem Informasi Harga (SISLOGDA)	Dinas Ketahanan Pangan	Upaya menjaga stabilitas stok dan gejolak harga komoditas pangan melalui keterbukaan akses informasi stok pangan

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Menjaga stok beras pada gudang tingkat kawasan	Dinas Ketahanan Pangan	- Pengolahan dan pengemasan beras oleh kelompok tani - BUMD melakukan penjualan beras secara terbuka pada pasar - Kebijakan <i>dual price</i> (harga lebih rendah dibanding harga pasar) jika terjadi gejolak harga
			Penyediaan informasi harga kepokmas dan barang penting di Jawa Tengah	Disperindag	
	2) Asuransi gagal panen untuk petani	Merupakan upaya pemberian jaminan bagi petani dari risiko gagal panen akibat bencana alam, serangan hama penyakit dan gangguan lainnya	Jaminan gagal panen bagi petani (Asuransi Petani)	Distanbun dan Jamkrida	Untuk petani yang sudah memiliki kartu tani
	b. Melindungi kepentingan nelayan	Program untuk memberikan jaminan perlindungan bagi nelayan dari risiko selama beraktifitas dan kecelakaan kerja, termasuk fasilitasi kepentingan dasar			

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Asuransi Nelayan Jawa Tengah	DKP	Jaminan perlindungan atas risiko yang dialami individu nelayan (nelayan kecil/tradisional/buruh) dalam rangka keberlangsungan kegiatan usaha penangkapan ikan, berupa pemberian bantuan asuransi bagi nelayan Jawa Tengah dengan jangka waktu selama 1 tahun
			Fasilitasi Sertifikasi Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan dan Akses Permodalan (Pasca SeHAT)	DKP	Memfasilitasi penyediaan aset (hak atas tanah nelayan) yang dapat didayagunakan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Gerai Perizinan Kapal Perikanan (SIUP, SIPI/SIKPI, Pas Kecil/Besar, BPKP, Andon, Rekomendasi, BKP)	DKP	Memberikan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan transparan dengan mendekati dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada nelayan di daerah bekerjasama dengan DPMPSTSP dan KSOP guna efisiensi biaya dan waktu proses perizinan kapal perikanan oleh nelayan
			Pengadaan "Rumah dan Apartemen Ikan"	DKP	Memulihkan ketersediaan (stok) sumberdaya ikan dengan mengadakan bangunan yang ditempatkan didalam perairan sebagai areal berpijah, perlindungan, asuhan dan pembesaran bagi telur serta anak2 ikan Diserahkan pengelolaannya kepada Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang merupakan kepanjangan tangan pemerintah di daerah yang turut serta membantu

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
					dalam kegiatan pengawasan dan pemulihan sumberdaya ikan
7.	a. Pengembangan transportasi massal	Pengembangan koridor angkutan umum massal berbasis jalan (BRT) dan pengelolaan BRT Trans Jateng dengan Sistem BLUD	Pengembangan Koridor BRT Trans Jateng, Pengelolaan BRT Trans Jateng dengan Sistem BLUD	Dinas Perhubungan	
	b. Revitalisasi jalur kereta api	Fasilitasi peningkatan layanan KA Semarang-Solo; fasilitasi revitalisasi/ reaktivasi jalur kereta api diantaranya yang menghubungkan wilayah Kedungsepur dengan PSN Borobudur, wilayah pantura timur, serta wilayah tengah	Peningkatan layanan berupa peningkatan frekuensi kereta api (Fasilitas)	Dinas Perhubungan	
Revitalisasi / Reaktivasi Jalur KA Non Operasi			Kementerian Perhubungan RI	Jalur KA Kedungjati – Tuntang; Ambarawa – Secang – Magelang – Yogyakarta; Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang; Purwokerto – Purbalingga – Banjarnegara – Wonosobo	
Pemasangan <i>Early Warning System</i> di Perlintasan Sebidang Kereta Api			Dinas Perhubungan	Pada jalan provinsi yang terdapat perlintasan sebidang dengan rel KA	
Pembangunan <i>Fly Over</i> Ganevo Mranggen			Dinas PU BMCK	Perlntasan sebidang dengan rel KA	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	c. Pengembangan bandara	Fasilitasi pengembangan bandara untuk mendukung pariwisata dan aksesibilitas wilayah	Pembangunan dan Pengembangan Bandara di Jawa Tengah (Fasilitasi Pemprov. Jateng berupa <i>sharing</i> pembebasan tanah) Pembangunan Bandara Jend. Soedirman Pembangunan Bandara Ngloram Pengembangan Bandara Dewadaru Pengembangan Bandara Tunggul Wulung	Dinas Perhubungan. Kementerian Perhubungan	Mulai beroperasi Tahap I Tahun 2020 dan Tahap II 2023 Perpanjangan landasan pacu dan pembangunan terminal penumpang Peningkatan frekuensi penerbangan
	d. Pembangunan embung/irigasi	Pembangunan tampungan air (Waduk/embung) dalam rangka menciptakan ketahanan air dan pemenuhan air baku guna mendukung peningkatan produksi pertanian dan pangan, penyediaan air bersih bagi masyarakat, dan mendukung pengembangan kawasan industri	Perbaiki daerah irigasi Perbaiki dan pembangunan embung	Dinas PU SDA Taru Dinas PU SDA Taru	Pemenuhan kebutuhan air irigasi untuk pertanian Pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat termasuk untuk pertanian

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
8.	a. Pembukaan kawasan industri baru	Afirmasi kebijakan tumbuhnya kawasan industri baru di perbatasan barat dan selatan, dalam mempercepat proses persebaran pusat-pusat pertumbuhan ekonomi	Dukungan Pengembangan Kawasan Industri di Jawa Tengah	Disperindag dan DPMPTSP	Penyusunan Kajian Wilayah Industri Baru untuk pemerataan sebaran industri dan pengembangan wilayah perbatasan Jateng
	b. Rintisan pertanian terintegrasi	Konsep integrasi vertikal hulu hilir, integrasi holistik, pertanian terintegrasi sektoral (mayor sektoral) dan sektor terintegrasi dalam pertanian (pertanian mayor), integrasi berbasis konsolidasi lahan (penerapan mekanisasi penuh), serta integrasi berbasis organisasi pertanian			
	1) <i>Agriculture estate</i>	Integrasi hulu - hilir, melalui konsolidasi lahan dan usaha terutama pada petani dengan lahan sempit, dengan pendampingan manajemen dari BUMD dan dukungan pinjaman/kredit dari Bank Jateng/BPR BKK serta jaminan kredit dari PT. Jamkrida.	Konsolidasi lahan bagi petani dengan kepemilikan lahan di bawah 0,5 Ha.	Dintanbun, BUMD, Jamkrida, Bank Jateng, PT. SPJT dan keterlibatan Perguruan Tinggi	- Petani dan BUMD merupakan satu kesatuan manajemen dalam bentuk korporasi, masing - masing mempunyai hak dan kewajiban.
			BUMD yaitu aspek <i>on-farm</i> , pengolahan dan <i>off-farm</i> sehingga akan memotong rantai pasok.		- PT. SPJT memberikan pendampingan dari <i>on farm</i> , pengolahan dan <i>off farm</i> sehingga memotong rantai pasok

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Pemberian kredit kepada petani antara lain melalui Bank Jateng dan BPR/BKK dengan suku bunga rendah.		-Dari sisi pengelolaan keuangan, untuk tahap awal petani mendapatkan pinjaman yang disalurkan secara rutin tiap bulan, dengan kata lain petani mendapatkan gaji bulanan selama masa tanam, misal budidaya padi maka jangka waktu pinjaman selama 3 bulan.
	2) Integrasi di bawah tegakan	Budidaya tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai di bawah tegakan kawasan hutan	Fasilitasi dan koordinasi dengan Perhutani untuk penyediaan lahan di bawah tegakan	Dinas LHK	Budidaya tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai di bawah tegakan kawasan hutan
			Penanaman tanaman pangan di bawah tegakan pendampingan budidaya	Dintanbun	
	3) <i>Zero Waste</i>	Integrasi tanaman pangan - peternakan dengan mengoptimalkan limbah untuk digunakan kembali	Pemanfaatan limbah tanaman budidaya (pasca panen) sebagai bahan baku pupuk organik	Dintanbun	
			Fasilitasi sarana, prasarana dan pengolahan limbah ternak melalui inovasi teknologi pengolahan pupuk dan pengembangan biogas, Pemanfaatan sumber EBT dan penurunan emisi GRK	Disnak Keswan	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Fasilitasi sarana, prasarana unit pengolahan limbah ternak melalui inovasi teknologi pengolahan pupuk (APPO) dan pengembangan biogas; Pemanfaatan sumber energi terbarukan dan penurunan emisi gas rumah kaca	Disnak Keswan	
	4) Agrowisata	Integrasi sektor pariwisata dengan pertanian	Penyediaan dan pengembangan kawasan wisata	Distanbun	Pengembangan potensi lokal berbasis agro menjadi Atraksi Wisata
			Pengembangan destinasi dan promosi	Disporapar	
	5) Minapadi	Integrasi padi dengan perikanan budidaya	Penyiapan lahan	Dintanbun	Integrasi antara budidaya tanaman padi sawah dengan budidaya perikanan tawar dalam satu lahan
			Pengadaan bibit tanaman padi		
			Budidaya tanaman padi		
			Penyediaan bibit ikan	Dinlutkan	
	Budidaya ikan				
	6) Pertanian Organik	Pengembangan pertanian tanpa menggunakan bahan kimia	Pendampingan dan sertifikasi organik	Dintanbun, Dishanpan	Lokasi di Kabupaten Magelang dan Boyolali

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
9.	a. Rumah Sakit tanpa dinding	<p>RS tanpa dinding mengubah paradigma kesehatan dari dari kuratif ke promotif dan preventif dengan tetap melaksanakan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pelayanan ini menempatkan tenaga medis jemput bola untuk mendatangi pasien; penyediaan ambulan; bidan, perawat, dokter datang ke orang sakit. Program ini dilakukan dengan memastikan pemerataan kesempatan masyarakat untuk mendapatkan kesehatan dasar terutama di wilayah dengan angka kematian dan angka kesakitan tinggi.</p> <p>Program ini juga disamping mempercepat pelayanan sekaligus memberikan penyuluhan kesehatan sesuai dengan kasus-kasus yang ditangani, juga untuk meningkatkan kapasitas masyarakat perilaku hidup bersih dan sehat</p>	<p>Penyuluhan paradigma sehat melalui :</p> <p>Penyebaran informasi melalui media elektronik (TV, radio, Vidiotron, Media <i>Online</i>, TV Kereta , media luar ruang , media pameran, media cetak, media transportasi);</p> <p>Penyuluhan kesehatan ke sekolah dan masyarakat;</p> <p>Edukasi pasien dan keluarga pasien; <i>home care; home visit; Daycare</i></p>	<p>Dinas Kesehatan; 7 RSUD/RSJD</p>	
			Kolaborasi/interkoneksi pelayanan kesehatan lintas sektor (puskesmas, RS Kabupaten/Kota/RS Provinsi)	Dinas Kesehatan	
			Peningkatan kapasitas <i>Public Safety Center</i> (PSC) 119 Tingkat Provinsi	Dinas Kesehatan	
			Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan	Dinas Kesehatan	
			Optimalisasi akreditasi RS dengan peningkatan mutu di Fasyankes (RS, Puskesmas, Laboratorium)	Dinas Kesehatan	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
	b. Sekolah biaya pemerintah khusus siswa miskin (SMA/SMK/SLB)	Sekolah yang dikembangkan untuk anak sekolah dari keluarga miskin, yang pembiayaan operasionalnya oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah secara penuh	Pengelolaan SMK Negeri <i>Boarding</i>	Dinas Dikbud	Pengelolaan 3 SMK Negeri Jawa Tengah di Kota Semarang, Kabupaten Pati, dan Purbalingga
			Pembangunan Gedung Asrama SMK Negeri <i>Semi Boarding</i>	Dinas Dikbud	Pembangunan 15 asrama di tahun 2020
			Biaya operasional Asrama SMK Negeri <i>Semi Boarding</i>	Dinas Dikbud	Operasional dimulai tahun 2021-2023 @ 2 M/tahun/asrama (100 siswa)
			Bantuan Beasiswa Siswa Miskin (BSM) 10.000 siswa per tahun	Dinas Dikbud	Sasaran adalah siswa miskin yang tidak terdaftar dalam Program Indonesia Pintar
					Alokasi BSM sebesar Rp. 1.000.000 Siswa/Tahun
					Tahun 2019 sebanyak 10.000 Siswa
			Pemberian biaya pendidikan bagi siswa miskin berprestasi di SMA Taruna Nusantara	Dinas Dikbud	Pembiayaan selama 3 tahun dengan sasaran siswa miskin berprestasi
			Program Indonesia Pintar	Dinas Dikbud	Pembiayaan dari Pemerintah Pusat dengan sasaran siswa miskin Alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000 Siswa per tahun

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Uji kompetensi siswa SMK miskin	Dinas Dikbud	Target 5.000 siswa per tahun
	c. Bantuan sekolah swasta, Ponpes, Madrasah dan Difabel	Pemberian Stimulan Bantuan Operasional Sekolah kepada SMA/SMK/SLB Swasta dan bantuan lembaga pendidikan keagamaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, jenjang pendidikan dan unsur pendidikan	Bantuan operasional pendidikan untuk sekolah swasta (BOSDa)	Dinas Dikbud Biro Kesra	BOSDa SMA/SMK/SLB Swasta sebesar Rp.500 ribu/siswa/tahun untuk 623,676 siswa dimulai tahun 2020, meningkat menjadi Rp.750 ribu/siswa/tahun di tahun 2021, selanjutnya Rp. 1 juta/siswa/tahun BOSDa MA untuk 177.114 siswa dengan alokasi tahun 2020 sebesar Rp. 350 ribu/siswa/tahun dan mulai 2021 meningkat menjadi Rp.500 ribu/siswa/th
			Bantuan Hibah Sarpras Keagamaan	Biro Kesra	
			Bantuan Hibah Sarpras Pendidikan Keagamaan	Biro Kesra	
			Bantuan Hibah Lembaga Keagamaan	Biro Kesra	
10.	a. Festival seni	Program ini dilakukan dengan mendorong kegiatan-kegiatan seni, pengembangan dan penguatan hubungan kebudayaan melalui rembug dan pertukaran kesenian dan budaya, penyelenggaraan festival dan gelar seni budaya dengan masyarakat dan provinsi lain maupun dengan masyarakat negara lain	Parade seni budaya Jawa Tengah	Dinas Dikbud, Badan Penghubung	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Festival/lomba tingkat Nasional		
			Duta seni Pelajar Jawa - Bali- Lampung		
			Pagelaran seni dalam Provinsi		
			Pertunjukan Kesenian Rakyat Jawa Tengah		
			Pagelaran seni/ pengiriman Tim kesenian ke luar negeri		
			Kongres Bahasa/ Kebudayaan Jawa		
			Pentas seni budaya di TBJT		
			Fasilitasi Penyelenggaraan Kesenian kepada Kabupaten/Kota	Disporapar	Penyelenggaraan kesenian/atraksi wisata untuk promosi pariwisata melalui: (1) tampilan kesenian pada event promosi pariwisata di dalam dan luar negeri; (2) fasilitasi atau dukungan kesenian pada event pariwisata di kabupaten/kota.
			Pengembangan Daya Tarik Wisata	Disporapar	Pembinaan dan pengembangan Keunikan Lokal Daerah/Masyarakat menjadi Atraksi Wisata di Desa Wisata melalui pagelaran seni masyarakat lokal

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
		Pengembangan/pembinaan/workshop/jambore ekonomi kreatif untuk penciptaan nilai tambah yang berbasis kreativitas pada seni pertunjukan dan seni rupa	Jambore Ekonomi Kreatif (Workshop Ekonomi Kreatif Bidang Seni Pertunjukan dan Seni Rupa)	Disporapar	
	b. Pengembangan infrastruktur olahraga	Program ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kebugaran masyarakat serta meningkatkan prestasi olahraga Jawa Tengah	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kawasan Olahraga Jatidiri	Disporapar	
	c. Rumah kebudayaan	Penyediaan Ruang Bersama yang terbuka dan mudah dijangkau untuk penggiatan, pengembangan dan pemajuan daya kritis, kreatif, produktif dan apresiatif terhadap hasil kerja dan temuan karya yang berakar pada nilai budaya masyarakat Jawa Tengah	Pemanfaatan aset aset pemerintah provinsi/ kabupaten/kota/desa yang potensial sebagai "Rumah Budaya"	BPKAD	
			Event napak tilas dan lawatan sejarah	Dinas Dikbud	
			Dialog Budaya dan tradisi	Dinas Dikbud	
			Seminar sejarah lokal	Dinas Dikbud	
			Kemah budaya	Dinas Dikbud	
			Penyelenggaraan warisan dunia	Dinas Dikbud	
			Pameran cagar budaya dan permuseuman	Dinas Dikbud	
			Pembinaan generasi penghayat	Dinas Dikbud	
			Festival/Pagelaran/Lomba Seni dalam Provinsi	Dinas Dikbud	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Dialog Pengembangan Kebudayaan dan pagelaran tradisi keagamaan	Biro Kesejahteraan Rakyat	
	d. Kepedulian Lingkungan	Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan peningkatan pengurangan resiko bencana	<p>Peningkatan sikap kepedulian lingkungan melalui:</p> <p>Edukasi melalui Sekolah Sungai, Sekolah Lingkungan, Sekolah Alam dan Sekolah Pesisir</p> <p>Budaya hemat energi (Lomba Hemat Energi & Air dan Lomba Desa Mandiri Energi)</p> <p>Audit energi</p> <p>Sadar lingkungan melalui Program Kampung Iklim</p> <p>Upaya konservasi dan rehabilitasi melalui:</p> <p>Rehabilitasi hutan dan lahan</p> <p>Konservasi air tanah: - sumur resapan - sumur pantau</p> <p>Pengembangan EBT: - roof top - pemanfaatan EBT (biogas, biomass, gas rawa)</p>	<p>Biro Kesejahteraan Rakyat</p> <p>DLHK</p> <p>Dinas ESDM</p> <p>Dinas ESDM</p> <p>DLHK</p> <p>DLHK</p> <p>DLHK</p> <p>Dinas ESDM</p> <p>Dinas ESDM</p>	<p>Sekolah Sungai, sekolah lingkungan, Sekolah Alam</p>

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Pengembangan desa ekowisata	Dinporpar dan DLHK	
			Pemantauan kualitas air	DLHK	Baki, Premulung, Mungkung, Grompol, Samin,, Jlantah, Palur, Pepe, Babon, Bogowonto, Garang, Gung, Kupang, Luk Ulo, Lusi, Pemali, Sambong, Serang, Serayu, Tuntang, Wulan,
			Pemantauan kualitas udara		35 kabupaten/kota
			IPAL Industri kecil/ limbah Rumah Tangga/Lembaga	DLHK	
			Pengolahan sampah: - TPS 3R - Limbah B3 rumah sakit - TPST regional, landfill gas, RDF, PLTSa	DLHK	
			Ijin lingkungan (rekomendasi)	DLHK	
			Penegakan Perda melalui:		
			Pembinaan terhadap siswa SMK/SMA, Ormas, BUMD dan penegakan Perda terutama berkaitan dengan Lingkungan	SATPOL PP	

No	Program Unggulan	Konsep Operasional	Indikasi Rencana Implementasi	Perangkat Daerah Pelaksana	Keterangan
1	2	3	4	5	6
			Pengembangan Sistem data dan informasi lingkungan berbasis geospasial		
			Penanggulangan Bencana melalui:		
			Pembentukan Desa Tangguh Bencana	Set BPBD	

Untuk penjabaran program pembangunan daerah yang mengarah langsung pada perwujudan cita-cita daerah yang tertuang dalam visi dan misi tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 6.3.

Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Misi 1: Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia									54.705.263		36.770.000		39.745.000		44.870.000		45.170.000		221.260.263	
Masyarakat Jawa Tengah yang semakin religius, toleran, dan guyup									54.705.263		36.770.000		39.745.000		44.870.000		45.170.000		221.260.263	
		Persentase penurunan konflik SARA			%	17,64	0	15		15		15		15		15		15		
	Terciptanya kohesi sosial masyarakat								54.705.263		36.770.000		39.745.000		44.870.000		45.170.000		221.260.263	
		Indeks Toleransi			Angka	73,9	0	74,4		74,48		75,3		75,9		76,6		76,6		
		Persentase tindak pidana yang tertangani			%	74,3	0	80		83		85		87		90		90		
			Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan						31.220.263		9.500.000		10.250.000		11.000.000		9.950.000		71.920.263	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini	%	75	75	80		81		83		86		90		90		Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
				Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
				Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang	%	75	75	80		81		83		86		90		90		Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
			Program Penguatan Ketahanan Bangsa						5.860.000		6.360.000		7.110.000		8.110.000		8.210.000		35.650.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	%	75	75	80		81		83		86		90		90		Bidang Ketahanan Bangsa
			Program Penguatan Politik Dalam Negeri						9.935.000		10.435.000		11.185.000		13.685.000		14.085.000		59.325.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
				Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek-aspek IDI	%	75	75	80		81		83		86		90		90		Bidang Politik Dalam Negeri

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pemeliharaan Kamtramtimas Dan Pencegahan Tindakan Kriminal						2.390.000		3.800.000		4.250.000		4.675.000		5.100.000		20.215.000	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase kabupaten/kota rawan tramtib yang kondusif	%	-	-	85		85		85		85		85		85		Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
			Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat						725.000		1.200.000		1.350.000		1.500.000		1.625.000		6.400.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase masyarakat yang meningkat kepatuhan dan ketaatannya terhadap tibatramtimas	%	-	-	10,7		11,03		11,26		11,82		12,16		56,98		Bidang Pembinaan Masyarakat
			Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						125.000		125.000		150.000		200.000		250.000		850.000,00	Sekretariat Daerah
				Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan	%	-	-	100		100		100		100		100		100		Biro Kesejahteraan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah						1.450.000		700.000		700.000		700.000		700.000		4.250.000,00	Sekretariat Daerah
				Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya	%	-	-	85		85		90		95		100		100		Biro Kesejahteraan Rakyat
			Pelayanan Umum, Ke-protokolan, dan Kehumasan						3.000.000		4.650.000		4.750.000		5.000.000		5.250.000		22.650.000,00	Sekretariat Daerah
				Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	%	-	-	100		100		100		100		100		100		Biro Kesejahteraan Rakyat
Misi 2: Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintah kabupaten/kota									341.874.307		303.553.249		319.611.514		340.969.259		365.555.533		1.671.563.862	
Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean government)									341.874.307		303.553.249		319.611.514		340.969.259		365.555.533		1.671.563.862	
		Indeks Reformasi Birokrasi			Angka	76,53	74,49	75,5		77		78		79		80		80		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik								69.315.336		69.534.906		88.246.996		93.295.670		100.162.264		420.555.172	
		Indeks Kepuasan Masyarakat			Angka	78,48	81,36	80			82		84		86		88		88	
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			Angka	2,54	2,64	2,76			2,88		3		3,12		3,24		3,24	
			Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik						16.014.250		17.264.000		18.764.000		20.264.000		21.764.000		94.070.250	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Nilai survei kepuasan komunikasi publik	%	-	-	57			64		71		78		85		85	Bidang Informasi dan Komunikasi Publik
			Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi						22.916.250		21.500.000		18.866.000		17.500.000		18.316.000		99.098.250	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	%	10	15	20			40		60		70		80		80	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pengembangan E-Government						4.534.714		5.169.574		5.893.315		6.718.378		7.255.848		29.571.829	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi	%	33	38	45		55		65		75		85		85		Bidang E-Government
			Pelayanan Perijinan						1.391.700		1.896.816		1.920.000		2.304.000		2.764.800		10.277.316	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	%	-	-	91		92		93		94		95		95		Bidang Pelayanan Perizinan
			Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Pelayanan Perijinan						1.337.630		1.740.000		2.169.100		2.603.000		3.123.700		10.973.430	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase pemenuhan standar pelayanan	%	-	-	90		90		91		92		93		93		Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan
				Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	-	-	100		100		100		100		100		100		Bidang Pengaduan dan Peningkatan Layanan
			Pelayanan Data Dan Informasi Penanaman Modal dan Perijinan						1.458.670		1.650.000		1.839.000		1.949.800		2.062.700		8.960.170	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perijinan	%	-	-	50		60		70		80		90		90		Bidang Pengelola Data dan Informasi
			Pengembangan Data Statistik Sektor dan Keterbukaan Informasi						2.320.800		2.664.741		2.988.677		3.514.122		3.999.136		15.487.476	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase badan publik yang terbuka	%	45	55	68		76		83		92		100		100		Bidang Statistik
			Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah						1.081.322		4.509.775		8.831.904		10.562.370		11.886.080		36.871.451	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase perangkat daerah memiliki keamanan informasi > 80	%	-	-	16,67		33,33		50		66,67		100		100		Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
			Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan						1.319.000		1.575.000		1.635.000		1.690.000		1.750.000		7.969.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	%	-	-	21		43		64		85		100		100		Bidang Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Kearsipan
			Pengelolaan dan Pelestarian Arsip						1.580.000		2.125.000		2.000.000		2.050.000		2.100.000		9.855.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase pengelolaan arsip	%	-	-	15,00		29,00		60,00		73,00		100,00		100,00		Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
			Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan						671.000		900.000		1.000.000		1.100.000		1.200.000		4.871.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Persentase pengunjung arsip	%	-	-	16		34		59		83		100		100		Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip
			Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah						1.300.000		7.400.000		7.750.000		7.850.000		8.150.000		32.450.000	Sekretariat Daerah
				Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa	%	-	-	70		73		76		79		80		80		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
				Persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan	%	-	8,94	9,65		22,12		34,59		47,06		59,53		59,53		Biro Organisasi
				Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	%	-	-	90		91		92		93		95		95		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
			Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan						13.390.000		1.140.000		14.590.000		15.190.000		15.790.000		60.100.000	Sekretariat Daerah
				Persentase layanan liputan dan keprotokolan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Biro Umum

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi manajemen pemerintahan								156.278.399		158.337.595		170.978.979		183.839.318		196.683.086		866.117.377	
		Nilai SAKIP			Angka	75,94	80,18	80			82		83		84		85		85	
		Indeks Persepsi Anti Korupsi			Angka	3,66	3,43	3,45			3,47		3,48		3,49		3,5		3,5	
		Opini BPK			Opini	WTP	WTP	WTP			WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	
			Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/ Hukum Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah						2.150.000		3.000.000		4.200.000		5.050.000		5.900.000		20.300.000	Satuan Polisi Pamong Praja
				Persentase penegakan pelanggaran produk hukum daerah	%	-	-	100			100		100		100		100		100	Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
			Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi						852.750		1.008.809		1.184.873		1.459.428		1.724.414		6.230.274	Dinas Komunikasi dan Informatika
				Persentase ketersediaan data sektoral	%	60	65	74			79		89		95		100		100	Bidang Statistik

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Perencanaan Pembangunan Ekonomi						2.500.000		2.625.000		2.756.250		2.895.250		3.035.000		13.811.500	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase ketercapaian pelaksanaan program /kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD lingkup bidang perekonomian	%		-	90		90		90		90		90		90		Bidang Perekonomian
				Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang perekonomian	%		-	90		90		90		90		90		90		Bidang Perekonomian
			Perencanaan Pembangunan Pemerintahan Dan Sosial Budaya						2.984.900		3.113.400		3.241.500		3.367.000		3.525.000		16.231.890	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya	%	-	-	90		90		90		90		90		90		Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
				Persentase ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya	%	-	-	90		90		90		90		90		90		Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
			Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup						3.000.000		3.150.000		3.307.500		3.472.800		3.645.500		16.575.800	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD,	%	-	-	90		90		90		90		90		90		Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				dan RPJMN) lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup																
				Persentase ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumber daya alam dan lingkungan hidup	%	-	-	90		90		90		90		90		90		Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
			Perencanaan Pembangunan Daerah						7.700.000		8.085.000		8.482.000		8.906.000		9.362.400		42.535.400	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan	%	-	-	90		90		90		90		90		90		Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Peningkatan Pendapatan Asli Daerah						61.786.022		65.786.022		69.286.022		73.786.022		79.286.022		349.930.110	Badan Pengelola Pendapatan Daerah
				Persentase pemanfaatan informasi pendapatan daerah	%	-	-	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		Bidang Pengelolaan Data dan Pengembangan Pendapatan
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB	%	-	-	7,05		11,60		11,50		6,24		5,38		5,38		Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
				Persentase peningkatan penerimaan PKB	%	-	-	9,04		11,30		8,73		13,81		10,17		10,17		Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
				Persentase peningkatan kepatuhan wajib pajak	%	-	-	-		73,00		74,00		75,00		76,00		76,00		Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
				Persentase peningkatan penerimaan PAP	%	-	-	15,17		24,89		8,40		7,75		8,41		8,41		Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	%	-	-	19,96		2,02		10,59		10,60		11,85		11,85		Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada Dipisahkan	%	-	-	14,26		6,55		11,00		11,00		12,26		12,26		Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase peningkatan penerimaan PBBKB	%	-	-	8,26		11,86		7,24		4,98		6,49		6,49		Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
				Persentase peningkatan penerimaan Pajak Rokok	%	-	-	7,42		7,48		8,64		6,25		12,08		12,08		Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
				Persentase peningkatan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	%	-	-	9,98		0,30		0,38		2,84		9,54		9,54		Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
				Persentase pencapaian kinerja pendapatan daerah	%	-	-	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		Bidang Evaluasi dan Pembinaan
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang I	%	-	-	0,71		6,82		5,15		8,13		5,95		5,95		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang I	%	-	-	3,67		13,40		13,13		7,04		6,03		6,03		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
				Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Semarang I	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang I	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang II	%	-	-	9,65		11,86		8,96		14,12		10,34		10,34		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang II	%	-	-	4,02		7,10		6,98		3,74		3,20		3,20		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
				Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Semarang II	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang II	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang III	%	-	-	1,78		14,80		11,18		17,63		12,91		12,91		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang III	%	-	-	0,63		11,50		11,31		6,07		5,19		5,19		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
				Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Semarang III	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Semarang III	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Semarang	%	-	-	24,73		12,30		9,29		14,65		10,73		10,73		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Semarang	%	-	-	10,21		14,20		13,94		7,48		6,40		6,40		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
				Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Semarang	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Semarang	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Salatiga	%	-	-	15,06		10,89		8,23		12,97		9,50		9,50		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Salatiga	%	-	-	11,66		6,00		17,50		17,19		9,22		7,89		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
				Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Salatiga	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Salatiga	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kendal	%	-	-	2,70		12,80		9,67		15,24		11,16		11,16		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kendal	%	-	-	6,87		14,60		14,30		7,67		6,56		6,56		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
				Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Kendal	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Kendal	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Demak	%	-	-	19,48		16,74		12,65		19,94		14,60		14,60		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Demak	%	-	-	15,48		14,00		13,72		7,35		6,29		6,29		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
				Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Demak	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Demak	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Demak
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Grobogan	%	-	-	11,02		11,75		8,88		14,00		10,25		10,25		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Grobogan	%	-	-	6,92		20,70		20,32		10,90		9,32		9,32		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Grobogan																
				Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Grobogan	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Grobogan	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Surakarta	%	-	-	5,77		10,89		8,22		12,96		9,49		9,49		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Surakarta	%	-	-	3,61		13,80		13,50		7,24		6,19		9,00		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
				Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Surakarta	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Surakarta	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Klaten	%	-	-	7,85		12,37		9,35		14,73		10,79		10,79		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Klaten	%	-	-	6,51		23,90		23,44		12,57		10,76		10,76		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
				Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Klaten	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Klaten	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Sragen	%	-	-	9,31		12,44		9,40		14,82		10,85		10,85		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Sragen	%	-	-	15,37		7,70		7,53		4,04		3,45		3,45		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
				Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Sragen	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Sragen	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	-	-	15,42		11,16		8,43		13,30		9,74		9,74		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	-	-	10,79		12,80		12,52		6,71		5,74		5,74		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
				Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Wonogiri	%	-	-	12,60		9,80		9,59		5,14		4,40		4,40		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
				Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonogiri	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Wonogiri	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Wonogiri	%	-	-	14,05		5,91		9,22		14,54		10,65		10,65		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Karanganyar	%	-	-	6,37		8,96		6,77		10,68		7,82		7,82		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Karanganyar	%	-	-	8,25		7,70		7,52		4,03		3,45		3,45		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
				Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Karanganyar	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Karanganyar	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Boyolali	%	-	-	7,61		13,72		10,37		16,34		11,97		11,97		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Boyolali	%	-	-	8,22		9,00		8,79		4,71		4,03		4,03		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
				Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Boyolali	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Boyolali	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pati	%	-	-	17,32		13,90		13,58		7,28		6,23		6,23		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
				Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pati	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Pati	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pati	%	-	-	13,01		12,21		9,22		14,54		10,65		10,65		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Blora	%	-	-	9,76		13,37		10,10		15,92		11,66		11,66		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Blora	%	-	-	11,07		17,30		16,92		9,07		7,77		7,77		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
				Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Blora	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,30		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Blora	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Rembang	%	-	-	7,19		13,39		10,12		15,59		11,68		11,68		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Rembang	%	-	-	6,40		25,90		25,42		13,63		11,66		11,66		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Rembang	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Rembang	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kudus	%	-	-	3,68		17,77		13,43		21,17		15,50		15,50		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kudus	%	-	-	9,97		7,60		7,46		4,00		3,42		3,42		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
				Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Kudus	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Kudus	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Jepara	%	-	-	6,85		11,76		8,88		14,00		10,25		10,25		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Jepara	%	-	-	5,86		12,40		12,11		6,49		5,56		5,56		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
				Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Jepara	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Jepara	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Pekalongan	%	-	-	12,53		13,23		10,00		15,76		11,54		11,54		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Pekalongan	%	-	-	6,12		12,10		11,89		6,38		5,46		5,46		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
				Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Pekalongan	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Pekalongan	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pekalongan	%	-	-	14,50		15,23		11,50		18,14		13,28		13,28		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pekalongan	%	-	-	1,51		5,60		5,53		2,97		2,54		2,54		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
				Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pekalongan	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Pekalongan	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Batang	%	-	-	7,67		15,36		11,60		18,29		13,39		13,39		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Batang	%	-	-	2,10		15,60		15,32		8,21		7,03		7,03		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
				Persentase peningkatan penerimaan	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				n PAP diUPPD Kabupaten Batang																Kabupaten Batang
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Batang	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pemalang	%	-	-	8,02		13,17		9,95		15,68		11,48		11,48		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pemalang	%	-	-	0,75		7,60		7,48		4,01		3,43		3,43		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
				Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Pemalang	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Pemalang	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Tegal	%	-	-	20,45		11,68		8,82		13,91		10,19		10,19		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Tegal	%	-	-	2,53		6,50		6,40		3,43		2,94		2,94		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
				Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Tegal	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Tegal	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Tegal	%	-	-	0,45		16,71		12,62		19,90		14,57		14,57		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Tegal	%	-	-	0,18		3,30		3,25		1,74		1,49		1,49		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Tegal	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Tegal	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Brebes	%	-	-	9,01		9,25		6,99		11,01		8,06		8,06		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Brebes	%	-	-	3,98		1,00		1,01		0,54		0,46		0,46		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
				Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Brebes	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Daerah di UPPD Kabupaten Brebes																
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Banyumas	%	-	-	7,55		8,88		6,71		10,57		7,74		7,74		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Banyumas	%	-	-	8,56		6,80		6,64		3,56		3,05		3,05		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
				Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banyumas	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Banyumas	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Cilacap	%	-	-	5,86		9,45		7,14		11,26		8,25		8,25		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Cilacap	%	-	-	9,83		5,50		5,41		2,90		2,48		2,48		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
				Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Cilacap	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Cilacap	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Cilacap
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Purbalingga	%	-	-	8,04		7,14		5,39		8,50		6,23		6,23		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Purbalingga	%	-	-	1,91		10,10		9,91		5,31		4,55		4,55		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
				Persentase peningkatan penerimaan PAP di	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				UPPD Kabupaten Purbalingga																n Purbalingga
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Purbalingga	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	-	-	7,96		10,01		7,56		11,92		8,73		8,73		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	-	-	6,04		13,30		13,01		6,98		5,97		5,97		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
				Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Daerah diUPPD Kabupaten Banjarnegara																	ara
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Magelang	%	-	-	37,62		6,77		5,12		8,07		5,91		5,91			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Magelang	%	-	-	0,55		19,10		18,75		10,05		8,60		8,60			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
				Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Magelang	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Magelang	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Magelang	%	-	-	13,82		9,91		7,48		11,80		8,64		8,64			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB	%	-	-	16,10		7,90		7,70		4,13		3,53		3,53			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				di UPPD Kabupaten Magelang																n Magelang
				Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Magelang	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Magelang	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kebumen	%	-	-	4,94		7,74		5,84		9,21		6,75		6,75		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kebumen	%	-	-	6,34		9,10		8,92		4,78		4,09		4,09		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
				Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kebumen	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Kebumen	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Purworejo	%	-	-	12,04		13,24		10,00		15,77		11,55		11,55		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Purworejo	%	-	-	11,83		17,40		17,05		9,14		7,82		7,82		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
				Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purworejo	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Purworejo	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
				Persentase peningkatan penerimaan	%	-	-	11,10		9,58		7,24		11,41		8,35		8,35		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				n PKB di UPPD Kabupaten Temanggung																Kabupaten Temanggung
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Temanggung	%	-	-	24,10		11,40		11,13		5,97		5,11		5,11		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
				Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Temanggung	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Temanggung	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
				Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Wonosobo	%	-	-	8,39		12,42		9,38		14,79		10,83		10,83		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
				Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten	%	-	-	15,19		15,90		15,60		8,37		7,16		7,16		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Wonosobo																
				Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonosobo	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
				Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Wonosobo	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo
			Pengelolaan Keuangan Daerah						21.791.546		22.291.546		24.791.546		27.291.546		29.791.546		125.957.730	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase kabupaten/kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
				Persentase penetapan APBD tepat waktu	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Anggaran
				Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Akuntansi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Persentase realisasi serapan APBD	%	90	92	92		92		92		92		95		95		Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah	
			Pengelolaan Aset Daerah						8.063.318		9.063.318		10.063.318		10.813.318		11.563.318		49.566.590	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
				Persentase pemanfaatan aset daerah	%	57,5	60	62,5		65		67,5		70		72,5		72,5		Bidang Aset Daerah	
			Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP						200.000		350.000		367.500		385.875		405.170		1.708.545	Inspektorat	
				Persentase APIP berlisensi nasional/internasional	%	-	-	20		40		60		80		100		100		Inspektorat	
			Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat						12.250.448		13.500.000		15.320.000		16.640.000		17.522.000		75.232.448	Inspektorat	
				Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah III	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Irbanwil III
				Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah III	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Irbanwil III

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasaan lainnya wilayah III	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Irbanwil III
				Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasaan lainnya wilayah I	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Irbanwil I
				Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah I	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Irbanwil I
				Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasaan wilayah I	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Irbanwil I
				Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Irbansus
				Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasaan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Irbansus
				Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasaan lainnya	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Irbansus

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasaan wilayah II	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Irbanwil II
				Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasaan lainnya wilayah II	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Irbanwil II
				Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah II	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Irbanwil II
			Pembangunan Budaya Integritas						2.036.295		2.200.000		2.310.000		2.425.500		2.546.775		11.518.570	Inspektorat	
				Nilai Budaya Integritas	%	-	-	75,00		80,00		83,00		85,00		90,00		90,00		90,00	Inspektorat
			Program Manajemen Resiko						1.277.030		1.500.000		1.575.000		1.653.750		1.736.440		7.742.220	Inspektorat	
				Persentase OPD yang memiliki profil manajemen risiko	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Inspektorat
			Penataan Peraturan Perundang-Undangan						594.000		650.000		694.800		724.800		754.800		3.418.400	Sekretariat Daerah	
				Persentase efektifitas produk hukum daerah	%	-	-	90		91		92		93		94		94		94	Biro Hukum

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah						25.439.000		17.954.500		18.413.670		19.473.029		19.889.701		101.169.900	Sekretariat Daerah
				Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%	-	-	85		87		88		89		90		90		Biro Administrasi Pembangunan Daerah
				Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaannya sesuai target	%	-	-	80		82		83		84		85		85		Biro Administrasi Pembangunan Daerah
				Persentase OPD dan Kabupaten / Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu	%	-	-	87		87		88		88		88		88		Biro Administrasi Pembangunan Daerah
				Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Biro Administrasi Pembangunan Daerah
				Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya	%	-	-	80		85		90		95		100		100		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya	%	-	-	80		85		90		95		100		100		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
				Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	%	-	-	80		85		90		95		100		100		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
				Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya	%	-	-	85		85		90		95		100		100		Biro Kesejahteraan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaannya	%	-	-	85		85		90		95		100		100		Biro Kesejahteraan Rakyat
				Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	%	60	64	68		74		83		92		100		100		Biro Organisasi
				Persentase Kabupaten /Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat	%	14	14	28		42		57		71		85		85		Biro Organisasi
				Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat	%	70	73	78		82		87		92		97		97		Biro Organisasi
				Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian,	%	100	90	85		89		90		93		95		95		Biro Perekonomian Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya																
				Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	%	100	88	85		90		92		96		98		98		Biro Perencanaan Daerah
				Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100	88	87		90		93		95		97		97		Biro Perencanaan Daerah
			Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah						3.653.000		4.060.000		4.985.000		5.495.000		5.995.000		24.188.000	Sekretariat Daerah
				Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaannya	%	-	-	100		100		100		100		100		100		Biro Administrasi Pembangunan Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	-	-	80		85		90		95		100		100		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
				Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	-	-	80		85		90		95		100		100		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
				Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	-	-	80		85		90		95		100		100		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
				Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan,	%	-	-	85		85		90		95		100		100		Biro Kesejahteraan Rakyat

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya																
				Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	-	-	85		85		90		95		100		100		Biro Kesejahteraan Rakyat
				Persentase perangkat daerah bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	-	-	100		100		100		100		100		100		Biro Umum
				Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	90	80		83		85		89		90		90		Biro Perekonomian Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase tingkat kesehatan BUMD	%	100	90	80		82		85		88		90		90		Biro Perekonomian Daerah
				Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100	92	82		85		87		90		92		92		Biro Perekonomian Daerah
	Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik								116.280.572		75.680.748		60.385.539		63.834.271		68.710.183		384.891.313	
		Nilai Kemataan Organisasi Daerah			Angka	-	-	17		20		23		26		29		29		
		Indeks Sistem Merit			Angka	-	0,66	0,67		0,68		0,69		0,7		0,71		0,71		
			Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah						20.858.950		23.418.110		24.369.421		25.956.912		27.803.557		122.406.950	Badan Kepegawaian Daerah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang terevaluasi kinerjanya	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
				Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui tugas belajar dan ijin belajar	%	20,00	20,00	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
				Persentase layanan administrasi kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Mutasi
				Persentase penanganan kasus kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
				Persentase sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan dan terintegrasi	%	20,00	20,00	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		Bidang Informasi Kepegawaian
				Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya	%	20,00	20,00	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pengembangan Kompetensi ASN						91.597.170		48.300.608		32.066.520		33.886.608		36.867.377		242.718.283	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
				Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
				Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
				Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
				Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	100,00	Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
			Sertifikasi Kompetensi ASN						724.452		678.030		665.598		706.751		750.749		3.525.580	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
				Persentase PNS yang lulus uji kompetensi	%	90,00	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00	90,00	Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah						3.100.000		3.284.000		3.284.000		3.284.000		3.288.500		16.240.500	Sekretariat Daerah
				Persentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	%	-	-	39		45		51		57		63		63		Biro Organisasi
				Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	%	75	80	83		84		85		85		86		86		Biro Organisasi
				Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	50	50	52,29		67,99		78,59		89,19		100		100		Biro Organisasi
				presentase Kabupaten /Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	%	-	-	14		23		31		40		48		48		Biro Organisasi
Misi 3: Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran									3.222.227.918		3.070.634.452		3.223.852.703		3.207.794.396		3.266.431.086		15.985.171.783	
Kemiskinan di Jawa Tengah yang semakin menurun secara merata									1.886.128.689		1.403.031.459		1.468.690.655		1.550.625.654		1.557.246.079		7.865.722.536	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		Angka Kemiskinan			%	12,23	11,19	10,57-9,57		9,81-8,81		9,05-8,05		8,27-7,27		7,48-6,48		7,48-6,48		
		Indeks Gini			Angka	0,36	0,35	0,35		0,34		0,33		0,32		0,3		0,3		
	Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin pedesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah																			
		Persentase penduduk miskin perkotaan			%	10,55	9,67	9,54		9,44		9,37		9,21		9,17		9,17		
		Persentase penduduk miskin pedesaan			%	13,92	12,8	12,74		12,65		12,35		12,12		11,97		11,97		
		Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpeng			Ribu Rupiah	451,28	-	464,81		478,76		493,12		507,91		523,15		523,15		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		hasilan terendah																		
		Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah			Angka	60,83	-	60,85		61		61,25		61,5		61,75		61,75		
		Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan dengan keluhan kesehatan			%	30,86	-	30,75		30,5		30,25		30		29,75		29,75		
			Pembinaan Pendidikan Khusus						24.163.287		16.763.545		17.008.545		17.008.545		17.108.545		92.052.467	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				APK SLB	%	63,63	65,39	65,74		66,09		66,44		66,79		67,14		67,14		Bidang Pembinaan Diksus
			Pembinaan SMK						706.029.600		451.825.502		482.442.743		485.442.743		486.496.600		2.612.237.188	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				APK SMK	%	47,81	48,09	48,36		48,63		48,91		49,18		49,46		49,46		Bidang Pembinaan SMK

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pembinaan SMA						736.71 6.040		434.02 6.972		435.32 6.972		436.53 2.971		437.70 1.969		2.480.3 04.924	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				APK SMA	%	26,11	26,7	27,03		27,36		27,69		28,02		28,36		28,36		Bidang Pembinaan SMA
			Pelayanan Kesehatan						248.88 8.528		249.17 3.832		249.50 0.000		250.00 0.000		249.50 0.000		1.247.0 62.360	Dinas Kesehatan
				Cakupan penduduk miskin yang mempunyai jaminan kesehatan	%	100	100	100		100		100		100		100		100		Bidang Pelayanan Kesehatan
			Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi						23.310. 000		50.403. 262		56.350. 000		109.01 9.533		100.69 2.022		339.774 .817	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
				Persentase akses air minum perkotaan	%	80,98	84,15	86,15		88,15		90,15		92,15		94,15		94,15		Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
				Persentase akses sanitasi air limbah domestik	%	80,00	81,50	83,50		85,50		87,50		89,50		91,50		91,50		Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
				Persentase akses air minum perdesaan	%	72,80	74,55	76,30		78,05		79,80		81,55		83,30		83,30		Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pembangunan Perumahan						6.510.000		15.750.000		33.750.000		43.000.000		43.500.000		142.510.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
				Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	-	-	-		4,57		7,7		10,39		12,5		12,5		Bidang Perumahan
				Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	%	0,3	2,35	4,94		10,35		19,31		28,28		37,24		37,24		Bidang Perumahan
			Penanganan Kawasan Permukiman						5.165.000		5.681.500		6.249.650		6.874.615		7.562.077		31.532.842	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
				Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	16,62	17,14	2,11		4,21		13,79		23,37		32,95		32,95		Bidang Kawasan Pemukiman
			Rehabilitasi Sosial						61.748.697		77.686.290		81.273.025		90.242.161		97.723.318		408.673.491	Dinas Sosial
				Persentase penanganan PMKS terlantar yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti	%	-	-	0,82		1,64		2,46		3,28		4,10		4,10		Bidang Rehabilitasi Sosial

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	-	-	0,03		0,06		0,09		0,12		0,15		0,15		Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	-	-	0,03		0,06		0,09		0,13		0,16		0,16		Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	-	-	0,04		0,07		0,11		0,14		0,18		0,18		Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	-	-	0,04		0,09		0,13		0,17		0,22		0,22		Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	-	-	0,03		0,05		0,08		0,10		0,13		0,13		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	-	-	0,03		0,05		0,08		0,11		0,13		0,13		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Turusgede
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	-	-	0,03		0,06		0,10		0,13		0,16		0,16		Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik Pangrukti Mulyo
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	-	-	0,02		0,04		0,06		0,08		0,11		0,11		Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Pendowo

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantii	%	-	-	0,03		0,06		0,09		0,12		0,15		0,15		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Potroyuda n
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantii	%	-	-	0,04		0,08		0,12		0,17		0,21		0,21		Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyat ama
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantii	%	-	-	0,05		0,09		0,14		0,18		0,23		0,23		Panti Pelayanan Sosial Anak Taruna Yodha
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantii	%	-	-	0,03		0,07		0,10		0,14		0,17		0,17		Panti Pelayanan Sosial Anak Dharma Putera
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantii	%	-	-	0,03		0,06		0,08		0,11		0,14		0,14		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Adi Yuswo
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantii	%	-	-	0,04		0,08		0,13		0,17		0,21		0,21		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantii	%	-	-	0,02		0,04		0,06		0,07		0,09		0,09		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagara n
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantii	%	-	-	0,06		0,11		0,17		0,22		0,28		0,28		Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Grahita Raharjo

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	-	-	0,01		0,03		0,04		0,06		0,07		0,07		Panti Pelayanan Sosial Anak Tawangmangu
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	-	-	0,04		0,07		0,11		0,14		0,18		0,18		Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik Samekto Karti
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	-	-	0,03		0,06		0,08		0,11		0,14		0,14		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	-	-	0,04		0,09		0,13		0,18		0,22		0,22		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bojongbatra
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	-	-	0,03		0,06		0,09		0,13		0,16		0,16		Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Penganthi
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	-	-	0,05		0,09		0,14		0,18		0,23		0,23		Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	-	-	0,01		0,03		0,04		0,06		0,07		0,07		Panti Pelayanan Sosial Anak Kasih Mera Demak

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantii	%	-	-	0,01		0,03		0,04		0,06		0,07		0,07		Panti Pelayanan Sosial Anak Pamardi Utomo Boyolali
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantii	%	-	-	0,02		0,03		0,05		0,07		0,08		0,08		Panti Pelayanan Sosial Anak Sukomulyo Tegal
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantii	%	-	-	0,02		0,05		0,07		0,10		0,12		0,12		Panti Pelayanan Sosial Anak Woro Wiloso Salatiga
				Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pantii	%	-	-	0,02		0,04		0,07		0,09		0,11		0,11		Panti Pelayanan Sosial Anak Kumuda Putera Puteri Magelang
			Penanganan Fakir Miskin						2.400.000		7.675.000		7.300.000		7.300.000		6.825.000		31.500.000	Dinas Sosial
				Persentase fakir miskin yang telah tervalidasi	%	-	-	0,06		0,11		0,17		0,23		0,29		0,29		Bidang Penanganan Fakir Miskin
			Perlindungan Dan Jaminan Sosial						3.800.000		4.180.000		4.598.000		5.057.800		5.413.580		23.049.380	Dinas Sosial
				Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif	%	-	-	0,36		0,73		1,09		1,46		1,82		1,82		Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak						6.336.940		5.719.000		6.059.000		6.359.000		6.642.642		31.116.582	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	
				Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi	%			25		30		30		30		30		30		Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	
			Penataan Administrasi Kependudukan						3.075.000		3.225.000		3.300.000		3.400.000		3.650.000		16.650.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	
				Tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akte kelahiran	%	87,42	87,5	90		92		95		97		100		100		100	Bidang Fasilitas Layanan Adminduk
				Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per wajib KTP-el	%	98,33	93,4	100		100		100		100		100		100		100	Bidang Fasilitas Layanan Adminduk

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat						3.585.000		7.100.000		7.200.000		7.500.000		7.850.000		33.235.000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
				Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang difasilitasi	%	15,02	30,04	37,8			46,25		54,71		63,16		71,61		71,61	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana						5.205.934		5.779.619		6.399.619		7.244.619		8.024.619		32.654.410	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	28,45	27,43	28,00			28,50		29,00		29,50		30,00		30,00	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE
				Unmetneed KB	%	11,71	13,06	12,75			12,25		11,75		11,25		10,75		10,75	Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE
			Keluarga Sejahtera						273.568		718.880		787.769		804.045		900.000		3.484.262	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
																				ian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Persentase UPPKS yang aktif	%	87,68	87,73	89,75		89,9		90		90,1		90,2		90,2		Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
			Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda						1.250.000		-		-		-		-		1.250.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
				Persentase peningkatan kelompok wirausaha pemuda	%	20	20	20		-		-		-		-		-		Bidang Kepemudaan
			Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan						-		10.448.000		11.450.000		12.092.000		12.518.000		46.508.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
				Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda	%	-	-	-		6,52		9,78		13,04		16,30		16,30		Bidang Kepemudaan
			Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut						300.000		200.000		200.000		200.000		200.000		1.100.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir	%	-	-	10		15		20		25		30		30		Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pengembangan Ketenagalistrikan						16.309.015		20.360.850		19.787.250		19.149.250		18.110.500		93.716.865	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin	%	3,93	6,18	8,83		15,91		22,98		30,06		37,13		37,13		Bidang Ketenagalistrikan
				Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo	%	0,21	0,39	0,60		0,93		1,26		1,59		1,92		1,92		Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
				Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria	%	0,26	0,38	0,64		1,11		1,59		2,06		2,53		2,53		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
				Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara	%	0,27	0,44	0,62		0,95		1,28		1,62		1,95		1,95		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan	%	0,65	0,94	1,13		1,88		2,64		3,39		4,15		4,15		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
				Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara	%	0,59	0,76	0,91		1,94		2,98		4,02		5,06		5,06		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
				Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran - Telomoyo	%	0,11	0,34	0,58		0,84		1,10		1,36		1,62		1,62		Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
				Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan	%	0,45	0,74	1,03		1,97		2,91		3,86		4,80		4,80		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
				Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu	%	0,16	0,31	0,59		0,90		1,21		1,51		1,82		1,82		Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan	%	0,47	0,64	1,05		2,04		3,03		4,02		5,01		5,01		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
				Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah	%	0,41	0,56	0,66		1,18		1,70		2,21		2,73		2,73		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
				Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi	%	0,34	0,50	0,71		1,47		2,22		2,98		3,73		3,73		Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
				Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang - Demak	%	-	0,17	0,31		0,69		1,07		1,45		1,82		1,82		Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
			Pengembangan Dan Penempatan Transmigrasi						3.082.346		3.390.000		3.729.000		4.102.000		4.512.000		18.815.346	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi	%	-	3,36	3,37		3,38		3,39		3,4		3,41		3,41		Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
				Persentase kenaikan calon transmigran dilatih di bidang pertanian	%	-	3,36	3,37		3,38		3,39		3,4		3,41		3,41		Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A
			Kelitbangan Iptek dan Inovasi Daerah						2.680.000		2.500.000		2.614.875		2.653.165		2.800.000		13.248.040	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase inovasi dan teknologi yang diterapkan	%	-	-	75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		Bidang Inovasi dan Teknologi
	Menurunnya pengannguran terbuka								25.299.734		30.424.207		33.364.207		36.643.207		39.515.207		165.246.562	
		Tingkat Pengannguran Terbuka			%	4,57	4,51	4,43		4,33		4,23		4,13		4		4		
		Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang			%	5,71	0	5,7		5,65		5,6		5,55		5,5		5,5		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		bekerja kurang dari 15 jam per minggu																		
			Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja						10.289.099		13.189.099		14.189.099		15.439.099		16.689.099		69.795.495	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	6,19	6,49	6,80		7,09		7,39		7,89		8,19		8,19		Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
				Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	25,50	28,57	31,00		33,00		35,00		37,50		38,50		38,50		Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
				Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	1,50	2,90	3,10		3,90		4,00		4,10		4,20		4,20		Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
				Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%	0,55	0,75	1,00		1,25		1,50		2,00		2,25		2,25		Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
				Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki	%	-	-	1,12		1,33		1,12		1,33		1,12		1,12		Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri																
				Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%	-	50,00	50,00		8,33		7,69		7,69		6,67		6,67		Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A
				Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	%	18,00	44,07	47,06		28,00		21,88		17,95		13,04		13,04		Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A
				Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerjaan migran	%	9,00	25,00	20,00		33,00		25,00		20,00		16,00		16,00		Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A
			Peningkatan Kesempatan Kerja						6.731.108		7.001.108		8.051.108		9.151.108		9.801.108		40.735.540	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	67,84	68,50	69,04		69,54		70,09		70,47		71,01		71,01		Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
				Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal	%	50,00	53,00	56,00		59,00		62,00		65,00		68,00		68,00		Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
			Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan						3.543.767		3.898.000		4.288.000		4.717.000		5.189.000		21.635.767	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	%	86,48	86,96	87,11		87,26		87,41		87,56		87,70		87,70		Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
				Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	-	6,30	15,00		22,00		29,00		36,00		43,00		36,00		Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
				Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	43,33	42,78	43,77		44,66		45,65		46,62		47,61		47,61		Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase perusahaan yang memenuhi ketentuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	%	21,90	22,31	22,68		23,05		23,42		23,79		24,15		24,15		Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
				Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	91,38	92,11	90,00		92,50		93,00		95,50		96,00		96,00		Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A
			Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan						4.735.760		6.336.000		6.836.000		7.336.000		7.836.000		33.079.760	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
				Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	98,25	97,56	94,86		92,09		89,26		86,21		82,97		82,97		Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan WASNAKER
				Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	24,44	24,69	24,94		25,29		25,54		25,89		26,14		26,14		Balai Keselamatan Kerja Kelas A

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	98,25	97,56	94,86		92,09		89,26		86,21		82,97		82,97		SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH SEMARANG
				Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	98,25	97,56	94,86		92,09		89,26		86,21		82,97		82,97		SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH PATI
				Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	98,25	97,56	94,86		92,09		89,26		86,21		82,97		82,97		SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH SURAKARTA
				Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	98,25	97,56	94,86		92,09		89,26		86,21		82,97		82,97		SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH MAGELANG
				Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	98,25	97,56	94,86		92,09		89,26		86,21		82,97		82,97		SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH BANYUMAS

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	98,25	97,56	94,86		92,09		89,26		86,21		82,97		82,97		SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH PEKALONGAN
Stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan									1.336.099.229		1.667.602.993		1.755.162.048		1.657.168.742		1.709.185.007		8.119.449.247	
		Pertumbuhan Ekonomi			%	5,26	5,32	5,3-5,7		5,4-5,7		5,4-5,8		5,5-5,8		5,6-6,0		5,6-6,0		
		Inflasi			%	3,71	2,82	3,5±1		3,0±1		3,0±1		3,0±1		3,0±1		3,0±1		
		PDRB per kapita			Juta Rupiah	34,23	36,78	37,44		39,25		41,15		43,2		45,35		45,35		
		Indeks Williamson			Angka	0,62	0	0,6		0,59		0,58		0,57		0,56		0,56		
	Meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah disertai kesejahteraan								1.336.099.229		1.667.602.993		1.755.162.048		1.657.168.742		1.709.185.007		8.119.449.247	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
	teraan petani, dan peran investasi terhadap ekonomi daerah																			
		Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan			%	1,66	2,63	2,9		2,9		3		3		3,1		3,1		
		Pertumbuhan sektor industri pengolahan			%	4,33	4,35	4,85		5,1		5,35		5,6		5,65		5,65		
		Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa			%	6,01	5,7	5,67		5,67		5,7		5,7		5,9		5,9		
		Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD			%	3	3	3,15		3,15		3,15		3,2		3,2		3,2		
		Pertumbuhan investasi			%	34,98	15	9		9		9		10		10		10		
		Nilai Tukar Petani			Angka	100,4	102,25	101,2		102,42		102,72		102,96		103,15		103,15		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Peningkatan dan Pembangunan Jalan, dan Penggantian Jembatan						410.74 0.640		520.74 0.640		585.74 0.640		466.51 5.591		475.51 5.591		2.459.2 53.102	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
				Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksanaan Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	-	-	35,65		36,48		38		38,76		40,13		40,13		Bidang Pelaksanaan Jalan Wilayah Timur
				Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksanaan Jalan Pembangunan Wilayah Barat	%	-	-	40,18		41,84		44,24		46,11		48,35		48,35		Bidang Pelaksanaan Jalan Wilayah Barat
			Rehabilitasi/ Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi						255.87 9.442		270.56 7.145		284.63 1.494		299.89 8.610		300.10 2.712		1.411.0 79.403	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
				Persentase panjang jalan provinsi	%	-	-	87,12		87,23		87,72		88,08		88,43		88,43		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal																Tegal
				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	-	-	94,89		95,04		95,7		96,18		96,65		96,65		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pekalongan
				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap	%	-	-	90,7		90,79		91,18		91,47		91,75		91,75		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Cilacap
				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang	%	-	-	96,33		96,46		97,05		97,47		97,89		97,89		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang	%	-	-	90,65		90,8		91,46		91,93		92,4		92,4		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	-	-	96,12		96,27		96,93		97,4		97,87		97,87		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati	%	-	-	86,45		86,61		87,32		87,83		88,33		88,33		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	-	-	81,71		81,94		82,96		83,69		84,41		84,41		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
				Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta	%	-	-	91,75		92,01		93,13		93,93		94,73		94,73		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.
			Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku					123.23 0.122		129.55 3.134		135.65 5.791		144.58 8.580		151.86 8.009		684.895 .636		Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi	%	80,00	82,00	82,50		83,00		83,50		84,00		84,50		84,50		Bidang Irigasi dan Air Baku
				Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	%	58,50	60,89	61,80		62,80		63,80		64,80		65,80		65,80		Bidang Irigasi dan Air Baku
				Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Pemali Comal
				Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Pemali Comal
				Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Bodri Kuto
				Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Bodri Kuto

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Serang Lusi Juana
				Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Serang Lusi Juana
				Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Bengawan Solo
				Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Bengawan Solo
				Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
				Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Serayu Citanduy.
				Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Serayu Citanduy.
			Penyelenggaraan Penataan Ruang						1.700.000		1.844.827		2.036.660		2.151.818		2.269.848		10.003.153	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
				Persentase rencana tata ruang kabupaten/kota yang mendapatkan rekomendasi rekom Gub	%	2,85	14,28	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		Bidang Penataan Ruang
				Persentase rencana tata ruang provinsi yang tersusun	%	1,64	3,28	6,67		13,34		20,01		26,68		33,35		33,35		Bidang Penataan Ruang

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Peningkatan Ketahanan Pangan						19.070.000		28.070.000		28.820.000		29.820.000		30.820.000		136.600.000	Dinas Ketahanan Pangan
				Ketersediaan protein pangan beragam dan berkualitas	Gram/kapita/hari	114,46	114,46	107,00		107,20		107,40		107,60		107,80		107,80		Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
				Ketersediaan energi pangan beragam dan berkualitas	kkal/kapita/hari	4.027,00	4.027,00	4.000,00		4.005,00		4.010,00		4.015,00		4.020,00		4.020,00		Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
				Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	87,50	100,00	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
				CV harga pangan strategis beras	%	2,60	4,38	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
				CV harga pangan strategis bawang merah	%	17,39	20,18	29,00		28,00		27,00		26,00		25,00		25,00		Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
				CV harga pangan strategis cabai	%	40,70	22,60	44,00		43,00		42,00		41,00		40,00		40,00		Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
				Persentase cadangan pangan yang dikelola	%	127,69	137,29	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
				Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan	Angka	-	0,34	0,44		0,56		0,77		0,89		1,00		1,00		Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Rasio konsumsi pangan lokal	Angka	0,12	0,21	0,11		0,12		0,13		0,14		0,15		0,15		Bidang Konsumsi dan Pengane k aragaman Pangan
				Konsumsi pangan beras	kg/kapit a/tahun	99,40	94,92	99,10		98,80		98,50		98,20		97,80		97,80		Bidang Konsumsi dan Pengane k aragaman Pangan
				Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur	kg/kapit a/tahun	82,40	83,34	83,00		84,00		85,00		86,00		87,00		87,00		Bidang Konsumsi dan Pengane k aragaman Pangan
				Konsumsi kelompok pangan hewani	kg/kapit a/tahun	29,40	30,17	30,00		31,00		32,00		33,00		34,00		34,00		Bidang Konsumsi dan Pengane k aragaman Pangan
				Persentase pengawasa n keamanan pangan segar	%	91,43	96,93	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		Bidang Keamanan Pangan
				Persentase jaminan mutu pangan yang diterbitkan	%	-	-	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		Balai Peningkat an Mutu dan Keamanan Pangan
			Pengembang an Perhubung an Darat						129.18 1.634		276.23 7.026		256.20 9.309		232.25 1.758		245.79 1.204		1.139.6 70.931	Dinas Perhubung an
				Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	%	7,48	7,74	9,71		21,42		29,14		42,85		52,34		52,34		Bidang Lalu Lintas

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	4,55	9,09	10,00		20,00		30,00		40,00		50,00		50,00		Bidang Lalu Lintas
				Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	5,88	11,76	15,38		30,77		46,15		61,54		76,92		76,92		Bidang Lalu Lintas
				Persentase jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	%	-	1,16	3,53		7,16		10,84		14,63		18,52		18,52		Bidang Lalu Lintas
				Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	%	3,93	4,33	4,64		4,87		5,34		5,49		5,68		5,68		Bidang Angkutan Jalan
				Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai	%	35,47	36,35	38,25		39,56		41,02		42,34		43,21		43,21		Bidang Angkutan Jalan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B																
				Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	63,05	63,68	63,99		64,62		65,17		65,96		66,43		66,43		Bidang Angkutan Jalan
				Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	%	4,00	8,00	9,52		23,81		33,33		38,10		42,86		42,86		Bidang Angkutan Jalan
				Persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum	%	47,08	74,73	78,31		82,06		86,00		90,14		94,45		94,45		Bidang Angkutan Jalan
				Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan	%	-	-	10,94		21,88		31,25		37,50		43,75		43,75		Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
				Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan	%	3,85	3,85	4,55		13,64		27,27		36,36		45,45		45,45		Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				sebidang Kereta Api																
				Persentase Fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis	%	9,09	18,18	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
				Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	46,56	47,38	48,92		50,15		51,18		52,00		52,51		52,51		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
				Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	-	5,56	6,25		12,50		18,75		25,00		31,25		31,25		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
				Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana	%	45,57	46,22	47,60		49,17		50,28		51,20		52,03		52,03		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Perhubungan Wilayah III Kelas A																
				Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	5,56	11,11	12,50		25,00		37,50		50,00		62,50		62,50		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
				Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	76,45	76,81	77,36		78,08		78,53		79,17		79,53		79,53		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
				Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	3,33	6,67	7,69		15,38		23,08		30,77		38,46		38,46		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
				Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai	%	81,89	82,04	82,26		82,49		82,87		83,09		83,55		83,55		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A																Kelas A
				Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	3,13	6,25	6,90		13,79		20,69		27,59		34,48		34,48		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
				Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	%	5,86	12,70	17,26		21,82		31,60		33,55		34,85		34,85		Balai Transportasi Jawa Tengah
			Pembinaan dan Pengawasan Koperasi						5.558.340		6.525.000		8.275.000		9.550.000		10.575.000		40.483.340	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Persentase koperasi sehat	%	19,86	20,92	22,17		23,41		24,86		25,90		27,15		27,15		Bidang Pengawasan
				Persentase koperasi aktif	%	82,81	83,42	84,20		84,52		84,83		85,03		85,19		85,19		Bidang Pengawasan
			Pemasyarakatan Perkoperasian						2.886.660		3.500.000		4.750.000		5.250.000		6.250.000		22.636.660	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase pertumbuhan anggota koperasi provinsi	%	40,94	34,09	37,87		42,95		50,06		57,42		66,20		66,20		Bidang Kelembagaan
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi						2.350.000		5.850.000		6.000.000		6.500.000		7.000.000		27.700.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Persentase koperasi provinsi berkualitas	%	61,69	71,50	72,50		73,50		74,50		75,50		76,50		76,50		Bidang Kelembagaan
			Pendidikan Perkoperasian dan UKM						16.296.780		17.046.780		18.046.780		19.046.780		20.046.780		90.483.900	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Persentase sumberdaya manusia koperasi dan UKM yang terampil	%	71,01	72,81	75,00		78,00		80,00		82,00		83,00		83,00		Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.
			Pengembangan Akses Pembiayaan Bagi KUKM						1.905.000		2.155.000		2.655.000		3.405.000		4.405.000		14.525.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Persentase KUKM yang mengakses kredit perbankan	%	30,43	31,03	31,23		31,55		31,78		31,98		32,14		32,14		Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan
			Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Usaha KUKM						17.355.000		17.500.000		18.750.000		20.000.000		21.250.000		94.855.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Persentase pertumbuhan tenaga kerja	%	48,98	55,48	55,68		55,88		56,08		56,28		56,48		56,48		Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				koperasi provinsi dan UKM yang dibina																n
				Persentase pertumbuhan omset koperasi provinsi dan UKM yang dibina	%	71,13	73,93	74,13		74,33		74,53		74,73		74,93		74,93		Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan
			Peningkatan Produktivitas KUKM						2.490.000		3.000.000		3.550.000		4.700.000		5.500.000		19.240.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Persentase pertumbuhan profit KUKM yang dibina	%	32,81	24,98	20,92		23,02		25,22		27,52		29,92		29,92		Bidang Bina Usaha
			Perluasan Jaringan Pemasaran dan Usaha KUKM						9.870.000		13.370.000		13.620.000		13.870.000		14.120.000		64.850.000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
				Persentase pertumbuhan pangsa pasar produk Koperasi dan UKM	%	5,63	5,65	5,80		5,95		6,10		6,25		6,40		6,40		Bidang Bina Usaha
			Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal						1.450.200		1.753.700		2.104.000		2.526.000		3.030.200		10.864.100	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Persentase bahan kajian potensi penanama	%	-	-	60		65		70		75		80		80		Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				n modal yang dipromosikan																
			Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal						3.097.680		3.629.999		4.367.000		5.240.000		6.288.000		22.622.679	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
				Rasio jumlah ijin usaha dan / atau izin komersial / izin operasional terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal	%	-	-	14		21		22		23		24		24		Bidang Promosi PM
				Rasio jumlah realisasi kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM terhadap jumlah kepeminatan kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM	%	-	-	22		23		24		25		26		26		Bidang Promosi PM
			Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal						1.431.620		1.685.385		2.190.700		2.628.800		3.154.600		11.091.105	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Persentase realisasi proyek penanaman modal	%	-	-	15		15		15		15		15		15		15	Bidang Pengawasan dan Pengendalian PM
			Pengembangan Perikanan Tangkap						9.250.000		15.175.000		15.125.000		15.175.000		14.025.000		68.750.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
			Produksi Perikanan Tangkap		Ton	437.936,36	446.277,16	393.150		412.807,50		433.447,88		455.120,26		477.876,28		477.876,28			Bidang Perikanan Tangkap
			Program Usaha dan Pengembangan Komoditas						11.200.000		22.650.000		23.650.000		24.650.000		25.650.000		107.800.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
				Persentase peningkatan produksi benih	%	-	-	5,00		10,00		15,00		20,00		25,00		25,00		25,00	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A
				Produksi perikanan budidaya	Ton	485.689,98	510.324,49	464.608,41		487.838,83		512.230,77		537.842,31		564.734,42		564.734,42			Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
			Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut						3.000.000		1.325.000		1.675.000		2.025.000		2.375.000		10.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				Persentase peningkatan produksi garam	%	-	-	5		10		15		20		25		25		25	Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan						5.300.000		5.800.000		6.350.000		7.100.000		7.850.000		32.400.000	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu	%	-	-	10,00			20,00		30,00		40,00		50,00		50,00	Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A
				Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan	%	-	-	5,00			10,00		15,00		20,00		25,00		25,00	Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
			Pengembangan Destinasi Pariwisata						25.686.943		26.986.943		27.236.943		27.486.943		27.736.943		135.134.715	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
				Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP	%	17,39	34,78	43,48			52,17		60,87		69,57		78,26		78,26	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
				Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	%	5,00	10,00	14,00			28,00		42,00		56,00		70,00		70,00	Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
			Pengembangan Pemasaran Pariwisata						17.000.000		17.750.000		18.750.000		19.750.000		20.250.000		93.500.000	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	40.118.470,00	44.130.317,00	46.645.745,00		49.631.073,00		53.204.510,00		57.673.689,00		62.748.973,00		62.748.973,00		Bidang Pemasaran Pariwisata
				Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	781.107,00	819.381,00	857.710,00		910.030,00		969.182,00		1.037.994,00		1.118.957,00		1.118.957,00		Bidang Pemasaran Pariwisata
			Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif						5.768.772,00											Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
				Persentase lembaga dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	%	20,00	20,00	20,00		-		-		-		-		-		Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
			Pengembangan SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif						-		6.368.772		7.118.772		8.118.772		9.118.772		30.725.088	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
				Persentase SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	15,96	17,02	-		25,53		31,91		35,11		38,30		38,30		Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
				Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi	%	20,00	20,00	-		60,00		80,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
																					Kreatif
			Pengembangan Agribisnis						145.67 7.712		146.17 7.712		148.17 7.712		148.67 7.712		149.67 7.712		738.388 .560		Dinas Pertanian dan Perkebunan
				Persentase jaringan irigasi tersier yang baik	%	16,00	16,38	16,88		17,38		17,88		18,38		18,88		17,88			Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
				Persentase penambahan alsintan	%	-	-	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00			Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
				Persentase peningkatan Produksi Kedelai	%	2,58	2,10	2,10		2,10		2,10		2,10		2,10		2,10			Bidang Tanaman Pangan
				Persentase peningkatan Produksi Jagung dan sereal lainnya	%	0,40	0,30	0,30		0,30		0,30		0,30		0,30		0,30			Bidang Tanaman Pangan
				Persentase peningkatan Produksi Padi	%	0,40	0,70	0,70		0,70		0,70		0,70		0,70		0,70			Bidang Tanaman Pangan
				Persentase peningkatan Produksi Bawang Merah	%	0,25	3,80	3,80		3,80		3,80		3,80		3,80		3,80			Bidang Hortikultura
				Persentase peningkatan Produksi Cabe Besar	%	0,25	3,80	3,80		3,80		3,80		3,80		3,80		3,80			Bidang Hortikultura
				Persentase peningkatan Produksi kopi	%	1,00	2,50	2,50		2,50		2,50		2,50		2,50		2,50			Bidang Perkebunan
				Persentase peningkatan Produksi Tebu	%	-	0,50	0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		0,50			Bidang Perkebunan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase peningkatan Produksi Kelapa	%	1,00	0,50	0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		Bidang Perkebunan
				Persentase peningkatan kapasitas kelompok pengolahan hasil	%	-	-	2,50		2,50		2,50		2,50		2,50		2,50		Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
				Persentase layanan Sertifikasi benih	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
				Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Semarang	%	-	-	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang
				Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta	%	-	-	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta
				Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas	%	-	-	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas
				Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan	%	-	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase penurunan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)	%	1,04	0,82	0,69		0,61		0,53		0,45		0,43		0,43		Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A
				Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian	%	100,00	100,00	100,00		-		-		-		-		-		BALAI PELATIHAN PERTANIAN
			Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian						6.105.000		13.205.000		13.953.000		14.705.000		15.455.000		63.423.000	Dinas Pertanian dan Perkebunan
				Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	%	10,00	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
				Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian	%	100,00	100,00	-		100		100		100		100		100		BALAI PELATIHAN PERTANIAN
			Pengembangan Agribisnis Peternakan						68.127.044		69.885.765		70.852.082		71.747.213		72.585.471		353.197.575	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
				Persentase kenaikan fasilitas sarpras peternakan	%	-	3,10	4,57		2,00		3,00		2,00		2,00		11,50		Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
				Persentase kenaikan fasilitas penyuluhan	%	-	7,00	9,52		8,69		12,00		14,28		15,62		76,00		Bidang Prasarana, Sarana dan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				n dan kemitraan																Penyuluhan
				Populasi ternak	(ST)/(AU)	3.330.188,00	3.340.549,00	3.387.541,00		3.498.613,00		3.648.570,00		3.819.014,00		4.013.001,00		4.013.001,00		Bidang Budidaya
				Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan betina produktif	%	-	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Bidang Veteriner
				Persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku	%	-	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		9,90		Balai Inseminasi Buatan Kelas A
				Persentase peningkatan produksi ternak	%	-	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A
				Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan betina produktif	%	-	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Balai veteriner semarang
				Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis)	%	-	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Balai veteriner boyolali

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				dan pemotongan betina produktif																
			Pemanfaatan Hutan						3.340.475		3.449.000		4.430.000		4.555.000		6.291.000		22.065.475	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	11,27	13,41	5,44		11,90		19,18		27,08		35,38		35,38		Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan
				Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	-	-	0,31		0,41		0,51		0,62		0,72		0,72		CDK 1
				Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	-	-	0,31		0,41		0,51		0,62		0,72		0,72		CDK 2
				Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	-	-	0,21		0,31		0,41		0,51		0,62		0,62		CDK 3

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	-	-	0,31		0,41		0,51		0,62		0,72		0,72		CDK 4
				Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	-	-	0,41		0,51		0,62		0,72		0,82		0,82		CDK 5
				Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	-	-	0,41		0,51		0,62		0,72		0,82		0,82		CDK 6
				Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	-	-	0,21		0,31		0,41		0,51		0,62		0,62		CDK 8
				Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	-	-	0,31		0,41		0,51		0,62		0,72		0,72		CDK 9

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	-	-	0,21		0,31		0,41		0,51		0,62		0,62		CDK 10
				Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	-	-	0,21		0,31		0,41		0,51		0,62		0,62		CDK 11
				Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	-	-	0,41		0,51		0,62		0,72		0,82		0,82		CDK 7
			Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor						2.550.000		2.800.000		3.250.000		3.750.000		4.250.000		16.600.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Nilai ekspor non migas	Juta US\$	5.767,44	6.437,66	6.303		6.518		6.739		6.968		7.205		7.205		Bidang Perdagangan Luar Negeri
			Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri						3.565.000		4.100.000		4.600.000		5.250.000		6.000.000		23.515.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupaten	%	14,50	14,00	13,50		13,00		12,50		12,00		11,50		11,50		Bidang Perdagangan Dalam Negeri

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				kota (price center)																
			Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang						7.946.165		8.946.165		9.946.165		10.946.165		11.946.165		49.730.825	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi	%	5	5	5		5		5		5		5		5		Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A
			Penguatan dan Pengembangan Industri Agro						6.575.000		7.575.000		8.575.000		9.575.000		10.575.000		42.875.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro	%	5,13	7,07	5,50		5,69		5,75		5,89		6,00		6,00		Bidang Industri Agro
			Penguatan dan Pengembangan Industri Non Agro						4.315.000		4.815.000		5.565.000		5.974.000		6.432.000		27.101.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro	%	3,01	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Bidang Industri Non Agro
			Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif						750.000		1.145.000		1.525.000		1.910.000		2.290.000		7.620.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	2,65	3,72	4,10		4,10		4,25		4,31		4,35		4,35		Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A	
			Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu						304.000		775.000			835.000		935.000		1.045.000		3.894.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	-	1,59	2,38		3,17		3,17		3,17		3,17		3,17		3,17	Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A
			Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki						5.145.000		5.645.000		6.145.000		6.895.000		7.645.000		31.475.000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
				Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	-	80,00	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Misi 4: Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan									771.66 6.221		1.304. 027.12 0		1.386. 010.66 7		1.086. 487.43 8		1.051. 829.18 5		7.016.9 56.154	
Sumber daya manusia Jawa Tengah yang semakin berkualitas dan berdaya saing									577.58 9.534		1.065. 708.93 1		1.127. 856.27 3		806.56 0.883		747.50 6.851		5.742.1 57.995	
		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			Angka	70,52	-	71,6		72		72,5		72,7		73		73		
		Meningkatnya kualitas dan tingkat pendidikan masyarakat secara luas							543.03 2.712		499.44 1.908		477.36 1.657		492.05 8.832		524.64 5.310		3.953.4 75.942	
		Rata-rata Lama Sekolah			Tahun	7,27	-	7,31		7,34		7,37		7,41		7,45		7,45		
		Harapan Lama Sekolah			Tahun	12,57	-	12,84		12,92		13		13,08		13,17		13,17		
			Pembinaan Pendidikan Khusus						4.435.1 60		3.375.1 60		3.375.1 60		3.700.1 60		4.055.1 60		18.940. 800	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Persentase serapan kurikulum SLB		%	97,33	97,82	97,85		97,88		97,91		97,94		97,97		97,97		Bidang Pembinaan Diksus

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	80,59	80,79	80,83		80,89		80,96		81		81,13		81,13		Bidang Pembinaan Diksus
				Disparitas prestasi SLB	%	1,14	1,15	1,05		0,95		0,85		0,75		0,65		0,65		Bidang Pembinaan Diksus
			Pembinaan SMK						122.728.641		105.686.498		69.836.498		65.006.498		66.272.641		429.530.776	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Disparitas prestasi SMK	%	1,05	1,05	1,04		1,04		1,03		1,03		1,02		1,02		Bidang Pembinaan SMK
				Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	74,88	83,64	84,77		85,46		85,82		86,17		86,54		86,54		Bidang Pembinaan SMK
				Persentase serapan kurikulum SMK	%	68,81	70,81	72,81		74,81		76,81		78,81		80,81		80,81		Bidang Pembinaan SMK
			Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan						308.489.628		318.489.000		330.989.000		348.489.000		376.989.000		1.683.445.628	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Persentase guru SMK memenuhi kualifikasi akademik	%	74,16	78,09	78,99		80,8		83,22		84,69		84,79		84,79		Bidang Ketenagaaan Dikbud
				Persentase guru SLB memenuhi kualifikasi akademik	%	81,33	85,64	86,63		88,61		89,84		90,5		90,51		90,51		Bidang Ketenagaaan Dikbud
				Rasio guru SMA dengan rombongan belajar SMA	%	0,06	0,06	0,07		0,07		0,07		0,08		0,08		0,08		Bidang Ketenagaaan Dikbud
				Rasio guru SLB dengan	%	0,01	0,16	0,25		0,25		0,33		0,33		0,5		0,5		Bidang Ketenagaaan Dikbud

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				rombongan belajar SLB																
				Rasio guru SMK dengan rombongan belajar SMK	%	0,07	0,07	0,07		0,07		0,08		0,08		0,08		0,08		Bidang Ketenagaa n Dikbud
				Persentase guru SMA memenuhi kualifikasi akademik	%	90,96	95,78	96,88		99,1		99,2		99,3		99,35		99,35		Bidang Ketenagaa n Dikbud
			Pembinaan SMA						83.273.108		45.175.000		45.453.999		46.103.999		46.503.999		1.683.445.628	Dinas Pendidika n dan Kebudayaan
				Persentase serapan kurikulum SMA	%	91,49	96,48	98,96		100		100		100		100		100		Bidang Pembinaa n SMA
				Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	60,96	63,61	65,61		67,61		69,61		71,61		73,61		73,61		Bidang Pembinaa n SMA
				Disparitas prestasi SMA	%	1,2	0,98	0,98		0,97		0,96		0,95		0,93		0,93		Bidang Pembinaa n SMA
			Pembinaan Kebudayaan						18.351.175		18.816.250		19.007.000		19.209.175		20.424.510		95.808.110	Dinas Pendidika n dan Kebudayaan
				Persentase sumber belajar berbasis budaya	%	0,22	0,25	0,28		0,32		0,36		0,39		0,42		0,42		Bidang Pembinaa n Kebudayaan
				Persentase siswa dan anggota paguyuban penghayat kepercayaan yang terlayani	%	18,14	20,16	22,40		26,40		30,40		34,40		37,84		37,84		Bidang Pembinaa n Kebudayaan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)		
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Persentase status cagar budaya	%	15,39	17,10	19,00		19,30		19,60		19,90		21,89		21,89		Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				Persentase jenis budaya yang terlayani	%	2,84	3,15	3,50		4,70		5,90		6,20		6,82		6,82		Bidang Pembinaan Kebudayaan	
				Persentase seni budaya kabupaten/kota yang terfasilitasi	%	-	-	68,57		71,42		74,28		77,14		80,00		80,00		Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A	
				Survei Kepuasan Pengunjung Museum	%	-	81,00	88,00		88,20		88,40		88,60		88,70		88,70		Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A	
			Pengembangan Perpustakaan							1.435.000		2.900.000		3.200.000		3.550.000		3.900.000		14.985.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Persentase peningkatan kompetensi SDM perpustakaan	%	-	-	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		Bidang Pengembangan Perpustakaan	
				Persentase perluasan jejaring kemitraan perpustakaan	%	-	-	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		Bidang Pengembangan Perpustakaan	
			Pengelolaan Perpustakaan							4.320.000		5.000.000		5.500.000		6.000.000		6.500.000		27.320.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
				Persentase ketersediaan bahan pustaka	%	-	-	24,00		48,00		68,00		79,00		100,00		100,00		Bidang Pengelolaan Perpustakaan	

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi	%	-	-	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		Bidang Pengelolaan Perpustakaan
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat								29.863.510		560.487.023		644.180.616		307.504.051		215.144.724		1.757.179.924	
		Angka Harapan Hidup			Tahun	74,08	-	74,09		74,09		74,1		74,1		74,1		74,1		
			Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit						7.945.430		7.062.313		7.686.750		8.327.375		9.600.518		40.622.386	Dinas Kesehatan
				Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini PTM	%	37	37	40		43		46		49		52		52		Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
				Persentase UCI desa	%	99,94	99,94	99,95		99,95		99,96		99,96		99,96		99,96		Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
				Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular	%	57	60	62,9		65,7		68,6		71,4		74,3		74,3		Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Pelayanan Kesehatan						7.500.000		214.248.000		164.993.366		15.638.676		9.431.206		411.811.248	Dinas Kesehatan
				Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan	%	20	20	22		36		66		75		82		82		Bidang Pelayanan Kesehatan
				Persentase kabupaten/kota dengan 100% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi	%	-	24,13	96,55		100		100		100		100		100		Bidang Pelayanan Kesehatan
				Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan primer sesuai ketentuan	%	-	11	17		23		29		31		34		34		Bidang Pelayanan Kesehatan
			Kesehatan Masyarakat						14.418.080		33.493.710		33.262.500		33.355.000		33.430.000		147.959.290	Dinas Kesehatan
				Persentase kabupaten/kota dengan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja dan olahraga baik	%	14,28	28	42		57		71		85		100		100		Bidang Kesehatan Masyarakat
				Persentase Kabupaten/Kota yang telah	%	-	31,43	34,3		37,14		40		42,86		45,7		45,7		Bidang Kesehatan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				mencapai desa siaga aktif mandiri 11%																
				Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita	%	51,43	51,43	57,14		62,86		68,57		74,26		80		80		Bidang Kesehatan Masyarakat
			Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan							305.683.000		438.238.000		250.183.000		162.683.000		1.156.787.000		Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
				Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	25,00	26,67	-		36,67		40,00		43,33		45,00		45,00		Bidang Keolahragaan
				Persentase capaian even olahraga rekreasi	%	20,00	30,00	-		50,00		70,00		90,00		100,00		100,00		Bidang Keolahragaan
				Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten	%	7,50	17,40	-		35,70		45,10		54,50		63,90		63,90		Bidang Keolahragaan
				Persentase atlet PPLOP yang berprestasi	%	5,88	8,57	-		11,11		12,78		13,89		15,00		15,00		Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik	%	12,50	12,50	-		62,50		87,50		100,00		100,00		100,00		Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A
	Meningkatnya akses dan kualitas hidup, perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender								4.693.312		5.780.000		6.314.000		6.998.000		7.716.817		31.502.129	
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)			Angka	91,94	-	92		92,06		92,12		92,18		92,25		92,25		
			Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak						1.168.275		1.870.000		2.025.000		2.220.000		2.481.358		9.764.633	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkat	%	57,14	80,00	80,00		82,86		85,71		88,57		91,43		91,43		Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				pratama, tingkat madya, dan tingkat nindya																
			Perlindungan Perempuan Dan Anak					2.763.530	3.040.000			3.344.000		3.678.000		4.046.000		16.871.530		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	5,37	5,93	5,87		5,81		5,76		5,7		5,64		5,64		Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
				Rasio korban kekerasan terhadap anak	Per 100.000	13,92	12,76	12,76		12,66		12,56		12,46		12,36		12,36		Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
			Keluarga Sejahtera					761.507	870.000			945.000		1.100.000		1.189.459		4.865.966		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
				Persentase kelompok tribina yang aktif	%	91,75	96,06	96,10		96,15		96,20		96,25		89,30		96,30		Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
						Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Sumberdaya alam dan lingkungan hidup Jawa Tengah yang lestari dan berkelanjutan									194.076.687		238.318.189		258.154.394		279.926.555		304.322.334		1.274.798.159	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)			Angka	66,33	66,51	66,69		66,87		67,02		67,14		67,26		67,26		
	Meningkatnya kualitas air, udara, serta tutupan lahan								176.146.687		218.388.189		235.724.394		254.996.555		276.642.334		1.161.898.159	
		Indeks Kualitas Air			Angka	48,17	48,47	48,77		49,17		49,47		49,77		50,07		50,07		
		Indeks Kualitas Udara			Angka	83,91	84,21	84,51		84,71		84,91		85,01		85,11		85,11		
		Indeks Tutupan Lahan			Angka	66,76	66,76	66,76		66,76		66,76		66,76		66,76		66,76		
			Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir						83.898.458		91.060.501		96.692.409		101.832.368		113.370.285		486.854.021	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
				Persentase luasan daerah bebas	%	12,66	15,64	17,28		18,92		20,56		22,19		23,83		23,83		Bidang Sungai, Bendungan dan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				genangan banjir																Pantai
				Persentase sungai dalam kondisi baik	%	52,06	52,16	52,20		52,24		52,28		52,32		52,36		52,36		Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai
				Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Pemali Comal
				Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Pemali Comal
				Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Bodri Kuto
				Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Bodri Kuto
				Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Serang Lusi Juana
				Persentase darurat banjir yang tertangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Bengawan Solo

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo																
				Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
				Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Serayu Citanduy.
			Penyelenggaraan Penataan Ruang						2.115.000		2.295.174		2.533.842		2.677.135		2.824.001		12.445.152	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
				Persentase implementasi indikasi program pemanfaatan ruang	%	68,73	70,00	72,00		74,00		76,00		78,00		80,00		80,00		Bidang Penataan Ruang
				Persentase pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang	%	68,73	70	71,5		73		74,5		76		77,5		77,5		Bidang Penataan Ruang
				Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Pemali Comal

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Bodri Kuto
				Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Serang Lusi Juana
				Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Bengawan Solo
				Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
				Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Serayu Citanduy
			Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya						16.168.648		18.285.864		20.953.393		24.521.302		28.049.048		107.978.255	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutana

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan																	n
				Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	-	-	5,00		5,00		5,00		10,00		10,00		10,00		Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
				Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara	%	5,71	5,71	5,71		5,71		5,71		8,57		8,57		8,57		Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
				Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	-	-	5,00		5,00		5,00		10,00		10,00		10,00		Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
				Persentase pemantauan kualitas udara ambien	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
			Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut						1.750.000		4.025.000		3.435.000		4.825.000		5.225.000		19.260.000	Dinas Kelautan dan Perikanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Selatan)	%	-	-	5,00		10,00		15,00		20,00		25,00		25,00		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
				Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Timur)	%	-	-	5,00		10,00		15,00		20,00		25,00		25,00		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
				Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Barat)	%	-	-	5,00		10,00		15,00		20,00		25,00		25,00		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
				Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	-	-	15,00		30,00		45,00		60,00		75,00		75,00		Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
			Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan						32.330.664		35.063.000		42.563.000		45.063.000		49.063.000		204.082.664	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2017	2018	2019		2020		2021		2022		2023		Target	Rp. (000)	
								Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	-	-	5,00		10,00		15,00		20,00		25,00		25,00		Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam
				Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	-	-	0,33		0,65		0,98		1,30		1,63		1,63		CDK 1
				Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	-	-	0,33		0,65		0,98		1,30		1,63		1,63		CDK 2
				Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	-	-	0,34		0,68		1,01		1,35		1,69		1,69		CDK 3
				Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	-	-	0,36		0,73		1,09		1,45		1,81		1,81		CDK 4
				Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	-	-	0,40		0,80		1,20		1,60		2,00		2,00		CDK 5
				Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	-	-	0,65		1,30		1,95		2,60		3,25		3,25		CDK 6
				Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	-	-	0,41		0,83		1,24		1,65		2,06		2,06		CDK 8

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				kritis tertangani																
				Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	-	-	0,53		1,05		1,58		2,10		2,63		2,63		CDK 9
				Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	-	-	0,41		0,83		1,24		1,65		2,06		2,06		CDK 10
				Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	0,14	0,14	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
				Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	0,09	0,09	0,09		0,09		0,09		0,09		0,09		0,09		Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
				Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	0,91	0,91	0,91		0,91		0,91		0,91		0,91		0,91		Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A
				Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	-	-	0,63		1,25		1,88		2,50		3,13		3,13		CDK 11
				Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	-	-	0,63		1,25		1,88		2,50		3,13		3,13		CDK 7

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan						15.751.747		15.250.500		13.000.000		15.000.000		15.000.000		74.002.247	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	-	-	5,00		10,00		15,00		22,00		25,00		25,00		Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
				Persentase pengaduan yang ditangani	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
				Persentase pengaduan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CDK 1
				Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	-	-	0,60		1,20		1,80		2,60		3,00		3,00		CDK 1
				Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	-	-	0,40		0,80		1,20		1,80		2,00		2,00		CDK 2
				Persentase pengaduan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CDK 2

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
				Persentase pengaduan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	CDK 3
				Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	-	-	0,40		0,80		1,20		1,80		2,00		2,00		2,00	CDK 3
				Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	-	-	0,40		0,80		1,20		1,60		2,00		2,00		2,00	CDK 4
				Persentase pengaduan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	CDK 4
				Persentase pengaduan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	CDK 5
				Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	-	-	0,60		1,20		1,80		2,60		3,00		3,00		3,00	CDK 5
				Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	-	-	0,40		0,80		1,20		1,80		2,00		2,00		2,00	CDK 6
				Persentase pengaduan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	CDK 6
				Persentase pengaduan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	CDK 8
				Persentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	-	-	0,40		0,80		1,20		1,80		2,00		2,00		2,00	CDK 8

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	-	-	0,40		0,80		1,20		1,80		2,00		2,00		CDK 9
				Persentase pengaduan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CDK 9
				Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	-	-	0,40		0,80		1,20		1,80		2,00		2,00		CDK 10
				Persentase pengaduan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CDK 10
				Persentase pengaduan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CDK 11
				Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	-	-	0,40		0,80		1,20		1,80		2,00		2,00		CDK 11
				Persentase pengaduan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CDK 7
				Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	-	-	0,60		1,20		1,80		2,60		3,00		3,00		CDK 7
			Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi						4.183.700		15.000.000		21.488.500		21.923.000		23.185.500		85.780.700	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Penurunan emisi gas rumah	tCO2e	745,70	1.176,31	24.512,00		49.481,00		74.027,00		98.587,00		123.401,00		123.401,00		Bidang Energi Baru

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				kaca sektor energi (tCO2e)																Terbarukan
				Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Solo	tCO2e	49,82	75,22	63,00		218,00		256,00		294,00		332,00		332,00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
				Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Kendeng Muria	tCO2e	12,70	26,88	225,03		462,76		700,49		938,22		1.737,69		1.737,69		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
				Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Serayu Utara	tCO2e	51,37	159,14	151,00		189,00		227,00		545,00		583,00		583,00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
				Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Serayu Selatan	tCO2e	12,70	25,40	32,00		161,00		714,00		726,00		739,00		739,00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
				Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e)	tCO2e	12,70	25,40	32,00		57,00		83,00		383,00		408,00		408,00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				wilayah Slamet Utara																
				Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) Wilayah Ungaran Telomoyo	tCO2e	16,52	45,06	25,40		38,10		50,80		63,50		76,20		76,20		Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
				Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Kendeng Selatan	tCO2e	134,26	146,96	78,00		208,00		220,00		233,00		505,00		505,00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
				Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Sewu Lawu	tCO2e	14,70	40,10	51,00		356,00		381,00		394,00		407,00		407,00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
				Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Slamet Selatan	tCO2e	12,70	29,71	19.149,00		38.293,00		57.425,00		76.569,00		95.701,00		95.701,00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
				Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e)	tCO2e	12,70	25,40	25,00		38,00		51,00		64,00		76,00		76,00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				wilayah Serayu Tengah																
				Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Merapi	tCO2e	337,35	388,88	435,00		873,00		1.194,00		1.515,00		1.836,00		1.836,00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
				Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Semarang Demak	tCO2e	59,63	102,74	4.092,00		8.141,00		12.190,00		16.239,00		20.288,00		20.288,00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
			Pengelolaan Pertambangan Minerba						7.148.320		15.934.000		10.832.000		12.087.500		12.306.500		58.308.320	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
				Persentase good mining practice	%	20,00	54,82	62,50		73,33		85,71		85,71		85,71		85,71		Bidang Mineral dan Batubara
				Persentase Good Mining Practice Wilayah Solo	%	1,50	4,71	5,25		6,13		6,57		6,57		6,57		6,57		Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
				Persentase Good Mining Practice Wilayah Kendeng Muria	%	1,10	1,88	2,25		2,67		2,86		2,86		2,86		2,86		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
				Persentase Good Mining Practice	%	2,00	4,47	5,00		5,87		6,29		6,29		6,29		6,29		Cabang Dinas ESDM Wilayah

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Wilayah Serayu Utara																Serayu Utara
				Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Selatan	%	1,20	2,82	3,25		4,00		4,29		4,29		4,29		4,29		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
				Persentase Good Mining Practice Wilayah Slamet Utara	%	0,80	6,59	7,25		8,80		12,00		12,00		12,00		12,00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
				Persentase Good Mining Practice Wilayah Ungaran Telomoyo	%	1,40	1,88	2,25		2,67		2,86		2,86		2,86		2,86		Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
				Persentase Good Mining Practice Wilayah Kendeng Selatan	%	2,75	7,06	7,75		8,80		11,43		11,43		11,43		11,43		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
				Persentase Good Mining Practice Wilayah Sewu Lawu	%	3,50	4,00	4,50		4,80		5,14		5,14		5,14		5,14		Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
				Persentase Good Mining Practice Wilayah Slamet Selatan	%	3,60	8,47	9,25		11,20		14,29		14,29		14,29		14,29		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
				Persentase pelayanan	%	100,00	100,0	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Laboratorium Energi

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
								2019		2020		2021		2022		2023						
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
				pengujian mineral dan batubara			0														dan Sumber daya Mineral Kelas A	
				Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Tengah	%	-	1,65	2,00		2,67		2,86		2,86		2,86		2,86		2,86	Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah	
				Persentase Good Mining Practice Wilayah Merapi	%	2,00	8,71	10,75		12,00		13,14		13,14		13,14		13,14		13,14	Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi	
				Persentase Good Mining Practice Wilayah Semarang Demak	%	1,60	2,59	3,00		3,73		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00	Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak	
			Pengembangan Kegeologian						12.800.150		21.474.150		24.226.250		27.067.250		27.619.000		113.186.800		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	
				Persentase pengambilan air tanah	%	48,66	54,38	54,66		54,93		55,20		55,48		55,76		55,76		55,76		Bidang Geologi dan Air Tanah
				Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	3,25	4,09	4,11		4,13		4,15		4,17		4,20		4,20		4,20		Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
				Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Muria	%	12,92	12,29	12,35		12,42		12,48		12,54		12,60		12,60		12,60		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	2,25	2,84	2,85		2,87		2,88		2,89		2,91		2,91		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
				Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	1,27	1,14	1,14		1,15		1,16		1,16		1,17		1,17		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
				Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%	0,54	0,95	0,96		0,96		0,97		0,97		0,97		0,97		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
				Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	%	9,30	8,26	8,30		8,35		8,39		8,43		8,47		8,47		Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
				Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	0,43	0,59	0,60		0,60		0,60		0,60		0,61		0,61		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
				Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	%	2,26	3,23	3,24		3,26		3,28		3,29		3,31		3,31		Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
				Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	1,05	1,07	1,08		1,08		1,09		1,10		1,10		1,10		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								2019		2020		2021		2022		2023				
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Persentase pelayanan pengujian air tanah	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
				Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	0,23	0,24	0,24		0,24		0,25		0,25		0,25		0,25		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
				Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	3,36	5,23	5,25		5,28		5,31		5,33		5,36		5,36		Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
				Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	11,79	14,45	14,52		14,59		14,67		14,74		14,81		14,81		Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
	Meningkatnya ketahanan daerah dalam penanggulangan bencana								17.930.000		19.930.000		22.430.000		24.930.000		27.680.000		112.900.000	
		Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana			Angka	3,5	-	3,52		3,54		3,56		3,58		3,6		3,6		

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja Program	Satuan	Kondisi Kinerja Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
								2019		2020		2021		2022		2023					
						2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana						17.930.000		19.930.000		22.430.000		24.930.000		27.680.000		112.900.000	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				Persentase penurunan risiko bencana	%	-	-	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		8,00		Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan	
				Persentase penanganan darurat kebencanaan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Bidang Penanganan Darurat
				Persentase rehab rekon pasca bencana	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
				Persentase pemenuhan logistik bencana	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Bidang Logistik dan Peralatan

BAB VII ARAH PENGEMBANGAN WILAYAH JAWA TENGAH

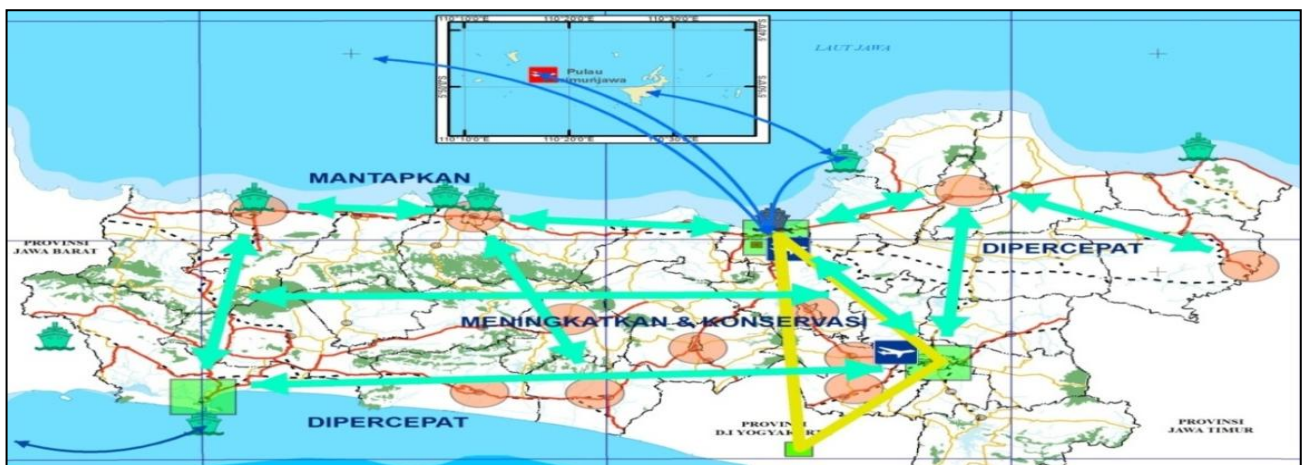
7.1. Kebijakan Umum

7.1.1. Arah Pengembangan Wilayah

Pengembangan Wilayah Provinsi Jawa Tengah ditujukan untuk mewujudkan ruang wilayah yang berdaya saing berbasis pertanian, industri, dan pariwisata, dengan memperhatikan kelestarian alam dan pemerataan pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Memperhatikan kondisi fisiografis dan geografis, maka kebijakan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Tengah dibagi menjadi :

- a. Poros pengembangan Utara - Utara yang membentang dari Bregasmalang - Petanglong - Kedungsepur - Wanarakuti - Banglor dikembangkan dengan memantapkan pembangunan di koridor utara, sehingga tetap mampu menjadi pendorong ekonomi wilayah Jawa Tengah;
- b. Poros pengembangan Selatan-Selatan yang membentang dari Barlingmascakeb - Purwomanggung - Subosukawonosraten dengan mempercepat pembangunan di Koridor Selatan, sehingga dapat mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah;
- c. Poros pengembangan Utara-Selatan yang menghubungkan Bregasmalang dengan Barlingmascakeb, Petanglong dengan Purwomanggung, Kedungsepur dengan Subosukawonosraten dan Purwomanggung, serta Wanarakuti dan Banglor dengan Subosukawonosraten dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi wilayah;
- d. Poros pengembangan bagian tengah Jawa Tengah diarahkan untuk meningkatkan fungsi konservasi di wilayah bagian tengah Provinsi Jawa Tengah (hulu DAS) pada daerah Gunung Slamet - Sindoro - Sumbing - Merbabu - Merapi - Lawu.
- e. Pengembangan wilayah kelautan diarahkan untuk pengembangan potensi ekonomi sosial dan budaya secara berkelanjutan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).

Arah Pengembangan Wilayah Jawa Tengah dilihat pada Gambar 7.1.



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 7.1.
Arah Pengembangan Wilayah Jawa Tengah

Strategi pengembangan wilayah di Jawa Tengah antara lain sebagai berikut :

1. Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru
2. Peningkatan keterhubungan perkotaan – perdesaan
3. Pengembangan prasarana wilayah
4. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung
5. Pemertahanan lahan pertanian
6. Pengembangan kawasan industri
7. Pengembangan destinasi dan daya tarik wisata strategis
8. Pengembangan sistem permukiman perkotaan yang kompak
9. Pengembangan dan pemanfaatan sumber daya laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

7.1.2. Kebijakan Pengembangan Struktur Ruang

Dalam mendukung arah pengembangan wilayah, diperlukan jaringan prasarana wilayah yang ditekankan pada pengembangan prasarana pendukung yang dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian wilayah dengan mewujudkan keterhubungan antar Pusat Kegiatan baik Nasional, Wilayah dan Lokal (PKN, PKW dan PKL).

Adapun pengembangan jaringan prasarana dimaksud berupa jaringan prasarana transportasi meliputi pengembangan : jaringan jalan; angkutan umum aglomerasi perkotaan; integrasi antar moda transportasi; bandar udara; reaktivasi jaringan rel kereta api; pelabuhan; terminal; jaringan prasarana energi; dan jaringan prasarana sumber daya air. Strategi pengembangan jaringan prasarana wilayah dilakukan antara lain melalui :

- 1) Pengembangan sistem transportasi darat, laut, dan udara secara terpadu guna meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas wilayah;
- 2) Peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung kawasan-kawasan strategis;
- 3) Pengembangan sistem energi secara optimal dan mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan listrik untuk mendukung pasokan energi nasional (sistem JAMALI);
- 4) Pengembangan sistem prasarana sumber daya air untuk menunjang kegiatan domestik, sektor industri dan pertanian;

Kebijakan Pengembangan struktur ruang di Jawa Tengah sebagaimana Gambar 7.2.



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Tengah 2009 - 2029

Gambar 7.2.
Pengembangan Wilayah Melalui Pembangunan Jaringan Prasarana Wilayah

7.1.3. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budaya

1. Kawasan Lindung

Fokus perwujudan kawasan lindung diarahkan pada : kawasan hutan lindung, kawasan yang memberikan perlindungan kawasan dibawahnya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan bencana alam serta kawasan lindung geologi. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah :

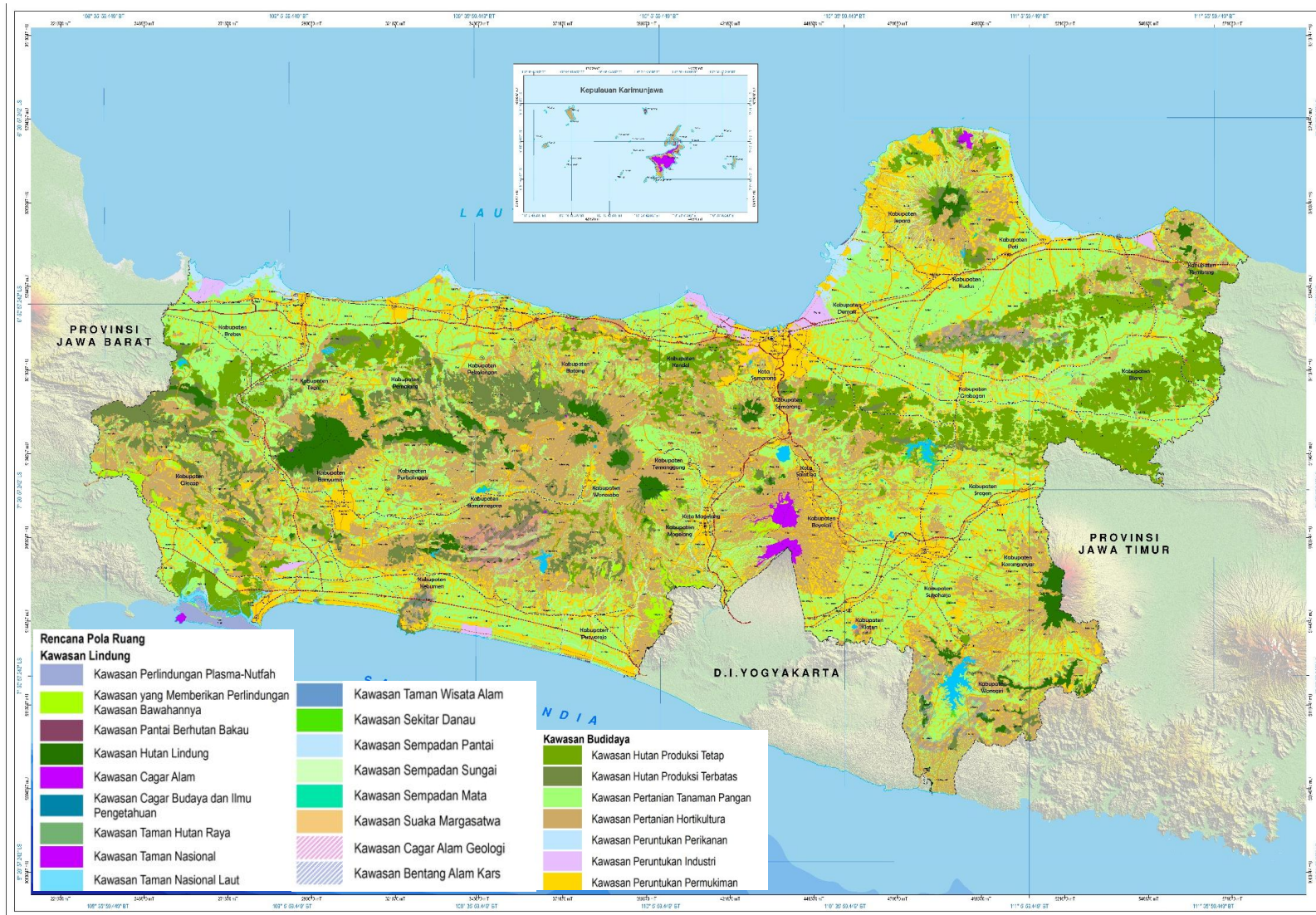
- a. Rehabilitasi dan konservasi kawasan yang berfungsi lindung baik hutan maupun non hutan berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS);
- b. Peningkatan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kawasan perkotaan sebesar 30%, yang terdiri RTH publik minimal 20% dan RTH privat minimal 10%;
- c. Rehabilitasi lahan kritis;
- d. Rehabilitasi daerah resapan air guna mempertahankan ketersediaan air;
- e. Peningkatan upaya mitigasi pada Kawasan Rawan Bencana.

2. Kawasan Budaya

Fokus perwujudan kawasan budaya diarahkan pada : kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, kawasan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan pariwisata dan kawasan permukiman. Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut adalah :

- a. Rehabilitasi dan pemantapan kawasan hutan produksi;
- b. Pemantapan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
- c. Pengembangan kawasan agropolitan;
- d. Pengendalian kawasan pertambangan;
- e. Pengembangan kawasan industri;
- f. Pengembangan kawasan pariwisata;
- g. Peningkatan kawasan permukiman.

Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung dan Kawasan Budaya sebagaimana Gambar 7.3.



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2009-2029

Gambar 7.3.
Pengembangan Wilayah Melalui Arah Pola Ruang

7.1.4. Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis

Penetapan kawasan strategis didasarkan atas fungsi keutamaan kawasan yang mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial budaya, dan/atau lingkungan bagi kepentingan tingkat/skala provinsi. Kawasan tersebut terbagi menurut 3 sudut kepentingan yaitu :

1. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya, meliputi :

A. Kawasan Strategis Nasional, yaitu :

- a. Kawasan Borobudur dan sekitarnya;
- b. Kawasan Prambanan dan sekitarnya;
- c. Kawasan Sangiran.

B. Kawasan Strategis Provinsi, yaitu:

- a. Kawasan Masjid Demak;
- b. Kawasan Candi Dieng;
- c. Kawasan Candi Gedongsongo;
- d. Kawasan Candi Cetho – Suku;
- e. Kawasan Keraton Kasunanan dan Mangkunegaran.

Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kawasan strategis meliputi:

- Perlindungan/konservasi kawasan;
- Pengembangan sarana prasarana pendukung kawasan;
- Penataan kawasan sekitar.

2. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, meliputi:

A. Kawasan Strategis Nasional, yaitu Kawasan Perkotaan Kedungsepur

B. Kawasan Strategis Provinsi

a. Kawasan Industri Terpadu meliputi:

1. Kawasan Industri Kendal – Semarang - Demak;
2. Kawasan Industri Brebes;
3. Kawasan Industri Rembang;
4. Kawasan Industri Cilacap; dan
5. Kawasan Industri Kebumen.

Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kawasan industri terpadu meliputi:

- Peningkatan kemudahan perijinan, promosi pengembangan kawasan industri dan pemberian insentif.
- Peningkatan jaringan infrastruktur transportasi, pengolahan limbah, energi, telekomunikasi dan sumber daya air serta prasarana penunjang lainnya.

b. Kawasan agropolitan meliputi:

1. Kawasan agropolitan MANGGA EMAS (Pemalang, Purbalingga, Tegal, Brebes, Banyumas);

2. Kawasan agropolitan GIRISUKA (Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar);
3. Kawasan agropolitan SEMARBOYONG (Semarang, Boyolali, Magelang); dan
4. Kawasan agropolitan SOBOBANJAR (Wonosobo, Banjarnegara).

Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kawasan agropolitan berbasis pertanian terintegrasi meliputi :

1. Peningkatan kapasitas Sumberdaya Manusia (SDM) Petani;
2. Pengembangan pendidikan vokasi yang mendukung pertanian;
3. Peningkatan akses modal;
4. Peningkatan pemanfaatan teknologi dalam budidaya pertanian;
5. Pengembangan pengolahan hasil pertanian;
6. Pengembangan sistem distribusi dan pemasaran;
7. Pengembangan sarana dan prasarana.

c. Kawasan perkotaan meliputi:

1. Kawasan Perkotaan Subosuka Wonosraten; dan
2. Kawasan Perkotaan Bregasmalang.

Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kawasan perkotaan, meliputi :

1. Peningkatan kawasan permukiman
2. Pengembangan infrastruktur wilayah yang memadai, antara lain Tempat Pembuangan Akhir (TPA) atau Tempat Pembuangan Sementara Terpadu (TPST) Regional, Sistem Pengelolaan Air Minum (SPAM) Regional, Sistem Jaringan Jalan, Pelayanan Perhubungan (Transportasi Massal, Bandara, Perkeretaapian, Terminal) dan Energi.
3. Pengembangan sarana prasarana pendidikan, kesehatan dan perdagangan.

d. Kawasan strategis pariwisata terpadu meliputi:

1. Kawasan Surakarta dan sekitarnya;
2. Kawasan Borobudur - Kebumen - Dieng dan sekitarnya; dan
3. Kawasan Lereng Gunung Slamet dan sekitarnya.

Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kawasan strategis pariwisata terpadu, meliputi :

1. Pengembangan infastruktur pendukung pariwisata antara lain : jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, air baku dan sampah;
2. Pengembangan destinasi dan promosi pariwisata.
3. Peningkatan kualitas kawasan permukiman pendukung pariwisata

3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi :

A. Kawasan Strategis Nasional, meliputi:

1. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
2. Kawasan Pangandaran – Kalipucang – Segara Anakan – Nusakambangan (Pacangsanak)

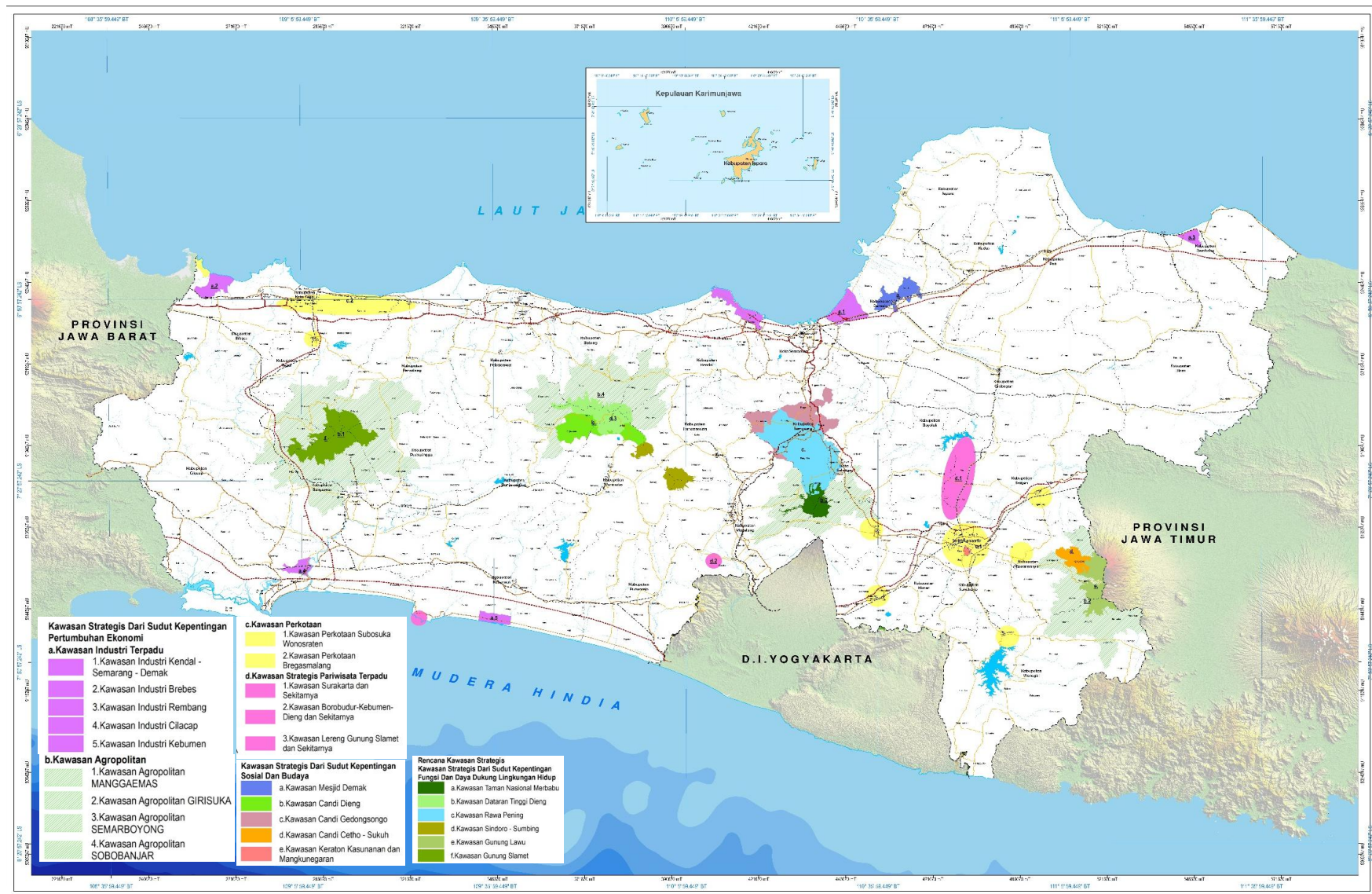
B. Kawasan Strategis Provinsi, diantaranya:

- a. Kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu;
- b. Kawasan Dataran Tinggi Dieng;
- c. Kawasan Rawa Pening;
- d. Kawasan Gunung Sindoro – Sumbing;
- e. Kawasan Gunung Lawu; dan
- f. Kawasan Gunung Slamet.

Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan kawasan strategis fungsi dan daya dukung lingkungan, antara lain :

1. Pengendalian kerusakan lingkungan;
2. Peningkatan konservasi sumber daya alam;
3. Perwujudan konsep jasa lingkungan bagi wilayah-wilayah yang memiliki fungsi konservasi.

Kawasan strategis secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 7.4. berikut :

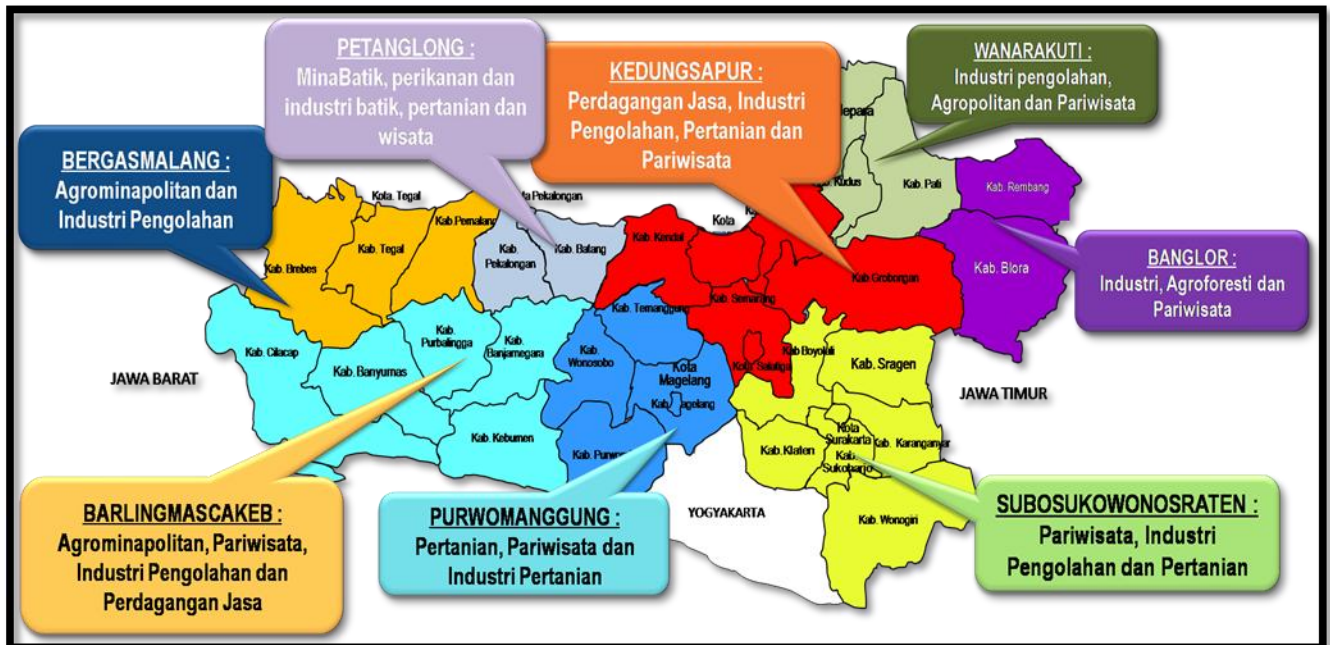


Sumber : RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2009-2029

Gambar 7.4
Kawasan Strategis Provinsi

7.2. Arah Pengembangan Perwilayahan

Dalam upaya mewujudkan pembangunan Jawa Tengah yang lebih menekankan pada karakter dan potensi wilayah serta memperlihatkan keberagaman, maka dikembangkan 8 (delapan) wilayah pengembangan utama. Pengelompokan kewilayahan tersebut bertujuan untuk dapat lebih mengoptimalkan potensi lokal, mempertahankan keberagaman hasil produk serta menciptakan pemerataan pembangunan yang memiliki ciri kuat produk unggulan. Adapun pengembangan kewilayahan meliputi Barlingmascakeb, Purwomanggung, Subosukawonosraten, Banglor, Wanarakuti, Kedungsepur, Petanglong dan Bregasmalang sebagaimana pada gambar berikut :



Sumber : RTRW Provinsi Jawa Tengah, 2009-2029

Gambar 7.5
Pembagian Per Wilayahan

7.2.1. WP Barlingmascakeb

WP Barlingmascakeb meliputi Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, Cilacap dan Kebumen, diarahkan sebagai PKN, PKW dan PKL di wilayah Jawa Tengah bagian barat dan selatan. PKN meliputi Kota Cilacap dan sekitarnya; Sedangkan PKW meliputi Purwokerto dan Kebumen, serta PKL meliputi Kroya, Majenang, Wangon, Ajibarang, Banyumas, Sumpuh, Purbalingga, Bobotsari, Sokaraja, Banjarnegara, Klampok, Gombong, Karanganyar – Kebumen, dan Prembun. Untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi di wilayah ini, PKL Purbalingga didorong menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah pertanian, perkebunan, pariwisata, pertambangan, industri dan perikanan, ditunjang oleh agroindustri, kehutanan, peternakan dan perdagangan.

Arah kebijakan WP Barlingmascakeb adalah **“Pengembangan Wilayah Barlingmascakeb Berbasis Agrominapolitan dan Pariwisata Terpadu yang Didukung Sektor Industri Pengolahan dan Perdagangan Jasa Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”**.

Pengembangan wilayah Barlingmascakep untuk Tahun 2018 sampai dengan 2023 ditargetkan untuk bisa mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,15% sampai dengan 6,65%, Angka Kemiskinan pada kisaran 11,13% sampai dengan 15,25%; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,97% sampai dengan 5,9% serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 69,3 sampai dengan 74,35. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 7.1.
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi WP Barlingmascakeb
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Cilacap	4,50-4,90	4,50-4,90	4,80-5,20	5,00-5,40	5,20-5,60
2	Banyumas	6,20-6,60	6,20-6,60	6,50-6,90	6,70-7,10	6,90-7,30
3	Purbalingga	5,30-5,70	5,30-5,70	5,60-6,00	5,80-6,20	6,00-6,40
4	Banjarnegara	5,80-6,20	5,70-6,10	5,90-6,30	6,10-6,50	6,20-6,60
5	Kebumen	4,90-5,30	5,40-5,80	5,70-6,10	5,90-6,30	6,20-6,60

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 7.2.
Sasaran Kemiskinan WP Barlingmascakeb
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Cilacap	9,85 - 10,85	9,45 - 10,45	9,05 - 10,05	8,65 - 9,65	8,25 - 9,25
2	Banyumas	11,51 - 12,51	10,53 - 11,53	9,54 - 10,54	8,55 - 9,55	7,56 - 8,56
3	Purbalingga	14,14 - 15,14	13,66 - 14,66	13,19 - 14,19	12,71 - 13,71	12,23 - 13,23
4	Banjarnegara	13,81 - 14,81	13,15 - 14,15	12,50 - 13,50	11,85 - 12,85	11,20 - 12,20
5	Kebumen	15,70 - 16,70	14,93 - 15,93	14,16 - 15,16	13,39 - 14,39	12,62 - 13,62

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 7.3.
Sasaran TPT WP Barlingmascakeb
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Cilacap	5,9-6,0	5,5-5,9	5,5-5,9	5,5-5,9	5,5-5,9
2	Banyumas	4,36	4,23	4,06	3,93	3,76
3	Purbalingga	<5	<4	<4	<4	<4
4	Banjarnegara	<4,80	4,50-4,80	4,40-4,70	4,40-4,70	4,35-4,60
5	Kebumen	2,01	1,99	1,97	1,97	1,97

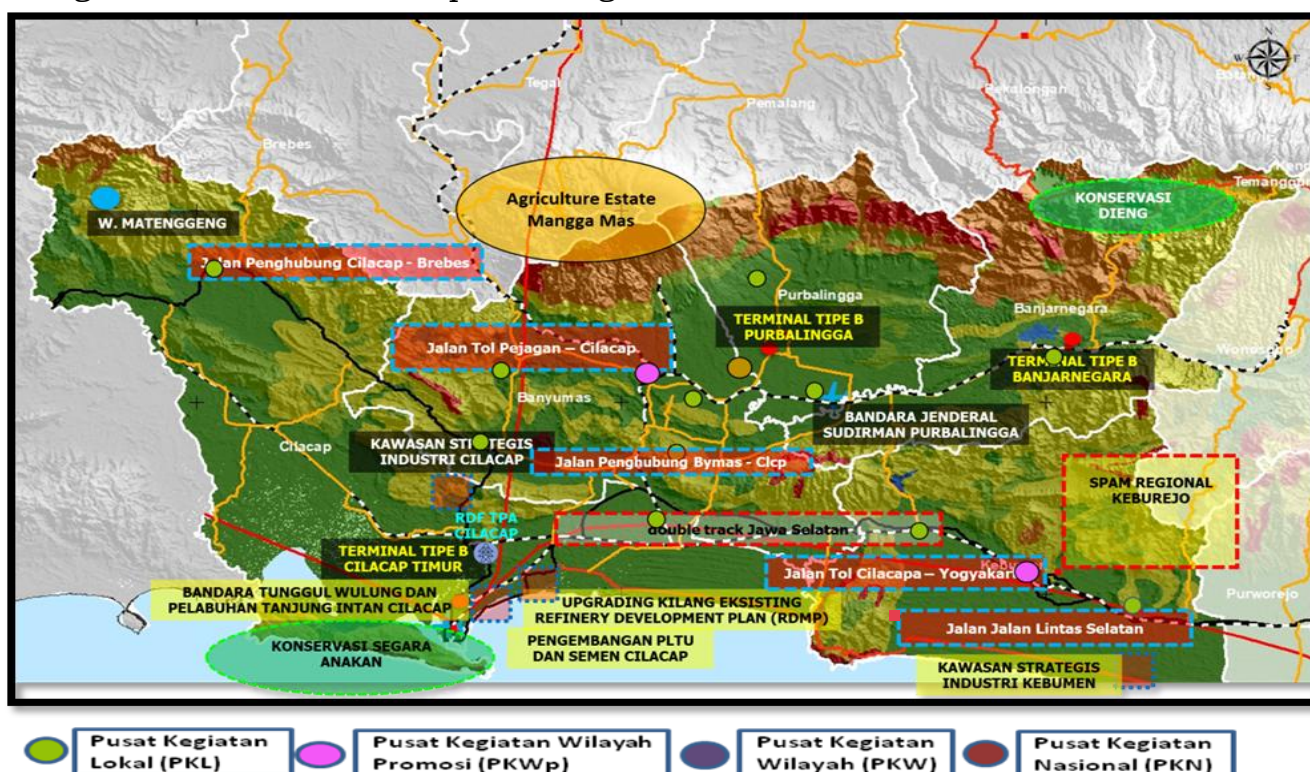
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 7.4.
Sasaran IPM WP Barlingmascakeb
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Cilacap	70,48	70,90	71,23	71,37	71,49
2	Banyumas	72,20	72,50	72,80	73,11	74,42
3	Purbalingga	69,20	69,59	69,98	70,36	70,75
4	Banjarnegara	67,83	68,37	68,70	69,02	69,35
5	Kebumen	69,06	69,36	69,62	69,88	70,07

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Untuk mencapai indikator makro tersebut maka dilakukan upaya sebagaimana terlihat dalam peta sebagai berikut :



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 7.6.
Arah Pengembangan Wilayah Barlingmascakeb

Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dengan pengembangan infrastruktur meliputi : fasilitasi pengembangan Jaringan Jalan Lintas Selatan (JJLS); fasilitasi pembangunan jalan tol Pejagan – Cilacap dan Cilacap – Yogyakarta; fasilitasi pengembangan Bandara Panglima Besar Jenderal Sudirman dan Tunggul Wulung beserta aksesibilitasnya; fasilitasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan; Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Kabupaten Banyumas - Cilacap, Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Kabupaten Cilacap - Brebes, Peningkatan Jalan Provinsi di Kabupaten Cilacap (Perbatasan Jawa Barat) dan

Pembangunan Banjar Kebuka (Banjarnegara - Kebumen); Pengembangan Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan (Koridor Purwokerto - Purbalingga); pembangunan Terminal Tipe B di Cilacap Timur.

Pemenuhan kebutuhan air baku maka dilakukan : pembangunan SPAM Regional Keburejo (Kebumen) dan fasilitasi pembangunan Bendungan Matenggeng.

Selain itu, upaya pengelolaan lingkungan diantaranya : Konservasi Segara Anakan, DAS Citanduy, Dieng, Gunung Slamet dan CAT Kebumen - Purworejo; Penanganan kerusakan pesisir; *Geopark* Karangsembung, *Geopark* Dieng (Banjarnegara); dan Pembangunan *Waste to Energy/Refused Derived Fuel* (RDF) Cilacap.

WP ini direncanakan pengembangan kegiatan perekonomian utamanya adalah : fasilitasi pengembangan kawasan industri Cilacap dan Kebumen; *Upgrading RDMP*; industri semen; pariwisata koridor Nusakambangan - Baturraden dan sekitarnya; serta pengembangan kawasan agropolitan Mangga Mas.

7.2.2. WP Purwomanggung

Pengembangan WP Purwomanggung meliputi Kabupaten Purworejo, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung yang berbatasan dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta di sisi timur tidak akan terlepas dari Pembangunan Bandara *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) di Kulon Progo. WP ini juga menjadi sangat strategis karena adanya KSPN Borobudur. Oleh karena itu, untuk mendukung pengembangan kewilayahan baik dari sisi sosial, ekonomi dan kewilayahan maka Perkotaan Purworejo akan didorong statusnya yang semula Pusat Kegiatan Lokal menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW).

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan pada WP ini adalah pertanian, pariwisata, pertambangan, industri, perikanan yang didukung sektor perkebunan dan peternakan.

Arah kebijakan WP Purwomanggung adalah **“Pengembangan Purwomanggung Berbasis Pertanian Dan Pariwisata Guna Mendorong Sektor Industri Pertanian Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”**.

Pengembangan wilayah Purwomanggung untuk Tahun 2018 sampai dengan 2023 ditargetkan untuk bisa mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00% sampai dengan 5,70%, Angka Kemiskinan pada kisaran 6,75% sampai dengan 14,36%; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,20% sampai dengan 4,50% serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 68,61 sampai dengan 78,55. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 7.5.
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi WP Purwomanggung
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Purworejo	5,60-6,00	5,80-6,20	6,10-6,50	6,50-6,90	6,70-7,10
2	Wonosobo	5,80-6,20	5,80-6,20	6,10-6,50	6,30-6,70	6,50-6,90
3	Magelang	5,20-5,60	5,30-5,70	5,60-6,00	5,80-6,20	6,00-6,40
4	Temanggung	5,20-5,60	5,30-5,70	5,60-6,00	5,80-6,20	6,00-6,40
5	Kota Magelang	5,20-5,60	5,30-5,70	5,60-6,00	5,80-6,20	6,00-6,40

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 7.6.
Sasaran Kemiskinan WP Purwomanggung
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Purworejo	9.91 - 10.91	9.16 - 10.16	8.41 - 9.41	7.65 - 8.65	6.90 - 7.90
2	Wonosobo	15.69 - 16.69	14.79 - 15.79	13.89 - 14.89	12.99 - 13.99	12.09 - 13.09
3	Magelang	9.69 - 10.69	9.14 - 10.14	8.60 - 9.60	8.05 - 9.05	7.51 - 8.51
4	Temanggung	8.36 - 9.36	7.85 - 8.85	7.34 - 8.34	6.83 - 7.83	6.32 - 7.32
5	Kota Magelang	7,5 - 8	7,30 - 7,80	7,10 - 7,60	6,90 - 7,40	6,70 - 7,20

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 7.7.
Sasaran TPT WP Purwomanggung
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Purworejo	3,7	3,6	3,5	3,40-3,50	3,35-3,50
2	Wonosobo	5,07	5,01	4,94	3,90-4,00	3,85-3,95
3	Magelang	2,30-2,40	2,30-2,40	2,25-2,35	2,25-2,35	2,20-2,25
4	Temanggung	2,97	2,97	2,97	2,97	2,97
5	Kota Magelang	5,5-5	5,2-5	5-4,5	4,8-4,5	4,5-4,25

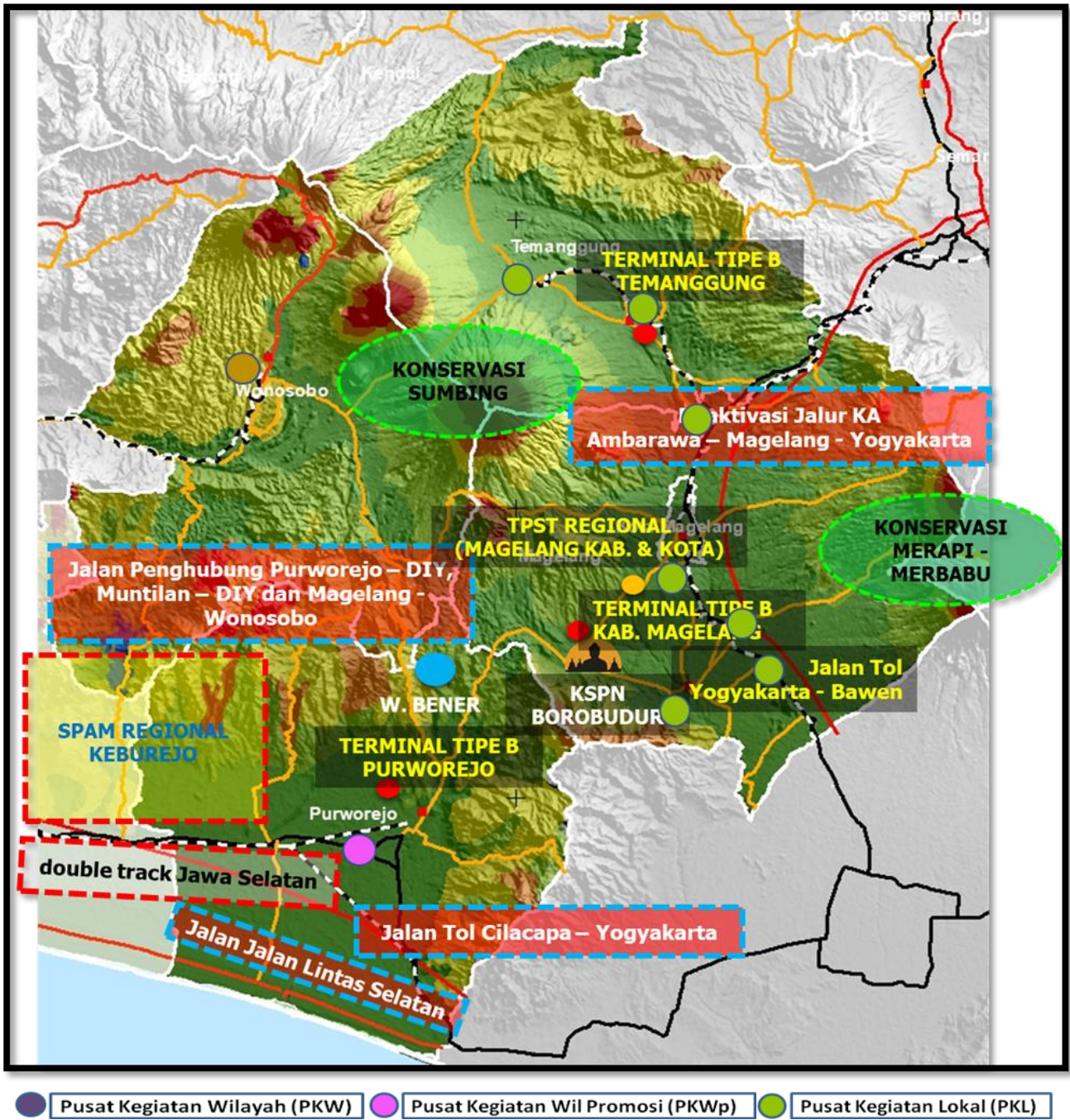
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 7.8.
Sasaran IPM Wilayah Purwomanggung
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Purworejo	71,93	72,16	72,40	72,63	72,87
2	Wonosobo	67,85	68,04	68,23	68,42	68,62
3	Magelang	69,11	69,34	69,58	69,83	70,09
4	Temanggung	69,22	69,54	69,84	70,16	70,49
5	Kota Magelang	78,16	78,37	78,45	78,55	79,00

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Untuk mencapai indikator makro tersebut maka dilakukan upaya sebagaimana terlihat dalam peta sebagai berikut :



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 7.7.
Arah Pengembangan Wilayah Purwomanggung

Untuk Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas akan dilakukan Reaktivasi Jalur Rel KA Ambarawa – Secang – Magelang – Yogyakarta; Pengembangan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan/BRT (koridor Purworejo - Magelang); Pembangunan Terminal Tipe B di Kabupaten Purworejo dan Magelang;

Peningkatan aksesibilitas Borobudur dan Dieng; Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Kabupaten Purworejo - Perbatasan DIY (Purworejo - Sibolong), Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Kabupaten Magelang - Wonosobo (pendukung akses NYIA) dan Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Kabupaten Magelang - Perbatasan DIY (Muntilan - Klangan); Jalan Tol Bawen - Yogyakarta dan Cilacap - Yogyakarta ruas Purworejo.

Pembangunan SPAM Regional Keburejo (Kebumen) dan fasilitasi pembangunan Bendungan Bener dilakukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan air baku.

Sedangkan untuk kelestarian lingkungan maka akan dilakukan Pembangunan sampah TPST Regional Magelang, Pembangunan limbah komunal industri kecil, konservasi utamanya pada Wilayah Dieng (Temanggung, Wonosobo), Gunung Merapi, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu dan kawasan hulu lainnya.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dilakukan dengan pengembangan ekonomi yang meliputi pengembangan agropolitan dan pariwisata khususnya KSPN Borobudur.

7.2.3. WP Subosukawonosraten

WP Subosukawonosraten meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten, sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) meliputi metropolitan Solo Raya terdiri dari kawasan perkotaan Kota Surakarta dan sekitarnya. Sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) terdiri dari Boyolali dan Klaten, sedangkan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Ampel, Sukoharjo, Kartosuro, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Gemolong, Jaten, Delanggu, dan Tawangmangu. Sektor unggulan wilayah adalah pariwisata, industri dan pertanian.

Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan arah pengembangan wilayah Subosukowonosraten adalah ***“Pembangunan Wilayah Subosukawonosraten Berbasis Pariwisata Terpadu yang Didukung oleh Pertanian dan Industri Pengolahan Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan.*”**

Pengembangan wilayah Subosukowonosraten untuk Tahun 2018 sampai dengan 2023 ditargetkan untuk bisa mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,45% sampai dengan 6,80%, Angka Kemiskinan pada kisaran 3,12% sampai dengan 11,50%; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,05% sampai dengan 4,40% serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 73,10 sampai dengan 84,40. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 7.9.
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi WP Subosukowonosraten
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Boyolali	5,20-5,60	5,20-5,60	5,50-5,90	5,70-6,10	5,90-6,30
2	Sukoharjo	5,30-5,70	5,40-5,80	5,70-6,10	5,90-6,30	6,10-6,50
3	Karanganyar	5,20-5,60	5,30-5,70	5,60-6,00	5,80-6,20	6,00-6,40
4	Wonogiri	5,20-5,60	5,30-5,70	5,60-6,00	5,80-6,20	6,00-6,40
5	Sragen	5,20-5,60	5,25-5,85	5,50-5,90	5,70-6,10	5,90-6,30
6	Klaten	5,30-5,70	5,40-5,80	5,70-6,10	5,90-6,30	6,10-6,50
7	Kota Surakarta	5,30-5,70	5,50-5,90	5,90-6,30	6,20-6,60	6,50-6,90

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 7.10.
Sasaran Kemiskinan WP Subosukowonosraten
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Boyolali	8.39 - 9.39	7.75 - 8.75	7.10 - 8.10	6.45 - 7.45	5.81 - 6.81
2	Sukoharjo	5.91 - 6.91	5.42 - 6.42	4.93 - 5.93	4.43 - 5.43	3.94 - 4.94
3	Karanganyar	8.29 - 9.29	7.58 - 8.58	6.87 - 7.87	6.15 - 7.15	5.44 - 6.44
4	Wonogiri	10,35 - 11,35	9,95 - 10,95	9,55 - 10,55	9,15 - 10,15	8,75 - 9,75
5	Sragen	11.55 - 12.55	10.99 - 11.99	10.43 - 11.43	9.87 - 10.87	9.30 - 10.30
6	Klaten	11.44 - 12.44	10.91 - 11.91	10.38 - 11.38	9.86 - 10.86	9.33 - 10.33
7	Kota Surakarta	7.55 - 8.55	7.02 - 8.02	6.49 - 7.49	5.95 - 6.95	5.42 - 6.42

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 7.11.
Sasaran TPT WP Subosukowonosraten
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Boyolali	3,5	3,21	3,15	3,09	3,03
2	Sukoharjo	2,10-2,20	2,10-2,20	2,10-2,15	2,10-2,15	2,05-2,15
3	Karanganyar	3,00-3,10	3,00-3,10	2,90-3,10	2,90-3,10	2,80-3,00
4	Wonogiri	2,71	2,60	2,50	2,44	2,40
5	Sragen	4,40-4,50	4,40-4,50	4,35-4,45	4,35-4,45	4,30-4,40
6	Klaten	4,13	4,09	3,98	3,87	3,56
7	Kota Surakarta	3,77	3,56	3,37	3,18	3,01

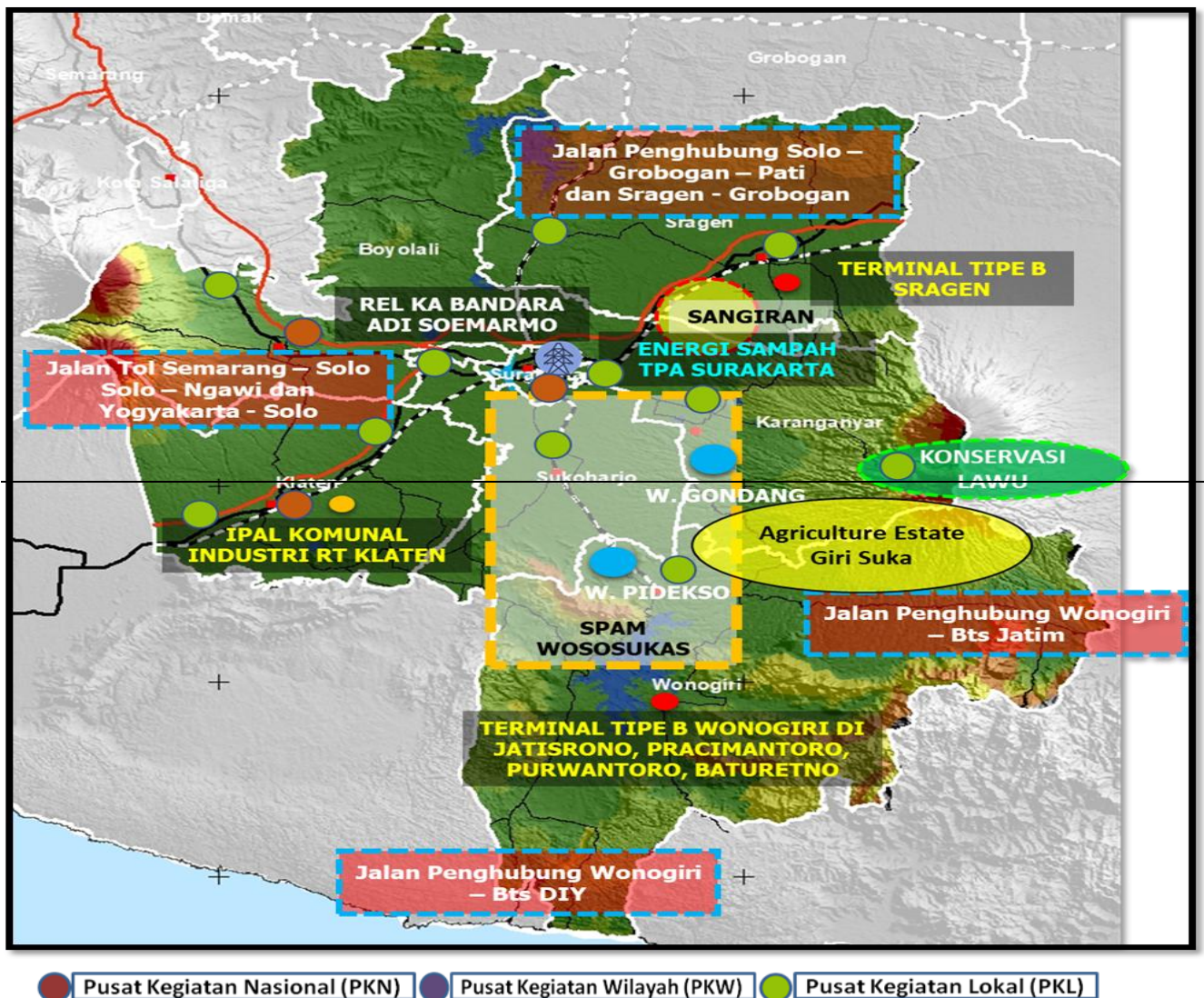
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 7.12.
Sasaran IPM WP Subosukowonosraten
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Boyolali	73,42	73,57	73,72	73,87	74,02
2	Sukoharjo	75,73	75,87	76,02	76,17	76,31
3	Karanganyar	75,86	76,15	76,41	76,48	76,55
4	Wonogiri	69,60	69,79	69,98	70,17	70,36
5	Sragen	72,94	73,15	73,36	73,56	73,77
6	Klaten	74,88	75,01	75,15	75,28	75,41
7	Kota Surakarta	81,21	81,36	81,51	81,65	81,79

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Untuk mencapai indikator makro tersebut maka dilakukan upaya sebagaimana terlihat dalam peta sebagai berikut :



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 7.8.
Arah Pengembangan Wilayah Subosukowonosraten

Pembangunan Pengembangan pariwisata menjadi arah pembangunan utama kawasan pariwisata terpadu Surakarta dan sekitarnya (Keraton Solo, Sangiran, Tawangmangu Candi Cetho – Suku, dan lain-lain). Kabupaten/kota lainnya diarahkan untuk mengembangkan pariwisata alam, dengan memperbaiki aksesibilitas, prasarana dan sarana pendukung pariwisatanya.

Dalam peningkatan akses pelayanan kewilayahan perlu dilakukan peningkatan konektivitas di Solo Raya yaitu Pengembangan Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan (2 Koridor) dan revitalisasi Terminal Tipe B Pilangsari Kabupaten Sragen, Jatisrono (Kabupaten Wonogiri), Pracimantoro, Purwantoro, Baturetno (Kabupaten Wonogiri); peningkatan pelayanan (peningkatan frekuensi) Kereta Api Regional Solo – Semarang; Fasilitas Pengembangan Bandara Adi Soemarmo Boyolali; Fasilitas Penyelesaian Jalan Tol Semarang – Solo, Fasilitas Penyelesaian Jalan Tol Solo – Kertosono, Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Surakarta - Grobogan – Pati, Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Wonogiri - Perbatasan Jatim dan Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Wonogiri - Perbatasan DIY; Fasilitas Pembangunan *Dry Port* Sragen; Fasilitas pengembangan infrastruktur transportasi pendukung pariwisata di Wilayah Subosukawonosraten dan Fasilitas pengembangan destinasi.

Untuk memenuhi kebutuhan air baku maka akan dilakukan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku, pembangunan SPAM Regional Wosusokas (Kabupaten Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen dan Kota Surakarta), dan Fasilitas Pembangunan Waduk Gondang dan Waduk Pidekso .

Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup akan dilakukan : Penanganan lahan kritis Merapi dan Lawu (Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen), Konservasi CAT Karanganyar-Boyolali dan reklamasi bekas tambang (Magelang, Klaten, Boyolali, Wonogiri), Pembangunan *Waste to Energy (Incenerator)* Kota Semarang dan Pembangunan IPAL Komunal Industri Rumah Tangga (Klaten).

Selain itu Wilayah Subosukawonosraten juga akan dikembangkan kawasan agropolitan GIRISUKA (Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar) dan SEMARBOYONG (Semarang, Boyolali, Magelang), yang diharapkan akan memberikan *multiplier effect* di wilayah ini.

7.2.4. WP Banglor

WP Banglor meliputi 2 (dua) kabupaten di perbatasan sebelah timur-utara Jawa Tengah dengan Jawa Timur yaitu Kabupaten Rembang dan Blora, difokuskan sebagai PKW dengan kawasan perkotaan Cepu sebagai simpul utama, sedangkan perkotaan Rembang diusulkan menjadi PKW. PKL wilayah Banglor meliputi Kawasan Perkotaan Lasem dan Blora.

Sektor unggulan yang dapat dikembangkan adalah pertambangan minyak dan gas, pertambangan mineral, perikanan, pariwisata, perhubungan, pertanian, yang ditunjang oleh kehutanan, perkebunan dan peternakan. Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Banglor adalah **“Pembangunan Wilayah Banglor Berbasis Perindustrian dan Agroforestri yang Didukung Pariwisata Terpadu Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”**.

Pengembangan wilayah Banglor untuk Tahun 2018 sampai dengan 2023 ditargetkan untuk bisa mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,30% sampai dengan 5,75%, Angka Kemiskinan pada kisaran 8,82% sampai dengan 9,82%; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,60% sampai dengan 4,10% serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 68,77 sampai dengan 70,70. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 7.13.
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi WP Banglor
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Blora	5,35-5,85	5,40-5,90	5,70-6,10	5,90-6,30	6,10-6,50
2	Rembang	5,10-5,50	5,20-5,60	5,50-5,90	5,70-6,10	5,90-6,30

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 7.14.
Sasaran Kemiskinan WP Banglor
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Blora	10.35 - 11.35	9.80 - 10.80	9.26 - 10.26	8.71 - 9.71	8.16 - 9.16
2	Rembang	13.29 - 14.29	12.18 - 13.18	11.07 - 12.07	9.96 - 10.96	8.84 - 9.84

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 7.15.
Sasaran TPT WP Banglor
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Blora	2,70-2,80	2,70-2,80	2,65-2,80	2,65-2,75	2,60-2,70
2	Rembang	4,19	4,10-4,20	4,00-4,20	4,00-4,15	3,90-4,10

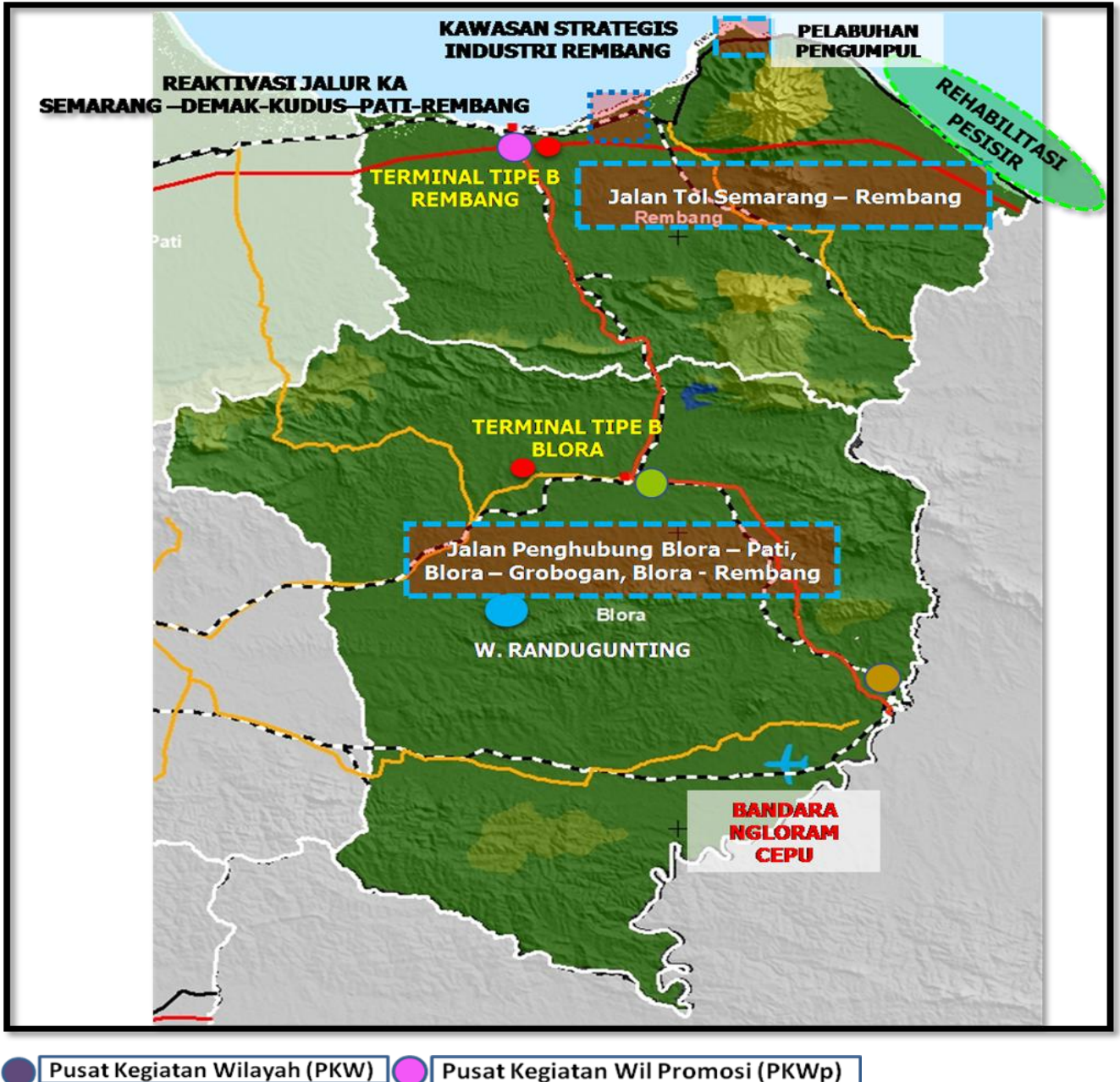
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 7.16.
Sasaran IPM WP Banglor
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Blora	68,30	68,42	68,54	68,66	68,77
2	Rembang	70,73	70,96	71,18	71,39	71,60

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Untuk mencapai indikator makro tersebut maka dilakukan upaya sebagaimana terlihat dalam peta sebagai berikut :



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 7.9.
Arah Pengembangan Wilayah Banglor

Pembangunan pengembangan wilayah diupayakan untuk meningkatkan pemerataan wilayah timur Jawa Tengah, maka ke depan di wilayah ini akan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru, dengan membangun kawasan industri baru di Rembang dan Pengembangan Bandara Ngloram, yang diharapkan akan memberikan daya ungkit dan memacu percepatan pembangunan di wilayah ini. Untuk mendukung pelayanan sosial ekonomi di wilayah ini, Kawasan Perkotaan Rembang didorong untuk dapat menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Selain itu produksi perikanan tangkap juga ditingkatkan, didukung dengan pembangunan sarana prasarana pendukungnya, terutama di wilayah pantura.

Dalam mencapai arah pengembangan wilayah berbasis industri dan *agroforestry* yang didukung kepariwisataan, akan dilakukan melalui pengembangan infrastruktur wilayah yang memadai yaitu Pembangunan Terminal Tipe B di Kab. Rembang, Fasilitasi Revitalisasi/Reaktivasi Jalur Rel Kereta Api Non Aktif pada Jalur Semarang – Demak – Kudus – Pati - Rembang; Fasilitasi Peningkatan Jalan Nasional Kabupaten Rembang - Kabupaten Blora - Batas Jatim, Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Kabupaten Blora - Kabupaten Pati dan Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Kabupaten Blora - Kabupaten Grobogan.

Dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan khususnya menjaga keberlanjutan air tanah maka dilakukan Konservasi CAT Pati - Rembang dan penanganan kerusakan pesisir (Rembang). Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan air baku maka akan dilakukan Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku dan Fasilitasi Pembangunan Bendungan Randugunting.

7.2.5. WP Wanarakuti

WP Wanarakuti (Juwana – Jepara – Kudus - Pati) meliputi Kabupaten Jepara, Kudus dan Pati, ifokuskan pada pemantapan fungsi - fungsi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang meliputi 6 kawasan perkotaan yaitu Pati, Juwana, Tayu, Jepara, Kalinyamatan dan Bangsri. Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah Wanarakuti yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan pengembangan wilayah Wanarakuti diarahkan pada ***“Pengembangan Wilayah Wanarakuti yang lestari Berbasis Industri Pengolahan dan Pariwisata yang Didukung Sektor Agrominapolitan Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”***.

Pengembangan wilayah Wanarakuti untuk Tahun 2018 sampai dengan 2023 ditargetkan untuk bisa mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 3,16% sampai dengan 5,70%, Angka Kemiskinan pada kisaran 6,53% sampai dengan 9,16%; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 2,90% sampai dengan 3,50% serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

pada kisaran 72,95 sampai dengan 76,48. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 7.17.
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi WP Wanarakuti
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jepara	5,40-5,80	5,50-5,90	5,80-6,20	6,00-6,40	6,20-6,60
2	Kudus	2,60-3,00	2,70-3,10	3,00-3,40	3,20-3,60	3,40-3,80
3	Pati	5,20-5,60	5,30-5,70	5,60-6,00	5,80-6,20	6,00-6,40

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 7.18.
Sasaran Kemiskinan WP Wanarakuti
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jepara	6,6 - 7,1	6,2 -6,6	5,8 - 6,2	5,4 - 5,8	5 - 5,4
2	Kudus	5.66 - 6.66	5.33 - 6.33	5.00 - 6.00	4.67 - 5.67	4.35 - 5.35
3	Pati	8,54 - 9,54	8,18 - 9,18	7,82 - 8,82	7,46 - 8,46	7,1 - 8,1

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 7.19.
Sasaran TPT WP Wanarakuti
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jepara	3,05	3,00	3,00	3,00	3,00
2	Kudus	3,5	3,5	3,5	3, 5	3,5
3	Pati	3,47	3,29	3,19	3,01	2,90

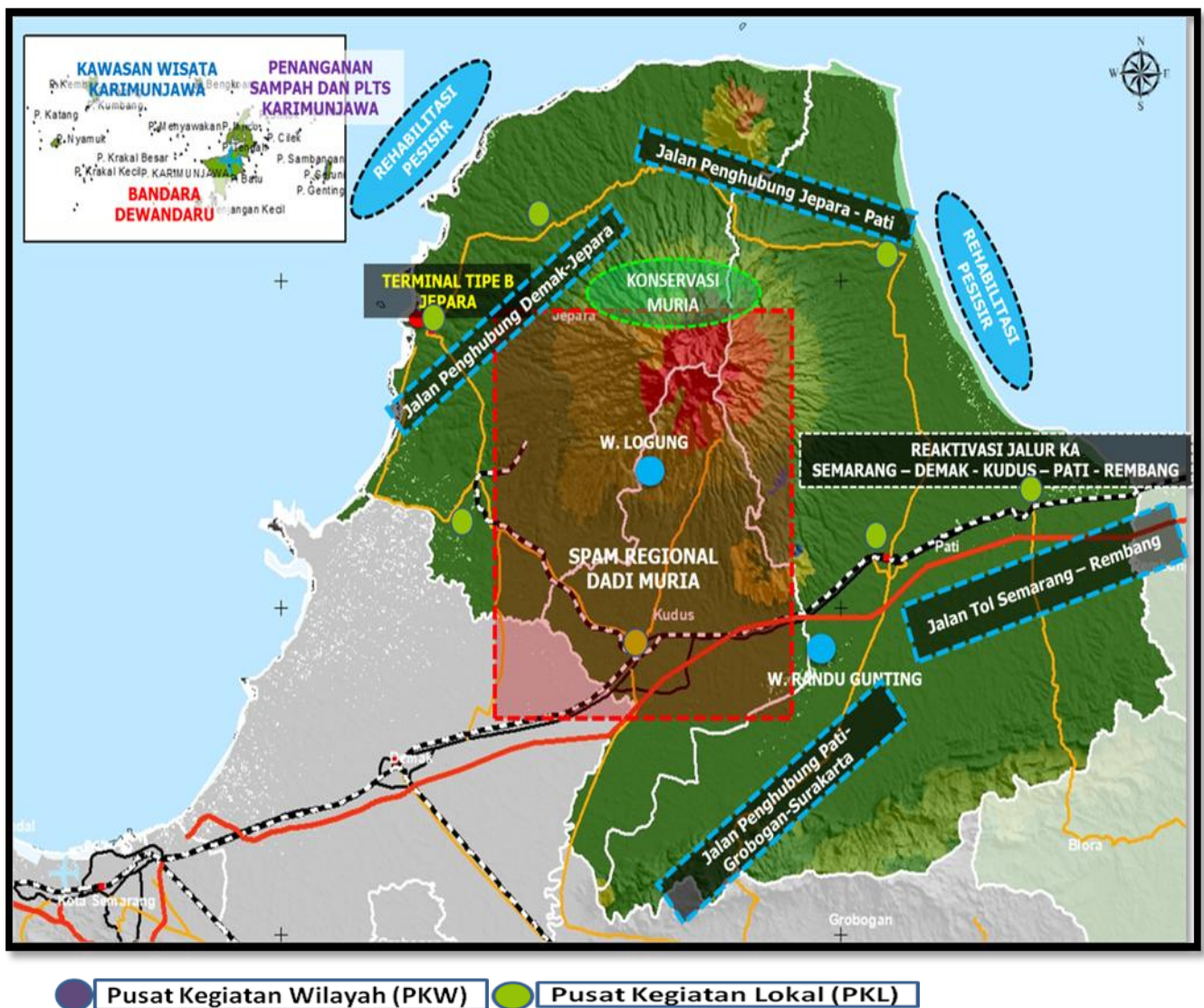
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 7.20.
Sasaran IPM WP Wanarakuti
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Jepara	71,60	72,09	72,44	72,81	73,10
2	Kudus	74,51	74,85	75,05	75,09	75,14
3	Pati	71,22	71,52	71,84	72,11	72,34

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Untuk mencapai indikator makro tersebut maka dilakukan upaya sebagaimana terlihat dalam peta sebagai berikut :



Gambar 7.10
Arah Pengembangan Wilayah Wanarakuti

Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dengan pengembangan infrastruktur yaitu Fasilitas Pengembangan Bandara Dewandaru Karimunjawa; Peningkatan konektivitas, sarana dan prasarana pendukung ekonomi antara wilayah perdesaan dan perkotaan; Fasilitas Revitalisasi / Reaktivasi Jalur Rel Kereta Api Non Aktif pada Jalur Semarang – Demak – Kudus – Pati - Rembang; Pembangunan Terminal Tipe B di Kab. Jepara; Peningkatan aksesibilitas kawasan Borobudur ke Karimunjawa; Inisiasi pembangunan jalan Demak-Jepara (*Coastal Road*).

Untuk Pemenuhan kebutuhan air baku maka akan dilakukan dengan Inisiasi pembangunan SPAM Regional Dadi Muria (Grobogan, Kudus, Pati) dan Fasilitas pembangunan Bendungan Logung. Untuk menjamin ketersediaan sumber air baku akan dilakukan upaya konservasi DAS Juwana.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal maka akan dikembangkan industri pengolahan dan pariwisata didukung oleh agrominapolitan.

Selain itu, diperlukan sarana prasarana pendukung pariwisata melalui Penyiapan listrik PLTS Komunal (Karimunjawa), Penanganan sampah (Karimunjawa), Pengembangan dan pemasaran kawasan strategis pariwisata nasional Karimunjawa - Semarang dan sekitarnya serta destinasi pariwisata Rembang-Blora.

7.2.6. WP Kedungsepur

WP Kedungsepur meliputi Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Ungaran (Kabupaten Semarang), Kota Semarang, Kota Salatiga, dan Purwodadi (Kabupaten Grobogan) sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Jawa Tengah maka, wilayah Kedungsepur diarahkan pada upaya : Perwujudan kawasan metropolitan Semarang sebagai ibukota provinsi yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama Jawa Tengah; Pengembangan kawasan strategis ekonomi dalam konteks kawasan ekonomi khusus; Perwujudan dari sisi hubungan intraregional sebagai pusat distribusi bagi produk dari daerah pedalaman karena berada sekitar jalur Pantura serta; Perwujudan secara interregional sebagai wilayah transit/pengumpul perdagangan dan jasa dari wilayah barat dan timur Jawa serta pulau-pulau lainnya terutama Kalimantan.

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi 12 kawasan perkotaan Purwodadi, Gubug, Godong, Demak, Mranggen, Ungaran, Ambarawa, Kendal, Boja, Kaliwungu, Weleri, dan Sukorejo yang diharapkan menunjang kegiatan sosial ekonomi disekitarnya. Kawasan-kawasan Wilayah Kedungsepur yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya seperti Kawasan Masjid Demak dan Kawasan Candi Gedongsongo. Selain itu juga terdapat kawasan strategis kepentingan ekonomi yaitu Kawasan Industri Kendal – Semarang – Demak.

Kebijakan Arah pengembangan WP Kedungsepur adalah “**Pengembangan Wilayah Kedungsepur Berbasis Perdagangan Jasa, dan Industri Pengolahan yang Sinergis Dengan Kegiatan Pertanian dan Pariwisata Terpadu Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan**”.

Pengembangan wilayah Kedungsepur untuk Tahun 2018 sampai dengan 2023 ditargetkan untuk bisa mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,20% sampai dengan 6,50%, Angka Kemiskinan pada kisaran 0,28% sampai dengan 9,28% ; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 1,70% sampai dengan 4,80% serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 71,16 sampai dengan 83,69. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 7.21.
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi WP Kedungsepur
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Grobogan	5,10-5,50	5,20-5,60	5,50-5,90	5,70-6,10	5,90-6,30
2	Demak	5,20-5,60	5,30-5,70	5,60-6,00	5,80-6,20	6,00-6,40
3	Semarang	5,90-6,30	6,00-6,40	6,30-6,70	6,50-6,90	6,70-7,10
4	Kendal	5,80-6,20	5,90-6,30	6,20-6,60	6,40-6,80	6,70-7,10
5	Kota Semarang	5,90-6,30	6,00-6,40	6,30-6,70	6,50-6,90	6,80-7,20
6	Kota Salatiga	5,30-5,70	5,40-5,80	5,70-6,10	5,90-6,30	6,10-6,50

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 7.22.
Sasaran Kemiskinan WP Kedungsepur
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Grobogan	10.80 - 11.80	10.29 - 11.29	9.78 - 10.78	9.27 - 10.27	8.76 - 9.76
2	Demak	10.90 - 11.90	10.26 - 11.26	9.62 - 10.62	8,98 - 9,98	8,34 - 9,34
3	Semarang	6.05 - 7.05	5.81 - 6.81	5.57 - 6.57	5.32 - 6.32	5.08 - 6.08
4	Kendal	8.27 - 9.27	7.70 - 8.70	7.14 - 8.14	6.57 - 7.57	6.00 - 7.00
5	Kota Semarang	3,85 - 4,85	3,75 - 4,75	3,65 - 4,65	3,45 - 4,45	3,20 - 4,20
6	Kota Salatiga	3.52 - 4.52	3.21 - 4.21	2.90 - 3.90	2.59 - 3.59	2.27 - 3.27

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 7.23.
Sasaran TPT WP Kedungsepur
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Grobogan	5,5	5,1	4,8	4,5	4,1
2	Demak	4,3-4,4	4,3-4,4	4,2-4,3	4,2-4,3	4,15-4,25
3	Semarang	1,7-1,8	1,7-1,8	1,7-1,8	1,7-1,8	1,7-1,8
4	Kendal	6,3	6,0	5,7	4,7-4,8	4,6-4,7
5	Kota Semarang	4,97*)	4,9-5,0*)	4,8-5,0*)	4,8-4,9*)	4,7-4,8*)
6	Kota Salatiga	5,98	5,83	5,78	5,78	3,6-3,8

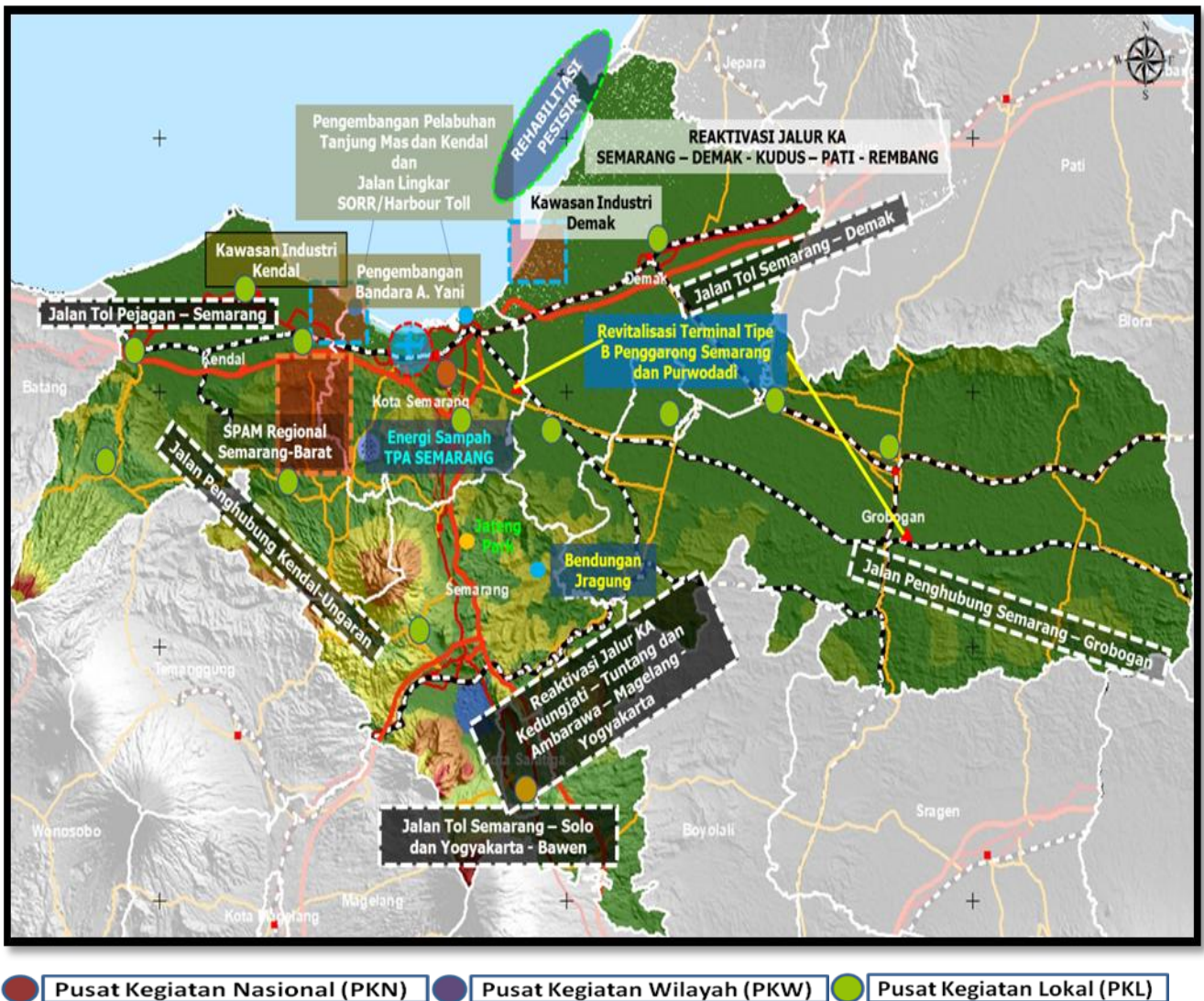
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 7.24.
Sasaran IPM WP Kedungsepur
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Grobogan	69,75	69,96	70,16	70,36	70,56
2	Demak	71,63	71,91	72,17	72,43	72,70
3	Semarang	73,55	73,85	74,05	74,21	75,00
4	Kendal	71,21	71,63	71,99	72,32	72,65
5	Kota Semarang	82,67	82,88	83,12	83,32	83,32
6	Kota Salatiga	82,09	82,67	83,18	83,69	83,94

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Untuk mencapai indikator makro tersebut maka dilakukan upaya sebagaimana terlihat dalam peta sebagai berikut :



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 7.11
Arah Pengembangan Wilayah Kedungsepur

Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas dengan pengembangan infrastruktur meliputi: Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi. Pelayanan jaringan infrastruktur transportasi dilakukan melalui: Pengembangan Angkutan Umum Massal Berbasis Jalan (3 koridor) dan rel (Kereta Api Komuter), Fasilitas pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan Kendal; Fasilitas Revitalisasi / Reaktivasi Jalur Rel Kereta Api Non Aktif pada Jalur Kedungjati – Tuntang dan Ambarawa – Secang – Magelang – Yogyakarta; Fasilitas Pembangunan Jalan Tol Semarang – Demak, Fasilitas Pembangunan Jalan Lingkar SORR/Semarang *Harbour Toll*; Fasilitas pengembangan Bandara A. Yani, Kota Semarang.

Pemenuhan kebutuhan air baku dilakukan : Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku Pendukung untuk pengembangan Kawasan Industri (KIK dan *Jatengland*).

Selain itu upaya pengelolaan lingkungan diantaranya : Konservasi air tanah CAT Semarang - Demak Rehabilitasi pesisir (Demak, Kendal, Kota Semarang); Penanganan daerah kritis (Kabupaten Semarang, Grobogan) dan Pembangunan Pengelolaan Limbah B3 Rumah Sakit Jawa Tengah; Pembangunan *Waste to Energy (Incenerator)* Kota Semarang

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal meliputi perdagangan, jasa, industri kawasan Kendal dan Demak dan Pembangunan *Jateng Park* dengan pola Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha.

7.2.7. WP Petanglong

WP Petanglong meliputi Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan, diarahkan sebagai PKW meliputi Kota Pekalongan, dan PKL meliputi Kawasan Perkotaan Limpung, Batang, Kajen, Kedungwuni, dan Wiradesa. Simpul utama pada kawasan Petanglong adalah kawasan perkotaan Pekalongan dan sekitarnya. Sektor unggulan dari wilayah ini adalah pertanian, pariwisata, industri, dan perikanan dan PKL.

Arah kebijakan pembangunan untuk wilayah Petanglong adalah **“Pengembangan Wilayah Petanglong Berbasis Industri Pengolahan Kreatif dan Pertanian Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”**.

Pengembangan wilayah Petanglong untuk Tahun 2018 sampai dengan 2023 ditargetkan untuk bisa mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,00% sampai dengan 5,60%, Angka Kemiskinan pada kisaran 4,5% sampai dengan 9,13%; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 4,05% sampai dengan 5,55% serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 70,60 sampai dengan 75,13. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 7.25.
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi WP Petanglong
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pekalongan	5,00-5,40	5,40-5,80	5,70-6,10	5,90-6,30	6,10-6,50
2	Batang	5,40-5,80	5,50-5,90	5,80-6,20	6,00-6,40	6,20-6,60
3	Kota Pekalongan	5,40-5,80	5,50-5,90	5,80-6,20	6,00-6,40	6,30-6,70

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 7.26.
Sasaran Kemiskinan WP Petanglong
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pekalongan	8.36 - 9.36	7.67 - 8.67	6.98 - 7.98	6.29 - 7.29	5.60 - 6.60
2	Batang	8,01 -8,51	7,67 - 8,14	7,32 - 7,82	6,70 - 7,20	5,14 - 5,64
3	Kota Pekalongan	5.45 - 6.45	5.15 - 6.15	4.85 - 5.85	4.55 - 5.55	4.25 - 5.25

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 7.27.
Sasaran TPT WP Petanglong
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pekalongan	4,20-4,30	4,20-4,30	4,15-4,25	4,10-4,20	4,05-4,15
2	Batang	5,65-5,75	5,60-5,70	5,55-5,65	5,50-5,60	5,45-5,55
3	Kota Pekalongan	5,00-5,10	5,00-5,10	4,90-5,10	4,90-5,00	4,85-4,95

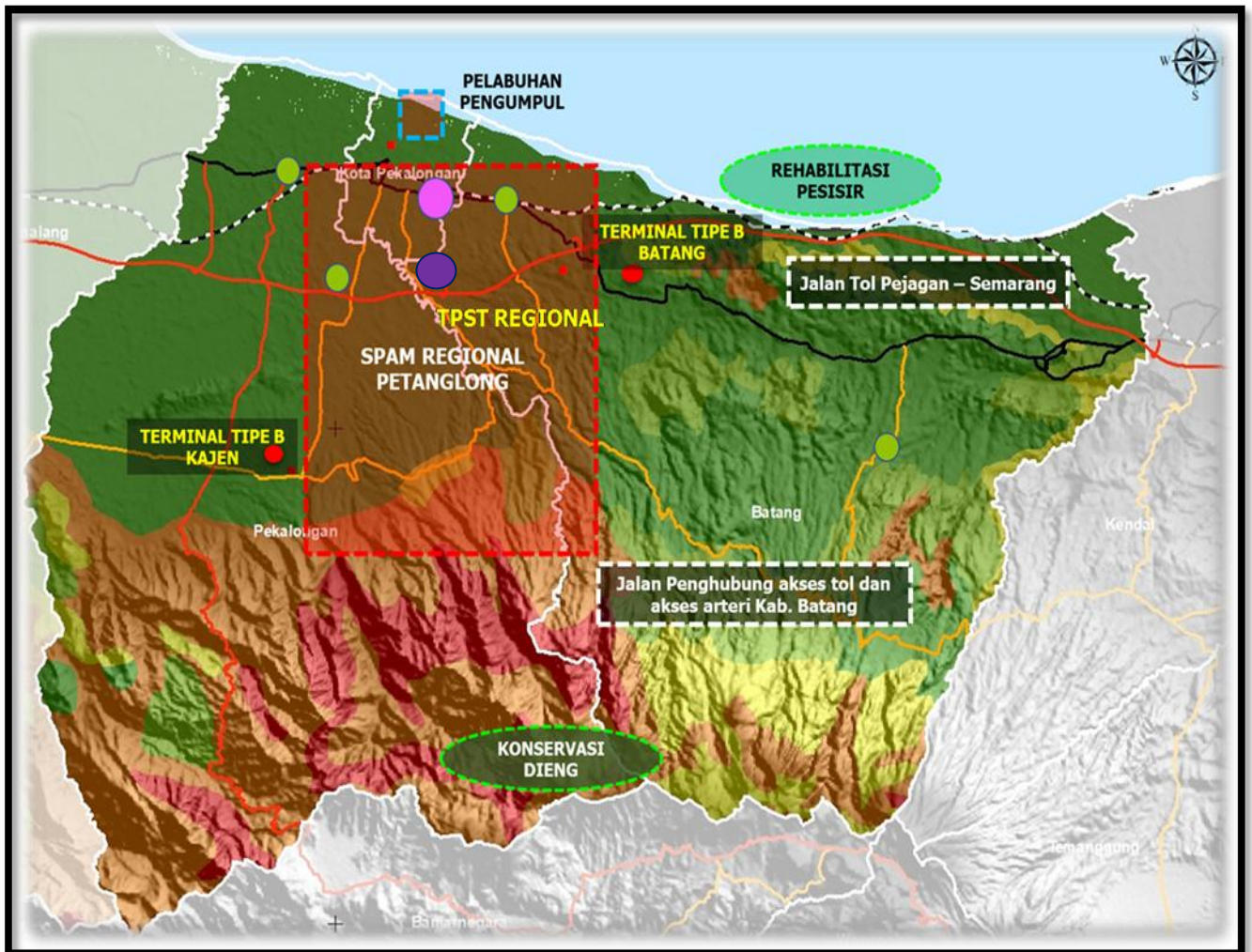
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 7.28.
Sasaran IPM WP Petanglong
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Pekalongan	69,03	69,65	70,01	70,30	70,60
2	Batang	69,22	69,58	69,94	70,32	70,70
3	Kota Pekalongan	74,50	74,65	74,80	74,96	75,13

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Untuk mencapai indikator makro tersebut maka dilakukan upaya sebagaimana terlihat dalam peta sebagai berikut :



● Pusat Kegiatan Lokal (PKL) ● Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)

Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 7.12.
Arah Pengembangan Wilayah Petanglong

Pemantapan konektivitas dan aksesibilitas akan dilakukan pengembangan infrastruktur meliputi : Revitalisasi Terminal Tipe B Banyuputih, Kabupaten Batang dan Kajen, Kabupaten Pekalongan; Peningkatan Jalan Provinsi Akses Menuju Jalan Tol di Kabupaten Pekalongan dan Peningkatan Jalan Provinsi Akses Menuju Jalan Arteri Pantura di Kabupaten Batang.

Pemenuhan kebutuhan air baku maka akan dilakukan pembangunan SPAM Regional Petanglong (Kabupaten Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan).

Selain itu, diperlukan upaya pengelolaan lingkungan diantaranya : utamanya rehabilitasi dan konservasi Kawasan Dieng (Pekalongan, Batang) serta Konservasi CAT Pekalongan - Pemalang; penanganan kerusakan pesisir; Penanganan Limbah Batik dan TPST Regional.

7.2.8. WP Bregasmalang

WP Bregasmalang meliputi Kabupaten Brebes, Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Kabupaten Pemalang, diarahkan sebagai PKW dan PKL yang berperan penting di wilayah perbatasan barat-utara Jawa Tengah dengan Jawa Barat. PKW meliputi Kota Tegal, dan PKL meliputi Comal, Pemalang, Slawi – Adiwerna, Ketanggungan – Kersana, Bumiayu, Brebes, dan Losari. Selanjutnya Kota Tegal diusulkan sebagai PKN Promosi. Fokus pengembangan wilayah ini adalah pada pengembangan simpul-simpul pusat pertumbuhan koridor perkotaan Brebes – Tegal – Adiwerna – Slawi, perkotaan Pemalang dan sekitarnya, perkotaan Comal, perkotaan Ketanggungan - Kersana, serta perkotaan Bumiayu dan sekitarnya. Sektor unggulan yang dapat dikembangkan di wilayah ini adalah perikanan, industri, pertanian, agroindustri, pariwisata ditunjang oleh kehutanan dan energi.

Memperhatikan potensi dan keunggulan wilayah Bregasmalang yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, serta memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah ke depan, maka ditetapkan konsep pengembangan wilayah Bregasmalang adalah **“Pengembangan Wilayah Bregasmalang berbasis Agrominapolitan dan Industri Pengolahan Dengan Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan”**.

Pengembangan wilayah Bregasmalang untuk Tahun 2018 sampai dengan 2023 ditargetkan untuk bisa mencapai 4 (empat) indikator utama yaitu Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,50% sampai dengan 6,55%, Angka Kemiskinan pada kisaran 3,06% sampai dengan 17,62%; Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,20% sampai dengan 7,90% serta Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kisaran 66,35 sampai dengan 74,72. Secara lengkap dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 7.29.
Sasaran Pertumbuhan Ekonomi WP Bregasmalang
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Brebes	5,50-5,90	5,60-6,00	5,90-6,30	6,10-6,50	6,30-6,70
2	Tegal	6,20-6,60	6,20-6,60	6,50-6,90	6,70-7,10	7,00-7,40
3	Pemalang	5,50-5,90	5,60-6,00	5,80-6,20	6,00-6,40	5,90-6,30
4	Kota Tegal	5,40-5,80	5,50-5,90	5,70-6,10	5,70-6,10	5,80-6,20

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 7.30.
Sasaran Kemiskinan WP Bregasmalang
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Brebes	16,10 -17,10	15,55 - 16,55	15,02 -16,02	14,51 -15,51	14,01 -15,01
2	Tegal	7,62	7,01	6,4	5,79	5,19
3	Pemalang	14.39 - 15.39	13.75 - 14.75	13.10 - 14.10	12.46 - 13.46	11.81 - 12.81
4	Kota Tegal	6.61 - 7.61	6.40 - 7.40	6.20 - 7.20	5.99 - 6.99	5.79 - 6.79

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 7.31.
Sasaran TPT WP Bregasmalang
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Brebes	7,90-8,00	7,90-8,00	7,80-7,90	7,80-7,90	7,70-7,80
2	Tegal	7,20-7,30	7,20-7,30	7,10-7,20	7,10-7,20	7,00-7,10
3	Pemalang	5,40-5,50	5,40-5,50	5,30-5,50	5,30-5,50	5,20-5,40
4	Kota Tegal	8,00-8,10	8,00-8,10	7,90-8,00	7,80-7,90	7,70-7,90

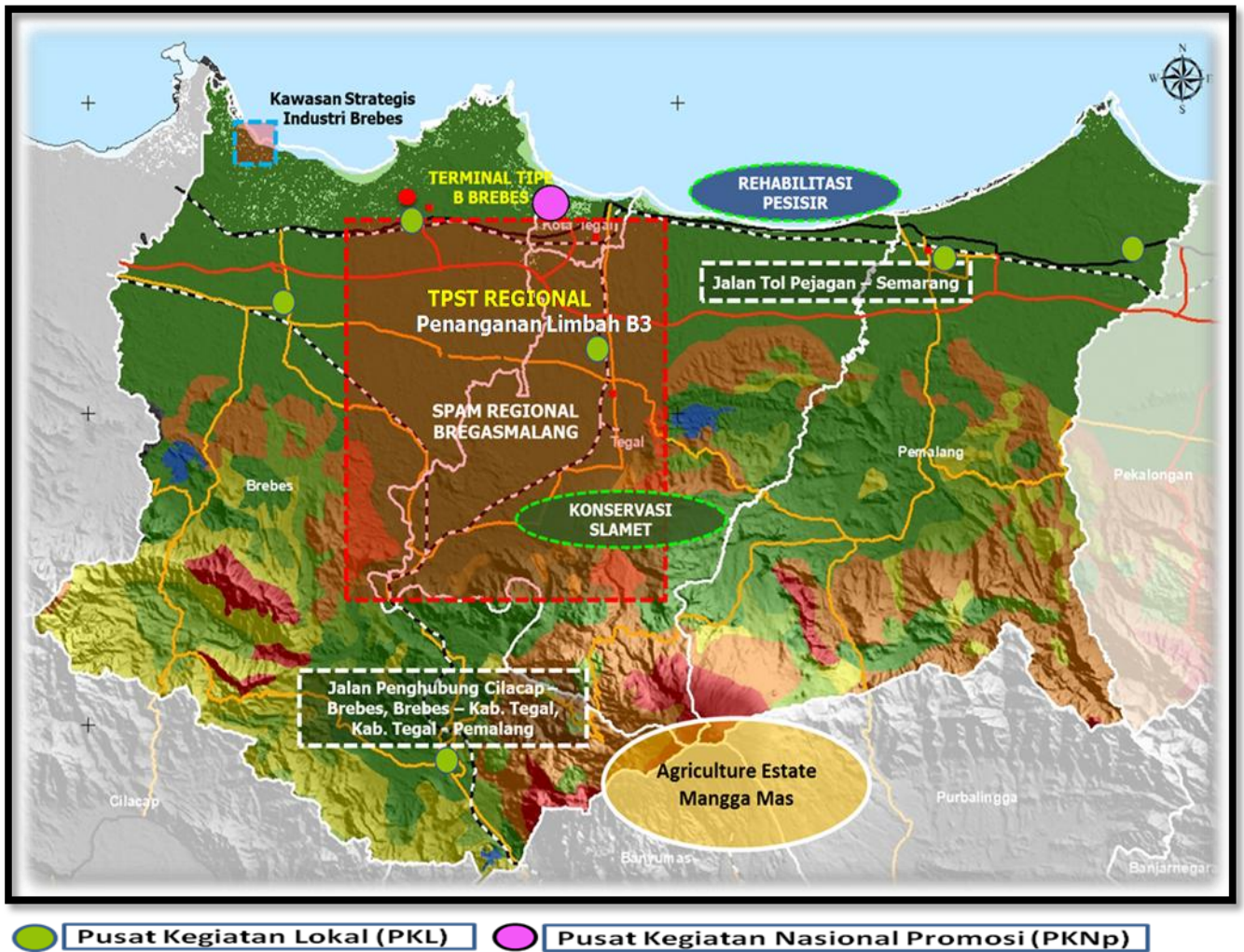
Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Tabel 7.32.
Sasaran IPM WP Bregasmalang
Per Kabupaten/Kota Tahun 2019 -2023

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Brebes	66,08	66,33	66,58	66,84	67,10
2	Tegal	67,68	67,87	67,91	68,20	68,51
3	Pemalang	65,11	65,44	65,78	66,11	66,36
4	Kota Tegal	74,30	74,47	74,56	74,64	74,72

Sumber: Hasil Analisis Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Untuk mencapai indikator makro tersebut maka dilakukan upaya sebagaimana terlihat dalam peta sebagai berikut :



Sumber: Bappeda Provinsi Jawa Tengah, 2018

Gambar 7.13.
Arah Pengembangan Wilayah Bregasmalang

Pembangunan pengembangan dilakukan dalam upaya meningkatkan pemerataan wilayah barat Jawa Tengah dengan dikembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru yaitu membangun kawasan industri baru di Brebes. Selain itu Wilayah Bregasmalang juga merupakan bagian Kawasan Pariswisata Lereng Gunung Slamet dan Kawasan Agropolitan MANGGA EMAS (Pemalang, Purbalingga, Brebes, Banyumas), yang diharapkan akan memberikan *multiplier effect* di wilayah ini. Selain itu produksi perikanan tangkap juga ditingkatkan, didukung dengan pembangunan sarana prasarana pendukungnya, terutama di wilayah pantura. Sedangkan bagian selatan wilayah ini, diarahkan untuk pengembangan pariwisata alam, serta memperkuat pembangunan wilayah berbasis pertanian, yaitu di Kabupaten Tegal, Pemalang, dan Brebes bagian selatan.

Untuk itu maka peningkatan konektivitas dan aksesibilitas diarahkan untuk pengembangan infrastruktur meliputi : Pembangunan Jalan Tol Pejagan – Semarang; Peningkatan konektivitas wilayah Bregasmalang; Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Kabupaten Brebes - Kabupaten Cilacap (Salem - Bandungsari); Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Brebes - Kabupaten Tegal; Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Kabupaten Tegal - Kabupaten Pemalang dan Revitalisasi Terminal Tipe B Tanjung, Kabupaten Brebes.

Peningkatan SPAM Regional Bregas (Kabupaten Brebes, Tegal, dan Kota Tegal) dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku untuk mendukung pengembangan kawasan Industri dan agropolitan.

Selain itu, upaya pengelolaan lingkungan antara adalah Konservasi CAT Pekalongan - Pemalang, Penanganan Lahan Kritis (Tegal, perbatasan Brebes - Kuningan, Pemalang); Rehabilitasi pesisir (Brebes, Tegal, Pemalang); Reklamasi bekas tambang (Pemalang); Penanganan Limbah B3 (Kabupaten Tegal) dan Pembuatan TPST Regional.

7.3. Arahan Pembangunan Wilayah Perbatasan Antar Provinsi.

Ketimpangan pembangunan dan pelayanan publik seringkali terjadi pada wilayah perbatasan daerah dibandingkan dengan wilayah lainnya. Hal ini dapat disebabkan karena fokus dan arah pembangunan yang belum cermat, kondisi geografis yang kurang menguntungkan serta kurangnya dukungan sarana dan prasarana infrastruktur dan pelayanan publik seperti pemenuhan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat, dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta sosial). Di sisi lain wilayah perbatasan mempunyai fungsi yang strategis sebagai *etalase* gambaran daerah / wilayah bersangkutan.

Dalam rangka mendorong pembangunan di wilayah perbatasan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah aktif melakukan sinergitas pembangunan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan DI.Yogyakarta. Ada 5 (lima) konsep pengembangan pembangunan wilayah perbatasan, yaitu:

- 1) Pengembangan Wilayah, adalah upaya mewujudkan keterpaduan penggunaan sumber daya untuk merekatkan dan menyeimbangkan pembangunan wilayah;
- 2) Keselarasan, adalah keberlanjutan pembangunan
- 3) Penanganan konflik/ potensi konflik,
- 4) Pemanfaatan bersama, adalah pemanfaatan fasilitas/sarana prasarana pada wilayah perbatasan
- 5) Pengawasan dan penanganan bersama, adalah upaya pelaksanaan/ implementasi peraturan

Tabel 7.33
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Kedungsapur
Tahun 2018-2023

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan
<i>Pengembangan Wilayah Kedungsepur Berbasis Perdagangan Jasa, dan Industri Pengolahan yang Sinergis Dengan Kegiatan Pertanian dan Pariwisata Terpadu Berlandaskan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan</i>	Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, telekomunikasi, energi, dan sumber daya air yang terpadu dan merata di seluruh wilayah Provinsi.	Meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut dan udara	Pengembangan Perhubungan Darat	Revitalisasi Terminal Tipe B : Penggaron, Kota Semarang & Purwodadi, Kab. Grobogan
			Pengembangan Perhubungan Udara (Fasilitasi)	Fasilitasi pengembangan Bandara A. Yani, Kota Semarang
			Pengembangan Perhubungan Laut	Fasilitasi pengembangan Pelabuhan Tanjung Emas dan Kendal
			Pembangunan jalan dan jembatan	Pendukung pengembangan kawasan Industri: Koridor Semarang – Purwodadi – Blora
				Pendukung pengembangan Kawasan Industri Demak
			Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi	
			Pengendalian banjir	
			Peningkatan kinerja pengelolaan air minum dan sanitasi	Inisiasi SPAM Regional Dadi Muria (Grobogan, Kudus, Pati) dan SPAM Regional Semarsalat
	Pengelolaan Pertambangan Minerba	Penyiapan bahan tambang untuk pembangunan infrastruktur (kecuali Kota Semarang)		
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang merata di wilayah Kedungsepur melalui pengotimalkan sektor potensial dan dukungan pengembangan	Pengembangan kawasan industri	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Kawasan Industri;	Pendukung pengembangan kawasan Industri: Koridor Semarang – Purwodadi – Blora
			Penataan dan Peningkatan Pelayanan Kawasan Perdagangan dan Jasa;	Pendukung pengembangan kawasan Industri: Demak
			Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Kawasan Perdagangan dan Jasa;	
			Kerjasama Pembangunan Perekonomian Wilayah.	
			Pengembangan sentra-sentra industri potensial	
Pengolahan Jaringan Irigasi dan Air Baku			APBD : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku di Kab. Semarang, Kab. Kendal, Kab. Demak , Kota Salatiga); Fasilitasi Pembangunan Bendungan Singorojo	
			APBN : Fasilitasi Pembangunan Bendung Jragung	
Pengelolaan Pertambangan Minerba	Bahan Industri Semen dan genteng batu bata (Purwodadi)			

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan
		Pengembangan pariwisata	Pengembangan destinasi, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata dan ekonomi kreatif;	Mendukung pengembangan dan pemasaran: Kawasan strategis pariwisata nasional Karimunjawa-Semarang dan sekitarnya, dan mendukung pengembangan Destinasi pariwisata Prov Jateng: Semarang-Karimunjawa, dan Destinasi Pariwisata Rembang-Blora; Pengembangan Bledug Kuwu / Grobogan; Rawapening Kabupaten Semarang
			Pemanfaatan Hutan	Pembangunan Jateng Park (Kab. Semarang) (KPBU)
	Meningkatkan dukungan dan kinerja infrastruktur pada wilayah-wilayah pertanian Kedungsepur	Peningkatan konektivitas Wilayah Agropolitan	Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Pembangunan jalan;	
			Rehabilitasi/pemeliharaan jalan;	
			Tanggap darurat jalan;	
			Pembangunan sistem informasi/data base jalan	
	Pengembangan infrastruktur yang merata guna mendukung aktivitas di wilayah pertanian Kedungsepur yang masih tertinggal	Peningkatan dukungan dan kinerja infrastruktur pada wilayah-wilayah pertanian Kedungsepur	Perencanaan Pembangunan Daerah	
			Peningkatan penerapan teknologi pertanian	
	Pengembangan pelayanan infrastruktur regional di wilayah Kedungsepur	Menjaga keterkaitan antar kawasan perkotaan, antara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan, serta antara kawasan perkotaan di sekitarnya;	Pengembangan Perhubungan Darat	Pengembangan Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan
			Kerjasama Pembangunan Perekonomian Wilayah	Koridor : Terminal Bawen – Stasiun Tawang (sudah operasional di Tahun 2017), Kota Semarang – Demak, Kota Semarang – Kendal
			Rehabilitasi/pemeliharaan jalan;	
			Pembangunan sistem informasi/data base jalan	
	Pengembangan sektor ekonomi potensial yang terpadu di wilayah Kedungsepur	Peningkatan konektivitas internal wilayah Kedungsepur melalui keterhubungan pengembangan sektor ekonomi	Kerjasama Pembangunan Perekonomian Wilayah	
			Pembangunan jalan;	
			Rehabilitasi/pemeliharaan jalan;	
			Tanggap darurat jalan;	
			Pembangunan sistem informasi/data base jalan	
	Peningkatan interaksi internal wilayah Kedungsepur	Peningkatan dukungan prasarana jalan penghubung inter wilayah di Kedungsepur	Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Kawasan Perdagangan dan Jasa	Fasilitasi peningkatan kualitas pelayanan tata niaga dan pengawasan barang beredar di wilayah Kedungsepur
			Pembangunan jalan dan jembatan;	

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan
			Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan.	
		Penataan dan Peningkatan Pelayanan Kawasan Perdagangan dan Jasa		
		Pengembangan konektivitas wilayah Kedungsepur	Pengembangan Perhubungan Darat	Fasilitasi Revitalisasi / Reaktivasi Jalur Rel Kereta Api Non Aktif pada Jalur : Kedungjati - Tuntang
			Pembangunan jalan dan jembatan	Fasilitasi Pembangunan Jalan Tol Semarang - Demak; Fasilitasi pembangunan sabuk pantai Demak-Jepara
				Fasilitasi Pembangunan Jalan Lingkar SORR / Semarang <i>Harbour Toll</i>
				Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang di Kab. Demak
				Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Kendal - Ungaran
				Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Semarang - Grobogan
			Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Kawasan Perdagangan dan Jasa	
Peningkatan interaksi eksternal wilayah Kedungsepur dengan region lain yang berbatasan	Peningkatan dukungan transportasi dalam memperkuat interaksi eksternal wilayah Kedungsepur	Pengembangan Perhubungan Darat Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Kawasan Perdagangan dan Jasa	Pengembangan Perhubungan Darat Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Kawasan Perdagangan dan Jasa	Fasilitasi Revitalisasi / Reaktivasi Jalur Rel Kereta Api Non Aktif pada Jalur : Ambarawa – Secang – Magelang - Yogyakarta
Pengembangan sumber daya manusia di wilayah Kedungsepur melalui pengoptimalan pendidikan masyarakat	Peningkatan pelayanan pendidikan di wilayah Kedungsepur melalui penyelenggaraan SMK Negeri <i>Boarding</i> dan SMK Negeri <i>Semi Boarding</i> untuk siswa dari keluarga miskin	Perencanaan Pembangunan Daerah Pembinaan SMA		
	Pemberian Beasiswa Siswa Miskin (BSM) SMA, SMK, SLB	Pembinaan SMK		
	Penyelenggaraan BOS dan BOP SMA, SMK, SLB	Pembinaan Pendidikan Khusus		
	Pemberian Beasiswa Siswa Miskin (BSM) SMA, SMK, SLB			
	Penyelenggaraan BOS dan BOP SMA, SMK, SLB			

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan	
	Pengentasan permasalahan kesejahteraan sosial masyarakat	Penanganan permasalahan pengangguran di wilayah Kedungsepur	Peningkatan kesempatan kerja	Pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi, berbasis internet dan link and match pada kompetensi tenaga kerja dan kebutuhan tenaga kerja di wikayah Kedungsepur	
		Peningkatan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat	Peningkatan kualitas kawasan permukiman		
			Penyediaan rumah layak huni		
	Pengembangan Kelembagaan Kedungsepur efektif	Penguatan kerjasama regional Kedungsepur dalam penyediaan infrastruktur, pengelolaan energi alternatif dan sistem pelayanan regional	Penguatan peran pemuda untuk mempercepat pengentasan kemiskinan	Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	
			Penguatan kerjasama regional Kedungsepur dalam penyediaan infrastruktur, pengelolaan energi alternatif dan sistem pelayanan regional	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Kawasan Industri;	
				Pengembangan sarana pendukung Kawasan Pelayanan Kawasan Industri	
			Kerjasama pembangunan		
			Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah		
	Pengintegrasian kegiatan ekonomi wilayah dengan pelestarian lingkungan	Konservasi Lingkungan	Pembentukan baru badan pengelola kerjasama interwilayah Kedungsepur	Perencanaan Pembangunan Daerah;	
				Kerjasama Pembangunan Perekonomian Wilayah	
Penanganan Limbah			Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh		
			Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan	Penanganan daerah kritis (Kab Semarang, Grobogan) dan rehabilitasi pesisir (Demak, Kendal, Kota Semarang)	
		Pengembangan Kegeologian	Konservasi air tanah CAT Semarang-Demak, reklamasi bekas tambang Kota Semarang		
		Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan	Pembangunan Pengelolaan Limban B3 Rumah Sakit Jawa Tengah (BUMD)		
		Pembangunan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energy	Pembangunan <i>Waste to Energy (Incenerator)</i> Kota Semarang (KPBU)		

Tabel 7.34
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Wanarakuti
Tahun 2018-2023

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan	
Pengembangan Wilayah Wanarakuti yang Berbasis Industri pariwisata dan Agrominapolitan	Kebijakan yang mengatur koordinasi lintas sektor percepatan pembangunan ekonomi;	Pengembangan industri dan pariwisata melalui pengelolaan dengan sistem hulu hilir dengan peningkatan potensi lokal (pertanian, perikanan dan Perhutanan)	Pengembangan Perekonomian Masyarakat;	Fasilitasi kerjasama pemasaran, peningkatan kualitas produksi, sertifikasi dan pengadaan bahan baku pada sentra industri potensial di Kabupaten Jepara, Pati dan Kudus	
			Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah dalam Sektor Pemasaran Hasil Olahan;		
			Pengembangan Pemasaran;		
			Pengembangan sentra-sentra industri potensial;		
			Penataan struktur industri		
			Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan		
			Peningkatan akses pasar		
			Pengembangan destinasi dan kemitraan pariwisata.		
			Pengolahan Jaringan Irigasi dan Air Baku		APBD : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku di Kab. Pati
			APBN : Fasilitasi Pembangunan Waduk Logung		
		Pengelolaan Pertambangan Minerba	Bahan Industri genteng, batu bata, fosfat, feldspat (Pati, Jepara, Kudus)		
		Pemanfaatan jalur pantura sebagai embrio pertumbuhan wilayah dan kegiatan ekonomi		Peningkatan Infrastruktur Wilayah;	Mendukung pengembangan dan pemasaran: Kawasan strategis pariwisata nasional Karimunjawa-Semarang dan sekitarnya, dan mendukung pengembangan Destinasi pariwisata Prov Jateng: Semarang-Karimunjawa, dan destinasi pariwisata Rembang-Blora, Inisiasi pembangunan jalan Demak-Jepara (<i>Coastal Road</i>)
				Pengelolaan Pertambangan Minerba	Penyiapan bahan tambang untuk pembangunan infrastruktur
Pemenuhan kebutuhan sarana prasarana pendukung pariwisata;		Pengembangan Perhubungan Udara (Fasilitasi)	Fasilitasi Pengembangan Bandara Dewandaru Karimunjawa		
		Peningkatan Infrastruktur Wilayah;			
		Pengembangan kemitraan.			
		Peningkatan kualitas kawasan permukiman pendukung pariwisata.			
		Peningkatan Jalan penghubung kawasan Borobudur ke Karimunjawa	Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Jepara - Pati		

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan	
		Penembangunan sarana dan prasarana dasar diseluruh desa dengan kualitas yang sama diperkotaan;	Penyediaan dan pengolahan air baku		
			Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Inisiasi SPAM Regional Dadi Muria (Grobogan, Kudus, Pati)	
			Peningkatan kualitas kawasan permukiman		
	Program Pengembangan perekonomian lokal yang fokus pada sektor unggulan;	Pengembangan sektor UMKM, dan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan untuk mendukung sektor pariwisata;	Peningkatan potensi pertanian dan perikanan	Pengembangan Pemasaran;	Fasilitasi pada kegiatan pengembangan SDM, pemasaran, proses produksi dan jejaring promosi pada sentra industri potensial di kabupaten Jepara, Kudus dan Pati
				Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah dalam Sektor Pemasaran Hasil Olahan;	
				Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	
				Pengembangan sentra-sentra industri potensial.	
				Peningkatan dan Pengembangan Sarana Irigasi Pertanian;	
				Pengembangan budidaya perikanan;	Pengembangan komoditas unggulan perikanan Budidaya (Bandeng, udang, kerapu dan rumput laut)
				- Pengelolaan jaringan irigasi dan air baku	(Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Irigasi di Kab.Pati; Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku di Kab. Pati);
Pengembangan budidaya tanaman pangan dan tanaman perkebunan	Peningkatan produksi tanaman Padi, kedelai, tebu di daerah Pati, Kopi di kab Jepara				
Pengembangan wilayah yang diselenggarakan dengan memperhatikan potensi dan peluang keunggulan sumberdaya di setiap wilayah, serta memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan daya dukung lingkungan	Pemerataan pertumbuhan wilayah dengan mengoptimalkan potensi pariwisata, pertanian, perikanan dan sektor UMKM	Peningkatan pertumbuhan PDRB melalui pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, UMKM dan pariwisata	Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah dalam Sektor Pemasaran Hasil Olahan;	Fasilitasi pengembangan potensi UMKM produk unggulan daerah dan pengembangan wirausaha baru di Kabupaten Kudus, Pati dan Jepara	
			Pengembangan Perekonomian Masyarakat;		
			Pengolahan Hasil Pertanian dan Perikanan	Fasilitasi pengembangan usaha pasca panen dan pengolahan hasil pertanian dan olahan ikan	
			Peningkatan akses pasar		
			Pengembangan Pemasaran;		
			Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah dalam Sektor Pemasaran Hasil Olahan;	Fasilitasi pengembangan jejaring pemasaran produk UMKM berbasis pertanian dan pariwisata melalui peningkatan kualitas produk, sertifikasi dan <i>e-commerce</i> di Kabupaten Kudus, Pati dan Jepara	

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan
			Pengembangan Perekonomian Masyarakat;	
			Pengembangan Pemasaran;	
	Peningkatan konektivitas, sarana dan prasarana pendukung ekonomi antara wilayah perdesaan dan perkotaan;	Peningkatan dukungan transportasi dalam memperkuat interaksi eksternal wilayah Wanarakuti	Pengembangan Perhubungan Darat	Fasilitasi Revitalisasi / Reaktivasi Jalur Rel Kereta Api Non Aktif pada Jalur : Semarang – Demak – Kudus – Pati - Rembang)
		pembangunan sarana prasarana penunjang kawasan industri pengolahan dan penunjang pariwisata;	Pemulihan Sarana Perdagangan Hasil Perikanan;	Pengembangan sarana dan prasarana pada destinasi pariwisata di kawasan Wanarakuti
			Pengembangan destinasi pariwisata;	
			Peningkatan Kapasitas IPTEK Sistem Produksi	
			Penyediaan akses rumah layak huni bagi pekerja	
			Peningkatan Jalan	Penghubung Pantura – Pansela: Koridor Pati-Surakarta-Wonogiri; Fasilitasi pembangunan sabuk pantai Demak-Jepara
		Penembangunan sarana dan prasarana dasar diseluruh desa dengan kualitas yang sama diperkotaan;	Penyediaan dan pengolahan air baku	
			Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	
		Meningkatkan sarana penghubung antara selatan dan utara Kabupaten Pati dengan peningkatan infrastruktur jalan dan sarana transportasi umum;	Pengembangan Perhubungan Darat	Pembangunan Terminal Tipe B di Kab. Jepara
			Peningkatan Infrastruktur Wilayah;	
	Mengurangi dampak banjir dan longsor pada kawasan budidaya	Mitigasi Bencana Banjir		
		perencanaan pembangunan daerah rawan bencana		
	Meningkatkan sarana dan prasarana pertanian	Peningkatan dan Pengembangan Sarana Irigasi Pertanian		
		Peningkatan akses pasar		
		Peningkatan penerapan teknologi pertanian		
Program Peningkatan kapasitas SDM dengan cara merumuskan dan mengembangkan kebijakan; pengembangan keahlian dan keterampilan teknis dan peningkatan penerapan manajemen modern.	Mengoptimalan sumber daya manusia dan tenaga kerja untuk peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat	Pengembangan Perekonomian Masyarakat;		
		Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan		
		Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan		
		Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa		

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan	
		Peningkatan pelayanan pendidikan di wilayah Wanarakuti melalui penyelenggaraan SMK Negeri <i>Boarding</i> untuk siswa dari keluarga miskin	Pembinaan SMA		
		Pemberian Beasiswa Siswa Miskin (BSM) SMA, SMK, SLB	Pembinaan SMK		
		Penyelenggaraan BOS dan BOP SMA, SMK, SLB	Pembinaan Pendidikan Khusus		
	Terwujudnya wilayah Wanarakuti yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Menjaga kondisi dan fungsi kawasan hulu (Muria) dan kawasan Kars (Kendeng, Sukolilo) sebagai kawasan lindung		Mitigasi Bencana Banjir	
				Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	
				Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	
				Pengembangan Kegeologian	Konservasi CAT Pati-Rembang, Reklamasi lahan bekas pertambangan
		Menjaga kelestarian Kepulauan Karimunjawa		Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	
				Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	
				Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan	Penanganan sampah (Karimunjawa);
				Pemabngunan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energy; Pengembangan Ketenagalistrikan	Penyiapan listrik PLTS Komunal (Karimunjawa); Fasilitasi Pengembangan PLTU Tanjung Jati B
		Menertibkan pembangunan tidak berijin pada kawasan lindung		Pengendalian pemanfaatan ruang	
				Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya	
				Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan	Penanganan kerusakan pesisir (Jejara, Pati)
		Menertibkan penambangan liar Menjaga kelestarian DAS		Pengendalian pemanfaatan ruang	
				Pengendalian pemanfaatan ruang	
				Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	
Efisiensi dan efektivitas kinerja melalui tata laksana organisasi yang baik (<i>good governance</i>);	Membentuk badan yang mengatur dan mensinkronkan rencana daerah		Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan	Penanganan Muria (DAS Juwana)	
			Kerjasama pembangunan		

Tabel 7.35
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Subosukawonosraten
Tahun 2018-2023

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan	
<i>Pembangunan Wilayah Subosukawonosraten Berbasis Pariwisata Terpadu yang Didukung oleh Pertanian dan Industri Pengolahan</i>	Peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui pengembangan sektor potensial wilayah Subosukawonosraten	Menciptakan embrio-embrio kegiatan ekonomi pada daerah yang relatif tertinggal;	Perencanaan kepariwisataan terpadu;	Fasilitasi pengembangan pemasaran terpadu daerah tujuan wisata di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten dan Kota Surakarta	
			Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Fasilitasi pengembangan SDM pelaku industri kecil dan menengah di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten dan Kota Surakarta	
			Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif		
		Penguatan peran pemuda untuk mempercepat pengentasan kemiskinan	Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda		
		Meminimalisir pertumbuhan ekonomi pada pusat perkotaan agar tidak terjadi pemusatan kegiatan	Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Pengembangan sentra industri potensial	Pengembangan sentra industri potensial melalui peningkatan kualitas produk dan pemasaran di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten dan Kota Surakarta
			Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah		
			Pembangunan Infrastruktur di Perdesaan		
		Mengembangkan potensi unggulan pariwisata yang terkoneksi antara daerah sehingga wisata-wisata unggulan yang ada di Subosukawonosraten dapat dikembangkan	Perencanaan tata ruang		
			Pengembangan destinasi, pemasaran dan pariwisata	Fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan promosi pemasaran di Wilayah Subosukawonosraten; Pengembangan pariwisata pantai Wonogiri Selatan	
		Meningkatkan pemasaran hasil industri pengolahan untuk mendukung kegiatan wisata	Pengembangan sistem pemasaran hasil industri kreatif	Fasilitasi pemasaran industri kreatif melalui <i>e-commerce</i> di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten dan Kota Surakarta	
			Pengembangan pemasaran pariwisata	Fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata unggulan dan promosi pemasaran di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten dan Kota Surakarta	
			Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan		
		Meningkatkan potensi industri kreatif dalam pengembangan ekonomi wilayah dan penyerapan tenaga kerja	Penciptaan iklim usaha kecil menengah	Fasilitasi pengembangan potensi UMKM produk unggulan daerah di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten dan Kota Surakarta	
Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Pengembangan industri batu mulia (Wonogiri, Sukoharjo), Benonit (Boyolali)				
Pengelolaan Pertambangan Minerba					

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan	
		Mengembangkan kerjasama regional dalam pemenuhan air bersih dan persampahan	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pembangunan SPAM Regional Wosusokas (Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Kota Surakarta)	
	Memaksimalkan peningkatan pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Meningkatkan konektivitas di Solo Raya	Pengembangan Perhubungan Darat	Pengembangan Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan (2 Koridor) Revitalisasi Terminal Tipe B Pilangsari Kab. Sragen, Jatisrono Kab. Wonogiri, Pracimantoro, Purwantoro, Baturetno Kab. Wonogiri	
				Fasilitasi peningkatan pelayanan (peningkatan frekuensi) Kereta Api Regional Solo - Semarang	
			Pengembangan Perhubungan Udara (Fasilitasi)	Fasilitasi Pengembangan Bandara Adi Soemarmo Boyolali	
			Pembangunan jalan.	Fasilitasi Penyelesaian Jalan Tol Semarang - Solo	
				Fasilitasi Penyelesaian Jalan Tol Solo - Kertosono	
				Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Surakarta - Grobogan - Pati	
				Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Wonogiri - Perbatasan Jatim	
				Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Wonogiri - Perbatasan DIY	
				Pembangunan Prasarana dan Fasilitas	
				Pengelolaan Pertambangan Minerba	Penyiapan bahan tambang untuk pembangunan infrastruktur
	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pertanian/peternakan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai jual hasil pertanian/peternakan	Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pertanian/peternakan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai jual hasil pertanian/peternakan	Pengembangan Perekonomian Masyarakat		
				Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	
				Peningkatan akses pasar	
			Peningkatan penerapan teknologi pertanian		
	Pengembangan kawasan Agrolitan Grisuka	Peningkatan Produksi dan daya saing produk pertanian	Pengembangan budidaya tanaman hortikultura dan perikanan, pengolahan hasil pertanian,	penerapan Agriculture estate dan penerapan pertanian terintegrasi yaitu Pendampingan dan kemitraan petani dengan BUMD dan jaminan usaha pertanian	
	Meningkatkan pemasaran hasil industri pengolahan untuk mendukung kegiatan wisata	Memanfaatkan sarana pendukung seperti sarana transportasi dan perhubungan dalam mengembangkan kawasan wisata	Pengembangan sapras pendukung pariwisata	Fasilitasi pengembangan infrastruktur transportasi pendukung pariwisata di Wilayah Subosukawonosraten	
				Pengembangan destinasi, kemitraan dan pemasaran pariwisata	Fasilitasi pengembangan destinasi, kemitraan dan pemasaran daerah tujuan wisata di Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten dan Kota Surakarta

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan
	Pengembangan pengelolaan sumberdayaair, sumberdaya lahan, sumberdayahutan, berdasarkanazas konservasi, efisien dan lestari	Meningkatkan fungsi waduk/embung yang ada maupun yang belum ada untuk pengairan pertanian dan perikanan,	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
			Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya	
			- Pengelolaan jaringan irigasi dan air baku	APBD : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku di Kab. Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten
			APBN : Fasilitas Pembangunan Waduk Gondang dan Waduk Pidekso	
	Merencanakan pembangunan industri, dan infrastruktur jalan untuk tidak menempati daerah potensial pertanian, kedutanan maupun kawasan lindung dan peternakan		Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
Peningkatan, pengembangan dan pelestarian nilai-nilai budaya	Meningkatkan sarana pendidikan keseluruh daerah untuk mening-katkan SDM dalam pembangunan dan pengembangan wilayah melalui Peningkatan pelayanan pendidikan di wilayah melalui penyelenggaraan SMK Negeri Semi Boarding untuk siswa dari keluarga miskin, Pemberian Beasiswa Siswa Miskin (BSM) SMA, SMK, SLB, Penyelenggaraan BOS dan BOP SMA, SMK, SLB		Pembinaan SMA	
			Pembinaan SMK	
			Pembinaan Pendidikan Khusus	
	Pengembangan Rumah Budaya		Pembinaan Kebudayaan	
	Meningkatkan SDM dalam menyikapi bencana alam;		Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana;	
			Tanggap darurat jalan;	
			Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan;	
	Mitigasi Bencana			
Pengembangan Infrastruktur Wisata Minat khusus Sangiran dan makam-makam raja dan keraton		Pengembangan destinasi pariwisata;		Pengembangan sarpras pendukung destinasi pariwisata Sangiran
		Pembangunan jalan.		Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Sragen - Grobogan

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan	
	Kebijakan tentang sinergitasi perencanaan daerah dan implementasi terutama dalam aturan yang berkaitan dengan pemberian ijin alih fungsi lahan	Menyusun perencanaan dan pembangunan wilayah ramah bencana, membangun pada kawasan budidaya dan tidak pada kawasan lindung serta daerah rawan bencana	Perencanaan Pembangunan Daerah;		
			Mitigasi Bencana;		
			Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.		
Terwujudnya wilayah Subosukawonosraten yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Menjaga kondisi dan fungsi kawasan hulu Gunung Lawu dan Sungai Bengawan Solo sebagai kawasan lindung	Pengendalian pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; Pengendalian pemanfaatan ruang. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan Pengembangan Kegeologian	Peningkatan kualitas kawasan permukiman pendukung potensi lokal		
			Penanganan Lahan Kritis (Boyolali, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, Karanganyar, Sragen)		
			Konservasi CAT Karanganyar-Boyolali dan reklamasi bekas tambang (Magelang, Klaten, Boyolali, Wonogiri)		
		Menertibkan pembangunan tidak berijin pada kawasan lindung Pengendalian pencemaran industri dan rumah tangga	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup; Peningkatan kualitas kawasan permukiman Pengendalian pemanfaatan ruang. Pembangunan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energy Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan		
				Pembangunan Waste to Energy (Incenerator) Kota Semarang (KPBU)	
				Pembangunan IPAL Komunal Industri Rumah Tangga (Klaten); TPST Regional Solo Raya	
		Peningkatan kualitas kawasan permukiman	eningkatan kualitas kawasan permukiman mendukung potensi lokal	fasilitasi penyediaan PSU kawasan permukiman	
		Terwujudnya pengelola daerah dengan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif	Menyusun masterplan daerah rawan bencana;	Perencanaan tata ruang;	
				Perencanaan Pembangunan Daerah;	
Mitigasi Bencana;					

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan
		Meningkatkan fungsi TKPRD dalam memperketat izin pemanfaatan ruang terutama pada lahan-lahan pertanian produktif	Kerjasama pembangunan; Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;	
		Mengembangkan konsep Jasling agar terjadi keseimbangan pembangunan antara daerah	Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		Meningkatkan fungsi kelembagaan Forum Pengembangan Ekonomi Wilayah melalui pengembangan sektor wisata se Subosukawonosraten	Perencanaan Kepariwisata Terpadu	Pengembangan pemasaran pariwisata terpadu Wilayah Subosukawonosraten
		Mengembangkan kerjasama regional dalam pemenuhan air bersih dan persampahan	Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	
		Mengembangkan kerjasama regional dalam pemenuhan air bersih dan persampahan	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	
		Membentuk kelembagaan dalam melayani infrastruktur di kawasan perbatasan antar daerah	Perencanaan Pembangunan Daerah; Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.	

Tabel 7.36
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Bregasmalang
Tahun 2018-2023

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan	
Pengembangan Wilayah Bregasmalang berbasis Agrowanaminapolitan dan Industri yang Berkelanjutan	Pemerataan pembangunan wilayah (sarana dan infrastruktur) utara-selatan di wilayah Bregasmalang	Mengurangi kesenjangan utara-selatan di wilayah Bregasmalang	Pengembangan Infrastruktur Wilayah;		
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan jalan sejajar pantura Koridor I (wilayah barat);		
	Peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah melalui pengembangan sektor potensial wilayah Bregasmalang	Mengoptimalkan produktivitas dari sektor-sektor ekonomi yang dikembangkan	Penguatan peran pemuda untuk mempercepat pengentasan kemiskinan	Program Pengelolaan Pertambangan Minerba	Penyiapan bahan tambang untuk pembangunan infrastruktur (kecuali Kota Tegal)
				Peningkatan Perekonomian Masyarakat;	Pengembangan klaster potensi unggulan daerah di Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang dan Kota Tegal
				Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;	
				Pengembangan Kegeologian	Potensi industri keramik (Brebes)
	Pengembangan infrastruktur jalan yg mendukung peningkatan konektivitas internal dan eksternal wil Bregasmalang	Peningkatan kualitas jaringan jalan untuk mendukung aktivitas dan konektivitas	Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Pengembangan Infrastruktur Wilayah;	
				Pembangunan jalan	Fasilitasi Pembangunan Jalan Tol Pejagan – Semarang
	Peningkatan konektivitas wilayah Bregasmalang guna menunjang pengembangan wilayah yang lebih pesat	Meningkatkan dukungan jalan bagi pergerakan antar kabupaten/kota di wilayah Bregasmalang	Meningkatkan konektivitas eksternal Bregasmalang dengan wilayah lain yang berbatasan	Pengembangan Infrastruktur Wilayah;	Dukungan sarana dan prasarana pengembangan kawasan industri Brebes
				Pembangunan jalan	Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Kab. Brebes - Kab. Cilacap (Salem - Bandungsari)
					Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Brebes - Kab. Tegal
					Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Kab. Tegal - Kab. Pemalang
	Pengembangan pelayanan infrastruktur air bersih dan persampahan di yang merata di wilayah Bregasmalang	Pengembangan infrastruktur regional untuk pemerataan pelayanan infrastruktur di wilayah Bregasmalang	Peningkatan kualitas SDM dan peningkatan pelayanan pendidikan wilayah Bregasmalang melalui :	Kerjasama Pembangunan Perekonomian Wilayah;	
				Pengembangan Perhubungan Darat	Revitalisasi Terminal Tipe B Tanjung, Kab. Brebes
Pembangunan jalan					
Pengembangan sumber daya manusia di wilayah Bregasmalang			Pengembangan Infrastruktur Wilayah;		
			Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh;		
			Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Peningkatan SPAM Regional Bregasmalang (Kab Brebes, Tegal, dan Kota Tegal)	

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan
			Pembinaan pendidikan menengah	
		Peningkatan pelayanan pendidikan di wilayah melalui penyelenggaraan SMK Negeri <i>Semi Boarding</i> untuk siswa dari keluarga miskin	Pembinaan SMA	
		Pemberian Beasiswa Siswa Miskin (BSM) SMA, SMK, SL	Pembinaan SMK	
		Penyelenggaraan BOS dan BOP SMA, SMK, SLB	Pembinaan Pendidikan Khusus	
Pengembangan pelayanan kesehatan wilayah yang merata di wilayah Bregasmalang		Meningkatkan pelayanan kesehatan di wilayah Bregasmalang	Upaya kesehatan masyarakat; Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya; Kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	
Pengembangan infrastruktur wilayah yang terpadu dan menyeluruh di wilayah Bregasmalang		Meningkatkan kerjasama regional Bregasmalang dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan umum	Pengembangan Infrastruktur Wilayah; Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah; Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah.	
		Mewujudkan tata kelola pengembangan wilayah Bregasmalang yang aktif	Perencanaan Pembangunan Daerah; Pengembangan data/informasi; Kerjasama pembangunan; Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	
Pengintegrasian keberlanjutan lingkungan dengan pengembangan ekonomi di wilayah Barlingmascakeb		Pelestarian sumber daya air, tanah, dan hutan	Perencanaan Pembangunan Daerah; Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan; Perlindungan dan konservasi sumber daya alam Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan	Penanganan Lahan Kritis (Tegal, perbatasan Brebes-Kuningan, Pemalang) dan kerusakan pesisir (Brebes, Tegal, Pemalang)
			Pengembangan Kegeologian	Konservasi CAT Pekalongan-Pemalang dan reklamasi bekas tambang (Pemalang)
			Pengelolaan jaringan irigasi dan air baku	APBD : Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku di Kab. Brebes, Tegal, Pemalang

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan	
		Penanganan Limbah B3	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH;		
			Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;		
			Peningkatan pengendalian polusi		
	Pengembangan Kawasan Agropolitan Mangga Emas	Peningkatan produksi dan daya saing produk pertanian.		Pengembangan Budidaya Tanaman Hortikultura dan Perikanan	Pendampingan dan kemitraan petani dengan BUMD
				Pengolahan Hasil Pertanian	Jaminan usaha pertanian
					Penerapan <i>Agriculture estate</i> dan penerapan pertanian terintegrasi Kawasan Agropolitan Mangga Emas
	Mewujudkan kesesuaian pemanfaatan ruang guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan resiko bencana di wilayah Bregasmalang		Perencanaan Pembangunan Daerah;		
			Program pengendalian pemanfaatan ruang		
			Pembangunan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana		

Tabel 7.37
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Petanglong
Tahun 2018-2023

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan	
Pengembangan wilayah Petanglong dengan Konsep MinaBatik, yaitu mengembangkan potensi utama perikanan dan industri batik, namun juga tetap meningkatkan potensi pertanian dan wisata di wilayah selatan	Kebijakan Pemkab/Kot Terhadap Pelestarian Batik Tradisional Dalam Upaya Peningkatan Ekonomi Lemah	Menjadikan batik sebagai penggerak ekonomi mikro di Petanglong selain potensi unggulan lainnya (perikanan, perkebunan dan pertanian)	Pengembangan Sistem Pendukung UMKM;	Fasilitasi pengembangan potensi UMKM unggulan melalui pengembangan wirausaha baru, peningkatan kualitas produksi, sertifikasi, pengembangan jejaring pemasaran dan promosi di Kabupaten Pemalang, Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan	
			Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah		
			Pengembangan sistem pendukung usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah		
	Kebijakan Pemkab/Kot tentang pengembangan Batik sebagai warisan budayadalam konteks melestarikan maupun menggunakannya sebagai sumber industri kreatif	Mengontrol perkembangan industri kreatif batik agar tumbuh dan beraktivitas di kawasan budidaya	Pengendalian pemanfaatan ruang		
			Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup		
	Kebijakan Pemkab/Kot dalam mengembangkan potensi daerah sebagai upaya meningkatkan daya saing daerah	Mengembangkan industri batik ramah lingkungan dan melakukan pengelolaan limbah	Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	Pembangunan pengolahan limbah komunal	
			Mengembangkan agropolitan untuk sektor perkebunan dan pertanian di kawasan Petanglong selatan	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	
				Peningkatan akses pasar	
	Kebijakan Pemkab/Pemkot dalam tentang Peningkatan daya saing sektor jasa dan perdagangan sebagai sektor basis;	Meningkatkan daya saing /beli masyarakat dengan meningkatkan pendapatan melalui sektor industri kreatif batik	Pengelolaan jaringan irigasi dan air baku	APBD : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku di Kab. Pekalongan 3 lokasi	
			Pengembangan Sistem Pendukung UMKM;	Fasilitasi pengembangan potensi melalui pengembangan industri kreatif, peningkatan SDM pelaku industri kecil dan pengembangan wirausaha baru dengan memanfaatkan keunggulan potensi lokal di Kabupaten Pemalang, Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan	
			Pengembangan Sistem Pemasaran Hasil Industri Kreatif		
			Pengembangan Industri Kecil dan Menengah		
Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah					
Peningkatan akses pasar					
Pengolahan Hasil Pertanian					
Pemerataan pertumbuhanwilayah dengan mengoptimalkan potensi perdagangan dan jasa (jalur patura, dan perkotaan), pertanian (petanglong bagian selatan), perikanan (petanglong pesisir utara) dan sektor industri kreatif batik		Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi		
	Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial				

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan
	Kebijakan Pemkab/Pemkot tentang Pengembangan Pelabuhan Dalam Rangka Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan di Pantura serta mening-katkan potensi perikanan;	Meningkatkan fungsi pelabuhan nasional di Pekalongan sebagai pusat perdagangan ikan di kawasan Petanglong dan sekitarnya	Peningkatan sarana prasarana pelabuhan ikan	
			Fasilitasi Program Pengembangan Perhubungan Laut	Fasilitasi Peningkatan Pelabuhan Pengumpan Regional menjadi Pengumpul
	Kebijakan Pemkab/Kot tentang keterpaduan sistem jaringan prasarana jalan dengan tata ruang wilayah yang merupakan acuan pengembangan wilayah dan meningkatkan keterpaduannya dengansarana dan prasarana lainnya;	Pengurangan dampak banjir, rob (Petanglong utara) dan longsor (Petanglong selatan) pada kawasan budidaya	Pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau, dan sumber daya air lainnya	
			Penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan	
		Meningkatkan konektifitas untuk mendukung kegiatan wisata dan kegiatan pertanian di wilayah selatan Petanglong	Pengembangan Perhubungan Darat	Revitalisasi Terminal Tipe B Banyuputih Kab. Batang dan Kajen Kab. Pekalongan
			Pengembangan infrastruktur	
			Pembangunan Jalan	Peningkatan Jalan Provinsi Akses Menuju Jalan Tol di Kab.Pekalongan
				Peningkatan Jalan Provinsi penghubung Pekalongan Banjarnegara.
				Peningkatan Jalan Provinsi Akses Menuju Jalan Arteri Pantura di Kab. Batang
Meningkatkan konektivitas dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan jalan distribusi hasil perta-nian kepusat kota (Petanglong utara)	Pengembangan infrastruktur			
	Pengelolaan Pertambangan Minerba	Penyiapan bahan tambang untuk pembangunan infrastruktur (kecuali Kota Pekalongan)		
Kebijakan Pemkab/Kot tentang pengembangan Batik sebagai warisan budaya dalam konteks melestarikan maupun menggunakannya sebagai sumber industri kreatif	Menyediakan dan menumbuhkan sarana pendukung wisata batik (penginapan, pasar, pusat-pusat batik, jasa pengiriman barang, wisata batik)	Pengembangan pemasaran, destinasi dan kemitraan pariwisata	Fasilitasi pengembangan potensi pendukung destinasi pariwisata melalui pengembangan potensi masyarakat destinasi pariwisata di Kabupaten Pemalang, Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan	
		Pemanfaatan <i>outlet</i> tol dan jalur utara-utara sebagai media peningkatan sektor industri kreatif batik dalam pemasaran dan wisata belanja serta menumbuhkan perekonomian bagian selatan	Perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan
	Kebijakan Pemkab/Pemkot tentang Peningkatan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia sekolah dengan target utama masyarakat miskin	Peningkatan pelayanan pendidikan di wilayah Petanglong melalui pemberian Beasiswa Siswa Miskin (BSM) SMA, SMK, SLB	Pembinaan SMA	
			Pembinaan SMK	
		Penyelenggaraan BOS dan BOP SMA, SMK, SLB	- Pembinaan Pendidikan Khusus	
	Kebijakan Pemkab/Pemkot tentang Peningkatan kualitas lembaga non formal pendidikan yang diselenggarakan baik oleh masyarakat maupun pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni khususnya tentang Batik.	Meningkatkan SDM tenaga kerja pengrajin batik, dan aktivitas pendukung batik (konveksi, pembuatan model)	Pembinaan SMK	
Terwujudnya wilayah Petanglong yang ramah lingkungan dan berkelanjutan		Menjaga kondisi dan fungsi kawasan hulu (Dieng) Petanglong	Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Rehabilitasi dan konservasi Kawasan Dieng (Pekalongan, Batang), penanganan kerusakan pesisir
		Menertibkan pembangunan tidak berijin pada kawasan lindung sempadan pantai,	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		Menertibkan penambangan liar	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
			Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
			Pengembangan Kegeologian	Konservasi CAT Pekalongan-Pemalang dan reklamasi bekas tambang (Pemalang)
	Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan		Penanganan Limbah Batik , sampah TPST Regional	

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan
	Kebijakan tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Aparatur;	Membuat lembaga/sistem kerjasama antar daerah dalam mengembangkan dan meningkatkan batik	Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	
			Pemberdayaan kelembagaan	
	Kebijakan Pemkab/Pemkot Dalam pemenuhan kebutuhan pokok pelayanan publik Terutama Pemenuhan Air Bersih dan Persampahan	Meningkatkan SDM tenaga kerja Melakukan kerjasama regional dalam pelaksanaan pemenuhan air bersih dan penyediaan lahan TPA	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pembangunan SPAM Regional Petanglong (Kab Batang, Pekalongan dan Kota Pekalongan

Tabel 7.38
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Barlingmascakeb
Tahun 2018-2023

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan	
Pengembangan Wilayah Barlingmascakeb Berbasis Agropolitan, Industri, dan Pariwisata berlandaskan Pilar Pembangunan Berkelanjutan	Pengembangan sektor industri yang berbasis bahan baku lokal di Barlingmascakeb	Mengembangkan industri hulu-hilir yang terpadu di wilayah Barlingmascakeb	Pengembangan Perekonomian Masyarakat;	Fasilitasi pengembangan potensi wilayah melalui pengembangan kerjasama pemasaran produk, peningkatan SDM pelaku industri kecil dan pengembangan wirausaha baru dengan memanfaatkan keunggulan potensi lokal di Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap dan Kebumen	
			Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah dalam Sektor Pemasaran Hasil Olahan;		
			Pengembangan Pemasaran;		
			Pengembangan sentra-sentra industri potensial;	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Industri Kebumen	
			Penataan struktur industri		
			Pengembangan destinasi dan kemitraan pariwisata.	Fasilitasi pengembangan potensi pendukung destinasi pariwisata melalui pengembangan potensi masyarakat destinasi pariwisata di Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap dan Kebumen; Nusakambangan Cilacap	
	Pengembangan sektor potensial wilayah (pertanian dan pariwisata) wilayah melalui produksi dan promosi	Memantapkan peran sektor pertanian sebagai sektor potensial yang menyokong perekonomian wilayah Barlingmascakeb melalui peningkatan produktivitas pertanian	Mengembangkan sektor pariwisata yang merupakan potensi unggulan di wilayah Barlingmascakeb	Pengembangan Ketenagalistrikan	Pengembangan PLTU dan Semen (Cilacap)
				Pengelolaan Pertambangan Minerba	Penyiapan bahan tambang untuk pembangunan infrastruktur, Geopark Karangsambung
				Pengembangan Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	Fasilitasi pengembangan budidaya tanaman Cabe di Banjarnegara, tanaman kelapa di kab Purbalingga, Kebumen Padi di kab. Cilacap
				Peningkatan pengolahan hasil pertanian	
Pengoptimalan pelayanan infrastruktur guna mendukung pengembangan sektor potensial di wilayah Barlingmascakeb	Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang merata di wilayah Barlingmascakeb	Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur yang merata di wilayah Barlingmascakeb	Penerapan Teknologi Pertanian		
			Peningkatan akses pasar		
			Pengelolaan jaringan irigasi dan air baku	APBD : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku di Kab. Banyumas 3 lokasi, Kab. Cilacap 3 lokasi APBN : Fasilitasi Pembangunan Waduk Matenggeng	
			Pengembangan pemasaran, destinasi dan kemitraan pariwisata	Fasilitasi pemasaran pariwisata di Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap dan Kebumen	
			Pengembangan Perhubungan Darat	Pengembangan Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan (Koridor Purwokerto - Purbalingga) Pembangunan Terminal Tipe B di Cilacap Timur Revitalisasi Terminal Tipe B di Purbalingga dan Banjarnegara	

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan
			Pengembangan Perhubungan Udara (Fasilitas)	Fasilitasi Pembangunan Bandara Jenderal Besar Sudirman Purbalingga dan Pengembangan Bandara Tunggal Wulung Cilacap)
			Pengembangan Perhubungan Laut (Fasilitas)	Fasilitasi Pengembangan Pelabuhan Tanjung Intan
			Pembangunan jalan	Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Kab. Banyumas - Kab. Cilacap Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Kab. Cilacap - Kab. Brebes Peningkatan Jalan Provinsi di Kab. Cilacap (Perbatasan Jawa Barat) Pembangunan Perlintasan Tidak Sebidang di Kab. Cilacap Pembangunan Banjar Kebuka (Banjarnegara-Kebumen)
			Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	
			Penyediaan dan pengolahan air baku	
	Peningkatan pelayanan infrastruktur melalui pemenuhan secara regional Barlingmascakeb	Meningkatkan pelayanan jaringan air bersih secara optimal di wilayah Barlingmascakeb	Penyediaan dan pengolahan air baku Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pembangunan SPAM Regional Keburejo (Kebumen)
	Peningkatan pelayanan sosial wilayah Barlingmascakeb guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Peningkatan pelayanan pendidikan di wilayah Barlingmascakeb, melalui penyelenggaraan SMK Negeri <i>Boarding</i> dan <i>Semi Boarding</i> untuk siswa dari keluarga miskin, Pemberian Beasiswa Siswa Miskin (BSM) SMA, SMK, SLB, Penyelenggaraan BOS dan BOP SMA, SMK, SLB	Pembinaan SMA Pembinaan SMK Pembinaan Pendidikan Khusus	
		Peningkatan pelayanan kesehatan di wilayah Barlingmascakeb	Pengadaan, peningkatan, dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	
		Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan sektor ekonomi potensial di wilayah Barlingmascakeb melalui penguatan peran pemuda untuk mempercepat pengentasan kemiskinan	Pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah Penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda	Pengembangan wirausaha baru berbasis potensi keunggulan dan fasilitasi pemasaran hasil produksi di Kabupaten Banjarnegara, Purbalingga, Cilacap dan Kebumen

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan
	Peningkatan peran kelembagaan dalam pengembangan wilayah Barlingmascakeb	Mengembangkan kerjasama regional dalam pengawasan pemanfaatan ruang di wilayah Barlingmascakeb	Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	
			Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	
		Mengembangkan tata kelola yang 'hidup' dalam meningkatkan kerjasama regional Barlingmascakeb	Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	
			Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	
	Pengintegrasian keberlanjutan lingkungan dengan pengembangan ekonomi di wilayah Barlingmascakeb	Pelestarian sumber daya air, tanah, dan hutan	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	Geopark Dieng (Banjarnegara dan Wonosobo) dan Geopark Karangsambung Kebumen
			Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	
			Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan	Konservasi Segara Anakan, DAS Citanduy (Cilacap-Ciamis), Dieng (Banjarnegara), Slamet
			Pengembangan Kegelogian	Konservasi CAT Kebumen-Purworejo
			Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan	Pembangunan IPAL Komunal Batik (Kebumen)
			Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energy	Waste to Energy (RDF Cilacap)
		Mewujudkan kesesuaian pemanfaatan ruang guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan konversi lahan	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	
		Antisipasi Bencana tsunami, longsor, banjir	Peningkatan kualitas kawasan permukiman rawan bencana	
			Penanggulangan bencana	
			Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan	Penanganan kerusakan pesisir dan mempertahankan gumuk pasir (Kebumen, Cilacap)

Tabel 7.39
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Purwomanggung
Tahun 2018-2023

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan	
Pengembangan Agropolitan, Industri Pengolahan Berbasis Pertanian Dan Pariwisata Secara Berkelanjutan	Pengembangan dan peningkatan kawasan perekonomian daerah yang produktif, efisien, berdaya saing	Mengendalikan pemasaran produk potensial wilayah	Pengelolaan pola distribusi dan pemasaran	Fasilitasi pemasaran bersama produk unggulan lokal di Kabupaten Purworejo, Magelang, Temanggung dan kota Magelang	
		Menjadikan wisata Borobudur sebagai penggerak wisata sekitarnya dan pemasaran produk hasil pertanian	Pengembangan pemasaran, destinasi dan kemitraan pariwisata	Pengembangan sarpras pendukung dan peningkatan SDM pelaku pariwisata di sekitar destinasi pariwisata Borobudur	
	Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mengembangkan sektor potensial di luar koridor jalan	Peningkatan akses pasar		
			Pengembangan sentra-sentra ekonomi potensial;	Fasilitasi Reaktivasi Jalur Rel KA Ambarawa – Secang – Magelang - Yogyakarta	
			Peningkatan akses pasar		
			Penerapan teknologi pertanian		
	Peningkatan pelayanan perkotaan dan pusat pertumbuhan ekonomi wilayah yang merata dan berhierarki;	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui komoditi potensial yaitu pertanian dan pengolahan hasil pertanian;	fasilitasi pembangunan rumah layak huni		
			Pengembangan sentra-sentra ekonomi potensial	Pengembangan klaster produk unggulan lokal di Kabupaten Purworejo, Magelang, Temanggung dan kota Magelang	
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pertanian hortikultura dan tanaman pangan;	Pengembangan Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura	
	Peningkatan kualitas dan pelayanan jaringan infrastruktur transportasi, dan sarana dasar yang terpadu dan merata.	Mengembangkan sarana dan infrastruktur pendukung pada kawasan potensial pertanian;	Peningkatan infrastruktur pertanian		
			Pengembangan Infrastruktur Pendukung pertanian		
			Penerapan teknologi pertanian		
		Mengoptimalkan pelayanan kesehatan dengan mendekatkan pelayanan kesehatan ke masyarakat serta penyediaan rumah layak huni	Meningkatkan kualitas jaringan konektivitas antar daerah di wilayah pengembangan Purwomanggung	Pengelolaan jaringan irigasi dan air baku	APBD : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku di Kab. Purworejo 2 lokasi, Kab. Temanggung 2 lokasi; Fasilitasi Pembangunan Bendungan Matoa
					APBN : Fasilitasi Pembangunan Bendungan Bener
Layanan kesehatan					
		Pengembangan Perhubungan Darat	Pengembangan Angkutan Umum Masal Berbasis Jalan (Untuk mendukung aksesibilitas Borobudur, 1 Koridor		
			Pembangunan Terminal Tipe B di Kab. Purworejo dan Kab. Magelang		

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan
				Revitalisasi Terminal Tipe B Madureso Kab. Temanggung
			Peningkatan jalan	Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Kab. Purworejo - Perbatasan DIY (Purworejo - Sibolong)
				Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Kab. Magelang - Perbatasan DIY (Muntilan - Klangan)
				Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Kab. Magelang - Kab. Wonosobo (pendukungn akses NYIA)
			Pengembangan infrastruktur wilayah	
			Pengelolaan Pertambangan Minerba	Penyiapan bahan tambang untuk pembangunan infrastruktur (kecuali Kota Semarang)
Pengembangan sarana dan infrastruktur pendukung pada kawasan potensial pertanian	Pengembangan sarana dan infrastruktur pendukung pada kawasan potensial pertanian;	Pengembangan Infrastruktur Pendukung pertanian		
	Peningkatan pelayanan pendidikan di wilayah Purwomanggung melalui penyelenggaraan SMK bidang agrobisnis	Pembinaan SMK		
Pensejahteraan masyarakat disleuruh wilayah Purwomanggung dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan seluruh potensi lokal yang ada di masing-masing daerah	Mengurangi tingkat pengangguran di perdesaan melalui : Penguatan peran pemuda untuk mempercepat pengentasan kemiskinan	Penciptakan lapangan kerja melalui industri pengolahan hasil pertanian;		
		Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda		
Terwujudnya wilayah Purwomanggung yang ramah lingkungan dan berkelanjutan	Menjaga kondisi dan fungsi kawasan hulu Gunung Merapi, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, Bukit Tidar, dan kawasan hulu lainnya	Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam		Geopark Dieng (Banjarnegara dan Wonosobo)
	Menertibkan pembangunan tidak berijin pada kawasan lindung, dan menindak alih fungsi lahan hutan menjadi lahan budidaya liannya	Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung		
	Menertibkan penambangan liar	Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung		
	Menjaga kelestarian Sumber Daya Alama dan Lingkungan Hidup	Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan		Konservasi Gunung Merapi, Gunung Sumbing, Gunung Merbabu, Bukit Tidar, Fasilitasi Konservasi Nusakambangandan kawasan hulu lainnya
		Pengembangan Kegeologian		Reklamasi bekas pertambangan (Kab. Magelang)
		Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan		Fasilitasi Pembangunan sampah TPST Regional (Magelang, Kota Magelang)

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan
				Pembangunan limbah komunal industri kecil (Kota Magelang, Magelang)
		Penanganan limbah sentra industri kecil	Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	
	Kebijakan Pemkab/Pemkot Dalam pemenuhan kebutuhan pokok pelayanan publik Persampahan	Melakukan kerjasama regional dalam pelaksanaan penyediaan infrastruktur dan pelayanan persampahan	Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah	Pembangunan SPAM Regional Keburejo (Purworejo)
	Penselarasan fungsi pusat-pusat pertumbuhan sebagai pusat pelayanan, pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan memberikan kesejahteraan dan berdampak pada pengembangan kawasan hinterland	Meningkatkan peran dan fungsi Kab. Magelang sebagai daerah perbatasan;	Pengembangan destinasi wisata	Fasilitasi pengembangan keunikan lokal, dukungan sarpras destinasi pariwisata dan pemasaran destinasi pariwisata se - Wilayah Purwomanggung
	Pengembangan kerjasama antar daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan fasilitas umum	Meningkatkan bentuk badan KAD, dengan mengintegrasikan kelembagaan Purwomanggung pada Kelembagaan Provinsi (SKPD Bakorwil atau SKPD tersendiri)	Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah	
	Pengendalian pemanfaatan kawasan lindung yang digunakan untk aktivitas budidaya dengan menselaraskan kehidupan masyarakat dengan alam (<i>living in harmony</i> Purwomanggung)	Mengendalikan konversi lahan, selain untuk menjaga keberlanjutan lingkungan juga untuk mempertahankan produktivitas pertanian;	Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Lindung Pemberian insentif lahan pertanian	
		Mengembangkan daerah rawan bencana sebagai daerah lindung;	Perlindungan dan Konservasi SDA	

Tabel 7.40
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan Wilayah Banglor
Tahun 2018-2023

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan
Pengembangan Agrowanaminapolitan, Industri, dan Pertambangan Wilayah Banglor secara Berkelanjutan	Percepatan pertumbuhan ekonomi wilayah Banglor melalui pengembangan infrastruktur wilayah yang memadai	Mengoptimalkan dukungan infrastruktur dalam pengembangan aktivitas ekonomi wilayah	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur ekonomi wilayah	
			Pengembangan Perhubungan Darat	Pembangunan Terminal Tipe B di Kab. Rembang
				Revitalisasi Terminal Tipe B Gagak Rimang, Kab. Blora
			Pengembangan Perhubungan Udara	Fasilitasi Pembangunan Bandara Ngloram Cepu)
			Pengembangan Perhubungan Darat	Fasilitasi Revitalisasi / Reaktivasi Jalur Rel Kereta Api Non Aktif pada Jalur : Semarang – Demak – Kudus – Pati - Rembang)
		- Fasilitasi Program Pengembangan Perhubungan Laut	Fasilitasi Peningkatan Pelabuhan Pengumpan Regional menjadi Pengumpul di Pelabuhan Sluke Rembang	
	Pengembangan potensi kawasan pesisir di wil Banglor	Melakukan penataan kawas pesisir	Perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang	
	Pengembangan mitigasi bencana pada kawasan rawan bencana di wilayah Banglor	Melestarikan kawasan lindung pada kawasan rawan longsor Mengoptimalkan jalur-jalur dan ruang evakuasi bencana Memperketat pengendalian pemanfaatan ruang	Perlindungan dan konservasi sumber daya alam	
			Penanggulangan bencana	
			Perencanaan pembangunan daerah rawan bencana	
Pengembangan pelayanan infrastruktur jalan di yang merata dan terkoneksi di	Meningkatkan kualitas jaringan jalan untuk mendukung aktivitas dan konektivitas wilayah	Pengelolaan Pertambangan Minerba	Penyiapan bahan tambang untuk pembangunan infrastruktur	
		Peningkatan jalan	Fasilitasi Peningkatan Jalan Nasional Kab. Rembang - Kab. Blora - Batas Jatim	
			Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Kab. Blora - Kab. Pati	
			Peningkatan Jalan Provinsi Penghubung Kab. Blora - Kab. Grobogan	
Pengembangan kualitas sumber daya manusia di wilayah Banglor	Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan	Pembinaan SMA		
		Pembinaan SMK		
		Pembinaan Pendidikan Khusus		

Konsep Pengembangan	Kebijakan	Strategi	Indikasi Program	Keterangan
	Pengoptimalan pelayanan kesehatan masyarakat yang merata di wilayah Banglor	Meningkatka kualitas pelayanan kesehatan	Upaya kesehatan masyarakat	
	Penangan permasalahan sosial di kawasan perbatasan wilayah Banglor	Mengentaskan kemiskinan pada kawasan perbatasan	Peningkatan Perekonomian Masyarakat Peningkatan infrastruktur pelayanan dasar dan rumah layak huni	
	Pengembangan kinerja kelembangaan dalam pengembangan wilayah Banglor dalam pelayanan infrastruktur dan pengembangan sektor ekonomi potensial	Meningkatkan kerjasama regional Banglor dalam penyediaan infrastruktur dan sarana pelayanan regional	Kerjasama pembangunan	
		mengembangkan sektor ekonomi yang sinergis antar wilayah	Kerjasama pembangunan Perencanaan pembangunan daerah	
			Pengembangan Kegeologian	Potensi industri semen (Blora, Rembang), industri keramik (Blora), industri genteng dan batu bata (Rembang)
		Mewujudkan tata kelola pengembangan wilayah Banglor yang aktif	Peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah	
	Pengintegrasian keberlanjutan lingkungan dengan pengembangan ekonomi di wilayah Banglor	Pelestarian sumber daya air, tanah, dan hutan (kawasan karst dan air tanah)	Rehabilitasi dan konservasi sumber daya hutan	Konservasi CAT Pati-Rembang Penanganan kerusakan pesisir (Rembang)
			Pengelolaan jaringan irigasi dan air baku	APBD : Perbaikan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Air Baku di Kab. Rembang, Kab. Blora; Fasilitasi Pembangunan SPAM Blora; Fasilitasi Bendungan Pasek Rembang
				APBN : Fasilitasi Pembangunan Bendungan Randugunting
		Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup		
		Mewujudkan kesesuaian pemanfaatan ruang guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan dan resiko bencana di wilayah Banglor	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	

BAB VIII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

8.1. Kerangka Pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun kedepan tidak terlepas dari kerangka pendanaan pembangunan yang diproyeksikan saat ini. Sebagaimana tertuang dalam Bab III pada sub bab 3.6. Pendapatan daerah Jawa Tengah dalam lima tahun kedepan diproyeksikan akan terus meningkat. Proyeksi peningkatan pendapatan daerah dengan memperhatikan beberapa asumsi:

- a. Meningkatnya pendapatan asli daerah terutama dari sumber pajak utama daerah, seiring dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dan perluasan sumber-sumber pendapatan baru;
- b. Meningkatnya pemanfaatan aset daerah yang bernilai ekonomis;
- c. Peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang ditunjukkan dari meningkatnya deviden yang diterima antara lain Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT), Sarana Patra Hulu Cepu (SPHC), Citra Mandiri Jawa Tengah (CMJT), Bank Jateng, Askrida, Jamkrida, Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan (PRPP), Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB), Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW), BPR/BKK, dan lainnya yang dilakukan dengan upaya revitalisasi dan restrukturisasi BUMD.

Pada sisi yang lain kebutuhan belanja pembangunan daerah juga diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah.

Belanja daerah tahun 2018-2023 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah.

Belanja daerah yang terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan proporsi yang semakin berimbang dalam rangka menjaga kualitas fiskal daerah. Rencana pendanaan dan belanja pembangunan daerah tahun 2018-2023 tertuang dalam tabel 8.1.

Tabel 8.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023 Provinsi Jawa Tengah

No	Uraian	2019*)	2020	2021	2022	2023
	BELANJA	<u>26.632.340.745.000</u>	<u>27.316.783.043.000</u>	<u>28.913.022.683.000</u>	<u>29.573.003.181.000</u>	<u>31.940.807.166.000</u>
A	Belanja Tidak Langsung	18.805.819.699.000	18.898.864.359.000	19.793.007.683.000	20.628.643.181.000	23.163.080.166.000
1	Belanja Pegawai	6.154.016.100.000	6.156.635.153.000	6.213.882.668.000	6.283.668.602.000	6.392.052.204.000
2	Belanja Bunga	-	50.633.550.000	173.353.500.000	195.583.500.000	195.583.500.000
3	Belanja Subsidi	-				
4	Belanja Hibah	5.417.699.400.000	5.701.910.500.000	5.886.946.600.000	6.045.165.600.000	7.403.415.600.000
5	Belanja Bantuan Sosial	48.292.000.000	48.292.000.000	48.292.000.000	48.292.000.000	48.292.000.000
6	Belanja Bagi Hasil Kepada Kab/Kota	5.105.018.278.000	5.701.393.156.000	6.205.532.915.000	6.690.933.479.000	7.283.736.862.000
7	Belanja Bantuan Keuangan	2.057.793.921.000	1.200.000.000.000	1.225.000.000.000	1.325.000.000.000	1.800.000.000.000
8	Belanja Tidak Terduga	23.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000
B	Belanja Langsung	7.826.521.046.000	8.417.918.684.000	9.120.015.000.000	8.944.360.000.000	8.777.727.000.000
	Surplus/Defisit	(666.759.423.000)	(72.945.000.000)	(389.055.000.000)	333.000.000.000	(435.000.000.000)

Sumber: Hasil Analisis, 2018

Ket : *) APBD TA. 2019

Kerangka pendanaan pembangunan daerah dapat dijelaskan menurut struktur belanja daerah meliputi:

1. **Belanja Tidak Langsung**, merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, meliputi:
 - a. *Belanja Pegawai*, merupakan belanja yang dianggarkan untuk gaji pokok dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kerangka pendanaan dibelanja pegawai dimaksudkan untuk mendorong kinerja pegawai, dengan besaran pemberian gaji mengikuti ketentuan nasional, dengan formulasi kenaikan berkala sesuai ketentuan yaitu sebesar 2,5%. Disamping itu diberikan pula sistem insentif bagi pegawai untuk berkinerja lebih baik, dengan penerapan kenaikan Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sesuai kelas jabatan;
 - b. *Belanja Bunga*, digunakan untuk pembayaran bunga atas pinjaman pemerintah daerah kepada pihak lainnya. Belanja bunga belum dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019 karena pada tahun tersebut belum ada beban pinjaman daerah. Namun demikian pada tahun 2020 akan dilakukan pinjaman melalui obligasi daerah untuk memperbaiki fiskal daerah, untuk itu pada tahun 2020-2023 mulai dicadangkan pengeluaran atas belanja bunga;
 - c. *Belanja Hibah*, merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah;
 - d. *Bantuan Sosial*, merupakan pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang diarahkan untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan antara lain bantuan keagamaan, pendidikan, kemasyarakatan, kesehatan, sosial, pertanian, kelautan dan perikanan;
 - e. *Belanja Bagi Hasil*, meliputi belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada kabupaten/kota yang besarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. *Belanja Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota dan Desa* yang bersifat umum maupun khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa yang diberikan untuk mengatasi kesenjangan dan mewujudkan keadilan di kabupaten/kota dalam rangka perbaikan kondisi fiskal daerah, serta kepentingan strategis pemerintah provinsi pada kabupaten/kota dan desa;
 - g. *Belanja Tak Terduga* merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,

termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup;

h. *Belanja Subsidi*, meskipun belum teranggarkan apabila memungkinkan di masa yang akan datang dapat disiapkan anggarannya maka akan digunakan untuk mendorong peran swasta dalam percepatan pembangunan daerah.

2. Belanja Langsung, merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan program dan kegiatan, meliputi :

a. *Belanja Pegawai*, untuk pengeluaran honorarium PNS, honorarium non PNS, dan uang lembur, Belanja Pegawai BLUD, Belanja Jasa Non PNS;

b. *Belanja Barang dan Jasa*, untuk pengeluaran bahan pakai habis, bahan material, jasa kantor, sewa alat berat, sewa perlengkapan, sewa perlengkapan dan alat kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus, perjalanan dinas, beasiswa pendidikan PNS, kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, perjalanan pindah tugas dan lain sebagainya;

c. *Belanja Modal*, untuk pengeluaran pengadaan tanah, gedung, alat-alat berat, alat-alat angkutan darat bermotor, alat-alat angkutan darat tidak bermotor, alat-alat angkutan air bermotor, alat-alat angkutan air tidak bermotor, alat-alat bengkel, pengolahan pertanian dan peternakan, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer dan lain-lain.

Belanja Langsung akan tumbuh rata-rata 4,2% per tahun yang akan digunakan untuk menyelesaikan urusan wajib yang terkait layanan dasar berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan sektor-sektor berdasarkan kewenangan urusan/konkuren yang wajib non layanan dasar dan pilihan. Perhitungan kerangka pendanaannya disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, dan diarahkan untuk:

a. Memenuhi pelaksanaan program prioritas daerah dan urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan;

b. Memenuhi pelaksanaan program yang berstandar pelayanan minimal dan operasional;

c. Mengakomodir program pembangunan yang dijaring melalui aspirasi masyarakat melalui forum koordinasi di bidang perencanaan;

d. Pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat;

e. Memenuhi alokasi persentase belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan dan infrastruktur sesuai dengan peraturan yang berlaku;

f. Mengutamakan pembiayaan untuk program dan kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023;

g. Membiayai penyusunan dan penyiapan kegiatan proyek-proyek daerah yang akan memberikan kontribusi pendapatan daerah (Obligasi dan Kerjasama Pemerintah Swasta/Badan Usaha).

Mendasarkan kerangka pendanaan tersebut, dijabarkan dalam rencana program prioritas daerah seluruh perangkat daerah yang kemudian dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Pada Tabel 8.2 memuat seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu

indikatif, target, perangkat daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2018-2023 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, 8 (delapan) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi penunjang urusan pemerintahan.

A. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan SMA

Program ini diarahkan pada pemberian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) SMA negeri, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA negeri dan swasta, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) kepada SMA swasta, Beasiswa Siswa Miskin (BSM), pemberian biaya pendidikan bagi siswa miskin berprestasi di SMA Taruna Nusantara, pembinaan potensi siswa, penguatan pendidikan karakter, pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi ruang kelas, pemenuhan prasarana sarana penunjang seperti pembangunan/rehabilitasi laboratorium, perpustakaan dan sanitasi sekolah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan APK SMA, persentase prasarana sarana SMA sesuai standar, persentase serapan kurikulum SMA, dan penurunan disparitas prestasi SMA.

b. Program Pembinaan SMK

Program ini diarahkan pada pemberian Biaya Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) SMK negeri, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMK negeri dan swasta, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) kepada SMK swasta, Beasiswa Siswa Miskin (BSM), pengelolaan SMK Negeri *Boarding* di 3 (tiga) SMK Negeri Jawa Tengah, pembangunan gedung asrama *semi boarding* pada SMK negeri di 15 kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi, uji kompetensi keahlian untuk siswa SMK kurang mampu, pembinaan potensi/ketrampilan siswa, penguatan pendidikan karakter, pengembangan dan penyelarasan kurikulum dengan dunia industri, pembangunan unit sekolah baru, rehabilitasi ruang kelas, pembangunan ruang praktik siswa, dan sanitasi sekolah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan APK SMK, persentase prasarana sarana SMK sesuai standar, persentase serapan kurikulum SMK, dan penurunan disparitas prestasi SMK.

c. Program Pembinaan Pendidikan Khusus

Program ini diarahkan pada pemberian dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan (BOP) SLB negeri, pemberian Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SLB negeri dan swasta, Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDa) kepada SLB swasta, Beasiswa Siswa Miskin (BSM), rehabilitasi ruang kelas, pemenuhan prasarana sarana SLB, deteksi dini terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (ABK), dan sekolah/kelas inklusi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan APK SLB, persentase prasarana sarana SLB sesuai standar, persentase serapan kurikulum SMK, dan penurunan disparitas prestasi SLB.

d. Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan

Program ini diarahkan pada pemberian kesejahteraan GTT dan PTT SMA Negeri, SMK Negeri, SLB Negeri, peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, dan pamong budaya, serta peningkatan guru pendamping di sekolah inklusi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan rasio guru SMA dengan rombongan belajar SMA; rasio guru SMK dengan rombongan belajar SMK; rasio guru SLB dengan rombongan belajar SLB; persentase guru SMA memenuhi kualifikasi akademik; persentase guru SMK memenuhi kualifikasi akademik; dan persentase guru SLB memenuhi kualifikasi akademik.

e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program ini diarahkan pada pemetaan mutu penyelenggaraan pendidikan, penguatan tupoksi Lembaga Non Struktural (LNS), Apresiasi Prestasi Insan Pendidikan dan Kebudayaan, dan fasilitasi seleksi serta pengirim duta lomba ke tingkat nasional, Fasilitasi Forum OSIS, Program Sehari Bersama Gubernur (Magang Gubernur), penguatan gerakan literasi sekolah, perwujudan sekolah berintegritas dan sekolah tanggap bencana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi manajemen pelayanan pendidikan.

2. Kesehatan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Program ini diarahkan pada kegiatan deteksi dini penyakit tidak menular kanker, hipertensi, dan *diabetes mellitus*, serta kesehatan jiwa, peningkatan surveilans penyakit dan imunisasi, serta eliminasi penyakit menular. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan layanan deteksi dini PTM; persentase UCI desa; persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular; persentase kabupaten/kota dengan respon cepat penanggulangan KLB/bencana <24 jam; dan persentase penanganan gangguan penglihatan dan pendengaran.

b. Program Pelayanan Kesehatan

Program ini diarahkan pada peningkatan mutu dan akses serta penguatan pelayanan kesehatan untuk mencapai cakupan kesehatan semesta; serta peningkatan sarana dan prasarana di 7 RSUD/RSJD. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan; cakupan penduduk miskin yang mempunyai jaminan kesehatan; persentase kabupaten/kota dengan 100% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi; persentase pemenuhan pelayanan kesehatan; dan persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan.

c. Program Sumber Daya Kesehatan

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan kefarmasian, peningkatan kompetensi dan pemanfaatan sumber daya kesehatan, dan pemanfaatan data berbasis teknologi informasi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku; persentase pemanfaatan sumber daya manusia kesehatan yang

dikembangkan kompetensinya; persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan; persentase SDM kesehatan yang terlatih; persentase SDM kesehatan dan non kesehatan terlatih; serta proporsi pelatihan kesehatan sesuai standar.

d. Program Kesehatan Masyarakat

Program ini diarahkan pada peningkatan upaya promotif dan preventif dalam penurunan kasus kematian ibu, bayi, balita, peningkatan PHBS melalui GERMAS, dan peningkatan lingkungan sehat dalam rangka mencapai Indeks Keluarga Sehat wilayah Provinsi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan persentase kabupaten/kota dengan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja baik dan olahraga baik; persentase kabupaten/kota yang telah mencapai desa siaga aktif mandiri 11%; persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita; persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat. Pada program ini termasuk upaya pencegahan prevalensi *stunting*.

e. Program Farmasi dan Perbekalan Kesehatan

Program ini diarahkan pada penyediaan obat, bahan habis pakai, *reagensia*, serta makan dan minum pasien. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan persentase kegiatan pemenuhan logistik terutama pada tujuh rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (RSUD/RSJD).

f. Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini dilaksanakan oleh tujuh rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (RSU/RSJD) yang diarahkan pada pelaksanaan deteksi dini penyakit menular dan bhakti sosial, dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kusta.

g. Program Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan dan pendukung pelayanan di tujuh RSUD/RSJD milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, guna mencapai peningkatan *cost recovery rate* (CRR) *total*. Program ini dilaksanakan mulai tahun 2020. Di tahun 2019, program ini menggunakan nomenklatur program Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (BLUD).

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan dan Pembangunan Jalan dan Penggantian Jembatan

Program ini diarahkan pada peningkatan jalan menuju lebar 7 m dengan MST 8 ton terutama pada ruas-ruas strategis yang mendukung pariwisata, penghubung Pantura-Pansela, akses perbatasan antar provinsi, akses *inlet outlet* tol, kawasan industri terpadu, serta pembangunan jalan Salem-Bandungsari pasca bencana, dan pembangunan *Fly Over* Ganevo di Kabupaten Demak. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik di wilayah barat dan wilayah timur Jawa Tengah.

b. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemeliharaan rutin, dan pembangunan talud dan drainase jalan terutama pada lokasi rawan longsor dan banjir. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan persentase jalan provinsi dengan kondisi permukaan baik dan jembatan dalam kondisi baik yang dilaksanakan oleh seluruh balai pengelolaan jalan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengadaan peralatan dan bahan kebinamargaan serta mempertahankan sertifikat ISO 17025 dan ISO 9001. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan, dan persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi.

d. Program Perencanaan, dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan, dan Keciaptakaryaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pemutakhiran data kebinamargaan maupun keciaptakaryaan, serta pengadaan tanah untuk jembatan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan persentase database jalan, jembatan, dan keciaptakaryaan yang termutakhirkan, serta persentase panjang jalan yang dileger.

e. Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi dan pembangunan SPAM Regional (Keburejo, Petanglong, dan Wosusokas) dan fasilitasi pengelolaan sampah dan sanitasi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan persentase akses aman air minum perdesaan; persentase akses aman air minum perkotaan; serta persentase akses sanitasi air limbah domestik.

f. Program Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung serta Pengembangan Jasa Konstruksi

Program ini diarahkan pada kegiatan bantuan teknis pengelolaan, penyelenggaraan, dan pendataan Bangunan Gedung Milik Daerah, pembangunan Masjid Agung Jawa Tengah, serta pelatihan dan sertifikasi tenaga jasa konstruksi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan persentase jumlah kompleks Bangunan Gedung Milik Daerah dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar; dan persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi.

g. Program Pengelolaan Jaringan Irigasi dan Air Baku

Program ini diarahkan pada kegiatan rehabilitasi dan pembangunan sarpras irigasi dengan prioritas 7 Daerah Irigasi (DI Banjaran, DI Kedunglimus Arca, DI Padurekso, DI Kalisapi, DI Krenceng, DI Sinongko, DI Jetis), rehabilitasi dan pembangunan sarpras air baku (embung) dengan prioritas 6 embung (embung Kamal, Karanganyar, Saradan, Sokoagung, Bakal dan Sempu), serta dukungan pembangunan Bendungan Randugunting, Jragung, Dolok, Ngemplak, Jatinegara dan Bodri. Program ini dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi; persentase pemenuhan kebutuhan air baku; persentase daerah irigasi yang dipelihara; dan persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara.

h. Program Pengelolaan Sungai, Pantai, dan Pengendalian Banjir

Program ini diarahkan pada rehabilitasi dan pembangunan sarpras sungai dan pantai dengan prioritas 5 lokasi pada WS Pemali Comal dan Bodri Kuto, pengendalian banjir dan pengelolaan peralatan dengan penanganan sarpras sumber daya air akibat banjir, serta penanganan banjir di 6 Balai PSDA. Indikator kinerja program ini adalah persentase luasan daerah bebas genangan banjir; persentase sungai dalam kondisi baik; persentase sungai yang dipelihara; serta persentase darurat banjir yang tertangani.

i. Program Pengembangan dan Pembinaan Teknis Sumber Daya Air

Program ini diarahkan pada kegiatan perencanaan teknis sarpras sumber daya air, pengelolaan hidrologi dan sistem informasi sumberdaya air, serta pengembangan dan pendayagunaan sumber daya air, dimana kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung pengeolaan irigasi dan air baku, serta pengelolaan konservasi SDA dan pengendalian banjir. Indikator kinerja pada program ini adalah peningkatan persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti.

j. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan rencana tata ruang provinsi, pembinaan penyusunan/review rencana tata ruang kabupaten/kota, pengendalian pemanfaatan ruang, dan optimalisasi pelaksanaan pemanfaatan ruang. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan persentase rencana tata ruang provinsi yang tersusun; persentase rencana tata ruang kabupaten/kota yang mendapatkan rekom Gubernur; persentase implementasi indikasi program pemanfaatan ruang; persentase pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang; serta persentase pemantauan pemanfaatan ruang di tiap wilayah balai.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembangunan Perumahan

Dilaksanakan dalam rangka upaya pemenuhan rumah layak huni melalui perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin, rehabilitasi rumah masyarakat terdampak bencana, bantuan pembangunan rumah sederhana layak huni utamanya bagi masyarakat miskin serta pembangunan rumah susun bagi pekerja. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase rumah tidak layak huni yang tertangani, dan persentase rumah layak huni yang disediakan.

b. Program Penanganan Kawasan Permukiman

Dilaksanakan dalam rangka upaya mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan melalui penanganan kawasan permukiman kumuh, fasilitasi penyediaan prasarana sarana utilitas umum perumahan, serta pembinaan dan pengendalian kawasan permukiman. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase kawasan kumuh yang tertangani.

c. Program Keterpaduan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan

Dilaksanakan dalam upaya mewujudkan makin optimalnya perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan lingkup perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan melalui penyusunan, pengelolaan, dan pengembangan data, penyusunan kebijakan dan strategi serta upaya pembinaan dan pengendalian program. Program ini diarahkan pada

pencapaian indikator persentase ketersediaan kebijakan, data, dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman.

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan

Program ini diarahkan pada kegiatan penanganan konflik sosial, peningkatan kapasitas elemen masyarakat dalam bidang kewaspadaan dan deteksi dini, peningkatan pengamalan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, perencanaan, pengendalian dan pembinaan ideologi dan kewaspadaan. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu peningkatan persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial; persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini; dan persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang.

b. Program Penguatan Ketahanan Bangsa

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan ketahanan ekonomi, penguatan ketahanan seni budaya dan etnisitas, penguatan toleransi umat beragama dan pemberdayaan ormas, dan didukung perencanaan, pengendalian, dan pembinaan ketahanan bangsa. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa.

c. Program Penguatan Politik Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan pendidikan dan budaya politi, penguatan sistem dan implementasi kelembagaan politik, dan didukung dengan perencanaan, pengendalian dan pembinaan politik dalam negeri. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase masyarakat yang paham terhadap aspek-aspek IDI.

d. Program Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Hukum dan Masyarakat pada Produk Hukum Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan penindakan pelanggar produk hukum daerah, pembinaan dan pengawasan pelanggar perda, pemberdayaan PPNS, serta sosialisasi dan pemberantasan barang kena cukai ilegal, guna mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan persentase penegakkan pelanggaran produk hukum daerah.

e. Program Pemeliharaan Kamtramtibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal

Program ini diarahkan pada kegiatan pemeliharaan tramtibum, pengendalian dan penanganan ketentraman dan ketertiban umum, dan konsolidasi penanganan tramtibum, dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase kabupaten/kota rawan tramtib yang kondusif.

f. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap tibumtranmas, monitoring dan pendataan daerah rawan gangguan tramtib, dan peningkatan kapasitas SDM satpol PP. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase masyarakat yang meningkat kepatuhan dan ketaatannya terhadap tibumtranmas; serta persentase anggota Satpol PP Kabupaten/Kota yang meningkat kapasitasnya.

g. Program Peningkatan Kemampuan Linmas dan Rakyat Terlatih

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan keterampilan satlinmas, peningkatan kapasitas kelembagaan satlinmas, dan orientasi satlinmas dalam pengamanan, dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu peningkatan persentase anggota linmas kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya.

h. Program Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, antara lain pembentukan desa tangguh bencana, pemasangan alat peringatan dini bencana/*early warning system* (EWS), pemasangan rambu jalur evakuasi, penyusunan rencana kontijensi bencana, gladi bencana, identifikasi dan sosialisasi daerah rawan bencana, pelatihan kluster bencana dan sistem komando penanganan darurat bencana, pelatihan kajian kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, pemenuhan kebutuhan logistik masyarakat terdampak bencana, serta penyiapan peralatan penanggulangan bencana di Jawa Tengah. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan persentase penurunan risiko bencana; persentase penanganan darurat kebencanaan; persentase rehab rekon pasca bencana; dan persentase pemenuhan logistik bencana.

6. Sosial

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Rehabilitasi Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan pelayanan rehabilitasi sosial dasar PMKS terlantar di dalam panti yang meliputi anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas terlantar, serta gelandangan dan pengemis. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penanganan PMKS yang membutuhkan pelayanan dasar di dalam panti, dan persentase keberfungsian PMKS dalam panti.

b. Program Penanganan Fakir Miskin

Program ini diarahkan pada kegiatan bimbingan sosial dan motivasi terhadap keluarga fakir miskin, serta pengelolaan data kemiskinan dan PMKS lainnya. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase fakir miskin yang telah tervalidasi.

c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan perlindungan sosial bagi korban bencana, dan jaminan sosial bagi PMKS Non Produktif melalui Kartu Jateng Sejahtera (KJS), serta penanangan korban bencana saat dan paska kejadian bencana. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif.

d. Program Pemberdayaan Sosial

Program ini diarahkan pada kegiatan penguatan kapasitas Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS), dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu persentase PSKS dapat melaksanakan UKS.

B. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja hingga memperoleh sertifikat kompetensi (di bidang industri; bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerjaan migran; bidang pertanian), peningkatan lembaga pelatihan supaya terakreditasi, peningkatan pencari kerja dan tenaga kerja yang mempunyai sertifikasi, peningkatan kompetensi instruktur pelatihan dan SDM pelatihan kerja, peningkatan tenaga kerja atau pencari kerja yang mengikuti pelatihan produktivitas atau kewirausahaan, peningkatan perusahaan atau lembaga yang menerapkan peningkatan produktivitas, peningkatan sarana dan prasarana pelatihan, peningkatan jejaring pelatihan dengan lembaga penempatan tenaga kerja/dunia usaha/dunia industri dalam rangka peningkatan kerjasama pelatihan dan pemasaran program pelatihan atau luaran lembaga pelatihan melalui identifikasi kebutuhan latihan (*TNA/Training Need Assesment*) dan promosi program pelatihan ataupun luarannya.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi; persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi; persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas; persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi (di bidang industri, bidang pertanian, jasa, bahasa asing, budaya dasar, dan pekerja migran); serta persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan.

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program ini diarahkan pada peningkatan penempatan pencari kerja atau tenaga kerja di sektor formal dan perluasan kesempatan kerja di sektor informal melalui padat karya, pemberdayaan dan pengembangan kewirausahaan atau pengembangan sektor informal bagi pencari kerja dan tenaga kerja khusus/disabilitas, lansia, kelompok rentan; peningkatan perlindungan tenaga kerja dalam dan luar negeri difokuskan pada pra dan pasca penempatan, optimalisasi peran lembaga penempatan tenaga kerja dan memperluas akses informasi pasar kerja melalui Bursa Kerja Khusus, Bursa Kerja *Online*, *Job Market Fair*, peningkatan pembinaan dan pelayanan pada perusahaan pengguna TKA (Tenaga Kerja Asing).

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase tenaga kerja yang ditempatkan, dan persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal.

c. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program ini diarahkan pada peningkatan pengelolaan iklim kerja yang kondusif untuk menciptakan Hubungan Industrial kondusif dan harmonis, serta penguatan dan pengelolaan data dan informasi Hubungan Industrial dengan fokus penetapan sistem pengupahan yang berkeadilan dan peningkatan kesejahteraan pekerja, peningkatan pembinaan dan pemberdayaan Lembaga Kerjasama Bipartit dan pengesahan peraturan perusahaan, peningkatan kepersertaan jaminan sosial; peningkatan penyelesaian

PHI/Mogok/Unjuk rasa, dan penutupan perusahaan dan pengembangan *database* kasus ketenagakerjaan; serta peningkatan penyelesaian perselisihan penempatan tenaga kerja.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu peningkatan persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS; persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah; persentase peningkatan jumlah LKS bipartit yang terbentuk; persentase perusahaan yang memenuhi ketentuan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama; dan persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

d. Program Peningkatan Kepatuhan dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan

Program ini diarahkan pada peningkatan koordinasi pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan ketenagakerjaan dalam dan luar negeri melalui penerapan SM-K3 (Sistem manajemen K3), pengawasan standarisasi dan sertifikasi K3, serta peningkatan deteksi dini potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja, serta peningkatan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan (Norma Kerja dan Norma K3) yang dilakukan secara berkesinambungan, dan diprioritaskan pada perusahaan-perusahaan yang memiliki risiko keselamatan tenaga kerja menengah dan besar.

Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja program yaitu persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan; dan persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak

Program ini diarahkan pada peningkatan peran perempuan dan anak dalam pembangunan, penyediaan data dan informasi PPPA sebagai bahan evaluasi kinerja dan perumusan perencanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta peningkatan pemenuhan hak anak di kabupaten/kota. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi; persentase data dan informasi PPPA yang tersedia; dan persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkat pratama, tingkat madya, dan tingkat nindya.

b. Program Perlindungan Perempuan dan Anak

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan kualitas layanan penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu penurunan rasio korban kekerasan terhadap perempuan; dan rasio korban kekerasan terhadap anak.

3. Pangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Peningkatan Ketahanan Pangan**. Program ini diarahkan pada analisis ketersediaan pangan; pengembangan ketersediaan sumberdaya pangan; peningkatan kemandirian dan penanganan kerentanan pangan; pemantauan harga dan stabilisasi harga pangan; pemberdayaan masyarakat melalui penguatan kelembagaan pangan, jaringan distribusi, Sistem Logistik Daerah

(Sislogda); pengembangan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, Pengembangan pemanfaatan pekarangan dan konsumsi pangan B2SA; Pengembangan Diversifikasi Pengolahan Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal; Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; Peningkatan Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan; Pengawasan Keamanan Pangan; Pengembangan Kelembagaan Keamanan Pangan; Sertifikasi dan Registrasi Jaminan Mutu Pangan; dan Pengujian Mutu Pangan.

Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu ketersediaan protein pangan beragam dan berkualitas; ketersediaan energi pangan beragam dan berkualitas; persentase penanganan daerah rawan pangan; CV harga pangan strategis beras; CV harga pangan strategis bawang merah; CV harga pangan strategis cabai; rasio cadangan pangan masyarakat terhadap kebutuhan pangan; persentase cadangan pangan yang dikelola; rasio konsumsi pangan lokal; konsumsi pangan beras; konsumsi kelompok pangan buah dan sayur; konsumsi kelompok pangan hewani; persentase pengawasan keamanan pangan segar; serta persentase jaminan mutu pangan yang diterbitkan.

4. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah** yang diarahkan pada persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum.

5. Lingkungan Hidup

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian pencemaran lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah bahan berbahaya beracun, pengendalian kerusakan lingkungan hidup, pembinaan masyarakat dan penanganan daerah penghasil bahan baku tembakau dan industrinya, pengujian kualitas air dan udara, dengan indikator kinerja program yaitu persentase sungai yang meningkat kualitasnya; persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara; dan persentase pemantauan kualitas udara ambien.

b. Program Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan teknologi lingkungan ekofisiensi dan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, perencanaan/penyusunan kebijakan teknis penataan lingkungan hidup, peningkatan pelaksanaan AMDAL dan Komisi Penilai AMDAL, dengan indikator kinerja yaitu peningkatan persentase rekomendasi lingkungan hidup.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Penataan Administrasi Kependudukan** dalam upaya mendorong kabupaten/kota untuk mewujudkan masyarakat tertib administrasi kependudukan, melalui pembinaan, fasilitasi, bimbingan dan supervisi pelaksana pelayanan administrasi kependudukan di kabupaten/kota, serta mendorong kerjasama pemanfaatan data kependudukan dalam pelayanan publik di skala

provinsi. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase penduduk yang memiliki KTP-el per wajib KTP-el; tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akte kelahiran; dan cakupan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa melalui fasilitasi pembinaan pengelolaan aset dan keuangan desa, fasilitasi penyusunan regulasi dan kebijakan bidang pemerintahan desa, evaluasi peningkatan perkembangan desa, peningkatan kapasitas aparatur dan lembaga desa, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase jumlah desa dengan satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat; persentase rekomendasi raperda/raperbup yang berkaitan dengan desa; persentase anggota BPD yang meningkat kapasitasnya; persentase jumlah rekomendasi gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum; serta persentase desa dengan Sistem Informasi Desa.

b. Program Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan

Program ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan pembangunan kawasan perdesaan dan kerjasama antar desa, dalam rangka pencapaian indikator kinerja peningkatan persentase pengembangan kawasan perdesaan; serta persentase desa yang mengembangkan BKAD.

c. Program Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat

Program ini dilaksanakan dalam upaya mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, penguatan Lembaga Masyarakat yang ada di desa serta pemanfaatan Teknologi Tepat Guna. Program ini diarahkan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu peningkatan persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang difasilitasi; dan persentase lembaga kemasyarakatan yang meningkat kapasitasnya.

8. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan kesertaan KB, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu peningkatan persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP); persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif; persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk; serta penurunan *Unmetneed* KB.

b. Program Keluarga Sejahtera

Program ini diarahkan pada peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga peningkatan persentase kelompok tribina yang aktif; persentase UPPKS yang aktif; dan persentase ormas dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga.

9. Perhubungan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perhubungan Darat

Program ini dalam lima tahun kedepan diarahkan pada peningkatan pelayanan angkutan aglomerasi berupa pengembangan koridor BRT Trans Jateng pada Wilayah Pembangunan Kedungsepur, Barlimascakeb, Purwomanggung dan Subosukawonosraten serta pengembangan layanan Trans Jateng dengan sistem BLUD; Peningkatan jaringan transportasi berupa fasilitasi pengembangan perhubungan udara (berupa pembebasan tanah) untuk Pembangunan Bandara Jenderal Besar Soedirman Kabupaten Purbalingga dan Bandara Ngloram Kabupaten Blora, Pengembangan Bandara Dewadaru Karimunjava Kabupaten Blora serta fasilitasi peningkatan pelayanan pada bandara eksisting (Bandara Adi Soemarmo Kabupaten Boyolali, Bandara Ahmad Yani Kota Semarang dan Bandara Tunggul Wulung Kabupaten Cilacap); Peningkatan perkeretaapian berupa peningkatan keselamatan di persimpangan rel kereta api (pemasangan *early warning system* di perlintasan sebidang KA pada ruas jalan provinsi) dan fasilitasi reaktivasi jalur non aktif utamanya pada Lintas Semarang – Demak – Kudus – Pati – Rembang, Lintas Purwokerto – Wonosobo dan Lintas Kedungjati – Tuntang – Ambarawa – Magelang serta fasilitasi proses pembangunan akses jalur kereta api menuju KSPN Borobudur; Peningkatan dan pembangunan terminal angkutan jalan Tipe B; Peningkatan rekayasa lalu lintas jalan berupa pemenuhan fasilitas keselamatan jalan pada ruas jalan provinsi strategis (utamanya berupa pemasangan LPJU pada ruas jalan provinsi (perbatasan antar provinsi, akses pariwisata dan ruas jalan strategis lainnya).

Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang; persentase rehabilitasi daerah rawan kecelakaan; persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis; persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum; persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM; persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum; persentase terminal bus tipe B sesuai standar pelayanan; persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang kereta api; persentase bus angkutan umum/massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis; persentase jumlah Abdi Yasa yang memenuhi *passing grade* pemahaman keselamatan jalan; dan persentase fasilitasi pembangunan infrastruktur transportasi strategis.

b. Program Pengembangan Perhubungan Laut

Program ini diarahkan pada pengembangan pelabuhan pengumpan regional di pesisir utara Jawa Tengah (masa transisi kewenangan dari Pemerintah Pusat), dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berizin; persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang; persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjava.

10. Komunikasi dan Informatika

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Program ini diarahkan pada peningkatan konten informasi publik yang disebarluaskan; komunitas masyarakat kehumasan yang dikoordinasikan; dan rekomendasi analisis berita dan pendapat umum, dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan nilai survei kepuasan komunikasi publik.

b. Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi

Program ini diarahkan pada peningkatan perangkat daerah yang terhubung dengan jaringan *fiber optic* milik Provinsi Jawa Tengah; kapasitas *bandwidth* yang tersedia; serta perangkat daerah yang terintegrasi infrastruktur TIK. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

c. Program Pengembangan e-Government

Program ini diarahkan pada peningkatan aplikasi berbagi pakai yang dikembangkan/dikelola; regulasi aplikasi yang terbit; kapasitas penyelenggara *e-government*, dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu persentase aplikasi layanan publik terintegrasi.

11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan dan Pengawasan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan pengawasan koperasi, penilaian kesehatan koperasi, fasilitasi pembinaan usaha koperasi, dan fasilitasi penyusunan laporan keuangan koperasi. Indikator kinerja pada program ini adalah persentase koperasi sehat; dan persentase koperasi aktif.

b. Program Pemasyarakatan Perkoperasian

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan pemasyarakatan dan kelembagaan koperasi dan penyediaan sistem data informasi koperasi, dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase pertumbuhan anggota koperasi provinsi.

c. Program Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi

Program ini diarahkan pada kegiatan pemeringkatan koperasi dan fasilitasi tata laksana pengelolaan koperasi, guna pencapaian indikator kinerja yaitu persentase koperasi provinsi berkualitas.

d. Program Pendidikan Perkoperasian dan UKM

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan kualitas manajerial sumberdaya manusia KUKM, peningkatan kompetensi sumberdaya manusia KUKM, pembinaan kemampuan dan keterampilan kerja, penguatan sarana dan prasarana kelembagaan pelatihan, dalam rangka mendukung pencapaian indikator program persentase sumberdaya manusia koperasi dan UKM yang kompeten.

e. Program Pengembangan Akses Pembiayaan Bagi KUKM

Program ini diarahkan pada peningkatan kapasitas pembiayaan bagi KUKM, pengembangan jaringan pembiayaan KUKM, serta penyediaan data dan informasi pembiayaan KUKM, untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase KUKM yang mengakses kredit perbankan.

f. Program Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Usaha KUKM

Program ini diarahkan pada penyediaan data dan informasi peluang usaha KUKM, fasilitasi perlindungan produk KUKM, penataan manajemen usaha KUKM, penguatan usaha ekonomi produktif masyarakat, dan pengembangan layanan usaha KUKM. Indikator dalam program ini yang akan dicapai adalah persentase pertumbuhan aset KUKM; dan persentase pertumbuhan tenaga kerja KUKM.

g. Program Peningkatan Produktivitas KUKM

Program ini diarahkan pada kegiatan peningkatan produksi koperasi, produksi UKM, perluasan jaringan produksi koperasi dan UKM, peningkatan kualitas produk unggulan daerah, penguatan manajemen produksi koperasi dan UKM, serta penyediaan data dan informasi produksi KUKM. Indikator kinerja yang akan dicapai pada program ini adalah persentase pertumbuhan omset KUKM.

h. Program Perluasan Jaringan Pemasaran dan Usaha KUKM

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi akses pemasaran bagi koperasi dan UKM, perluasan jaringan usaha koperasi dan UKM, penyediaan data produk dan sistem informasi pasar koperasi, serta promosi produk koperasi dan UKM, dalam rangka mencapai indikator kinerja persentase pertumbuhan pangsa pasar produk KUKM.

12. Penanaman Modal

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada penyusunan perencanaan dan kebijakan penanaman modal melalui perencanaan sektoral penanaman modal dan penyusunan profil potensi dan peluang penanaman modal, serta profil pengembangan dan penyiapan kewilayahan penanaman modal regional. Indikator kinerja program ini adalah peningkatan persentase bahan kajian potensi penanaman modal yang dipromosikan.

b. Program Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada promosi dan kerjasama penanaman modal melalui Central Java Investment Business Forum (CJIBF) dan Business Matching realisasi kerjasama kemitraan antara usaha besar (PMA/PMDN) dengan UKM. Program yang dilakukan ini untuk mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan rasio jumlah izin usaha dan/atau izin komersial/izin operasional terhadap kepeminatan penanaman modal; dan rasio jumlah realisasi kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM terhadap jumlah kepeminatan kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM.

c. Program Pelayanan Perijinan

Program ini diarahkan pada penyelenggaraan perijinan melalui penyelesaian perijinan sesuai standar pelayanan, dalam rangka pencapaian indikator kinerja peningkatan persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan.

d. Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal

Program ini diarahkan pada pengawasan, pengendalian, serta monitoring dan evaluasi melalui klinik investasi dan penyelesaian permasalahan penanaman modal, guna mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan persentase realisasi proyek penanaman modal.

e. Program Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perijinan

Program ini diarahkan pada peningkatan persentase pemenuhan standar pelayanan; dan persentase pelayanan pengaduan masyarakat.

f. Program Pelayanan Data dan Informasi Penanaman Modal dan Perijinan

Program ini diarahkan pada peningkatan pelayanan informasi penanaman modal dan perijinan, dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu penanganan pengaduan serta peningkatan prasarana sarana layanan melalui penyelesaian pengaduan masyarakat dan analisis survei kepuasan masyarakat (SKM). Indikator kinerja program ini adalah peningkatan persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perijinan.

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kewirausahaan secara berkelanjutan; penguatan kemitraan dengan *stakeholder*; dan kesadaran pemuda dari ancaman destruktif, dalam rangka pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase capaian kapasitas kepemudaan; dan persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda.

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Keolahragaan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan atlet secara berjenjang; penguatan *database* keolahragaan dan penguatan kemitraan dengan *stakeholder* olahraga serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana latihan, guna pencapaian indikator kinerja program yaitu peningkatan persentase capaian event olahraga rekreasi; persentase peningkatan prestasi olahraga; persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten; persentase atlet PPLOP yang berprestasi; dan persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik.

14. Statistik

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Data Statistik Daerah Dan Keterbukaan Informasi**, yang diarahkan pada peningkatan data sektor ekonomi dan infrastruktur yang tersedia dalam *Single Data System*; data sektor sosial, politik, hukum dan HAM yang tersedia dalam *Single Data System*, Daftar Informasi Publik (DIP) yang dipublikasikan badan publik; dan persentase penyelesaian sengketa informasi. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase ketersediaan data sektoral; dan persentase badan publik yang terbuka.

15. Persandian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Peningkatan Persandian Daerah Dan Keamanan Informasi Daerah**, yang diarahkan pada peningkatan SDM pengelola persandian yang ditingkatkan kapasitasnya; aplikasi yang dilakukan *assesment* keamanan informasinya; dan informasi yang menggunakan jaringan komunikasi sandi. Program ini dilaksanakan dalam rangka mencapai indikator kinerja program yaitu persentase perangkat daerah memiliki keamanan informasi > 80.

16. Kebudayaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Pembinaan Kebudayaan**, yang diarahkan pada penyelenggaraan festival seni (apresiasi seni budaya) dan rumah budaya, pelestarian dan perlindungan cagar budaya, peningkatan kepuasan pengunjung museum, penguatan nilai kesejarahan, dialog pengembangan budaya dan tradisi, serta layanan terhadap penghayat kepercayaan. Program ini dilakukan untuk mencapai indikator kinerja yaitu peningkatan persentase sumber belajar berbasis budaya; persentase siswa dan anggota paguyuban penghayat kepercayaan yang terlayani; persentase status cagar budaya; persentase jenis budaya yang terlayani; nilai Survei Kepuasan Pengunjung Museum; dan persentase seni budaya kabupaten/kota yang terfasilitasi.

17. Perpustakaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas SDM pengelola perpustakaan/pustakawan yang memiliki sertifikat kompetensi; peningkatan budaya gemar baca melalui pelayanan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan penyelenggaraan pameran perpustakaan; serta pengembangan dan penguatan perpustakaan yang melibatkan seluruh pihak (lembaga pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat) dengan membangun kerjasama dan jejaring antar perpustakaan. Program ini diarahkan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase peningkatan kompetensi sdm perpustakaan; dan persentase perluasan jejaring kemitraan perpustakaan.

b. Program Pengelolaan Perpustakaan

Program ini diarahkan pada peningkatan kuantitas dan keberagaman koleksi perpustakaan (termasuk koleksi digital) serta peningkatan kualitas layanan perpustakaan berbasis IT. Indikator kinerja program ini yang akan dicapai adalah persentase ketersediaan bahan pustaka; dan persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi.

18. Kearsipan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pembinaan, Pengembangan, dan Pengawasan Kearsipan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan dan penataan kelembagaan instansi pemerintah yang terintegrasi, penguatan penerapan sistem pengelolaan arsip berbasis IT, serta penerapan budaya tertib arsip melalui audit dan pengawasan kearsipan, dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja persentase perangkat daerah yang tertib arsip.

b. Program Pengelolaan dan Pelestarian Arsip

Program ini diarahkan pada peningkatan tata kelola arsip yang transparan dan memiliki akuntabilitas kinerja pemerintah, guna mendukung pencapaian indikator kinerja persentase pengelolaan arsip.

c. Program Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik dan peningkatan promosi pemanfaatan arsip, dengan indikator kinerja program yaitu persentase pengunjung arsip.

C. Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian penangkapan ikan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan; kepelabuhanan dan kenelayanan; serta pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP), dalam rangka pencapaian indikator kinerja peningkatan produksi perikanan tangkap; dan persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan.

b. Program Usaha dan Pengembangan Komoditas

Program ini diarahkan pada pengujian kesehatan ikan dan lingkungan; pengembangan komoditas; dan pengembangan budidaya ikan air payau dan laut. Indikator kinerja yang akan dicapai program ini adalah produksi perikanan budidaya; persentase peningkatan produksi benih; dan persentase penanganan kasus hama penyakit ikan.

c. Program Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut

Program ini diarahkan pada kegiatan konservasi, rehabilitasi, dan perijinan; pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil; dan pengelolaan ruang laut. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase peningkatan produksi garam; persentase peningkatan pemberdayaan perempuan dan taruna pesisir; dan persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif; dan persentase peningkatan luas kawasan mangrove yang direhabilitasi dari tahun sebelumnya.

d. Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada pencegahan dan penindakan pelanggaran pengelolaan SDKP; serta pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan. Indikator kinerja yang akan dicapai melalui program ini adalah persentase jumlah kasus pelanggaran pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang ditindaklanjuti; dan persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara dan selatan Jawa Tengah.

e. Program Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan

Program ini diarahkan pada pengembangan logistik, bina mutu dan diversifikasi produk; dan pengujian mutu hasil perikanan, untuk mencapai indikator kinerja persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan; dan persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu.

2. Pariwisata

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program ini diarahkan pada pengembangan kawasan pariwisata melalui pengembangan KSPP/KSPN, penyusunan dokumen pengembangan destinasi pariwisata, penyelenggaraan atraksi wisata di kawasan pariwisata, penerimaan penghargaan kepariwisataan; pengembangan daya tarik wisata; serta pengembangan industri pariwisata melalui Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) usaha pariwisata. Program ini adalah untuk mendukung pencapaian indikator kinerja program yaitu persentase peningkatan dan

pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP; dan persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).

b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program ini diarahkan pada pengembangan pasar wisata melalui pengembangan pasar massal di Jawa Tengah, pengembangan ceruk pasar pariwisata, serta penyusunan dokumen pengembangan pasar pariwisata; promosi dan informasi pariwisata melalui penyelenggaraan dan partisipasi event/promosi pariwisata di dalam negeri dan di luar negeri; serta pencitraan pariwisata melalui pengadaan dan penyediaan sarana dan prasarana pemasaran pariwisata. Program ini dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu peningkatan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara.

c. Program Pengembangan SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Program ini diarahkan pada pengembangan dan pemberdayaan masyarakat dan SDM pariwisata melalui pelatihan SDM pariwisata, pembinaan SDM pariwisata yang sadar wisata, serta peningkatan kemampuan kewirausahaan di bidang pariwisata; pengembangan pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan dan sertifikasi pelaku ekonomi kreatif, dan fasilitasi pengembangan komunitas ekonomi kreatif; serta penguatan kemitraan dan kelembagaan kepariwisataan dan ekonomi kreatif melalui pembinaan dan pengembangan lembaga/organisasi pariwisata (pokdarwis dan klaster pariwisata), penyusunan dokumen kerjasama serta pembentukan kota kreatif. Program ini dilaksanakan adalah untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi; dan persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi.

3. Pertanian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Agribisnis

Program ini diarahkan pada persentase peningkatan produksi padi; persentase peningkatan produksi jagung; persentase peningkatan produksi kedelai; persentase peningkatan produksi bawang merah; persentase peningkatan produksi cabe besar; persentase peningkatan produksi kopi; persentase peningkatan produksi tebu; persentase peningkatan produksi kelapa; persentase jaringan irigasi tersier yang baik; persentase peningkatan kapasitas kelompok pengolahan hasil; persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian; persentase layanan sertifikasi benih; persentase peningkatan produksi benih; serta persentase puso akibat serangan organisme pengganggu tanaman (OPT) .

b. Program Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian

Program ini diarahkan pada persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya.

c. Program Pengembangan Agribisnis Peternakan

Program ini diarahkan pada peningkatan populasi ternak; persentase kenaikan fasilitasi sarpras peternakan; persentase kenaikan fasilitasi penyuluhan dan kemitraan; persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan betina produktif; persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku; dan persentase peningkatan produksi ternak.

4. Kehutanan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Program ini diarahkan pada kegiatan pengendalian penanganan DAS dan konservasi tumbuhan dan satwa liar, dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani.

b. Program Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan dan penegakan hukum lingkungan hidup dan kehutanan; penyuluhan, pemberdayaan masyarakat dan perlindungan hutan, dengan indikator kinerjanya adalah presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat; dan persentase pengaduan yang ditangani.

c. Program Pemanfaatan Hutan

Program ini diarahkan pada kegiatan Pengendalian, penatagunaan dan pemanfaatan hutan, dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengembangan Ketenagalistrikan

Program ini diarahkan pada kegiatan pembinaan dan peningkatan keselamatan ketenagalistrikan, terutama diperuntukkan untuk pemenuhan kebutuhan listrik bagi rumah tangga miskin. Program ini diarahkan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase pemenuhan kebutuhan listrik bagi rumah tangga miskin.

b. Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan konservasi Energi Baru Terbarukan, dalam rangka pencapaian penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO₂e).

c. Program Pengelolaan Pertambangan Minerba

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pembinaan pertambangan mineral dan batubara, guna pencapaian indikator kinerja yaitu peningkatan persentase *good mining practice*.

d. Program Pengembangan Kegeologian

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan dan pembinaan geologi dan air tanah, dengan indikator kinerja program yaitu persentase pengambilan air tanah.

6. Perdagangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor

Program ini diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku ekspor-impor non migas; peningkatan efisiensi impor non migas; peningkatan akses pasar produk berorientasi ekspor; peningkatan informasi dan analisa pasar ekspor; dan *business matching* jejaring pemasaran internasional. Program ini memiliki indikator kinerja yang akan dicapai yaitu nilai ekspor non migas.

b. Program Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri

Program ini diarahkan pada pemantauan distribusi dan logistik kepokmas dan komoditi strategis lainnya; promosi dan informasi pasar produk dalam negeri; pengembangan pasar dan usaha dagang kecil menengah; serta peningkatan promosi produk unggulan daerah. Indikator kinerja program ini adalah persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupaten/kota (*price center*).

c. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen

Program ini diarahkan pada peningkatan perlindungan konsumen; peningkatan tertib niaga; peningkatan standardisasi industri; serta pembinaan industri melalui fasilitasi kepemilikan hak atas kekayaan intelektual bagi industri kecil menengah. Indikator kinerja program ini adalah persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan.

d. Program Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang

Program ini diarahkan pada kegiatan penyebaran informasi layanan uji mutu dan kalibrasi; peningkatan pengujian produk dan konsultasi mutu barang; serta peningkatan laboratorium kalibrasi. Program ini dilaksanakan guna pencapaian indikator kinerja persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi.

7. Perindustrian

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penguatan dan Pengembangan Industri Agro

Program ini diarahkan pada pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber daya agro; pengembangan SDM, inovasi dan kreativitas industri agro; penguatan informasi industri agro; serta pengembangan pemasaran dan jejaring kemitraan industri agro. Indikator kinerja program ini adalah persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro.

b. Program Penguatan dan Pengembangan Industri Non Agro

Program ini diarahkan pada pengembangan sarana prasarana IKM berbasis sumber daya non agro; pengembangan SDM, inovasi dan kreativitas industri non agro; penguatan informasi industri non agro; serta pengembangan pemasaran dan jejaring kemitraan industri non agro. Indikator kinerja program ini adalah persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro.

c. Program Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif

Program ini diarahkan pada fasilitasi dan layanan pengembangan kemasan; pengembangan industri kreatif; pengembangan jejaring pemasaran berbasis *e-commerce*, dengan indikator kinerjanya yaitu persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif.

d. Program Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu

Program ini diarahkan pada peningkatan layanan jasa keteknikan; dan pengembangan rekayasa dan penerapan teknologi industri logam dan kayu, dengan indikator kinerja program yaitu persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa.

e. Program Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki

Program ini diarahkan pada peningkatan SDM industri produk tekstil dan alas kaki; peningkatan layanan jasa pelatihan industri tekstil dan alas kaki; penyediaan sarana prasarana kelembagaan dan pelatihan ketrampilan bagi masyarakat di wilayah IHT. Indikator kinerja program ini adalah persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki.

8. Transmigrasi

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Pengembangan Dan Penempatan Transmigrasi**, yang diarahkan pada persentase kenaikan calon transmigran dilatih di bidang pertanian; persentase kenaikan transmigran yang ditempatkan memiliki rumah dan lahan usaha; persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi

D. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dan ketercapaian target tahunan terhadap sasaran RPJMD melalui penyusunan dokumen perencanaan lingkup bidang perekonomian. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang perekonomian; serta persentase ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD lingkup bidang perekonomian.

b. Program Perencanaan Pembangunan Pemerintahan dan Sosial Budaya

Program ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dan ketercapaian target tahunan terhadap sasaran RPJMD melalui penyusunan dokumen perencanaan lingkup bidang pemerintahan dan sosial budaya. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya; serta persentase ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya.

c. Program Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dan ketercapaian target tahunan terhadap sasaran RPJMD melalui penyusunan dokumen perencanaan lingkup bidang Infrastruktur Wilayah, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup. Indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup; serta Persentase ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup.

d. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini dilaksanakan dalam upaya mewujudkan perencanaan dan evaluasi yang sesuai peraturan perundangan melalui penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah, dengan indikator kinerja yang akan dicapai yaitu persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun sesuai peraturan perundangan.

2. Keuangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan asli daerah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja yaitu persentase peningkatan penerimaan PKB; persentase peningkatan penerimaan BBNKB; persentase peningkatan penerimaan PAP; persentase peningkatan penerimaan retribusi pemakaian kekayaan daerah; persentase peningkatan penerimaan retribusi kayada dipisahkan; persentase peningkatan penerimaan PBBKB; persentase peningkatan penerimaan pajak rokok; persentase peningkatan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah; persentase pemanfaatan informasi pendapatan daerah; persentase peningkatan kepatuhan wajib pajak; persentase pencapaian kinerja pendapatan daerah.

b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan penyusunan APBD agar tepat waktu, penerapan laporan pertanggungjawaban APBD berbasis akrual, dan implementasi penatausahaan keuangan daerah, dengan indikator kinerja yaitu peningkatan persentase penetapan APBD tepat waktu; persentase kabupaten/kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan; persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu; persentase realisasi serapan APBD.

c. Program Pengelolaan Aset Daerah

Program ini diarahkan pada upaya peningkatan optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka pencapaian peningkatan persentase pemanfaatan aset daerah.

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah,

Program ini diarahkan pada peningkatan persentase pejabat pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas yang terevaluasi kinerjanya; persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui tugas belajar dan ijin belajar; persentase layanan administrasi kepegawaian; persentase penanganan kasus kepegawaian; persentase sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan dan terintegrasi; dan persentase PNS yang terpetakan kompetensinya.

b. Program Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi

Program ini diarahkan pada kegiatan perencanaan pengembangan kompetensi dan penjaminan mutu pengembangan kompetensi, dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu peningkatan persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti, dan indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan.

c. Program Pengembangan Kompetensi ASN

Program ini diarahkan pada kegiatan pengembangan kompetensi teknis, pengembangan kompetensi jabatan fungsional, pengembangan kompetensi manajerial, serta pelatihan dasar CPNS, dalam rangka pencapaian indikator kinerja yaitu peningkatan persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis; persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional; persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial; persentase ASN yang lulus Latsar CPNS.

d. Program Sertifikasi Kompetensi ASN

Program ini diarahkan pada kegiatan uji kompetensi dan pengembangan lembaga sertifikasi kompetensi, untuk mencapai indikator kinerja peningkatan persentase PNS yang lulus uji kompetensi.

4. Penelitian dan Pengembangan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah **Program Kelitbangan Iptek dan Inovasi Daerah**, yang diarahkan pada kegiatan riset dan pengembangan bidang pemerintahan dan sosial budaya, perekonomian, infrastruktur dan pengembangan wilayah; serta kegiatan perekayasaan, penerapan, dan pelayanan inovasi dan teknologi. Program ini dilaksanakan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase implementasi rencana kelitbangan iptekin; dan persentase inovasi yang diterapkan di daerah.

5. Pengawasan

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan audit kinerja, evaluasi kinerja, pemantauan kebijakan kepala daerah dan hasil pemeriksaan, review perencanaan penganggaran dan pelaporan, audit dengan tujuan tertentu, serta pengawasan lainnya. Program ini dilaksanakan untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan; persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan; serta persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya.

b. Program Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP

Program ini diarahkan pada kegiatan sertifikasi APIP dalam rangka meningkatkan persentase APIP berlisensi nasional/internasional.

c. Program Peningkatan Manajemen Mutu

Program ini diarahkan pada kegiatan PPKT berbasis risiko dan survailans ISO, untuk mencapai indikator kinerja Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas.

d. Program Manajemen Risiko

Program ini diarahkan pada kegiatan pemetaan risiko dan sapu bersih pungli, dengan indikator kinerja yaitu persentase OPD yang memiliki profil manajemen risiko.

e. Program Pembangunan Budaya Integritas

Program ini diarahkan pada kegiatan kepatuhan pencegahan dan pemberantasan korupsi, guna mencapai target indikator kinerja Nilai Budaya Integritas.

6. Fungsi Lainnya

Rencana program prioritas yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Program ini diarahkan pada peningkatan persentase hasil ringkas kebijakan (*policy brief*) yang diusulkan (sesuai bidangnya); dan persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti.

b. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Dilaksanakan dalam rangka upaya penataan peraturan perundang-undangan tingkat Provinsi (Produk Hukum Daerah) agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang undangan lainnya, kepentingan umum dan kesusilaan melalui penyusunan Raperda, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur serta pengkajian dan sosialisasi produk hukum. Program ini diarahkan pada pencapaian indikator persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan dan persentase efektifitas produk hukum daerah.

c. Program Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah

Program ini diarahkan pada kegiatan-kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja yaitu persentase bantuan hukum dan sengketa hukum; persentase kabupaten/kota peduli HAM; Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/Kota yang dikaji; persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun; persentase kegiatan strategis yang dievaluasi pelaksanaannya (sesuai bidangnya); persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target; persentase kegiatan bantuan keuangan yang pelaksanaannya sesuai target; persentase OPD dan kabupaten/kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu; persentase ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD; persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target; persentase OPD yang efektif tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangannya; persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB; persentase UPP yang mengimplementasikan standar pelayanan; persentase kabupaten/kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat; persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan; persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas); persentase kabupaten/kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15; persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat; persentase keberhasilan pengadaan barang/jasa; persentase efektivitas sistem informasi pengadaan barang/jasa; persentase aduan dan sengketa yang tertangani.

d. Program Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah

Program ini diarahkan pada persentase perangkat daerah yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya (sesuai bidangnya); dan persentase tingkat kesehatan BUMD.

e. Program Administrasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Program ini diarahkan pada persentase tertib administrasi pemerintahan; Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah.

f. Program Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Program ini diarahkan pada persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah; persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD.

g. Program Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan

Program ini diarahkan pada persentase pemenuhan pelayanan umum rumah tangga pimpinan; persentase layanan liputan dan keprotokolan; Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya.

h. Program Peningkatan Layanan Kedewanan

Program ini diarahkan pada kegiatan yang mendukung pencapaian indikator kinerja yaitu persentase layanan bagian persidangan; dan persentase layanan bagian humas.

i. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi pelayanan untuk masyarakat dan aparatur di Jakarta seperti fasilitasi mudik bersama, untuk mencapai indikator kinerja yaitu persentase ketercapaian pelayanan aparatur dan masyarakat.

j. Program Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya

Program ini diarahkan pada kegiatan fasilitasi promosi produk unggulan dan kesenian kabupaten/kota di Jakarta, untuk mendukung pencapaian indikator kinerja yaitu persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam promosi produk unggulan, dan pelestarian seni budaya.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan program prioritas perangkat daerah, direncanakan program yang bersifat pendukung operasional OPD sebagai berikut:

1. Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah

Program ini diarahkan untuk kegiatan pendukung operasional yaitu administrasi pelayanan keuangan perangkat daerah; pelayanan jasa surat menyurat dan kearsipan perangkat daerah; penyediaan jasa komunikasi, air dan listrik perangkat daerah; penyediaan jaminan barang milik daerah; penyediaan jasa kebersihan dan pelayanan perkantoran perangkat daerah; rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah perangkat daerah; pelayanan penyediaan makan minum rapat perangkat daerah; penyediaan bahan bacaan/buku perpustakaan perangkat daerah; pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan/rumah dinas/gedung kantor/kendaraan dinas/operasional perangkat daerah; pemeliharaan rutin /berkala sarana kantor dan rumah tangga perangkat daerah; penyediaan sarana dan prasarana kantor; pembangunan gedung kantor; rehab gedung kantor perangkat daerah; pengadaan kendaraan dinas/operasional; pengadaan pakaian dinas; pendidikan dan pelatihan formal; pelayanan informasi perangkat daerah; serta pengelolaan administrasi kepegawaian perangkat daerah.

2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Program ini diarahkan untuk penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah; serta penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah

Sedangkan penjabaran program prioritas seluruh perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah, tertuang dalam Tabel 8.2.

8.2. Kerangka Pendanaan Non Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

Mendasarkan pada kemampuan fiskal yang berpotensi tidak sepenuhnya dapat membiayai kebutuhan belanja pembangunan maka kerangka pendanaan non APBD akan diperoleh dari:

- a. Pengembangan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dan Pengembangan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha;
- b. Obligasi daerah untuk membiayai kegiatan investasi sektor publik yang menjadi urusan pemerintah daerah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Proyek-proyek potensial yang akan dibiayai diantaranya pembangunan Rumah Sakit Khusus (Kota Magelang dan Kota Pekalongan), pengembangan RSUD Kelet Kabupaten Jepara, pengembangan RSUD Moewardi (pengembangan onkologi terpadu), pembangunan Komplek GOR Jatidiri, dan pengembangan kawasan wisata *Edu Park* Tlogo Wening Kabupaten Semarang, pembangunan infrastruktur penunjang kawasan industri, serta proyek-proyek lain yang memenuhi persyaratan;
- c. Pendayagunaan peran BUMD untuk menangani proyek-proyek strategis provinsi antara lain pembangunan rumah sakit khusus di Jawa Tengah, rintisan pertanian terintegrasi melalui implementasi *agriculture estate*, kebijakan sistem logistik daerah (Sislogda) serta proyek strategis yang menguntungkan. Di samping itu, dalam rangka peningkatan pemahaman literasi keuangan dan perlindungan petani/nelayan, BUMD yang menyangkut lembaga keuangan bank (Bank Jateng dan BPR/BKK) dan non bank (Jamkrida dan Askrida) diarahkan untuk mendorong penguatan usaha masyarakat dan UMKM melalui kemudahan akses permodalan dan asuransi. Dengan demikian, penyertaan modal akan terus ditingkatkan dalam rangka mendorong bisnis-bisnis BUMD untuk menyelesaikan urusan daerah yang bersifat strategis;
- d. Optimalisasi peran swasta melalui Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP);
- e. Pemanfaatan sumber pembiayaan lain yang berasal dari Lembaga Donor, Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA), partisipasi masyarakat dan swasta.

Apabila pendanaan non APBD ini dapat dilaksanakan maka kerangka pendanaan APBD tahun 2018-2023 sebagaimana disajikan dalam Tabel 3.19 Proyeksi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018-2023 Provinsi Jawa Tengah akan dilakukan penyesuaian.

Tabel 8.2.

Indikasi Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
0	NON URUSAN						950.234.810,00		782.452.367,00		793.659.518,00		815.485.880,00		993.066.103,00		4.400.879.213,00	
0.0	NON URUSAN						950.234.810,00		782.452.367,00		793.659.518,00		815.485.880,00		993.066.103,00		4.400.879.213,00	
0.0 0.0 1	Manajemen Administrasi Pelayanan Umum, Kepegawaian dan Keuangan Perangkat Daerah						915.896.399,00		731.512.694,00		741.040.012,00		760.866.374,00		936.446.597,00		4.147.180.981,00	Seluruh OPD
		Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian dan keuangan perangkat daerah	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		
0.0 0.0 2	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						34.338.411,00		50.939.673,00		52.619.506,00		54.619.506,00		56.619.506,00		253.698.232,00	Seluruh OPD
		Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja OPD	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR						5.109.459.023,00		5.803.047.991,00		6.314.787.929,00		6.234.643.974,00		5.888.857.040,00		29.348.726.422,00	
1.0 1	PENDIDIKAN						2.019.842.333,00		2.073.101.677,00		2.096.767.917,00		2.128.966.916,00		2.169.615.914,00		10.488.294.757,00	
1.0 1.1 5	Pembinaan Pendidikan Khusus						29.548.447,00		30.948.705,00		32.913.705,00		35.578.705,00		38.243.705,00		167.233.267,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase serapan kurikulum SLB	%	97,33	97,82	97,85		97,88		97,91		97,94		97,97		97,97		Bidang Pembinaan Diksus
		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	80,59	80,79	80,83		80,89		80,96		81,00		81,13		81,13		Bidang Pembinaan Diksus
		APK SLB	%	63,63	65,39	65,74		66,09		66,44		66,79		67,14		67,14		Bidang Pembinaan Diksus
		Disparitas prestasi SLB	%	1,14	1,15	1,05		0,95		0,85		0,75		0,65		0,65		Bidang Pembinaan Diksus
		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	80,89	81,09	81,12		81,18		81,25		81,29		81,42		81,42		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
		APK SLB	%	63,42	63,79	64,14		64,49		64,84		65,19		65,54		65,54		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
		Persentase serapan kurikulum SLB	%	96,08	96,56	96,59		96,62		96,65		96,68		96,71		96,71		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
		Disparitas prestasi SLB	%	7,87	7,91	7,81		7,71		7,61		7,51		7,41		7,41		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
		Disparitas prestasi SLB	%	0,52	0,52	0,42		0,32		0,22		0,12		0,02		0,02		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
		Persentase serapan kurikulum SLB	%	98,07	98,56	98,59		98,62		98,65		98,68		98,71		98,71		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	87,40	87,62	87,65		87,71		87,78		87,82		87,95		87,95		CABANG DINAS PENDIDIKAN II

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		APK SLB	%	72,16	72,26	72,61		72,96		73,31		73,66		74,01		74,01		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
		Disparitas prestasi SLB	%	0,56	0,56	0,46		0,36		0,26		0,16		0,06		0,06		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	78,26	78,45	78,51		78,57		78,64		78,69		78,81		78,81		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
		APK SLB	%	47,24	47,34	47,69		48,04		48,39		48,74		49,09		49,09		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
		Persentase serapan kurikulum SLB	%	97,17	97,66	97,69		97,72		97,75		97,78		97,81		97,81		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
		APK SLB	%	62,26	62,36	62,71		63,06		63,41		63,76		64,11		64,11		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	75,25	75,44	75,47		75,53		75,60		75,64		75,77		75,77		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
		Disparitas prestasi SLB	%	0,50	0,50	0,40		0,30		0,20		0,10		0,01		0,01		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
		Persentase serapan kurikulum SLB	%	98,27	98,76	98,79		98,82		98,85		98,88		98,91		98,91		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	76,25	76,44	76,47		76,53		76,60		76,64		76,77		76,77		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
		Persentase serapan kurikulum SLB	%	95,98	96,46	96,49		96,52		96,55		96,58		96,61		96,61		CABANG DINAS PENDIDIKAN V

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Disparitas prestasi SLB	%	0,78	0,78	0,68		0,58		0,48		0,38		0,28		0,28		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
		APK SLB	%	69,79	69,89	70,24		70,59		70,94		71,29		71,64		71,64		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	84,96	85,17	85,20		85,26		85,33		85,37		85,50		85,50		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
		Persentase serapan kurikulum SLB	%	97,14	97,63	97,66		97,69		97,72		97,75		97,78		97,78		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
		Disparitas prestasi SLB	%	0,65	0,65	0,55		0,45		0,35		0,25		0,15		0,15		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
		APK SLB	%	87,09	87,19	87,54		87,89		88,24		88,59		88,94		88,94		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	79,27	79,47	79,50		79,56		79,63		79,67		79,80		79,80		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
		APK SLB	%	59,23	59,33	59,68		60,03		60,38		60,73		61,08		61,08		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
		Disparitas prestasi SLB	%	0,64	0,64	0,54		0,44		0,34		0,24		0,14		0,14		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
		Persentase serapan kurikulum SLB	%	98,32	98,81	98,84		98,87		98,90		98,93		98,96		98,96		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
		Disparitas prestasi SLB	%	0,60	0,61	0,51		0,41		0,31		0,21		0,11		0,11		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		APK SLB	%	68,24	68,34	68,69		69,04		69,39		69,74		70,09		70,09		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
		Persentase serapan kurikulum SLB	%	97,03	97,52	97,55		97,58		97,61		97,64		97,67		97,67		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	79,96	80,16	80,19		80,25		80,32		80,36		80,49		80,49		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
		APK SLB	%	64,41	64,51	64,86		65,21		65,56		65,91		66,26		66,26		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
		Disparitas prestasi SLB	%	0,66	0,66	0,56		0,46		0,36		0,26		0,16		0,16		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	81,12	81,32	81,35		81,41		81,48		81,53		81,65		81,65		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
		Persentase serapan kurikulum SLB	%	98,24	98,73	98,76		98,79		98,82		98,85		98,88		98,88		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
		Disparitas prestasi SLB	%	0,52	0,52	0,42		0,32		0,22		0,12		0,02		0,02		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	69,05	69,23	69,27		69,33		69,40		69,44		69,57		69,57		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
		Persentase serapan kurikulum SLB	%	97,42	97,91	97,94		97,97		98,00		98,03		98,06		98,06		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
		APK SLB	%	39,81	39,90	40,26		40,60		40,95		41,30		41,65		41,65		CABANG DINAS PENDIDIKAN X

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Disparitas prestasi SLB	%	0,49	0,50	0,40		0,30		0,20		0,15		0,10		0,10		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
		APK SLB	%	63,09	63,20	63,55		63,89		64,24		64,59		64,94		64,94		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	96,60	96,85	96,88		96,94		97,01		97,05		97,18		97,18		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
		Persentase serapan kurikulum SLB	%	98,18	98,68	98,71		98,74		98,77		98,80		98,83		98,83		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
		APK SLB	%	65,03	65,13	65,48		65,83		66,18		66,53		66,88		66,88		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
		Persentase serapan kurikulum SLB	%	96,05	96,54	96,57		96,60		96,63		96,66		96,69		96,69		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
		Disparitas prestasi SLB	%	0,52	0,52	0,42		0,32		0,22		0,12		0,02		0,02		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	84,14	84,35	84,38		84,44		84,52		84,56		84,68		84,68		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
		Persentase serapan kurikulum SLB	%	97,37	97,86	97,89		97,92		97,95		97,98		98,01		98,01		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
		Persentase prasarana sarana SLB sesuai standar	%	74,51	74,70	74,73		74,79		74,86		74,90		75,03		75,03		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
		Disparitas prestasi SLB	%	0,55	0,56	0,46		0,36		0,26		0,16		0,06		0,06		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		APK SLB	%	81,38	81,48	81,83		82,18		82,53		82,88		83,23		83,23		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
1.0 1.1 6	Pembinaan SMK						841.667.241,00		877.500.000,00		880.667.241,00		886.667.241,00		890.667.241,00		4.377.168.964,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Disparitas prestasi SMK	%	1,05	1,05	1,04		1,04		1,03		1,03		1,02		1,02		Bidang Pembinaan SMK
		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	74,88	83,64	84,77		85,46		85,82		86,17		86,54		86,54		Bidang Pembinaan SMK
		APK SMK	%	47,81	48,09	48,36		48,63		48,91		49,18		49,46		49,46		Bidang Pembinaan SMK
		Persentase serapan kurikulum SMK	%	68,81	70,81	72,81		74,81		76,81		78,81		80,81		80,81		Bidang Pembinaan SMK
		Persentase SMK memanfaatkan sumber belajar berbasis IT	%	9,48	12,63	50,54		57,17		63,49		70,12		76,44		76,44		Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	73,16	73,81	74,46		75,11		75,76		76,41		77,06		77,06		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
		APK SMK	%	48,08	48,38	48,68		48,98		49,28		49,58		49,88		49,88		CABANG DINAS PENDIDIKAN I

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase serapan kurikulum SMK	%	70,11	72,11	74,11		76,11		78,11		80,11		82,11		82,11		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
		Disparitas prestasi SMK	%	2,85	2,80	2,75		2,70		2,65		2,60		2,55		2,55		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	73,96	74,61	75,26		75,91		76,56		77,21		77,86		77,86		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
		Disparitas prestasi SMK	%	0,87	0,86	0,85		0,84		0,83		0,82		0,81		0,81		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
		APK SMK	%	31,63	31,98	32,33		32,68		33,03		33,38		33,73		33,73		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
		Persentase serapan kurikulum SMK	%	66,66	68,66	70,66		72,66		74,66		76,66		78,66		78,66		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
		APK SMK	%	35,23	35,58	35,93		36,28		36,63		36,98		37,33		37,33		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
		Persentase serapan kurikulum SMK	%	68,42	70,42	72,42		74,42		76,42		78,42		80,42		80,42		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
		Disparitas prestasi SMK	%	2,11	2,06	2,01		1,96		1,91		1,86		1,81		1,81		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	72,72	73,37	74,02		74,67		75,32		75,97		76,62		76,62		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	65,48	66,13	66,78		67,43		68,08		68,73		69,38		69,38		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase serapan kurikulum SMK	%	63,69	65,69	67,69		69,69		71,69		73,69		75,69		75,69		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
		Disparitas prestasi SMK	%	0,37	0,36	0,35		0,34		0,33		0,32		0,31		0,31		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
		APK SMK	%	41,12	41,42	41,72		42,02		42,32		42,62		42,92		42,92		CABANG DINAS PENDIDIKAN IV
		Persentase serapan kurikulum SMK	%	69,69	71,69	73,69		75,69		77,69		79,69		81,69		81,69		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
		APK SMK	%	58,00	58,21	58,42		58,62		58,83		59,04		59,24		59,24		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
		Disparitas prestasi SMK	%	0,93	0,92	0,91		0,90		0,89		0,88		0,87		0,87		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	73,37	74,02	74,67		75,32		75,97		76,62		77,27		77,27		CABANG DINAS PENDIDIKAN V
		Disparitas prestasi SMK	%	0,78	0,77	0,76		0,75		0,74		0,73		0,72		0,72		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
		APK SMK	%	50,12	50,37	50,62		50,87		51,12		51,37		51,62		51,62		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	86,19	86,84	87,49		88,14		88,79		89,44		90,09		90,09		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
		Persentase serapan kurikulum SMK	%	69,02	71,02	73,02		75,02		77,02		79,02		81,02		81,02		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Disparitas prestasi SMK	%	2,08	2,03	1,98		1,93		1,88		1,83		1,78		1,78		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
		APK SMK	%	72,38	72,51	72,65		72,78		72,92		73,05		73,19		73,19		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	80,35	81,00	81,65		82,30		82,95		83,60		84,25		84,25		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
		Persentase serapan kurikulum SMK	%	70,22	72,22	74,22		76,22		78,22		80,22		82,22		82,22		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
		Persentase serapan kurikulum SMK	%	72,95	74,95	76,95		78,95		80,95		82,95		84,95		84,95		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
		Disparitas prestasi SMK	%	0,87	0,86	0,85		0,84		0,83		0,82		0,81		0,81		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	70,09	70,74	71,39		72,04		72,69		73,34		73,99		73,99		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
		APK SMK	%	54,02	54,27	54,52		54,77		55,02		55,27		55,52		55,52		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
		Disparitas prestasi SMK	%	1,02	1,01	1,00		0,99		0,98		0,97		0,96		0,96		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	80,78	81,43	82,08		82,73		83,38		84,03		84,68		84,68		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
		APK SMK	%	42,84	43,15	43,46		43,78		44,09		44,40		44,71		44,71		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase serapan kurikulum SMK	%	71,16	73,16	75,16		77,16		79,16		81,16		83,16		83,16		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
		APK SMK	%	55,47	55,72	55,97		56,22		56,47		56,72		56,97		56,97		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	75,08	75,73	76,38		77,03		77,68		78,33		78,98		78,98		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
		Disparitas prestasi SMK	%	0,90	0,89	0,88		0,87		0,86		0,85		0,84		0,84		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
		Persentase serapan kurikulum SMK	%	69,45	71,45	73,45		75,45		77,45		79,45		81,45		81,45		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
		APK SMK	%	54,53	54,72	54,90		55,09		55,27		55,46		55,64		55,64		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	71,14	71,79	72,44		73,09		73,74		74,39		75,04		75,04		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
		Disparitas prestasi SMK	%	0,29	0,28	0,27		0,26		0,25		0,24		0,23		0,23		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
		Persentase serapan kurikulum SMK	%	66,13	68,13	70,13		72,13		74,13		76,13		78,13		78,13		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
		Persentase serapan kurikulum SMK	%	68,10	70,10	72,10		74,10		76,10		78,10		80,10		80,10		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
		APK SMK	%	35,68	36,03	36,38		36,73		37,08		37,43		37,78		37,78		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Disparitas prestasi SMK	%	0,63	0,62	0,61		0,60		0,59		0,58		0,59		0,59		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	76,26	76,91	77,56		78,21		78,86		79,51		80,16		80,16		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
		Disparitas prestasi SMK	%	0,57	0,56	0,55		0,54		0,53		0,52		0,51		0,51		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
		Persentase serapan kurikulum SMK	%	68,95	70,95	72,95		74,95		76,10		78,10		80,10		80,10		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
		APK SMK	%	41,48	41,83	42,18		42,53		42,88		43,23		43,58		43,58		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
		Persentase prasarana sarana SMK sesuai standar	%	74,87	75,52	76,17		76,82		77,47		78,12		78,77		78,77		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
1.0 1.1 7	Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan						308.489.628,00		318.489.000,00		330.989.000,00		348.489.000,00		376.989.000,00		1.683.445.628,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase guru SMK memenuhi kualifikasi akademik	%	74,16	78,09	78,99		80,80		83,22		84,69		84,79		84,79		Bidang Ketenagaan Dikbud
		Persentase guru SLB memenuhi kualifikasi akademik	%	81,33	85,64	86,63		88,61		89,84		90,50		90,51		90,51		Bidang Ketenagaan Dikbud
		Rasio guru SMA dengan rombongan belajar SMA	%	0,06	0,06	0,07		0,07		0,07		0,08		0,08		0,08		Bidang Ketenagaan Dikbud

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Rasio guru SLB dengan rombongan belajar SLB	%	0,01	0,16	0,25		0,25		0,33		0,33		0,50		0,50			Bidang Ketenagaan Dikbud
		Rasio guru SMK dengan rombongan belajar SMK	%	0,07	0,07	0,07		0,07		0,08		0,08		0,08		0,08			Bidang Ketenagaan Dikbud
		Persentase guru SMA memenuhi kualifikasi akademik	%	90,96	95,78	96,88		99,10		99,20		99,30		99,35		99,35			Bidang Ketenagaan Dikbud
1.0 1.1 8	Pembinaan SMA						826.118.768,00		830.638.972,00		835.647.971,00		841.656.970,00		847.115.968,00		4.181.178.649,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase serapan kurikulum SMA	%	91,49	96,48	98,96		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Bidang Pembinaan SMA
		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	60,96	63,61	65,61		67,61		69,61		71,61		73,61		73,61			Bidang Pembinaan SMA
		APK SMA	%	26,11	26,70	27,03		27,36		27,69		28,02		28,36		28,36			Bidang Pembinaan SMA
		Disparitas prestasi SMA	%	1,20	0,98	0,98		0,97		0,96		0,95		0,93		0,93			Bidang Pembinaan SMA
		Persentase SMA memanfaatkan sumber belajar berbasis IT	%	17,32	20,79	49,65		56,00		61,78		68,13		73,90		73,90			Balai Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Dan Kebudayaan Kelas A
		APK SMA	%	37,66	37,96	38,26		38,56		38,86		39,16		39,46		39,46			CABANG DINAS PENDIDIKAN I

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	68,69	71,39	73,39		75,39		77,39		79,39		81,39		81,39		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
		Disparitas prestasi SMA	%	3,88	3,68	3,67		3,66		3,65		3,64		3,62		3,62		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
		Persentase serapan kurikulum SMA	%	86,50	90,20	97,30		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN I
		Disparitas prestasi SMA	%	0,41	0,36	0,35		0,34		0,33		0,32		0,30		0,30		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
		Persentase serapan kurikulum SMA	%	91,00	96,07	99,05		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	53,13	55,76	57,76		59,76		61,76		63,76		65,76		65,76		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
		APK SMA	%	16,95	17,30	17,65		18,00		18,35		18,70		19,05		19,05		CABANG DINAS PENDIDIKAN II
		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	54,83	57,48	59,48		61,48		63,48		65,48		67,48		67,48		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
		Persentase serapan kurikulum SMA	%	93,83	97,75	99,21		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
		APK SMA	%	23,44	23,79	24,14		24,49		24,84		25,19		25,54		25,54		CABANG DINAS PENDIDIKAN III
		Disparitas prestasi SMA	%	1,53	1,50	1,49		1,48		1,47		1,46		1,44		1,44		CABANG DINAS PENDIDIKAN III

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		APK SMA	%	21,01	21,36	21,71		22,06		22,41		22,76		23,11		23,11		CABANG DINAS PENDIDIK- AN IV
		Disparitas prestasi SMA	%	0,32	0,29	0,28		0,27		0,26		0,25		0,23		0,23		CABANG DINAS PENDIDIK- AN IV
		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	58,78	61,45	63,45		65,45		67,45		69,45		71,45		71,45		CABANG DINAS PENDIDIK- AN IV
		Persentase serapan kurikulum SMA	%	92,60	97,16	99,04		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CABANG DINAS PENDIDIK- AN IV
		Disparitas prestasi SMA	%	1,05	0,91	0,90		0,89		0,88		0,87		0,85		0,85		CABANG DINAS PENDIDIK- AN V
		APK SMA	%	33,46	33,78	34,10		34,41		34,73		35,05		35,36		35,36		CABANG DINAS PENDIDIK- AN V
		Persentase serapan kurikulum SMA	%	89,87	93,99	98,03		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CABANG DINAS PENDIDIK- AN V
		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	58,87	61,49	63,49		65,49		67,49		69,49		71,49		71,49		CABANG DINAS PENDIDIK- AN V
		Persentase serapan kurikulum SMA	%	92,88	96,96	99,21		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CABANG DINAS PENDIDIK- AN VI
		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	57,54	60,20	62,20		64,20		66,20		68,20		70,20		70,20		CABANG DINAS PENDIDI- KAN VI
		Disparitas prestasi SMA	%	0,26	0,17	0,16		0,15		0,14		0,13		0,11		0,11		CABANG DINAS PENDIDIK- AN VI

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		APK SMA	%	18,67	19,02	19,37		19,72		20,07		20,42		20,77		20,77		CABANG DINAS PENDIDIKAN VI
		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	64,13	66,74	68,74		70,74		72,74		74,74		76,74		76,74		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
		Persentase serapan kurikulum SMA	%	92,35	98,88	99,94		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
		Disparitas prestasi SMA	%	1,18	0,86	0,85		0,85		0,85		0,85		0,83		0,83		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
		APK SMA	%	49,99	50,29	50,59		50,89		51,19		51,49		51,79		51,79		CABANG DINAS PENDIDIKAN VII
		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	65,53	68,25	70,25		72,25		74,25		76,25		78,25		78,25		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
		APK SMA	%	28,87	29,20	29,52		29,85		30,17		30,50		30,82		30,82		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
		Persentase serapan kurikulum SMA	%	83,45	92,49	96,85		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
		Disparitas prestasi SMA	%	1,39	1,27	1,26		1,25		1,24		1,23		1,21		1,21		CABANG DINAS PENDIDIKAN VIII
		APK SMA	%	18,45	18,80	19,15		19,50		19,85		20,20		20,55		20,55		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
		Disparitas prestasi SMA	%	1,68	0,71	0,70		0,69		0,68		0,67		0,65		0,65		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	53,65	56,32	58,32		60,32		62,32		64,32		66,32		66,32		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
		Persentase serapan kurikulum SMA	%	94,75	98,75	99,59		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN IX
		APK SMA	%	22,73	23,08	23,43		23,78		24,13		24,48		24,83		24,83		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
		Disparitas prestasi SMA	%	1,59	1,57	1,56		1,55		1,54		1,53		1,51		1,51		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	55,36	58,03	60,03		62,03		64,03		66,03		68,03		68,03		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
		Persentase serapan kurikulum SMA	%	89,40	98,13	99,55		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN X
		Persentase serapan kurikulum SMA	%	94,38	98,27	99,27		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
		Disparitas prestasi SMA	%	1,25	0,82	0,81		0,81		0,81		0,80		0,79		0,79		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
		APK SMA	%	28,91	29,21	29,51		29,81		30,11		30,41		30,71		30,71		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	71,08	73,69	75,69		77,68		79,68		81,68		83,68		83,68		CABANG DINAS PENDIDIKAN XI
		Persentase serapan kurikulum SMA	%	94,38	97,92	99,88		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Disparitas prestasi SMA	%	0,75	0,33	0,32		0,31		0,30		0,29		0,27		0,27		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	61,61	64,17	66,17		68,16		70,16		72,16		74,16		74,16		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
		APK SMA	%	17,78	18,13	18,48		18,83		19,18		19,54		19,88		19,88		CABANG DINAS PENDIDIKAN XII
		Persentase prasarana sarana SMA sesuai standar	%	69,25	71,94	73,94		75,94		77,94		79,94		81,94		81,94		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
		APK SMA	%	24,87	25,19	25,51		25,82		26,14		26,46		26,77		26,77		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
		Persentase serapan kurikulum SMA	%	94,00	97,63	99,60		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
		Disparitas prestasi SMA	%	0,43	0,40	0,39		0,38		0,37		0,36		0,34		0,34		CABANG DINAS PENDIDIKAN XIII
1.0 1.1 9	Manajemen Pelayanan Pendidikan						14.018.24 9,00		15.525.00 0,00		16.550.00 0,00		16.575.00 0,00		16.600.00 0,00		79.268.24 9,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase kabupaten/kota yang terfasilitasi manajemen pelayanan pendidikan	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
1.02	KESEHATAN						1.917.332.315,00		2.368.839.996,00		2.649.977.314,00		2.352.159.440,00		2.211.769.642,00		11.498.009.172,00		
1.02.15	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit						8.445.430,00		9.662.313,00		10.346.750,00		11.047.375,00		12.530.518,00		52.237.851,00		Dinas Kesehatan
		Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan layanan layanan deteksi dini PTM	%	37,00	37,00	40,00		43,00		46,00		49,00		52,00		52,00			Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Persentase UCI desa	%	99,94	99,94	99,95		99,95		99,96		99,96		99,96		99,96			Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular	%	57,00	60,00	62,90		65,70		68,60		71,40		74,30		74,30			Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
		Persentase kabupaten/kota dengan respon cepat penanggulangan KLB/Bencana < 24 jam	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Semarang	%	37,00	37,00	40,00		43,00		46,00		49,00		52,00		52,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
		Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana <24 jam di wilayah Balkesmas Semarang	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
		Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Semarang	%	57,00	60,00	62,90		65,70		68,60		71,40		74,30		74,30		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
		Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Ambarawa	%	37,00	37,00	40,00		43,00		46,00		49,00		52,00		52,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana <24 jam di wilayah Balkesmas Ambarawa	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
		Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Ambarawa	%	57,00	60,00	62,90		65,70		68,60		71,40		74,30		74,30		74,30	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
		Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Magelang	%	37,00	37,00	40,00		43,00		46,00		49,00		52,00		52,00		52,00	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
		Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana <24 jam di wilayah Balkesmas Magelang	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular di wilayah Balkesmas Magelang	%	57,00	60,00	62,90		65,70		68,60		71,40		74,30		74,30		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
		Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Klaten	%	37,00	37,00	40,00		43,00		46,00		49,00		52,00		52,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
		Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana <24 jam di wilayah Balkesmas Klaten	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
		Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular	%	57,00	60,00	62,90		65,70		68,60		71,40		74,30		74,30		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase kabupaten/kota dengan Puskesmas yang melaksanakan deteksi dini PTM di wilayah Balkesmas Pati	%	37,00	37,00	40,00		43,00		46,00		49,00		52,00		52,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
		Persentase kabupaten/kota dengan penanggulangan KLB/bencana <24 jam di wilayah Balkesmas Pati	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
		Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan penemuan dan penurunan kasus penyakit menular	%	57,00	60,00	62,90		65,70		68,60		71,40		74,30		74,30		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
		Persentase penanganan gangguan penglihatan dan pendengaran	%	14,00	14,00	17,00		57,00		71,00		86,00		100,00		100,00		Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.0 2.1 6	Pelayanan Kesehatan						489.885.525,00		864.650.863,00		1.083.859.614,00		720.353.490,00		512.419.237,00		3.671.168.729,00	RSUD Kelet Donorejo; RSJD Surakarta; RSUD Dr. Moewardi; RSUD Tugurejo; Dinas Kesehatan; RSJD Dr. RM. Soedjarwadi; RSJD Dr. Amino Gondohutomo; RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan	%	100,00	60,00	16,00		16,00		17,00		17,00		18,00		85,00		RSUD Dr. Moewardi
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan	%	33,00	42,00	66,00		66,00		66,00		66,00		66,00		66,00		RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan	%	80,00	80,00	60,00		70,00		80,00		80,00		80,00		80,00		RSUD Tugurejo
		Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan	%	90,00	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		RSUD Tugurejo

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Prosentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan	%	99,68	80,00	80,00		85,00		90,00		95,00		95,00		100,00		RSUD Kelet Donorejo
		Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan	%	100,00	60,00	13,00		20,00		23,00		29,00		15,00		100,00		RSUD Kelet Donorejo
		Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan	%	100,00	100,00	12,01		21,76		21,76		23,76		22,71		100,00		RSJD Dr. Amino Gondohutomo
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan	%	100,00	100,00	9,99		21,30		21,88		23,32		23,51		100,00		RSJD Dr. Amino Gondohutomo
		Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan	%	97,00	25,00	75,00		80,00		85,00		90,00		95,00		95,00		RSJD Surakarta
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan	%	88,00	55,00	75,00		80,00		85,00		90,00		95,00		95,00		RSJD Surakarta
		Persentase pemenuhan pelayanan kesehatan	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
		Persentase pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan pelayanan kesehatan	%	-	-	40,00		55,00		70,00		85,00		100,00		100,00		RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan	%	20,00	20,00	22,00		36,00		66,00		75,00		82,00		82,00		Bidang Pelayanan Kesehatan
		Cakupan penduduk miskin yang mempunyai jaminan kesehatan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Pelayanan Kesehatan
		Persentase kabupaten/kota dengan 100% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi	%	-	24,13	96,55		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Pelayanan Kesehatan
		Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan primer sesuai ketentuan	%	-	11,00	17,00		23,00		29,00		31,00		34,00		34,00		Bidang Pelayanan Kesehatan
		Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Semarang	%	20,00	20,00	22,00		36,00		66,00		75,00		82,00		82,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Ambarawa	%	20,00	20,00	22,00		36,00		66,00		75,00		82,00		82,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
		Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Magelang	%	20,00	20,00	22,00		36,00		66,00		75,00		82,00		82,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
		Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Klaten	%	20,00	20,00	22,00		36,00		66,00		75,00		82,00		82,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
		Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan wilayah Balkesmas Pati	%	20,00	20,00	22,00		36,00		66,00		75,00		82,00		82,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan di BKIM	%	20,00	20,00	22,00		36,00		66,00		75,00		82,00		82,00		Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A
		Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita	%	51,43	51,43	57,14		62,86		68,57		74,26		80,00		80,00		Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A
		Persentase kabupaten/kota dengan 100% fasilitas kesehatan primer, rujukan dan faskes lain yang terakreditasi	%	2,80	2,80	14,29		28,57		57,14		85,71		100,00		100,00		Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A
		Proporsi kabupaten/kota dengan pelayanan kesehatan rujukan sesuai ketentuan di BalapkesPAK	%	20,00	20,00	22,00		36,00		66,00		75,00		82,00		82,00		Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.0 2.1 7	Sumber Daya Kesehatan						46.860.76 4,00		45.585.76 4,00		46.835.76 4,00		48.135.76 4,00		49.485.76 4,00		234.628.8 20,00	RSUD Tugurejo; Dinas Kesehatan; RSJD Dr. Amino Gondohutomo; RSJD Dr. RM. Soedjarwadi; RSJD Surakarta; RSUD Dr. Moewardi; RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo; RSUD Kelet Donorejo
		Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	7,55	29,89	31,00		32,00		33,00		34,00		35,00		35,00		RSUD Dr. Moewardi
		Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	83,00	60,00	-		10,00		20,00		30,00		40,00		40,00		RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
		Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	45,00	80,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		100,00		RSUD Tugurejo
		Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	100,00	85,19	17,00		18,00		19,00		20,00		21,00		100,00		RSUD Kelet Donorejo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	100,00	100,00	70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		70,00		70,00	RSJD Dr. Amino Gondohutomo
		Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	94,00	92,00	94,50		96,50		97,00		98,00		100,00		100,00		100,00	RSJD Surakarta
		Persentase SDM kesehatan dan non kesehatan yang terlatih	%	88,80	84,62	85,00		86,00		87,00		88,00		89,00		89,00		89,00	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi
		Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan untuk mendukung pengambilan keputusan	%	90,00	90,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku	%	28,00	42,00	42,00		57,00		71,00		83,00		100,00		100,00		100,00	Bidang Sumber Daya Kesehatan
		Persentase pemanfaatan sumber daya manusia kesehatan yang dikembangkan kompetensinya	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Bidang Sumber Daya Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Semarang	%	28,00	42,00	42,00		57,00		71,00		85,00		100,00		100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
		Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Ambarawa	%	28,00	42,00	42,00		57,00		71,00		85,00		100,00		100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
		Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Magelang	%	10,00	15,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		35,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Klaten	%	10,00	15,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		35,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
		Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di Balkesmas Wilayah Pati	%	28,00	42,00	42,00		57,00		71,00		85,00		100,00		100,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
		Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di BKIM	%	10,00	15,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		35,00		Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan kefarmasian sesuai ketentuan yang berlaku di BalapkesPAK	%	10,00	15,00	15,00		20,00		25,00		30,00		35,00		35,00		Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A
		Proporsi pelatihan kesehatan sesuai standar	%	82,60	85,00	87,50		90,00		93,00		95,00		100,00		100,00		Balai Pelatihan Kesehatan Kelas A
1.0 2.1 8	Kesehatan Masyarakat					19.063.710,00		38.663.710,00		38.763.710,00		38.963.710,00		39.263.710,00		174.718.550,00		Dinas Kesehatan
		Persentase kabupaten/kota dengan kesehatan lingkungan dan kesehatan kerja dan olahraga baik	%	14,28	28,00	42,00		57,00		71,00		85,00		100,00		100,00		Bidang Kesehatan Masyarakat
		Persentase Kabupaten/Kota yang telah mencapai desa siaga aktif mandiri 11%	%	-	31,43	34,30		37,14		40,00		42,86		45,70		45,70		Bidang Kesehatan Masyarakat
		Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita	%	51,43	51,43	57,14		62,86		68,57		74,26		80,00		80,00		Bidang Kesehatan Masyarakat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Semarang	%	51,43	51,43	57,14		62,86		68,57		74,26		80,00		80,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
		Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Semarang	%	-	14,00	14,00		29,00		43,00		57,00		71,00		71,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Semarang
		Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Ambarawa	%	51,43	51,43	57,14		62,86		68,57		74,26		80,00		80,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa
		Persentase kabupaten/kota mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Ambarawa	%	-	14,00	14,00		29,00		43,00		57,00		71,00		71,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Magelang	%	-	-	5,71		14,28		22,85		28,57		37,14		37,14		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
		Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Magelang	%	51,43	51,43	57,14		62,86		68,57		74,26		80,00		80,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Magelang
		Persentase kabupaten/kota dengan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Klaten	%	51,43	51,43	57,14		62,86		68,57		74,26		80,00		80,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten
		Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Klaten	%	-	-	5,71		14,28		22,85		28,57		37,14		37,14		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Klaten

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5% di Balkesmas Wil. Pati	%	-	14,00	14,00		29,00		43,00		57,00		71,00		71,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
		Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di Balkesmas Wil. Pati	%	51,43	51,43	57,14		62,86		68,57		74,26		80,00		80,00		Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Pati
		Persentase kabupaten/kota yang telah mencapai PHBS tatanan institusi pendidikan sehat 5%	%	-	-	5,71		14,28		22,85		28,57		37,14		37,14		Balai Kesehatan Indera Masyarakat Kelas A
		Persentase kabupaten/kota dengan peningkatan cakupan kesehatan ibu, bayi dan balita di BalapkesPAK	%	51,43	51,43	57,14		62,86		68,57		74,26		80,00		80,00		Balai Laboratorium Kesehatan dan Pengujian Alat Kesehatan Kelas A

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.0 2.1 9	Farmasi dan Perbekalan Kesehatan						59.401.86 0,00		63.342.04 6,00		66.876.25 1,00		71.063.87 6,00		74.970.26 3,00		335.654.2 96,00	RSJD Dr. Amino Gondohuto mo; RSUD Tugurejo; RSUD Dr. Moewardi; RSUD Kelet Donorejo; RSJD Surakarta; RSJD Dr. RM. Soedjarwad i; RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
		Persentase kegiatan pemenuhan logistik	%	4,21	4,21	8,42		8,42		8,42		8,42		8,42		8,42		RSUD Dr. Moewardi
		Persentase kegiatan pemenuhan logistik	%	100,00	100,00	17,00		20,00		23,00		24,00		27,00		27,00		RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
		Persentase kegiatan pemenuhan logistik	%	58,00	58,00	30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00		RSUD Tugurejo
		Persentase kegiatan pemenuhan logistik	%	4,21	4,21	16,84		16,84		16,84		16,84		16,84		100,00		RSUD Kelet Donorejo
		Persentase kegiatan pemenuhan logistik	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		RSJD Dr. Amino Gondohuto mo
		Persentase kegiatan pemenuhan logistik	%	98,00	91,00	93,00		95,00		97,00		98,00		100,00		100,00		RSJD Surakarta
		Persentase kegiatan pemenuhan logistik	%	-	-	60,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		RSJD Dr. RM. Soedjarwad i

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.0 2.2 0	Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat						2.075.026,00		3.085.300,00		3.695.225,00		3.745.225,00		4.000.150,00		16.600.926,00	RSUD Dr. Moewardi; RSJD Surakarta; RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo; RSJD Dr. Amino Gondohutomo; RSUD Tugurejo; RSJD Dr. RM. Soedjarwadi; RSUD Kelet Donorejo
		Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	%	100,00	40,00	40,00		50,00		60,00		60,00		70,00		70,00		RSUD Dr. Moewardi
		Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	%	100,00	100,00	10,00		15,00		15,00		20,00		40,00		100,00		RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
		Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	100,00	100,00	20,00		20,00		20,00		20,00		20,00		100,00		RSUD Tugurejo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	100,00	40,00	40,00		20,00		15,00		15,00		10,00		100,00		RSUD Kelet Donorejo
		Persentase kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kusta	%	30,00	30,00	30,00		50,00		70,00		80,00		90,00		100,00		RSUD Kelet Donorejo
		Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	100,00	100,00	30,00		25,00		20,00		15,00		10,00		100,00		RSJD Dr. Amino Gondohutomo
		Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat	%	94,00	70,00	75,00		80,00		85,00		90,00		95,00		95,00		RSJD Surakarta
		Persentase capaian peserta kegiatan promosi dan pemberdayaan masyarakat tingkat provinsi	%	-	-	17,70		21,24		23,00		19,47		18,59		100,00		RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.0 2.2 1	Pelayanan dan Pendukung Pelayanan (BLUD)						1.291.600.000,00										1.291.600.000,00	RSUD Kelet Donorejo; RSUD Tugurejo; RSJD Dr. RM. Soedjarwadi; RSJD Dr. Amino Gondohutomo; RSJD Surakarta; RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo; RSUD Dr. Moewardi
		Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	96,92	70,03	70,50		-		-		-		-		-		RSUD Dr. Moewardi
		Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	66,29	75,01	65,00		-		-		-		-		-		RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
		Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	48,94	50,74	59,63		-		-		-		-		-		RSUD Tugurejo
		Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	87,00	72,00	80,00		-		-		-		-		-		RSUD Kelet Donorejo
		Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	38,86	27,80	30,00		-		-		-		-		-		RSJD Dr. Amino Gondohutomo
		Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	36,00	35,00	25,00		-		-		-		-		-		RSJD Surakarta
		Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	56,39	49,10	42,00		-		-		-		-		-		RSJD Dr. RM. Soedjarwadi

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.0 2.2 2	Peningkatan Mutu Pelayanan BLUD								1.343.850 .000,00		1.399.600 .000,00		1.458.850 .000,00		1.519.100 .000,00		5.721.400. 000,00	RSUD Tugurejo; RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo; RSUD Dr. Moewardi; RSJD Surakarta; RSUD Kelet Donorejo; RSJD Dr. RM. Soedjarwad i; RSJD Dr. Amino Gondohuto mo
		Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	76,53	70,03	-		71,00		71,50		72,00		72,05		72,05		RSUD Dr. Moewardi
		Cost Recovery Rate (CRR) Total		66,29	75,01	-		67,00		69,00		71,00		75,00		75,00		RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo
		Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	48,94	50,74	-		55,55		56,43		52,94		53,69		53,69		RSUD Tugurejo
		Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	87,00	72,00	-		82,00		85,00		88,00		90,00		100,00		RSUD Kelet Donorejo
		Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	38,86	34,10	-		32,00		35,00		37,00		39,00		39,00		RSJD Dr. Amino Gondohuto mo
		Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	36,00	35,00	-		30,00		32,00		33,00		35,00		35,00		RSJD Surakarta
		Cost Recovery Rate (CRR) Total	%	56,39	49,10	-		43,00		44,00		45,00		46,00		46,00		RSJD Dr. RM. Soedjarwad i

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.03	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						1.004.555.415,00		1.176.633.528,00		1.353.328.023,00		1.509.710.042,00		1.230.196.509,00		6.274.423.517,00	
1.03.15	Peningkatan dan Pembangunan Jalan, dan Penggantian Jembatan						410.740.640,00		520.740.640,00		585.740.640,00		466.515.591,00		475.515.591,00		2.459.253.102,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
		Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Timur	%	-	-	35,65		36,48		38,00		38,76		40,13		40,13		Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Timur
		Persentase panjang jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik Bidang Pelaksana Jalan Pembangunan Wilayah Barat	%	-	-	40,18		41,84		44,24		45,44		47,68		47,68		Bidang Pelaksana Jalan Wilayah Barat
1.03.16	Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan Provinsi						255.879.442,00		270.567.145,00		284.631.494,00		299.898.610,00		300.102.712,00		1.411.079.403,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Tegal	%	-	-	87,12		87,23		87,72		88,08		88,43		88,43		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Tegal	%	-	-	83,37		84,05		84,96		85,41		86,09		86,09		Balai Pengelolaa n Jalan Wilayah Tegal
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	-	-	94,89		95,04		95,70		96,18		96,65		96,65		Balai Pengelolaa n Jalan Wilayah Pekalongan
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pekalongan	%	-	-	84,74		85,67		86,90		87,52		88,44		88,44		Balai Pengelolaa n Jalan Wilayah Pekalongan
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Cilacap	%	-	-	90,70		90,79		91,18		91,47		91,75		91,75		Balai Pengelolaa n Jalan Wilayah Cilacap
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Cilacap	%	-	-	80,86		81,55		82,46		82,91		83,60		83,60		Balai Pengelolaa n Jalan Wilayah Cilacap
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Semarang	%	-	-	96,33		96,46		97,05		97,47		97,89		97,89		Balai Pengelolaa n Jalan Wilayah Semarang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Semarang	%	-	-	82,78		83,45		84,34		84,79		85,46		85,46		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Semarang
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Magelang	%	-	-	90,74		91,45		92,41		92,88		93,60		93,60		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Magelang	%	-	-	90,65		90,80		91,46		91,93		92,40		92,40		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Magelang
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	-	-	96,12		96,27		96,93		97,40		97,87		97,87		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Wonosobo	%	-	-	91,73		92,51		93,55		94,07		94,85		94,85		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Wonosobo
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Pati	%	-	-	86,45		86,61		87,32		87,83		88,33		88,33		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Pati	%	-	-	90,13		91,04		92,25		92,86		93,77		93,77		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Pati
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	-	-	81,71		81,94		82,96		83,69		84,41		84,41		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Purwodadi	%	-	-	86,34		87,54		89,14		89,93		91,13		91,13		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Purwodadi
		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan baik BPJ Wilayah Surakarta	%	-	-	91,75		92,01		93,13		93,93		94,73		94,73		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.
		Persentase panjang jembatan provinsi kondisi baik BPJ Wilayah Surakarta	%	-	-	89,91		91,45		93,49		94,52		96,05		96,05		Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Surakarta.
1.0 3.1 7	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan						19.573.688,00		21.531.057,00		22.379.490,00		12.288.932,00		10.851.366,00		86.624.533,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
		Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan kebinamargaan	%	88,28	89,84	93,05		94,62		95,33		97,68		100,00		100,00		Balai Pengujian dan Peralatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Persentase pengendalian mutu pelaksanaan jasa konstruksi	%	-	62,50	69,99		77,50		85,00		92,50		100,00		100,00			Balai Penguujian dan Peralatan
1.0 3.1 8	Perencanaan, dan Pengawasan Teknis Jalan, Jembatan dan Keciptakaryaan						54.910.72 5,00		57.239.84 9,00		33.993.64 2,00		35.842.01 5,00		35.717.66 8,00		217.703.8 99,00		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
		Persentase panjang jalan yang dileger	%	89,80	89,84	96,30		97,05		98,43		99,02		100,00		100,00			Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
		Persentase database jalan, jembatan, dan keciptakaryaan yang termutakhirkan	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Bidang Rancang Bangun dan Pengawasan
1.0 3.1 9	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Minum Dan Sanitasi						23.310.00 0,00		50.403.26 2,00		56.350.00 0,00		109.019.5 33,00		100.692.0 22,00		339.774.8 17,00		Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
		Persentase akses air minum perkotaan	%	80,98	84,15	86,15		88,15		90,15		92,15		94,15		94,15			Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
		Persentase akses sanitasi air limbah domestik	%	80,00	81,50	83,50		85,50		87,50		89,50		91,50		91,50			Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase akses air minum perdesaan	%	72,80	74,55	76,30		78,05		79,80		81,55		83,30		83,30		Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
1.0 3.2 0	Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung Serta Pengembangan Jasa Konstruksi						12.196.07 1,00		13.396.07 1,00		113.500.0 00,00		314.500.0 00,00		15.800.00 0,00		469.392.1 42,00	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya
		Persentase jumlah kompleks Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD) dalam kondisi menuju berfungsi baik sesuai standar	%	9,14	10,15	11,17		12,18		13,20		14,21		15,23		15,23		Bidang Sarana Prasarana Pemukiman dan Bangunan Gedung
		Persentase jumlah tenaga bidang jasa konstruksi yang tersertifikasi	%	5,43	7,70	9,71		11,86		14,13		16,54		19,09		19,09		Balai Jasa Konstruksi
1.0 3.2 1	Pengelolaan Jaringan Irigasi Dan Air Baku						123.230.1 22,00		129.553.1 34,00		135.655.7 91,00		144.588.5 80,00		151.868.0 09,00		684.895.6 36,00	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
		Persentase kondisi baik sarana dan prasarana jaringan irigasi	%	80,00	82,00	82,50		83,00		83,50		84,00		84,50		84,50		Bidang Irigasi dan Air Baku

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase pemenuhan kebutuhan air baku	%	58,50	60,89	61,80		62,80		63,80		64,80		65,80		65,80		Bidang Irigasi dan Air Baku
		Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Pemali Comal
		Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Pemali Comal
		Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Bodri Kuto
		Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Bodri Kuto
		Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Serang Lusi Juana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Balai PSDA Serang Lusi Juana
		Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Balai PSDA Bengawan Solo
		Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Balai PSDA Bengawan Solo
		Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
		Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
		Persentase daerah irigasi yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Balai PSDA Serayu Citanduy.

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Persentase prasarana sarana air baku yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Balai PSDA Serayu Citanduy.
1.0 3.2 2	Pengelolaan Sungai, Pantai, Dan Pengendalian Banjir					83.898.458,00		91.060.501,00		96.692.409,00		101.832.368,00		113.370.285,00		486.854.021,00		Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	
		Persentase luasan daerah bebas genangan banjir	%	12,66	15,64	17,28		18,92		20,56		22,19		23,83		23,83		Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai	
		Persentase sungai dalam kondisi baik	%	52,06	52,16	52,20		52,24		52,28		52,32		52,36		52,36		Bidang Sungai, Bendungan dan Pantai	
		Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Pemali Comal	
		Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Pemali Comal	
		Persentase sungai yang dipelihara di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Bodri Kuto	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Bodri Kuto
		Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Serang Lusi Juana
		Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Bengawan Solo
		Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
		Persentase darurat banjir yang tertangani di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy.	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Serayu Citanduy.
1.0 3.2 3	Program Pengembangan Dan Pembinaan Teknis SDA						17.001.269,00		18.001.868,00		19.814.055,00		20.395.460,00		21.185.007,00		96.397.659,00	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase perencanaan teknis yang ditindaklanjuti	%	18,75	20,50	21,38		41,51		61,64		81,13		100,00		100,00		Bidang Pengembangan dan Pembinaan Teknis
1.0 3.2 4	Penyelenggaraan Penataan Ruang						3.815.000,00		4.140.001,00		4.570.502,00		4.828.953,00		5.093.849,00		22.448.305,00	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang
		Persentase implementasi indikasi program pemanfaatan ruang	%	68,73	70,00	72,00		74,00		76,00		78,00		80,00		80,00		Bidang Penataan Ruang
		Persentase rencana tata ruang kabupaten/kota yang mendapatkan rekom Gub	%	2,85	14,28	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		Bidang Penataan Ruang
		Persentase pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang	%	68,73	70,00	71,50		73,00		74,50		76,00		77,50		77,50		Bidang Penataan Ruang
		Persentase rencana tata ruang provinsi yang tersusun	%	1,64	3,28	6,67		13,34		20,01		26,68		33,35		33,35		Bidang Penataan Ruang
		Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Pemali Comal	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Pemali Comal

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bodri Kuto	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Bodri Kuto
		Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serang Lusi Juana	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Serang Lusi Juana
		Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Bengawan Solo	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Bengawan Solo
		Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Progo Bogowonto Luk Ulo
		Persentase pemantauan pemanfaatan ruang di wilayah Balai PSDA Serayu Citanduy.	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai PSDA Serayu Citanduy.
1.0 4	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKI- MAN						13.570.0 00,00		23.666.5 00,00		42.669.6 50,00		53.024.6 15,00		54.662.0 77,00		187.592.8 42,00	
1.0 4.1 5	Pembangunan Perumahan						6.510.000 ,00		15.750.00 0,00		33.750.00 0,00		43.000.00 0,00		43.500.00 0,00		142.510.0 00,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase rumah layak huni yang disediakan	%	-	-	-		4,57		7,70		10,39		12,50		12,50		Bidang Perumahan
		Persentase Rumah tidak Layak Huni yang tertangani	%	0,30	2,35	4,94		10,35		19,31		28,28		37,24		37,24		Bidang Perumahan
1.0 4.1 6	Penanganan Kawasan Permukiman						5.165.000,00		5.681.500,00		6.249.650,00		6.874.615,00		7.562.077,00		31.532.842,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Persentase luasan kawasan permukiman kumuh yang tertangani	%	16,62	17,14	2,11		4,21		13,79		23,37		32,95		32,95		Bidang Kawasan Pemukiman
1.0 4.1 7	Keterpaduan Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan						1.895.000,00		2.235.000,00		2.670.000,00		3.150.000,00		3.600.000,00		13.550.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
		Persentase ketersediaan kebijakan, data dan evaluasi kinerja perumahan rakyat dan kawasan permukiman	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Pemukiman
1.0 5	KETENTRAMAN, KETER-TIBAN UMUM DAN PER-LINDUNGAN MASYARA-KAT						79.310.263,00		63.675.000,00		70.525.000,00		79.000.000,00		102.550.000,00		395.060.263,00	
1.0 5.1 5	Program Penguatan Ideologi dan Kewaspadaan						31.220.263,00		9.500.000,00		10.250.000,00		11.000.000,00		9.950.000,00		71.920.263,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini	%	75,00	75,00	80,00		81,00		83,00		86,00		90,00		90,00		Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
		Persentase penanganan kejadian terkait konflik sosial	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
		Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi Pancasila dan wasbang	%	75,00	75,00	80,00		81,00		83,00		86,00		90,00		90,00		Bidang Ideologi dan Kewaspadaan Nasional
1.0 5.1 6	Program Penguatan Ketahanan Bangsa						5.860.000,00		6.360.000,00		7.110.000,00		8.110.000,00		8.210.000,00		35.650.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	%	75,00	75,00	80,00		81,00		83,00		86,00		90,00		90,00		Bidang Ketahanan Bangsa
1.0 5.1 7	Program Penguatan Politik Dalam Negeri						9.935.000,00		10.435.000,00		11.185.000,00		13.685.000,00		14.085.000,00		59.325.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase masyarakat yang paham terhadap aspek-aspek IDI	%	75,00	75,00	80,00		81,00		83,00		86,00		90,00		90,00		Bidang Politik Dalam Negeri

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembangu an	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.0 5.1 8	Peningkatan Kepatuhan Aparatur, Badan Usaha/Huku m Dan Masyarakat Pada Produk Hukum Daerah						2.150.000 ,00		3.000.000 ,00		4.200.000 ,00		5.050.000 ,00		5.900.000 ,00		20.300.00 0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase penegakkan pelanggaran produk hukum daerah	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah
1.0 5.1 9	Pemeliharaan Kamtramtibm as Dan Pencegahan Tindak Kriminal						2.390.000 ,00		3.800.000 ,00		4.250.000 ,00		4.675.000 ,00		5.100.000 ,00		20.215.00 0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase kabupaten/ kota rawan tramtib yang konduusif	%	-	-	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		Bidang Ketertiban Umum dan Ketentra- man Masyarakat
1.0 5.2 0	Peningkatan Pemberdayaa n Masyarakat						1.075.000 ,00		1.650.000 ,00		1.850.000 ,00		2.050.000 ,00		2.225.000 ,00		8.850.000 00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase anggota Satpol PP Kabupaten/ Kota yang meningkat kapasitasnya	%	-	-	12,52		12,52		12,52		12,52		12,52		62,61		Bidang Pembinaan Masyarakat
		Persentase masyarakat yang me- ningkat kepatuhan dan ke- taatannya ter- hadap tibus- tranmas	%	-	-	10,70		11,03		11,26		11,82		12,16		56,98		Bidang Pembinaan Masyarakat

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1.0 5.2 1	Peningkatan Kemampuan Linmas Dan Rakyat Terlatih						8.750.000 ,00		9.000.000 ,00		9.250.000 ,00		9.500.000 ,00		29.400.00 0,00		65.900.00 0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Persentase anggota linmas Kabupaten/K ota yang meningkat kapasitasnya	%	-	-	2,29		0,29		0,33		0,35		2,69		5,94		Bidang Pembinaan Satuan Perlindung an Masyarakat
1.0 5.2 2	Penyelenggara an Penanggulang an Bencana						17.930.00 0,00		19.930.00 0,00		22.430.00 0,00		24.930.00 0,00		27.680.00 0,00		112.900.0 00,00	Sekretariat Badan Penanggula ngan Bencana Daerah
		Persentase penurunan risiko bencana	%	-	-	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		8,00		Bidang Pencega han dan Kesiapsiaga an
		Persentase penanganan darurat kebencanaan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Penangan an Darurat
		Persentase rehab rekon pasca bencana	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Rehabilitasi dan Rekon struksi
		Persentase pemuhan logistik bencana	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Logistik dan Peralatan
1.0 6	SOSIAL						74.848.6 97,00		97.131.2 90,00		101.520. 025,00		111.782. 961,00		120.062. 898,00		505.345.8 71,00	
1.0 6.1 5	Rehabilitasi Sosial						61.748.69 7,00		77.686.29 0,00		81.273.02 5,00		90.242.16 1,00		97.723.31 8,00		408.673.4 91,00	Dinas Sosial
		Persentase penanganan PMKS ter lantar yang membutuh kan pelaya nan dasar di dalam panti	%	-	-	0,82		1,64		2,46		3,28		4,10		4,10		Bidang Rehabilitasi Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,03		0,06		0,09		0,12		0,15		0,15		Panti Pelayanan Sosial PGOT Mardi Utomo
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,03		0,06		0,09		0,13		0,16		0,16		Panti Pelayanan Sosial Anak Mandiri
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,04		0,07		0,11		0,14		0,18		0,18		Panti Pelayanan Sosial Anak Wira Adhi Karya
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,04		0,09		0,13		0,17		0,22		0,22		Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik Ngudi Rahayu
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,03		0,05		0,08		0,10		0,13		0,13		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Cepiring
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,03		0,05		0,08		0,11		0,13		0,13		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Turusgede
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,03		0,06		0,10		0,13		0,16		0,16		Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik Pangrukti Mulyo
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,02		0,04		0,06		0,08		0,11		0,11		Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Pendowo
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,03		0,06		0,09		0,12		0,15		0,15		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Potroyudan

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,04		0,08		0,12		0,17		0,21		0,21		Panti Pelayanan Sosial Wanita Wanodyata ma
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,05		0,09		0,14		0,18		0,23		0,23		Panti Pelayanan Sosial Anak Taruna Yodha
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,03		0,07		0,10		0,14		0,17		0,17		Panti Pelayanan Sosial Anak Dharma Putera
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,03		0,06		0,08		0,11		0,14		0,14		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Adi Yuswo
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,04		0,08		0,13		0,17		0,21		0,21		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Dewanata
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,02		0,04		0,06		0,07		0,09		0,09		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Sudagaran
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,06		0,11		0,17		0,22		0,28		0,28		Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Grahita Raharjo
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,01		0,03		0,04		0,06		0,07		0,07		Panti Pelayanan Sosial Anak Tawangma ngu
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,04		0,07		0,11		0,14		0,18		0,18		Panti Pelayanan Sosial Eks Psikotik Samekto Karti

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,03		0,06		0,08		0,11		0,14		0,14		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bisma Upakara
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,04		0,09		0,13		0,18		0,22		0,22		Panti Pelayanan Sosial Lanjut Usia Bojongbata
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,03		0,06		0,09		0,13		0,16		0,16		Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Netra Penganthi
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,05		0,09		0,14		0,18		0,23		0,23		Panti Pelayanan Sosial Margo Widodo
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,01		0,03		0,04		0,06		0,07		0,07		Panti Pelayanan Sosial Anak Kasih Mera Demak
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,01		0,03		0,04		0,06		0,07		0,07		Panti Pelayanan Sosial Anak Pamardi Utomo Boyolali
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,02		0,03		0,05		0,07		0,08		0,08		Panti Pelayanan Sosial Anak Sukomulyo Tegal
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Pant	%	-	-	0,02		0,05		0,07		0,10		0,12		0,12		Panti Pelayanan Sosial Anak Woro Wiloso Salatiga

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase keberfungsian sosial PMKS Dalam Panti	%	-	-	0,02		0,04		0,07		0,09		0,11		0,11		Panti Pelayanan Sosial Anak Kumuda Putera Puteri Magelang
1.0 6.1 6	Penanganan Fakir Miskin						2.400.000,00		7.675.000,00		7.300.000,00		7.300.000,00		6.825.000,00		31.500.000,00	Dinas Sosial
		Persentase fakir miskin yang telah tervalidasi	%	-	-	0,06		0,11		0,17		0,23		0,29		0,29		Bidang Penanganan Fakir Miskin
1.0 6.1 7	Perlindungan Dan Jaminan Sosial						3.800.000,00		4.180.000,00		4.598.000,00		5.057.800,00		5.413.580,00		23.049.380,00	Dinas Sosial
		Persentase penanganan sosial terhadap korban bencana dan PMKS Non Produktif	%	-	-	0,36		0,73		1,09		1,46		1,82		1,82		Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
1.0 6.1 8	Pemberdayaan Sosial						6.900.000,00		7.590.000,00		8.349.000,00		9.183.000,00		10.101.000,00		42.123.000,00	Dinas Sosial
		Persentase PSKS dapat melaksanakan UKS	%	-	-	6,88		13,75		20,63		27,51		34,38		34,38		Bidang Pemberdayaan Sosial
2	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR						881.059.029,00		893.120.675,00		1.040.222.146,00		871.457.259,00		823.381.631,00		4.018.510.990,00	
2.0 1	TENAGA KERJA						25.299.734,00		30.424.207,00		33.364.207,00		36.643.207,00		39.515.207,00		165.246.562,00	
2.0 1.1 5	Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja						10.289.099,00		13.189.099,00		14.189.099,00		15.439.099,00		16.689.099,00		69.795.495,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase kenaikan pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi	%	6,19	6,49	6,80		7,09		7,39		7,89		8,19		8,19		Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
		Persentase kenaikan lembaga pelatihan yang terakreditasi	%	25,50	28,57	31,00		33,00		35,00		37,50		38,50		38,50		Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
		Persentase kenaikan perusahaan yang menerapkan peningkatan produktivitas	%	1,50	2,90	3,10		3,90		4,00		4,10		4,20		4,20		Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
		Persentase kenaikan tenaga kerja tersertifikasi	%	0,55	0,75	1,00		1,25		1,50		2,00		2,25		2,25		Bidang Pelatihan Kerja dan Produktivitas LATTAS
		Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang industri	%	-	-	1,12		1,33		1,12		1,33		1,12		1,12		Balai Latihan Kerja Cilacap Kelas A
		Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang pertanian	%	-	50,00	50,00		8,33		7,69		7,69		6,67		6,67		Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase kenaikan tenaga kerja yang dilatih peningkatan produktivitas atau kewirausahaan	%	18,00	44,07	47,06		28,00		21,88		17,95		13,04		13,04		Balai Latihan Kerja Semarang 2 Kelas A
		Persentase kenaikan pencari kerja yang memiliki sertifikat pelatihan berbasis kompetensi di bidang jasa, bahasa asing, budaya dasar dan pekerjaan migran	%	9,00	25,00	20,00		33,00		25,00		20,00		16,00		16,00		Balai Latihan Kerja Semarang 1 Kelas A
2.0 1.1 6	Peningkatan Kesempatan Kerja						6.731.108,00		7.001.108,00		8.051.108,00		9.151.108,00		9.801.108,00		40.735.540,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase pencari kerja yang ditempatkan	%	67,84	68,50	69,04		69,54		70,09		70,47		71,01		71,01		Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
		Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal	%	50,00	53,00	56,00		59,00		62,00		65,00		68,00		68,00		Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
2.0 1.1 7	Perlindungan Dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan						3.543.767,00		3.898.000,00		4.288.000,00		4.717.000,00		5.189.000,00		21.635.767,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase pekerja buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	%	86,48	86,96	87,11		87,26		87,41		87,56		87,70		87,70		Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
		Persentase perusahaan yang menyusun dan melaksanakan struktur dan skala upah	%	-	6,30	15,00		22,00		29,00		36,00		43,00		36,00		Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
		Persentase peningkatan jumlah LKS Bipartit yang terbentuk	%	43,33	42,78	43,77		44,66		45,65		46,62		47,61		47,61		Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
		Persentase perusahaan yang memenuhi ketentuan Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama	%	21,90	22,31	22,68		23,05		23,42		23,79		24,15		24,15		Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial HI JAMSOS
		Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	91,38	92,11	90,00		92,50		93,00		95,50		96,00		96,00		Balai Pelayanan Penyelesaian Perselisihan Tenaga Kerja Kelas A

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.0 1.1 8	Peningkatan Kepatuhan Dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan						4.735.760,00		6.336.000,00		6.836.000,00		7.336.000,00		7.836.000,00		33.079.760,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	98,25	97,56	94,86		92,09		89,26		86,21		82,97		82,97		Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan WASNAKER
		Persentase peningkatan perusahaan memiliki kategori baik dalam penerapan K3	%	24,44	24,69	24,94		25,29		25,54		25,89		26,14		26,14		Balai Keselamatan Kerja Kelas A
		Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	98,25	97,56	94,86		92,09		89,26		86,21		82,97		82,97		SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH SEMARANG
		Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	98,25	97,56	94,86		92,09		89,26		86,21		82,97		82,97		SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH PATI
		Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	98,25	97,56	94,86		92,09		89,26		86,21		82,97		82,97		SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH SURAKARTA

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	98,25	97,56	94,86		92,09		89,26		86,21		82,97		82,97		SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH MAGE-LANG
		Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	98,25	97,56	94,86		92,09		89,26		86,21		82,97		82,97		SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH BANYU-MAS
		Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	98,25	97,56	94,86		92,09		89,26		86,21		82,97		82,97		SATUAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH PEKA-LONGAN
2.02	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						12.158.100,00		13.134.000,00		14.188.000,00		15.272.000,00		16.390.000,00		71.142.100,00	
2.02.15	Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Dan Anak						9.394.570,00		10.094.000,00		10.844.000,00		11.594.000,00		12.344.000,00		54.270.570,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Persentase peningkatan perempuan yang mendapatkan pendampingan menjadi pelaku usaha ekonomi	%	-	-	25,00		30,00		30,00		30,00		30,00		30,00			Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
		Persentase kabupaten/kota menuju layak anak tingkat pratama, tingkat madya, dan tingkat nindya	%	57,14	80,00	80,00		82,86		85,71		88,57		91,43		91,43			Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak
		Persentase data dan informasi PPPA yang tersedia	%	50,00	-	83,33		83,33		100,00		100,00		100,00		100,00			Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat
2.0 2.1 6	Perlindungan Perempuan Dan Anak						2.763.530,00		3.040.000,00		3.344.000,00		3.678.000,00		4.046.000,00		16.871.530,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana
		Rasio korban kekerasan terhadap perempuan	Per 100.000	5,37	5,93	5,87		5,81		5,76		5,70		5,64		5,64			Bidang Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
		Rasio korban kekerasan terhadap anak	Per 100.000	13,92	12,76	12,76		12,66		12,56		12,46		12,36		12,36			Bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
2.03	PANGAN						19.070.000,00		28.070.000,00		28.820.000,00		29.820.000,00		30.820.000,00		136.600.000,00		
2.03.15	Peningkatan Ketahanan Pangan						19.070.000,00		28.070.000,00		28.820.000,00		29.820.000,00		30.820.000,00		136.600.000,00		Dinas Ketahanan Pangan
		Ketersediaan protein pangan beragam dan berkualitas	Gram/kapita/hari	114,46	114,46	107,00		107,20		107,40		107,60		107,80		107,80			Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
		Ketersediaan energi pangan beragam dan berkualitas	kkal/kapita/hari	4.027,00	4.027,00	4.000,00		4.005,00		4.010,00		4.015,00		4.020,00		4.020,00			Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
		Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	87,50	100,00	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00			Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
		CV harga pangan strategis beras	%	2,60	4,38	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00			Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
		CV harga pangan strategis bawang merah	%	17,39	20,18	29,00		28,00		27,00		26,00		25,00		25,00			Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
		CV harga pangan strategis cabai	%	40,70	22,60	44,00		43,00		42,00		41,00		40,00		40,00			Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
		Persentase cadangan pangan yang dikelola	%	127,69	137,29	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan
		Rasio cadangan pangan masyarakat kebutuhan pangan	Angka	-	0,34	0,44		0,56		0,77		0,89		1,00		1,00			Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Rasio konsumsi pangan lokal	Angka	0,12	0,21	0,11		0,12		0,13		0,14		0,15		0,15		Bidang Konsumsi dan Penganekear agaman Pangan
		Konsumsi pangan beras	kg/kapita /tahun	99,40	94,92	99,10		98,80		98,50		98,20		97,80		97,80		Bidang Konsumsi dan Penganekear agaman Pangan
		Konsumsi kelompok pangan buah dan sayur	kg/kapita /tahun	82,40	83,34	83,00		84,00		85,00		86,00		87,00		87,00		Bidang Konsumsi dan Penganekear agaman Pangan
		Konsumsi kelompok pangan hewani	kg/kapita /tahun	29,40	30,17	30,00		31,00		32,00		33,00		34,00		34,00		Bidang Konsumsi dan Penganekear agaman Pangan
		Persentase pengawasan keamanan pangan segar	%	91,43	96,93	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		Bidang Keamanan Pangan
		Persentase jaminan mutu pangan yang diterbitkan	%	-	-	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		Balai Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan
2.04	PERTANAHAN						1.865.000,00		2.550.000,00		2.800.000,00		2.900.000,00		5.350.000,00		15.465.000,00	
2.04.15	Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah						1.865.000,00		2.550.000,00		2.800.000,00		2.900.000,00		5.350.000,00		15.465.000,00	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Persentase penyediaan tanah bagi masyarakat dan pembangunan untuk kepentingan umum	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Bidang Pertanahan
2.0	LINGKUNGAN HIDUP						18.748.648,00		21.220.864,00		24.553.643,00		29.386.527,00		33.794.124,00		127.703.806,00		
2.0 5.1 5	Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan						16.168.648,00		18.285.864,00		20.953.393,00		24.521.302,00		28.049.048,00		107.978.255,00		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	-	-	5,00		5,00		5,00		10,00		10,00		10,00			Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup
		Persentase kabupaten/kota yang meningkat kualitas udara	%	5,71	5,71	5,71		5,71		5,71		8,57		8,57		8,57			Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase sungai yang meningkat kualitasnya	%	-	-	5,00		5,00		5,00		10,00		10,00		10,00		Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
		Persentase pemantauan kualitas udara ambien	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Balai Pengujian Dan Laboratorium Lingkungan Hidup Kelas A
2.0 5.1 6	Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas						2.580.000,00		2.935.000,00		3.600.250,00		4.865.225,00		5.745.076,00		19.725.551,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Persentase rekomendasi lingkungan hidup	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Penataan, Pengkajian Dampak dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
2.0 6	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL						5.057.538,00		5.275.000,00		5.350.000,00		5.450.000,00		5.750.000,00		26.882.538,00	
2.0 6.1 5	Penataan Administrasi Kependudukan						5.057.538,00		5.275.000,00		5.350.000,00		5.450.000,00		5.750.000,00		26.882.538,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Cakupan OPD Provinsi/Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	%	-	-	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00			Bidang Fasilitas Layanan Adminduk
		Tingkat partisipasi 0-18 tahun memiliki akte kelahiran	%	87,42	87,50	90,00		92,00		95,00		97,00		100,00		100,00			Bidang Fasilitas Layanan Adminduk
		Persentase penduduk yang memiliki KTP-el per wajib KTP-el	%	98,33	93,40	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Bidang Fasilitas Layanan Adminduk
2.0	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA						11.185.000,00		16.900.000,00		17.950.000,00		19.000.000,00		20.000.000,00		85.035.000,00		
2.0 7.1 5	Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa						4.100.000,00		5.000.000,00		5.800.000,00		6.350.000,00		6.650.000,00		27.900.000,00		Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase rekomendasi raperda/raperbup yang berkaitan dengan desa	%	-	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Bidang Penataan Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase jumlah desa dengan satgas pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan sosial budaya masyarakat	%	6,02	9,64	27,71		45,78		63,85		81,93		100,00		100,00		Bidang Penataan Desa
		Persentase desa dengan Sistem Informasi Desa	%	1,61	3,10	10,53		17,95		25,38		32,81		40,24		40,24		Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
		Persentase anggota BPD yang meningkatkan kapasitasnya	%	0,83	2,11	2,56		3,00		3,45		3,89		4,34		4,34		Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
		Persentase jumlah rekomendasi Gubernur terhadap permohonan persetujuan tukar-menukar tanah kas desa untuk kepentingan umum	%	-	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Administrasi Pemerintahan Desa
2.0 7.1 6	Kerjasama Desa dan Pengembangan Kawasan Perdesaan						1.950.000,00		2.550.000,00		2.700.000,00		2.800.000,00		3.050.000,00		13.050.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase pengembangan kawasan perdesaan	%	-	17,81	34,25		50,68		67,12		83,56		100,00		100,00		Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase desa yang mengembangkan BKAD	%	-	1,11	2,23		3,34		4,46		5,57		6,68		6,68		Bidang Pengembangan dan Kerjasama Desa
2.0 7.1 7	Peningkatan Partisipasi dan Penguatan Kelembagaan Masyarakat						5.135.000,00		9.350.000,00		9.450.000,00		9.850.000,00		10.300.000,00		44.085.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM) yang difasilitasi	%	15,02	30,04	37,80		46,25		54,71		63,16		71,61		71,61		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Persentase Lembaga Masyarakat yang meningkatkan kapasitasnya	%	1,45	1,80	2,15		2,50		2,85		3,20		3,55		3,55		Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
2.0 8	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB						7.288.834,00		8.638.499,00		9.562.388,00		10.753.664,00		11.964.078,00		48.207.463,00	
2.0 8.1 5	Pengendalian Penduduk dan Peningkatan Kesertaan Keluarga Berencana						6.149.619,00		6.899.619,00		7.649.619,00		8.649.619,00		9.649.619,00		38.998.095,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki kebijakan pengendalian kuantitas penduduk	%	-	-	8,33		16,67		25,00		33,33		41,67		41,67			Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
		Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	%	28,45	27,43	28,00		28,50		29,00		29,50		30,00		30,00			Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE
		Unmetneed KB	%	11,71	13,06	12,75		12,25		11,75		11,25		10,75		10,75			Bidang Keluarga Berencana, Advokasi, dan KIE
		Persentase organisasi masyarakat/mitra kerja dalam program KB tingkat daerah provinsi yang aktif	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat
2.08.16	Keluarga Sejahtera						1.139.215,00		1.738.880,00		1.912.769,00		2.104.045,00		2.314.459,00		9.209.368,00		Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase kelompok tribina yang aktif	%	91,75	96,06	96,10		96,15		96,20		96,25		89,30		96,30		Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
		Persentase UPPKS yang aktif	%	87,68	87,73	89,75		89,90		90,00		90,10		90,20		90,20		Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Sejahtera
		Persentase ormas dan mitra kerja dalam pembangunan keluarga	%	-	-	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		Bidang Data dan Partisipasi Masyarakat
2.09	PERHUBUNGAN						131.857.634,00		281.266.026,00		270.015.309,00		262.184.758,00		269.651.204,00		1.214.974.931,00	
2.09.15	Pengembangan Perhubungan Darat						129.181.634,00		276.237.026,00		256.209.309,00		232.251.758,00		245.791.204,00		1.139.670.931,00	Dinas Perhubungan
		Persentase fasilitas perlengkapan jalan terpasang	%	7,48	7,74	9,71		21,42		29,14		42,85		52,34		52,34		Bidang Lalu Lintas
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	4,55	9,09	10,00		20,00		30,00		40,00		50,00		50,00		Bidang Lalu Lintas

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	5,88	11,76	15,38		30,77		46,15		61,54		76,92		76,92		Bidang Lalu Lintas
		Persentase jumlah Abdi Yasa yang memenuhi Passing Grade pemahaman keselamatan jalan	%	-	1,16	3,53		7,16		10,84		14,63		18,52		18,52		Bidang Lalu Lintas
		Persentase angkutan umum AKDP sesuai SPM	%	3,93	4,33	4,64		4,87		5,34		5,49		5,68		5,68		Bidang Angkutan Jalan
		Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah II Kelas B	%	35,47	36,35	38,25		39,56		41,02		42,34		43,21		43,21		Bidang Angkutan Jalan

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah V Kelas B	%	63,05	63,68	63,99		64,62		65,17		65,96		66,43		66,43		Bidang Angkutan Jalan
		Persentase trayek angkutan aglomerasi dan perintis	%	4,00	8,00	9,52		23,81		33,33		38,10		42,86		42,86		Bidang Angkutan Jalan
		Persentase penumpang masa angkutan lebaran yang menggunakan angkutan umum	%	47,08	74,73	78,31		82,06		86,00		90,14		94,45		94,45		Bidang Angkutan Jalan
		Persentase terminal Bus Type B sesuai standar pelayanan	%	-	-	10,94		21,88		31,25		37,50		43,75		43,75		Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
		Persentase fasilitas keselamatan jalan terpasang di perlintasan sebidang Kereta Api	%	3,85	3,85	4,55		13,64		27,27		36,36		45,45		45,45		Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian
		Persentase Fasilitas pembangunan infrastruktur transportasi strategis	%	9,09	18,18	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		Bidang Jaringan Transportasi dan Perkeretaapian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	46,56	47,38	48,92		50,15		51,18		52,00		52,51		52,51		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A	%	-	5,56	6,25		12,50		18,75		25,00		31,25		31,25		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah I Kelas A
		Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	45,57	46,22	47,60		49,17		50,28		51,20		52,03		52,03		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A	%	5,56	11,11	12,50		25,00		37,50		50,00		62,50		62,50		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah III Kelas A

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	76,45	76,81	77,36		78,08		78,53		79,17		79,53		79,53		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A	%	3,33	6,67	7,69		15,38		23,08		30,77		38,46		38,46		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah IV Kelas A
		Persentase Pembaharuan izin AKDP yang berbadan hukum Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	81,89	82,04	82,26		82,49		82,87		83,09		83,55		83,55		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A
		Persentase Rehabilitasi Daerah Rawan Kecelakaan Balai Pengelola Sarana dan Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A	%	3,13	6,25	6,90		13,79		20,69		27,59		34,48		34,48		Balai Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Wilayah VI Kelas A

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase bus angkutan umum / massal berbasis aglomerasi di kawasan strategis yang beroperasi	%	5,86	12,70	17,26		21,82		31,60		33,55		34,85		34,85		Balai Transportasi Jawa Tengah
2.0 9.1 6	Pengembangan Perhubungan Laut						2.676.000,00		5.029.000,00		13.806.000,00		29.933.000,00		23.860.000,00		75.304.000,00	Dinas Perhubungan
		Persentase perusahaan angkutan laut dan jasa terkait angkutan di perairan yang berijin	%	27,43	31,72	33,96		35,82		39,55		41,42		43,28		43,28		Bidang Pelayaran
		Persentase fasilitas keselamatan pelayaran terpasang	%	-	6,67	12,50		37,50		50,00		62,50		75,00		75,00		Bidang Pelayaran
		Persentase penumpang angkutan laut dari dan ke Karimunjawa	%	42,99	53,43	58,40		65,41		73,26		78,39		87,79		87,79		Balai Transportasi Jawa Tengah
2.1 0	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						43.465.214,00		43.933.574,00		43.523.315,00		44.482.378,00		47.335.848,00		222.740.329,00	
2.1 0.1 5	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik						16.014.250,00		17.264.000,00		18.764.000,00		20.264.000,00		21.764.000,00		94.070.250,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Nilai survei kepuasan komunikasi publik	%	-	-	57,00		64,00		71,00		78,00		85,00		85,00		Bidang Informasi dan Komunikasi Publik

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.1 0.1 6	Pengembang- an Infra- struktur Teknologi Informasi dan Komunikasi						22.916.25 0,00		21.500.00 0,00		18.866.00 0,00		17.500.00 0,00		18.316.00 0,00		99.098.25 0,00	Dinas Komunika- si dan Informatika
		Persentase ketersediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi	%	10,00	15,00	20,00		40,00		60,00		70,00		80,00		80,00		Bidang Teknologi Informasi dan Komunika- si
2.1 0.1 7	Pengembang- an E-Gover- ment						4.534.714 ,00		5.169.574 ,00		5.893.315 ,00		6.718.378 ,00		7.255.848 ,00		29.571.82 9,00	Dinas Komunikas i dan Informatika
		Persentase aplikasi layanan publik terintegrasi	%	33,00	38,00	45,00		55,00		65,00		75,00		85,00		85,00		Bidang E- Govern- ment
2.1 1	KOPERASI DAN UKM						58.711.7 80,00		68.946.7 80,00		75.646.7 80,00		82.321.7 80,00		89.146.7 80,00		374.773.9 00,00	
2.1 1.1 5	Pembinaan dan Pengawasan Koperasi						5.558.340 ,00		6.525.000 ,00		8.275.000 ,00		9.550.000 ,00		10.575.00 0,00		40.483.34 0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Persentase koperasi sehat	%	19,86	20,92	22,17		23,41		24,86		25,90		27,15		27,15		Bidang Pengawa- san
		Persentase koperasi aktif	%	82,81	83,42	84,20		84,52		84,83		85,03		85,19		85,19		Bidang Pengawas- an
2.1 1.1 6	Pemasyarakat an Perkoperasian						2.886.660 ,00		3.500.000 ,00		4.750.000 ,00		5.250.000 ,00		6.250.000 ,00		22.636.66 0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Persentase pertumbuhan anggota koperasi provinsi	%	40,94	34,09	37,87		42,95		50,06		57,42		66,20		66,20		Bidang Kelembaga an

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.1 1.1 7	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Koperasi						2.350.000,00		5.850.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00		7.000.000,00		27.700.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Persentase koperasi provinsi berkualitas	%	61,69	71,50	72,50		73,50		74,50		75,50		76,50		76,50		Bidang Kelembagaan
2.1 1.1 8	Pendidikan Perkoperasian dan UKM						16.296.780,00		17.046.780,00		18.046.780,00		19.046.780,00		20.046.780,00		90.483.900,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Persentase sumberdaya manusia koperasi dan UKM yang terampil	%	71,01	72,81	75,00		78,00		80,00		82,00		83,00		83,00		Balai Pelatihan Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kelas A.
2.1 1.1 9	Pengembangan Akses Pembiayaan Bagi KUKM						1.905.000,00		2.155.000,00		2.655.000,00		3.405.000,00		4.405.000,00		14.525.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Persentase KUKM yang mengakses kredit perbankan	%	30,43	31,03	31,23		31,55		31,78		31,98		32,14		32,14		Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan
2.1 1.2 0	Peningkatan dan Penguatan Kapasitas Usaha KUKM						17.355.000,00		17.500.000,00		18.750.000,00		20.000.000,00		21.250.000,00		94.855.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Persentase pertumbuhan tenaga kerja koperasi provinsi dan UKM yang dibina	%	48,98	55,48	55,68		55,88		56,08		56,28		56,48		56,48		Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase pertumbuhan omset koperasi provinsi dan UKM yang dibina	%	71,13	73,93	74,13		74,33		74,53		74,73		74,93		74,93		Bidang Restrukturisasi dan Pembiayaan
2.1 1.2 1	Peningkatan Produktivitas KUKM						2.490.000,00		3.000.000,00		3.550.000,00		4.700.000,00		5.500.000,00		19.240.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Persentase pertumbuhan profit KUKM yang dibina	%	32,81	24,98	20,92		23,02		25,22		27,52		29,92		29,92		Bidang Bina Usaha
2.1 1.2 2	Perluasan Jaringan Pemasaran dan Usaha KUKM						9.870.000,00		13.370.000,00		13.620.000,00		13.870.000,00		14.120.000,00		64.850.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Persentase pertumbuhan pangsa pasar produk Koperasi dan UKM	%	5,63	5,65	5,80		5,95		6,10		6,25		6,40		6,40		Bidang Bina Usaha
2.1 2	PENANAMAN MODAL						10.167.500,00		12.355.900,00		14.589.800,00		17.251.600,00		20.424.000,00		74.788.800,00	
2.1 2.1 5	Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal						1.450.200,00		1.753.700,00		2.104.000,00		2.526.000,00		3.030.200,00		10.864.100,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase bahan kajian potensi penanaman modal yang dipromosikan	%	-	-	60,00		65,00		70,00		75,00		80,00		80,00		Bidang Perencanaan dan Pengembangan
2.1 2.1 6	Promosi Dan Kerjasama Penanaman Modal						3.097.680,00		3.629.999,00		4.367.000,00		5.240.000,00		6.288.000,00		22.622.679,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Rasio jumlah ijin usaha dan / atau izin komersial / izin operasional terhadap jumlah kepeminatan penanaman modal	%	-	-	14,00		21,00		22,00		23,00		24,00		24,00		Bidang Promosi PM
		Rasio jumlah realisasi kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM terhadap jumlah kepeminatan kemitraan Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UKM	%	-	-	22,00		23,00		24,00		25,00		26,00		26,00		Bidang Promosi PM
2.1 2.1 7	Pelayanan Perijinan						1.391.700 ,00		1.896.816 ,00		1.920.000 ,00		2.304.000 ,00		2.764.800 ,00		10.277.31 6,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase penyelesaian perizinan sesuai standar pelayanan	%	-	-	91,00		92,00		93,00		94,00		95,00		95,00		Bidang Pelayanan Perizinan
2.1 2.1 8	Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal						1.431.620 ,00		1.685.385 ,00		2.190.700 ,00		2.628.800 ,00		3.154.600 ,00		11.091.10 5,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase realisasi proyek penanaman modal	%	-	-	15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		15,00		Bidang Pengawas- an dan Pengendali an PM

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembangu n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.1 2.1 9	Penanganan Pengaduan dan Peningkatan Layanan Perijinan						1.337.630 ,00		1.740.000 ,00		2.169.100 ,00		2.603.000 ,00		3.123.700 ,00		10.973.43 0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase pemuhan standar pelayanan	%	-	-	90,00		90,00		91,00		92,00		93,00		93,00		Bidang Pengaduan dan Peningkat- an Layanan
		Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Pengaduan dan Peningkat- an Layanan
2.1 2.2 0	Pelayanan Data Dan Informasi Penanaman Modal dan Perijinan						1.458.670 ,00		1.650.000 ,00		1.839.000 ,00		1.949.800 ,00		2.062.700 ,00		8.960.170, 00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase pemanfaatan sistem informasi penanaman modal dan perijinan	%	-	-	50,00		60,00		70,00		80,00		90,00		90,00		Bidang Pengelola Data dan Informasi
2.1 3	KEPEMUDA- AN DAN OLAH RAGA						504.253. 000		320.906. 250,00		454.511. 250,00		266.856. 250,00		179.756. 250,00		1.235.553 .250,00	
2.1 3.1 5	Penyadaran, Pemberdaya- an, Pengem- bangan Pemuda dan Lembaga Kepemudaan						12.273.25 0,00										12.273.25 0,00	Dinas Kepemuda- an, Olah Raga dan Pariwisata
		Persentase peningkatan pola kemitraan	%	20,00	20,00	20,00		-		-		-		-		-		Bidang Kepemuda- an
		Persentase peningkatan kapasitas pemuda	%	20,00	20,00	20,00		-		-		-		-		-		Bidang Kepemuda- an

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembangu n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggu ng Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase peningkatan kelompok wirausaha pemuda	%	20,00	20,00	20,00		-		-		-		-		-		Bidang Kepemudaan
2.1 3.1 6	Peningkatan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda						1.250.000,00										1.250.000,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Persentase peningkatan kelompok wirausaha pemuda	%	20,00	20,00	20,00		-		-		-		-		-		Bidang Kepemudaan
2.1 3.1 7	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan/ Organisasi Olahraga						3.425.000,00										3.425.000,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Persentase peningkatan kelembagaan dan SDM olahraga	%	20,00	20,00	20,00		-		-		-		-		-		Bidang Keolahragaan
2.1 3.1 8	Pembibitan, Pembinaan dan Pemasaryakatan Olahraga						77.581.750,00										77.581.000,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Persentase event olahraga massal	%	100,00	100,00	100,00		-		-		-		-		-		Bidang Keolahragaan
		Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	25,00	26,67	5,00		-		-		-		-		-		Bidang Keolahragaan
		Persentase peningkatan tenaga olahraga	%	7,50	17,40	26,30		-		-		-		-		-		Bidang Keolahragaan
		Persentase atlet PPLOP yang berprestasi	%	5,88	8,57	9,44		-		-		-		-		-		Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembangu n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
																			Olahraga Pelajar Kelas A
2.1 3.1 9	Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kepemudaan Dan Keolahragaan						409.723.7 50,00										409.723.7 50,00		Dinas Kepemuda- an, Olah Raga dan Pariwisata
		Persentase sarana prasarana kepemudaan dan keolahragaan dalam kondisi baik	%	12,50	12,50	50,00		-		-		-		-		-			Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A
2.1 3.2 3	Pembinaan dan Pengem- bangan Kepemudaan						-	15.223.25 0,00		16.273.25 0,00		16.673.25 0,00		17.073.25 0,00		65.243.00 0,00		Dinas Kepemuda- an, Olah Raga dan Pariwisata	
		Persentase capaian kapasitas kepemudaan	%	-	-	-		39,68		59,78		79,89		100,00		100,00		Bidang Kepemuda- an	
		Persentase capaian kemandirian ekonomi pemuda	%	-	-	-		6,52		9,78		13,04		16,30		16,30		Bidang Kepemuda- an	
2.1 3.2 4	Pembinaan dan Pengem- bangan Keolahragaan						-	305.683.0 00,00		438.238.0 00,00		250.183.0 00,00		162.683.0 00,00		1.156.787. 000,00		Dinas Kepemuda- an, Olah Raga dan Pariwisata	
		Persentase peningkatan prestasi olahraga	%	25,00	26,67	-		36,67		40,00		43,33		45,00		45,00		Bidang Keolahraga an	
		Persentase capaian even olahraga rekreasi	%	20,00	30,00	-		50,00		70,00		90,00		100,00		100,00		Bidang Keolahraga an	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase peningkatan tenaga olahraga yang berkompeten	%	7,50	17,40	-		35,70		45,10		54,50		63,90		63,90		Bidang Keolahragaan
		Persentase atlet PPLOP yang berprestasi	%	5,88	8,57	-		11,11		12,78		13,89		15,00		15,00		Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A
		Persentase sarpras olahraga dalam kondisi baik	%	12,50	12,50	-		62,50		87,50		100,00		100,00		100,00		Balai Pemusatan Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Kelas A
2.14	STATISTIK						3.173.550,00		3.673.550,00		4.173.550,00		4.973.550,00		5.723.550,00		21.717.750,00	
2.14.15	Pengembangan Data Statistik Sektoral Dan Keterbukaan Informasi						3.173.550,00		3.673.550,00		4.173.550,00		4.973.550,00		5.723.550,00		21.717.750,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase badan publik yang terbuka	%	45,00	55,00	68,00		76,00		83,00		92,00		100,00		100,00		Bidang Statistik
		Persentase ketersediaan data sektoral	%	60,00	65,00	74,00		79,00		89,00		95,00		100,00		100,00		Bidang Statistik
2.15	PERSANDIAN						1.081.322,00		4.509.775,00		8.831.904,00		10.562.370,00		11.886.080,00		36.871.451,00	
2.15.15	Peningkatan Persandian Daerah dan Keamanan Informasi Daerah						1.081.322,00		4.509.775,00		8.831.904,00		10.562.370,00		11.886.080,00		36.871.451,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase perangkat daerah memiliki keamanan informasi > 80	%	-	-	16,67		33,33		50,00		66,67		100,00		100,00		Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
2.1 6	KEBUDAYA- AN						18.351.1 75,00		18.816.2 50,00		19.007.0 00,00		19.209.1 75,00		20.424.5 10,00		95.808.11 0,00	
2.1 6.1 5	Pembinaan Kebudayaan						18.351.17 5,00		18.816.25 0,00		19.007.00 0,00		19.209.17 5,00		20.424.51 0,00		95.808.11 0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase sumber belajar berbasis budaya	%	0,22	0,25	0,28		0,32		0,36		0,39		0,42		0,42		Bidang Pembinaan Kebudayaan
		Persentase siswa dan anggota paguyuban penghayat kepercayaan yang terlayani	%	18,14	20,16	22,40		26,40		30,40		34,40		37,84		37,84		Bidang Pembinaan Kebudayaan
		Persentase status cagar budaya	%	15,39	17,10	19,00		19,30		19,60		19,90		21,89		21,89		Bidang Pembinaan Kebudayaan
		Persentase jenis budaya yang terlayani	%	2,84	3,15	3,50		4,70		5,90		6,20		6,82		6,82		Bidang Pembinaan Kebudayaan
		Persentase seni budaya kabupaten/kota yang terfasilitasi	%	-	-	68,57		71,42		74,28		77,14		80,00		80,00		Taman Budaya Jawa Tengah Kelas A
		Survei Kepuasan Pengunjung Museum	%	-	81,00	88,00		88,20		88,40		88,60		88,70		88,70		Museum Jawa Tengah Ranggawarsita Kelas A
2.1 7	PERPUSTAKA AN						5.755.00 0,00		7.900.00 0,00		8.700.00 0,00		9.550.00 0,00		10.400.0 00,00		42.305.00 0,00	

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.1 7.1 5	Pengembang- an Perpustaka n						1.435.000 ,00		2.900.000 ,00		3.200.000 ,00		3.550.000 ,00		3.900.000 ,00		14.985.00 0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustaka n
		Persentase peningkatan kompetensi SDM perpustakaan	%	-	-	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		Bidang Pengemban gan Perpustaka n
		Persentase perluasan jejaring kemitraan perpustakaan	%	-	-	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		Bidang Pengemban gan Perpustaka n
2.1 7.1 6	Pengelolaan Perpustakaan						4.320.000 ,00		5.000.000 ,00		5.500.000 ,00		6.000.000 ,00		6.500.000 ,00		27.320.00 0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustaka n
		Persentase ketersediaan bahan pustaka	%	-	-	24,00		48,00		68,00		79,00		100,00		100,00		Bidang Pengelolan Perpustaka n
		Persentase peningkatan cakupan layanan perpustakaan provinsi	%	-	-	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		Bidang Pengelolan Perpustaka n
2.1 8	KEARSIPAN						3.570.00 0,00		4.600.00 0,00		4.635.00 0,00		4.840.00 0,00		5.050.00 0,00		22.695.00 0,00	
2.1 8.1 5	Pembinaan, Pengembang- an, dan Pengawasan Kearsipan						1.319.000 ,00		1.575.000 ,00		1.635.000 ,00		1.690.000 ,00		1.750.000 ,00		7.969.000, 00	Dinas Kearsipan dan Perpustaka n
		Persentase perangkat daerah yang tertib arsip	%	-	-	21,00		43,00		64,00		85,00		100,00		100,00		Bidang Pembinaan, Pengemban gan dan Pengawas- an Kearsipan

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
2.1 8.1 6	Pengelolaan dan Pelestarian Arsip						1.580.000,00		2.125.000,00		2.000.000,00		2.050.000,00		2.100.000,00		9.855.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Persentase pengelolaan arsip	%	-	-	15,00		29,00		60,00		73,00		100,00		100,00		Bidang Pengelolaan dan Pelestarian Arsip
2.1 8.1 7	Layanan dan Pemanfaatan Kearsipan						671.000,00		900.000,00		1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		4.871.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Persentase pengunjung arsip	%	-	-	16,00		34,00		59,00		83,00		100,00		100,00		Bidang Layanan dan Pemanfaatan Arsip
3	URUSAN PILIHAN						453.927.053,00		526.656.857,00		552.690.674,00		576.937.805,00		598.169.563,00		2.702.613.180,00	
3.0 1	KELAUTAN DAN PERIKANAN						55.925.000,00		76.500.000,00		81.475.000,00		87.000.000,00		91.325.000,00		392.225.000,00	
3.0 1.1 5	Pengembangan Perikanan Tangkap						20.400,00		27.525,00		29.200,00		30.975,00		31.550,00		139.650,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Produksi Perikanan Tangkap	Ton	437.936,36	446.277,16	393.150,00		412.807,50		433.447,88		455.120,26		477.876,28		477.876,28		Bidang Perikanan Tangkap
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tegalsari	%	81,82	81,82	81,82		90,91		100,00		100,00		100,00		100,00		Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Kelas A
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Asemdayong	%	81,82	81,82	81,82		90,91		100,00		100,00		100,00		100,00		Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong Kelas B

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Wonokerto	%	63,64	63,64	63,64		63,64		72,73		72,73		81,82		81,82			Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto Kelas B
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Kidanglor	%	72,73	72,73	72,73		81,82		81,82		90,91		100,00		100,00			Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor Kelas A
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tawang	%	54,55	54,55	54,55		63,64		63,64		72,73		81,82		81,82			Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang Kelas B
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Morodemak	%	72,73	72,73	72,73		81,82		81,82		90,91		100,00		100,00			Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak Kelas A
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Bajomulyo	%	72,73	72,73	72,73		81,82		81,82		90,91		100,00		100,00			Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo Kelas A
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Tasikagung	%	72,73	72,73	72,73		81,82		82,82		90,91		100,00		100,00			Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung Kelas A
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Karimunjawa	%	45,45	45,45	45,45		54,55		54,55		63,64		63,54		63,64			Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa Kelas B

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Lohgending	%	81,82	81,82	81,82		81,82		90,91		90,91		100,00		100,00			Pelabuhan Perikanan Pantai Lohgending Kelas A
		Persentase ketercapaian pelayanan kepelabuhanan PPP Larangan	%	90,91	90,91	90,91		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Pelabuhan Perikanan Pantai Larangan Kelas B
3.0 1.1 6	Program Usaha dan Pengembangan Komoditas						11.200.000,00		22.650.000,00		23.650.000,00		24.650.000,00		25.650.000,00		107.800.000,00		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase penanganan kasus hama penyakit ikan	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Balai Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan Lingkungan Kelas A
		Persentase peningkatan produksi benih	%	-	-	5,00		10,00		15,00		20,00		25,00		25,00			Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Kelas A
		Produksi perikanan budidaya	Ton	485.689,98	510.324,49	464.608,41		487.838,83		512.230,77		537.842,31		564.734,42		564.734,42			Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
3.0 1.1 7	Pengelolaan Ruang Pesisir dan Laut						5.050.000,00		5.550.000,00		6.300.000,00		7.050.000,00		7.800.000,00		31.750.000,00		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah	%	-	-	5,00		10,00		15,00		20,00		25,00		25,00			Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Selatan)																
		Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Timur)	%	-	-	5,00		10,00		15,00		20,00		25,00		25,00		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
		Persentase Peningkatan Luas Kawasan Mangrove Yang Direhabilitasi dari Tahun Sebelumnya (Wilayah Barat)	%	-	-	5,00		10,00		15,00		20,00		25,00		25,00		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		Persentase peningkatan produksi produksi garam	%	-	-	5,00		10,00		15,00		20,00		25,00		25,00		Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
		Persentase Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan Taruna Pesisir	%	-	-	10,00		15,00		20,00		25,00		30,00		30,00		Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil
		Persentase kawasan konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif	%	-	-	15,00		30,00		45,00		60,00		75,00		75,00		Bidang Kelautan dan Pulau-pulau Kecil

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.0 1.1 8	Program Pengawasan Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan						13.975.00 0,00		14.975.00 0,00		15.975.00 0,00		17.225.00 0,00		18.475.00 0,00		80.625.00 0,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai selatan Jawa Tengah	%	-	-	10,00		8,00		6,00		4,00		2,00		2,00		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Selatan Kelas A
		Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara timur Jawa Tengah	%	-	-	10,00		8,00		6,00		4,00		2,00		2,00		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Timur Kelas A
		Persentase penurunan jumlah kasus pelanggaran sektor kelautan dan perikanan wilayah pantai utara barat Jawa Tengah	%	-	-	10,00		8,00		6,00		4,00		2,00		2,00		Kantor Cabang Dinas Kelautan Wilayah Barat Kelas A
		Persentase Jumlah Kasus Pelanggaran Pengelolaan Sumberdaya Kelautan Perikanan yang ditindak-	%	-	-	1,00		2,00		3,00		4,00		5,00		5,00		Bidang Pengawas- an Sumber daya Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		lanjuti																
3.0 1.1 9	Penguatan Daya Saing dan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan						5.300.000,00		5.800.000,00		6.350.000,00		7.100.000,00		7.850.000,00		32.400.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Persentase peningkatan dokumen kelayakan mutu	%	-	-	10,00		20,00		30,00		40,00		50,00		50,00		Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Kelas A
		Persentase peningkatan produksi hasil olahan ikan	%	-	-	5,00		10,00		15,00		20,00		25,00		25,00		Bidang Usaha dan Pengembangan Komoditas
3.0 2	PARIWISATA						48.455.715,00		51.105.715,00		53.105.715,00		55.355.715,00		57.105.715,00		259.359.803,00	
3.0 2.1 5	Pengembangan Destinasi Pariwisata						25.686.943,00		26.986.943,00		27.236.943,00		27.486.943,00		27.736.943,00		135.134.715,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Persentase peningkatan dan pengembangan kawasan pariwisata pada setiap DPP	%	17,39	34,78	43,48		52,17		60,87		69,57		78,26		78,26		Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata
		Persentase usaha pariwisata yang memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata	%	5,00	10,00	14,00		28,00		42,00		56,00		70,00		70,00		Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		(TDUP)																
3.0 2.1 6	Pengembangan Pemasaran Pariwisata						17.000.000,00		17.750.000,00		18.750.000,00		19.750.000,00		20.250.000,00		93.500.000,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Kunjungan Wisatawan Nusantara	Orang	40.118.470,00	44.130.317,00	46.645.745,00		49.631.073,00		53.204.510,00		57.673.689,00		62.748.973,00		62.748.973,00		Bidang Pemasaran Pariwisata
		Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Orang	781.107,00	819.381,00	857.710,00		910.030,00		969.182,00		1.037.994,00		1.118.957,00		1.118.957,00		Bidang Pemasaran Pariwisata
3.0 2.1 7	Pengembangan Kelembagaan Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif						5.768.772,00											Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Persentase lembaga dan SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	%	20,00	20,00	20,00		-		-		-		-		-		Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.0 2.1 8	Pengembangan SDM Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif						-		6.368.772,00		7.118.772,00		8.118.772,00		9.118.772,00		30.725.088,00	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata
		Persentase SDM pariwisata yang memiliki sertifikasi kompetensi	%	15,96	17,02	-		25,53		31,91		35,11		38,30		38,30		Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
																		Ekonomi Kreatif
		Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki sertifikasi	%	20,00	20,00	-		60,00		80,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3.03	PERTANIAN						219.909.756,00		229.268.477,00		232.982.794,00		235.129.925,00		237.718.183,00		1.155.009.135,00	
3.03.15	Pengembangan Agribisnis						145.677.712,00		146.177.712,00		148.177.712,00		148.677.712,00		149.677.712,00		738.388.560,00	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Persentase jaringan irigasi tersier yang baik	%	16,00	16,38	16,88		17,38		17,88		18,38		18,88		17,88		Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
		Persentase penambahan alsintan	%	-	-	4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		4,00		Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian
		Persentase peningkatan Produksi Kedelai	%	2,58	2,10	2,10		2,10		2,10		2,10		2,10		2,10		Bidang Tanaman Pangan
		Persentase peningkatan Produksi Jagung dan sereal lainnya	%	0,40	0,30	0,30		0,30		0,30		0,30		0,30		0,30		Bidang Tanaman Pangan
		Persentase peningkatan Produksi Padi	%	0,40	0,70	0,70		0,70		0,70		0,70		0,70		0,70		Bidang Tanaman Pangan
		Persentase peningkatan Produksi Bawang	%	0,25	3,80	3,80		3,80		3,80		3,80		3,80		3,80		Bidang Hortikultura

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Merah																	
		Persentase peningkatan Produksi Cabe Besar	%	0,25	3,80	3,80		3,80		3,80		3,80		3,80		3,80		3,80	Bidang Hortikultura
		Persentase peningkatan Produksi kopi	%	1,00	2,50	2,50		2,50		2,50		2,50		2,50		2,50		2,50	Bidang Perkebunan
		Persentase peningkatan Produksi Tebu	%	-	0,50	0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		0,50	Bidang Perkebunan
		Persentase peningkatan Produksi Kelapa	%	1,00	0,50	0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		0,50		0,50	Bidang Perkebunan
		Persentase peningkatan kapasitas kelompok pengolahan hasil	%	-	-	2,50		2,50		2,50		2,50		2,50		2,50		2,50	Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
		Persentase layanan Sertifikasi benih	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Kelas A
		Persentase peningkatan produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Semarang	%	-	-	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Semarang
		Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Surakarta	%	-	-	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00	Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Surakarta

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih TPH wilayah Banyumas	%	-	-	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Wilayah Banyumas
		Persentase peningkatan Produksi benih di Balai Benih Tanaman Perkebunan	%	-	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Balai Benih Tanaman Perkebunan Kelas A
		Persentase penurunan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT)	%	1,04	0,82	0,69		0,61		0,53		0,45		0,43		0,43		Balai Perlidungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kelas A
		Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian	%	100,00	100,00	100,00		-		-		-		-		-		BALAI PELATIHAN PERTANIAN
3.0 3.1 6	Peningkatan SDM dan Penyuluhan Pertanian						6.105.000,00		13.205.000,00		13.953.000,00		14.705.000,00		15.455.000,00		63.423.000,00	Dinas Pertanian dan Perkebunan
		Persentase jumlah SDM penyuluh yang ditingkatkan kapasitasnya	%	10,00	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha
		Persentase peningkatan kapasitas SDM pertanian	%	100,00	100,00	-		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		BALAI PELATIHAN PERTANIAN
3.0 3.1 7	Pengembangan Agribisnis Peternakan						68.127.044,00		69.885.765,00		70.852.082,00		71.747.213,00		72.585.471,00		353.197.575,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase kenaikan fasilitasi sarpras peternakan	%	-	3,10	4,57		2,00		3,00		2,00		2,00		11,50		Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
		Persentase kenaikan fasilitasi penyuluhan dan kemitraan	%	-	7,00	9,52		8,69		12,00		14,28		15,62		76,00		Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan
		Populasi ternak	(ST)/(AU)	3.330.188,00	3.340.549,00	3.387.541,00		3.498.613,00		3.648.570,00		3.819.014,00		4.013.001,00		4.013.001,00		Bidang Budidaya
		Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan betina produktif	%	-	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Bidang Veteriner
		Persentase peningkatan produksi dan distribusi semen beku	%	-	1,00	1,00		1,00		1,00		1,00		1,00		9,90		Balai Inseminasi Buatan Kelas A
		Persentase peningkatan produksi ternak	%	-	2,00	2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		2,00		Balai Budidaya dan Pembibitan Ternak Terpadu Kelas A
		Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan betina produktif	%	-	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Balai veteriner semarang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase penurunan PHMS (Penyakit Hewan Menular Strategis) dan pemotongan betina produktif	%	-	10,00	10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		10,00		Balai veteriner boyolali
3.04	KEHUTANAN						51.422.886,00		53.762.500,00		59.993.000,00		64.618.000,00		70.354.000,00		300.150.386,00	
3.04.15	Rehabilitasi dan Konservasi Sumber Daya Hutan						32.330.664,00		35.063.000,00		42.563.000,00		45.063.000,00		49.063.000,00		204.082.664,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	-	-	5,00		10,00		15,00		20,00		25,00		25,00		Bidang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Konservasi Sumber Daya Alam
		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	-	-	0,33		0,65		0,98		1,30		1,63		1,63		CDK 1
		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	-	-	0,33		0,65		0,98		1,30		1,63		1,63		CDK 2
		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	-	-	0,34		0,68		1,01		1,35		1,69		1,69		CDK 3
		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	-	-	0,36		0,73		1,09		1,45		1,81		1,81		CDK 4

Ko de	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	-	-	0,40		0,80		1,20		1,60		2,00		2,00		CDK 5
		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	-	-	0,65		1,30		1,95		2,60		3,25		3,25		CDK 6
		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	-	-	0,41		0,83		1,24		1,65		2,06		2,06		CDK 8
		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	-	-	0,53		1,05		1,58		2,10		2,63		2,63		CDK 9
		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	-	-	0,41		0,83		1,24		1,65		2,06		2,06		CDK 10
		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	0,14	0,14	0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		0,14		Balai Taman Hutan Raya KGPAA Mangkunagoro I Kelas A
		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	0,09	0,09	0,09		0,09		0,09		0,09		0,09		0,09		Balai Kebun Raya Baturraden Kelas B
		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	0,91	0,91	0,91		0,91		0,91		0,91		0,91		0,91		Balai Sertifikasi dan Perbenihan Tanaman Hutan Kelas A

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	-	-	0,63		1,25		1,88		2,50		3,13		3,13		CDK 11
		Persentase lahan kritis dan sangat kritis tertangani	%	-	-	0,63		1,25		1,88		2,50		3,13		3,13		CDK 7
3.0 4.1 6	Penyuluhan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan						15.751.74 7,00		15.250.50 0,00		13.000.00 0,00		15.000.00 0,00		15.000.00 0,00		74.002.24 7,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	-	-	5,00		10,00		15,00		22,00		25,00		25,00		Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
		Persentase pengaduan yang ditangani	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Penyuluhan, Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Perlindungan Hutan
		Persentase pengaduan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CDK 1
		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	-	-	0,60		1,20		1,80		2,60		3,00		3,00		CDK 1

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	-	-	0,40		0,80		1,20		1,80		2,00		2,00		CDK 2
		Persentase pengaduan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CDK 2
		Persentase pengaduan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CDK 3
		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	-	-	0,40		0,80		1,20		1,80		2,00		2,00		CDK 3
		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	-	-	0,40		0,80		1,20		1,60		2,00		2,00		CDK 4
		Persentase pengaduan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CDK 4
		Persentase pengaduan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CDK 5
		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	-	-	0,60		1,20		1,80		2,60		3,00		3,00		CDK 5
		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	-	-	0,40		0,80		1,20		1,80		2,00		2,00		CDK 6
		Persentase pengaduan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CDK 6
		Persentase pengaduan yang	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CDK 8

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		ditangani																
		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	-	-	0,40		0,80		1,20		1,80		2,00		2,00		CDK 8
		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	-	-	0,40		0,80		1,20		1,80		2,00		2,00		CDK 9
		Persentase pengaduan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CDK 9
		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	-	-	0,40		0,80		1,20		1,80		2,00		2,00		CDK 10
		Persentase pengaduan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CDK 10
		Persentase pengaduan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CDK 11
		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	-	-	0,40		0,80		1,20		1,80		2,00		2,00		CDK 11
		Persentase pengaduan yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		CDK 7
		Presentase peningkatan kelas kelompok masyarakat	%	-	-	0,60		1,20		1,80		2,60		3,00		3,00		CDK 7
3.0 4.1 7	Pemanfaatan Hutan						3.340.475,00		3.449.000,00		4.430.000,00		4.555.000,00		6.291.000,00		22.065.475,00	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
																			dan Kehutanan
		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	11,27	13,41	5,44		11,90		19,18		27,08		35,38		35,38			Bidang Penataan dan Pemanfaatan Hutan
		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	-	-	0,31		0,41		0,51		0,62		0,72		0,72			CDK 1
		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	-	-	0,31		0,41		0,51		0,62		0,72		0,72			CDK 2
		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	-	-	0,21		0,31		0,41		0,51		0,62		0,62			CDK 3
		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	-	-	0,31		0,41		0,51		0,62		0,72		0,72			CDK 4

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	-	-	0,41		0,51		0,62		0,72		0,82		0,82		CDK 5
		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	-	-	0,41		0,51		0,62		0,72		0,82		0,82		CDK 6
		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	-	-	0,21		0,31		0,41		0,51		0,62		0,62		CDK 8
		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	-	-	0,31		0,41		0,51		0,62		0,72		0,72		CDK 9
		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	-	-	0,21		0,31		0,41		0,51		0,62		0,62		CDK 10
		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	-	-	0,21		0,31		0,41		0,51		0,62		0,62		CDK 11

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase unit pengelolaan hutan dan pengolahan hasil hutan yang berkelanjutan	%	-	-	0,41		0,51		0,62		0,72		0,82		0,82		CDK 7
3.05	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL						40.441.185,00		72.769.000,00		76.334.000,00		80.227.000,00		81.221.500,00		350.992.685,00	
3.05.15	Pengembangan Ketenagalistrikan						16.309.015,00		20.360.850,00		19.787.250,00		19.149.250,00		18.110.500,00		93.716.865,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin	%	3,93	6,18	8,83		15,91		22,98		30,06		37,13		37,13		Bidang Ketenagalistrikan
		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Solo	%	0,21	0,39	0,60		0,93		1,26		1,59		1,92		1,92		Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Muria	%	0,26	0,38	0,64		1,11		1,59		2,06		2,53		2,53		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Utara	%	0,27	0,44	0,62		0,95		1,28		1,62		1,95		1,95		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Selatan	%	0,65	0,94	1,13		1,88		2,64		3,39		4,15		4,15		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Utara	%	0,59	0,76	0,91		1,94		2,98		4,02		5,06		5,06		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Ungaran - Telomoyo	%	0,11	0,34	0,58		0,84		1,10		1,36		1,62		1,62		Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Kendeng Selatan	%	0,45	0,74	1,03		1,97		2,91		3,86		4,80		4,80		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Sewu Lawu	%	0,16	0,31	0,59		0,90		1,21		1,51		1,82		1,82		Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Slamet Selatan	%	0,47	0,64	1,05		2,04		3,03		4,02		5,01		5,01		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Serayu Tengah	%	0,41	0,56	0,66		1,18		1,70		2,21		2,73		2,73		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Merapi	%	0,34	0,50	0,71		1,47		2,22		2,98		3,73		3,73		Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
		Persentase pemenuhan listrik bagi rumah tangga miskin Wilayah Semarang - Demak	%	-	0,17	0,31		0,69		1,07		1,45		1,82		1,82		Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
3.0 5.1 6	Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi						4.183.700,00		15.000.000,00		21.488.500,00		21.923.000,00		23.185.500,00		85.780.700,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e)	tCO2e	745,70	1.176,31	24.512,00		49.481,00		74.027,00		98.587,00		123.401,00		123.401,00		Bidang Energi Baru Terbarukan
		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Solo	tCO2e	49,82	75,22	63,00		218,00		256,00		294,00		332,00		332,00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Kendeng	tCO2e	12,70	26,88	225,03		462,76		700,49		938,22		1.737,69		1.737,69		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Muria																
		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Serayu Utara	tCO2e	51,37	159,14	151,00		189,00		227,00		545,00		583,00		583,00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Serayu Selatan	tCO2e	12,70	25,40	32,00		161,00		714,00		726,00		739,00		739,00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Slamet Utara	tCO2e	12,70	25,40	32,00		57,00		83,00		383,00		408,00		408,00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) Wilayah Ungaran - Telomoyo	tCO2e	16,52	45,06	25,40		38,10		50,80		63,50		76,20		76,20		Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Kendeng Selatan	tCO2e	134,26	146,96	78,00		208,00		220,00		233,00		505,00		505,00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Sewu Lawu	tCO2e	14,70	40,10	51,00		356,00		381,00		394,00		407,00		407,00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Slamet Selatan	tCO2e	12,70	29,71	19.149,00		38.293,00		57.425,00		76.569,00		95.701,00		95.701,00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Serayu Tengah	tCO2e	12,70	25,40	25,00		38,00		51,00		64,00		76,00		76,00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Merapi	tCO2e	337,35	388,88	435,00		873,00		1.194,00		1.515,00		1.836,00		1.836,00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
		Penurunan emisi gas rumah kaca sektor energi (tCO2e) wilayah Semarang Demak	tCO2e	59,63	102,74	4.092,00		8.141,00		12.190,00		16.239,00		20.288,00		20.288,00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
3.0 5.1 7	Pengelolaan Pertambangan Minerba						7.148.320,00		15.934.000,00		10.832.000,00		12.087.500,00		12.306.500,00		58.308.320,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase good mining practice	%	20,00	54,82	62,50		73,33		85,71		85,71		85,71		85,71		Bidang Mineral dan Batubara

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Good Mining Practice Wilayah Solo	%	1,50	4,71	5,25		6,13		6,57		6,57		6,57		6,57		Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
		Persentase Good Mining Practice Wilayah Kendeng Muria	%	1,10	1,88	2,25		2,67		2,86		2,86		2,86		2,86		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Muria
		Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Utara	%	2,00	4,47	5,00		5,87		6,29		6,29		6,29		6,29		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
		Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Selatan	%	1,20	2,82	3,25		4,00		4,29		4,29		4,29		4,29		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
		Persentase Good Mining Practice Wilayah Slamet Utara	%	0,80	6,59	7,25		8,80		12,00		12,00		12,00		12,00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
		Persentase Good Mining Practice Wilayah Ungaran Telomoyo	%	1,40	1,88	2,25		2,67		2,86		2,86		2,86		2,86		Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
		Persentase Good Mining Practice Wilayah Kendeng Selatan	%	2,75	7,06	7,75		8,80		11,43		11,43		11,43		11,43		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
		Persentase Good Mining Practice Wilayah Sewu Lawu	%	3,50	4,00	4,50		4,80		5,14		5,14		5,14		5,14		Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Good Mining Practice Wilayah Slamet Selatan	%	3,60	8,47	9,25		11,20		14,29		14,29		14,29		14,29		Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan
		Persentase pelayanan pengujian mineral dan batubara	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
		Persentase Good Mining Practice Wilayah Serayu Tengah	%	-	1,65	2,00		2,67		2,86		2,86		2,86		2,86		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
		Persentase Good Mining Practice Wilayah Merapi	%	2,00	8,71	10,75		12,00		13,14		13,14		13,14		13,14		Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
		Persentase Good Mining Practice Wilayah Semarang Demak	%	1,60	2,59	3,00		3,73		4,00		4,00		4,00		4,00		Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
3.05.18	Pengembangan Kegeologian						12.800.150,00		21.474.150,00		24.226.250,00		27.067.250,00		27.619.000,00		113.186.800,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Persentase pengambilan air tanah	%	48,66	54,38	54,66		54,93		55,20		55,48		55,76		55,76		Bidang Geologi dan Air Tanah
		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Solo	%	3,25	4,09	4,11		4,13		4,15		4,17		4,20		4,20		Cabang Dinas ESDM Wilayah Solo
		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng	%	12,92	12,29	12,35		12,42		12,48		12,54		12,60		12,60		Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Muria																	Muria
		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Utara	%	2,25	2,84	2,85		2,87		2,88		2,89		2,91		2,91			Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Utara
		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Selatan	%	1,27	1,14	1,14		1,15		1,16		1,16		1,17		1,17			Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Selatan
		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Utara	%	0,54	0,95	0,96		0,96		0,97		0,97		0,97		0,97			Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Utara
		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Ungaran Telomoyo	%	9,30	8,26	8,30		8,35		8,39		8,43		8,47		8,47			Cabang Dinas ESDM Wilayah Ungaran - Telomoyo
		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Kendeng Selatan	%	0,43	0,59	0,60		0,60		0,60		0,60		0,61		0,61			Cabang Dinas ESDM Wilayah Kendeng Selatan
		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Sewu Lawu	%	2,26	3,23	3,24		3,26		3,28		3,29		3,31		3,31			Cabang Dinas ESDM Wilayah Sewu Lawu
		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Slamet Selatan	%	1,05	1,07	1,08		1,08		1,09		1,10		1,10		1,10			Cabang Dinas ESDM Wilayah Slamet Selatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase pelayanan pengujian air tanah	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Laboratorium Energi dan Sumber daya Mineral Kelas A
		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Serayu Tengah	%	0,23	0,24	0,24		0,24		0,25		0,25		0,25		0,25		Cabang Dinas ESDM Wilayah Serayu Tengah
		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Merapi	%	3,36	5,23	5,25		5,28		5,31		5,33		5,36		5,36		Cabang Dinas ESDM Wilayah Merapi
		Persentase pengambilan air tanah Wilayah Semarang Demak	%	11,79	14,45	14,52		14,59		14,67		14,74		14,81		14,81		Cabang Dinas ESDM Wilayah Semarang - Demak
3.06	PERDAGANGAN						17.601.165,00		19.906.165,00		22.426.165,00		25.216.165,00		27.946.165,00		113.095.825,00	
3.06.15	Peningkatan Ekspor, Promosi dan Efisiensi Impor						2.550.000,00		2.800.000,00		3.250.000,00		3.750.000,00		4.250.000,00		16.600.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Nilai ekspor non migas	Juta US\$	5.767,44	6.437,66	6.303,00		6.518,00		6.739,00		6.968,00		7.205,00		7.205,00		Bidang Perdagangan Luar Negeri
3.06.16	Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri						3.565.000,00		4.100.000,00		4.600.000,00		5.250.000,00		6.000.000,00		23.515.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase disparitas harga kepokmas di 6 kabupatenkota (price center)	%	14,50	14,00	13,50		13,00		12,50		12,00		11,50		11,50		Bidang Perdagangan Dalam Negeri
3.0 6.1 7	Pemberdayaan Dan Perlindungan Konsumen						3.540.000,00		4.060.000,00		4.630.000,00		5.270.000,00		5.750.000,00		23.250.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase jumlah barang yang tidak sesuai standar pada saat pengawasan	%	10,00	9,00	7,50		6,00		5,00		4,00		3,00		3,00		Bidang Standarisasi dan Perlindungan Konsumen
3.0 6.1 8	Peningkatan Layanan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang						7.946.165,00		8.946.165,00		9.946.165,00		10.946.165,00		11.946.165,00		49.730.825,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi	%	5,00	5,00	5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		5,00		Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Surakarta Kelas A
		Persentase kenaikan layanan pengujian dan sertifikasi	%	-	5,00	4,76		4,55		4,35		4,17		4,00		4,00		Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Semarang Kelas A
3.0 7	PERINDUSTRIAN						17.089.000,00		19.955.000,00		22.645.000,00		25.289.000,00		27.987.000,00		112.965.000,00	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
3.0 7.1 5	Penguatan dan Pengembangan Industri Agro						6.575.000,00		7.575.000,00		8.575.000,00		9.575.000,00		10.575.000,00		42.875.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri agro	%	5,13	7,07	5,50		5,69		5,75		5,89		6,00		6,00		Bidang Industri Agro
3.0 7.1 6	Penguatan dan Pengembangan Industri Non Agro						4.315.000,00		4.815.000,00		5.565.000,00		5.974.000,00		6.432.000,00		27.101.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase pertumbuhan produksi industri pengolahan industri non agro	%	3,01	3,00	3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		3,00		Bidang Industri Non Agro
3.0 7.1 7	Pengembangan Kemasan Dan Industri Kreatif						750.000,00		1.145.000,00		1.525.000,00		1.910.000,00		2.290.000,00		7.620.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Persentase kenaikan pelaku usaha yang difasilitasi layanan kemasan dan industri kreatif	%	2,65	3,72	4,10		4,10		4,25		4,31		4,35		4,35		Balai Industri Kreatif Digital dan Kemasan Kelas A
3.0 7.1 8	Pengembangan Teknologi Logam Dan Kayu						304.000,00		775.000,00		835.000,00		935.000,00		1.045.000,00		3.894.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Persentase kenaikan pelaku usaha yang memanfaatkan layanan keteknikan, penerapan, dan rekayasa	%	-	1,59	2,38		3,17		3,17		3,17		3,17		3,17		3,17	Balai Industri Logam Dan Kayu Kelas A
3.0 7.1 9	Pengembangan Produk Tekstil dan Alas Kaki						5.145.000,00		5.645.000,00		6.145.000,00		6.895.000,00		7.645.000,00		31.475.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
		Persentase peserta pelatihan yang diserap industri produk tekstil dan alas kaki	%	-	80,00	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00	Balai Industri Produk Tekstil Dan Alas Kaki Kelas A
3.0 8	TRANSMIGRASI						3.082.346,00		3.390.000,00		3.729.000,00		4.102.000,00		4.512.000,00		18.815.346,00		
3.0 8.1 5	Pengembangan Dan Penempatan Transmigrasi						3.082.346,00		3.390.000,00		3.729.000,00		4.102.000,00		4.512.000,00		18.815.346,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	
		Persentase penempatan transmigran terhadap animo transmigrasi	%	-	3,36	3,37		3,38		3,39		3,40		3,41		3,41		3,41	Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi PENTA
		Persentase kenaikan calon transmigran dilatih di bidang pertanian	%	-	3,36	3,37		3,38		3,39		3,40		3,41		3,41		3,41	Balai Pelatihan Kerja dan Transmigrasi Kelas A
4	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH						431.636.131,00		412.640.794,00		418.654.733,00		445.835.082,00		474.252.663,00		2.183.019.403,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
	AN																		
4.01	PERENCANAAN						16.184.990,00		16.973.400,00		17.787.250,00		18.641.050,00		19.567.900,00		89.154.590,00		
4.01.15	Perencanaan Pembangunan Ekonomi						2.500.000,00		2.625.000,00		2.756.250,00		2.895.250,00		3.035.000,00		13.811.500,00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD lingkup bidang perekonomian	%	-	-	90,00			90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		Bidang Perekonomian
		Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang perekonomian	%	-	-	90,00			90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		Bidang Perekonomian
4.01.16	Perencanaan Pemerintahan Dan Sosial Budaya						2.984.990,00		3.113.400,00		3.241.500,00		3.367.000,00		3.525.000,00		16.231.890,00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya	%	-	-	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
		Persentase ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD lingkup bidang pemerintahan, sosial, dan budaya	%	-	-	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya
4.0 1.1 7	Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Wilayah, Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup						3.000.000,00		3.150.000,00		3.307.500,00		3.472.800,00		3.645.500,00		16.575.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase konsistensi rencana antar dokumen (RKPD, Rentsra, RPJMD, dan RPJMN) lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya	%	-	-	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		alam dan lingkungan hidup																
		Persentase ketercapaian pelaksanaan program/kegiatan tahunan dengan sasaran RPJMD lingkup bidang infrastruktur wilayah, sumberdaya alam dan lingkungan hidup	%	-	-	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah
4.0 1.1 8	Perencanaan Pembangunan Daerah						7.700.000,00		8.085.000,00		8.482.000,00		8.906.000,00		9.362.400,00		42.535.400,00	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan yang disusun sesuai peraturan	%	-	-	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		Bidang Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab		
						2019		2020		2021		2022		2023						
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target	Rp. (000)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
		perundangan																		
4.0 2	KEUANGAN						91.640.8 86,00		97.140.8 86,00		104.140. 886,00		111.890. 886,00		120.640. 886,00		525.454.4 30,00			
4.0 2.1 5	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah						61.786.02 2,00		65.786.02 2,00		69.286.02 2,00		73.786.02 2,00		79.286.02 2,00		349.930.1 10,00		Badan Pengelola Pendapat- an Daerah	
		Persentase pemanfaatan informasi pendapatan daerah	%	-	-	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		Bidang Pengelolan Data dan Pengemban gan Pen- dapatan
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB	%	-	-	7,05		11,60		11,50		6,24		5,38		5,38		5,38		Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
		Persentase peningkatan penerimaan PKB	%	-	-	9,04		11,30		8,73		13,81		10,17		10,17		10,17		Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
		Persentase peningkatan kepatuhan wajib pajak	%	-	-	-		73,00		74,00		75,00		76,00		76,00		76,00		Bidang Pajak Kendaraan Bermotor
		Persentase peningkatan penerimaan PAP	%	-	-	15,17		24,89		8,40		7,75		8,41		8,41		8,41		Bidang Retribusi dan Pendapat- an Lain
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	%	-	-	19,96		2,02		10,59		10,60		11,85		11,85		11,85		Bidang Retribusi dan Pendapat- an Lain

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Kayada Dipisahkan	%	-	-	14,26		6,55		11,00		11,00		12,26		12,26		Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
		Persentase peningkatan penerimaan PBBKB	%	-	-	8,26		11,86		7,24		4,98		6,49		6,49		Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
		Persentase peningkatan penerimaan Pajak Rokok	%	-	-	7,42		7,48		8,64		6,25		12,08		12,08		Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
		Persentase peningkatan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	%	-	-	9,98		0,30		0,38		2,84		9,54		9,54		Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain
		Persentase pencapaian kinerja pendapatan daerah	%	-	-	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		Bidang Evaluasi dan Pembinaan
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang I	%	-	-	0,71		6,82		5,15		8,13		5,95		5,95		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang I	%	-	-	3,67		13,40		13,13		7,04		6,03		6,03		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Semarang I	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang I	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang I
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang II	%	-	-	9,65		11,86		8,96		14,12		10,34		10,34		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang II	%	-	-	4,02		7,10		6,98		3,74		3,20		3,20		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
		Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Semarang II	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang II	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang II
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Semarang III	%	-	-	1,78		14,80		11,18		17,63		12,91		12,91		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Semarang III	%	-	-	0,63		11,50		11,31		6,07		5,19		5,19		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
		Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Semarang III	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Semarang III	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Semarang III
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Semarang	%	-	-	24,73		12,30		9,29		14,65		10,73		10,73		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Semarang	%	-	-	10,21		14,20		13,94		7,48		6,40		6,40		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
		Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Semarang	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Semarang	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Semarang
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Salatiga	%	-	-	15,06		10,89		8,23		12,97		9,50		9,50		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Salatiga	%	-	-	11,66		6,00		17,50		17,19		9,22		7,89		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
		Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Salatiga	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Salatiga	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Salatiga
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kendal	%	-	-	2,70		12,80		9,67		15,24		11,16		11,16		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kendal
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD	%	-	-	6,87		14,60		14,30		7,67		6,56		6,56		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Kabupaten Kendal																	Kendal
		Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Kendal	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapata n Daerah Kabupaten Kendal	
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Kendal	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapata n Daerah Kabupaten Kendal	
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Demak	%	-	-	19,48		16,74		12,65		19,94		14,60		14,60		Unit Pelayanan Pendapata n Daerah Kabupaten Demak	
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Demak	%	-	-	15,48		14,00		13,72		7,35		6,29		6,29		Unit Pelayanan Pendapata n Daerah Kabupaten Demak	
		Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Demak	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapata n Daerah Kabupaten Demak	
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapata n Daerah Kabupaten Demak	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Kabupaten Demak																	
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Grobogan	%	-	-	11,02		11,75		8,88		14,00		10,25		10,25			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Grobogan	%	-	-	6,92		20,70		20,32		10,90		9,32		9,32			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Grobogan	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Grobogan	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Grobogan
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Surakarta	%	-	-	5,77		10,89		8,22		12,96		9,49		9,49			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota	%	-	-	3,61		13,80		13,50		7,24		6,19		9,00			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Surakarta																	Surakarta
		Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Surakarta	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Surakarta	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Surakarta
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Klaten	%	-	-	7,85		12,37		9,35		14,73		10,79		10,79			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Klaten	%	-	-	6,51		23,90		23,44		12,57		10,76		10,76			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
		Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Klaten	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		diUPPD Kabupaten Klaten																
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Sragen	%	-	-	9,31		12,44		9,40		14,82		10,85		10,85		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Sragen	%	-	-	15,37		7,70		7,53		4,04		3,45		3,45		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
		Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Sragen	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Sragen	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sragen
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	-	-	15,42		11,16		8,43		13,30		9,74		9,74		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Sukoharjo	%	-	-	10,79		12,80		12,52		6,71		5,74		5,74		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
		Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Sukoharjo	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Sukoharjo	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Sukoharjo
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Wonogiri	%	-	-	12,60		9,80		9,59		5,14		4,40		4,40		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
		Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Wonogiri	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Wonogiri	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Wonogiri	%	-	-	14,05		5,91		9,22		14,54		10,65		10,65		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonogiri
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Karanganyar	%	-	-	6,37		8,96		6,77		10,68		7,82		7,82		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Karanganyar	%	-	-	8,25		7,70		7,52		4,03		3,45		3,45		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Karanganyar	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Karanganyar	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Karanganyar
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Boyolali	%	-	-	7,61		13,72		10,37		16,34		11,97		11,97		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Boyolali	%	-	-	8,22		9,00		8,79		4,71		4,03		4,03		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
		Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Boyolali	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Boyolali	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Boyolali
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pati	%	-	-	17,32		13,90		13,58		7,28		6,23		6,23		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
		Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Pati	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Pati	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pati	%	-	-	13,01		12,21		9,22		14,54		10,65		10,65		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pati
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Blora	%	-	-	9,76		13,37		10,10		15,92		11,66		11,66		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Blora	%	-	-	11,07		17,30		16,92		9,07		7,77		7,77		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Blora	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,30		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Blora	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Blora
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Rembang	%	-	-	7,19		13,39		10,12		15,59		11,68		11,68		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten	%	-	-	6,40		25,90		25,42		13,63		11,66		11,66		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Rembang																	
		Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Rembang	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Rembang	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Rembang
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kudus	%	-	-	3,68		17,77		13,43		21,17		15,50		15,50			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kudus	%	-	-	9,97		7,60		7,46		4,00		3,42		3,42			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
		Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Kudus	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Kudus	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Jepara	%	-	-	6,85		11,76		8,88		14,00		10,25		10,25		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Jepara	%	-	-	5,86		12,40		12,11		6,49		5,56		5,56		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
		Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Jepara	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Jepara	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Pekalongan	%	-	-	12,53		13,23		10,00		15,76		11,54		11,54		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Pekalongan	%	-	-	6,12		12,10		11,89		6,38		5,46		5,46		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Pekalongan	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Pekalongan	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Pekalongan
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pekalongan	%	-	-	14,50		15,23		11,50		18,14		13,28		13,28		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pekalongan	%	-	-	1,51		5,60		5,53		2,97		2,54		2,54		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Pekalongan	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pekalongan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Kabupaten Pekalongan																	
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Batang	%	-	-	7,67		15,36		11,60		18,29		13,39		13,39			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Batang	%	-	-	2,10		15,60		15,32		8,21		7,03		7,03			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Batang	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Batang	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Batang
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Pemalang	%	-	-	8,02		13,17		9,95		15,68		11,48		11,48			Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Pemalang	%	-	-	0,75		7,60		7,48		4,01		3,43		3,43		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
		Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kabupaten Pemalang	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Pemalang	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Pemalang
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Tegal	%	-	-	20,45		11,68		8,82		13,91		10,19		10,19		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Tegal	%	-	-	2,53		6,50		6,40		3,43		2,94		2,94		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
		Persentase peningkatan penerimaan PAP diUPPD Kota Tegal	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kota Tegal	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Tegal

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Tegal	%	-	-	0,45		16,71		12,62		19,90		14,57		14,57		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Tegal	%	-	-	0,18		3,30		3,25		1,74		1,49		1,49		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Tegal	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Tegal	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Brebes	%	-	-	9,01		9,25		6,99		11,01		8,06		8,06		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Brebes	%	-	-	3,98		1,00		1,01		0,54		0,46		0,46		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Brebes	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Brebes	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Brebes
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Banyumas	%	-	-	7,55		8,88		6,71		10,57		7,74		7,74		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Banyumas	%	-	-	8,56		6,80		6,64		3,56		3,05		3,05		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banyumas	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Banyumas	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Cilacap	%	-	-	5,86		9,45		7,14		11,26		8,25		8,25		Unit Pelayanan Pendapata n Daerah Kabupaten Cilacap
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Cilacap	%	-	-	9,83		5,50		5,41		2,90		2,48		2,48		Unit Pelayanan Pendapata n Daerah Kabupaten Cilacap
		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Cilacap	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapata n Daerah Kabupaten Cilacap
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Cilacap	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapata n Daerah Kabupaten Cilacap
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Purbalingga	%	-	-	8,04		7,14		5,39		8,50		6,23		6,23		Unit Pelayanan Pendapata n Daerah Kabupaten Purbalingga
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Purbalingga	%	-	-	1,91		10,10		9,91		5,31		4,55		4,55		Unit Pelayanan Pendapata n Daerah Kabupaten Purbalingga

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purbalingga	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Purbalingga	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purbalingga
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	-	-	7,96		10,01		7,56		11,92		8,73		8,73		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	-	-	6,04		13,30		13,01		6,98		5,97		5,97		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Banjarnegara	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembanguna n	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggun g Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kota Magelang	%	-	-	37,62		6,77		5,12		8,07		5,91		5,91		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kota Magelang	%	-	-	0,55		19,10		18,75		10,05		8,60		8,60		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kota Magelang	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kota Magelang	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kota Magelang
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Magelang	%	-	-	13,82		9,91		7,48		11,80		8,64		8,64		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Magelang	%	-	-	16,10		7,90		7,70		4,13		3,53		3,53		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Magelang	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah diUPPD Kabupaten Magelang	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Magelang
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Kebumen	%	-	-	4,94		7,74		5,84		9,21		6,75		6,75		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Kebumen	%	-	-	6,34		9,10		8,92		4,78		4,09		4,09		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Kebumen	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Kebumen	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Purworejo	%	-	-	12,04		13,24		10,00		15,77		11,55		11,55		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Purworejo	%	-	-	11,83		17,40		17,05		9,14		7,82		7,82		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Purworejo	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Purworejo	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Purworejo
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Temanggung	%	-	-	11,10		9,58		7,24		11,41		8,35		8,35		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Temanggung	%	-	-	24,10		11,40		11,13		5,97		5,11		5,11		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Temanggung	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Temanggung	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Temanggung
		Persentase peningkatan penerimaan PKB di UPPD Kabupaten Wonosobo	%	-	-	8,39		12,42		9,38		14,79		10,83		10,83		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.
		Persentase peningkatan penerimaan BBNKB di UPPD Kabupaten Wonosobo	%	-	-	15,19		15,90		15,60		8,37		7,16		7,16		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.
		Persentase peningkatan penerimaan PAP di UPPD Kabupaten Wonosobo	%	-	-	15,00		13,04		11,54		10,34		9,38		9,38		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.
		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah di UPPD Kabupaten Wonosobo	%	-	-	10,59		10,59		10,59		10,60		10,59		10,59		Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Wonosobo.
4.0 2.1 6	Pengelolaan Keuangan Daerah						21.791.54 6,00		22.291.54 6,00		24.791.54 6,00		27.291.54 6,00		29.791.54 6,00		125.957.7 30,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Persentase kabupaten/kota yang menyusun APBD tepat waktu dan sesuai kaidah perundangan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Persentase penetapan APBD tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Bidang Anggaran
		Persentase penyampaian laporan keuangan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Bidang Akuntansi
		Persentase realisasi serapan APBD	%	90,00	92,00	92,00		92,00		92,00		92,00		95,00		95,00		95,00	Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah
4.0 2.1 7	Pengelolaan Aset Daerah						8.063.318,00		9.063.318,00		10.063.318,00		10.813.318,00		11.563.318,00		49.566.590,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		Persentase pemanfaatan aset daerah	%	57,50	60,00	62,50		65,00		67,50		70,00		72,50		72,50		72,50	Bidang Aset Daerah
4.0 3	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						115.385.784,00		74.836.177,00		59.784.913,00		63.172.819,00		68.306.488,00		381.486.181,00		
4.0 3.1 5	Penyelenggaraan Kepegawaian dan Perangkat Daerah						20.858.950,00		23.418.110,00		24.369.421,00		25.956.912,00		27.803.557,00		122.406.950,00	Badan Kepegawaian Daerah	
		Persentase pejabat Pimpinan Tinggi, Administrator, dan Pengawas yang	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		terevaluasi kinerjanya																	
		Persentase PNS yang meningkat kualifikasinya melalui tugas belajar dan ijin belajar	%	20,00	20,00	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00			Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
		Persentase layanan administrasi kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Bidang Mutasi
		Persentase penanganan kasus kepegawaian	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
		Persentase sistem informasi kepegawaian yang dikembangkan dan terintegrasi	%	20,00	20,00	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00			Bidang Informasi Kepegawaian
		Persentase PNS yang terpetakan kompetensinya	%	20,00	20,00	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00			Unit Penilaian Kompetensi ASN Kelas A
4.0 3.1 6	Perencanaan dan Pengendalian Mutu Pengembangan Kompetensi						2.205.212 ,00		2.439.429 ,00		2.683.374 ,00		2.622.548 ,00		2.884.805 ,00		12.835.36 8,00		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase perencanaan pengembangan kompetensi yang ditindaklanjuti	%	75,00	75,00	76,00		77,00		78,00		79,00		80,00		80,00		Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
		Indeks penjaminan mutu pelaksanaan pelatihan	Skor	3,50	3,50	3,50		3,50		3,50		3,50		3,50		3,50		Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
4.0 3.1 7	Pengembangan Kompetensi ASN						91.597.170,00		48.300.608,00		32.066.520,00		33.886.608,00		36.867.377,00		242.718.283,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi teknis	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis
		Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi fungsional	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional
		Persentase ASN yang lulus pengembangan kompetensi manajerial	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
		Persentase ASN yang lulus Latsar CPNS	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial
4.0 3.1 8	Sertifikasi Kompetensi ASN						724.452,00		678.030,00		665.598,00		706.751,00		750.749,00		3.525.580,00	Badan Pengembangan Sumber Daya

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
																			Manusia Daerah
		Persentase PNS yang lulus uji kompetensi	%	90,00	90,00	90,00		90,00		90,00		90,00		90,00		90,00			Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Penjaminan Mutu
4.04	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						12.195.924,00		13.447.500,00		13.914.875,00		14.403.165,00		15.638.825,00		70.420.289,00		
4.04.15	Kelitbangan Iptek dan Inovasi Daerah						12.195.924,00		13.447.500,00		13.914.875,00		14.403.165,00		15.638.825,00		70.420.289,00		Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		Persentase implementasi riset dan pengembangan	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Bidang Riset dan Pengembangan
		Persentase inovasi dan teknologi yang diterapkan	%	-	-	75,00		75,00		75,00		75,00		75,00		75,00			Bidang Inovasi dan Teknologi
4.05	PENGAWASAN						17.110.346,00		19.100.000,00		21.200.000,00		22.814.000,00		24.004.435,00		104.228.781,00		

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4.0 5.1 5	Pengawasan Intern Pemerintah dan Penanganan Aduan Masyarakat						12.250.448,00		13.500.000,00		15.320.000,00		16.640.000,00		17.522.000,00		75.232.448,00	Inspektorat
		Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah III	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Irbanwil III
		Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah III	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Irbanwil III
		Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah III	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Irbanwil III
		Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah I	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Irbanwil I
		Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah I	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Irbanwil I
		Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah I	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Irbanwil I

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Irbansus
		Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Irbansus
		Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Irbansus
		Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan wilayah II	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Irbansus
		Persentase obyek pemeriksaan yang dilakukan pengawasan lainnya wilayah II	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Irbansus
		Persentase pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan wilayah II	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Irbansus
4.0 5.1 8	Peningkatan Profesionalisme dan Kompetensi APIP						200.000,00		350.000,00		367.500,00		385.875,00		405.170,00		1.708.545,00	Inspektorat
		Persentase APIP berlisensi nasional/internasional	%	-	-	20,00		40,00		60,00		80,00		100,00		100,00		Inspektorat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
4.0 5.2 0	Pembangunan Budaya Integritas						2.036.295,00		2.200.000,00		2.310.000,00		2.425.500,00		2.546.775,00		11.518.570,00	Inspektorat
		Nilai Budaya Integritas	%	-	-	75,00		80,00		83,00		85,00		90,00		90,00		Inspektorat
4.0 5.2 1	Peningkatan Manajemen Mutu						1.346.573,00		1.550.000,00		1.627.500,00		1.708.875,00		1.794.050,00		8.026.998,00	Inspektorat
		Indeks Kepuasan Pelanggan Kriteria Puas	Angka	87,35	87,35	87,35		87,35		87,35		87,35		87,35		87,35		Inspektorat
4.0 5.2 2	Program Manajemen Resiko						1.277.030,00		1.500.000,00		1.575.000,00		1.653.750,00		1.736.440,00		7.742.220,00	Inspektorat
		Persentase OPD yang memiliki profil manajemen risiko	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Inspektorat
4.0 6	FUNGSI LAINNYA						179.323.201,00		191.142.831,00		201.826.809,00		214.913.162,00		226.094.129,00		1.012.275.132,00	
4.0 6.1 5	Peningkatan Sinergi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						6.851.088,00		7.701.250,00		8.428.000,00		9.495.000,00		10.678.000,00		43.373.338,00	Sekretariat Daerah
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Pemerintahan	%	-	-	85,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
		Persentase naskah kerjasama yang ditindaklanjuti	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

Ko de	Bidang Urusan Pemerintah n dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset Perencanaan, Keuangan, Pendapatan dan Aset	%	-	-	85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		85,00		Biro Administrasi Pembangunan Daerah
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Infrastruktur	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang keagamaan	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Biro Kesejahteraan Rakyat
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Biro Kesejahteraan Rakyat
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM	%	100,00	90,00	80,00		85,00		90,00		93,00		96,00		96,00			Biro Perekonomian Daerah
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan penguatan dan efisiensi BUMD	%	100,00	90,00	83,00		85,00		88,00		90,00		93,00		93,00			Biro Perekonomian Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Persentase Hasil Ringkas Kebijakan (Policy Brief) yang diusulkan sebagai kebijakan bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata	%	100,00	90,00	80,00		80,00		80,00		80,00		80,00		80,00			Biro Perekonomian Daerah
4.0 6.1 6.6	Penataan Peraturan Perundang-Undangan						1.980.000,00		2.216.000,00		2.316.000,00		2.416.000,00		2.516.000,00		11.444.000,00		Sekretariat Daerah
		Persentase rancangan produk hukum daerah yang dihasilkan sesuai kaidah pembentukan perundang-undangan	%	-	-	90,00		91,00		92,00		93,00		94,00		94,00			Biro Hukum
		Persentase efektifitas produk hukum daerah	%	-	-	90,00		91,00		92,00		93,00		94,00		94,00			Biro Hukum
4.0 6.1 7	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Daerah						34.524.000,00		35.573.300,00		36.482.670,00		37.884.029,00		38.705.201,00		183.894.200,00		Sekretariat Daerah
		Persentase OPD yang pelaksanaan APBDnya sesuai target	%	-	-	85,00		87,00		88,00		89,00		90,00		90,00			Biro Administrasi Pembangunan Daerah
		Persentase Kegiatan Bantuan Keuangan yang pelaksanaann	%	-	-	80,00		82,00		83,00		84,00		85,00		85,00			Biro Administrasi Pembangunan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		ya sesuai target																	
		Persentase OPD dan Kabupaten/ Kota tertib pelaporan pelaksanaan APBD dan Bankeu	%	-	-	87,00		87,00		88,00		88,00		88,00		88,00		Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
		Persentase Ketepatan waktu penyerahan LKPJ kepada DPRD	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Biro Administrasi Pembangunan Daerah	
		Persentase kegiatan strategis bidang Infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaannya	%	-	-	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	
		Persentase kegiatan strategis bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaannya	%	-	-	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase kegiatan strategis bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaannya	%	-	-	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
		Persentase kegiatan strategis bidang keagamaan yang dievaluasi pelaksanaannya	%	-	-	85,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		Biro Kesejahteraan Rakyat
		Persentase kegiatan strategis Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaannya	%	-	-	85,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		Biro Kesejahteraan Rakyat
		Persentase kegiatan strategis bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang	%	-	-	85,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		dievaluasi pelaksanaannya																
		presentase OPD yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	%	-	-	39,00		45,00		51,00		57,00		63,00		63,00		Biro Organisasi
		Persentase OPD yang efektif dalam implementasi ANJAB	%	75,00	80,00	83,00		84,00		85,00		85,00		86,00		86,00		Biro Organisasi
		Persentase UPP yang mengimplemtasikan standar pelayanan	%	-	8,94	9,65		22,12		34,59		47,06		59,53		59,53		Biro Organisasi
		Persentase OPD yang mematuhi kebijakan ketatalaksanaan	%	50,00	50,00	52,29		67,99		78,59		89,19		100,00		100,00		Biro Organisasi
		Persentase OPD yang nilai Sistem AKIP-nya Baik (B keatas)	%	60,00	64,00	68,00		74,00		83,00		92,00		100,00		100,00		Biro Organisasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Kabupaten/ Kota yang capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi yang nilainya meningkat	%	14,00	14,00	28,00		42,00		57,00		71,00		85,00		85,00		Biro Organisasi
		presentase Kabupaten/ Kota yang mencapai skor kematangan organisasi minimal 15	%	-	-	14,00		23,00		31,00		40,00		48,00		48,00		Biro Organisasi
		Persentase capaian sasaran dan area Reformasi Birokrasi Provinsi yang nilainya meningkat	%	70,00	73,00	78,00		82,00		87,00		92,00		97,00		97,00		Biro Organisasi
		Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten/ Kota yang dikaji	%	-	-	90,00		91,00		92,00		93,00		94,00		94,00		Biro Hukum
		Persentase produk hukum yang diinformasikan tiap tahun	%	-	-	90,00		91,00		92,00		93,00		94,00		94,00		Biro Hukum
		Persentase Bantuan Hukum dan Sengketa Hukum	%	-	-	90,00		91,00		92,00		93,00		94,00		94,00		Biro Hukum

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase kabupaten/kota peduli HAM	%	-	-	90,00		91,00		92,00		93,00		94,00		94,00		Biro Hukum
		Persentase kegiatan strategis bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100,00	90,00	85,00		89,00		90,00		93,00		95,00		95,00		Biro Perekonomian Daerah
		Persentase ketercapaian peningkatan laba BUMD sesuai target	%	100,00	88,00	85,00		90,00		92,00		96,00		98,00		98,00		Biro Perekonomian Daerah
		Persentase kegiatan strategis bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaannya	%	100,00	88,00	87,00		90,00		93,00		95,00		97,00		97,00		Biro Perekonomian Daerah
		Persentase Keberhasilan Pengadaan Barang/Jasa	%	-	-	90,00		91,00		92,00		93,00		95,00		95,00		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
		Persentase Efektivitas Sistem Informasi pengadaan barang/jasa	%	-	-	70,00		73,00		76,00		79,00		80,00		80,00		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase Aduan dan Sengketa yang tertangani	%	-	-	70,00		73,00		76,00		79,00		80,00		80,00		Biro Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa
4.0 6.1 8	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Perangkat Daerah						3.573.000,00		4.060.000,00		4.985.000,00		5.495.000,00		5.995.000,00		24.188.000,00	Sekretariat Daerah
		Persentase Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Biro Administrasi Pembangunan Daerah
		Presentase perangkat daerah bidang infrastruktur yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	-	-	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
		Presentase perangkat daerah bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Energi Sumber Daya Mineral yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	-	-	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Presentase perangkat daerah bidang Ketahanan pangan, Kelautan perikanan dan Pertanian yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	-	-	80,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam
		Persentase perangkat daerah bidang Pendidikan, Kebudayaan, Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	-	-	85,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		Biro Kesejahteraan Rakyat
		Persentase perangkat daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat, Keluarga Berencana, Kepemudaan dan Olahraga yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	-	-	85,00		85,00		90,00		95,00		100,00		100,00		Biro Kesejahteraan Rakyat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						2019		2020		2021		2022		2023				
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
		Persentase perangkat daerah bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Biro Umum
		Persentase perangkat daerah bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100,00	90,00	80,00		83,00		85,00		89,00		90,00		90,00		Biro Perekonomian Daerah
		Persentase tingkat kesehatan BUMD	%	100,00	90,00	80,00		82,00		85,00		88,00		90,00		90,00		Biro Perekonomian Daerah
		Persentase perangkat daerah bidang Perhubungan, Penanaman Modal dan Pariwisata yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	100,00	92,00	82,00		85,00		87,00		90,00		92,00		92,00		Biro Perekonomian Daerah
4.0 6.1 9	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah						2.134.729,00		2.630.200,00		3.030.200,00		3.330.200,00		3.530.200,00		14.655.529,00	Sekretariat Daerah
		Persentase tertib administrasi pemerintahan	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Persentase pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang sesuai kewenangan di Provinsi Jawa Tengah	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
4.0 6.2 0	Peningkatan Pelaksanaan Otonomi Daerah						2.685.290,00		3.000.000,00		3.500.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00			17.685.290,00	Sekretariat Daerah
		Persentase rata-rata ketercapaian IKK penyelenggaraan pemerintahan daerah	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
		Persentase fasilitasi dokumen administrasi Kepala Daerah dan PAW Anggota DPRD	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama
4.0 6.2 1	Pelayanan Umum, Keprotokolan, dan Kehumasan						25.690.000,00		26.060.000,00		27.230.000,00		28.400.000,00		29.570.000,00			134.900.000,00	Sekretariat Daerah
		Persentase Keterlaksanaan Kegiatan bidang keagamaan di Pemprov Jawa Tengah	%	-	-	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Biro Kesejahteraan Rakyat
		Persentase layanan liputan dan keprotokolan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Biro Umum

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Satuan	Kondisi Kinerja Awal (2017/2018)		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						2019		2020		2021		2022		2023					
				2017	2018	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)	Target	Rp. (000)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	
		Persentase pemenuhan pelayanan umum Rumah Tangga Pimpinan	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Biro Umum
4.0 6.2 2	Peningkatan Layanan Kedewanan						97.545.094,00		105.163.581,00		110.879.939,00		118.717.933,00		125.289.728,00		557.596.275,00		Sekretariat DPRD
		Persentase layanan bagian humas	%	-	-	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00			Bagian Humas
		Persentase layanan bagian persidangan	%	-	-	95,00		95,00		95,00		95,00		95,00		95,00			Bagian Persidangan
4.0 6.2 3	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat						1.915.000,00		2.181.500,00		2.275.000,00		2.375.000,00		2.460.000,00		11.206.500,00		Badan Penghubung
		Persentase ketercapaian pelayanan aparatur dan masyarakat	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Badan Penghubung
4.0 6.2 4	Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya						2.425.000,00		2.557.000,00		2.700.000,00		2.800.000,00		2.850.000,00		13.332.000,00		Badan Penghubung
		Persentase kabupaten/kota yang difasilitasi dalam promosi produk unggulan, dan pelestarian seni budaya.	%	100,00	100,00	100,00		100,00		100,00		100,00		100,00		100,00			Badan Penghubung
	Total						7.826.521.046,00		8.417.918.684,00		9.120.015.000,00		8.944.360.000,00		8.777.727.000,00		42.653.749.208,00		

Keterangan:

- *Terdapat program dalam beberapa urusan yang berbeda antara tahun 2019 dan 2020-2023, berdasarkan pada hasil verifikasi, seperti urusan Kepemudaan dan Olahraga, Urusan Pariwisata, Urusan Kesehatan*

BAB IX

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah, indikator kinerja utama perangkat daerah yang menggambarkan kinerja kepala perangkat daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang menggambarkan kinerja seluruh perangkat daerah.

9.1. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 sebagai berikut.

Tabel 9.1.

Indikator Kinerja Utama Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Indikator Kinerja Utama Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Capaian					Perangkat Daerah Koordinator
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase penurunan konflik SARA	%	17,64	na	15	15	15	15	15	Sekretariat Daerah
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	76,53	74,49	75,5	77	78	79	80	Sekretariat Daerah
3	Angka Kemiskinan	%	12,23	11,19	10,57-9,57	9,81-8,81	9,05-8,05	8,27-7,27	7,48-6,48	Sekretariat Daerah
4	Indeks Gini	Angka	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,30	Sekretariat Daerah
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,57	4,51	4,43	4,33	4,23	4,13	4,00	Sekretariat Daerah
6	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,26	5,32	5,3-5,7	5,4-5,7	5,4-5,8	5,5-5,8	5,6-6,0	Sekretariat Daerah
7	Inflasi	%	3,71	2,82	3,5±1	3,0±1	3,0±1	3,0±1	3,0±1	Sekretariat Daerah
8	PDRB per kapita	Juta Rupiah	34,23	36,78	37,44	39,25	41,15	43,2	45,35	Sekretariat Daerah
9	Indeks Williamson	Angka	0,62	na	0,6	0,59	0,58	0,57	0,56	Sekretariat Daerah
10	Nilai Tukar Petani	Angka	100,4	102,25	101,2	102,42	102,72	102,96	103,15	Sekretariat Daerah
11	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,52	na	71,6	72	72,5	72,7	73	Sekretariat Daerah
12	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	91,94	na	92	92,06	92,12	92,18	92,25	Sekretariat Daerah
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	66,33	66,51	66,69	66,87	67,02	67,14	67,26	Sekretariat Daerah

9.2. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator kinerja utama perangkat daerah merupakan indikator kinerja yang menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Indikator ini berada pada level *intermediate outcome*, yang menghubungkan kinerja program dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU PD ini akan menjadi dasar penilaian kinerja organisasi setiap tahunnya.

Tabel 9.2.

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi Akademik	%	82,15	86,5	87,5	89,5	90,75	91,5	91,55	91,55
2		Persentase Jenis seni budaya yang terlayani	%	2,84	3,15	3,5	4,7	5,9	6,2	6,82	6,82
3		Disparitas APK SMA/SMK/SLB	%	7,38	7,37	7,28	7,25	7,1	7	6,79	6,79
4		Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar	%	72,14	76,01	77,07	77,98	78,79	79,59	80,43	80,43
5		Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB	Angka	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
6	Dinas Kesehatan	AKI	100.000/ KH	88,58	88	87	85,5	84	82,5	81	81
7		Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	Angka	0,16	0,18	0,2	0,23	0,26	0,29	0,32	0,32
8		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	43	43	45	51	57	63	69	69

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
9		Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
10		Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa	%	40	45	50	52	54	57	60	60
11		Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	42	47	52	57	62	67	72	72
12		AKABA	1.000/KH	10,47	10,47	10,47	10,45	10,45	10,45	10,43	10,43
13		AKB	1.000/KH	8,93	8,5	8,3	8,1	8	7,9	7,8	7,8
14	RSUD Dr. Moewardi	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	77,86	77,54	80	81	82	83	84	84
15	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	82,16	87,57	87,59	87,61	87,63	87,65	87,67	87,67
16	RSUD Tugurejo	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	91,21	84,44	85	85	85	90	90	90
17	RSUD Kelet Donorejo	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	92,23	80	80	80	85	90	95	95
18	RSJD Dr. Amino Gondohutomo	Persentase capaian standar pelayanan minimal (SPM)	%	99,5	99,79	90	100	100	100	100	100
19	RSJD Surakarta	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	95,94	98,06	98,08	98,1	98,12	98,15	98,17	98,17

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
20	RSJD Dr. RM. Soedjarwadi	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	79,55	81,8	80	85	90	95	100	100
21	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	9,14	10,15	11,17	12,18	13,2	14,21	15,23	15,23
22		Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik	%	77,46	77,59	37,91	39,16	41,12	42,43	44,24	44,24
23		Persentase akses aman air aman perkotaan	%	80,98	84,15	86,15	88,15	90,15	92,15	94,15	94,15
24		Persentase akses aman air aman perdesaan	%	72,8	74,55	76,3	78,05	79,8	81,55	83,3	83,3
25		Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik	%	88,92	89,6	90,2	90,8	91,5	92	92,5	92,5
26	Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	Tingkat pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	%	59,77	61,39	62,6	63,87	65,14	66,41	67,69	67,69
27		Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	%	50,81	52,67	53,45	54,24	55,04	55,83	56,62	56,62
28		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR	%	68,73	70,12	71,75	73,5	75,25	77	78,75	78,75

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
29	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni	%	na	na	2,9	5,95	15,35	24,76	34,16	34,16
30		Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100
31		Persentase penurunan kawasan kumuh	%	na	na	77,12	71,03	63,97	56,9	49,83	49,83
32	Satuan Polisi Pamong Praja	Persentase kab/kota yang kondusif	%	na	na	100	100	100	100	100	100
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	%	75	75	80	81	83	86	90	90
34		Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	%	75	75	80	81	83	86	90	90
35	Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
36		Indeks Ketahanan Daerah	Angka	3,5	3,5	3,52	3,54	3,56	3,58	3,6	3,6
37		Persentase penambahan kapasitas PB diwilayah rawan bencana	%	na	na	10	10	10	10	10	50
38		Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	%	na	na	5	5	5	5	5	25

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
39		Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
40	Dinas Sosial	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	%	na	na	0,47	0,95	1,42	1,9	2,37	97,63
41		Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan yang melaksanakan UKS	%	na	na	8,97	17,93	26,9	35,87	44,83	44,83
42	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	67,84	68,5	69,04	69,54	70,09	70,47	71,01	71,01
43		Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	91,38	92,11	90	92,5	93	95,5	96	96
44		Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Rp/Juta)	%	52,01	54,57	54,58	54,59	54,6	54,61	54,62	54,62
45		Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	6,19	6,49	6,89	7,09	7,39	7,89	8,19	8,19
46		Persentase pengangguran yang ditangani	%	25,64	20,65	24,05	25,86	27,37	28,15	28,55	28,55
47		Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	98,25	97,56	94,86	92,09	89,26	86,21	82,97	82,97
48		Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	%	50	53	56	59	62	65	68	68
49		Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	%	86,48	86,96	87,11	87,26	87,41	87,56	87,7	87,7

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
50	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	Angka	76,89	74,69	75	75,1	75,25	75,5	76	76
51		Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	20	22,86	22,86	25,71	28,57	31,43	34,29	34,29
52		Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	7,24	8,2	8,16	8,13	8,09	8,05	8,02	8,02
53		Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,3	na	2,26	2,24	2,22	2,2	2,18	2,18
54		Persentase Keluarga Pra Sejahtera	%	22,14	22,14	21,64	21,14	20,64	20,14	19,64	19,64
55		Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	33,13	na	34,18	34,21	34,24	34,27	34,3	34,3
56		Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,51	8,44	8,37	8,29	8,22	8,15	8,07	8,07
57		Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak	%	60	82,86	82,86	85,71	88,57	91,43	100	100
58		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	75,1	na	75,12	75,14	75,16	75,18	75,2	75,2
59	Dinas Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	86,41	87,3	87,36	87,72	88,08	88,44	88,8	88,8
60		PPH Ketersediaan	Angka	85,3	85,3	82,5	82,75	83	83,25	83,5	83,5

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
61		Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi)	kkal/kapita/hari	2.149,50	2.090,17	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
62		Angka Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein)	Gram/kapita/hari	61,3	63,7	57	57	57	57	57	57
63	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76
64		Kontribusi subsektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
65		Indeks Pencemar SO2 dan NO2	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
66		Indeks Pencemaran Air	%	3,46	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
67		Indeks Kualitas udara	%	83,91	84,21	84,51	84,71	84,91	85,01	85,11	85,11
68		Indeks Kualitas Air	%	48,17	48,47	48,77	49,17	49,47	49,77	50,07	50,07
69		Pertumbuhan PDRB Subsektor Kehutanan	%	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
70		Luas Tutupan Lahan (LTV)	km2	16.555,86	16.555,86	16.555,86	16.555,86	16.555,86	16.555,86	16.555,86	16.555,86
71	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	na	na	12,99	16,3	17,86	18,25	20,35	20,35
72		Cakupan masyarakat yang terlayani administrasi kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
73	Dinas Perhubungan	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	5,92	6,08	8,69	21,22	31,36	41,82	51,45	51,45
74		Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	29,84	30,34	34,75	42,12	49,08	54,46	60,38	60,38
75		Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	26,67	26,67	33,33	40	46,67	53,33	66,67	66,67
76	Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Domain Tata Kelola SPBE.	Angka	2,3	2,3	2,4	2,51	2,61	2,71	2,82	2,82
77		Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE.	Angka	2,69	2,69	2,82	2,94	3,06	3,18	3,3	3,3
78		Indeks Domain Layanan SPBE.	Angka	2,93	2,93	3,06	3,2	3,33	3,46	3,6	3,6
79		Laju Pemanfaatan Data Sektoral.	%	na	8,21	15,18	30,36	45,54	60,72	75,9	75,9
80		Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI)	Angka	na	1	1	1	2	2	3	3
81	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	13,79	16,68	18,78	21,08	23,68	26,58	29,68	29,68
82		Persentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	16	18,22	20,5	22,8	25,3	27,7	29,95	29,95

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
83	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Realisasi PMA dan PMDN	%	124	126	100	100	100	100	100	100
84		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	87,64	84,65	90	90	90	90	90	90
85	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata	Indeks Pembangunan Keolahragaan	%	0,55	0,55	0,58	0,6	0,61	0,63	0,65	0,65
86		Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata	%	3,13	3,15	3,17	3,19	3,21	3,23	3,25	3,25
87		Indeks Pembangunan Pemuda	%	50,17	50,17	50,2	50,25	50,28	50,3	50,35	50,35
88	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Persentase Sistem Pengelolaan Kearsipan yang terintegrasi	%	na	na	21	43	64	85	100	100
89		Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	na	na	24	48	64	79	100	100
90	Dinas Kelautan dan Perikanan	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	29,19	30,65	30,5	31,27	32,05	32,85	33,67	33,67
91		Produksi Perikanan	Ton	923.626,34	956.601,65	857.758,41	900.646	945.678,64	992.962,58	1.042.610,71	1.042.610,71
92	Dinas Pertanian dan Perkebunan	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (bawang merah)	Ton	476.337	507.268	528.537	550.276	572.016	593.756	615.495	2.860.080

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
93		Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (padi)	Ton	11.396.629	11.401.629	11.543.015	11.629.588	11.716.810	11.804.686	11.893.221	58.587.320
94		Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (cabe besar)	Ton	195.571	197.266	200.836	209.232	217.628	226.024	234.420	1.088.141
95		Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (kedelai)	Ton	105.553	130.525	102.726	104.940	107.201	109.512	111.872	536.251
96		Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (jagung)	Ton	3.577.507	3.688.477	3.660.360	3.675.002	3.689.702	3.704.460	3.719.278	18.448.802
97		Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (kelapa)	Ton	158.302	158.299	164.248	165.069	165.895	166.724	167.558	829.495
98		Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (kopi)	Ton	15.097	17.456	20.482	21.019	21.556	22.093	22.629	107.780

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
99		Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (tebu)	Ton	2.904.903	2.638.785	2.934.025	2.948.695	2.963.438	2.978.255	2.993.147	14.817.560
100	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah Produksi Susu	Kg	99.606.547	101.511.053	101.460.171	101.561.631	101.663.192	101.764.855	101.866.620	101.866.620
101		Jumlah Produksi Telur	Kg	301.941.582	312.420.004	310.234.990	315.144.165	315.686.596	320.610.319	325.083.370	325.083.370
102		Jumlah Produksi Daging	Kg	332.527.494	359.988.398	315.873.883	325.436.369	340.041.606	355.690.105	375.382.386	375.382.386
103	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	9,56	10,8	11,1	11,6	12,94	14,85	15,96	15,96
104		Persentase Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi	%	61,58	64,23	65	65,5	66	66,5	67	67
105		Indeks ketersediaan air tanah	Angka	3,42	3,06	3,05	3,03	3,02	3	2,99	2,99
106		Rasio ketersediaan daya listrik	Angka	1,18	1,12	1	1	1	1	1	1
107	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Industri	%	4,35	4,61	4,85	5,1	5,35	5,65	5,85	5,85
108		Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	6,1	5,22	6,98	7,32	7,76	8,2	8,64	8,64
109	Sekretariat Daerah	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	na	na	100	100	100	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
110		Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	%	na	na	80	85	90	93	96	96
111		Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	%	na	na	90	91	92	93	94	94
112		Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	%	na	na	81	87	92	93	94	94
113		Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	%	na	na	80	82	83	84	85	85
114		Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	%	na	na	80	82	83	84	85	85
115		Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	%	na	na	80	81	82	83	84	84
116		Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	%	na	na	90	91	92	93	94	94
117		Persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	%	na	na	90	91	92	93	94	94
118		Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	%	na	na	90	91	92	93	94	94
119		Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Skor	na	na	19	22	25	28	31	31

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
120		presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	%	na	na	52,1	64,32	76,48	88,64	100	100
121		Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	%	70	73	73	78	82	87	92	92
122		Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	%	11	11,4	25	40	54	70	85	85
123		Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	%	na	na	80	84	88	92	96	96
124		Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	na	na	85	85	85	85	85	85
125		Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	%	na	na	85	89	90	93	95	95
126		Persentase Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	%	na	na	60	63	65	67	70	70
127		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%	na	na	85	85	85	85	85	85

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
128		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	%	na	na	80	84	88	92	96	96
129		Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	%	na	na	85	85	85	85	85	85
130		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	%	na	na	85	85	85	85	85	85
131		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	%	na	na	100	100	100	100	100	100
132		Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	%	na	na	100	100	100	100	100	100
133		Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	%	na	na	100	100	100	100	100	100

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
134		Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	na	na	75	76	77	78	79	80
135		Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	%	na	na	70	75	80	85	90	90
136		Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	%	na	na	85	85	85	85	85	85
137		Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	%	na	na	85	85	85	85	85	85
138		Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	%	na	na	75	76	77	78	79	80
139		Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	na	na	80	81	82	83	84	84
140		Persentase Kebijakan yang Efektif	%	na	na	80	81	82	83	84	84
141	Sekretariat DPRD	Indeks Kepuasan Atas Kualitas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah.	%	na	na	71	72	73	74	75	75
142	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase hasil kelitbangan iptekin yang sesuai dengan program perencanaan pembangunan daerah	%	na	na	90	90	90	90	90	90

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
143		Persentase Konsistensi , keselarasan dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah	%	na	na	90	90	90	90	90	90
144		Persentase perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	%	na	na	90	90	90	90	90	90
145	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan pajak daerah	%	na	na	8,05	10,77	9,25	8,82	8,59	8,59
146		Persentase peningkatan penerimaan Retribusi dan Pendapatan lain	%	na	na	11,35	1,73	3,3	5,24	10,37	10,37
147	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	Persentase pemanfaatan aset	%	na	60	62,5	65	67,5	70	72,5	72,5
148		Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai kaidah perundangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
149	Badan Kepegawaian Daerah	Persentase distribusi penempatan PNS dalam Jabatan	%	na	100	100	100	100	100	100	100
150		Persentase Pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	na	100	100	100	100	100	100	100
151	Inspektorat	Level 3 penuh Kapabilitas APIP	Nilai	3	3	3	3	3	3	3	3
152	Inspektorat	Nilai 3,5 Maturitas SPIP	Nilai	3,02	3,02	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5

No	Perangkat Daerah	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	Satuan	Kondisi Awal Kinerja		Target Tahun					Kondisi Akhir Kinerja
				2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
153	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	%	na	35	35,01	35,03	35,05	35,06	35,08	35,08
154	Badan Penghubung	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	na	na	82	82	83	84	85	85

9.3. Indikator Kinerja Daerah

Indikator kinerja daerah merupakan indikator kinerja yang ditetapkan sebagai ukuran kinerja seluruh penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, yang merupakan seluruh indikator tujuan dan sasaran pencapaian misi, serta IKU OPD. Indikator kinerja daerah adalah sebagai berikut.

Tabel 9.3.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
1	Angka Kemiskinan	%	12,23	11,19	10,57-9,57	9,81-8,81	9,05-8,05	8,27-7,27	7,48-6,48	7,48-6,48
2	Indeks Gini	Angka	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,3	0,3
3	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,26	5,32	5,3-5,7	5,4-5,7	5,4-5,8	5,5-5,8	5,6-6,0	5,6-6,0
4	Inflasi	%	3,71	2,82	3,5±1	3,0±1	3,0±1	3,0±1	3,0±1	3,0±1
5	PDRB per kapita	Juta Rupiah	34,23	36,78	37,44	39,25	41,15	43,2	45,35	45,35
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	70,52	0	71,6	72	72,5	72,7	73	73
7	Persentase penduduk miskin perkotaan	%	10,55	9,67	9,54	9,44	9,37	9,21	9,17	9,17
8	Persentase penduduk miskin perdesaan	%	13,92	12,8	12,74	12,65	12,35	12,12	11,97	11,97
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,57	4,51	4,43	4,33	4,23	4,13	4	4
10	Indeks Williamson	Angka	0,62	0	0,6	0,59	0,58	0,57	0,56	0,56
11	Pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	%	1,66	2,63	2,9	2,9	3	3	3,1	3,1
12	Pertumbuhan sektor industri pengolahan	%	4,33	4,35	4,85	5,1	5,35	5,6	5,65	5,65
13	Pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa	%	6,01	5,7	5,67	5,67	5,7	5,7	5,9	5,9
14	Pertumbuhan kontribusi pariwisata pada PAD	%	3	3	3,15	3,15	3,15	3,2	3,2	3,2
15	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	7,27	na	7,31	7,34	7,37	7,41	7,45	7,45
16	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,57	na	12,84	12,92	13	13,08	13,17	13,17

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
17	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,08	na	74,09	74,09	74,1	74,1	74,1	74,1
18	Pertumbuhan investasi	%	34,98	15	9	9	9	10	10	10
19	Persentase tenaga kerja kelompok RT 20% berpenghasilan terendah yang bekerja kurang dari 15 jam per minggu	%	5,71	na	5,7	5,65	5,6	5,55	5,5	5,5
20	Pengeluaran per kapita per bulan kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Ribu Rupiah	451,28	na	464,81	478,76	493,12	507,91	523,15	523,15
21	Angka Partisipasi Sekolah jenjang menengah kelompok RT 20% berpenghasilan terendah	Angka	60,83	na	60,85	61	61,25	61,5	61,75	61,75
22	Persentase kelompok RT 20% berpenghasilan terendah dengan keluhan kesehatan	%	30,86	na	30,75	30,5	30,25	30	29,75	29,75
23	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Angka	91,94	na	92	92,06	92,12	92,18	92,25	92,25
24	Nilai Tukar Petani	Angka	100,4	102,25	101,2	102,42	102,72	102,96	103,15	103,15
B	Aspek Pelayanan Umum									
	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR									
	PENDIDIKAN									
1	Disparitas APK SMA/SMK/SLB	%	7,38	7,37	7,28	7,25	7,1	7	6,79	6,79
2	Persentase Sarpras SMA/SMK/SLB sesuai standar	%	72,14	76,01	77,07	77,98	78,79	79,59	80,43	80,43
3	Rasio Guru terhadap Rombongan Belajar pada SMA/SMK/SLB	Angka	0,05	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08	0,08
4	Persentase Guru SMA/SMK/SLB memenuhi kualifikasi Akademik	%	82,15	86,5	87,5	89,5	90,75	91,5	91,55	91,55

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KESEHATAN									
5	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	91,21	84,44	85	85	85	90	90	90
6	Persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	95,94	98,06	98,08	98,1	98,12	98,15	98,17	98,17
7	Persentase capaian standar pelayanan minimal (SPM)	%	99,5	99,79	90	100	100	100	100	100
8	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	92,23	80	80	80	85	90	95	95
9	AKI	100.000/KH	88,58	88	87	85,5	84	82,5	81	81
10	AKB	1.000/KH	8,93	8,5	8,3	8,1	8	7,9	7,8	7,8
11	AKABA	1.000/KH	10,47	10,47	10,47	10,45	10,45	10,45	10,43	10,43
12	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular	%	42	47	52	57	62	67	72	72
13	Persentase ketercapaian upaya pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan jiwa	%	40	45	50	52	54	57	60	60
14	Persentase pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan atau berpotensi bencana provinsi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
15	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	77,86	77,54	80	81	82	83	84	84
16	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	82,16	87,57	87,59	87,61	87,63	87,65	87,67	87,67
17	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	%	79,55	81,8	80	85	90	95	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
18	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai ketentuan	%	43	43	45	51	57	63	69	69
19	Indeks Keluarga Sehat Wilayah Provinsi	Angka	0,16	0,18	0,2	0,23	0,26	0,29	0,32	0,32
	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG									
20	Persentase Panjang Jalan provinsi sesuai standar jalan kolektor baik	%	77,46	77,59	37,91	39,16	41,12	42,43	44,24	44,24
21	Tingkat pelayanan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang	%	59,77	61,39	62,6	63,87	65,14	66,41	67,69	67,69
22	Persentase Kualitas Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air	%	50,81	52,67	53,45	54,24	55,04	55,83	56,62	56,62
23	Persentase akses aman air aman perkotaan	%	80,98	84,15	86,15	88,15	90,15	92,15	94,15	94,15
24	Persentase panjang jalan provinsi kondisi permukaan dan bangunan pelengkap baik serta persentase panjang jembatan kondisi baik	%	88,92	89,6	90,2	90,8	91,5	92	92,5	92,5
25	Persentase akses aman air aman perdesaan	%	72,8	74,55	76,3	78,05	79,8	81,55	83,3	83,3
26	Persentase jumlah bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung milik daerah	%	9,14	10,15	11,17	12,18	13,2	14,21	15,23	15,23
27	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR	%	68,73	70,12	71,75	73,5	75,25	77	78,75	78,75

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN									
28	Persentase penurunan kawasan kumuh	%	na	na	77,12	71,03	63,97	56,9	49,83	49,83
29	Persentase peningkatan jumlah Rumah Layak Huni	%	na	na	2,9	5,95	15,35	24,76	34,16	34,16
	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT									
30	Persentase masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	%	75	75	80	81	83	86	90	90
31	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	%	75	75	80	81	83	86	90	90
32	Persentase penambahan kapasitas PB di wilayah rawan bencana	%	na	na	10	10	10	10	10	50
33	Persentase penambahan kapasitas relawan TRC/pemangku kepentingan PB	%	na	na	5	5	5	5	5	25
34	persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
35	Persentase kecukupan kebutuhan dasar dan peralatan masyarakat terdampak yang terpenuhi	%	100	100	100	100	100	100	100	100
36	Persentase kab/kota yang kondusif	%	na	na	100	100	100	100	100	100
37	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	3,5	3,5	3,52	3,54	3,56	3,58	3,6	3,6
	SOSIAL									
38	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	%	na	na	0,47	0,95	1,42	1,9	2,37	97,63

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
39	Persentase PSKS yang mendapatkan penguatan yang melaksanakan UKS	%	na	na	8,97	17,93	26,9	35,87	44,83	44,83
	URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR									
	TENAGA KERJA									
40	Persentase pengangguran yang ditangani	%	25,64	20,65	24,05	25,86	27,37	28,15	28,55	28,55
41	Persentase Peningkatan tenaga kerja yang kompeten	%	6,19	6,49	6,89	7,09	7,39	7,89	8,19	8,19
42	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan	%	67,84	68,5	69,04	69,54	70,09	70,47	71,01	71,01
43	Persentase Penyelesaian perselisihan hubungan industrial	%	91,38	92,11	90	92,5	93	95,5	96	96
44	Persentase penurunan pelanggaran norma ketenagakerjaan	%	98,25	97,56	94,86	92,09	89,26	86,21	82,97	82,97
45	Tingkat produktivitas tenaga kerja di Jawa Tengah (Rp/Juta)	%	52,01	54,57	54,58	54,59	54,6	54,61	54,62	54,62
46	Persentase peningkatan penyerapan tenaga kerja baru disektor Informal	%	50	53	56	59	62	65	68	68
47	Persentase pekerja/buruh yang menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan	%	86,48	86,96	87,11	87,26	87,41	87,56	87,7	87,7
	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK									
48	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Angka	75,1	na	75,12	75,14	75,16	75,18	75,2	75,2
49	Persentase Kab/Kota Menuju Layak Anak	%	60	82,86	82,86	85,71	88,57	91,43	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
50	Rasio kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	8,51	8,44	8,37	8,29	8,22	8,15	8,07	8,07
51	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR)	Angka	2,3	0	2,26	2,24	2,22	2,2	2,18	2,18
52	Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja	%	33,13	0	34,18	34,21	34,24	34,27	34,3	34,3
53	Persentase kabupaten/kota yang menerapkan kebijakan afirmatif pemenuhan hak anak	%	20	22,86	22,86	25,71	28,57	31,43	34,29	34,29
54	Rasio kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Per 100.000	7,24	8,2	8,16	8,13	8,09	8,05	8,02	8,02
	PANGAN									
55	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Angka	86,41	87,3	87,36	87,72	88,08	88,44	88,8	88,8
56	PPH Ketersediaan	Angka	85,3	85,3	82,5	82,75	83	83,25	83,5	83,5
57	Angka Kecukupan Gizi (Angka Konsumsi Energi)	kcal/kapita/hari	2.149,50	2.090,17	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
58	Angka Kecukupan Energi (Angka Konsumsi Protein)	Gram/kapita/hari	61,3	63,7	57	57	57	57	57	57
	PERTANAHAN									
59	Persentase penyediaan tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	LINGKUNGAN HIDUP									
60	Indeks Kualitas Air	%	48,17	48,47	48,77	49,17	49,47	49,77	50,07	50,07
61	Indeks Kualitas udara	%	83,91	84,21	84,51	84,71	84,91	85,01	85,11	85,11
62	Indeks Pencemaran Air	%	3,46	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45	3,45
63	Indeks Pencemar SO2 dan NO2	%	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	ADIMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL									
64	Cakupan masyarakat yang terlayani administrasi kependudukan	%	100	100	100	100	100	100	100	100
	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA									
65	Persentase Peningkatan Desa Mandiri	%	na	na	12,99	16,3	17,86	18,25	20,35	20,35
	PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB									
66	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR	Angka	76,89	74,69	75	75,1	75,25	75,5	76	76
67	Persentase Keluarga Pra Sejahtera	%	22,14	22,14	21,64	21,14	20,64	20,14	19,64	19,64
	PERHUBUNGAN									
68	Persentase layanan jaringan distribusi transportasi	%	29,84	30,34	34,75	42,12	49,08	54,46	60,38	60,38
69	Persentase pemenuhan fasilitas keselamatan transportasi	%	5,92	6,08	8,69	21,22	31,36	41,82	51,45	51,45
70	Persentase operasional angkutan umum aglomerasi yang nyaman dan handal	%	26,67	26,67	33,33	40	46,67	53,33	66,67	66,67
	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
71	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE.	Angka	2,69	2,69	2,82	2,94	3,06	3,18	3,3	3,3
72	Indeks Domain Tata Kelola SPBE.	Angka	2,3	2,3	2,4	2,51	2,61	2,71	2,82	2,82
73	Indeks Domain Layanan SPBE.	Angka	2,93	2,93	3,06	3,2	3,33	3,46	3,6	3,6

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KOPERASI DAN UKM									
74	Persentase pertumbuhan omzet Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	13,79	16,68	18,78	21,08	23,68	26,58	29,68	29,68
75	Persentase pertumbuhan tenaga kerja Koperasi dan UKM Jawa Tengah	%	16	18,22	20,5	22,8	25,3	27,7	29,95	29,95
	PENANAMAN MODAL									
76	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	87,64	84,65	90	90	90	90	90	90
77	Persentase Realisasi PMA dan PMDN	%	124	126	100	100	100	100	100	100
	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA									
78	Indeks Pembangunan Pemuda	%	50,17	50,17	50,2	50,25	50,28	50,3	50,35	50,35
79	Indeks Pembangunan Keolahragaan	%	0,55	0,55	0,58	0,6	0,61	0,63	0,65	0,65
	STATISTIK									
80	Laju Pemanfaatan Data Sektoral.	%	na	8,21	15,18	30,36	45,54	60,72	75,9	75,9
	PERSANDIAN									
81	Indeks Kematangan Keamanan Informasi (KAMI).	Angka	na	1	1	1	2	2	3	3
	KEBUDAYAAN									
82	Persentase Jenis seni budaya yang terlayani	%	2,84	3,15	3,5	4,7	5,9	6,2	6,82	6,82
	PERPUSTAKAAN									
83	Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan	%	na	na	24	48	64	79	100	100
	KEARSIPAN									
84	Persentase Sistem Pengelolaan Kearsipan yang terintegrasi	%	na	na	21	43	64	85	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	URUSAN PILIHAN									
	KELAUTAN DAN PERIKANAN									
85	Produksi Perikanan	Ton	923.626,34	956.601,65	857.758,41	900.646	945.678,64	992.962,58	1.042.610,71	1.042.610,71
86	Angka Konsumsi Ikan	kg/kapita/tahun	29,19	30,65	30,5	31,27	32,05	32,85	33,67	33,67
	PARIWISATA									
87	Kontribusi PDRB Bidang Pariwisata	%	3,13	3,15	3,17	3,19	3,21	3,23	3,25	3,25
	PERTANIAN									
88	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (padi)	Ton	11.396.629	11.401.629	11.543.015	11.629.588	11.716.810	11.804.686	11.893.221	58.587.320
89	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (jagung)	Ton	3.577.507	3.688.477	3.660.360	3.675.002	3.689.702	3.704.460	3.719.278	18.448.802
90	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (kedelai)	Ton	105.553	130.525	102.726	104.940	107.201	109.512	111.872	536.251
91	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (cabe besar)	Ton	195.571	197.266	200.836	209.232	217.628	226.024	234.420	1.088.141
92	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (bawang merah)	Ton	476.337	507.268	528.537	550.276	572.016	593.756	615.495	2.860.080

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
93	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (tebu)	Ton	2.904.903	2.638.785	2.934.025	2.948.695	2.963.438	2.978.255	2.993.147	14.817.560
94	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (kelapa)	Ton	158.302	158.299	164.248	165.069	165.895	166.724	167.558	829.495
95	Kontribusi sub sektor pertanian dan perkebunan komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan (kopi)	Ton	15.097	17.456	20.482	21.019	21.556	22.093	22.629	107.780
96	Jumlah Produksi Daging	Kg	332.527.494	359.988.398	315.873.883	325.436.369	340.041.606	355.690.105	375.382.386	375.382.386
97	Jumlah Produksi Susu	Kg	99.606.547	101.511.053	101.460.171	101.561.631	101.663.192	101.764.855	101.866.620	101.866.620
98	Jumlah Produksi Telur	Kg	301.941.582	312.420.004	310.234.990	315.144.165	315.686.596	320.610.319	325.083.370	325.083.370
	KEHUTANAN									
99	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	%	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76
100	Kontribusi subsektor Kehutanan terhadap PDRB	%	0,45	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
101	Luas Tutupan Lahan (LTV)	km2	16.555,86	16.555,86	16.555,86	16.555,86	16.555,86	16.555,86	16.555,86	16.555,86
102	Pertumbuhan PDRB Subsektor Kehutanan	%	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47	0,47
	ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL									
103	Persentase Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi	%	61,58	64,23	65	65,5	66	66,5	67	67
104	Indeks ketersediaan air tanah	Angka	3,42	3,06	3,05	3,03	3,02	3	2,99	2,99
105	Rasio ketersediaan daya listrik	Angka	1,18	1,12	1	1	1	1	1	1

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
106	Persentase pemanfaatan energi baru terbarukan dalam bauran energi	%	9,56	10,8	11,1	11,6	12,94	14,85	15,96	15,96
	PERDAGANGAN									
107	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan	%	6,1	5,22	6,98	7,32	7,76	8,2	8,64	8,64
	PERINDUSTRIAN									
108	Persentase Laju Pertumbuhan Sektor Industri	%	4,35	4,61	4,85	5,1	5,35	5,65	5,85	5,85
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
	PERENCANAAN									
109	Persentase perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang berkualitas	%	na	na	90	90	90	90	90	90
110	Persentase Konsistensi , keselarasan dan ketercapaian sasaran perencanaan pembangunan daerah	%	na	na	90	90	90	90	90	90
	KEUANGAN		na	na						
111	Persentase peningkatan pajak daerah	%	na	na	8,05	10,77	9,25	8,82	8,59	8,59
112	Persentase peningkatan penerimaan Retribusi dan Pendapatan lain	%	na	na	11,35	1,73	3,3	5,24	10,37	10,37
113	Persentase pemanfaatan aset	%	na	60	62,5	65	67,5	70	72,5	72,5
114	Persentase Tata Kelola Keuangan Pemda yang sesuai kaidah perundangan	%	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									
115	Persentase distribusi penempatan PNS dalam Jabatan	%	na	100	100	100	100	100	100	100
116	Persentase Pengembangan layanan kepegawaian yang cepat dan terintegrasi	%	na	100	100	100	100	100	100	100
117	Persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi	%	na	35	35,01	35,03	35,05	35,06	35,08	35,08
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									
118	Persentase hasil kelitbang iptekin yang sesuai dengan program perencanaan pembangunan daerah	%	na	na	90	90	90	90	90	90
	PENGAWASAN									
119	Level 3 penuh Kapabilitas APIP	Nilai	3	3	3	3	3	3	3	3
120	Nilai 3,5 Maturitas SPIP	Nilai	3,02	3,02	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,5
	FUNGSI LAINNYA									
121	Persentase Kebijakan yang Efektif	%	na	na	80	81	82	83	84	84
122	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah	%	na	na	80	81	82	83	84	84
123	Persentase Peningkatan Kualitas Pelayanan Umum di Setda	%	na	na	75	76	77	78	79	80
124	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	%	na	na	82	82	83	84	85	85
125	Indeks Kepuasan Atas Kualitas Layanan Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Provinsi Jawa Tengah.	%	na	na	71	72	73	74	75	75

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
126	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Pengendalian Administrasi Pembangunan Daerah, Wilayah, Pelaporan dan Analisis yang terealisasi	%	na	na	85	85	85	85	85	85
127	Prosentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Pemerintahan yang terealisasi	%	na	na	85	85	85	85	85	85
128	Persentase kerjasama dalam negeri dan luar negeri yang efektif	%	na	na	70	75	80	85	90	90
129	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat yang direalisasikan	%	na	na	85	85	85	85	85	85
130	Persentase rekomendasi kebijakan bidang Perekonomian yang terealisasi	%	na	na	80	85	90	93	96	96
131	Persentase usulan rekomendasi kebijakan bidang hukum yang terealisasi	%	na	na	90	91	92	93	94	94
132	Efektivitas Pelaksanaan APBD Provinsi Jawa Tengah	%	na	na	80	82	83	84	85	85
133	Persentase ketercapaian pelaksanaan kegiatan bantuan pembangunan di Kabupaten/Kota	%	na	na	80	82	83	84	85	85
134	Efektivitas Pelaporan Pelaksanaan APBD dan Bantuan Keuangan	%	na	na	80	81	82	83	84	84
135	Persentase efektivitas rekomendasi hasil kajian produk hukum daerah kabupaten/kota	%	na	na	90	91	92	93	94	94
136	peningkatan persentase produk hukum daerah yang diinformasikan	%	na	na	90	91	92	93	94	94

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
137	Persentase efektivitas implementasi kebijakan bidang hukum	%	na	na	90	91	92	93	94	94
138	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Skor	na	na	19	22	25	28	31	31
139	presentase UPP yang memperoleh nilai IKM baik	%	na	na	52,1	64,32	76,48	88,64	100	100
140	Persentase pemenuhan sasaran dan area perubahan RB yang nilainya telah mencapai B	%	70	73	73	78	82	87	92	92
141	Persentase kabupaten/ kota yang meningkat indeks RB nya	%	11	11,4	25	40	54	70	85	85
142	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam	%	na	na	80	84	88	92	96	96
143	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Kesejahteraan Rakyat	%	na	na	85	85	85	85	85	85
144	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan Strategis Bidang Perekonomian	%	na	na	85	89	90	93	95	95
145	Efektivitas Pelayanan Pengadaan Barang/ Jasa	%	na	na	60	63	65	67	70	70
146	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perencanaan, Penganggaran, Keuangan, dan Aset yang dievaluasi	%	na	na	85	85	85	85	85	85

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
147	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang dievaluasi	%	na	na	80	84	88	92	96	96
148	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Umum yang dievaluasi pelaksanaan fungsinya	%	na	na	100	100	100	100	100	100
149	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dievaluasi	%	na	na	85	85	85	85	85	85
150	Persentase Capaian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian yang dievaluasi	%	na	na	100	100	100	100	100	100
151	Persentase efektifitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan Kab/Kota	%	na	na	100	100	100	100	100	100
152	Persentase tertib pelaksanaan otonomi daerah melalui evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan kapasitas daerah, serta administrasi kepala daerah dan DPRD	%	na	na	100	100	100	100	100	100
153	Persentase Keberhasilan Pelaksanaan pelayanan umum, keprotokolan dan Kehumasan	%	na	na	75	76	77	78	79	80
154	Persentase Hasil Rekomendasi Kebijakan Bidang Infrastruktur dan Sumber Daya Alam yang terealisasi	%	na	na	81	87	92	93	94	94

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPJMD (2017/2018)		Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
C	Aspek Daya Saing									
1	Persentase penurunan konflik SARA	%	17,64	na	15	15	15	15	15	15
2	Indeks Toleransi	Angka	73,9	0	74,4	74,48	75,3	75,9	76,6	76,6
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	76,53	74,49	75,5	77	78	79	80	80
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Angka	78,48	81,36	80	82	84	86	88	88
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Angka	2,54	2,64	2,76	2,88	3	3,12	3,24	3,24
6	Nilai SAKIP	Angka	75,94	80,18	80	82	83	84	85	85
7	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Angka	3,66	3,43	3,45	3,47	3,48	3,49	3,5	3,5
8	Nilai Kematangan Organisasi Daerah	Angka	na	na	17	20	23	26	29	29
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	66,33	66,51	66,69	66,87	67,02	67,14	67,26	67,26
10	Indeks Kualitas Air	Angka	48,17	48,47	48,77	49,17	49,47	49,77	50,07	50,07
11	Indeks Kualitas Udara	Angka	83,91	84,21	84,51	84,71	84,91	85,01	85,11	85,11
12	Indeks Tutupan Lahan	Angka	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76	66,76
13	Persentase tindak pidana yang tertangani	%	74,3	na	80	83	85	87	90	90
14	Opini BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
15	Indeks Sistem Merit	Angka	na	0,66	0,67	0,68	0,69	0,7	0,71	0,71
16	Indeks Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	Angka	3,5	na	3,52	3,54	3,56	3,58	3,6	3,6

BAB X

PENUTUP

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 merupakan penjabaran tahapan ketiga dan keempat RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 untuk terwujudnya Jawa Tengah Yang Mandiri, Maju, Sejahtera dan Lestari, serta menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam mengimplementasikan serangkaian program/kegiatan jangka menengah yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah. Dokumen RPJMD ini juga menjadi panduan bagi kabupaten/kota untuk menyusun perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan dunia usaha maupun masyarakat dalam ikut serta bersama membangun Jawa Tengah.

Perencanaan pembangunan yang dituangkan dalam dokumen RPJMD ini dapat diwujudkan dengan baik dengan didukung komitmen yang tinggi para penyelenggara pemerintahan dalam melaksanakan program dan kegiatan, peran serta para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan, kondusivitas nasional dan global yang menjamin stabilitas ekonomi dan pembangunan, kemampuan adaptasi terhadap situasi disruptif dan peran serta masyarakat.

Dalam rangka menjamin pelaksanaan RPJMD diperlukan penjabaran secara teknis dalam rencana strategis perangkat daerah yang disusun dan ditetapkan dengan periodisasi yang bersamaan dengan RPJMD 2018-2023. Adapun pelaksanaan tahunan dilakukan 5 (lima) tahapan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) secara sinergi dan berkesinambungan.

Selanjutnya, pada saat RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023–2028 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama di bawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 - 2025 dan mengacu RPJMN Tahun 2019- 2024.

Semangat gotong-royong seluruh pemangku kepentingan di Jawa Tengah terus dikembangkan dalam rangka mewujudkan visi “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, *Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi*”. Pada akhirnya masyarakat akan semakin sejahtera dan pembangunan Jawa Tengah akan memberikan sumbangan penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan nasional.

GUBERNUR JAWA TENGAH

GANJAR PRANOWO